PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2024
TANGGAL 08 JULI 2024 M
01 MUHARRAM 1446 H

RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH

PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN INVESTASI

PERDAGANGAN DAN JASA

PARIWISATA SERTA PERIKANAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah ...

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9).

M E M U T U S K A N ..

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.

BAB II
RKPD
Pasal 2

(1) RKPD Kota Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota untuk Periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

(1) RKPD Kota Tahun 2025 memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi Kota Banda Aceh;
    b. prioritas pembangunan Kota Banda Aceh; dan
    c. rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
    a. pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja OPD Tahun 2025; dan
    b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Juli 2024 M
01 Muharam 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Juli 2024 M
01 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR .....

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR X
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 1
2.1.1.2 Topografi 2
2.1.1.3 Geomorfologi 3
2.1.1.4 Geologi 4
2.1.1.5 Hidrologi 4
2.1.1.6 Klimatologi 5
2.1.1.7 Penggunaan Lahan 6
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 8
2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 13
2.1.1.10 Demografi 16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi 18
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 27
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 34
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 36
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan 36
2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar 49
2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 92
2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan 147
2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan 157
2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah 158
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 161
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 161
2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi 163
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 173
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 186
2.3 Permasalahan Pembangunan 257
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 257

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 259
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 259
B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 261
C. Urusan Pelayanan Pilihan 263
D. Penunjang Urusan 264
E. Otonomi Daerah 268
F. Urusan Keistimewaan 268
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs 268
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Aceh 2
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh 4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11
3.2.1 Pendapatan Daerah 12
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 17
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 22
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2 Permasalahan dan Isu Strategis 5
4.3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU 6
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 19
4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 20
4.6 Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 22
4.7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 26
4.8 Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 78
4.9 Konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 95
4.10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 102
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2023 1
6.2 Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2023 2
6.3 Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh 15
6.4 Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 16
6.5 Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Kota Banda Aceh 25
BAB VII PENUTUP 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh 1
Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh 5
Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023 6
Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2023 7
Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh..... 8
Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 10
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2023 16
Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 17
Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta) 19
Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta) 20
Tabel 2. 11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) 21
Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 21
Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023 27
Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 31
Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 32
Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023 33
Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 34
Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 35
Tabel 2. 19 Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an Kota Banda Aceh, 2019-2023 36
Tabel 2. 20 Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi Kota Banda Aceh, 2019-2023 37
Tabel 2. 21 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 38
Tabel 2. 22 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksessibilitas Tahun 2019-2023..... 39
Tabel 2. 23 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MT yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 39
Tabel 2. 24 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2019-2023 40
Tabel 2. 25 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023..... 41
Tabel 2. 26 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 42
Tabel 2. 27 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2019-202343

Tabel 2. 28 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (jiwa) 43
Tabel 2. 29 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ 44
Tabel 2. 30 Keputusan Keulamaan 45
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 51
Tabel 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 52
Tabel 2. 33 Capaian Raport pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 54
Tabel 2. 34 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (Dalam Persen) 55
Tabel 2. 35 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 56
Tabel 2. 36 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 58
Tabel 2. 37 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 59
Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 59
Tabel 2. 39 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 60
Tabel 2. 40 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 63
Tabel 2. 41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 65
Tabel 2. 42 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Orang) 66
Tabel 2. 43 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023 68
Tabel 2. 44 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023 69
Tabel 2. 45 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2018-202271
Tabel 2. 46 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase 72
Tabel 2. 47 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 72
Tabel 2. 48 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 74
Tabel 2. 49 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2019-2023 75
Tabel 2. 50 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 79
Tabel 2. 51 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen) 80
Tabel 2. 52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 81
Tabel 2. 53 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Ha) 82
Tabel 2. 54 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 83

Tabel 2. 55 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya 84
Tabel 2. 56 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 84
Tabel 2. 57 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen) 85
Tabel 2. 58 Jumlah Pelanggaran K3 Dan Cara Penyelesaiannya 85
Tabel 2. 59 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023..... 86
Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 87
Tabel 2. 61 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan 87
Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023 88
Tabel 2. 63 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 88
Tabel 2. 64 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 90
Tabel 2. 65 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 91
Tabel 2. 66 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 92
Tabel 2. 67 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Orang)..... 92
Tabel 2. 68 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 93
Tabel 2. 69 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 94
Tabel 2. 70 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 95
Tabel 2. 71 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 95
Tabel 2. 72 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 96
Tabel 2. 73 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 97
Tabel 2. 74 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023..... 100
Tabel 2. 75 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023 101
Tabel 2. 76 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 101
Tabel 2. 77 Rincian Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DLHK3 Tahun 2023..... 102
Tabel 2. 78 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2023 .. 102
Tabel 2. 79 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2023 103
Tabel 2. 80 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 104
Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Air Kota Banda Aceh Tahun 2019..... 105
Tabel 2. 82 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2023 106

Tabel 2. 83 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2018-2023 107
Tabel 2. 84 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2022 107
Tabel 2. 85 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 108
Tabel 2. 86 Capaian Luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 110
Tabel 2. 87 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 111
Tabel 2. 88 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 . 112
Tabel 2. 89 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 113
Tabel 2. 90 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 114
Tabel 2. 91 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 115
Tabel 2. 92 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 117
Tabel 2. 93 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 119
Tabel 2. 94 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 121
Tabel 2. 95 PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 122
Tabel 2. 96 Jumlah Posyandu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 122
Tabel 2. 97 Strata Posyandu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 123
Tabel 2. 98 Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 123
Tabel 2. 99 Mukim Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2023 124
Tabel 2. 100 Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 126
Tabel 2. 101 Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2019-2023... 127
Tabel 2. 102 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 128
Tabel 2. 103 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2023 129
Tabel 2. 104 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong Tahun 2019-2023 129
Tabel 2. 105 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 130
Tabel 2. 106 Data BUMG Kota Banda Aceh tahun 2019 - 2023 131
Tabel 2. 107 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023131
Tabel 2. 108 Ratio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 132
Tabel 2. 109 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 133
Tabel 2. 110 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 134
Tabel 2. 111 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 134
Tabel 2. 112 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2023 135
Tabel 2. 113 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 135
Tabel 2. 114 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 136

Tabel 2. 115 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2023 137
Tabel 2. 116 Presentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023... 138
Tabel 2. 117 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2023 139
Tabel 2. 118 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 140
Tabel 2. 119 Perkembangan jumlah BPR/ LKM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023... 141
Tabel 2. 120 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 141
Tabel 2. 121 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2023 143
Tabel 2. 122 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 143
Tabel 2. 123 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 144
Tabel 2. 124 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2023 145
Tabel 2. 125 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023..... 146
Tabel 2. 126 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2023 150
Tabel 2. 127 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 . 151
Tabel 2. 128 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 152
Tabel 2. 129 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023 153
Tabel 2. 130 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 154
Tabel 2. 131 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022) 155
Tabel 2. 132 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (Dalam Ton) 156
Tabel 2. 133 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 157
Tabel 2. 134 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2019-2023..... 157
Tabel 2. 135 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 158
Tabel 2. 136 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 158
Tabel 2. 137 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 159
Tabel 2. 138 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 160
Tabel 2. 139 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ 160
Tabel 2. 140 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 161
Tabel 2. 141 Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 162

Tabel 2. 142 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 163
Tabel 2. 143 Prestasi yang telah diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh 166
Tabel 2. 144 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2023..... 170
Tabel 2. 145 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 - 2023(yoy) 171
Tabel 2. 146 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020 - 2023 173
Tabel 2. 147 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 173
Tabel 2. 148 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2023 175
Tabel 2. 149 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 176
Tabel 2. 150 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 177
Tabel 2. 151 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 178
Tabel 2. 152 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 178
Tabel 2. 153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023..... 179
Tabel 2. 154 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023..... 181
Tabel 2. 155 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 183
Tabel 2. 156 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 183
Tabel 2. 157 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 184
Tabel 2. 158 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 184
Tabel 2. 159 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 per Dinas 187
Tabel 2. 160 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 258
Tabel 2. 161 Daftar Aset produktif belum optimal 265
Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 5
Tabel 3. 2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2022-2023 7
Tabel 3. 3 PDRB Perkapita (ADHB) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 7
Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021-2023 8
Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2019-2023 9
Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2019-2023 10
Tabel 3. 7 Target Ekonomi Makro Kota Banda Aceh Tahun 2025 11
Tabel 3. 8 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2024 14

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2026 20
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 s.d Tahun 2026 23
Tabel 4. 1 Visi dan Misi RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 . 2
Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 2
Tabel 4. 3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 .. 7
Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 19
Tabel 4. 5 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 20
Tabel 4. 6 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025..... 22
Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh 26
Tabel 4. 8 Intervensi Mendukung 8 (delapan) P-BNA..... 37
Tabel 4. 9 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 70
Tabel 4. 10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 79
Tabel 4. 11 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 95
Tabel 4. 12 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2025..... 102
Tabel 4. 13 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 111
Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 1
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2
Tabel 6. 3 Penghargaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022/2023 16
Tabel 6. 4 Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir di Kota Banda Aceh..... 18
Tabel 6. 5 Daftar Inovasi Kota Banda Aceh 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumen RPJPN 2025-2045, RKPA 2025 dan RPD 2
Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024 3
Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 7
Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh 1
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh 2
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh 3
Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh 4
Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh 5
Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh 7
Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 9
Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh 11
Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh 12
Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh.. 13
Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh 14
Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh 14
Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh..... 15
Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh 15
Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2011-2023 16
Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 18
Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 22
Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2019-2023 23
Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 23
Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 25
Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023. 26
Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 27
Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023 28
Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 29
Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 30
Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023..... 31
Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2019 – 2023 32

Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023 33
Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 34
Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 49
Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019–2023 50
Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 52
Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023 53
Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023..... 54
Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2019-2023 56
Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023 .. 57
Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 58
Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 61
Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2023 Kota Banda Aceh 62
Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2023 63
Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2019-2023 64
Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023..... 66
Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2019-2023 67
Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 69
Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023..... 72
Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2019 - 2023 73
Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh..... 74
Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy 76
Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029..... 77
Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 ... 78
Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 79
Gambar 2. 52 Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023 99
Gambar 2. 53 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2019-2023 106
Gambar 2. 54 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2019-2023 110
Gambar 2. 55 RTH Ramah Anak Hutan Kota Tibang..... 111
Gambar 2. 56 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023... 112
Gambar 2. 57 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 133
Gambar 2. 58 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023..... 140
Gambar 2. 59 Rangkuman Data Statistik Kepariwisataan Kota BandaAceh Tahun 2023 148

Gambar 2. 60 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 149

Gambar 2. 61 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Ton) 156

Gambar 2. 62 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 (25 Januari 2024) 169

Gambar 6. 1 Salah Satu Layout Kawasan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh 19

Gambar 6. 2 Perangkat Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir pada Kawasan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh 20

Gambar 6. 3 Peresmian Kawasan Parkir Elektronik dengan Sistem Pembayaran Parkir secara Non Tunai 20

Gambar 6. 4 Kartu Uang Elektronik yang Dapat Digunakan Pada Pembayaran Parkir Non Tunai 20

Gambar 6. 5 Juru Parkir menunjukkan Barcode QRIS pada ID Card Juru Parkir 21

Gambar 6. 6 Edukasi dan Penyuluhan Kepada Juru Parkir dan Masyarakat terkait Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir 22

Gambar 6. 7 Tampilan aplikasi jaga Parkir 23

Gambar 6. 8 Rapat Persiapan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia secara sistematis dan terintegrasi, yaitu keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan telah habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan untuk menyusun RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang lebih lanjut untuk Kota Banda Aceh disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
2) Penyusunan Rancangan RKPD;
3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
4) Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang RKPD.

Di samping itu, penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

1. Pendekatan teknokratis yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan
2. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan *(stakeholders)* antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari gampong, kecamatan, kota, provinsi dan nasional.
5. Proses *top-down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini, penetapan program dan kegiatan prioritas juga mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu *"Money Follow Program".* Di samping pelaksanaan Musrenbang berjenjang mulai dari Musrenbang Gampong, Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota, Kota Banda Aceh juga melakukan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Kota Banda Aceh. Forum ini juga yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang mana merupakan dasar penyusunan APBK Banda Aceh.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik dan terintegrasi, seluruh dokumen perencanaan harus saling mendukung pencapaian kinerja satu sama lain. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan program tahunan. RKPD berisi Rencana Kerja (Renja) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Atas dasar ini, maka masing-masing SKPD/OPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPA Tahun 2023-2026, dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Gambar 1. 1 Dokumen RPJPN 2025-2045, RKPA 2025 dan RPD Kota Banda Aceh 2023-2026

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengikuti perkembangan capaian pembangunan Kota Banda Aceh tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2023 tercatat sebesar 5,06 persen menurun 0,17 poin dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,23 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 2,04 poin dari 86,28 tahun 2022 menjadi 88,32 pada tahun 2023. Sementara itu, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 7,13 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen menjadi 7,04 tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan sebesar 0,59 poin dari 8,62 persen tahun 2022 menjadi 8,03 persen tahun 2023. Gini ratio mengalami penurunan sebesar 0,061 poin dari 0,391 tahun 2022 menjadi 0,330 tahun 2023. Dari beberapa capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif, namun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras agar terjadi kenaikan dalam pencapaian pembangunan Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tahun ini merupakan tahun pertama proses penerapan aplikasi SIPD RI Kemendagri dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024

Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran di daerah yang terintegrasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);
32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
33. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
35. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
38. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16);
39. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
40. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

41. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 berpegang pada dokumen perencanaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, yaitu: RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2025; RPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2025; serta RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Untuk mengetahui secara rinci tentang hubungan antar dokumen dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini:

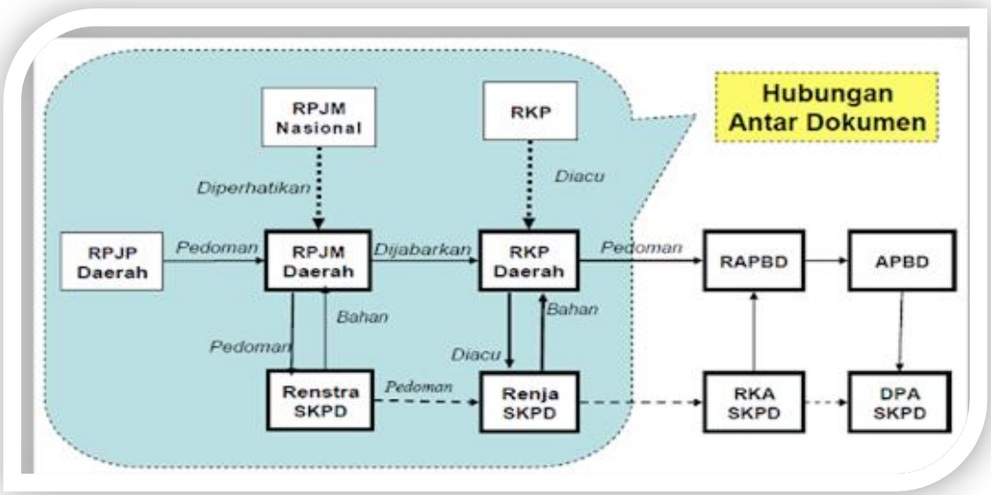

Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan berdasrakan ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang bersangkutan. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang selanjutnya disahkan menjadi APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan konsistensi, integrasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Banda Aceh untuk tahun 2025.

Tujuan penyusunan RKPD Kota Banda Aceh 2025 adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2025;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi tahun 2023, perkiraan tahun 2024 dan tantangan serta prospek perekonomian tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah. Aspek-aspek tersebut juga akan digunakan untuk menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh di dalam dokumen RKPD 2025. Berikut merupakan gambar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan Kota Banda Aceh.

Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km^2 atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km^2. Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km^2)	Persentase	(Km^2)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		**61,360**	**100,00**	**59,002**	**100,00**

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini

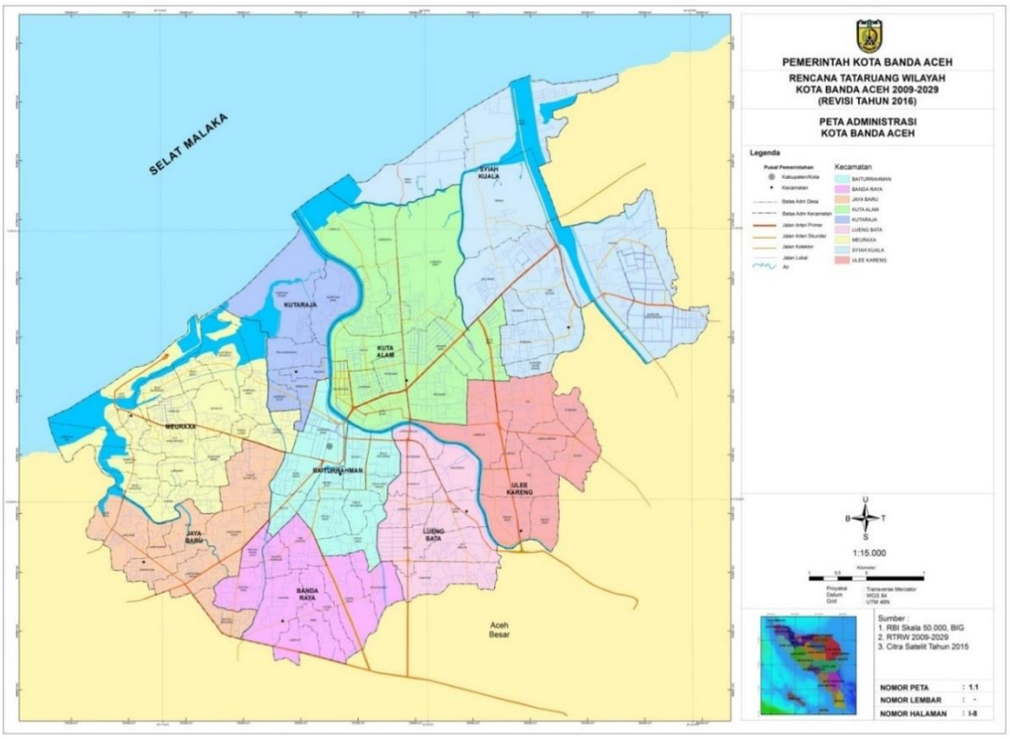

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Selat Malaka
Sebelah Timur	:	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	:	Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah

permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.

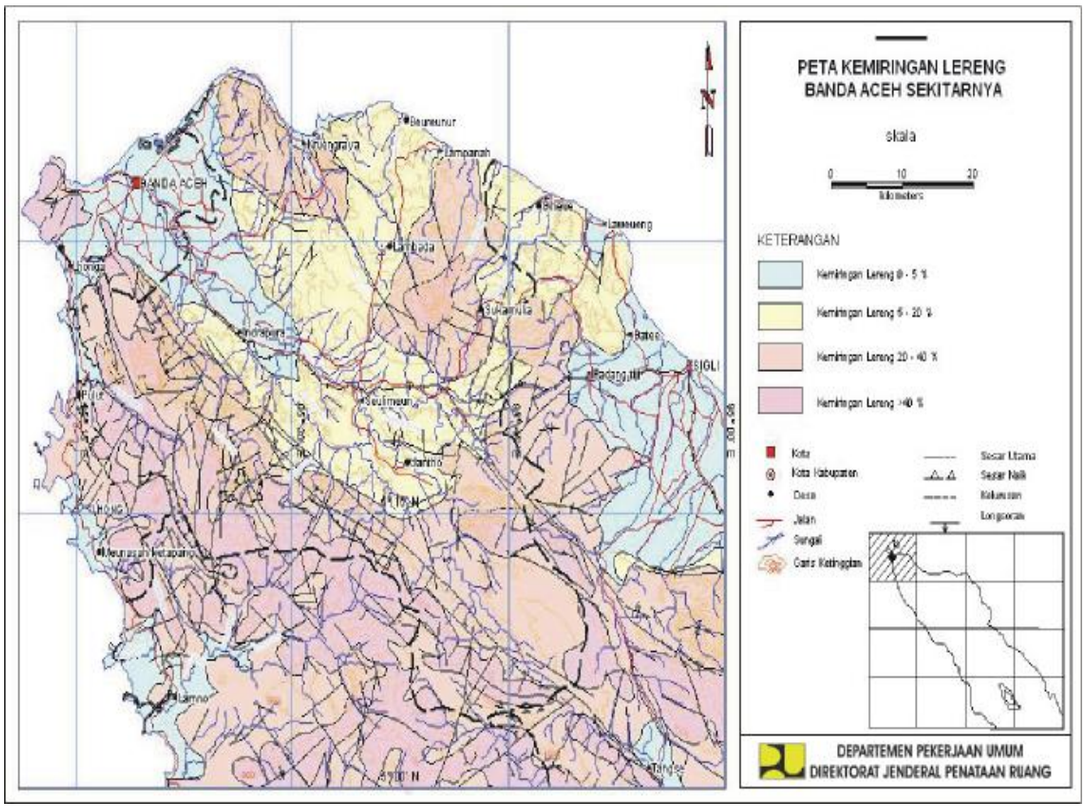

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ±130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Alluvium
2. Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
3. Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
4. Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.

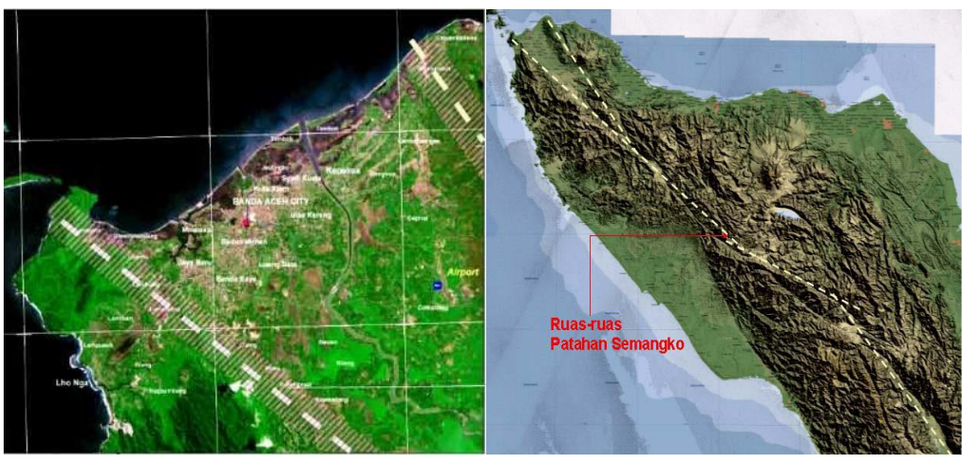

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng danKecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	**723,60**
2	Krueng Daroy	**3,60**
3	Krueng Doy	**2,00**
4	Krueng Neng	**4,10**
5	Krueng Lueng Paga	**26,33**
6	Krueng Tanjong	**2,25**
7	Krueng Titi Panjang	**1,60**
8	Krueng Kon Keumeh	**3,27**
9	Krueng Geunasen	**1,25**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai yang terpanjang alirannya, yaitu 723,69 Km, sedangkan Krueng Geunasen merupakan sungai yang terpendek alirannya, yaitu hanya sepanjang 1,25 Km. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat disepanjang aliran sungai hulu dan hilir yang dapat menggangu lancarnya aliran sungai khususnya pada saat hujan.

Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Banda Aceh pada Gambar 2.5 berikut ini:

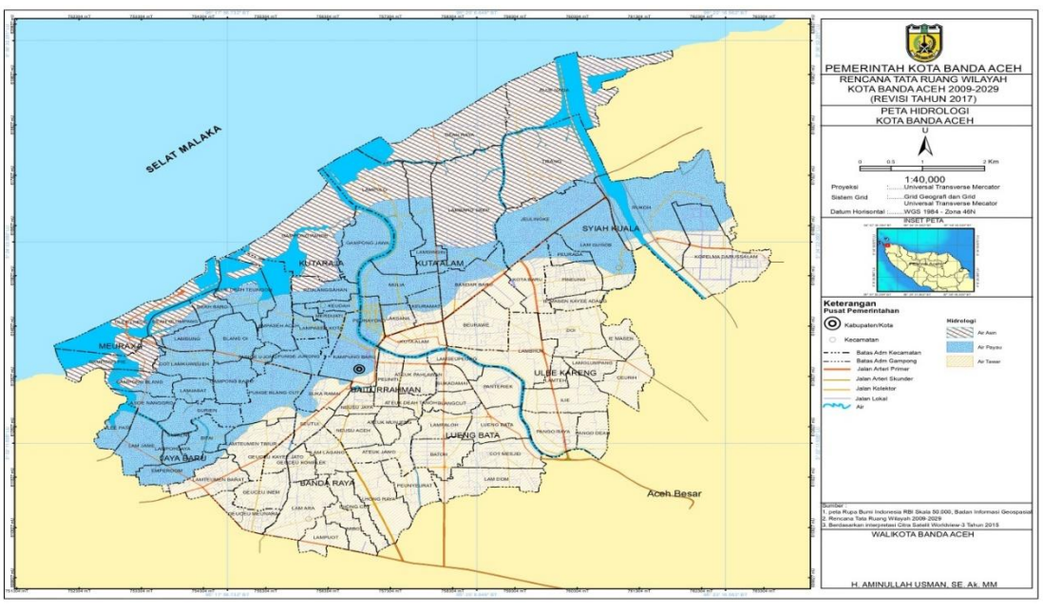

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	603.70	16	26.0	84.10
2	Februari	355.90	17	26.3	82.60
3	Maret	253.60	12	26.8	80.00
4	April	59.80	6	27.8	78.80
5	Mei	64.50	14	28.6	77.20
6	Juni	72.30	9	28.8	69.30
7	Juli	111.60	8	28.8	66.70
8	Agustus	53.70	11	28.2	71.30
9	September	131.60	20	27.5	75.00
10	Oktober	199.60	25	26.8	81.50
11	November	411.90	26	26.6	84.60
12	Desember	217.90	20	26.7	83.60
Jumlah		253.1	184	-	-
Rata-rata		211.3	15	27.4	77.89

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2024

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh terbesar pada Tahun 2023 terjadi pada Bulan Januari yaitu sebesar 603,70 mm dan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan November yang selama 26 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu sebesar 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2023 adalah 27,4^{0}C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77,89%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh darikawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan

olahraga (keberadaan Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya sebagai *sport center)*. Jenis penggunaan lahan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Jenis Penggunaan	Luas Area (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	1.300,10	22,03
2	Perkantoran dan Perdagangan	216,51	3,67
3	Fasilitas Kesehatan	20,81	0,35
4	Fasilitas Pendidikan	66,55	1,13
5	Pariwisata	6,99	0,12
6	Peribadatan	14,25	0,24
7	Olah Raga	11,22	0,19
8	Transportasi	1,41	0,02
9	RTH	216,96	3,68
10	Perairan	690,09	11,69
11	Jalan	385,67	6,54
12	TPA dan IPAL	0,65	0,01
13	Ruang Terbuka	2.969,44	50,32
14	Telekomunikasi	0,34	0,01
Jumlah		**5.900,99**	**100**

Sumber: PUPR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50 persen lahan di Kota Banda Aceh adalah ruang terbuka (2.969,44 Hektar), sedangkan pemukiman dan perairan masing-masing sebesar 22,03% (1.300,10 Hektar) dan 11,69 persen (690,09 Hektar). Penggunaan lahan untuk TPA dan IPA menempati bagian terkecl dari luas Kota Banda Aceh, yaitu seluas 0,65 Hektar (0,01 persen).

Berdasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh 5.900,20 Ha dengan penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun seluas 3.137, 12 Ha atau 53,17 persen dari luas wilayah kota. Dominasi pemanfaatan eksisting lahan terbangun adalah pemanfaatan kawasan perumahan, pemanfaatan peruntukan lainnya, dan pemanfaatan area infrastruktur jalan.

Pemanfaatan lahan eksisting di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada pada Gambar 2.6 berikut ini:

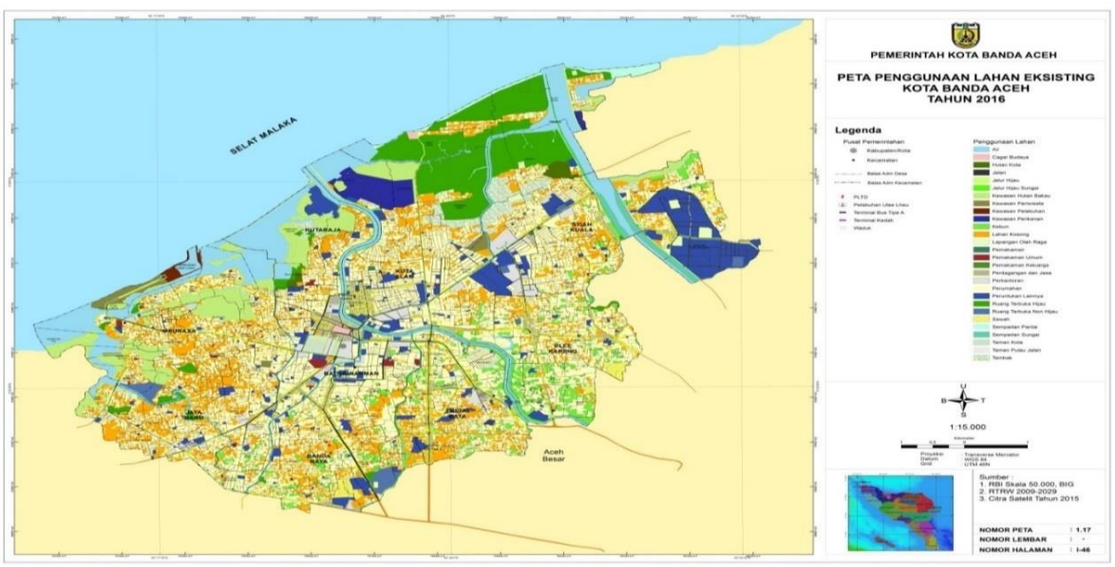

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh

Di samping itu, untuk mengetahui secara rinci penggunaan lahan eksisting-lahan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	573.82	21.00
2	Hutan Kota	19.46	0.71
3	Jalur Hijau Jalan	58.15	2.13
4	Jalur Hijau Sungai	20.55	0.75
5	Kawasan Hutan Bakau	308.84	11.30
6	Kawasan Pariwisata	33.29	1.22
7	Kebun	179.41	6.56
8	Lahan Terbuka Produktif	801.61	29.33
9	Pemakaman	22.85	0.84
10	Ruang Terbuka Hijau	431.31	15.78
11	Sawah	9.57	0.35
12	Sempadan Pantai	37.85	1.38
13	Sempadan Sungai	102.16	3.74
14	Taman Kota	37.06	1.36
15	Taman Pulau Jalan	0.61	0.02
16	Tambak	96.53	3.53
	Total	**2733.08**	**100.00**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area air/sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), sempadan pantai, sempadan sungai, jalur hijau sungai, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, kebun masyarakat, lahan kosong masyarakat, lahan pemakaman, sawah, tambak, hutan bakau dan kawasan wisata. Area yang yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan 2.763,08 Ha atau 46,83 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Area yang belum terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari Tahun 2015, bahwa area tebangun mencapai 53,17 persen dan lahan belum terbangun 46,83 persen dari luas wilayah kota. Hal tersebut menunjukan bahwa kecendrungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersedian ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

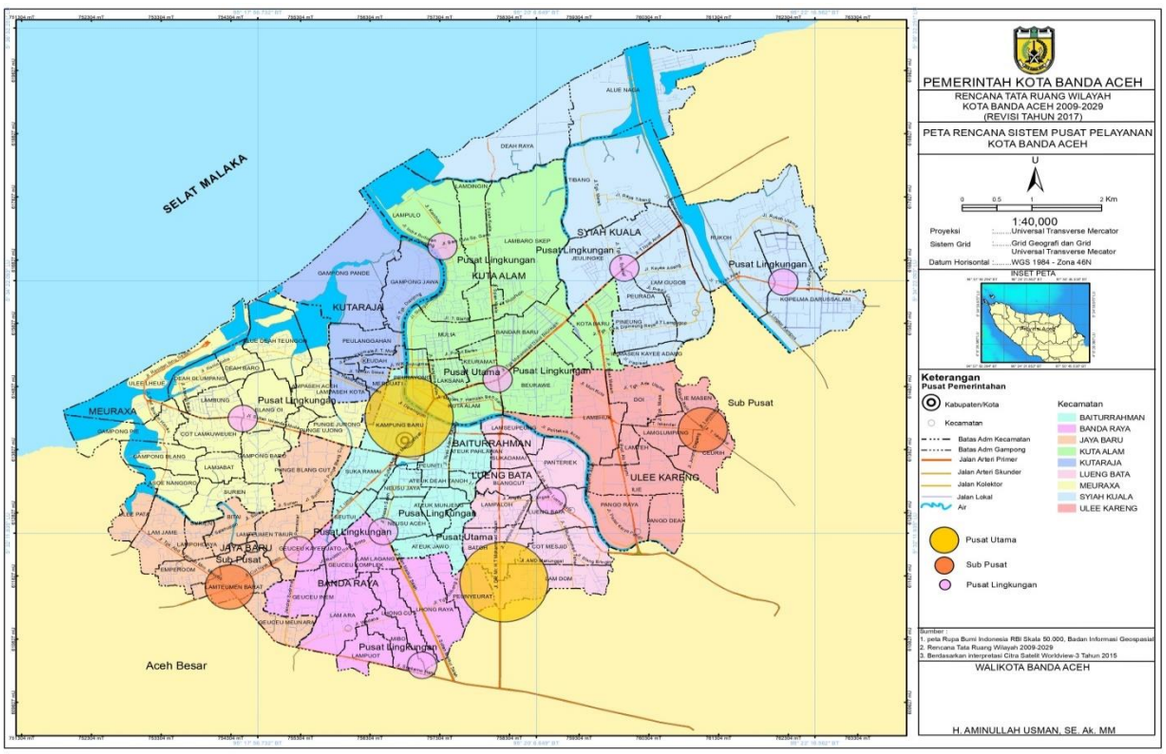

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana pusat–pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.

Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru • Pusat perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Lamtemen	• Perdagangan dan Jasa • Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	• Pelabuhan ikan • Galangan kapal • Industri pengolahan ikan • Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	• Pendidikan • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	• Perdagangan dan jasa • Permukiman • Perikanan • Pelabuhan • Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	• Perkantoran • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi

dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city,* dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini:

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini:

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini :

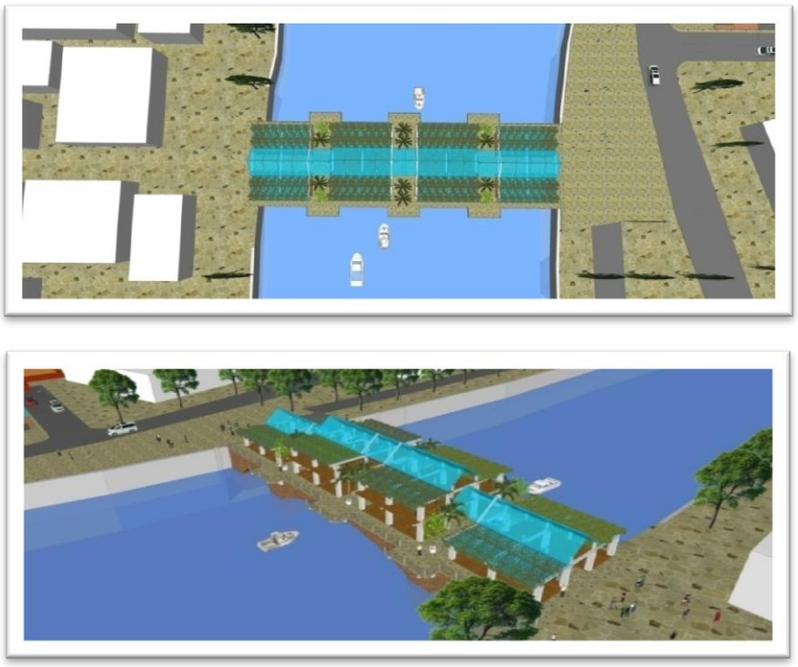

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banda Aceh memiliki indeks resiko bencana dengan skor 127,31. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gempa bumi
3. Rawan bencana tsunami
4. Ancaman kebakaran hutan dan lahan
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
6. Ancaman tanah longsor
7. Ancaman kekeringan
8. Rawan bencana cuaca ekstrem

Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.11 sampai dengan 2.14 di bawah ini:

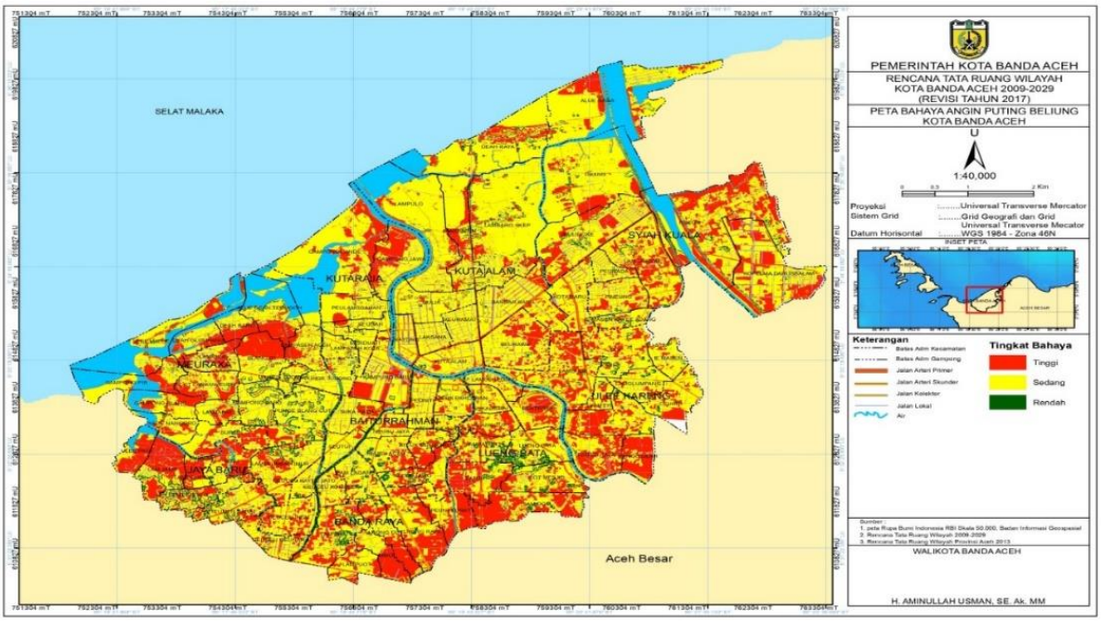

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

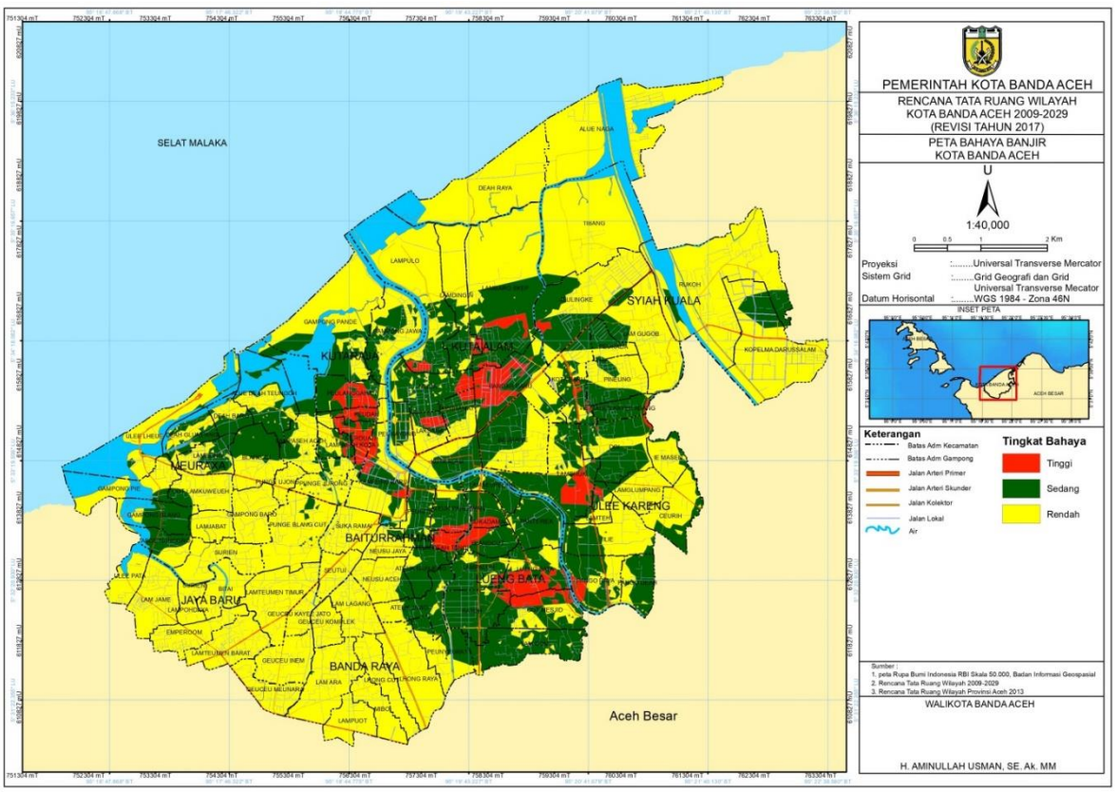

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh

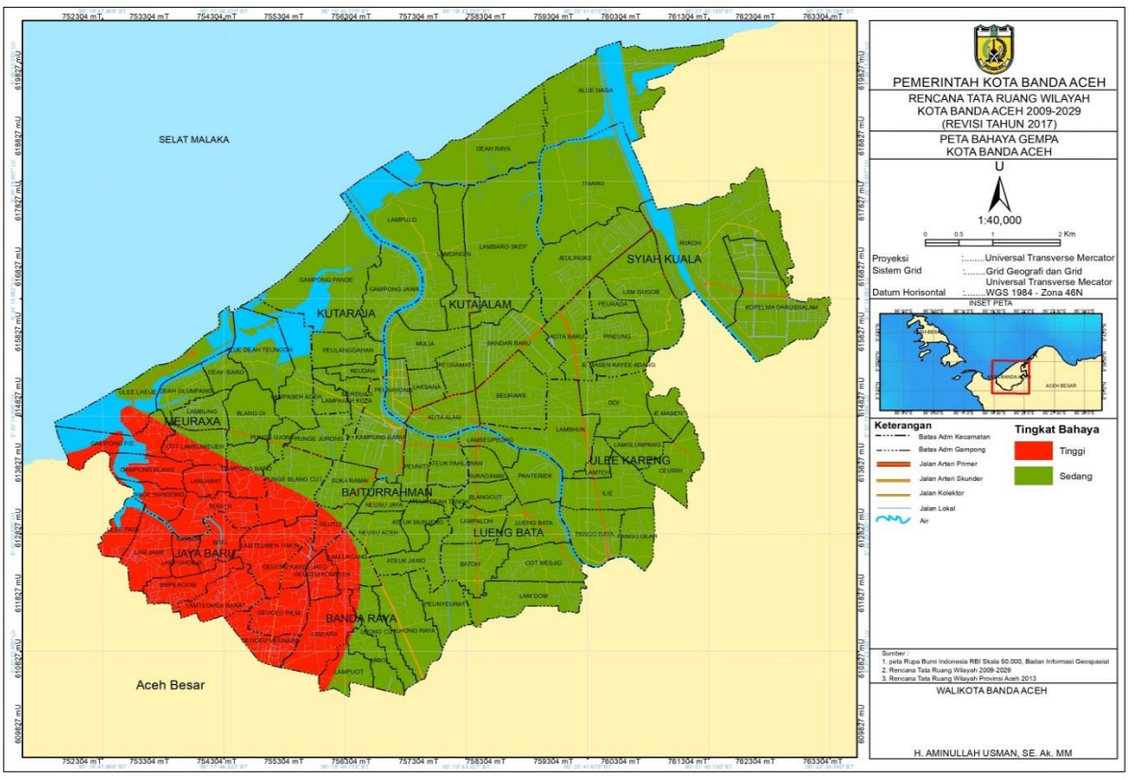

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh

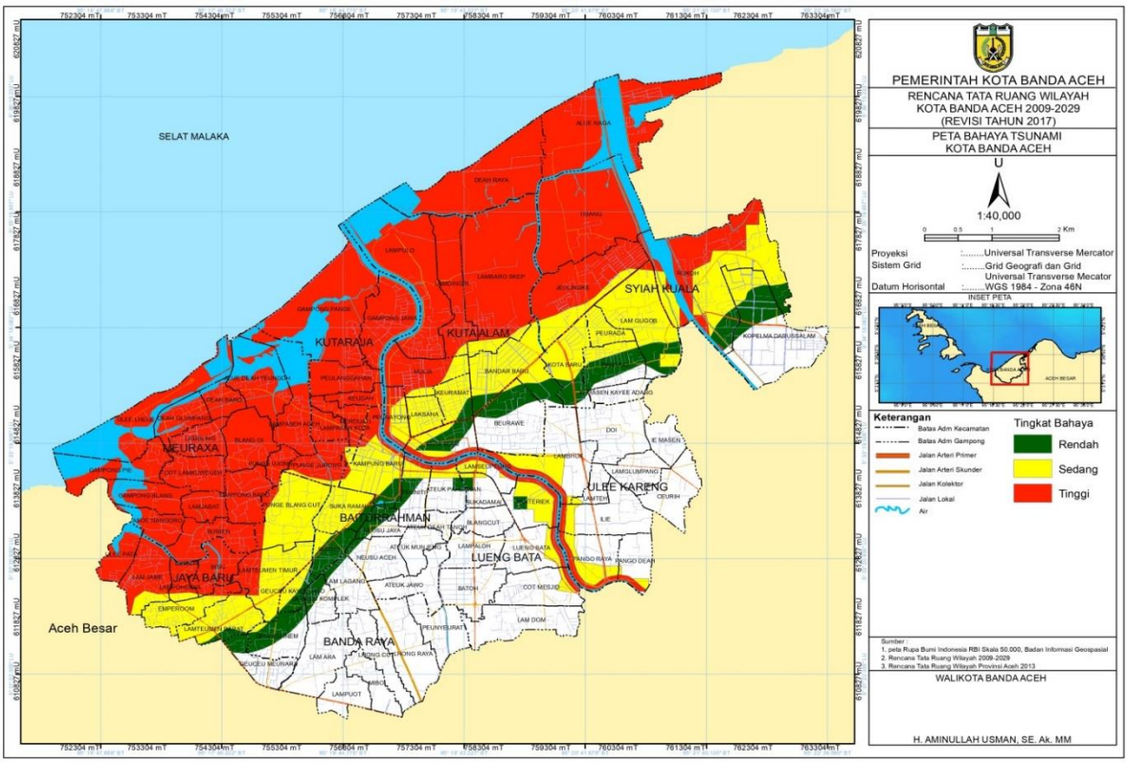

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.1.10 Demografi

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebanyak 257.635 jiwa. Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini:

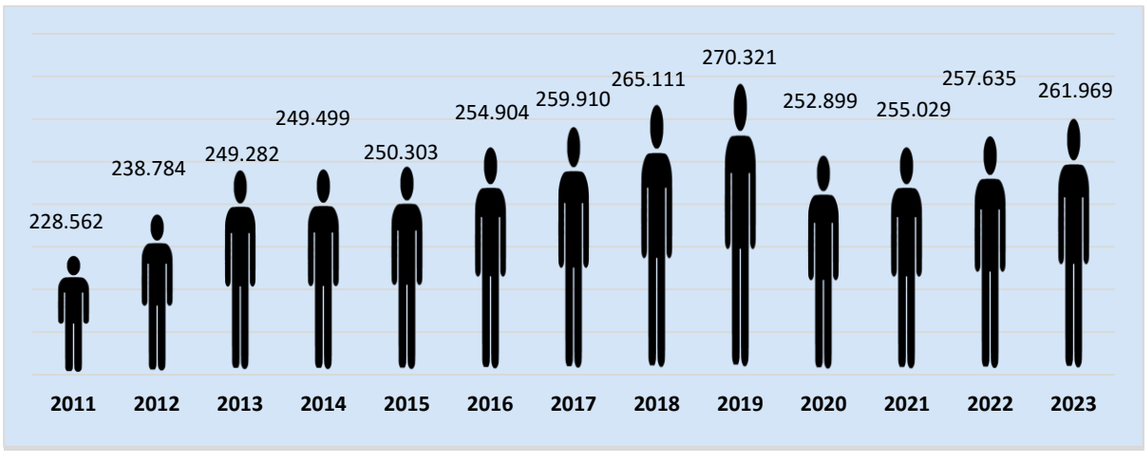

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka (Beberapa Tahun), 2024

Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2011-2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebesar 270.321 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic *Covid*-19. Berdasarkan penjelasan BPS Kota Banda Aceh, penurunan jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terjadi akibat sebagian besar proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dilakukan secara daring selama masa *Covid*-19 di tahun 2020. Pada masa *Covid*-19, sebagian besar mahasiswa PTN/PTS tidak berada di Kota Banda Aceh dan melakukan kegiatan daring dari kampung halaman masing-masing. Di samping itu, survei penduduk oleh BPS dilakukan secara *de vakto*. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 255.029 jiwa. Dan di tahun 2023 jumlah penduduk Kota Banda Aceh bertambah menjadi 261.969 jiwa.

Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	ACEH				KOTA BANDA ACEH			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASE (%)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK	PERSENTASI (%)
0-4	256.819	245.660	502.479	9.17	11.986	11.531	23.517	8.98
5-9	248.290	237.678	485.968	8.86	12.565	12.109	24.674	9.42
10-14	248.001	235.669	483.670	8.82	12.237	11.734	23.971	9.15
15-19	247.411	232.811	480.222	8.76	10.909	10.508	21.417	8.18
20-24	241.270	229.810	471.080	8.59	9.268	8.82	18.088	6.90
25-29	233.766	225.463	459.229	8.38	10.305	10.359	20.664	7.89
30-34	223.260	218.094	441.354	8.05	11.083	12.138	23.221	8.86
35-39	209.966	208.063	418.029	7.62	11.441	11.947	23.388	8.93
40-44	191.631	191.880	383.511	7.00	10.321	9.755	20.076	7.66
45-49	170.556	172.575	343.131	6.26	8.614	7.891	16.505	6.30

50-54	143.417	146.737	290.154	5.29	6.986	6.999	13.985	5.34
55-59	115.150	119.703	234.853	4.28	5.705	5.809	11.514	4.40
60-64	88.363	94.130	182.493	3.33	4.442	4.19	8.632	3.30
65-69	62.615	69.078	131.693	2.40	2.897	2.83	5.727	2.19
70-74	38.943	47.889	86.832	1.58	1.732	1.94	3.672	1.40
75+	33.718	54.111	87.829	1.60	1.16	1.758	2.918	1.11
Total	**2,753.176**	**2,729.351**	**5,482.527**	**100.00**	**131.651**	**130.318**	**261.969**	**100.00**

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.7 di atas menunjukkan di Provinsi Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (0-4) tahun, yaitu sebanyak 502.479 jiwa (9.17%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 256.819 jiwa (4.68%) dan perempuan sebesar 245.660 jiwa (4.48%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 86.832 jiwa (1,58%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 38.943 jiwa (0.71%) dan perempuan sebesar 47.889 jiwa (0.87%). Jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 483.670 jiwa (8.82%), dan jumlah penduduk usia remaja pada kelompok umur (15-19) tahun sebesar 480.222 jiwa (8.76%).

Sedangkan di Kota Banda Aceh berada pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 24.674 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur 75+ tahun keatas sebesar 2.918 jiwa. Pada tabel provinsi aceh sebagian besar penduduk Provinsi berada pada kelompok 0-4 tahun sebesar 502.479 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur (70-74) tahun sebesar 86.832.

Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidakjauh berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Salah satu masalah yang terjadi ialah perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota Provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

Di samping itu, untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	Jiwa	270.321	252.899	255.029	257.635	261,969
Pertumbuhan	%	1,97	-6,44	0,84	1,02	1,23
Kepadatan	Ribu Jiwa/ km^2	4,41	4,12	4,15	4,19	4,27
Sex Ratio	%	105,84	102	102	102	101,02

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar -6,44 persen yang diakibatkan oleh pandemi

Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dan 1,02 persen. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,23 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 berjumlah 4.691 jiwa per km^2 yang mengalami peningkatan kepadatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.199 jiwa per km^2.

Berdasarkan data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah rasio penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 138.993 jumlah penduduk Perempuan 131.328 dan pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki sebesar 129.868 jumlah penduduk Perempuan 127.767. Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebesar 131.651 jumlah penduduk Perempuan 131.318 Jika dipersentasekan sex ratio dari tahun 2020 s/d 2022 mengalami kesamaan berjumlah 102 persen. Sedangkan persentase sex ratio tahun 2023 sebesar 101,02 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut ini:

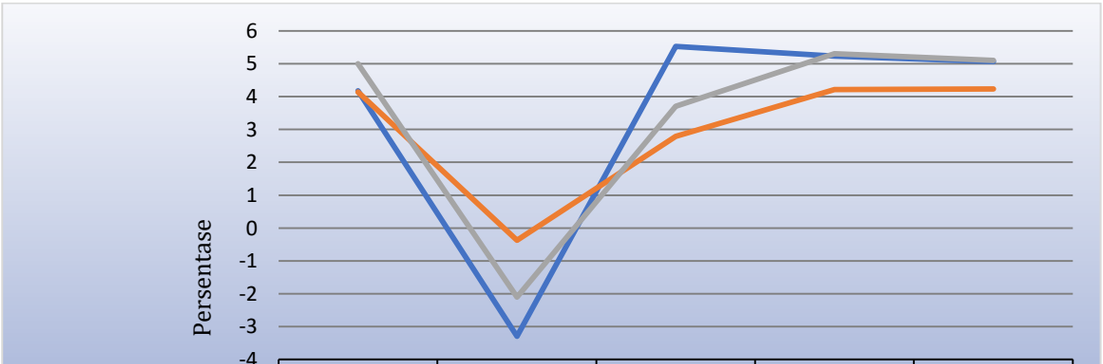

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Banda Aceh	4,18	-3,29	5,53	5,23	5,06
Provinsi Aceh	4,14	-0,37	2,79	4,21	4,23
Nasional	5	-2,1	3,7	5,3	5,1

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2023

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh digambarkan dengan PDRB menunjukkan trend yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemi *Covid*-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pelambatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 0.31 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya menurun drastis menjadi -3.29 di tahun 2020. Namun walau demikian, pasca pandemic *Covid*-19, pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.

Menurunnya nilai PDRB menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid*-19 telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir. PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 497.160 milyar per tahun selama kurun waktu 2018-2022. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan adminsitrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas Pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2020 masih didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 43,15 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 23,11 persen dan 20,04 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun.

Real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami pelambatan akibat pandemi *Covid-19*. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall yang terhenti akibat pandemi *Covid-19* menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Terdapat empat sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2023 yakni perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (22,03 pesen), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (21,54 persen), Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219,59	1,18	246,29	1,33	253,95	1,27	274,74	1,27	393,38	1,65
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	391,65	2,11	395,97	2,14	436,74	2,19	480,55	2,23	493,48	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,62	0,37	70,81	0,38	71,84	0,36	74,61	0,35	79,44	0,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,67	0,16	30,27	0,16	30,02	0,15	33,34	0,15	35,10	0,15
6	Konstruksi	1 123,55	6,05	1 175,72	6,35	1 194,85	5,99	1 280,42	5,94	1 358,68	5,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 877,08	20,88	3 875,51	20,95	4 208,23	21,1	4 563,76	21,17	5 237,04	22,03
8	Transportasi dan Pergudangan	1 688,94	9,10	1 352,99	7,31	1 714,52	8,60	1 928,40	8,95	2 338,13	9,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832,59	4,48	785,44	4,25	769,87	3,86	1 022,32	4,74	1 220,85	5,13
10	Informasi dan Komunikasi	910,23	4,90	960,39	5,19	999,34	5,01	1 107,86	5,14	1 283,92	5,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	608,61	3,28	611,61	3,31	621,35	3,12	653,53	3,03	591,19	2,49
12	Real Estate	1 585,13	8,54	1 545,84	8,36	1 604,64	8,05	1 719,40	7,98	1 803,85	7,59
13	Jasa Perusahaan	465,43	2,51	464,11	2,51	475,35	2,38	534,02	2,48	551,75	2,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 280,95	23,05	4 326,81	23,39	4 729,95	23,72	4 808,66	22,31	5 121,50	21,54
15	Jasa Pendidikan	1 382,48	7,45	1 473,45	7,96	1 548,02	7,76	1 631,47	7,57	1 703,04	7,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	724,41	3,90	796,39	4,30	881,69	4,42	990,93	4,60	1 047,41	4,41
17	Jasa lainnya	380,13	2,05	390,02	2,11	403,01	2,02	452,97	2,10	518,72	2,18

	PDRB	**18 569,08**	**100,00**	**18 501,63**	**100,00**	**19 943,40**	**100,00**	**21 556,95**	**100,00**	**23 777,46**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2012. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp 16,25 Juta, naik pada tahun 2023 sebesar 17,07 juta.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	162,47	9,40	170,01	4,64	170,11	0,06	177,65	4,43	242,84	36,69
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	322,74	2,02	307,51	-4,72	315,96	2,75	323,95	2,53	323,85	-0,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	65,08	9,63	68,84	5,76	68,64	-0,28	70,21	2,28	73,12	4,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,29	25,68	16,82	-2,76	16,67	-0,88	18,30	9,79	*18,55*	*4,19*
6	Konstruksi	965,83	0,13	1 008,50	4,42	1 019,22	1,06	1 022,54	0,33	1 060,13	3,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 099,74	2,64	2 940,62	-5,13	3 073,18	4,51	3 274,16	6,54	*3 541,43*	*8,16*
8	Transportasi dan Pergudangan	1 810,92	1,80	1 366,71	-24,53	1 717,31	25,65	1 821,86	6,09	1 899,29	4,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	528,23	6,07	467,19	-11,56	451,62	-3,33	581,06	28,66	*692,61*	*19,20*
10	Informasi dan Komunikasi	1 137,49	0,54	1 245,76	9,52	1 350,92	8,44	1 476,56	9,30	1 599,55	8,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	406,39	12,28	415,51	2,24	400,82	-3,53	395,10	-1,43	352,12	-10,88
12	Real Estate	1 133,06	9,14	1 097,92	-3,10	1 135,07	3,38	1 183,77	4,29	1 221,17	3,16
13	Jasa Perusahaan	359,84	5,54	345,92	-3,87	348,24	0,67	375,40	7,80	372,33	-0,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 257,17	2,99	3 206,04	-1,57	3 326,18	3,75	3 341,84	0,47	3 427,18	2,55
15	Jasa Pendidikan	984,08	9,79	1 036,33	5,31	1 065,12	2,78	1 102,63	3,52	1 128,80	2,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	597,28	9,82	639,73	7,11	675,86	5,65	740,26	9,53	749,45	1,24
17	Jasa lainnya	310,35	9,97	310,89	0,17	315,03	1,33	352,64	11,94	377,45	7,04
	PDRB	**15 157,98**	**4,13**	**14 644,29**	**-3,39**	**15 449,97**	**5,50**	**16 257,93**	**5,23**	**17 079,85**	**5,06**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2019. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 36,69 persen dibandingkan tahun 2021. Terdapat kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2023. Untuk PDRB ADHB ada dua sektor yakni perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (22,03 pesen) dan administrasi pemeritahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (21,54 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK juga ada dua sektor yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (36,69 persen) dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (19,20 persen).

Tabel 2. 11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	9,40	1,33	4,64	1,27	0,06	1,27	4,43	1,65	36,69
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	2,11	2,02	2,14	-4,72	2,19	2,75	2,23	2,53	2,08	-0,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	9,63	0,38	5,76	0,36	-0,28	0,35	2,28	0,33	4,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	25,68	0,16	-2,76	0,15	-0,88	0,15	9,79	0,15	*4,19*
6	Konstruksi	6,05	0,13	6,35	4,42	5,99	1,06	5,94	0,33	5,71	3,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,88	2,64	20,95	-5,13	21,1	4,51	21,17	6,54	22,03	*8,16*
8	Transportasi dan Pergudangan	9,10	1,80	7,31	-24,53	8,60	25,65	8,95	6,09	9,83	4,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48	6,07	4,25	-11,56	3,86	-3,33	4,74	28,66	5,13	*19,20*
10	Informasi dan Komunikasi	4,90	0,54	5,19	9,52	5,01	8,44	5,14	9,30	5,40	8,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,28	12,28	3,31	2,24	3,12	-3,53	3,03	-1,43	2,49	-10,88
12	Real Estate	8,54	9,14	8,36	-3,10	8,05	3,38	7,98	4,29	7,59	3,16
13	Jasa Perusahaan	2,51	5,54	2,51	-3,87	2,38	0,67	2,48	7,80	2,32	-0,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,05	2,99	23,39	-1,57	23,72	3,75	22,31	0,47	21,54	2,55
15	Jasa Pendidikan	7,45	9,79	7,96	5,31	7,76	2,78	7,57	3,52	7,16	2,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,90	9,82	4,30	7,11	4,42	5,65	4,60	9,53	4,41	1,24
17	Jasa lainnya	2,05	9,97	2,11	0,17	2,02	1,33	2,10	11,94	2,18	7,04
	PDRB	**100,00**	**4,13**	**100,00**	**-3,39**	**100,00**	**5,50**	**100,00**	**5,23**	**100,00**	**5,06**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Komponen	2019		2020		2021		2022		2023	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,44	2,34	60,38	-2,12	58,46	2,36	57,14	3,43	55,73	4,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,81	9,06	1,75	-5,44	1,59	-2,78	1,63	9,98	1,64	9,90
Pengeluaran Konsumsi	43,16	5,85	42,69	-6,85	41,70	2,95	37,14	-5,83	35,27	1,32

Pemerintah										
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,56	0,73	25,21	2,00	24,22	0,85	23,29	0,37	23,52	5,87
Perubahan Inventori	1,02	19,56	0,78	-29,41	0,91	4,90	0,87	4,22	0,85	-
Net Ekspor	-30,99	-1,12	-30,81	-2,72	-26,88	-20,68	-20,06	-48,32	-17,01	-
P D R B	**100,00**	**4,13**	**100,00**	**-3,39**	**100,00**	**5,50**	**100,00**	**5,23**	**100,00**	**5,06**

Sumber: PDRB Kota Banda Aceh Menurut Pengeluaran 2019-2023

Di tahun 2019 sampai dengan 2023 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah. Kenaikan kontribusi dalam komponen pengeluaran pemerintah mencapai 40-an persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto mencapai 20-an persen. Namun, kontribusi net ekspor menurun dari negatif 32,84 persen menjadi negatif 18,51 persen. Pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami refocusing anggaran akibat dari Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan rendahnya serapan anggaran sehingga kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 37,14 persen di tahun 2022. Kontribusi ini sangat menurun sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,70 persen dimana tahun 2021. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 55,73 persen dari tahun sebelumnya yaitu 57,14 persen pada tahun 2023.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perbandingan tingkat inflasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.17 di bawah ini :

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
Provinsi Aceh	1,69	3,59	2,25	5,89	1,53
Kota Banda Aceh	1,38	3,46	2,41	6	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Gambar 2. 17 di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Banda Aceh lebih tinggi dbandingkan laju inflasi Provinsi Aceh dan Nasional. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istillah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istillah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Perhitungan inflasi ini menggunakan Indeks Harga Konsumen baru dengan tahun dasar 2012 sejak tahun 2014. Perbedaan perhitungan tahun dasar ini

juga membedakan cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. IHK adalah dalah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB Per-Kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinngi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB per-Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk mengetahui nilai PDRB Per-Kapita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.18 di bawah ini:

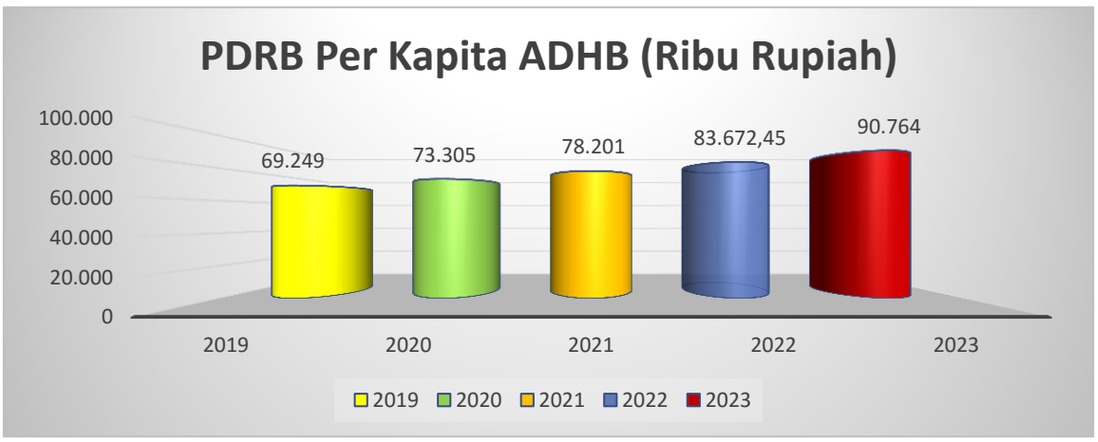

Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2019-2023

Gambar 2.18 di atas menunjukkan bahwa PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2019 sampai Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan.

Di samping itu, untuk mengetahui pertumbuhan PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:

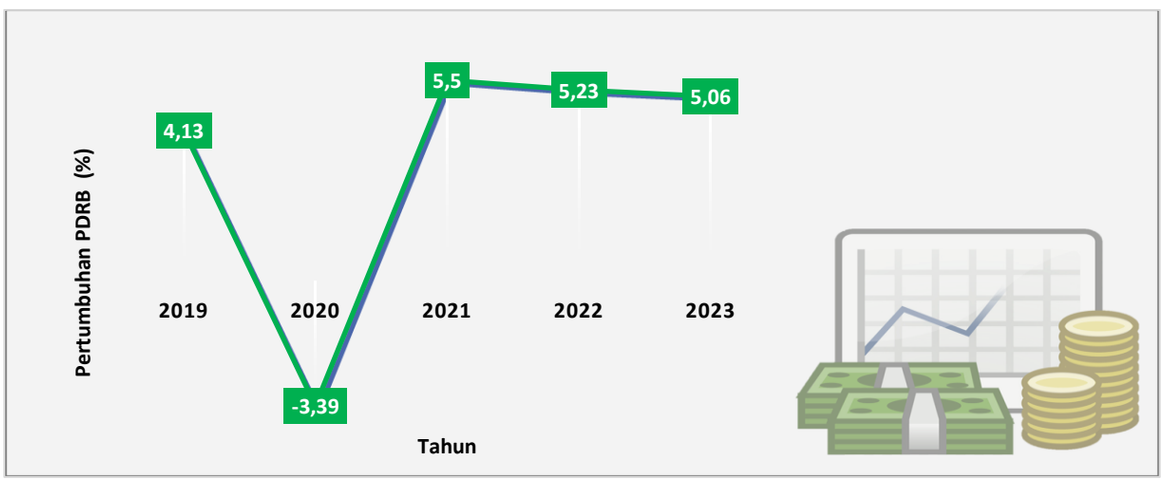

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.19 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per-kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan Tahun 2019 sampai Tahun 2023 berfluktuasi setiap tahunnya. PDRB pada tahun 2019 sebesar 4.13. PDRB pada Tahun 2020 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikan nilai PDRB pada Tahun 2020 merupakan PDRB terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Penurunan PDRB ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid*-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian. Tahun 2021 PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat sebesar 5.5 persen.

D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan *(non-income factors)* seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin” yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengetahui Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini:

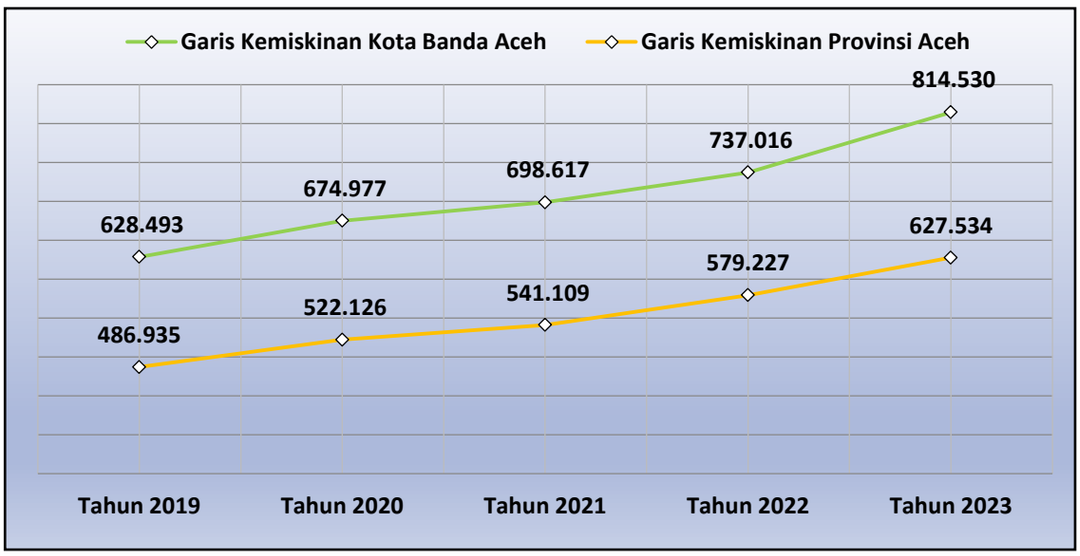

Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Gambar 2.20 di atas membandingkan antara garis kemiskinan Kota Banda Aceh dan garis kemiskinan Provinsi Aceh. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada di atas garis kemiskinan Provinsi Aceh selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita per-bulan penduduk Kota Banda Aceh lebih tinggi dari pengeluaran per-kapita penduduk Provinsi Aceh. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Meskipun garis kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, namun garis kemiskinan Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 628.493 per bulan. Begitu juga untuk 4 (empat) tahun berikutnya (2020-2023), Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 674.977; Rp 698.617; Rp 737.016; dan Rp 814.530. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya garis kemiskinan di Kota Banda Aceh selama ini adalah pengaruh mahalnya harga barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga umum.

Di samping itu, untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:

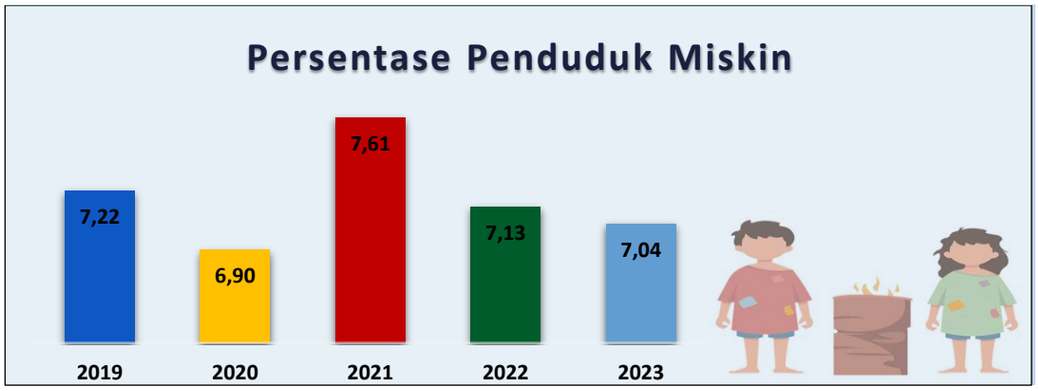

Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun, 2024

Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,22 persen di tahun 2019 menjadi 7,04 persen pada tahun 2023. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam RKPD dan APBD. Pada Tahun 2022 Kota Banda Aceh telah menyiapkan anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu sebesar Rp. 130.616.828.186, hingga bulan Mei telah terealisasi sebesar Rp. 21.041.759.328 (16,11%). Langkah Kongkrit dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 6 strateri penanganan, yaitu:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran, kegiatannya antara lain:
   - Asupan Makanan dan Nutrisi Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Bayi
   - Beasiswa miskin SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA
   - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin
   - Program Keluarga Harapan (PKH)
   - DLL
2. Meningkatkan Pendapatan, kegiatannya antara lain:
   - Bantuan Kelompok Usaha
   - Program Pembiayaan Revolving Gampong
   - Belanja Hibah Kepala Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
   - Kegiatan Job Fair
3. Meningkatkan Kualitas SDM, Kegiatannya antara lain:
   - Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan
   - Optimalisasi omzet melalui market place
   - Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan
   - Pelatihan berbasis kompetensi
4. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, kegiatan antara lain:
   - Perbaikan rumah tidak layak huni
   - Pembangunan rumah layak huni
   - Bantuan biaya pembangunan rumah duafa
   - Bantuan biaya renovasi rumah duafa
5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kegiatannya antara lain:

- Pasar murah
- Pelaksanaan pasar pangan murah (toko tani)

6. Menanggulangi dan mengurangi dampak bencana, kegiatannya antara lain:
   - Penyediaan makanan (program penanganan bencana)
   - Bantuan musibah kebakaran duafa

Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup desa/kelurahan Rekap Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 Persentil Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desil Kesejahteraan	PERSENTIL									
		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTA BANDA ACEH	Kec. Baiturrahman	1573	249	216	67	202	117	32	11	287	136	256
	Kec. Kuta Alam	1598	259	190	62	167	112	34	13	409	160	192
	Kec. Meuraxa	1375	176	147	53	157	116	22	4	294	141	265
	Kec. Syiah Kuala	1788	376	183	89	189	150	33	20	350	122	276
	Kec. Lueng Bata	1101	136	124	53	121	105	19	0	221	91	231
	Kec. Kuta Raja	1399	463	195	46	138	100	49	6	189	69	144
	Kec. Banda Raya	1459	253	162	66	155	100	22	29	331	110	231
	Kec. Jaya Baru	838	68	66	44	134	56	15	0	204	118	133
	Kec. Ulee Kareng	1318	149	140	88	169	128	70	0	275	93	206
TOTAL		12449	2129	1423	568	1432	984	296	83	2560	1040	1934

Sumber: Bappeda (data diolah), 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf (AMF)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mecapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Perkembangan AMH di Kota Banda Aceh, Aceh dan nasional, dapat dilihat pada Gambar 2.22 di bawah ini:

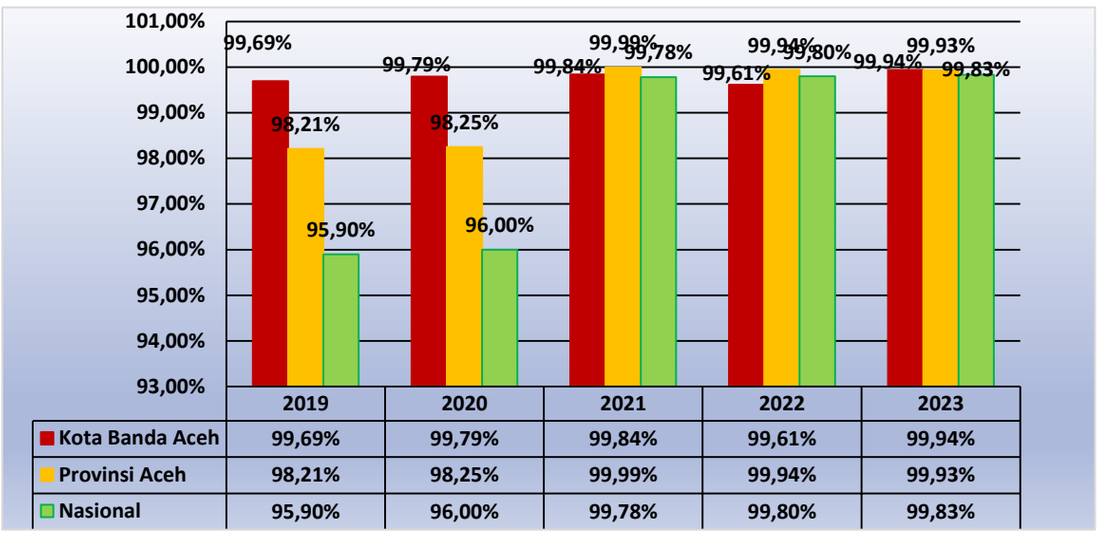

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.22 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 s/d 2023 terus meningkat, namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih rendah, perlu dapat perhatian lebih dari stakeholder terkait.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.

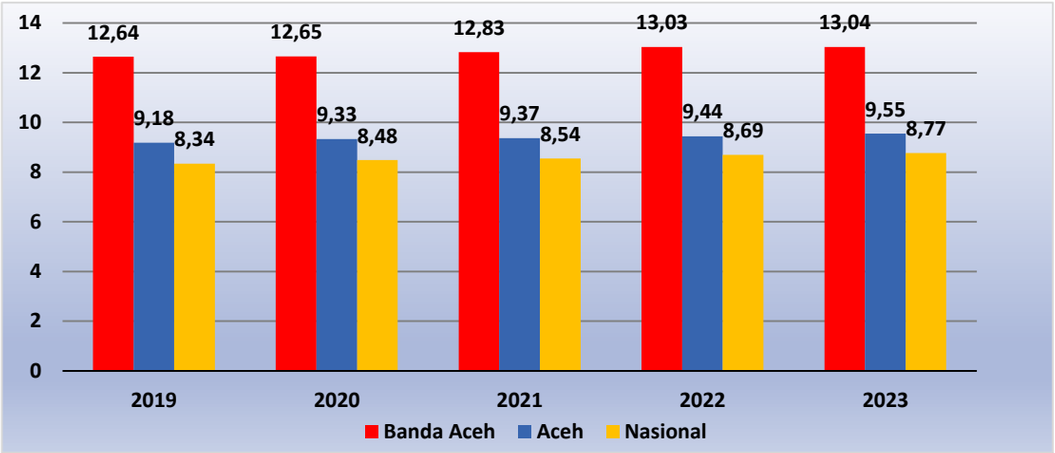

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 13,04 pada tahun 2023, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat. Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2019-2023 di Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang meningkat. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,64 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,04 tahun pada tahun 2023. Pencapaian angka pada tahun 2019 sampai dengan 2023 tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh mendapatkan masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional.

C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan pola asuh yang baik karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0–5 tahun merupakan

golongan yang paling rentan terhadap gizi, anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk. Gambar 2.24 berikut ini menunjukkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk/Kurang di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

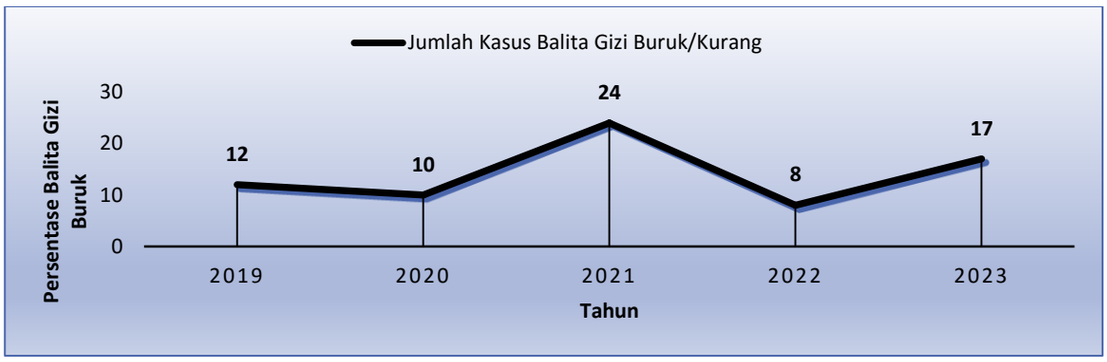

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Gambar 2.24 di atas menunjukkan jumlah balita gizi buruk/kurang di Kota Banda Aceh selama periode 2022-2023 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah kasus balita gizi buruk sebesar 12 kasus meningkat menjadi 17 kasus pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya partipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu masih kurang sehingga penanganan kasus balita beresiko malnutrisi secara dini belum terlaksana secara optimal, masih kurangnya kemampuan kader dalam pemberian konseling terkait hasil pemantauan pertumbuhan balita dan makanan pendamping ASI sehingga upaya pencegahan belum terlaksana secara maksimal, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelaksana gizi dalam melaksanakan pendampingan dan monitoring balita bermasalah gizi.

Peningkatan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk yang ada di Kota Banda Aceh hingga saat ini semua kasus sudah ditangani dan dilakukan intervensi 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi antara pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif sehingga penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk tidak terlaksananya secara tuntas sesuai akar masalahnya. Penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk juga terkendala pada kondisi balita yang mengalami penyakit penyerta seperti penyakit jantung, TBC dan penyakit infeksi lain yang dipicu dengan daya tahan tubuh yang rentan karena tidak adanya imunisasi, kondisi sanitasi yang buruk serta pola asuh yang tidak optimal. Maka menjadi tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya promotif yang lebih pro aktif kepada masyarakat, serta upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara teringrasi melalui upaya intervensi sensitif dan spesifik.

D. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Gambar 2.25 menggambarkan perkembangan angka harapan hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional:

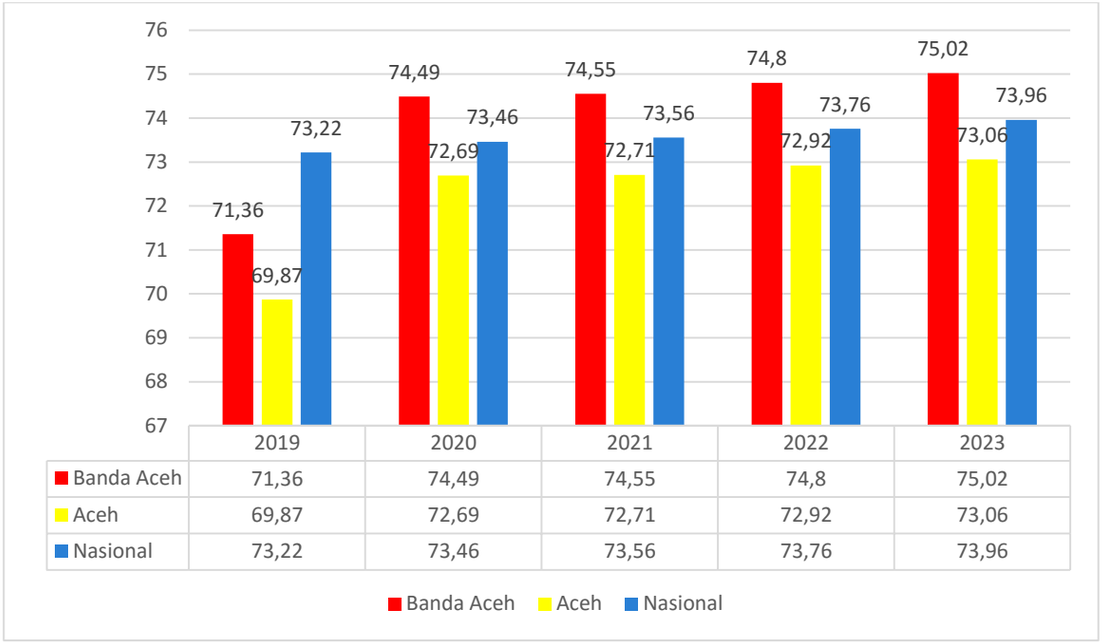

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 71,36 tahun 2019 menjadi 75,02 tahun 2023. Peningkatan AHH sejak 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2020 – 2023 terlihat Kota Banda Aceh sudah diatas nasional dan Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Dengan kata lain, TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khusunya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah ini:

Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja (jiwa)	126.580	131.147	136.675	130.689	123 727
	- Bekerja	117.822	118.637	124.460	119.476	113 790
	- Pengangguran	8.758	12.510	12.215	11.213	9 937
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	79.605	79.605	80.277	90.660	66 550
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,39	61,54	63	59	65,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,92	9,54	8,94	8,62	8,03

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 tercatat 126.580 jiwa, terus mengalami pengingkatan sampai tahun 2021 menjadi 136.675 jiwa. Pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah angkatan kerja menjadi 123.727 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguranpun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

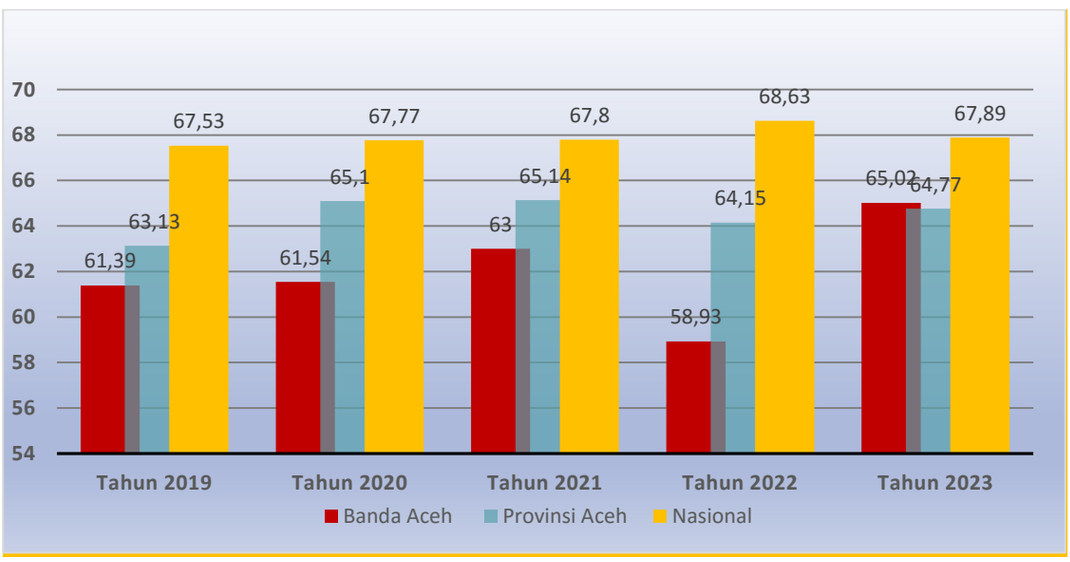

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Dari Gambar 2.26 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2019	2020	2021	2022	2023	
Menjahit	96	80	32	32	48	288
Teknisi Cooling System	32	16	-	-	32	80
Teknisi Sepeda Motor	48	32	16	16	16	128
Las Listrik	32	32	36	16	32	148
Kewirausahaan Membuat Kue	102	32	32	32	32	230
Tata Rias dan Kecantikan	32	-	-	32	32	96
English for Tour Guides	20	-	-	-	16	36
Penggambaran Auto CD	-	-	16	-	-	16
Estimator Bangunan Gedung	-	-	-	16	16	32
Juru Gambar Arsitektur	-	-	-	16	16	32
Pengolahan Ikan	-	-	-	16	16	32
Front Office Kejuruan Pariwisata	-	-	-	-	16	16
Jumlah	**362**	**192**	**132**	**176**	**272**	**1.134**

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.15 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 246 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 343 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2019-2023 terlihat dalam gambar 2.27 berikut:

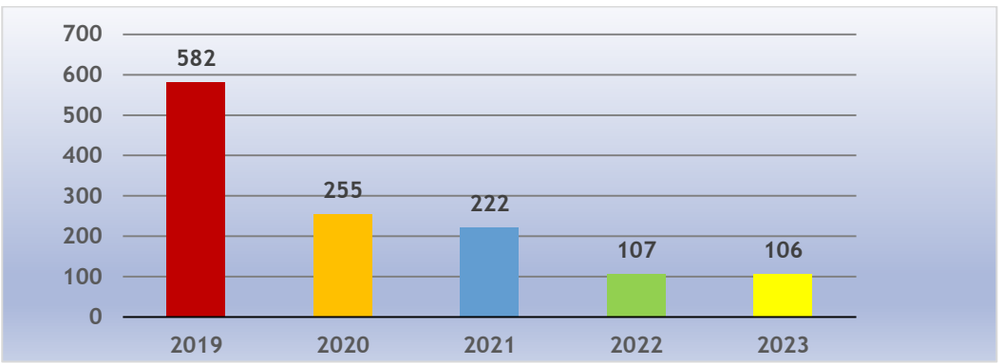

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2019 – 2023

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Persentase antara para pencari kerja dengan pelatihan yang diberikan persentasenya sudah mencapai 50 persen.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat adminintrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	IPM Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,41
2	IPM Provinsi Aceh	71,90	71,99	72,18	72,80	74,70
3	IPM Kota Banda Aceh	85,07	85,41	85,71	86,28	88,32
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,82	0,40	0,35	0,66	0,45

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

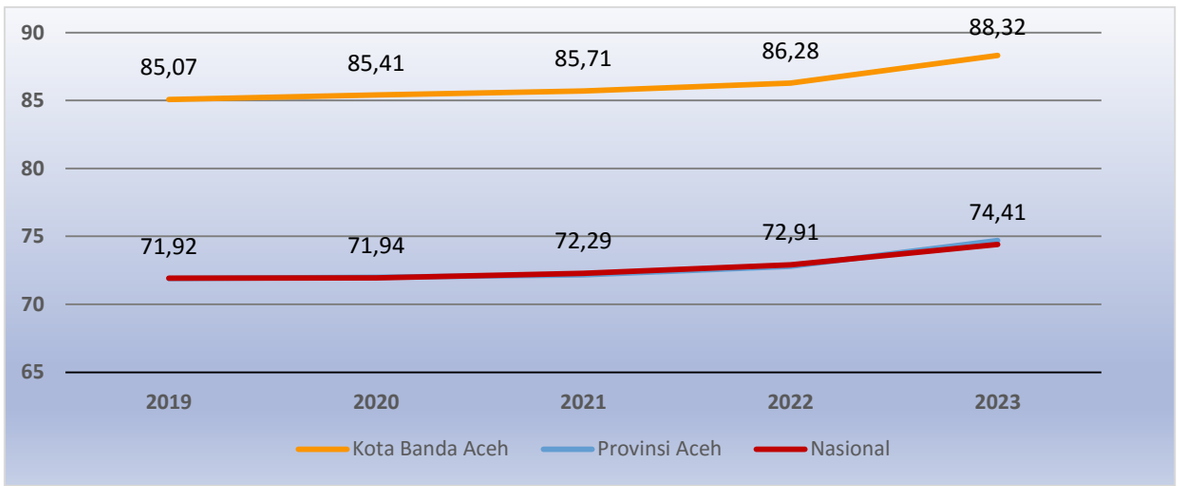

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 2.16 dan Gambar 2.28 di atas, dapat diketahui bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus

dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut ini:

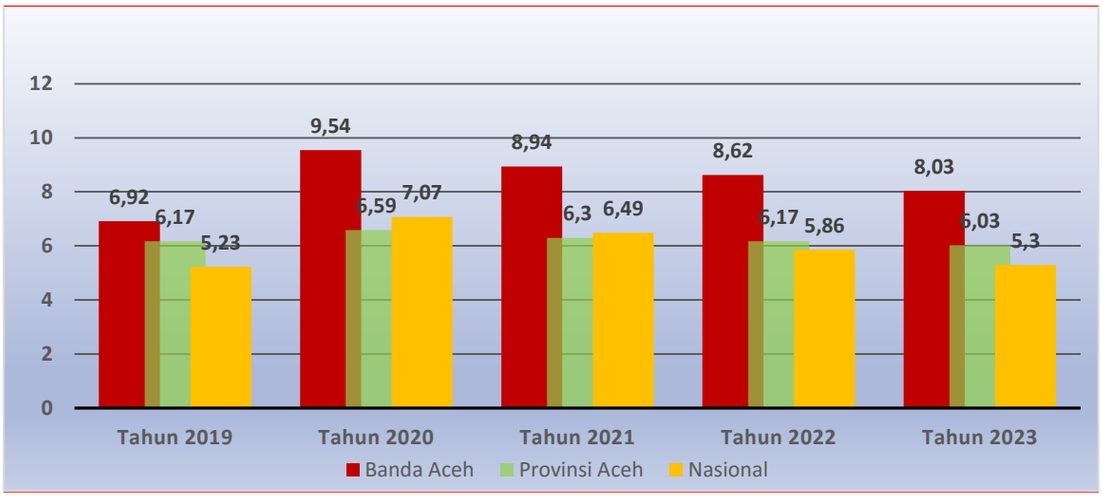

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024

Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 6,92 persen pada tahun 2019 menjadi 8,03 persen pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023 berada diatas keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19.* Selain dari pandemi *Covid-19*, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Untuk mengetahui capaian kebudayaan Kota Banda Aceh yang diukur berdasarkan jumlah sanggar kesenian per 10.000 penduduk periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:

Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5.5*	5.8*	5.8*	6.0	6.0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

*) Data tahun 2018-2021 disesuaikan

Tabel 2.17 di atas menunjukan bahwa jumlah sanggar kesenian yang tersedia untuk 10.000 penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 dapat dihitung sebanyak 5,5 sanggar kesenian untuk 10.000 penduduk dan terus meningkat sebanyak 6,0 lembaga pada tahun 2022.

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sanggar seni yang dibentuk oleh masyarakat dan peningkatan jumlah group kesenian yang dibentuk oleh sekolah yang terdiri dari jenjang sekolah dasar (SD) dan jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP), untuk tahun 2023 tidak ada penambahan sanggar seni/grup kesenian walaupun jumlah penduduk terus bertambah.

Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Banda Aceh untuk bisa tampil pada pentas seni budaya di tingkat Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga bertujuan untuk membangun penduduk yang sehat secara jasmani dan rohani dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama generasi muda. Pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan pembinaan olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini:

Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk.	5,5*	6,0*	5,9*	5,9	5,8
2	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk.	0,1*	0,2*	0,2*	0,2	0,2

Sumber: Dispora Kota Banda Aceh, 2024
*)Data Tahun 2019-2023 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.18 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja olahraga mengalami peningkatan. Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 dan 2022 berjumlah 151 Klub. Pada Tahun 2023, jumlah ini tidak mengalami penambahan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat dari Tahun 2022 sebanyak 257.635 jiwa menjadi 259.538 jiwa pada Tahun 2023. Untuk indikator gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan jumlah gedung olahraga dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu terdapat 6 gedung olahraga di kota Banda Aceh yang terdiri dari: Gor Pango, Stadion H. Dimurthala, Lapangan Tenis Indoor Blang Oi, Lapangan Tenis Outdoor Blang Oi, Lapangan Volly Gampong Mibo dan Lapangan Sepak Bola Lambhuk.

Secara keseluruhan, capaian indikator perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh sudah baik. Namun demikian, perlu dilakukan pembangunan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dispora yaitu jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar, juga untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

A. Syariat Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Dengan demikian pelaksanaaan Syariat Islam di Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat. ini merupakan pengakuan negara Republik Indonesia terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang ketentuannya diatur dalam qanun (peraturan daerah). Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam karena menjadi barometer terhadap penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Ruang lingkup pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) Peningkatan, pemahaman dan pengamalan Syariat Islam, (2) Penguatan regulasi pelaksanaan Syariat Islam, (3) Melakukan Pembinaan dan pengawasan Syariat Islam.

1. Kemampuan Baca Al-Quran Siswa Tingkat Sekolah Menengah

Dalam implementasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh, kemampuan baca Al-Qur'an siswa di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijadikan sebagai salah satu keberhasilan dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya. Untuk mengetahui persentase SMP yang mampu baca Al-Qur'an di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini:

Tabel 2. 19 Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an Kota Banda Aceh, 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase siswa SMP yang mampu Baca Al-quran	94,18	94,48	88,82	91,16	88.79

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.19 di atas dapat diketahui bahwa persentase siswa menengah pertama (SMP) yang mampu baca Al-Qur'an dari tahun 2019 hingga 2022 berfluktuasi. Walaupun persentase siswa menengah pertama berfluktuasi, namun pada tahun 2022 menunjukkan capaian yang baik karena persentasenya melampaui angka 90 persen. Pencapain ini tidak terlepas dari program diniyah dan tahfiz yang telah diselenggarakan pada jenjang SMP sejak tahun 2012, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan ada nya beberapa SMP swasta baru yang belum mempunyai lulusan .

2. Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah

Dalam implementasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh, kemampuan baca Al-Qur'an siswa di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijadikan sebagai salah satu keberhasilan dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya. Untuk mengetahui persentase SMP yang mampu baca Al-

Qur'an di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2. 20 Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi Kota Banda Aceh, 2019-2023

No	Capaian Pembangunan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi	89,16	83,57	77,76	80,45	78.74

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.20 di atas menggambarkan bahwa persentase siswa yang mampu baca tulis Arab Jawi di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena tidak efektifnya pelaksanaan pembelajaran pada tahun 2020 karena pembatasan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena wabah *Covid*-19. PTM ditiadakan dan sebagai penggantinya adalah program belajar daring (BDR) dan sistim shif yang arah pembelajaran tidak untuk meningkatkan mutu belajar tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan karakter dan life skill siswa. Hal tersebut memberi dampak menurunnya angka capaian siswa yang mampu baca tulis arab jawi.

Dukungan terhadap program diniyah dan tahfiz yang telah diselenggarakan sejak tahun 2012 akan terus dilakukan untuk meningkatkan persentase siswa yang mampu baca tulis arab jawi sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan ada nya beberapa SMP swasta baru yang belum mempunyai lulusan.

3. Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat

Kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam (DSI). DSI melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang dirangkai dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Melakukan dakwah melalui media online, Dakwah Online adalah salah satu kegiatan dakwah yang dilaksanakan melalui Media Sosial agar tersebarnya informasi keislaman dengan cepat dan meluas.
2. Dakwah Keliling dilakukan secara rutin dengan menggunakan mobil operasional dakwah dalam rangka mensosialisasikan informasi – informasi Syariat Islam agar diketahui oleh masyarakat Kota Banda Aceh secara cepat dan sesuai dengan momen-momen yang ada. Agar masyarakat dapat mengetahui dan berpatisipasi dalam penegakan Syariat Islam.
3. Safari dakwah (Safda) yang dilaksanakan setiap malam Ahad mulai Maghrib sampai Isya dengan mendatangi masjid-masjid secara bergantian dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan sasaran utama yaitu meningkatkan kesadaran beribadah terutama shalat berjamaah dan membangun tanggung jawab bersama penegakkan syariat Islam dilingkungan masing-masing.
4. Safari Dakwah Da'iyah (Sa'idah) dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh setiap ba'da Jumat di masjid-masjid dalam Kota Banda Aceh secara bergantian. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga dengan menekankan pada penguatan fungsi ibu sebagai madrasatul'ula, membangun semangat beribadah dalam ruangan (memotivasi keluarga untuk shalat berjamah) dan mencegah generasi muda dari kerusakan moral.
5. Safari dakwah sekolah adalah safari dakwah di sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh secara

bergantian. Kegiatan ini melibatkan Da'i Kota Banda Aceh, kelompok kerja Da'i Penyelamatan Generasi Muda Islam (PGMI) dengan fokus kepada membangun semangat belajar, menghindari generasi muda dari pornografi dan narkotika.

6. Dakwah Warung Kopi, yaitu kegiatan dakwah yang dilaksanakan di warung-warung kopi mengingat Banda Aceh sebagai Kota Seribu Warung Kopi. Dengan banyaknya pengunjung merupakan salah satu langkah strategis untuk kegiatan usaha dakwah dilaksanakan. Tujuannya agar pelanggan warung tersebut dapat mendapatkan dakwah dan informasi keislaman.

Untuk mengetahui frekwensi Syiar dan Dakwah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2. 21 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kegiatan	Frekwensi Pelaksanaan Pertahun (Kali)					Jumlah	%
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Safari Dakwah (Safda) Malam Minggu	44	44	36	40	34	198	16
2	Safari Da'iyah (Jumat Siang)	44	32	44	40	37	197	16
3	Safari Dakwah Sekolah	18	8	15	20	26	87	7
4	Ceramah Penyejuk Hati	290	0	0	0	0	290	24
5	Dakwah Da'iyah Ramadhan	90	0	0	0	0	90	7
6	IRUP ke Sekolah	0	0	0	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Pengajian dan Zikir	28	15	5	6	0	54	4
8	Dakwah Warung Kopi	10	5	1	5	10	31	3
9	Dakwah Keliling	44	40	15	18	15	132	11
10	Dakwah Online	0	100	0	25	0	125	10
Total		**568**	**244**	**116**	**154**	**122**	**1204**	**100**

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.21 di atas ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020-2023 seperti kegiatan Ceramah Penyejuk Hati, Kegiatan Dakwah Daiyah Ramadhan, IRUP Ke Sekolah, Pelaksanaan Pengajian dan Zikir serta Dakwah Online dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Disamping kegiatan syiar dan dakwah Dinas Syariat Islam juga melakukan beberapa kegiatanuntuk pengeuatan, pemahaman dan pengamalan syariat islam di Kota Banda Aceh yaitu :

1. Membentuk SPPQ (Sekolah Pembinaan dan Pengembangan AlQur'an). Sebagai
   - Wadah untuk menampong potensi calon kafilah mtq kota banda aceh
   - Untuk membina dan menampung warga kota banda aceh yang memiliki minat dan bakat di Bidang Tilawatil Qur'an
2. Membentuk Lembaga Sertifikasi Tahfizhul Qur'an
   - Untuk memfasilitasi dan mensertifikasi para Tahfiz Qur'an yang ada di Kota Banda Aceh
3. Membentuk dan mengukuhkan Dewan Syariah Kota Banda Aceh
   - Mengawasi penerapan fatwa DSN (Dewan Syariat Nasional) atas produk dan transaksi LKS di kota

4. Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Asessibel

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan manajemen kebersihan masjid berupa kegiatan pembinaan dan perlombaan kebersihan masjid. Kegiatan ini mengikut sertakan 9 masjid yang mewakili 9 (sembilan) kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan Lomba Kebersihan dan Ketertiban Masjid telah dilaksanakan sejak Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan, ketertiban dan aksessibilitas dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini :

Tabel 2. 22 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksessibilitas Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Masjid	Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan	Masjid yang Ramah Disabilitas
1	2019	113	36	3
2	2020	114	-*	-*
3	2021	115	-*	-*
4	2022	115	-	-
5	2023	115	-	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2020 dan 2021 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2.22 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2020-2023 tidak dilaksanakan penilaian standar kebersihan, ketertiban dan aksessibilitas.

5. Musabaqah Tilawah Quran (MTQ)

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) merupakan ajang uji kemampuan bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, penulis khat, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Pelaksanaan MTQ untuk Tingkat Kota Banda Aceh dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan untuk Tingkat Provinsi juga dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pelaksanaan MTQ bertujuan sebagai syiar dan uji kemampuan pada seni-seni Al-Qur'an yang diperlombakan. Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Aceh sesuai dengan cabang yang dilombakan selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2. 23 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MT yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

No	Cabang-Cabang MTQ	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tilawah	17	*)	**)	17	17
2	Tafsir	6	*)	**)	6	6
3	Tahfizh	10	*)	**)	10	10
4	Fahmil Qur'an	6	*)	**)	6	6
5	Syarhil Qur'an	6	*)	**)	6	6
6	Khattil Qur'an	8	*)	**)	8	8
7	MMQ	2	*)	**)	2	2
	Total	55	-	**)	55	55

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024
**) MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan pada Tahun Ganjil*
***) Tidak dapat dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022.*

Tabel 2.23 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2018-2023 Kota Banda Aceh mengikutsertakan seluruh cabang perlombaan MTQ pada MTQ Provinsi

Aceh. Jumlah peserta untuk masing-masing cabang umumnya sama untuk setiap tahunnya.

Pada MTQ Tahun 2023, kafilah MTQ Kota Banda Aceh berhasil memperoleh Peringkat Juara Umum I dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Semeulue. Untuk mengikuti MTQ tersebut Dinas Syariat Islam telah melakukan pembinaan secara berkesinambungan yaitu TC Berjalan, TC Khusus, dan Try Out MTQ.

Tahapan pembinaan kafilah MTQ Tahun 2023 yaitu :

- TC Berjalan dilaksanakan selama 30 Kali
- TC Khusus dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 17 sd 18 November 2023
- Try Out MTQ dilaksanakan selam 1 hari pada 19 November 2023 di Kantor Dinas Syariat Islam
- Keberangkatan Kafilah MTQ Kota Banda Aceh ke Kabupaten Seumeulue untuk mengikuti kegiatan MTQ dari tanggal 24 November sd 5 Desember 2023.

B. Pendidikan Dayah

1. Jumlah Dayah, Guru dan Santri

Dalam konteks Banda Aceh saat ini dayah di Banda Aceh dibagi dengan 2 tipe dayah yaitu Salafi (tradisional) dan Terpadu (modern). Saat ini semua guru Dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari instansi pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi guru dayah. Terkait dengan akreditasi dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya ada 4 (empat) Dayah yang terakreditasi A yaitu Darul Ulum, Babun Najah, Inshafuddin dan Madinatul Fata.

Jumlah dayah, jumlah guru dan jumlah santri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini:

Tabel 2. 24 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dayah	42	45	38	40	40
2	Guru	899	901	901*	1.214	1.214
3	Santri	6.404	6.451	6.560*	4.720	4.720
Rasio Guru/Santri		1 : 7	1 : 7	1 : 7	1 : 7	1 : 7

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dayah turun menjadi 38 dayah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 45 dayah. Penurunan tersebut karena setelah dilakukan evaluasi terhadap keberadaan dayah yang ada di Banda Aceh yang pada akhirnya diturunkan statusnya menjadi Balai Pengajian. Sebayak 7 dayah dikualifikasi menjadi Balai Pengajian karna tidak sesuai dengan syarat da kriteria dayah sesuai dengan Perwal 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah santri dikarnakan banyak santri dari luar Kota Banda Aceh dan Luar Negeri pulang kekampung halamannya dikarnakan adanya kebijakan suntik vaksin covid-19, yang menyebabkan banyak santri tidak balek lagi untuk mondok di Dayah yang ada di Banda Aceh. Dapat kami sampaikan juga pada Dayah Salafiyah (Madinatul Fata dan Nidhamul Fata) dua dayah ini sejak 2019 hingga 2021 banyak santri Luar Negeri

(Malaysia) yang mondok akan tetapi saat terjadi pandemic covid-19 kedua dayah ini santrinya merosot. Umumnya Balek ke kampong halamannnya masing-masing ini juga terjadi disejumlah dayah di Banda Aceh. Kondisi ini berimbas pada penurunan jumlah santri di Tahun 2022 hingga 2023. Kondisi ini secara perlahan-lahan akan normal kembali di Tahun 2024.

Ditinjau dari sisi rasio antara guru dan santri pada Dayah di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 juga menggambarkan rasio yang relatif baik dan memadai. Hal ini menjadi peluang dalam mewujudkan sinergisitas antara ulama dengan umara. Insya Allah kedepan keberadaan dayah di Banda Aceh semakin diminati orang tua/wali santri, bukan hanya dari Banda Aceh akan tetapi wali santri dari berbagai Kabuapten Kota di Banda Aceh. Untuk mengetahui jenis dan tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut ini

Tabel 2. 25 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
1	Darul Ulum	Keuramat	Kuta Alam	Terpadu	A
2	Dayah Inshafuddin	Lambaro Skep	Kuta Alam	Terpadu	A
3	Dayah Al-Ikhlas	Beurawe	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
4	Raudhatul Muttaqin	Gp.Jawa Kec Kuta Raja	Kutaraja	Salafiyah	NT/D
5	Raudhatul Jannah	Ateuk Jawo	Baiturrahman	Salafiyah	C
6	Markas Al Ishlah Al-Aziziah	Lueng Bata	Luengbata	Terpadu	B
7	Bustanul Amilin Ad-Daudiyah	Gp Blang Cut	Luengbata	Salafiyah	NT/D
8	Madinatul Fata	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	A
9	Darul Hijrah	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
10	Liwaul Mukhlishin	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
11	Fauzul karimah	Lam lagang	Banda Raya	Salafiyah	NT/D
12	Nidhamul Fata	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
13	Babun Najah	Doy	Ulee Kareng	Terpadu	A
14	Madinatul Fatayat	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	B
15	Darul Amin Al Waliyah	Desa Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
16	Raudhatul Jannah	Gp.Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
17	Al-Islahiyah	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
18	Darul Mufadzal Al Aziziyah	Pelanggahan	Kuta Raja	Salafiyah	C
19	Raudhatul Hikmah Al Waliyah	Pango Raya	Ulee Kareng	Salafiyah	C
20	Nurusshadiqah	Lamglumpang	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
21	Dayah BTRG	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
22	Babul Jannah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
23	Budi Muthmainnah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
24	Mabdaul Ulum Al-Aziziyah	Lamtemen Timur	Jaya Baru	Salafiyah	B
25	Darul Fikri Al Waliyah	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Salafiyah	C
26	Mishrul Huda Malikussaleh	Lamjamee	Jaya Baru	Salafiyah	B
27	Mini Aceh	Alue Naga	Syiah Kuala	Salafiyah	B
28	Mudhiatul Fata	Lampaseh Aceh	Kutaraja	Salafiyah	C
29	Raudhatul Wustha	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
30	Misbahus Shalihin Al Waliyah	Gampong Pande	Kuta Raja	Salafiyah	B
31	Al Fatani Darussalam	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Salafiyah	C
32	Al Athiyah	Beurawe	Kuta Alam	Terpadu	C

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
33	Bustanul Huda	Lambaro Skep	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
34	Baital `Atiq	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	C
35	Sirathal Mustaqim Misrul Muarrif Al Aziziyah	Surien	Meuraxa	Salafiyah	C
36	Tahfidz Al Hanifi	Lamdingin	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
37	Al Mukmin	Lamgugop	Syiah Kuala	Salafiyah	NT/D
38	Al Huda	Emperom	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
39	Pesantren Tahfidz Qur`an Baitussalihin	Ceurih	Ulee Kareng	Terpadu	NT/D
40	Darul Fityan	Tibang	Syiah Kuala	Salafiyah	C

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2024

C. Baitul Mal

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta waqaf dan harta agama. Penyelenggaraan urusan dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2017 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui peraturan Walikota. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah pada Baitul Mal di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini:

Tabel 2. 26 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ribu)				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2019	19.604.500.000	14.011.017.230	1.175.188.643	1.268.791.804	6.360.321	16.461.357.998
2020	22.064.260.000	13.714.128.368	1.554.162.106	1.631.728.035	2.573.489	16.902.591.999
2021	24.349.130.000	11.182.953.209	1.275.607.379	1.640.282.993	4.430.860	14.103.274.443
2022	21.789.130.000	11.899.361.544	1.686.488.162	2.078.451.093	14.092.653	15.678.393.454
2023	18.594.523.464	11.967.429,688	1.568.378.809	1.977.708.967	2.061.985	15.535.579.450

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.26 di atas menunjukkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Dari seluruh realisasi penerimaan yang ada, persentase penerimaan zakat yang berasal dari zakat penghasilan dan perniagaan masih lebih besar daripada penerimaan infaq dan sadaqah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh berkaitan dengan perencanaan, pendistribusian dan penerima zakat, infaq dan shadaqah.

2) Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan melalui pembangunan rumah dhuafa. Untuk mengetahui pembangunan Rumah Dhuafa dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2. 27 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)
2019	19
2020	20
2021	20
2022	30
2023	35
Total	124

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2019-2023 jumlah zakat, infaq dan shadaqah untuk telah digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa sebanyak 124 rumah yang jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa ini sangat bermanfaat bagi kaum dhuafa karena rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan rumah dhuafa sementara kemampuan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masih sangat terbatas. Atas dasar ini maka pembangunan rumah dhuafa untuk kaum dhuafa harus berdasarkan kepada prioritas yang membutuhkannya.

Di samping itu, zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh juga diberikan dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat miskin. Adapun jumlah penerima beasiswa miskin yang berasal dari penerimaan zakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini:

Tabel 2. 28 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (jiwa)

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2019	995	939	632	295	14	43	2918
2020	991	992	87	396	13	39	2518
2021	1.000	1.000	100	299	0	48	2447
2022	1.000	1.000	100	299	0	49	2448
2023	993	995	99	399	102	44	2632
Jumlah	**4.979**	**4926**	**1018**	**1688**	**129**	**223**	**12963**

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima beasiswa miskin di Kota Banda Aceh yang bersumber dari zakat pada tahun 2019 dengan total penerima 2.918 jiwa. Beasiswa diberikan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Beasiswa juga diberikan untuk program beasiswa tahfidz dan santri salafi. Pada tahun 2023, jumlah penerima beasiswa menjadi 2.632 siswa.

D. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi " memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ". Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

1) Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
3) Melakukan pengkaderan Ulama.
4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Di samping itu, kewenangan MPU juga melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

1) Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

MPU Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan keputusan keulamaan. Berikut Jumlah keputusan, hasil penellitian, surat edaran, rekomendasi/ saran/ nasehat, arahan, himbauan dan tausiyah yang dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.29 berikut ini :

Tabel 2. 29 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ Nasehat, Arahan, Himbauan dan Tausiyah Yang Dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Keputusan	10	1	-	-	-	11
2	Hasil Penelitian	1	-	-	-	-	1
3	Surat Edaran	-	-	-	-	-	0
4	Rekomendasi/Saran/Nasehat	4	4	-	4	-	12
5	Surat Arahan	15	-	-	-	16	15

6	Himbauan	-	9	-	-	-	9
7	Tausiyah	-	8	6	4	2	18
Jumlah		30	22	6	8	18	84

Sumber: Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.29 di atas menunjukkan bahwa MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 telah mengeluarkan 11 keputusan, 1 hasil penelitian, 0 surat edaran, 12 rekomendasi/saran/nasehat, 31 surat arahan, 9 himbauan dan 20 tausiyah.

2) Kewenangan MPU :

Kewenangan MPU Kota Banda Aceh terdiri dari:

(1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
(2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan Keputusan Keulamaan pada Tabel 2.30 di bawah ini :

Tabel 2. 30 Keputusan Keulamaan

No	Tahun		Keterangan
1	2019	a.	Surat Arahan untuk Kegiatan Malam Resepsi HUT Kota Banda Aceh ke-841
		b.	Surat Arahan untuk Kegiatan PLN Aceh tentang "BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2019"
		c.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Pekan Kreatif Banda Aceh Tahun 2019"
		d.	Surat Arahan Kegiatan untuk Bank Indonesia tentang " Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh (Fesa) 2019"
		e.	Surat Arahan Kegiatan untuk PT Era Baru Mandiri tentang " Amazing Muharram Hijrah & Ukhuwah"
		f.	Surat Arahan kepada Dinas PU Kota Banda Aceh untuk Pembangunan Tugu Tauhid di Ulee Lheue
		g.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Perhubungan Aceh tentang "Malam Keakraban Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019"
		h.	Surat Arahan Kegiatan untuk Zawiyah Nurun Nabi "Zikir Akbar, Shalawat dan Doa Bersama Masyarakat Kota Banda Aceh
		i.	Surat Arahan Kegiatan untuk Teater Wanito Ngunandiko Yogyakarta
		j.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Banda Aceh Coffee Festival"
		k.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang "Aceh Agro Expo"
		l.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh tentang "Aceh UMKM Expo 2019"
		m.	Surat Arahan Kegiatan untuk BRI (Persero), Tbk tentang “Pesta Rakyat Simpedes BRI Tahun 2019”
		n.	Surat Arahan Kegiatan untuk Gudang Garam tentang “Pawai Budaya Bersama Gudang Garam”
		o.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang " Kutaraja Festival"
		p.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/01/2019 tentang Pelaksanaan Musyawarah Ulama Pembentukan MPU Tahun 2019
		q.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/02/2019 tentang Penetapan Tim Penguji Baca Kitab Calon Anggota MPU Kota Banda Aceh, pada Musyawarah Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019

No	Tahun		Keterangan
		r.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		s.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 155 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		t.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/010/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - I Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		u.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/011/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		v.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 017/2019 tentang Pedoman Zakat Fitrah Tahun 2019
		w.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 024/2019 tentang Identifikasi Aliran Sesat dan Wahabi Salafi
		x.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/026 /2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - II Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		y.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/031/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - III Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		z.	Saran dan nasehat tentang penolakan kedatangan DR. Firanda Andirja Lc, MA
		aa.	Saran dan nasehat tentang Fungsi Masjid di Kota Banda Aceh
2	2020	a.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Siaga darurat *Corona virus Disease (Covid-19*) di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dalan Situasi pandemi *Corona Virus Disease (Covid*-19) di Kota Banda Aceh
3	2021	a.	Tausiyah MPU tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dalam situasi pandemi Corona Virus Deseare (COVID-19) di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU tentang Peperangan Ghaza Palestina dan Pencegahan COVID-19
		c.	Tausiyah MPU tentang pelaksanaan Qurban 1441 h dan pelaksanaan ibadah sesuai protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19
		d.	Tausiyah MPU tentang Pemilihan Geuchik Langsung
		e.	Tausiyah MPU tentang pemberian tahun Hijriah pada surat dinas
		f.	Tausiyah MPU tentang Qanun penyelenggaraan pariwisata natal Kota Banda Aceh
4	2022	a.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Tahun 1443 H/ 2022 M di Kota Banda Aceh.
		b.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Status Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Babu Zamzam Peunayong.
		c.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penertiban Lapangan Blang Padang.
		d.	Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Isu-isu Sosial/Keagamaan.
		e.	"Direktur Utama PT.Sarana Aceh Ventura Konveksi menjadi lembaga keuangan syariah" (Rekomendasi)
		f	Pimpinan Yayasan Islam Ar-Risalah Audiensi " Audiensi buku syair Aqidah diajarkan dan dianut masyarakat Kota Banda Aceh" buku ini bagus diajarkan kepada pelajar dan masyarakat dalam upaya penguatan aqidah Islamiyah(Rekomendasi)
		g	" Ketua Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (Baitul Qiradh Bima) Perubahan AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)(Rekomendasi)
		h	Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh "Permohonan Pembentukan Dewan Syariah Kota Banda Aceh " (Rekomendasi)
5	2023	a.	Tausiah MPU Tentang Pendistribusian Daging Qurban 1443 H
		b.	Tausiah MPU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan 1444 H
		c.	Kepada Ketua Himpunan mahasiswa Fisika (Kegiatan " Closing Ceremony PC OH)
		d.	Kepada Direktur CV.AMC Event Organizer Kegiatan "Expo UMKM ACEH 2023" (Arahan)
		e.	Kepada Direktur CV.BOMS-SKY Event Management Kegiatan "PEKAN RAYA CAHAYA ACEH" (Arahan)

No	Tahun		Keterangan
		f.	Kepada Ketua Panitia Grub Paduan Suara New Laras Cita (Kegiatan " Mengembangkan Bakat Vokal Milenial Untuk Menciptakan Generasi Bertalenta)
		g.	Kepada Kadis Koperasi UMKM ACEH Kegiatan " Expo Enterpreneur 2023"
		h.	Kepada Koordinator Shelter Cooporation Kegiatan " Honda Sport Motor Show dan Honda Premium Matic Day"
		i.	Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Seudati dan Expo 2023"
		j.	Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Aceh PoP Culture Festifal 2023" Kepada Panitia Mahkota Production Kegiatan " Atjeh Fest 2023"
		k.	Kepada Direktur PT.Farobi Eventporium Organizer Kegiatan "Pasar Murah dan Bazar UKM Bersama Pema 2023"
		l.	Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Premium Matic Day dan Silaturrahim Honda Matic Lovers"
		m.	Kepada Ketua Pelaksana Mahkota Produktion Kegiatan " Soundsation"
		n.	Kepada Ketua pelaksana Honda Klasik Aceh (Hoka) Kegiatan " Anniversary 1 Dekade Honda Klasik Atjeh (Hoka) dan Honda Tuha Atjeh Festifal 2023"
		o.	Kepada Ketua Pelaksana Manager Lingkar Kreatif Kegiatan " Expo Pemuda Kreatif"
		p.	Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Custom Playground dan Honda Sport Motor Show"
		q	Kepada Ketua Panitia Komunitas Musik Banda Aceh Kegiatan " Komunitas Musik"

Sumber : Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

E. Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

F. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak Tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

MPD Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan khususnya Pendidikan dalam bidang agama islam yang diwujudkan dalam kurikulum Pendidikan diniyah mulai dari tingkat Pendidikan dasar sampai dengan menengah diseluruh wilayah Kota Banda Aceh, disamping itu peran lembaga ini juga memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

1. Tugas Pokok MPD

1) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan
2) Menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat
3) Memberi pertimbangan tentang kurikulum sekolah dan madrasah
4) Memberi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kota
5) Memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional
6) Mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan
7) Memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/ madrasah/ dayah menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan
8) Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/ madrasah
9) Meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota

2. Fungsi MPD

1) Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)

2) Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)
3) Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)
4) Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
5) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

3. Kewenangan MPD

1) Menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta
2) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan di kota
3) Mengembangkan sistem pendidikan islami di kota
4) Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
5) Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Diselenggarakan Sebelum Jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. dan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Perkembangan siswa PAUD di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut:

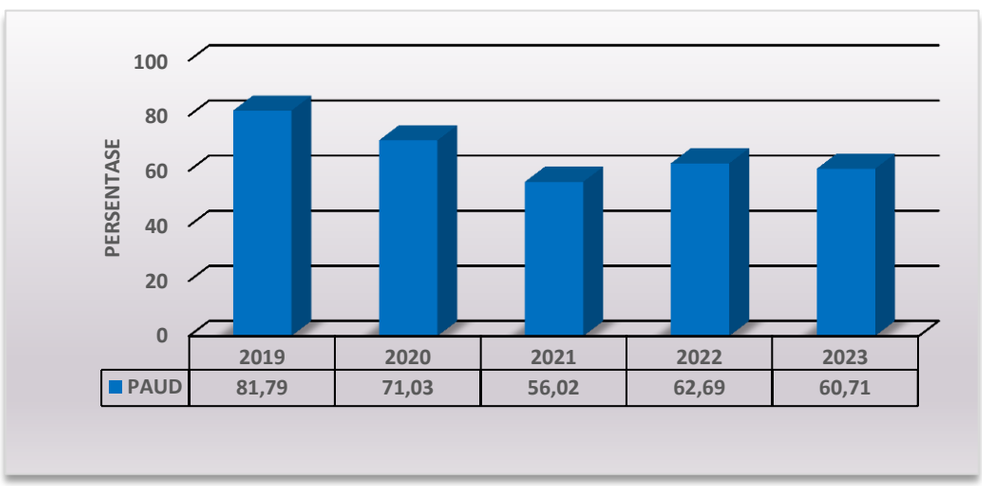

Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan partisipasi PAUD terus menerus mengalami fluktuasi perkembangan, penurunan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1). Masih adanya orang tua yang men-cuti-kan anaknya bersekolah PAUD disebabkan karena 2). Masih adanya PAUD yang dikelola oleh masyarakat belum memiliki izin Operasional sehingga peserta didik PAUD tidak terdata dalam aplikasi Dapodik. 3) Masih belum meratanya Taman Kanak-kanak Negeri pada kecamatan Kota Banda Aceh. 4) masih kurangnya pengawas/penilik PAUD baik jalur formal maupun non formal yang dapat memberikan pembinaan dan pengawasan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik capaian PAUD pada Tahun 2023 sebesar 60,71 persen akan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya.

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada Gambar 2.31 di bawah ini:

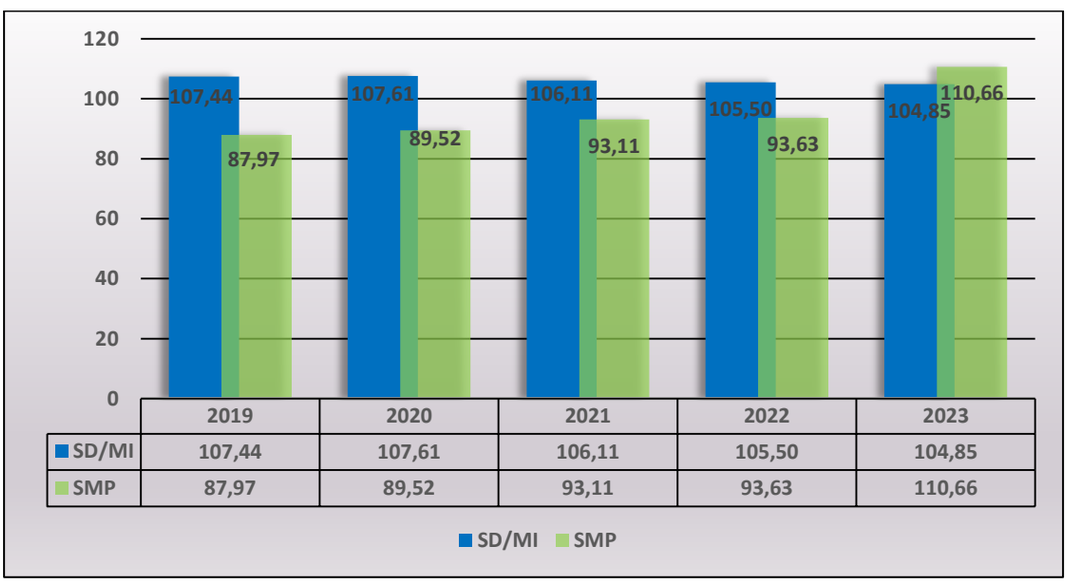

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2019–2023

Berdasarkan Gambar 2.31 diatas dapat diketahui bahwa APK di jenjang SD/MI di Kota Banda Aceh cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2018-2023. Pada tahun 2021 APK di jenjang SD/MI sebesar 106,11 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 105,50 persen. Status APK untuk jenjang SMP/MTS mengalami fluktuasi dari Tahun 2018-2022, dengan persentase terbesar berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 102,47 persen ,sedangkan di tahun 2023 APK di jenjang SD/MI. sebesar 104,64% dan APK SMP sebesar 110,66%.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat akhir suatu jenjang baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Tabel 2.31 menunjukkan APT di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 sebagai berikut ini:

Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
1)	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962
2)	Jumlah Siswa Tkt. VI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962
3)	APT SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs					
1)	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4.417	5.237	4.874	5.619	3.735
2)	Jumlah siswa Tkt. III	4.420	5.237	4.874	5.622	3.742
3)	APT SMP/MTs	99,93	100	100	99,98	99.81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.31 di atas dapat dilihat bahwa capaian angka pendidikan yang ditamatkan (APT) pada jenjang Sekolah Dasar telah tercapai 100 persen artinya semua Peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar di kota Banda Aceh menamatkan pendidikan pada tahun 2022. Akan tetapi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 angka pendidikan yang ditamatkan adalah sebesar 99,96 persen, hal tersebut disebabkan adanya sejumlah siswa yang tidak menamatkan pendidikan pada jenjang SMP sebanyak 3 (tiga) orang dan jumlah yang tidak mengikuti ujian sebanyak 4 (empat) orang.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota.

Gambar 2.33 berikut ini menggambarkan perkembangan APM untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023:

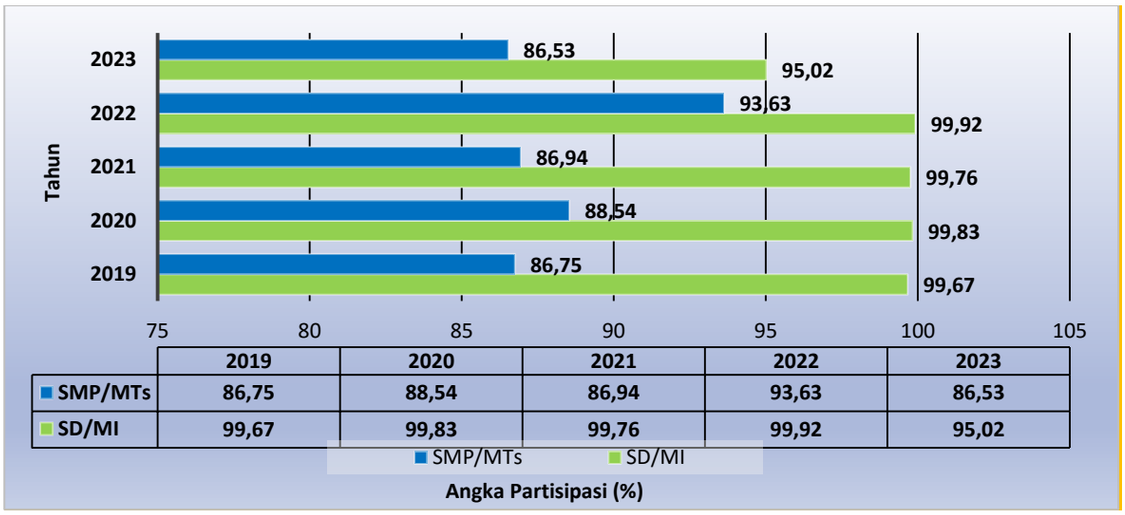

	2019	2020	2021	2022	2023
SMP/MTs	86,75	88,54	86,94	93,63	86,53
SD/MI	99,67	99,83	99,76	99,92	95,02

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.32 di atas dapat diketahui bahwa APM SD/MI cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, APM SD/MI sebesar 95,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Banda Aceh yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/MI pada Tahun 2023.

Sementara itu APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 APM SMP/MTs adalah 86.53 persen.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Tabel 2.31 berikut ini menunjukkan perkembangan APS di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	99,95	99,99	99,98	99,92	99.92
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	100,00	99,89	99,99	99,05	99.05

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Berdasarkan tabel 2.32 ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2023 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 99,92 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2023 mencapai 99,05 Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

6. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai

investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Pada tahun 2023 tidak ada lagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah**.**

7. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada jenjang tertentu. Standar rasio ketersediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah, semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi rasio akan semakin baik pencapaiannya. Rasio ketersediaan sekolah di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 dapat pada Gambar 2.33 di bawah ini:

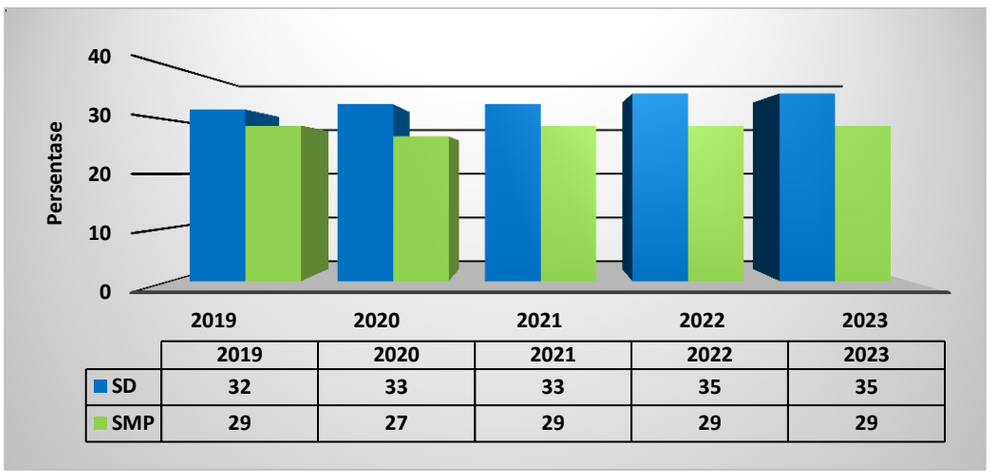

	2019	2020	2021	2022	2023
SD	32	33	33	35	35
SMP	29	27	29	29	29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan Gambar 2.33 di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah baik jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 35 artinya tiap 10.000 penduduk terdapat 35 gedung sekolah. Begitu juga dengan rasio ketersedian sekolah SMP/MTs memiliki rasio 29 gedung/10.000 penduduk. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia 13-15 tahun tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah secara signifikan serta adanya sekolah SMP swasta yang tutup karena tidak ada siswa yang mendaftar (SMP Swasta Cut Meutia).

8. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid, rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah tenaga pengajar, selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
b. untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;

c. untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
d. untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
e. untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;

Untuk mengetahui rasio guru/murid di Kota Banda Aceh selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.34 di bawah ini:

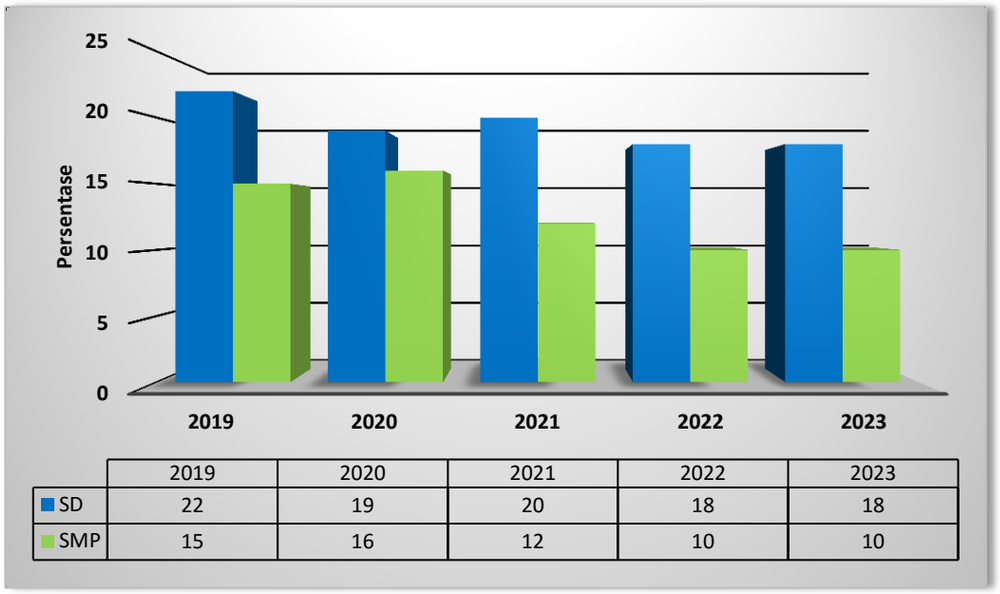

	2019	2020	2021	2022	2023
SD	22	19	20	18	18
SMP	15	16	12	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

Selama tahun 2019 hingga tahun 2023, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

9. Capaian Rapor Pendidikan

Capaian Raport pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 33 Capaian Raport pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi SD		Realisasi SMP	
		2023	2022	2023	2022
1	Literasi	68,69	60,66	74,94	70,38
2	Numerasi	46,07	30,47	45,03	44,20

3	Karakter	53,40	52,49	54,81	53,89
4	Kualitas Pembelajaran	65,69	58,93	62,27	59,94
5	iklim Kebhinekaan	68,66	59,73	67,97	60,99
6	Iklim Inklusivitas	55,59	52,22	54,87	53,07

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Dari Tabel 2.34 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Raport Pendidikan Kota Banda Aceh pada tahun 2023 untuk kemampuan Literasi mencapai 68.69 untuk Sekolah Dasar, dan 74.94 untuk Sekolah Menengah Pertama artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik untuk menjadi mahir. Kemampuan Numerasi, 46.07 untuk Sekolah Dasar dan 45.03 untuk Sekolah Menengaah Pertama kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan Indeks karakter 53,40 untuk Sekolah Dasar dan 54,81 untuk Sekolah Menengah pertama dapat dijelaskan bahwa peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang memegang penting dalam menjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik yang dimiliki oleh para guru. Dari data perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terus mengalami peningkatan. Perkembangan dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut:

Tabel 2. 34 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (Dalam Persen)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	86,96	89,07	90,59	96,99	86,84	Tidak termasuk Guru Depag

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;

2) kurangnya pengetahuan keluarga dalam mendeteksi resiko tinggi pada ibu hamil dan perawatan kesehatan pada bayi;

Sampai dengan tahun 2023 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 3,2 per 1000 kelahiran hidup, atau sebanyak 16 kasus yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.35 di bawah ini:

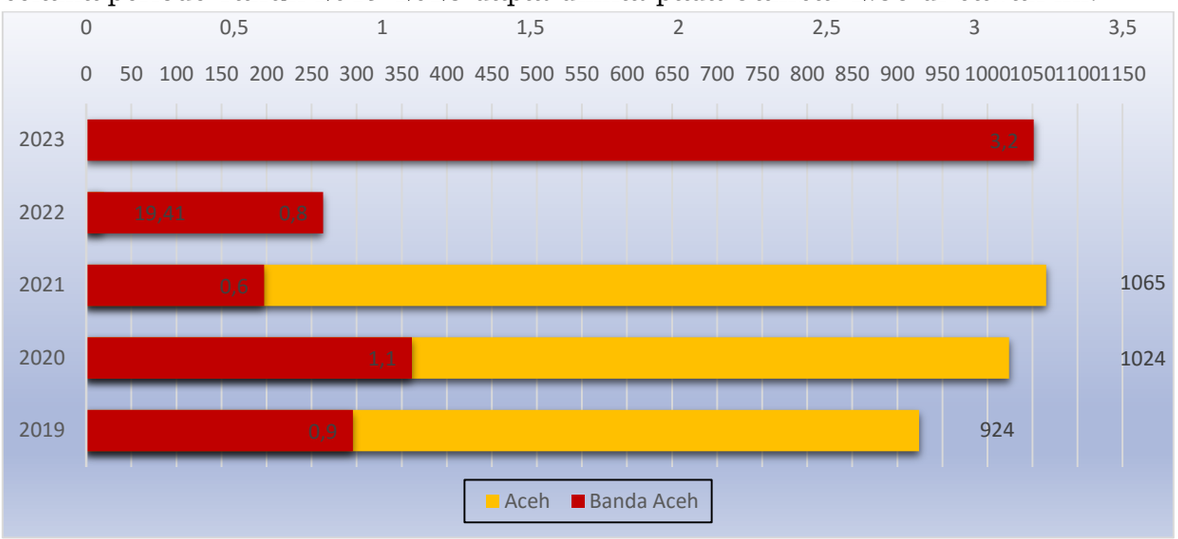

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.35 diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, peningkatan tersebut memerlukan perhatian dan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-AKB). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.36 di bawah ini :

Tabel 2. 35 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Capaian Setiap Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	1000 (KH) - angka kematian bayi (AKB)	998	998	999	999	997

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan menurun di tahun 2023, Adanya penurunan terhadap angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan di sebabkan oleh faktor Angka Kematian Bayi yang meningkat dimana pada tahun 2022 AKB 1,6 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2023 AKB 3 per 1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.36 di bawah ini:

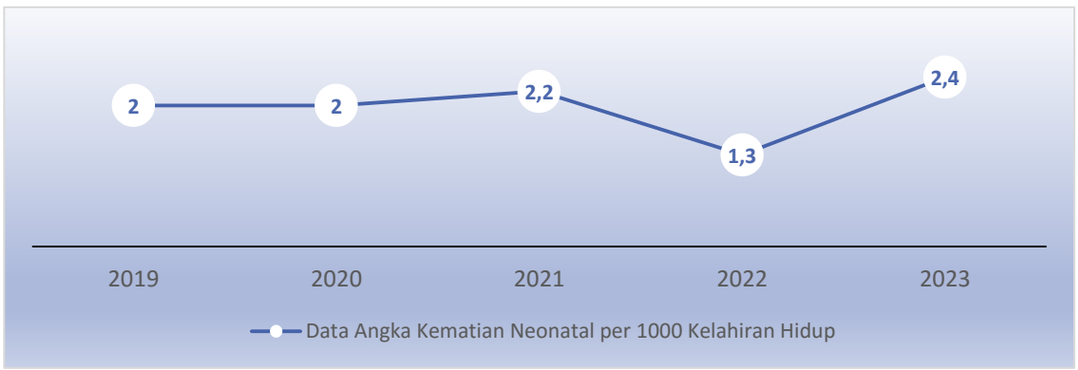

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.36 di atas, angka kematian neonatal di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 sebesar 2,4 per 1000 Kelahiran Hidup. Angka ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi angka kematian neonatal melalui program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian tablet zat besi dan vaksinasi suntikan anti tetanus.

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2023 sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, atau sebanyak 5 kasus. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya pemahaman ibu terhadap resiko kehamilan dengan penyakit penyerta, pemeriksaan rutin ANC serta multi gravida. Selain itu kematian ibu juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.37 di bawah ini:

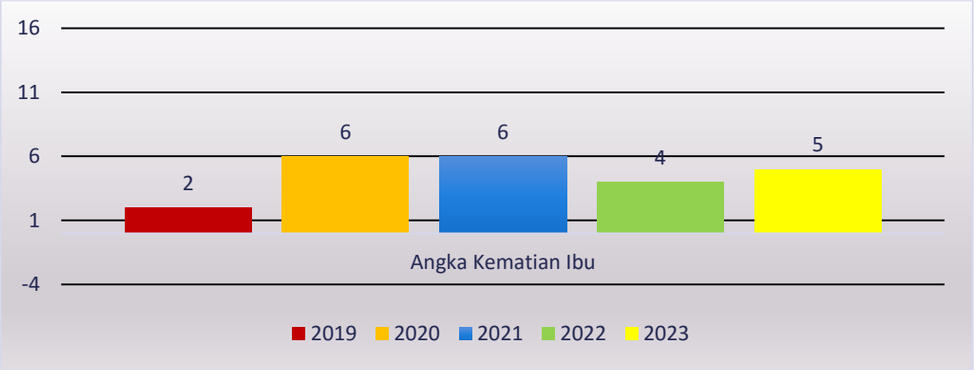

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. lmunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2. 36 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022	115	13.775	1 : 120
2023	114	11.887	1 :104

Sumber : Dinas Kesehatan Banda Aceh, 2024

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita tahun 2023 adalah 104 balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kurangnya parsipasi masyarakat untuk berkunjung ke posyandu membawa balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

6. Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk

Jumlah fasilitas kesehatan menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan dan sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud ialah ; Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, Pos KIA, Balai Pengobatan dan lain-lain. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut:

Tabel 2. 37 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum	13	13	14	14	14
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	114	114	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	39	39	54	54	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan.

Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit (Umum+Swasta)	13	13	14	14	15
Jumlah Penduduk	268,156	252,899	276,223	257,635	255.409
Rasio	1 : 21	1 : 21	1 : 18	1 : 17	1:25

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 39 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Praktik Dokter Perorangan	637	469	697	665	502
Jumlah Penduduk	270.321	252.899	255.029	257,635	257.313
Rasio/100.000 penduduk	1 : 42	1 : 53	1 : 36	1 : 39	1 : 512

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah cukup memadai, 1 orang dokter melayani 514 penduduk di tahun 2023.

9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan bagi si anak yang dikandungnya, menjaga kesehatan dan asupan makanan bergizi adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilupakan oleh ibu hamil. Berbagai masalah kesehatan dapat dialami oleh ibu hamil, dan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat saja hal tersebut mengganggu kesehatan baik si ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Beberapa ibu hamil dapat tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) atau mengalami komplikasi dalam kehamilan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu indikator kinerja bidan. Untuk mengetahui cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.38 dibawah ini:

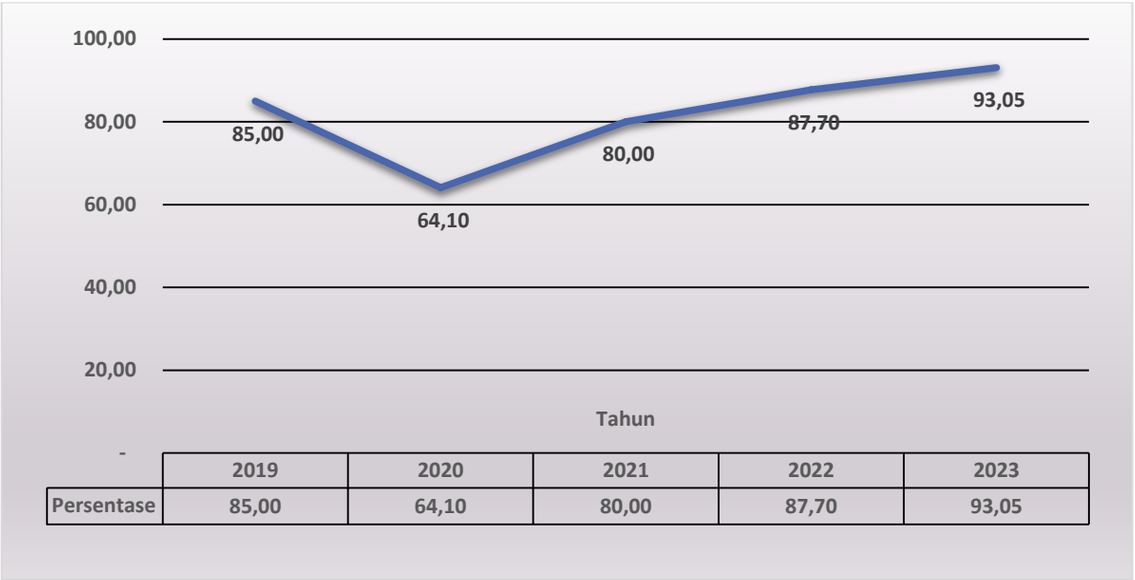

	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase	85,00	64,10	80,00	87,70	93,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.38 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019-2023, cakupan ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 85%, pada Tahun 2020 sebesar 64,10%. Pada tahun 2021 sebesar 80,00 %, dan pada tahun 2022 cakupan komplikasi kebidanan di kota Banda Aceh sebesar 87,70 %, dan pada tahun 2023 sebesar 93,05% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kondisi ini masih belum tercapai maksimal mengingat target yang ditetapkan adalah sebesar 100%, atau hanya tercapai 87 %. Hal ini menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kebidanan yang adekuat dan penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan.

10. Cakupan Desa/ Gampong *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian *Universal Child Imunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bulan) yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan campak. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI secara merata pada bayi di seluruh gampong. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap jumlah gampong UCI dari Tahun 2019-2023 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut ini:

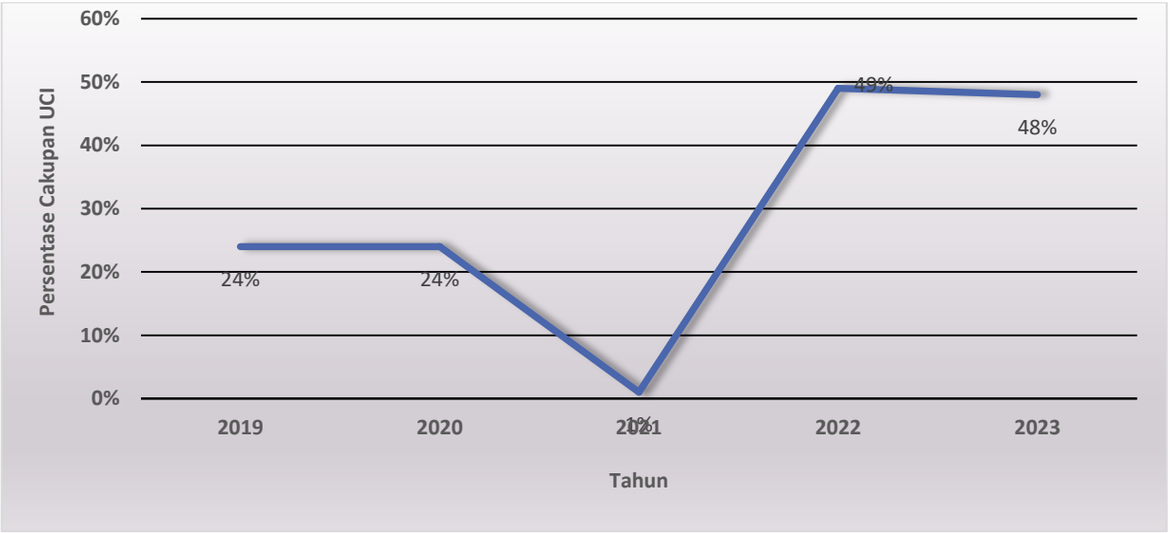

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2023 Kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.39 diatas, dari Tahun 2019-jumlah gampong yang telah melaksanakan UCI bagi bayi 0-11 bulan mengalami penurunan drastis, terutama pada tahun 2021 dimana masih terjadi pandemi covid 19 dan tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 49% akan tetapi tahun 2023 menurun sedikit menjadi 48%. Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan imunisasi sampai ke seluruh gampong di Kota Banda Aceh perlu terus diupayakan, namun terkendala kurangnya keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap bagi balita dikarenakan faktor isu kehalalan vaksin. Hal ini untuk memastikan target minimal 80 persen bayi yang ada di seluruh gampong telah mendapatkan lima inumisasi dasar lengkap sesuai yang diisyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

11. Stunting

Stunting yang sering disebut kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standard deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penyebab dari masalah stunting berhubungan dengan empat faktor yaitu akses terhadap pangan bergizi, praktek pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan serta akses terhadap kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan penyebab tidak langsungnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Kota Banda Aceh sejak tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Lokasi Fokus (Lokus) prioritas percepatan penurunan stunting dalam rangka mendukung target nasional sebesar 16 persen pada tahun 2023. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting Kota Banda Aceh sebesar 23,4 persen, terendah se-Provinsi Aceh. Namun pada akhir tahun 2022 hasil SSGI Kota Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 25,1 persen. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melalui pencatatan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yakni sebesar 9,53 persen pada Desember 2023.

Untuk mengetahui persentase stunting di Kota Banda Aceh tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 40 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Balita	Stunting	Persentase (%)
2019	20.846*)	211*)	1.01
2020	17.922	197	1.10
2021	21.699	186	0.85
2022	13.533	864	7.13
2023	11.887	953	9.53

Sumber: Laporan Rutin dan Survey EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2018-2019 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2.40 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan stunting, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor, mengingat sasaran penanganan stunting dimulai sejak remaja putri sampai dengan bayi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Tingginya angka stunting juga berkaitan dengan kemiskinan, walaupun kemiskian dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan secara konvergen.

12. Cakupan Imunisasi Campak Bayi

Salah satu penyakit yang termasuk ke dalam golongan PD3I (Penyakit Menular yang dapat di Cegah dengan Imunisasi) adalah campak. Penyakit campak (*Measles*) adalah salah satu penyakit yang sangat menular. Cakupan imunisasi campak pada bayi Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.40.

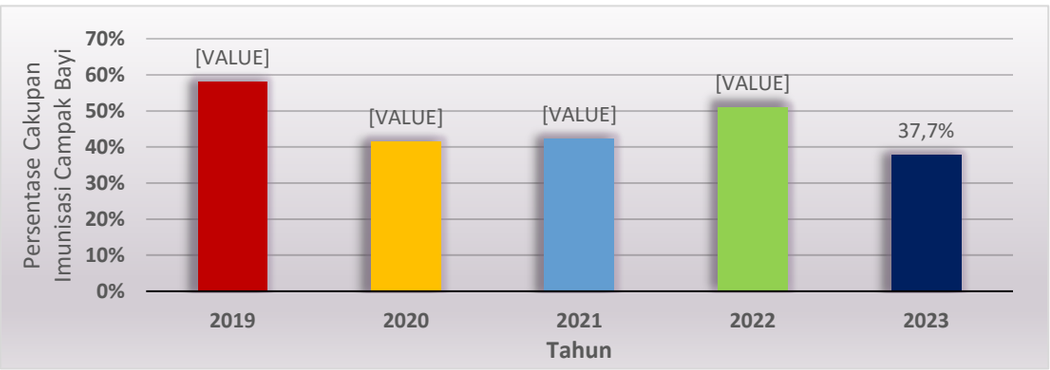

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2023

Pada Gambar 2.40 di atas dapat dilihat bahwa tidak semua bayi yang ada di Kota Banda Aceh telah mendapatkan imunisasi campak. Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi campak mulai terjadi peningkatan akan tetapi di tahun 2023 kembali turun menjadi 37.7%. Penurunan cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan orang tua untuk melakukan imunisasi campak pada bayi dan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas kehalalan bahan imunisasi dan kekhawatiran orang tua terhadap efek demam pasca pemberian imunisasi. Cakupan imunisasi campak sangat penting untuk mencegah penyakit ini dan menutup kesenjangan sehingga tidak ada daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata

minimal 95% dapat membentuk herdimmunity dan memutus rantai penularan penyakit campak.

13. Jumlah Kasus Campak

Campak yang juga dikenal dengan sebutan *Morbili* atau Measles, merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau mata merah (*conjunctivitis*). Penyakit ini sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini tidak bisa diobati, namun pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif. Tapi, penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut Gambar 2.41 memperlihatkan jumlah kasus campak di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*

Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2019-2023

Gambar 2.41 menunjukkan jumlah kasus campak berfluktuasi dari Tahun 2018-2022, dimana lonjakan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan jumlah kasus 468 kasus. Tahun 2023 terjadi penurun kasus menjadi 272 kasus dengan insiden rate suspek campak sebesar 104.5 persen per 100.000 penduduk.

14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. TB menyebar melalui udara dan menularkan kepada orang lain dan apabila tuberkulosis laten tidak mendapatkan pengobatan maka lebih dari 50% dapat menyebabkan kemataian. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjaringan terhadap terduga pasien TB. Pemeriksaan fisik dan laboratoris dilakukan untuk menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB.

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

1. Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)
2. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).

Dari Tabel 2.41 berikut dapat dilihat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada periode Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB(%)	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)
2019	8.647	84%	255	97,90%
2020	664	83%	147	91,70%
2021	4.069	7.017	435	81,32%
2022	10.754	89%	623	93,49%
2023	11.856	84%	1361	99.8%

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.41 diatas merupakan cakupan penemuan dan penanganan TB di Aceh dan Banda Aceh. Berdasarkan isi tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 angka penemuan kasus TB di Provinsi Aceh terjadi peningkatan yang cukup tinggi dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dilaporkan ada 4.069 kasus meningkat menjadi 10.754 kasus pada tahun 2022 dan embali meningkat pada tahun 2023 sebesar 11.856. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan TB di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh cenderung lebih kecil.

Cakupan penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Peningkatan penemuan kasus pada tahun 2022 sampai dengan 2023 disebabkan karena sistem penjaringan kasus TB di sarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara pasif (sistem menunggu di layanan kesehatan) menjadi aktif (sistem mencari langsung ke masyarakat).

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 sebesar 93,49 persen meningkat menjadi 99,8% persen pada tahun 2023 . Data diatas menunjukkan bahwa target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu 80 persen. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien dan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui Pemberian Makanan Tambahan pada pasien.

15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tahun 2023 angka kematian akibat tuberkulosis sebesar 5,3%. Angka tersebut 5,3% dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,4%. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh mencapai 90,69%, sisanya masih dalam proses pengobatan. Namun pada tahun 2022 ditemukan kasus meninggal pada pasien TB dengan penyebab meninggal bermacam-macam antara lain TB dengan penyakit lain seperti TB dengan DM, TB Resisten Obat dengan berbagai komplikasi, tuberkulosos resistem obat dan lain-lain Perilaku atau pola hidup pasien serta adanya komplikasi dengan penyakit lainnya menjadi faktor pendorong terjadinya kasus kematian, juga peran pemerintah terkait dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ (Bahan Tahan Asam) dengan selalu tersedianya obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring pelayanan TB yang baik dimana akan terlayani pasien kemanapun pasien pindah baik pindah kabupaten maupun provinsi.

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan

karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 2. 42 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Orang)

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Kuta Alam	49	14	3	44	3
Lueng Bata	34	9	1	22	20
Meuraxa	41	11	4	75	61
Syiah Kuala	60	15	1*	26	29
Ulee Kareng	36	6	2*	22	25
Banda Raya	31	14	6*	61	36
Jaya Baru	42	15	0	58	24
Kuta Raja	13	2	0	19	17
Baiturrahman	38	12	2*	39	23
Total	**344**	**98**	**19***	**366**	**269**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Masih tingginya kasus DBD di Kota Banda Aceh tahun 2023 masih dipengaruhi tingginya curah hujan diawal tahun dan akhir tahun 2023 serta kurangnya kebersihan lingkungan, sedangkan upaya yang dilakukan masih sebatas pengasapan atau *fogging* yang hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik serta kegiatan gotong royong Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus yaitu Menguras bak mandi atau membersihkan genangan air, Menutup tempat tempat penampungan air, Mendaur ulang barang bekas plus menghindari gigitan nyamuk.

Berikut pada Gambar 2.42 dapat dilihat kasus kematian DBD di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

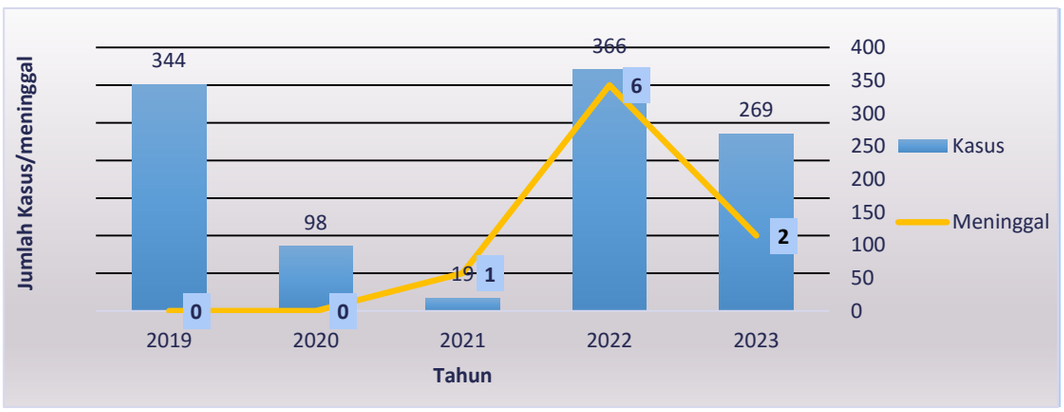

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sangat memuaskan yakni 100%, hal ini disebabkan karena DBD merupakan penyakit musiman yang dapat dicegah melalui pola hidup bersih dan sehat, dilaksanakan melalui promosi kesehatan lingkungan yang terus menerus.

Adapun kasus DBD tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 366 kasus meningkat drastis dari tahun sebelumnya dan kematian akibat DBD sebanyak 6 kasus disebabkan karena pasien terlambat melapor untuk berobat ke fasilitas kesehatan sehingga terlambat mendapatkan penanganan karena menganggap hanya demam biasa. Pada tahun 2023 jumlah kasus DBD mengalami penurunan menjadi 269 kasus dengan kasus kematian yang disebabkan oleh DBD sebanyak 2 kasus.

17. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah Kesehatan yang menjadi fokus pemerintah, karena penyakit ini masih sering timbul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB) dan disertai dengan angka kematian yang tinggi. Diare juga menjadi salah satu penyebab sebagian besar kematian pada anak usia dibawah lima tahun di Indonesia. Berikut akan tersedia data terkait Penderita Diare yang Ditangani di Kota Banda Aceh, dimana Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Puskesmas. Berikut pada Gambar 2.43 dapat dilihat penderita diare yang ditangani di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

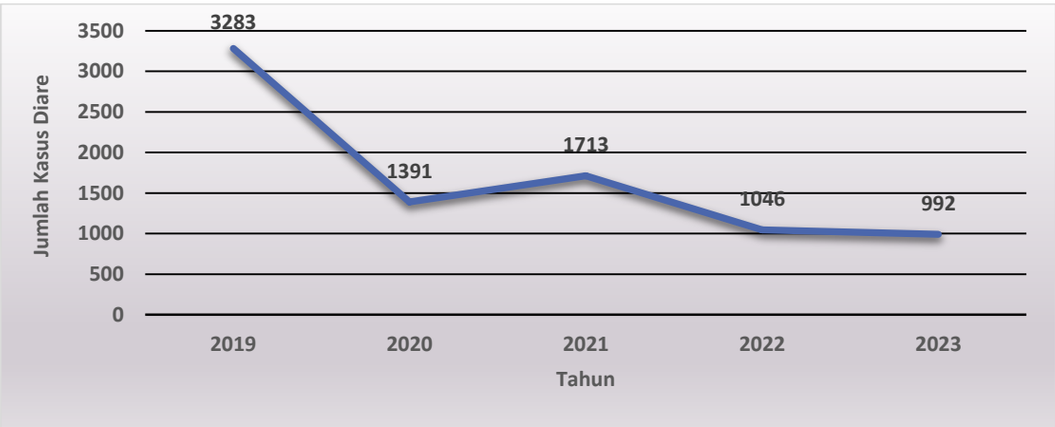

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.43 terjadi peningkatan jumlah penderita diare kategori semua umur yang ditangani dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019, namun tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2022 mengalami tren penurunan kecuali sedikit peningkatan pada tahun 2021. Angka-angka tersebut di atas merupakan angka penderita yang dilayani oleh 11 Puskesmas. Penderita Diare umur Balita diberikan Oralit dan Zinc, sedangkan penderita Diare umur >5 tahun diberikan Oralit sesuai standar penanganan Diare dan terapi simptomatis lainnya.

18. Angka Kesakitan Malaria *(Annual Parasit Incidence)*

Malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang mengandung *Plasmodium* didalamnya. Penyakit ini harus ditangani dengan cepat, karena dapat menimbulkan komplikasi dan menyebabkan kematian. Prevalensi Malaria atau Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*) dihitung dari banyaknya kasus malaria yang baru dengan yang lama dibagi jumlah penduduk di wilayah Kota Banda Aceh. Angka Kesakitan Malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas atau tingkat penularan malaria

di suatu daerah. Kasus malaria yang dimaksud disini adalah kasus malaria dengan diagnosa positif yaitu kasus dengan gejala klinis malaria.

Kota Banda Aceh bukan wilayah endemik malaria, beberapa kasus yang ditemukan bukan terjangkit di Banda Aceh tetapi dari wilayah lain. Namun untuk pelayanan terhadap malaria tetap tersedia pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam bentuk surveillance.

19. Jumlah Kasus Baru HIV

HIV (*Human Immunodefiency Syndrome*) menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodefiency Syndrome* (AIDS) dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, beresiko, jarum suntik yang digunakan bersama, produk darah dan cairan tubuh serta dari ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada bayinya. Berikut pada Tabel 2.43 dapat dilihat jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023 :

Tabel 2. 43 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kelompok Umur	H I V				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun								
2	5 - 14 Tahun		1	1	1.01%				
3	15 - 19 Tahun	4		4	4.04 %				
4	20 - 24 Tahun	27	1	28	28.2%	7		7	17.07%
5	25 - 49 Tahun	60	5	65	65.6%	31	1	32	78.04%
6	≥ 50 Tahun	1		1	1.01%	2		2	4.87%
Jumlah		92	7	99	**100**	**40**	**1**	**41**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Kegiatan pengendalian HIV/AIDS untuk menghentikan epidemi AIDS di Kota Banda Aceh diperlukan untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, serta peningkatan upaya penyebaran atau penularan penyakit. Untuk itu ditetapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah dan swasta dapat memeberikan layanan perawatan dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS dengan tetap memegang prinsip kerahasiaan pasien.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan sudah berbasis hak seluruh masyarakat sehingga tidak membedakan lagi berdasarkan tingkat sosial ekonominya. Berikut pada Gambar 2.44 dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :

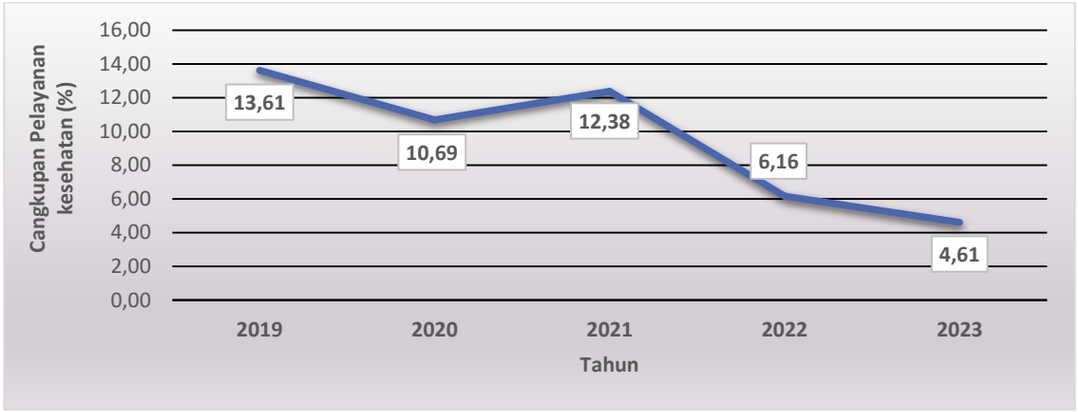

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.44 di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin menunjukkan tren yang menurun. Jumlah tertinggi penderita yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 13,61 persen dan terendah pada Tahun 2023 sebanyak 4.61 persen. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10.69 persen. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 12.38 persen namun tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 6.16 persen yang dapat diasumsikan karena jumlah penderita masyarakat miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terjadi penurunan sebesar 4.61. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Namun demikian pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani dengan baik.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Panjang ruas jalan dibedakan berdasarkan status/kewenangan pembinaannya yang dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota. Jalan Nasional pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Jalan Provinsi pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas PUPR Propinsi Aceh), dan Jalan Kota yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas PUPR Kota Banda Aceh). Dari Tabel 2.45 berikut dapat dilihat panjang ruas jalan berdasarkan status di Kota Banda Aceh Tahun 2023:

Tabel 2. 44 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023

Status Jalan		
Nasional (Km)	**Provinsi (Km)**	**Kota (Km)**
32,56	22,61	620,960

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.44 di atas dapat dilihat dari total panjang ruas jalan nasional, yang termasuk jalan provinsi sebesar 22,61 Km dan jalan Kota Banda Aceh sebesar 620,960 Km. Kondisi ruas jalan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan yang baik/ rusak merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efiensi waktu), kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan Jalan. Pada Tabel 2.46 berikut ini dapat dilihat status kondisi jalan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 45 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Aceh									Banda Aceh								
	Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak		Belum Tembus		Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		km	%	Km	%	Km	%	Km	%		km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2019	1781,72	1.297,35	72,81%	72,03	4,04%	363,14	20,38%	49,2	2,76%	707,343	558.634	78,98	101.646	14,37	42.365	5,99	4.698	0,66
2020	1781,72	1.321,82	74,19%	92,14	5,17%	312,16	17,52%	55,6	3,12%	620.960	585.887	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	1781,72	1.155,51	64,85%	208,42	11,70 %	361,1	20,27%	56,69	3,18%	620.960	593.338	95,55	17.891	2,88	7.805	1,26	1.926	0,31
2022	1781,72	1.391,21	78,08%	112,72	6,33%	221,4	12,43%	56,39	3,16%	620.960	597.338	96,2	15.891	2,56	6.805	1,1	0,64	0,15
2023	1781,72	1.439,46	80,79%	95,15	5,34%	189,52	10,64%	57,59	3,23%	620.960	495.250	79,76	77.480	12,48	36.355	5,86	11.875	1,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.45 diatas dapat diketahui bahwa kondisi jalan Provinsi Aceh dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terus meningkat menjadi lebih baik. Namun, pada tahun 2021 kondisi jalan di Provinsi Aceh menurun 9,34% dibandingkan tahun 2020, dan pada tahun 2023 kondisi jalan dalam status baik kembali meningkat dan lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data dalam tabel tersebut, kondisi jalan di Kota Banda Aceh jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan jalan Provinsi Aceh. Dapat dilihat pada tahun 2023 jalan dengan kondisi baik di Kota Banda Aceh sebesar 79,76% berbeda 1,03% dari jalan Provinsi Aceh.

Tabel diatas juga menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 79,76 persen dalam kondisi baik, 12,48 persen dalam kondisi sedang 5,86 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 1,91 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 79,76 persen.

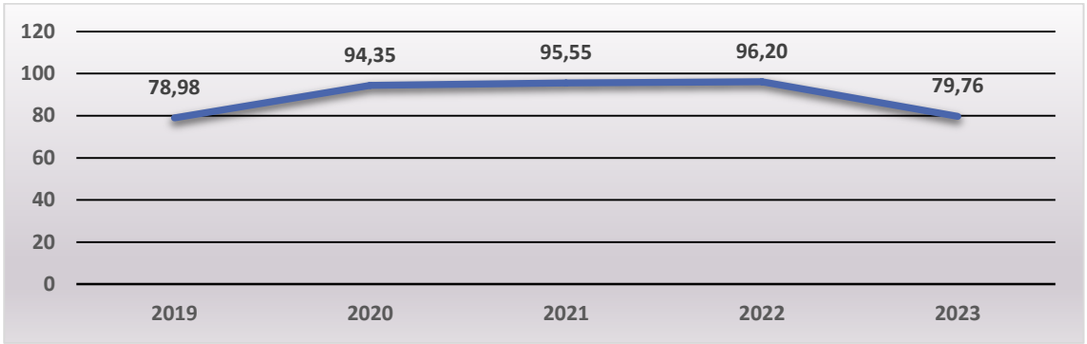

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023

Gambar 2.45 di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terus menunjukkan peningkatan. sedangkan pada tahun 2023 trend Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan persen. Hal ini disebabkan karena penyesuaian data dengan survey kondisi jalan Kota Banda Aceh tahun 2023.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sama sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100 meter dengan persentase meningkat sebesar 0,02 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2. 46 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59,435	59,435	59,435	59,435	59,535
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	620,960	620,960	620,960	620,960
Persentase	8,40	9,57	9,57	9,57	9,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota. Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.47 di bawah ini:

Tabel 2. 47 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi						59.848	59.848	59.998	60.227	60.490
Jumlah rumah tinggal						65	68.507	68.507	68.023	63.768

Persentase	73,16	77,06	77,55	77,48	78,85	91,68	87,36	87,58	88,54	94,98%

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024 (II-99&II-100), Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel 2.47 terlihat bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung sama dengan persentase 77%. Namun, jika dilihat dari tahun 2019 sampai 2022 persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh mengalami peningkatan 4,32%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Banda Aceh lebih besar dibandingkan Provinsi Aceh meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 di Kota Banda Aceh.

Berikut pada Gambar 2.46 dapat dilihat Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023:

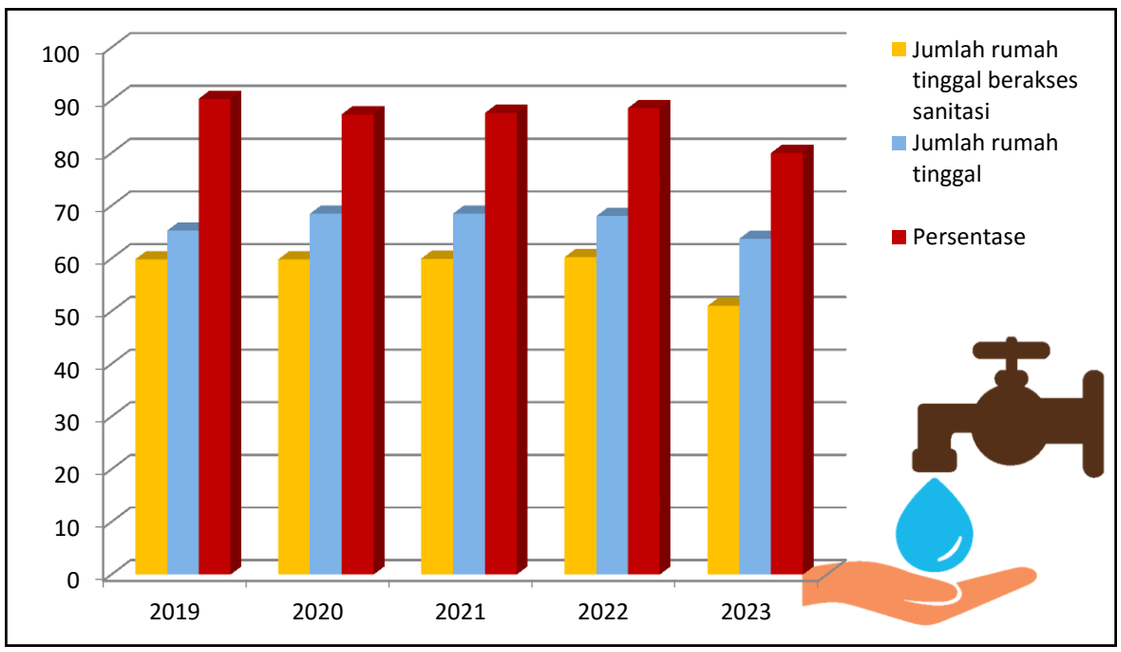

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.46 persentase rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2019 mencapai 90,3 persen. Namun pada tahun 2022, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi menurun menjadi 88,54 persen. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen.

3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pengembangan sistem drainase di Kota Banda Aceh harus mempertimbangkan kondisi geografis yang relatif datar dan berada pada kawasan pesisir sehingga Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai. Rata-rata kondisi topografi berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut dan memiliki bentuk permukaan lahan relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8 persen. Pengembangan sistem drainase juga harus mempertimbangkan kondisi daratan yang merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Sungai Krueng Aceh mengalir melalui Kota Banda Aceh dan memiliki anak sungai seperti Krueng Daroy, krueng Doy dan Krueng Neng yang berfungsi sebagai saluran drainase alam yang menjadi

outlet dari saluran-saluran drainase yang ada. Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut ini:

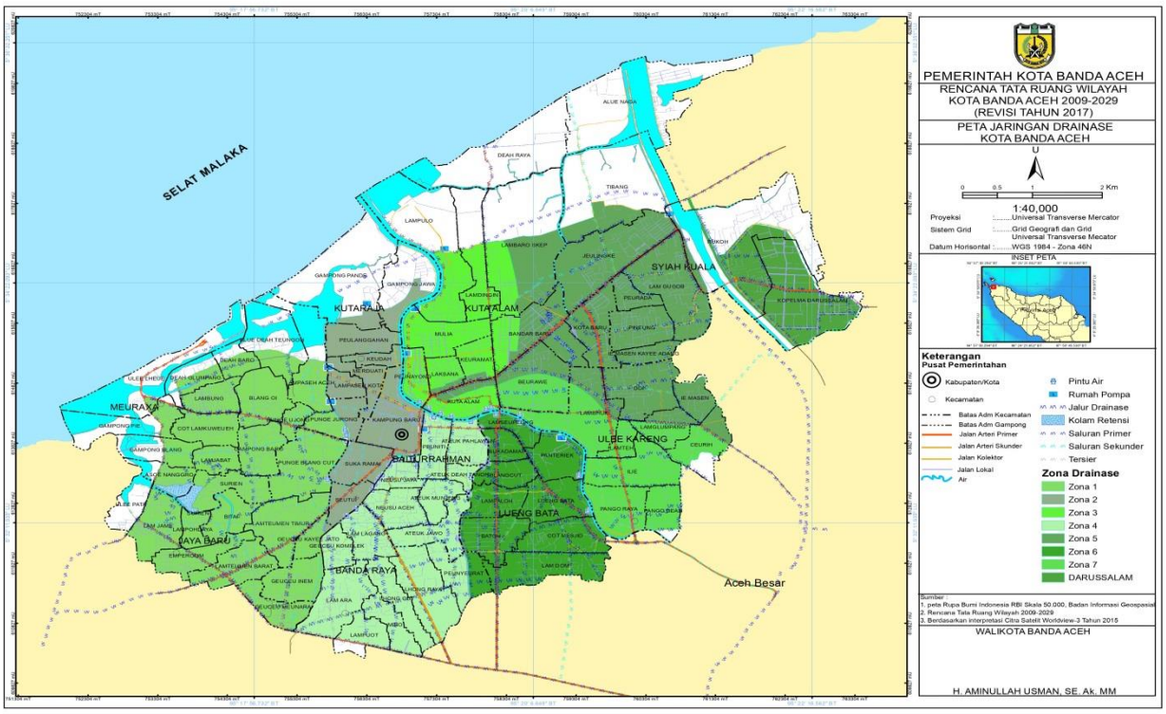

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Akibat kondisi topografi yang relatif datar, Kota Banda Aceh sangat rentan terhadap banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut. Oleh karena itu diperlukan saluran drainase yang baik. Untuk lebih jelasnya kondisi drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.48:

Tabel 2. 48 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang total (km)		Kondisi drainase					
			Baik		rusak ringan		rusak berat	
	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder
2019	189,7	2260,39	159,46	1769,64	5,8	45,941	22,95	440,82
2020	190,3	2262,55	160,48	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2021	191,2	2262,55	161,83	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2022	193,7	2262,55	164,34	1861,87	6,32	45,858	22,95	350,83
2023	194,05	2262,55	168,11	1683,79	12,46	337,38	13,48	241,38

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 di atas dapat dilihat bahwa panjang total drainase primer dan sekunder mengalami peningkatan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 panjang total drainase primer adalah 194,05 km yang mengalami penambahan panjang. Begitu juga dengan panjang total drainase sekunder di Tahun 2023 sepanjang 2.262,55 km yang bertambah panjang dari Tahun 2019. Panjang saluran drainase primer di Kota Banda Aceh pada Desember 2023 adalah 194,05 Km. Dengan rincian kondisi drainase dalam kondisi baik sepanjang 168,11 Km, drainase dalam rusak ringan 12,46 km dan rusak berat sepanjang 13,48 Km. Panjang saluran sekunder di Kota Banda Aceh pada Desember 2023 adalah 2262,55 Km. Dengan rincian kondisi drainase dalam kondisi baik sepanjang 1,683,79 Km.

drainase dalam kondisi rusak ringan 337,38 km dan rusak berat sepanjang 241,38 Km

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Adapun Sistem teknis drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak hanya meliputi jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local saja. Namun juga penanganan terhadap bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik dengan jaringan saluran drainase.

Dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang perlu pertimbangan seperti pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut. Pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pompa.

Pembagian zonasi drainase ini dilakukan berdasarkan sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Pembuangan akhir dari drainase pada zona 1 diarahkan menuju Kr. Neng dan Kr. Doy, Zona 2 menuju Kr. Aceh dan Kr.Doy. Zona 3 menuju Kr. Aceh, Zona 4 menuju Kr. Daroy dan Kr. Lueng Paga, Zona 5 menuju Kr. Titi Panyang dan Kr. Cut, Zona 6 menuju Kr. Lueng Paga dan Kr. Tanjung, Zona 7 dan Zona 8 menuju Kr. Aceh dan Kr. Cut. Tabel 2.49 menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 49 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59.435	59.435	59.435	59.435	59,535
Panjang seluruh jalan kota (km)	707.343	620.960	620.960	620.960	620,960

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.49 di atas, perbandingan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada Tahun 2022 sebesar 59.435 km. Panjang seluruh jalan kota pada Tahun 2022 sebesar 620.960 km. Namun, angka ini masih rendah dan perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang masih harus ditingkatkan.

4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak, kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menaikan muka air dan menjaga adanya *intrusi* air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air

yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin;
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan;
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh;
- Melakukan koordinasi dengan Pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di Bawah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu.

Untuk mendukung terlaksananya sistem penyediaan air minum dengan baik, maka sistem pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat. Salah salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksana dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

Peta rencana zona wilayah pelayanan teknis PDAM Tirta Daroy dan Peta rencana jaringan air bersih Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.48 dan 2.49:

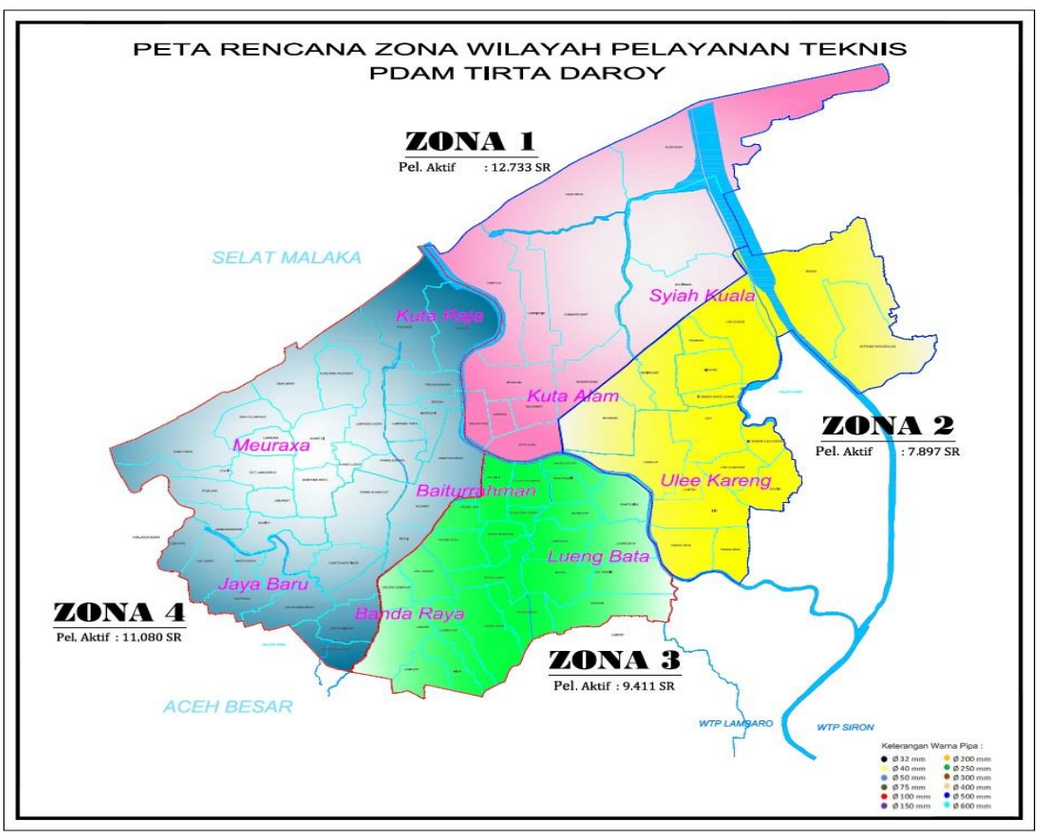

Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya

intrusi air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m³/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m³/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya kebadan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.

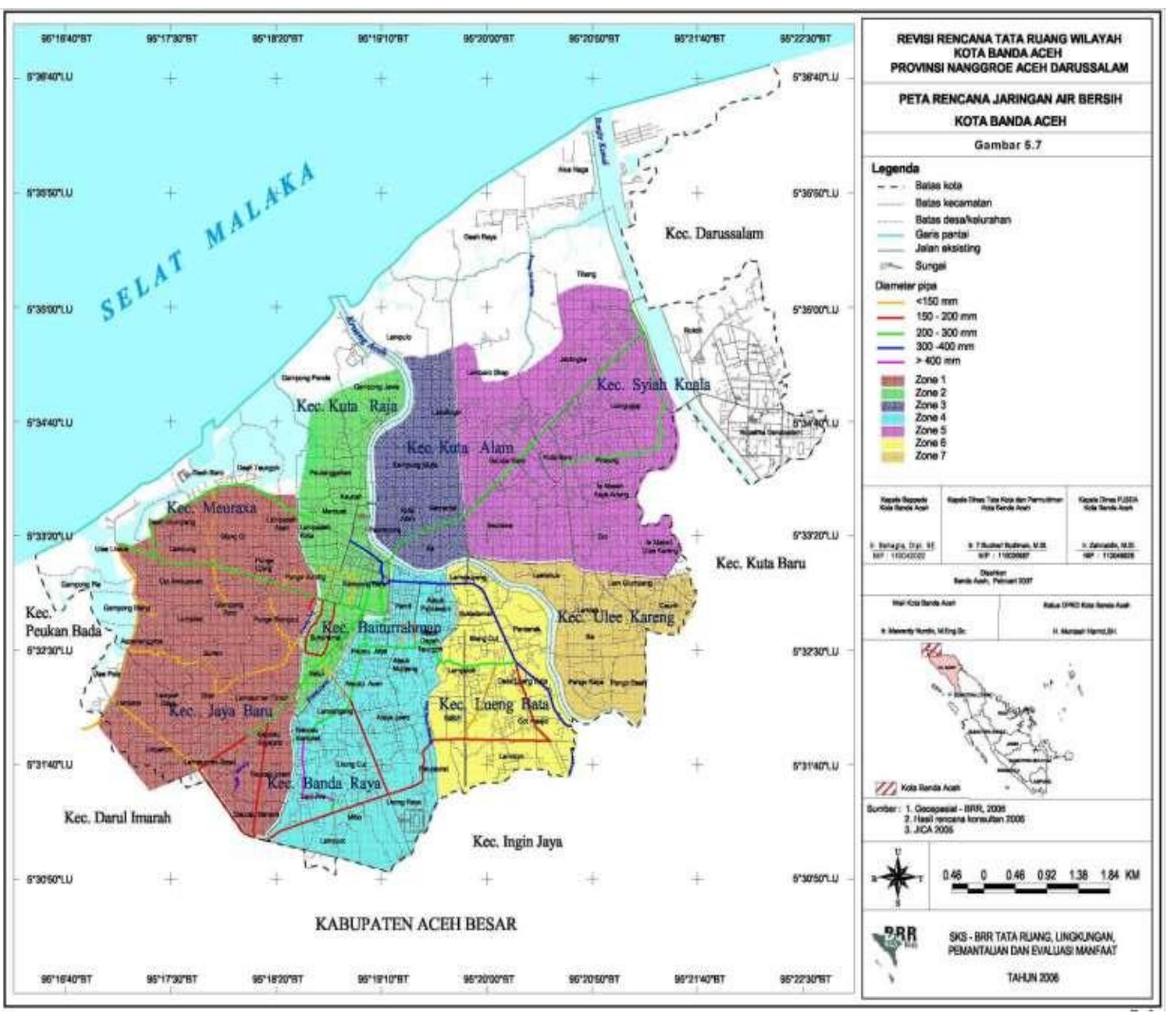

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Data Tahun 2019-2023 menunjukkan persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh telah mencapai 99,34 persen. Walaupun persentase menunjukkan kenaikan namun cakupan layanan ini belum mencapai 100 persen. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu untuk memberikan cakupan layanan air minum kepada penduduknya sampai dengan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.50 berikut:

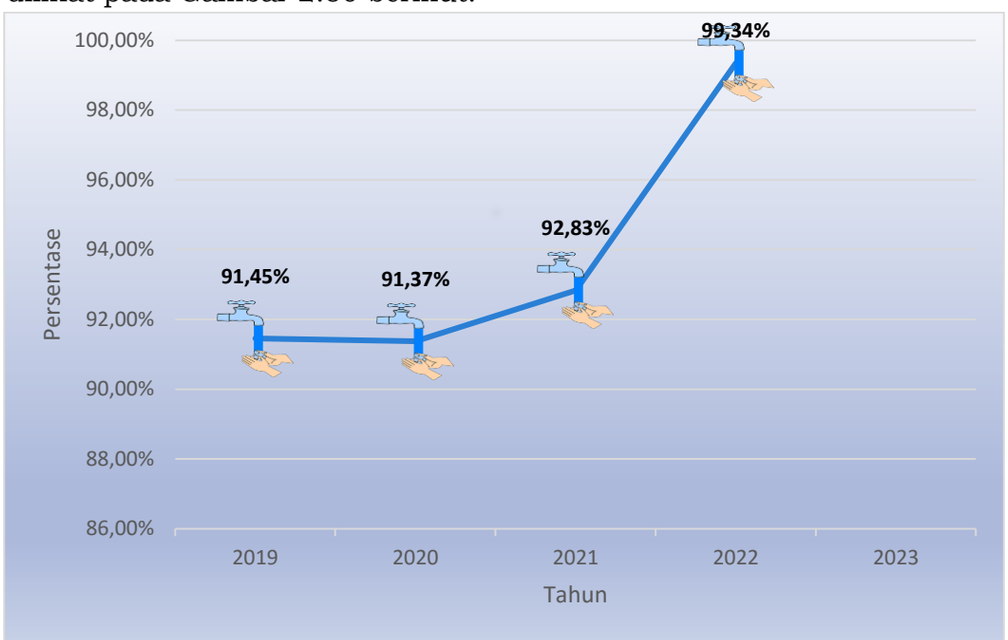

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, 2023

Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

5. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebanyak 76.753 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ±60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber-IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini:

Tabel 2. 50 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	53.555	55.108	56.271	57.395	57,764
2	Jumlah Bangunan	72.536	74.139	75.650	76.753	77,377
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	73,60	74,20	74,43	74,78	74,65

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Rasio bangunan ber-IMB Tahun 2019 hingga 2023 di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat Gambar 2.51 berikut ini:

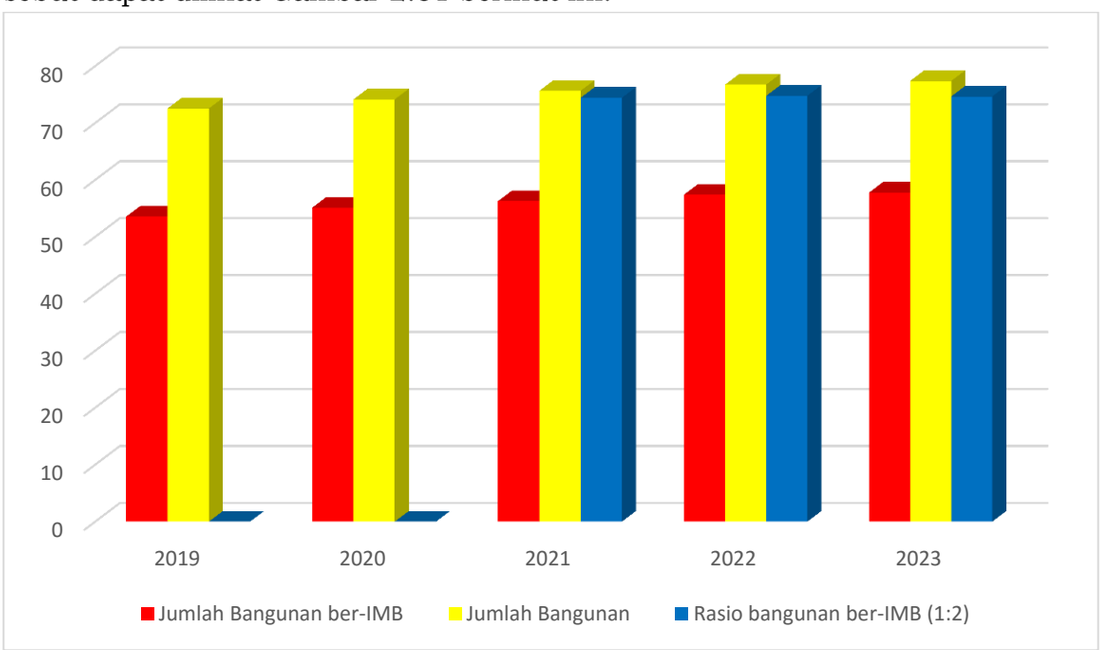

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 2.50 dan Gambar 2.51 di atas dapat dilihat persentase jumlah bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Artinya 74,65 persen jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah memiliki izin bangunan. Meski terjadi peningkatan pada persentase ini, pemerintah Kota Banda Aceh tetap perlu melakukan pengawasan agar terciptanya tata letak bangunan di Kota Banda Aceh yang teratur dan nyaman.

6. Ketaatan terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap *stakeholder*, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW. Rasio ketaatan masyarakat terhadap RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut:

Tabel 2. 51 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi RTRW	73,83	78,57	81,07	81,18	81,28
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,74	0,79	0,81	0,81	0,81

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.51 di atas menunjukkan dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 realisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi melalui perizinan IMB, pengawasan dan penertiban secara rutin oleh Tim Pengawasan Bangunan di Dinas PUPR. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang rencana tata ruang kota yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta mendukung kesehatan penghuninya. Meningkatnya kebutuhan rumah di Kota Banda Aceh dipicu oleh kondisi Kota Banda Aceh yang terus berkembang terutama bidang pendidikan, perekonomian dan jasa, yang kemudian menstimulasi perpindahan penduduk dari luar Kota Banda Aceh. Hal ini kemudian berdampak pada kebutuhan rumah yang tinggi di Kota Banda Aceh**.**

Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting**.** Hingga saat ini, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Banda Aceh sudah cukup tinggi. Tabel dibawah ini merupakan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam rentang waktu 2019-2023.

Tabel 2. 52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah						67.613	68.507	54.689	54.689	54.689
Jumlah Rumah Layak Huni						65.852*)	64.314	50.424	50.574	50.771
Persentase	73,9	60,5	78,8	63,5		97,40	93,88	92,2	92,48	92,84

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024 (II-116), Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024

Ketersediaan rumah layak huni di Provinsi Aceh pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Dapat dilihat dari tabel pada tahun 2020 ketersediaan rumah layak huni di Aceh menurun 16,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar 73,9%. Tahun 2021 presentase rumah layak huni kembali naik menjadi 78,8% dan di tahun 2022 kembali turun di angka 63,5%. Jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh, presentase ketersediaan rumah layak huni di Provinsi Aceh sangat jauh dibawah Kota Banda Aceh dengan perbedaan 28,98% pada tahun 2022.

Jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Banda Aceh mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perubahan yang fluktiatif. Jumlah rumah tersebut di tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021-2023. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2019 telah mencapai 65.852 unit. Namun, jumlah tersebut menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 50.424 unit dan 50.574 unit. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode pendataan rumah.

Tahun 2019 dan 2020, jumlah rumah dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya adalah toko-toko di kawasan perdagangan dan jasa, sehingga jumlah rumah di tahun tersebut belum sepenuhnya mewakili jumlah rumah eksisting di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tahun 2021-2023 merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada 90 Gampong di Kota Banda Aceh, sehingga data ini lebih mewakili kondisi eksisting jumlah rumah di Kota Banda Aceh.

Penurunan jumlah rumah layak huni di periode tahun 2019 dan 2020 dan tahun 2021-2023 juga dipengaruhi oleh jumlah rumah di periode yang sama. Perbedaan metode pendataan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah rumah dan rumah layak huni yang signifikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan rumah layak huni dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBK, DAK Fisik Perumahan, Dana Otsus, dan ZIS. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Permukiman yang Tertata

Dalam rangka mengendepankan konsep kota berkelanjutan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan ekonomi, ekologi, kesetaraan sosial, dan kenyamanan huni dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah-wilayah prioritas Kota Banda Aceh. Pengembangan kawasan permukiman pada wilayah ini

memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan Kota Banda Aceh tanpa permukiman kumuh dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dilaksanakan dengan mengedepankan hal-hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti kondisi bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan, dan proteksi kebakaran. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas pemukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, diantaranya adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Penataan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh berimplikasi pada pengurangan luas kawasan kumuh. Tabel di bawah menunjukkan penurunan luas kawasan yang bervariasi pada periode tahun 2018-2023. Luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh ditentukan berdasarkan hasil survey tujuh indikator kumuh, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banda Aceh. Telah ditetapkan empat Surat Keputusan Walikota terkait luas kawasan kumuh ini, yaitu pada tahun 2016, 2018, 2020, dan 2021. Perubahan regulasi terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh ini menyebabkan luas kawasan yang fluktuatif pada periode tahun tertentu.

Untuk lebih jelasnya luas kawasan kumuh di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini:

Tabel 2. 53 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Ha)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	608.25	461,48	451,40	451,40	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	16,16	4,90	N/A	60,61	77,39
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	127.86	456,58	451,40	390,79	374,01

No	Uraian	Aceh			Banda Aceh				
		SK Bupati/ Walikota 2013	SK Bupati/ Walikota 2018 (Revisi)	SK Bupati/ Walikota 2020/2021 (Revisi)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	5.814,07	5.310,68	6.688,76	21,06	461,48	451,4	451,4	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)				59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)				16,16	4,9	8,47	60,61	77,39
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)				4,9	456,58	442,93	390,79	374,01

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024

Mengacu pada surat keputusan bupati/walikota pada tahun 2013 luas kawasan kumu yang ada di Aceh sebesar 5.814,07 Ha. Pada tahun 2018 luasan kawasan kumuh di Provinsi Aceh menurun sebanyak 503,39 Ha. Namun, berdasarkan SK Bupati/Walikota tahun 2020/2021 jumlah kawasan kumuh di Aceh kembali meningkat menjadi 6.688,76 Ha.

Berdasarkan Tabel 2.53 di atas, luas kawasan kumuh pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 terus menurun. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh meningkat yang disebabkan karena penilaian kawasan kumuh termasuk juga kawasan yang berpotensi kumuh. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penegakan Perda

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum salah satu yang dilakukan Satuan Polisi & Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) adalah penegakan peraturan daerah (Perda)/Qanun. Persentase penegakan Perda/Qanun dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada Tabel 2.54 sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus)	762	421	436	535	350
2	Jumlah pelanggaran perda (kasus)	920	421	436	535	350
3	Persentase penegakan perda (persen)	82,83	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.54 di atas menunjukkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 persentase penegakan Perda/Qanun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengami peningkatan. Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase terkecil terjadi tahun 2019 sebesar 82,83 persen dimana dari 920 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 762 penegakan perda.

Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH mengalami penurunan jumlah pelanggaran Perda/Qanun dari tahun – tahun sebelumnya sejumlah 350 kasus, penurunan kasus tersebut menjadi indikator bahwa hampir seluruh warga Kota Banda Aceh maupun warga yang dating dari luar Kota Banda Aceh telah menaati Perda/Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh. Adapun rician jumlah pelanggaran dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA SYARIAT	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Pembinaan	Cambuk	
1	Khalwat	31	31	-	-
2	Ikhtilath	42	32	10	
3	Khamar	4	2	2	-
4	Maisir	4	-	4	-
5	Liwath	2	2	-	-
	Jumlah	**83**	**67**	**16**	-

NO	PERKARA TRANTIBUM	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi/Tipiring	
1	Bangunan Gedung	13	13	-	-
	Jumlah	**13**	**13**	-	-

NO	PERKARA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	Pajak Restoran	5	-	5	-
	Jumlah	**5**	**-**	**5**	-

2. Cakupan Perlindungan Masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) dibentuk sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017. Satlinmas merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan kantrantibmas di masing-masing gampong. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini:

Tabel 2. 56 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5	5,72	5,27	5,47	5,68

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.56 di atas menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2019 Kota Banda Aceh telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 450 personil Satlinmas yang berasal dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah Satlinmas Gampong terus mengalami peningkatan melebihi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Dikota Banda Aceh dimana sebutkan dalam pasal 10 ayat 4 dimana disebutkan bahwa “anggota regu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong", hingga tahun 2023 Jumlah Linmas gampong telah mengalami peningkatan sebanyak 512 personil yang tersebar di masing – masing gampong dengan rata 5,68 orang/gampong atau dalam 1 gampong berjumlah 5 hingga 6 orang per gampong.

3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih terperinci tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut:

Tabel 2. 57 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaranK3 (kasus)	241	66	163	322	249
2.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	273	66	163	322	249
3.	Persentase penyelesaian K3 (%)	88,28	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.57 di atas menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH memiliki 249 kasus pelanggaran K3 dengan tingkat realisasi sebanyak 249 kasus telah berhasil diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat penyelesaian kasus K3 pada Tahun 2023 sebesar 100 persen dari total kasus. Adapun rician jumlah pelanggaran K3 dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Jumlah Pelanggaran K3 Dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA K3	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	PKL	227	227	-	-
4	PMKS	22	22	-	-
	Jumlah	**249**	**249**	-	-

a. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan

perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2. 59 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	80%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				85%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				85%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			86,56%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024

4. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{ Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{ luas potensi kebakaran}} \times 100\ \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK } (7.5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 73,\ 34\ \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK } (7{,}5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 97{,}78\ \%$$

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)			Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2019	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2020	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2021	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2022	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2023	19,64	5	Pos	59,00	166,00

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai dengan 2023 masih memiliki 5 pos Kebakaran Kota, merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk Geuceu Meunara, yaitu: Pos Pembantu Pango, Pos Pembantu Simpang Mesra, Pos Pembantu Keudah, Pos Pembantu Pelangi dan Pos Pembantu Assoe Nanggroe (tutup karena kurang personil).

5. Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/ penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 61 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2019	26	26	100
2020	48	48	100
2021	50	50	100
2022	63	66	100
2023	67	67	100

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan data diatas tingkat waktu tanggap darurat layanan untuk kebakaran Kota Banda Aceh sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terus membaik.

Seluruh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelayanan DPKP sudah memenuhi waktu tanggap darurat mencapai 100 persen.

Jumlah kasus Kebakaran yang terjadi di Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai 289 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh sejak tahun 2019–2023 adalah 340 kasus, yang didominasi oleh perumahan/permukiman sebanyak 118 kasus, kemudian kebakaran Hutan/Ilalang/Semak Belukar sebanyak 114 kasus, dan Bangunan Perkantoran sebanyak 108 kasus.

Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

Jenis Kebakaran	Aceh					Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta						7	20	43	19	19
Perumahan/ Pemukiman Penduduk						30	17	24	27	20
Hutan Ilalang Semak/Belukar						59	3	7	17	28
Jumlah	285	289	269			96	40	74	63	67

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Jika dilihat trend kasus setiap tahunnya untuk tahun 2019-2023, jumlah kasus kebakaran di tahun 2019 adalah 96 kasus, kemudian tahun 2020 turun menjadi 40, pada tahun 2021 kasus kebakaran kembali naik. Jumlah kasus kebakaran yang banyak ditangani dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah kebakaran Perumahan/Pemukiman Penduduk sebanyak 118 kasus.

F. Sosial

Aspek sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat memang terdapat masalah sosial tetapi perlu diakui bahwa potensi penyelesaiannya juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pembinaan yang baik dan tepat dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Tabel 2.63 berikut menyajikan jenis PMKS dan jumlah penyandangnya di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 63 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak dengan Kecacatan	98	98	104	104	13
2	Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu	2.080	2.080	2.700	2.700	2810
3	Anak Terlantar	13	21	23	21	36

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Anak Bermasalah Hukum	108	51	59	70	68
5	Anak Jalanan	55	50	24	24	31
6	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	930	930	-	932	9
7	Lanjut Usia Terlantar	3	11	6	10	26
8	Lanjut Usia	2.495	2.471	2.455	2.394	113
9	Penyandang Disabilitas	477	389	202	379	340
10	Pengemis	103	132	95	115	47
11	Gelandangan	3	47	17	17	47
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	3	NA	NA	NA	NA
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	15	NA	NA	NA	NA
14	Keluarga Fakir Miskin	12.777*	12.253*	24.250	27.044	28054***
14	Keluarga Rentan	2.044	2.044	3.214**	3.298**	2734****

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

*) *Data tahun 2018-2020 digunakan data bantuan sosial masyarakat miskin seperti* PKH, BPNT, BST dan PBI, sedangkan Data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI dari desil 1 sampai dengan desil 4 tingkat kesejahteraan keluarga.

**) Data Diperoleh Dari DTKS Kota Banda Aceh dari desil Ke IV/ Tingkat Kesejahteraan Keluarga Rentan Miskin.

***) Data diperoleh dari DTKS

****) Data diperoleh dari data DTKS yang telah di verifikasi dan validasi

Berdasarkan Tabel 2.63 di atas dapat dilihat dari 26 kategori PMKS sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012, hanya teridentifikasi 15 kategori saja yang ada di Kota Banda Aceh. Tabel diatas menunjukkan adanya penambahan kasus pada beberapa kategori jenis permasalahan sosial seperti kategori anak yatim, piatu dan yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar dan gelandangan.

1) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. PMKS sesuai karakteristiknya merupakan kelompok masyarakat terbawah yang dalam penanganannya sangat ketergantungan dengan dan perlu diberikan bantuan sosial untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Penanganan PMKS adalah melalui proses rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi dasar dan rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi dasar lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan rehabilitasi lanjutan memberikan peningkatan kapasitas sebagai modal dasar memenuhi kebutuhannya sendiri.

Secara Nasional, pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Kementerian Sosial, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta model bantuan lainnya. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program-program tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kondisi sejahtera dalam keluarga. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Tabel 2.64 berikut memberikan gambaran jumlah KPM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh beserta jumlah total bantuan yang diterima pada Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 64 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh		Banda Aceh			
	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)
2019	370.269	488.755.080.000	9	90	4.521	2.392.300.000
2020	451.940	90.388.000.000	9	90	6.968	34.340.705.000
2021	388.854	1.062.153.200.000	9	90	12.282	25.849.750.000
2022	3.323.087	1.146.184.400.000	9	90	13.846	34.644.665.000
2023			9	90	12.846	21.364.400.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Jumlah Penerima KPM di Provinsi Aceh pada tahun 2019 adalah 370.269 keluarga dan meningkat menjadi 451.940 keluarga pada tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah penerima KPM menurun sebanyak 62.086 keluarga dibandingkan tahun 2020. Jumlah penerima KPM Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2022 yakni mencapai 3.323.087 keluarga dengan jumlah bantuan yang diterima Rp.1.146.184.400.000. Di Tahun 2023 jumlah KPM penerima bantuan PKH dan BPNT adalah sebanyak 12.846 KPM dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 21.364.400.000,-.

Data Tabel 2.64 diatas menunjukkan pada adanya peningkatan cakupan (*coverage*) dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun 2019-2022. Jumlah KPM tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 13.846 Kepala Keluarga dari 90 gampong selaku penerima bantuan PKH. Jumlah bantuan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 34.644.665.000,-.

Adapun pada Tahun 2023 Kota Banda Aceh memiliki Kegiatan Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada 192 KPM dengan total realisasi keuangannya sebesar Rp. 795.235.000,-. Dan Kegiatan Pemberian Bansos Barang Pada Subkeg Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diperuntukkan kepada keluarga miskin yang masuk didalam empat klaster diDTKS di Kota Banda Aceh sebanyak 8.148 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.265.056.400,-.

2) PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Berkaitan dengan PMKS penanganan yang sifatnya dalam panti sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lebih pada penanganan PMKS di luar panti. Hal ini berdampak pada kondisi nyata dimana banyak Kota/Kabupaten yang harus mengubah model dan sistem pelayanannya kepada pelayanan luar panti.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Panti Asuhan Nirmala yang pada Tahun 2019 berubah menjadi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melayani dampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah tersedianya Rumah Singgah.

Jumlah penanganan untuk anak yang termasuk kedalam kategori PMKS dalam wilayah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kategori permasalahan sosial PMKS Permensos Nomor 8 Tahun 2012 adalah :

- Anak Dengan Kecacatan ditahun 2023 sebanyak 13 orang,
- Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu ditahun 2023 sebanyak 2.810 orang,

- Anak Terlantar ditahun 2023 sebanyak 36 orang,
- Anak Bermasalah Hukum ditahun 2023 sebanyak 68 orang,
- Anak Jalanan ditahun 2023 sebanyak 31 orang.

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Dalam konteks bencana, pertama kali yang harus dilakukan setelah evakuasi adalah melakukan upaya tanggap darurat yang salah satunya menyediakan dukungan permakanan, sandang dan penampungan sementara. Penanganan terhadap korban bencana dilakukan Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan kemalangan yang diderita masyarakat. Tabel 2.65 di bawah ini menunjukkan penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

Tabel 2. 65 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis Bencana	Banjir	Kebakaran dan Banjir	Kebakaran dan Angin Kencang	Bantuan Logistik Keluarga Kurang Mampu, Kebakaran dan Angin Kencang	Kebakaran dan Angin Kencang
Penerima	18 KK	95 KK	20 KK	94 KK	28 KK
Sumber Dana	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Kebakaran	= 27 KK	94 JIWA
Angin Kencang	= 1 KK	2 JIWA

Tabel 2.65 di atas menunjukkan Dinas Sosial sejak Tahun 2019-2023 telah memberikan bantuan tanggap cepat darurat untuk korban kebakaran dan angin kencang yang dananya berasal dari APBK melalui kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota. Banda Aceh rawan terhadap ancaman bencana kebakaran, angin kencang/puting beliung dan banjir, sehingga sebagian besar penerima bantuan adalah korban bencana kebakaran dan angin kencang.

4) Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dukungan pemerintah baik berupa kebijakan maupun upaya langsung dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan. Pada tingkatan yang berat, yang dapat diupayakan adalah adanya dukungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yakni suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada Tabel 2.66 sebagai berikut

Tabel 2. 66 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Jenis Kecacatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cacat Fisik	234	133	285	278	123
Cacat Mental	135	38	138	138	63
Cacat Ganda	127	152	158	164	36
Jumlah	**496**	**323**	**581**	**580**	**222**

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.66 di atas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas baik cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bersifat fluktuatif. Tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 496 orang. Pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 323 orang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 581 jumlah penyandang disabilitas dan ditahun 2022 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 580 orang. Untuk Tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas yang tertangani yaitu sebanyak 222 Orang.

2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah pada Tabel 2.67 sebagai berikut :

Tabel 2. 67 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Orang)

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2019	2020	2021	2022	2023	
Menjahit	96	80	32	32	48	288
Teknisi Cooling System	32	16	0	0	32	80
Teknisi Sepeda Motor	48	32	16	16	16	128
Las Listrik	32	32	36	16	32	148
Kewirausahaan Membuat Kue	102	32	32	32	32	230
Tata Rias dan Kecantikan	32	0	0	32	32	96
English for Tour Guides	20	0	0	0	16	36
Penggambaran Auto CD	0	0	16	0	0	16
Estimator Bangunan Gedung	0	0	0	16	16	32
Juru Gambar Arsitektur	0	0	0	16	16	32
Pengolahan Ikan	0	0	0	16	16	32
Front Office kejuruan pariwisata	0	0	0	0	16	16
Jumlah	**362**	**192**	**132**	**176**	**272**	**1134**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.67 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelatihan menurun yaitu berjumlah 132 pelatihan dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023. Menjahit merupakan jenis pelatihan

yang paling banyak dilakukan dan Kewirausahaan Membuat Kue,Teknisi Sepeda Motor, pelatihan Las Listrik, Tata Rias dan Kecantikan, Teknisi Cooling Sistem, pelatihan english for tour guides dan Pelatihan Operatot Alat Berat, pelatihan pangkas menempati jumlah terendah di tahun 2021.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), Pemerintah Kota Banda Aceh secara rata-rata hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 1.134 orang per tahun. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun demikian Dinas Tenaga Kerja berupaya mencari sumber-sumber dana lain seperti dari APBN dan APBA untuk membiayai pelaksanaan pelatihan agar dapat melatih lebih banyak pengangguran lagi

1) Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam suatu hubungan industrial. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perselisihan maka telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kota Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang juga menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini. Dimana dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemerintah merupakan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Pada periode 2019–2023 sebanyak 754 kasus. Metode penyelesaian kasus perselisihan dapat dilakukan dengan bipartit atau tripartit yang melibatkan mediator dan konsiliator bahkan jika tidak selesai maka dapat diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah pada Tabel 2.68 berikut ini:

Tabel 2. 68 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Jenis Kasus/Perkara yang Masuk	Tahun					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Perselisihan hubungan Kerja	21	631	52	35	83	822
Mediator	19	30	30	28	10	117
Konsiliator	0	0	0	0	0	0
Pengadilan PHI	2	10	29	7	60	108

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat besar yaitu 631 kasus. Hal ini terjadi karena pandemi telah menyebabkan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK). Namun demikian Sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara bipartit di tingkat perusahaan dan pekerja sehingga jumlah kasus yang harus dimediasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hanya 32 kasus dan hanya 60 kasus yang perlu anjuran untuk diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 108 kasus yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2) Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh

Kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu upaya pemerintah dalam melihat besaran tenaga kerja yang tersedia adalah dengan melibatkan dinas tenaga kerja di daerah untuk melakukan pendaftaran pencari kerja melalui mekanisme antar kerja. Tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja diidentifikasi melalui Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Para pencari kerja ini kemudian akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui pengantar kerja atau pun Job Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang ditempatkan selama 5 (Lima) tahun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.69 beriku:

Tabel 2. 69 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga Kerja Terdaftar	582	255	222	107	131
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	332	105	116	48	56
	Persentase	**57,04**	**41,17**	**52,25**	**45,00**	**42,75**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.69 di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 42,75 persen pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan, hal ini mengalami penurunan sebesar sebesar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini salah satu disebabkan jumlah lowongan kerja yang terbatas dan tidak adanya laporan lowongan kerja dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial

Selama kurun waktu 2019 – 2023, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat pendemi yang menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerja. Perselisihan ini telah dapat diselesaikan baik melalui metode penyelesaian bipartite, melalui mediator dan hanya sedikit yang diselesaikan pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Jumlah sarana hubungan industrial yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini:

Tabel 2. 70 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	PKWT/PKWTT	864	217	1565	40	1418
2	PP/PKB	54	23	25	39	43
3	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	4	25	23	13	3
4	LKS Bipartit	1	1	4	16	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.70 diatas, secara garis besar terlihat adanya kecenderungan peningkatan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial mulai dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dan menurun di Tahun 2022 serta di Tahun 2023 terjadi kenaikan kembali. Sementara itu untuk pengesahan dan pencatatan sarana Serikat Pekerja/Serikat Buruh jumlahnya berfluktuasi dan sarana LKS Bipartit jumlahnya meningkat di tahun 2022 dan menurun pada Tahun 2023.

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial dan sudah terdata pada database Aplikasi SINAKER (Sistem Informasi ketenagakerjaan). Guna tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Proses penerimaan pegawai negeri ini mengikuti ketetapan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia dan dapat bekerja di berbagai tingkat pemerintahan setelah lulus tanpa memandang perbedaan gender. Demikian juga pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Kota Banda Aceh. Tabel 2.71 berikut menggambarkan persentase pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki dan perempuan dari Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 71 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	4.272	4.255	4.090	4.129	4.631
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	1.422	1.400	1.338	1.294	1.259
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	2.852	2.855	2.752	2.663	2.573
Jumlah PPPK Laki-laki				135	172
JUmlah PPPK Perempuan				37	627
Persentase Laki-laki	33,3	32,9	32,71	34,6	30,9
Persentase Perempuan	66,8	67,1	67,29	65,4	69

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.73 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah Aparatur Sipil Negara perempuan sudah mencapai 66,8 persen dan menjadi 67,1 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 67,29 persen pada tahun 2021

sementara pada tahun 2022 turun menjadi 65,4 persen dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 69 persen dari total ASN Kota Banda Aceh atau dengan kata lain dua per tiga dari total ASN Kota Banda Aceh adalah perempuan. Hal ini menggambarkan tidak adanya perbedaan gender dalam penerimaan ASN pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Sampai saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai komposisi ASN yang ideal antara laki-laki dan perempuan.

2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bernegara tetapi merupakan unit yang utama dalam penentuan kesejateraan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam rumah tangga telah menjadi sorotan utama dan menjadi factor penting dalam aspek kesejahteraan. Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara khusus dikeluarkan demi kepentingan ini. Oleh karena itu, rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi indicator penting dalam aspek kesejahteraan. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara definisi adalah jumlah KDRT dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100. Perkembangan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditunjukkan oleh Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2. 72 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Perempuan	0,10	0,05	0,07	0,07	0.11
Anak	0,10	0,04	0,05	0,06	0.05

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.72 Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Banda Aceh masih fluktuatif baik yang terjadi pada perempuan maupun pada anak. Rasio KDRT Tahun 2023 pada perempuan dan anak dilaporkan sebesar 0,11% dan 0,05% artinya Setiap 100 keluarga di Kota Banda Aceh terdapat 11 keluarga dengan perempuan dan 5 keluarga dengan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Meningkatnya rasio KDRT dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain jumlah kasus yang meningkat, meningkatnya jumlah edukasi sehingga meningkatkan keberanian dan kemampuan untuk melaporkan serta akses yang lebih mudah untuk mendapatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Angka KDRT yang masih fluktuatif disebabkan penanganan kasus masih berdasarkan pada kemauan korban untuk melapor.

Namun demikian upaya-upaya pencegahan KDRT akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dan mau terlibat dalam upaya pencegahan dan sistem perlindungan yang dibangun di tingkat gampong dan kecamatan, salah satunya melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sementara penyelesaian pengaduan dan penanganan kasus untuk perlindungan perempuan dan anak dari KDRT adalah sebesar 100 persen dihitung melalui jumlah pengaduan kasus KDRT dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani dikali 100 persen. Begitupun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100 persen.

3) Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikator KLA terbagi dalam 1 (satu) klaster Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Pemenuhan Hak Anak yaitu Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya dan Klaster V : Perlindungan Khusus. Pencapaian yang diraih Kota Banda Aceh periode 2019-2023 diperlihatkan pada Tabel 2.73 berikut:

Tabel 2. 73 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indikator KLA yang dicapai	664	664	693	788	766

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024
**) Data 2019 sampai 2021 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2.73 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator KLA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2020 tidak dilakukan evaluasi KLA akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, Kota Banda Aceh kembali memperoleh penghargaan KLA dalam kategori Madya dengan skor 693 untuk evaluasi tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori yang lebih tinggi, yaitu Nindya. Dan di tahun 2023 penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya kembali diperoleh dengan skor 766.

Peningkatan peringkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian, masih diperlukan upaya, kebijakan, dan program yang lebih konsisten untuk mencapai hasil maksimal sehingga mendapatkan kategori Kota Layak Anak (KLA), untuk terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA).

4) Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh stakeholder dari berbagai institusi. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan maksimal bagi penyelesaian permasalahan perempuan dan anak. Oleh karena itu, UPTD PPA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar penanganan kasus yang dilakukan dapat berlangsung secara optimal. Adapun mitra kerjasama UPTD PPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mitra Internal Pemerintah Kota Banda Aceh

- Dinas Sosial
- Dinas Koperasi, UMKM
- RSUD Meuraxa
- Puskesmas Lampulo
- Puskesmas Baiturrahman
- Pemerintah Gampong
- BKPSDM Kota Banda Aceh
- Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

- SD Percontohan Banda Aceh
- SMP Negeri 7 Banda Aceh
- SMA Negeri 16 Banda Aceh
- Puspaga Kota Banda Aceh

2. Mitra Tingkat Provinsi, Lintas Sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat

- Polresta Banda Aceh
- Kejaksanaan negeri Banda Aceh
- Pengadilan Negeri Banda Aceh
- Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
- Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar
- Badan Kepegawaian Aceh
- BKPSDM Kabupaten Aceh Besar
- LL DIKTI Wilayah XIII
- BKN Kanreg XIII
- Universitas Iskandar Muda
- Polda Aceh
- Polsek Banda Raya
- Polsek Kuta Raja
- LBH Banda Aceh
- Flower Aceh
- Yayasan Pulih Aceh
- PKBI Aceh
- Rumah Zakat
- UPTD Rumah Singgah Dinsos
- Dinsos Aceh
- UPTD PPA Aceh

Mitra kerja UPTD PPA tahun 2023 terdiri dari sektor pemerintah kota, provinsi dan pusat serta sektor swasta dan lembaga penyedia layanan lainnya yang terdapat di Kota Banda Aceh. Mitra kerja sangat berperan untuk membantu penyelesaian kasus yang diadukan ke UPTD PPA Kota Banda Aceh. Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA pada prinsipnya mengedepankan konsep manajemen kasus yang kuncinya adalah koordinasi. Dalam pemberian layanan maka UPTD PPA akan melakukan koordinasi, rujukan dan pelimpahan kepada lembaga mitra sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga mitra tersebut.

Jaringan kerja UPTD PPA semakin luas karena sesuai kebutuhan korban /survivor yang memerlukan berbagai layanan. Karena kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks dituntut adanya pengembangan mitra kerja, sehingga sistem layanan lebih solid dan tidak tumpang tindih.

5) Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasasn Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam menyelesaikan kasus, biasanya terdapat dua jalur yang dapat dilakukan bagi pihak yang bersengketa yaitu jalur Litigasi dan Non-Litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. Penyelesaian kasus melalui jalur Litigasi dan mediasi/musyawarah (Non-Litigasi) pada Tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.53 :

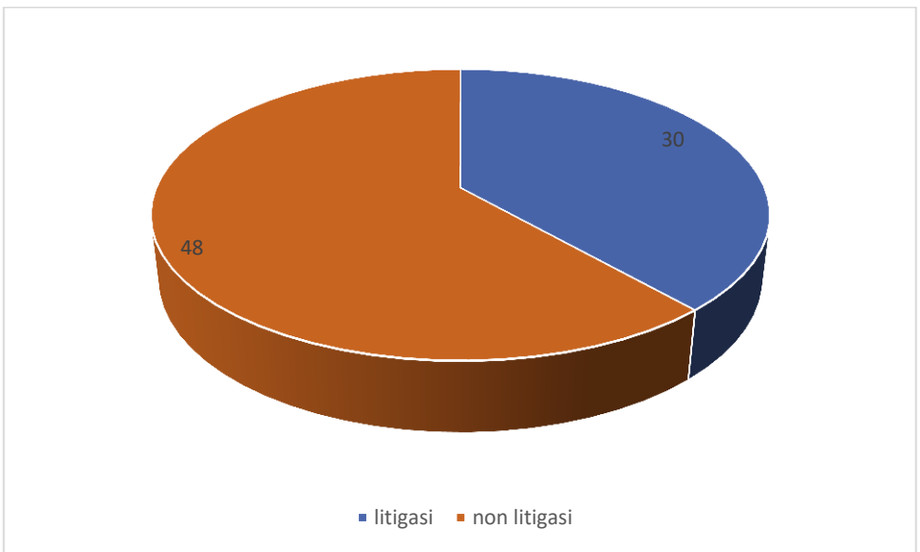

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 52 Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.53 diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan layanan bantuan hukum sejumlah 78 kasus yang terdiri dari 50 kasus perempuan dan 28 kasus anak. Secara keseluruhan kasus yang diselesaikan melalui jalur litigasi sejumlah 30 kasus yang terdiri dari 22 kasus perempuan dan 8 kasus anak. Sementara itu, kasus yang diselesaikan melalui jalur non litigasi sejumlah 48 kasus yang terdiri atas 28 kasus perempuan dan 20 kasus anak. Umumnya kasus akan diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan demi kemaslahatan semua pihak. Namun demikian, pada kasus-kasus kekerasan yang tidak dapat ditolerir seperti kekerasan fisik, rudapaksa, maka kasus akan diselesaikan melalui jalur litigasi baik dipengadilan negeri maupun di mahkamah Syar'iyah.

Penyelesaian kasus secara non litigasi akan melibatkan para pihak yang terdiri dari keluarga, aparatur desa serta instansi terkait yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan ke UPTD PPA Banda Aceh. Kasus-kasus yang umumnya diselesaikan adalah kasus KDRT berupa penelantaran nafkah.

C. Pangan

1) Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan satu-satunya kebutuhan dasar manusia yang bersifat hayati agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan kompisisi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan adalah merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Adapun jenis pangan atau kelompok pangan dalam Pola Pangan Harapan adalah :

1. Padi-padian (beras, jagung, tepung terigu, gandum, dan lain-lain)
2. Umbi-umbian (ubi jalar, kentang, singkong, talas, wortel dan lain-lain)
3. Pangan Hewani (daging rumenansia, daging unggas, telur, susu, ikan dan lain-lain)
4. Minyak dan Lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung dan lain-lain)
5. Buah/ Biji Berminyak (kelapa, kemiri, dan lain-lain)
6. Kacang -kacangan (kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah)
7. Gula (gula aren, gula pasir, dan lain-lain)
8. Sayur dan Buah (sayur-sayuran dan buah-buahan)
9. Lain-lain (minuman, bumbu, dan lain-lain)

Tabel 2. 74 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	253,3	1.006	53,4	47,9	0,5	26,7	24,0	25,0	24,0
2	Umbi-umbian	37,1	31	1,6	1,5	0,5	0,8	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	162,9	293	15,5	13,9	2,0	31,1	27,9	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	31,4	283	15,0	13,5	0,5	7,5	6,7	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	4,2	23	1,2	1,1	0,5	0,6	0,6	1,0	0,6
6	Kacang-kacangan	17,5	47	2,5	2,3	2,0	5,0	4,5	10,0	4,5
7	Gula	13,8	54	2,9	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	211,9	98	5,2	4,7	5,0	26,0	23,3	30,0	23,3
9	Lain-lain	94,0	50	2,7	2,4	-	-	-	-	-
	Total		**1.885**	**100,0**	**89,7**		**99,1**	**89,0**	**100,0**	**83,3**

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah diperlukan parameter, jumlah, keragaman, dan mutu gizi pangan. Secara sederhana dapat diamati dari suatu susunan atau pola ketersediaan dan konsumsi penduduk. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai untuk menilai Tingkat keragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan

penduduk adalah Pola Pangan Harapan (PPH) yang di analisis menggunakan data Susenas yang diterbikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Skor Pola Pangan Harapan di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah 83,3%, kecukupan Energi (% AKE) 89,7%, sedangkan Kecukupan Protein 106,6%.

D. Lingkungan hidup

1) Survey Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2008 DLHK3 membuka 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Pelayanan DLHK3 mengenai pelayanan sampah medis dihapuskan sehingga jumlah layanan pada Tahun 2019 hanya ada 9 (sembilan) pelayanan. Penghapusan pelayanan sampah medis dikarenakan pelayanan sampah medis sudah ditangani oleh pihak ketiga. DLHK3 tidak lagi melakukan pemusnahan sampah medis. Pada Tahun 2023 untuk Pelayanan sewa alat berat sudah dihapuskan dikarenakan kondisi alat berat sudah rusak berat sehingga pada Tahun 2023 jumlah pelayanan pada DLHK3 terdiri dari 8 (delapan) pelayanan. Kinerja dari 8 pelayanan DLHK3 Banda Aceh tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan. Capaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan DLHK3 Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.75:

Tabel 2. 75 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Target dan Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Realisasi	Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Persentase Capaian	100 %	100 %	-	100%	100%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.75 diatas menunjukkan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima layanan DLHK3 diperoleh nilai kepuasan terhadap pelayanan DLHK3 adalah “Baik” dan pada tahun 2020 menjadi “Sangat Baik”. Sedangkan untuk tahun 2022 juga sangat baik dengan indeks survey Kepuasan masyarakat sebesar 89,46. Pada Tahun 2023 indeks survey kepuasan masyarakat sebesar 83,82.

Rincian skor hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.76:

Tabel 2. 76 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			%
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	83,82

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel 2.76 Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan perkerjannya.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan perkerjannya.

Tabel 2. 77 Rincian Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DLHK3 Tahun 2023

JK (Jenis Kelamin)		**PT (Perguruan Tinggi)**	
Laki - Laki	95	1. SD Kebawah	0
Perempuan	60	2. SMP	10
JUMLAH	**155**	3. SMA	45
PU (Pekerjaan Utama)		4. D1-D2-D3	20
1. PNS/TNI/Polri	25	5. S-1	80
2. Pegawai Swasta	30	6. S-2 Keatas	0
3. Wiraswasta/Usahawan	20	**JUMLAH**	**155**
4. Pelajar/Mahasiswa	20		
5. Lainnya	60		
JUMLAH	**155**		

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berikut penjabaran hasil perolehan nilai survey terhadap mutu kinerja pelayanan DLHK3 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.78:

Tabel 2. 78 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
1	Pelayanan Rekomendasi Lingkungan	75,11	KURANG BAIK	C
2	Pelayanan Sedot Tinja	87,77	BAIK	B
3	Pelayanan Kebersihan	87,11	BAIK	B
4	Pelayanan Pemasangan Lampu Jalan Umum	77,77	BAIK	B
5	Pelayanan Pemangkasan Pohon	50,77	TIDAK BAIK	D
6	Pelayanan Sewa Taman Sari	76,88	BAIK	B
7	Pelayanan Retribusi Sampah	70,55	KURANG BAIK	C
8	Pelayanan Izin Magang Penelitian	77,77	BAIK	B

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLHK3			83,32	B
			Baik	

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Dari 8 (delapan) jenis pelayanan yang disurvei, pelayanan sedot tinja (87,77: baik) memiliki skor yang paling tinggi sedangkan skor yang paling rendah diperoleh oleh pelayanan pemangkasan pohon (50,77 : tidak baik). Secara rinci, pada pelayanan sedot tinja, unsur yang mendapatkan skor paling tinggi adalah kesesuaian antara biaya pelayanan yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh DLHK3 (Skor 3,8 dari skala 4). Sedangkan unsur paling rendah adalah keamanan pelayanan serta kesopanan dan keramahan petugas (skor 3,6 dari skala 4).

2) Capaian Menurunnya TPS Liar

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya membuat beberapa tempat menjadi tempat penampungan sementara (TPS) liar yang berserakan di Kota Banda Aceh. DLHK3 Banda Aceh telah menyediakan wadah sampah yang tersebar dibeberapa lokasi untuk tempat penampungan sampah sementara dari masyarakat. Namun masyarakat masih saja membuang sampahnya di TPS liar yang seringkali terlihat berserakan di sepanjang jalan raya, terminal, pasar, jembatan, halte, perbatasan dan tempat-tempat umum lainnya. Secara keseluruhan terdapat 140 titik TPS Liar yang ada di Kota Banda Aceh. Persentase capaian menurunnya TPS liar Tahun 2018 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2. 79 berikut ini:

Tabel 2. 79 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2023

No	Menurunnya TPS Liar	Target dan Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	20 titik	20 titik	20 titik	65 titik	0	0
2	Realisasi	28 titik	36 titik	47 titik	65 titik	18 Titik	12 Titik
3	Persentase Capaian Menurunnya TPS	140 %	180 %	235 %	100%	100%	100%

	Liar						

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian menurunnya TPS liar hanya ada dari tahun 2018-2021, hal ini dikarenakan indikator tersebut belum digunakan pada tahun 2016-2017. Tahun 2018 target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai pada tahun yang sama sebanyak 28 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2018 sebesar 140%. Pada tahun 2019, target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 36 titik. Dapat diketahui pada tahun 2019, persentase capaian menurunnya TPS liar sebesar 180%. Untuk tahun 2020, target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 47 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2020 sebesar 235%. Pada Tahun 2021 Persentase capaian menurunnya TPS Liar sebesar 100%. Berdasarkan capaian di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2021, realisasi menurunnya TPS liar melebihi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022 dan 2023 persentase capaian menurunnya TPS liar sebanyak 100%.

3) Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. capaian indeks kualitas air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.80:

Tabel 2. 80 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target dan Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	Tercemar Ringan	Baik	N/A	N/A	45,66
2	Realisasi	Tercemar Ringan	Tidak Teruji Karena *Covid*-19	N/A	N/A	56,67
3	Persentase Capaian	100 %	0 %	N/A	N/A	124,11%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Pelaksanaan pengukuran IKA di Kota Banda Aceh Tahun 2019 sangat baik dan telah mencapai realisasi 100 persen. Pada tahun 2019 pengukuran IKA dilakukan pada 5 buah sungai dengan 20 titik lokasi yang berbeda. Namun ditahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan *Covid*-19. Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2018 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2018 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2018-2022. Pada renstra 2023-2026 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3. Pada Tahun 2023 Persentase capaian untuk Indeks Kualitas Air

(IKA) sebesar 124,11 %. Nilai IKLH ini diperoleh berdasarkan data hasil uji dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dipublikasi kan pada Aplikasi IKLH.

Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Air Kota Banda Aceh Tahun 2019

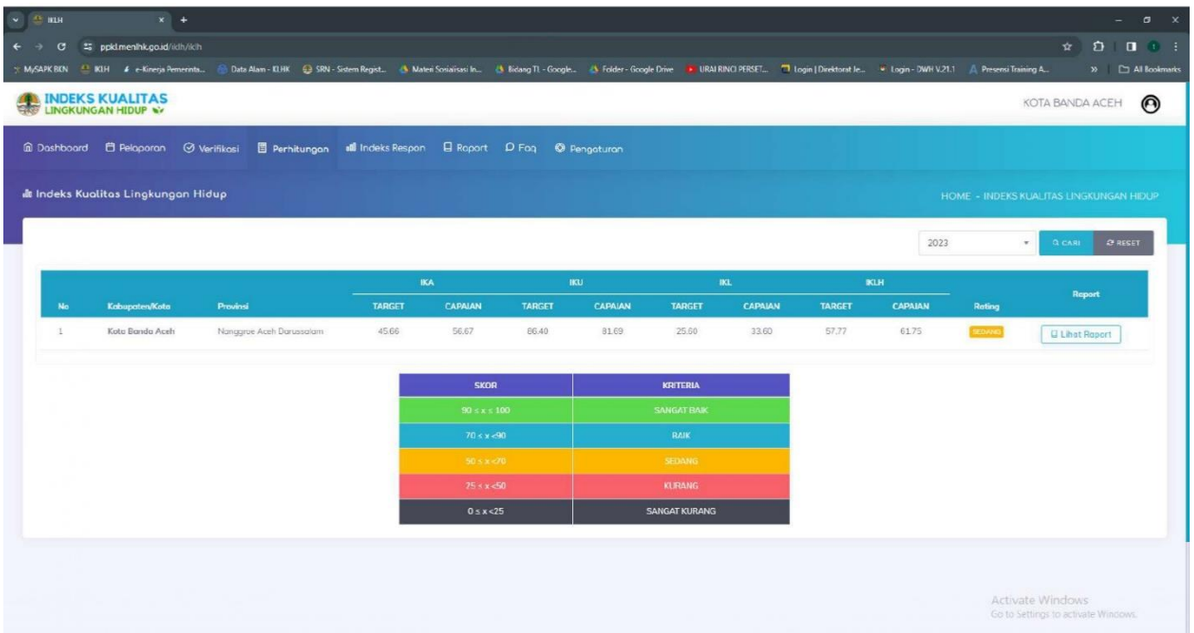

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2018 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2018 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2018 - 2022. Oleh karena itu, data Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia.

Berdasarkan Tabel 2.81 di atas dapat dilihat bahwa pengukuran IKA pada Tahun 2019 menggunakan 4 metode yakni metode STORET, metode Indeks Pencemaran (IP), metode IKA Existing dan metode IKA-INA. Hasil akhir dari metode IKA Existing menunjukkan angka 52.00 hal ini berarti kualitas air di Kota Banda Aceh saat ini termasuk dalam katagori “Cemar Ringan”. Pada tahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan *Covid*-19.

Tahun 2023 Perhitungan nilai IKA dilakukan melalui Aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh KLHK RI, sedangkan Kota Banda Aceh tidak melakukan pemantauan karena refocusing anggaran.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Selain itu setiap metode dalam mengukur kualitas air juga dapat menunjukkan hasil yang berbeda karena perbedaan tingkat sensitivitas

setiap metode dalam menggambarkan kualitas suatu badan perairan, yakni melalui tingkat toleransi setiap indeks tersebut terhadap kualitas suatu badan perairan.

4) Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Hal serupa juga diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Jumlah izin/rekomendasi lingkungan hidup pada Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.53 berikut ini:

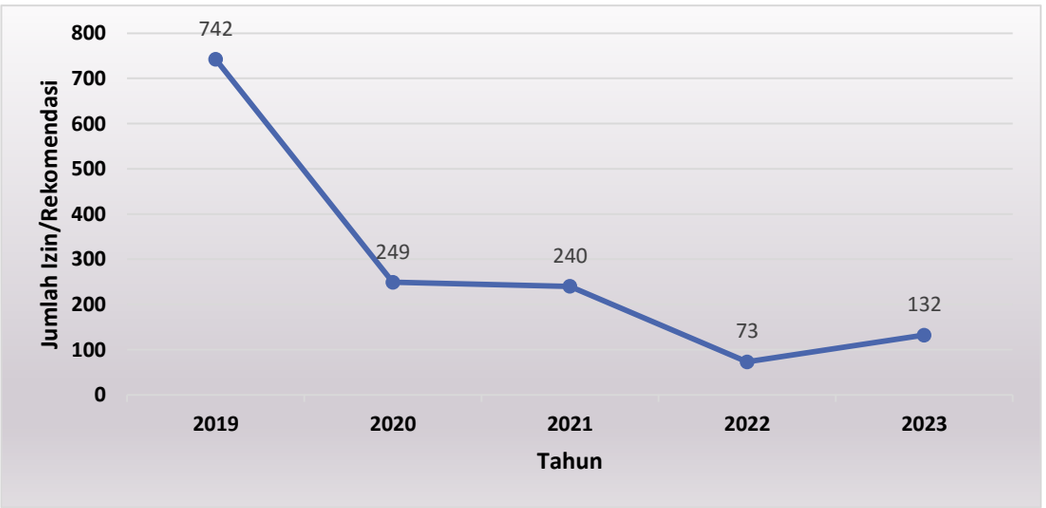

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 53 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2019-2023

Capaian izin/rekomendasi lingkungan hidup pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.82 dibawah ini:

Tabel 2. 82 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2023

No	Dokumen	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SPPL	229	226	270	67	110
2	UKL-UPL/DPLH	20	14	15	6	22
Total		742	249	240	73	132

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2.53 dan Tabel 2.82 terlihat bahwa jumlah penerbitan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan DPLH/DELH pada Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam tertib perizinan. Upaya kontrol bersama antara pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat dan Pemerintah harus terus ditingkatkan sebagai

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan optimal dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

5) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Daya Tampung TPS per satuan penduduk tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer dam komunal, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer/wadah komunal di dalam wilayah gampong karena warga belum bersedia meminjamkan lahan mereka untuk penempatan wadah tersebut. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.83 di bawah ini:

Tabel 2. 83 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2018-2023

Indikator	Target dan Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Target	35	37	40	44	45	50
	Realisasi	29,04	33,18	34,75	32,01	31,51	30,57

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.86 di atas terlihat bahwa rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada Tahun 2018 belum mencapai target yang diharapkan. Target setiap tahunnya 227 wadah komunal berukuran 660 Liter yang harus disediakan namun Pemerintah Kota Banda Aceh (DLHK3) hanya mampu mampu mengalokasikan 30-50 Wadah komunal untuk ditempatkan pada jalan utama saja. Indikator kinerja pada rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk seperti pada tabel 2.83 ini tidak digunakan lagi sejak Tahun 2018. Hal ini menyesuaikan dengan indikator pengelolaan sampah terbaru yang ditetapkan secara nasional yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka realisasi sampah terkelola pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.84 dibawah ini:

Tabel 2. 84 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2022

Indikator	Target dan Capaian	Target Capaian setiap Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Sampah yang terkelola	Target	91 %	90 %	97%	98%	99%	99%
	Realisasi	95,94 %	92,87 %	93,12 %	97,78%	97,97%	98,48%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Banda Aceh telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penetapan kebijakan tersebut berlaku sejak 2018 hingga 2025, yang menetapkan target penanganan dan pengurangan sampah. Jumlah volume sampah dalam penanganan dan pengurangan sampah tersebut merupakan jumlah sampah terkelola. Sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebesar 95,54 % menurun 92,87 % pada tahun 2019, akibat pemisahan data antara sampah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang masuk di TPA Gampong Jawa. Namun pada tahun 2022 persentase sampah terkelola naik signifikan menjadi 97,97 % akibat

pemberantasan TPS Liar yang berasal dari gampong-gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Di Tahun 2023 persentase sampah terkelola meningkat menjadi 98,48%.

6) Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m3/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkas gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2022 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan 99% ke rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas methan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas methan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas methan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Sejak tahun 2021 penyaluran gas methan kepada masyarakat sudah terhenti dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan jaringan, sehingga banyak jaringan perpipaan distribusi yang putus tidak dilakukan perbaikan.

7) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengaju pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pada Tabel 2.85 rincian pencapaian RTH publik Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 berdasarkan jenis komponen RTH:

Tabel 2. 85 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Jenis RTH Publik	Aceh					Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

Jenis RTH Publik	Aceh					Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
RTH Taman Kota						58,56	58,59	58,59	58,46	58,46
RTH Hutan kota						32,95	33	33	32,95	32,95
RTH Lapangan Olah Raga						57,23	58,56	58,56	58,56	58,56
RTH Jalur Hijau Jalan						43,85	43,86	43,86	43,86	43,86
RTH Makam						21,66	22,77	22,77	21,58	21,58
RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman						183,58	183,58	183,58	183,76	183,63
Hutan Bakau						445,47	445,48	445,48	446,19	446,19
Jumlah luasan RTH Total	33,23	21,57				843,3	845,84	845,84	845,36	845,43
Luas Kota Banda Aceh						5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.901,00	5.900
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh						14,29	14,34	14,34	14,34	14,33

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.85 Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Sedangkan Kawasan RTH Kota Banda Aceh sudah sulit untuk diperluas, hanya 14 persen sejak 2018 sampai saat ini. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Gambar 2.55 menunjukkan target dan realisasi RTH publik dari Tahun 2019 hingga 2023:

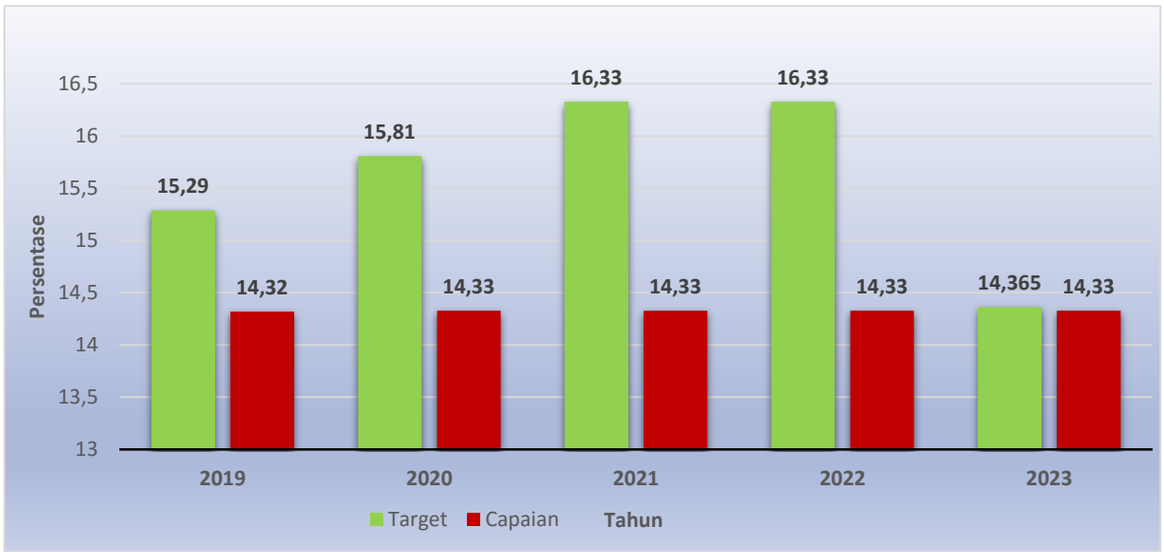

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 54 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2019-2023

Gambar 2.54 diatas menunjukkan penambahan jalur hijau masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 target seluas 15,29 persen dengan realisasi 14,32 persen. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 14,33 persen, walaupun masih dibawah target. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk peruntukan pembebasan lahan, yang ditargetkan seluas 5.8 Ha untuk mencapai 16,33 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 DLHK3 lebih fokus pada pemeliharaan RTH dan penataan RTH yang sudah ada yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang dan pemenuhan RTH Ramah Anak. Pada Tahun 2022 capaian realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14,33 pada tahun 2021 dan masih belum mampu untuk mencapi target yaitu sebesar 16,33. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 14,33 mampu mencapai target sebesar 14,365%.

8) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak

Menambah fasilitas RTH ramah anak merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu wilayah kota yang sedang berkembang. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target realisasi lahan RTH ramah anak, capaian luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.86 berikut ini:

Tabel 2. 86 Capaian Luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Luas Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak	Target dan Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	20 %	30 %	40 %	50%	0
2	Realisasi	10 %	10 %	10 %	10 %	10%
3	Persentase Capaian	50 %	33 %	25 %	20%	10%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.86 di atas data tahun 2019 relisasinya mencapai 10% dari 20% yang ditargetkan (persentase capaian 50%). Angka realisasi 10%

bertahan hingga tahun 2022 dan 2023. Tahun 2023 RTH ramah anak tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2023-2026.

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 55 RTH Ramah Anak Hutan Kota Tibang

9) Penghargaan Adipura

Penghargaan Adipura adalah penghargaan untuk kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk memacu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kriteria pemilihan meliputi kriteria fisik dan non fisik. Tabel 2.87 berikut adalah target dan capaian penghargaan Adipura Tahun 2019 sampai Tahun 2023

Tabel 2. 87 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/ capaian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meraih Adipura	Nilai Fisik dan Non Fisik Adipura	Target	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
		Capaian	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK		Belum ada pengumuman

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

** Tahun berjalan

Data di atas menunjukkan bahwa target meraih Adipura pada tahun 2022 berhasil direalisasikan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya target yang ditetapkan belum dapat diraih. Pada Tahun 2023 penghargaan adipura belum diumumkan.

10) Persentase Penerangan Jalan Umum

Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan penerangan jalan umum terus meningkat. Data jumlah LPJU di Kota Banda Aceh hingga 2019 adalah sebanyak 11.481 Unit. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lampu PJU yang dipasang di

Kota Banda Aceh, sehingga pada tahun 2022, jumlahnya menjadi 11.856 unit. Tahun 2023 jumlah LPJU meningkat sebesar 11.980 unit. Untuk lebih jelasnya persentase capaian penerangan jalan umum dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.56 berikut:

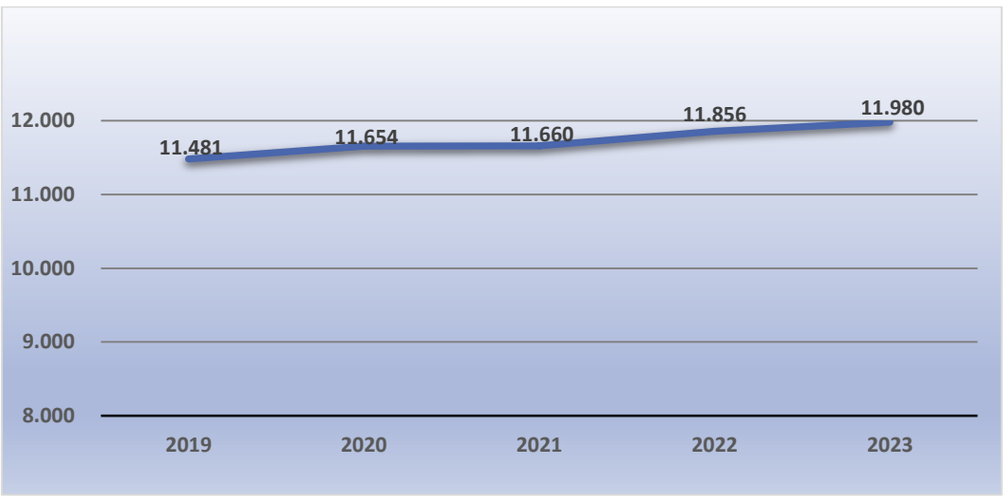

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 56 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tabel 2.88 menunjukkan persentase capaian Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh tahun 2019-2023:

Tabel 2. 88 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum	Target dan Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	81,38 %	82,79 %	84,20 %	85,61%	86
2	Realisasi	81,16 %	82,38 %	82,42 %	83,81%	84,68%
3	Persentase Capaian	99,72 %	99,50 %	97,88 %	97,90%	97,56%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.88 diatas menunjukkan persentase capaian penerangan jalan umum hampir seratus persen dari yang ditargetkan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, namun pada tahun 2021 persentase capian menurun sebesar 97,88% dan tahun 2022 naik sedikit menjadi 97,90%. Tahun 2023 persentase capaian sebesar 97,56%.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kartu indentitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Rasio kepemilikan KTP di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.89 di bawah ini:

Tabel 2. 89 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	3.309.145	3.382.639	3.504.900	3.589.857		139.640	165.307	167.922	169.083	173.912
Jumlah Wajib KTP Elektronik	3.554.143	3.682.029	3.692.292	3.750.429		3072	165.415	169.097	174.140	174.799
Rasio	**93,12**	**91,87**	**94,92**	**95,72**		99,48	99,93	99,31	97,10	99,76

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024

Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-rata penduduk di Aceh yang memiliki KTP mencapai angka 94 persen, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Penduduk Aceh yang memiliki KTP Elektronik di tahun 2022 berjumlah 3.750.429 atau 95,72 persen dari jumlah wajib KTP Elektronik. Tabel 2.89 di atas menunjukkan Kota Banda rasio kepemilikan KTP dari Tahun 2019-2023 mencapai 99,76 persen, capaian tersebut sudah berada diatas target nasional kepemilikan KTP-el yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja antara kadisdukcapil seluruh Indonesia dengan target 99,40 persen.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran melalui sosialisasi, upaya proaktif, pelayanan yang terjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran baik medis maupun non medis. Pelayanan dilakukan dengan menyediakan pelayanan melalui aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau tingkat gampong dan semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain:

sosialisasi, upaya proaktif dengan pelayanan yang menjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan melalui inovasi berupa aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong yakni Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi). Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis). Jumlah kepemilikan akte kelahiran dan jumlah kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.90 di bawah ini:

Tabel 2. 90 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun.	131.173	139.640	146.878	160.513	
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun.	2.845	3.072	2.713	3.574	

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 2.90 di atas dapat dilihat jumlah akte kelahiran yang diterbitkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 160.513. Sementara itu angka kelahiran cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan jauh melebihi dari jumlah angka kelahiran. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran membuat akta kelahiran.

Pada Provinsi Aceh Sepanjang tahun 2018– 2022, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, hanya 75,58 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 96,63 persen di tahun 2022. Kepemilikan akte lahir pada kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2.73.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa

Sarana dan prasarana perkantoran desa merupakan pendukung seluruh aktifitas pemerintahan di desa/gampong. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan sangat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh aparat gampong bagi masyarakat. Selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.91 berikut:

Tabel 2. 91 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah gampong	2019		2020		2021		2022		2023	
			jumlah kantor pemerin-tahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik
1	Baiturrahman	10	10	100	10	100	10	90	10	100	10	100
2	Kuta Alam	11	10	90.91	10	90.91	11	100	11	100	11	100
3	Meuraxa	16	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100
4	Syiah Kuala	10	9	90	9	90	10	100	10	100	10	100
5	Lueng Bata	9	9	100	9	100	9	100	8	89	8	89
6	Kutaraja	6	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
7	Banda Raya	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Jaya Baru	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
9	Ulee Kareng	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**90**	**88**	**97.78**	**88**	**97.78**	**90**	**100**	**89**	**98,89**	**89**	**98,89**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 kondisi prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik mencapai 97,78 %. Pada tahun 2021 cakupannya sudah 100 %. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan cakupan menjadi 98,89 dikarenakan terjadinya musibah kebakaran pada kantor Keuchik Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata, dan sampai tahun 2023 belum ada pembangunan kantor keuchik baru.

2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim

Mukim merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diterapkan dalam pemerintahan. Kota Banda Aceh secara khusus menuangkan peran mukim dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam qanun ini dituangkan bahwa terdapat fungsi mukim diantaranya pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah gampong dalam mukim, penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, pengorodinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejehateraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender, penyelesaian sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, dan juga termasuk pengawasan fungsi lilngkungan hidup dan pengelolan sumber daya alam dalm mukim. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Selama Tahun 2019-2023 jumlah kantor mukim yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.92 di bawah ini:

Tabel 2. 92 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2019		2020		2021		2022		2023	
			Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
1	Baiturrahman	2	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
2	Kuta Alam	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3	Meuraxa	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
4	Syiah Kuala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lueng Bata	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Kutaraja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Banda Raya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jaya Baru	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
9	Ulee Kareng	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**17**	**6**	**35.29**	**6**	**35.29**	**6**	**35,29**	**6**	**35,29**	**6**	**35,29**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Di Kota Banda Aceh terdapat 17 mukim. Sarana dan prasarana mukim dalam kota Banda Aceh masih sangat kurang, bahkan banyak yang belum memiliki kantor mukim. Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor mukim yang baik dengan jumlah seluruh mukim dikali 100%. Dari tahun 2019 s/d 2023 data cakupan sarana dan prasarana mukim memperoleh angka yang sama yaitu 35,29%. Sebagian kantor mukim yang adapun dalam keadaan rusak sedang dan ringan yang perlu perbaikan, seperti di Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/karangtaruna, remaja mesjid dan lain-lain.

Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.93 berikut ini

Tabel 2. 93 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
1	Baiturrahman	10	21	2.1	10	21	2.1	10	21	2.1	10	21	2.1	10	21	2.1
2	Kuta Alam	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27
3	Meuraxa	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88
4	Syiah Kuala	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2
5	Lueng Bata	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44
6	Kutaraja	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33
7	Banda Raya	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2
8	Jaya Baru	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22
9	Ulee Kareng	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**90**	**196**	**2.18**	**90**	**196**	**2.18**	**90**	**196**	**2.18**	**90**	**196**	**2.18**	**90**	**196**	**2.18**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan lain-lain. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM sampai Tahun 2023 adalah 2,18 kelompok per gampong.

4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
i. melaksanakan tertib administrasi; dan
j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun,Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.

Tabel 2. 94 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
1	Baiturrahman	11	424	38.55	11	412	37.45	11	412	37.45	11	403	36,64	11	693	63.00
2	Kuta Alam	12	431	35.92	12	341	28.42	12	341	28.42	12	440	36,67	12	633	52.75
3	Meuraxa	17	312	18.35	17	361	21.24	17	361	21.24	17	431	25,35	17	669	39.35
4	Syiah Kuala	11	407	37.00	11	321	29.18	11	321	29.18	11	382	34,73	11	682	62.00
5	Lueng Bata	10	310	31.00	10	405	40.50	10	405	40.50	10	351	35,10	10	398	39.80
6	Kutaraja	7	166	23.71	7	324	46.29	7	324	46.29	7	241	34,43	7	365	52.14
7	Banda Raya	11	336	30.55	11	239	21.73	11	239	21.73	11	441	40,09	11	473	43.00
8	Jaya Baru	10	310	31.00	10	309	30.90	10	309	30.90	10	335	33,50	10	543	54.30
9	Ulee Kareng	10	347	34.70	10	350	35.00	10	350	35.00	10	293	29,30	10	593	59.30
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**99**	**3.043**	**30.74**	**99**	**3.062**	**30,93**	**99**	**3.062**	**30,93**	**99**	**3.317**	**33,51**	**99**	**5.049**	**51,00**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K BKB, Lansia, Pola Asuh, dan lain-lain. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 2.962 kelompok binaan PKK Kota Banda Aceh dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 5.049 kelompok binaan.

5) Persentase PKK aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Jumlah PKK aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut:

Tabel 2. 95 PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	100	100	100	100	100
4	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan pembinaan, sejak tahun 2019 s/d 2023 seluruh TP PKK dalam kondisi aktif. Hal ini karena adanya dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Sejak tahun 2019 s/d 2023 persentase PKK aktif sebesar 100%.

6) Persentase Posyandu aktif

Posyandu merupakan bentuk kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada tingkat gampong dan kegiatan ini diawasi oleh petugas kesehatan di gampong tersebut. Keaktifan kegiatan Posyandu dapat menjadi indikator kualitas kesehatan pada tingkat gampong. Berikut adalah gambaran jumlah Posyandu aktif yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 96 Jumlah Posyandu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
		Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif
1	Baiturrahman	19	19	19	19	19
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	12	12	12	12	12
5	Lueng Bata	9	9	9	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	114	114	114	114	114

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh pada tahun 2023 berjumlah 114 buah dan posyandu aktif berjumlah 114 buah. Pada tahun 2000 kebawah tercatat ada satu posyandu yang tidak aktif yaitu Posyandu Lembah Hijau di Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, namun sejak tahun 2021 status posyandu tersebut telah dihapuskan dan dilebur dengan posyandu lainnya di Gampong Cot Mesjid.

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun sejak Tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.97 berikut ini:

Tabel 2. 97 Strata Posyandu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Strata Posyandu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pratama	4	0	1	1	1
2	Madya	89	90	88	88	88
3	Purnama	22	24	25	25	25
4	Mandiri	0	0	0	0	0
Jumlah		**115**	**114**	**114**	**114**	**114**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.97 menunjukkan bahwa Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada tahun 2023 strata posyandu dalam Kota Banda Aceh adalah 1 pratama, 88 madya, 25 purnama, dan belum ada yang mencapai strata mandiri.

7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik (kepala desa) Langsung (Pilchiksung). Persentase partisipasi masyarakat dalam pilchiksung dihitung dengan jumlah masyarakat yang ikut pemilihan pada pilchiksung dibagi jumlah masyarakat yang telah memiliki hak pilih (DPT) dikali 100 persen. Jumlah desa pelaksana Pilchiksung, jumlah daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dan partisipasi masyarakat dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut :

Tabel 2. 98 Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	22	0	24	0	31
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	24,999	0	40,651	0	58,150
3	Jumlah Pemilih	Orang	17,058	0	25,513	0	36,674
4	Partisipasi Masyarakat	%	68.23	0	62.76	0	63.07

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.98 di atas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2022 tidak ada pemilihan Geuchiek secara langsung (pilchiksung) karena tahun ini adalah masa transisi untuk pemilihan serentak. Jadwal pemilihan Geuchiek untuk Kota Banda Aceh adalah tahun 2021, 2023, dan 2025. Dimasa penyesuaian pemilihan geuchiek maka ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas Geuchiek.

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Pada tahun 2019 dilakukan

pemilihan keuchik langsung yang dilakukan tidak serentak. Namun sejak tahun 2021 telah dilakukan pemilihan Keuchik Serentak .

Presentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) dihitung dengan jumlah masyarakat yang ikut pemilihan pada pilchiksung dibagi jumlah masyarakat yang telah memiliki hak pilih (DPT) dikali 100 %. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi Masyarakat pada tahun 2023 mencapai 63,07%.

8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2017, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan). Tabel 2.99 menunjukkan secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dalam Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 99 Mukim Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4
		17	Poeteumeureuhom	5

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Tabel 2.99 diatas menggambarkan jumlah mukim dan jumlah gampong dibawah mukim per kecamatan di Kota Banda Aceh. Sebagaimana halnya kabupaten/kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim.

9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada poin (b) lebih dikenal dengan nama Dana Desa (DD), sedangkan alokasi Dana Desa pada poin (d) untuk Provinsi Aceh dikenal dengan nama Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, untuk Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota poin (c) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya besaran Dana pembangunan untuk gampong Tahun 2019 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahun telah memfasilitasi dana pembangunan untuk gampong. Pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong dilaksanakan dari APBK melalui ADG (Alokasi Dana Gampong) untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Sejak tahun 2015 mulai diluncurkan Dana Desa dari Pusat, dan sejak Tahun 2017 Dana pembangunan untuk gampong juga mendapat bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

Tabel 2. 100 Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)						58.357.906.650	48.862.057.710	57.111.381.200	57.481.003.700	59,418,915,600
2	Dana Desa (DD)	4,955,500,482,000	4,90,088,180,000	4,986,622,278,000	4,669,371,747,00	4,761,060,876	74.192.333.000	75.977.398.000	77.702.442.000	70.100.703.000	73,484,769,000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah						6.993.885.233	6.064.790.652	5.142.160.652	5.142.160.652	5,142,160,652
4	Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah						3.031.474.257	2.565.987.274	2.565.987.274	2.565.987.274	2,565,987,274
	Jumlah						**142.575.599.140**	**133,470.233.636**	**142.521.971.126**	**135.289.854.626**	**140,611,832,526**

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel di atas dapat bahwa alokasi dana desa untuk Aceh meningkat dari tahun 2019-2021, namun menurun di tahun 2022. Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang menerima alokasi dana desa paling besar karena memang memiliki jumlah desa paling banyak dan dapat dilihat Kota Banda Aceh terjadi fluktuasi terhadap alokasi dana pembangunan yang disalurkan untuk gampong, yang pada tahun 2019 hanya Rp. 142.575.599.140,- menurun menjadi Rp.135.289.854.626,- pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi penurunan disebabkan menurunnya jumlah Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023 total alokasi dana Pembangunan desa di Kota Banda Aceh kembali naik menjadi Rp. 140,611,832,526,-

Walaupun alokasi dana untuk gampong mengalami penurunan akibat pandemic, kemampuan gampong dalam mengelola dana gampong telah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Capain pengelolaan keuangan gampong dapat dilihat pada Tabel 2.101 berikut:

Tabel 2. 101 Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2019-2023

Uraian (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik (%)	30	47	64,44	66,67	72,22

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Pada awal periode capaian pengelolaan keuangan gampong relatif masih rendah. Kemampuan aparat gampong dalam mengelola dana gampong mengalami beberapa kendala dan belum mampu memenuhi kriteria cakupan yang baik yaitu Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dialami antara lain dari segi perencanaan sering terlambat akibat ketidakharmonisan dengan tuha peut gampong; penatausahaan, kelengkapan berkas/dokumen pencairan; pelaksanaan, perubahan harga barang, menyebabkan perubahan proses pengadaan. Akibatnya mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Pergantian geuchiek dapat menyebabkan kapasitas aparat yang juga berbeda dan bermasalah dengan proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya berkesinambungan ini kemudian berdampak kepada membaiknya capaian pengelolaan keuangan gampong yang hanya 30 persen pada tahun 2019 menjadi 72,22 persen pada tahun 2023.

10) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh mengalihkan dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan dari PT. BPRS Baiturrahman menjadi Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh dan disalurkan oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan sistim penyaluran dana PUEM lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Penempatan Dana Awal Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.436.000.000,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening angsuran pokok nomor : 121.01.00587 an. Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dan rekening jasa bagi hasil nomor : 121.01.00590 untuk penyetoran jasa mengendap serta jasa bagi hasil dari debitur PUEM.

Tabel 2. 102 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	227.000.000	187.000.000	203.000.000	170.000.000	179.000.000
2	Jumlah Penerima (orang)	48	40	35	26	33

Sumber : Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024

Adapun Jumlah permohonan yang diterima dari masyarakat pada DPMG Kota Banda Aceh sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2023 jumlahnya sebanyak 204 debitur. Permohonan para debitur tersebut diproses dalam tahap 01 s/d 48, tahap pencairan tersebut terbagi dalam wilayah domisili pada 90 Gampong 9 Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Dana yang di salurkan dari tahun 2019 s/d 2023 sebesar Rp. 966.000.000,-

Penyaluran Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh diperuntukan kepada pedagang, sektor perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha. Jumlah plafon pembiayaan awal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan dan jumlah plafon pembiayaan tahap selanjutnya dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan adapun masyarakat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, dengan mengisi fomulir yang telah disediakan oleh DPMG dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat jaminan/borok serta jasa pembiayan kepada debitur ditetapkan setara 6 (enam) % per tahun dengan pembagian 3 (tiga) % sebagai modal PUEM yang disetor ke rekening jasa bagi hasil dan 3 (tiga) % untuk pendapatan pihak penyalur. Jangka waktu pembiayaan adalah 40 (empat puluh) minggu dengan akad pembiayaan dalam bentuk murabahah/ mudharabah.

Setiap permohonan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong bersangkutan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan dana PUEM-G dan dana lain yang telah disalurkan di masing–masing gampong. Permohonan tersebut diteliti dan diseleksi keabsahan dokumennya pada DPMG Kota Banda Aceh, kemudian disampaikan ke LKMS Mahirah Muamalah. Setelah menerima permohonan, petugas LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke lokasi di gampong dan menganalisa kelayakan usahanya. Petugas LKMS Mahirah Muamalah mengadakan pertemuan dengan calon debitur di gampong sebanyak tiga kali pertemuan serta meninjau kelayakan usaha dan mengambil keputusan nama-nama yang layak menjadi debitur dan jumlah dana yang harus diberikan untuk penambahan modal usahanya.

Nama-nama debitur tersebut disampaikan kepada DPMG, kemudian DPMG membuat Surat Keputusan jumlah plafon dana yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh untuk dicairkan kepada para debitur PUEM Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Penetapan Plafon dan Debitur Penerima Dana Bergulir Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, nama-nama debitur dan jumlah dana yang layak diberikan, SK tersebut dikirim kepada LKMS Mahirah Muamalah untuk proses pencairan dana. Petugas LKMS Mahirah Muamalah kemudian mencairkan dana sesuai dengan dana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

11) Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong

Definisi asset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.103 berikut:

Tabel 2. 103 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian Pengelolaan Aset Gampong (%)	37	40	44,44	46,67	47,78

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Aset gampong sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari dan kekayaan gampong sebagai barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah, perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat membutuhkan data yang akurat, sehingga aset gampong dapat dikelola dengan baik.

Tabel diatas menggambarkan prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong serta fasilitasi inventarisasi aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

12) Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.104 berikut :

Tabel 2. 104 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong (%)	38	45	59,81	60,75	63,55

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik.

Tabel diatas menggambarkan Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dari Tahun 2019 s/d 2023. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penataan administrasi pemerintahan mukim/gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur mukim/gampong dalam penataan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

13) Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM dapat dilihat pada tabel 2.105 di bawah ini.

Tabel 2. 105 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Status IDM	2019	2020	2021	2022	2023
1	MANDIRI	4	12	16	60	82
2	MAJU	54	54	53	30	8
3	BERKEMBANG	32	24	21	0	0
4	TERTINGGAL	0	0	0	0	0
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0
Jumlah		**90**	**90**	**90**	**90**	**90**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2023

Data IDM ini merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan dalam pengalokasian Dana Desa. Dalam pemutakhiran data Status Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terjadi peningkatan status desa di Kota Banda Aceh yang awalnya pada tahun 2019 terdiri dari 4 Desa Mandiri, 54 Desa Maju dan 32

Desa Berkembang. Pada tahun 2023 menjadi 82 Desa Mandiri dan 8 Desa Maju. Tidak ada desa yang berstatus berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

14) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Banda Aceh

Meningkatnya jumlah BUMG pada Tahun 2020 dikarenakan BUMG menjadi Prioritas terhadap penggunaan dana desa. Sedangkan pada tahun 2021 BUMG menurun dikarenakan ada beberapa BUMG yang bubar akibat pandemi Covid 19. Pada Tahun 2023 Jumlah BUMG yang sudah terbentuk adalah 71 BUMG dengan Rincian 26 BUMG sudah berbadan hukum dan 45 BUMG lainnya sudah terverifikasi nama resmi (lima diantaranya sedang dalam proses badan hukum). Data BUMG Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.106 di bawah ini

Tabel 2. 106 Data BUMG Kota Banda Aceh tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2022
Data BUMG Kota Banda Aceh	28 BUMG	47 BUMG	43 BUMG	43 BUMG	71 BUMG

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik/BOKB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 8 (delapan) Balai Penyuluh KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong. Berikut Tabel 2.107 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 107 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	1,35*)	1,57	2,68	2,30	2,14

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024
**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2.107 di atas dapat dilihat rata-rata jumlah anak di Kota Banda Aceh sejak tahun 2018 sampai 2020 tidak mencapai 2 orang anak per keluarga tetapi pada tahun 2021 dan 2022 jumlah anak perkeluarga berjumlah 2 orang anak. Rata-rata jumlah anak per keluarga/angka kelahiran total (TFR) Nasional tahun 2023 adalah 2.14, sedangkan di tingkat propinsi Aceh sebesar 2.34. Adapun data TFR Kota Banda Aceh belum dapat disampaikan, dikarenakan data dimaksud belum publis dari Kedeputian Dalduk.

2) Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan) dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut ini:

Tabel 2. 108 Ratio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	45,21	55,76	72,99	47,87	59,44

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.108 di atas menunjukkan data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang positif atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB dimana pada tahun 2019 hanya 45,21 persen menjadi 72,99 persen di tahun 2021. Namun pada pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Penurunan ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

- Keberhasilan capaian cakupan peserta KB aktif di tahun 2021 yang melebihi 100%, menyebabkan dinaikkannya angka target jumlah PUS namun tidak diikuti dengan kenaikan jumlah akseptor;
- Data kepesertaan KB yang belum maksimal karena ada peralihan aplikasi dari SIGA ke New Siga; dan
- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dimana akseptor akan berganti kontrasepsi setelah 5 s/d 7 tahun sehingga tidak ada penambahan jumlah akseptor KB baru.

Tahun 2023, rasio akseptor KB sebesar 59.44% adalah jumlah akseptor KB (23.458) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (39.463). Secara target Provinsi Aceh untuk mCPR tahun 2023 sebesar 58.49%, Kota Banda Aceh sudah melampaui dari target dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Namun belum secara signifikan mencapai target yang ditetapkan disebabkan:

- Jumlah PUS yang bertambah dari tahun 2022 dan banyaknya PUS yang masih program untuk mempunyai anak; dan
- Adanya aseptor DO atau bukan PUS lagi karena usia sudah di atas 49 tahun, sehingga walaupun menggunakan kontrasepsi tetapi tidak terdaftar lagi dalam sistem.

H. Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum merujuk kepada pengangkutan orang dan atau barang oleh kendaraan umum baik berupa mobil/bis penumpang ataupun kapal/pesawat. Layanan angkutan ini diperlukan untuk memperlancar aktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi dan non ekonomi. Penggunaan jasa angkutan umum oleh masyarakat di Kota Banda Aceh pada periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.57 dibawah ini:

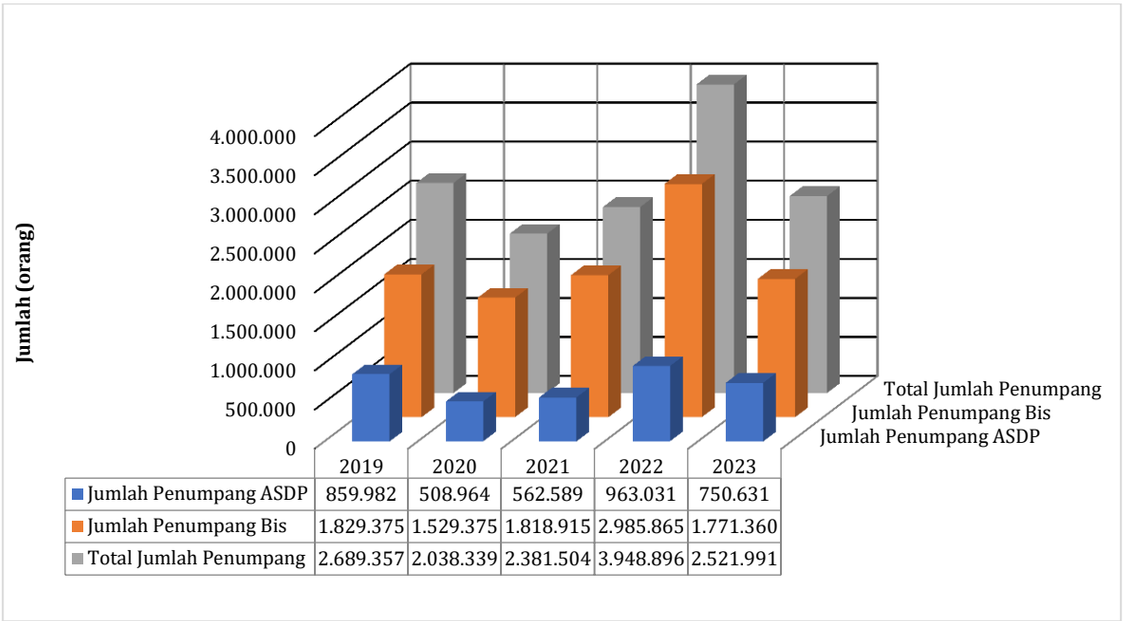

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang ASDP	859.982	508.964	562.589	963.031	750.631
Jumlah Penumpang Bis	1.829.375	1.529.375	1.818.915	2.985.865	1.771.360
Total Jumlah Penumpang	2.689.357	2.038.339	2.381.504	3.948.896	2.521.991

Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 57 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Gambar 2.57 di atas menunjukkan jumlah penumpang angkutan umum di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. jumlah penumpang pada angkutan bis dan juga ASDP YANG terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.948.896 dan pada tahun 2023 sebesar 2.521.991.

2) Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk menyediakan layanan penumpang umum. Pemberian izin trayek angkutan umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dilakukan agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk di naiki.

Rasio izin trayek di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.109 berikut ini :

Tabel 2. 109 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Izin Trayek perkotaan (jlh kendaraan)	207	210	22	12	12
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-		-	-
3.	Izin Trayek (KPS)	37	24	22	12	12
4.	Jumlah penduduk	270.321	275.800	255.029	255.409	259.538
5.	Rasio Izin Trayek	0,08	0,08	0,01	0,005	0,005

Sumber :Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah izin trayek perkotaan pada tahun 2023 memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 12 kendaraan saja. Penurunan yang terjadi dari tahun 2021 dikarenakan izin trayek yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Izin trayek dikeluarkan untuk

masa 5 tahun, jika sudah habis masa berlaku maka dapat diajukan kembali. Sementara itu, Izin trayek KPS merupakan izin trayek yang masa berlakunya adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan melekat pada kendaraan.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah rangkaian pengujian kelayakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna kendaraan bermotor terutama bagi angkutan umum. Peraturan uji KIR tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara khusus menyebutkan pada Pasal 53 ayat 1 yaitu "Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan". Untuk lebih jelasnya jumlah uji Kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.110:

Tabel 2. 110 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Angkutan Umum	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	74	30	20,27	74	14	9,46	22	14	31,82	29	16	27,59	29	16	27,59
2	Mobil bus	1.637	2.150	65,67	1.817	1.581	43,51	1.532	2044	66,71	1.711	1.709	49,94	1841	1743	47,34
3	Mobil barang	5.958	7.353	61,71	6.348	4.871	38,37	4.971	7.835	78,81	5.667	4.597	40,56	6144	5217	42,46
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	Kereta tempelan	-	-	-	28	63	112,50	54	110	101,85	66	93	70,45	78	135	86,54
	Jumlah	7.669	9.533	62,15	8.267	6.529	39,49	6.579	10.003	76,02	7.473	6.415	42,92	8092	7111	43,94

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Persentase kenderaan yang melakukan uji kir tahun 2023 mengalami kenaikan dari 85,84 % dari tahun 2022 menjadi 87,88 % pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi dikarenakan berhasilnya strategi yang dilakukan dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan uji KIR sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, strategi lainnya adalah melakukan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian..

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.Jumlah terminal bis adalah 3 (tiga) unit yaitu:

Terminal Penumpang Type A (Batoh)
Terminal Penumpang Type B (Lueng Bata)
Terminal Penumpang Type C (APK Keudah)

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Kota Banda Aceh Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.111 dibawah ini:

Tabel 2. 111 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	0	0
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

5) Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat dan penumpang menjadi data penting untuk melihat arus penumpang di Kota Banda Aceh. Jumlah angkutan darat dan penumpang di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini:

Tabel 2. 112 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkutan darat						796	901	1.554	1.717	1.764
Jumlah penumpang Angkutan Darat	12.762.542	633.082	612.980	2,964,869	602.784	1.408.808	1.529.375	1.825.977	2.985.865	1.771.360
Persentase (%)						0,06	0,06	0,09	0,06	0.10

Sumber :Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.112 di atas menunjukkan persentase angkutan darat dengan jumlah penumpang dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 persentase angkutan darat sebesar 0,10% . Jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang darat pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1.764 dan 1.771.360.

6) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kir merupakan prasyarat yang penting dalam penyediaan armada angkutan umum. Persentase kepemilikan Kir angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki Kir dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100 persen. Persentase angkutan umum yang melakukan uji Kir di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.113 berikut ini:

Tabel 2. 113 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	4.767	7.171	10.003	6.415	7.111
2	Jumlah angkutan umum	7.669	7.797	6.579	7.473	8.092
Persentase (%)		62,16	91,97	152,04	85,84	87,88

Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.113 di atas, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sebesar 4.767, pada tahun 2021 sebesar 10.003. jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 6.415 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7.111.

Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan oleh:

1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
5. Kendaraan yang beroperasi dijalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

7) Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas berguna untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Ketersediaan rambu-rambu menjadi hal yang penting bagi warga kota dan penghuninya. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100 persen. Tabel 2.114 berikut ini memperlihatkan persentase ketersediaan rambu-rambu di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 114 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pemasangan Rambu	2.305 Unit	2.324 Unit	2.424 Unit	2.527 Unit	2.261 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	2.360 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit	2.540 Unit	2.590 Unit
Persentase (%)		97,7	98,5	102,7	99,5	87,30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.114 di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan Tahun 2023 telah mencapai 87,30 persen, terjadinya penurunan jumlah rambu pada tahun 2023 daripada tahun sebelumnya disebabkan banyaknya jumlah rambu yang rusak setelah dilakukan survei ke lokasi pemasangan rambu sehingga diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkala dan berkesinambungan.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di sektor komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh merujuk pada indikator yang ingin dicapai yaitu pemeringkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Nilai indeks SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para penggunanya, yang dahulu dikenal dengan nama pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). SPBE juga merupakan sebuah alat ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna memetakan perkembangan e-government di seluruh Indonesia. Indikator tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diperjelas dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2018 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2. 115 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,24 (Cukup)	2,87 (Baik)	2,62 (Baik)	3,15 (Baik)	3,54 (Sangat Baik)

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.115 di atas dapat dilihat bahwa dari skala 1 sampai dengan 4 (versi PeGI) dan 1-5 (Versi SPBE), terjadi peningkatan pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik yang cukup signifikan. Nilai Indeks SPBE Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 3,15 (Baik), naik menjadi 3,54 (Sangat Baik) pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan diberbagai sektor domain dan aspek penilaian terutama pada bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan strategi yang lebih komprehensif dan matang dalam upaya peningkatan nilai pemeringkatan SPBE tersebut. Beberapa keunggulan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah di aspek Kebijakan Internal dalam penerapan SPBE beserta dengan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, aspek Perencanaan Strategis, Aspek TIK yang dimiliki dan Kualitas Penyelenggara.

Pencapaian Indeks SPBE ini selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yaitu Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 57%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dikarenakan perbandingan dari mampu dilayaninya jumlah SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD/SKPK yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti masterplan/blue print SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD/SKPK lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu

aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu untuk terus bekerjasama dengan seluruh OPD/SKPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyangkut pelaksanaan e-government, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh juga melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan penyebaran/desiminasi informasi kepemerintahan kepada masyarakat melalui situs daring (*website*) organisasi perangkat daerah (OPD) yang diwujudakan dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Website OPD yang Aktif. IKU Persentase Website OPD yang Aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.116 di bawah ini:

Tabel 2. 116 Presentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase website OPD yang aktif (%)	65	70	75	80	82

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.116 di atas presentase OPD yang situsnya (*website*-nya) aktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi capaian persentase website OPD yang Aktif dari tahun 2018-2023. Tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan *update* berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/*website* OPD tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website informasi publik kepada masyarakat dapat disampaikan melalui situs/*website*. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan *city branding* kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan *media social* yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (*followers*) yang menyasar kaum muda secara luas.

Selain melakukan diseminasi informasi kepemerintahan secara daring (online), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik juga melaksanakan desiminasi

dan pemberdayaan komponen masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat gampong atau yang lebih dikenal dengan KIM. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dimasukkan ke dalam RPD Diskominfotik Kota Banda Aceh berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Diskominfotik Kota Banda Aceh Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah KIM dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. Cakupan pelaksanaan KIM di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui Tabel 2.117 dibawah ini

Tabel 2. 117 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.117 di atas menunjukkan bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat gampong di tingkat kecamatan hingga dari tahun 2019-2023 mencapai 100 persen berdasarkan formulasi target yang telah ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIM perlu didukung oleh semua *stakeholder*. Kebutuhan pengembangan website-website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selayaknya di dukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk kebijakan yang disampaikan dalam KIM salah satunya seperti perlu adanya web site gampong dimana butuh dana untuk sarana dan prasarana pendukung web tersebut.

J. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

1) Persentase Koperasi Aktif

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peran ini diberikan karena koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan sikap khas bangsa Indonesia yang saling tolong menolong dan selalu begotong royong. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menfasilitasi masyarakat dalam menggiatkan koperasi. Kota Banda Aceh turut mendorong tumbuhnya dan aktifnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan koperasi aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.118 di bawah ini:

Tabel 2. 118 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif				3.967	4,037	384	386	395	399	399
Jumlah Koperasi				6.974	7,772	506	507	513	517	519
Persentase Koperasi Aktif	68	57,20	57,30	56,86	51,94	75,88	76,13	76,69	77,18	76,88

Sumber Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2023

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2023 mencapai 7.772 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 4.037 unit atau sebesar 51,94 persen. Dari tabel .. diatas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 56,86 persen menjadi 51,94 persen.

Perkembangan koperasi aktif di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.58 di bawah ini:

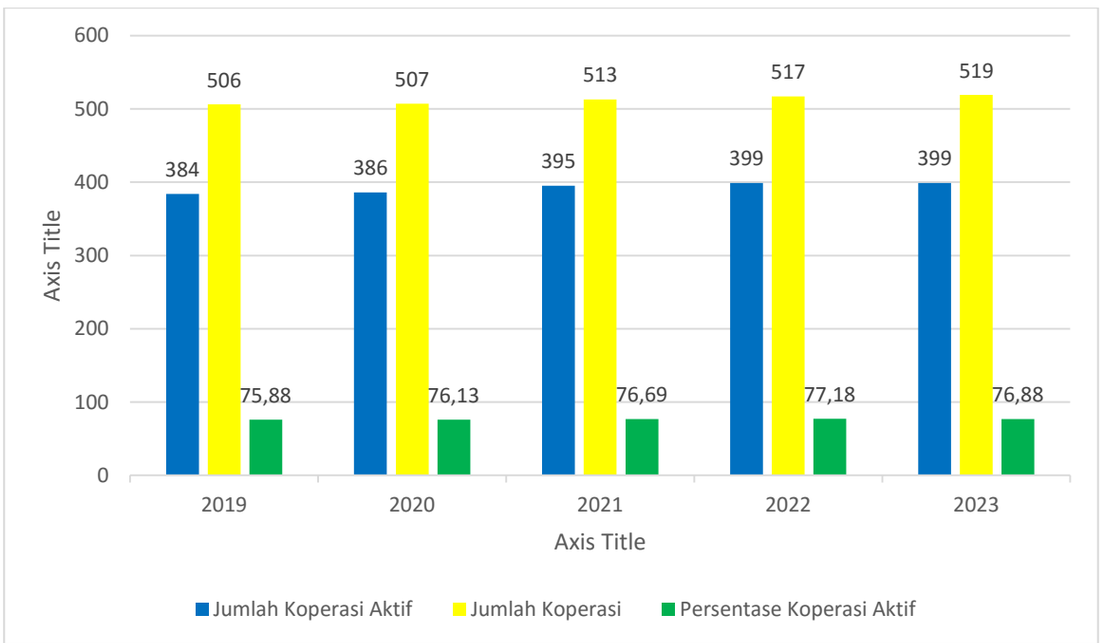

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 58 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tabel 2.118 dan Gambar 2.58 menunjukkan persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata persentase koperasi aktif per tahun 75,55 persen dari total koperasi yang dibentuk. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal periode yaitu tahun 2019 adalah 75,88 persen bertambah menjadi 76,88 persen pada akhir periode tahun 2023. Perkembangan

koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 506 jumlah koperasi aktif menjadi 519 koperasi.

2) Jumlah BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat. Namun demikian, BPR dan LKM menghadapi permasalahan berupa permodalan keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang membutuhkan modal dari LKM. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.119 di bawah ini:

Tabel 2. 119 Perkembangan jumlah BPR/ LKM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh UMKM	12.012	15.107	16.970	17.308	34,428
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.119 di atas dapat dilihat jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mengalami peningktan setiap tahunnya. Sedangkan jumlah BPR/LKM tidak mengalami peningkatan sejak Tahun 2019 hingga 2023, konstan pada angka 4. Untuk meningkatkan jumlah BPR/LKM perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengembangkan BPR/LKM sehingga lebih banyak BPR/LKM yang dapat membantu peningkatan UMKM.

3) Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal

Pasar-pasar di Kota Banda Aceh masih berfungsi dengan sangat baik. Namun, perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi menuntut perubahan terutama dari sisi tata ruang dan keindahan kota. Dengan sebab itu maka beberapa lokasi pasar perlu dipindahkan atau diremajakan sehingga menimbulkan beberapa pasar yang tertunda untuk berfungsi dengan baik. Berikut kondisi pasar di Kota Banda Aceh yang sudah berfungsi dengan baik dan belum. Untuk lebih jelasnya, kondisi pasar di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.120 di bawah ini:

Tabel 2. 120 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	-	-	-	-	
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	-	-	-	-	
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	-	-	-	-	
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	-	-	-	-	
5	Pasar Kartini	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pasar Ikan	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasar Daging	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pasar Bumbu	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pasar Unggas	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pasar Nasabe	V	V	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pasar Rex	V	V	-	-	V	-	-	V	V	
12	Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang	-	-	-	-	V	V	V	V	V	

13	Pasar Newtown	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir	-	-	-	-	V	V	V	V	V	-
15	Pasar Kuliner Ulee Lheue	-	-	-	-	V	V	V	V	V	-
16	Pasar Al-Mahirah Lamdingin	-	V	V	V	-	V	-	-	-	V
17	Pasar Rakyat - Batoh	V	V	-	-	-			V	V	V
18	Pasar Rakyat Ulee Lheu					V			V	V	-
Total		**12**	**14**	**5**	**5**		**5**	**4**	**7**	**7**	**3**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.120 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 ada 7 pasar yang belum berfungsi secara optimal yaitu Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang, Pasar Newtown, Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir, Pasar Kuliner Ulee Lhee, Pasar Rakyat – Batoh dan Pasar Rakyat Ulee Lheu. Pasar Kuliner Ulee Lheue yang dibangun dengan sumber dana APBN, pada Tahun 2019-2021 kondisi sudah kosong (tidak berfungsi).

Pasar Newton yang dibangun dengan dana bantuan dari Dana Otsus dan hibah Pertamina, terdiri dari 2 bangunan gedung. Pada Tahun 2018 Gedung A difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh. Sedangkan Tahun 2019-2021 gedung ini sudah kosong. Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango yang dibangun atas bantuan dana Otsus pada Tahun 2018 sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir, sedangkan pada Tahun 2019-2021 pasar ini sudah kosong. Pasar Aceh berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, bukan sebagai pasar tradisional. Berdasarkan SK Walikota Banda Aceh no. 464 tahun 2021 tentang Penetapan Pasar Rakyat dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Kota banda Aceh melalui UPTD Pasar Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terdapat 5 pasar di Kota Banda Aceh. *)Pasar Kartini, pasar Ikan, pasar daging, pasar bumbu Nasabe dan pasar Unggas di Peunayong sudah dilebur dan direlokasi pedagangnya di pasar Al mahirah Lamdingin. Pasar Rex difungsikan sebagai pasar kuliner. Pasar Lamgapang Ulee Kareng diambil alih pengelolaannya oleh BUMG Makmu Beurata menjadi pasar kuliner. Pasar Newton belum berfungsi secara optimal, disewa sebagai caffe dan kantor PDAM. Pasar Kuliner dan Souvenir Pango sudah dijadikan café Paopia Garden. Pasar Rakyat Batoh sebagian kiosnya sudah dimanfaatkan, sebagian lagi belum termanfaatkan. Pasar rakyat Ulhee lheu dikelola oleh pihak ketiga (Desiana) sebagai pusat permainan anak.

K. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

Pada Tahun 2023 jumlah total investor baik PMDN maupun PMA meningkat sebesar 227% dibandingkan Tahun dasar 2021 berjumlah 1078 Investor yang melaporkan realisasi investasinya. Banyak investor kelas menengah yang ikut mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kota Banda Aceh, namun investor dari kelas besar masih sedikit sehingga mengakibatkan capaian realisasi investasi agak melamban, dikarenakan tidak adanya investasi yang besar yang tumbuh di Wilayah Kota Banda Aceh. Adapun jumlah investor yang berinvestasi di

Provinisi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.121 di bawah ini:

Tabel 2. 121 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2019	376	70	74*	13*
2020	2.241	61	798	8
2021	1.003	51	804	15
2022	786	58	640	8
2023			3474	52

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2016-2019 disesuaikan RANWAL RKPA, 2024*

Berdasarkan tabel 2.121 di atas pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yaitu sebanyak 376 investor hingga 2241 pada tahun 2020, namun pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan yakni sebanyak 1.033 investor menjadi 786 investor pada tahun 2022. Dan untuk jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh baik yang berasal dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing). Pada investasi yang berasal dari PMDN, pada tahun 2023 sebesar 3474 investor. Jumlah investor yang berasal dari PMA sebesar 52 investor.

2) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadai wajah keamanan investasi bagi Aceh secara keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitibalitas yang tinggi bagi para investor. Tabel 2.122 berikut menyajikan nilai realiasi investasi PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh selama lima tahun sejak Tahun 2019:

Tabel 2. 122 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah PMDN dan PMA (Rp)	Jumlah Investor
2019	185.577.364.240	380.740.108.449	566.317.472.689	87
2020	257.206.290.684	2.000.000.000	259.206.290.684	806
2021	227.945.665.191	156.381.146.842	384.326.812.033	1081
2022	375.577.559.829	58.301.919.266	433.879.479.095	648
2023	536.425.559.412	37.109.995.756	573.535.555.168	3526

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

L. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda dan pemudi yang menghimpun segenap potensi anak muda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut serta dalam mengisi pembangunan. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2023 terdapat 54 OKP di Kota Banda Aceh. Berikut dibawah ini jumlah OKP yang aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.123 di bawah ini:

Tabel 2. 123 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Aceh	Kota Banda Aceh
		Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda
1	2019	70	53
2	2020	71	53
3	2021	66	54
4	2022	68	54
5	2023	68	54

Sumber : RANWAL RKPA, 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.123 tersebut dapat dilihat bahwa di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 68 (OKP) dan tidak mengalami kenaikan jumlah OKP pada tahun 2023. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan bentuk kewenangan pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Dan jumlah OKP yang terdaftar di Dispora Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 53 OKP, hingga di tahun 2023 berjumlah 54 OKP.

2) Pembinaan Atlet dan Pelatih

Olahraga sebagai sarana untuk mencapai prestasi tentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam membangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2023 Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olah raga yang dibina secara khusus dengan

para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlet yang dibina Kota Banda Aceh tahun 2023.

Tabel 2. 124 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
1	Atletik	11	4	1	5
2	Sepak bola	22	4	1	5
3	Bola voly	20	4	2	6
4	Bola basket	20	4	2	6
5	Pencak silat	15	4	1	5
6	Bulu tangkis	8	2	1	3
7	Tenis lapangan	8	3	-	3
8	Tenis meja	8	3	-	3
9	Karate	13	3	2	5
10	Taekwondo	13	3	2	5
11	Panahan	18	2	3	5
Total		156	36	15	51

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.124 di Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olahraga yang dibina khusus dengan para pelatih yang berlisensi hingga tahun 2023, yang didalamnya terdapat atlet binaan berjumlah 156 atlet dengan 51 pelatih. Atlet terbanyak adalah dari cabang olah raga Voly dan Basket sebanyak 20 orang dan yang paling sedikit adalah bulutangkis, tenis lapangan dan tenis meja masing-masing hanya sebanyak 8 orang atlet.

Sedangkan saat ini di Provinsi Aceh terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Yang terdiri dari 14 cabang olahraga binaan pada tahun 2023 diantaranya yaitu: 1) Atletik; 2) Pencak Silat; 3) Karate; 4) Panahan; 5) Anggar; 6) Tarung Derajat; 7) Sepakbola; 8) Bola Voly; 9) Kempo; 10) Bulutangkis; 11) Sepak Takraw; 12) Tenis Meja; 13) Angkat Besi; dan 14) Taekwondo. Dan 14 cabor yang dibina 6 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Sepakbola; 2) Taekwondo; 3) Pencak Silat; 4) Karate; 5) Tarung Derajat; dan 6) Atletik. Meskipun demikian, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Para- Cycling; 2) Tinju; 3) Petanque; 4) Drum Band; 5) B-Boyindo; dan 6) Fotografi. Saat ini jumlah pelatih yang mengukir prestasi di Provinsi Aceh berjumlah 15 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga perstasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2023 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 (lima) unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

3) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Secara umum, Pembinaan Kepemudaan terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Penyadaran kepemudaan berupa perlindungan pemuda dari peyalahan narkoba dan zat adiktif lainnya, perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas, perlindungan pemuda dari penyakit menular (HIV/AIDS), perlindungan pemuda dari tindak kekerasan, serta perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme sedangkan pemberdayaan pemuda berupa partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan informal, tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inkulsif, dan tumbuh kembangnya kreatitifas dan inovasi pemuda. Adapun pengembangan kepemudaan berupa tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda, tuumbuh kembangnya kepeloporan pemuda, tumbuh

kembangnya kesukarelawan pemuda, tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan serta tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda.

Pembinaan organisasi kepemudaan dilaksanakan melalui pembinaan manajemen kepemimpinan, manajemen rekruitmen keanggotaan, dan manajemen kinerja organisasi melalui pelatihan bagi pemimpin, pengurus dan anggota organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun organisasi kepemudaan yang ada di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 berjumlah 54 OKP dengan data pada Tabel 2.125 sebagai berikut:

Tabel 2. 125 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023

No	Organisasi Kepemudaan (OKP)
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
2	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ansor (PD GP Ansor)
3	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama (PD Fatayat NU)
4	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (PD IPNU)
5	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama(PD Fatayat NU)
6	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah(PD PM)
7	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA)
8	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA)
9	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Putri Al Washliyah (PD IPA)
10	Pimpinan Daerah Angkatan Putri Al Washliyah (PD APA)
11	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharan Indonesia (DPD AMPI)
12	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPD BMK ‘57)
13	Dewan Pimpinan Daerah Wira Karya Indonesia (Depidar WKI)
14	Dewan Pimpinan Daerah Baladhika Karya (DPD BK)
15	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PD AM-MDI)
16	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Organisasi Kemasyarakatan syawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPD ORMAS GEMA MKGR)
17	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (DPD IPTI)
18	Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (DPD GPPI)
19	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Putra Putri Indonesia (DPD IPPI)
20	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro (DPD GM Kosgoro)
21	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat donesia (DPD GM GAKARI)
22	Dewan Pengurus Daerah Generasi Muda TRIKORA (DPD GM TRIKORA)
23	Pimpinan Daerah Srikandi Pemuda Pancasila (PD Srikandi PP)
24	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam (DPD PI)
25	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ka’bah (PD GPK)
26	Pimpinan Daerah Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PD GM PARMUSI)
27	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Ka’bah (PD AMK)

28	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PD GMPI)
29	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan (PD GMP)
30	Pimpinan Daerah Pemuda Bulan Bintang (PD PBB)
31	Dewan Pimpinan Daerah Benteng Muda Indonesia (DPD BMI)
32	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPD BM PAN)
33	Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Persaudaraan Pemuda Keadilan (DPD GEMA GARDA Keadilan)
34	Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Indonesia (DPD GPI)
35	Markas Daerah Pemuda Panca Marga (MD PPM)
36	Pimpinan Daerah-I Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (PD-I GM FKPPI)
37	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (DPD PPAPRI)
38	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI)
39	Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI)
40	Pimpinan Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD PMI)
41	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII)
42	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPD GEMA MA)
43	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (DPD AMPG)
44	Pemuda Reformasi Indonesia (PD PRI)
45	Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI)
46	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia (DPD PDI)
47	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nasional Indonesia (DPD BPNI)
48	Dewan Pimpinan Daerah Kossi Dunia Pemuda (DPD KDP)
49	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Demokrat (DPD BM Demokrat)
50	Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Iskandar Muda (DPD IPIM)
51	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Cinta Bangsa (DPD IPEUTABA)
52	Dewan Pimpinan Daerah Forum Bersama Pemuda Cinta Bangsa (DPD FORBES PEUCINSA)
53	Komite Sentral Organisasi Pemuda Kongres (KSO Pemuda Kongres)
54	Persatuan Pemuda Gemilang (PPG)

Sumber: Data dari Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2024

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kota Banda Aceh memiliki posisi yang sangat strategis untuk pengembangan kepariwisataan karena sebagai ibukota, Pemerintah Provinsi Aceh sangat giat mempromosikan kepariwisataan Kota Banda Aceh dan merupakan tempat penyelenggaraan event pariwisata baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Gambar 2.59 di bawah ini menunjukkan rangkuman data statistik kepariwisataan pada Tahun 2022:

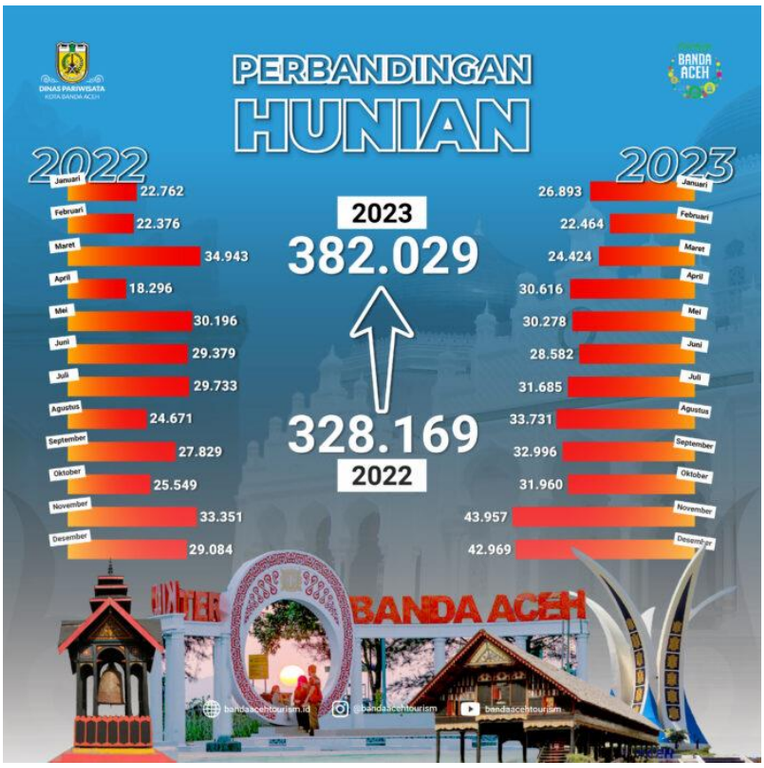

Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2024

Gambar 2. 59 Rangkuman Data Statistik Kepariwisataan Kota BandaAceh Tahun 2023

Berdasarkan data pada Gambar 2.59 di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sudah mulai membaik pasca terjadinya pandemi *Covid*-19. Salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjung yaitu Museum tsunami. Pada tahun 2023 pengunjung museum tsunami juga semakin meningkat dimana pengunjung domestik bejumlah 309.760 orang dan pengunjung asing berjumlah 17.262 orang.

Tingginya minat wisatawan Malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh disebabkan antara lain karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya destinasi yang bernuansa islami dan kuliner yang halal.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh tahun 2023 didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia diurutan pertama, disusul Tahiland, RRC, Singapura, Jerman, Perancis, Australia, dan negara lainnya. Gambar 2.60 berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

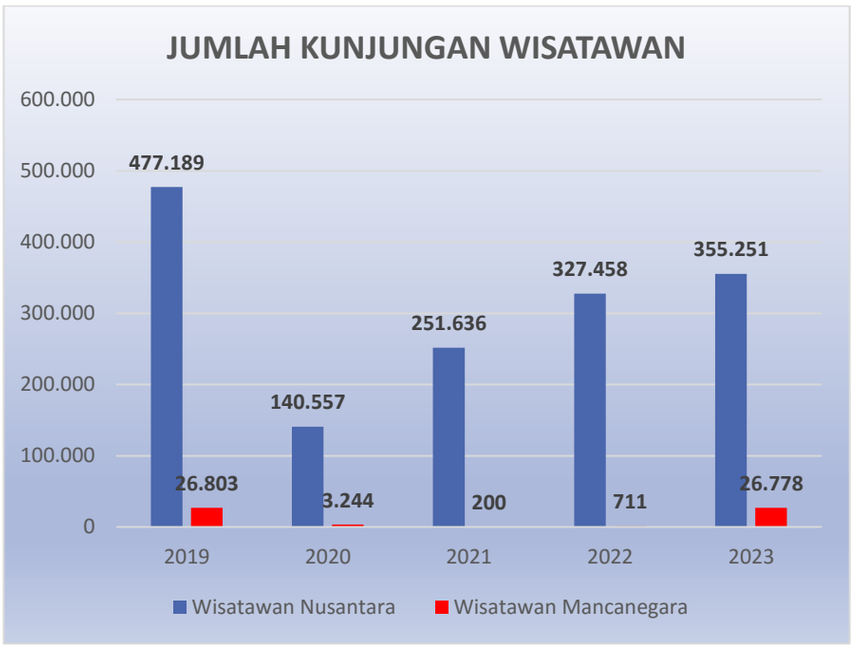

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 60 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.60 diatas jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2019. Pencapaian ini menunjukkan kota Banda Aceh sudah menjadi salah satu kota kunjungan wisatawan yang diminati. Pencapaian ini terwujud karena adanya berbagai event-event promosi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun maupun diselenggarakan oleh stakeholder lainnya di Banda Aceh. Promosi wisata yang berkesinambungan dan pembenahan destinasi wisata akan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan telah dapat menambah investasi disektor pariwisata, seperti pembangunan Transmart Studio, Hotel Kyriad 2, Mes Sabang menjadi Hotel Sabang, BSSD Keudah, dan Hotel Trans Kita.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 140.557 orang dan 3.244 orang. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan adanya pandemi *Covid*-19. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi *Covid*-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan drastis. Meskipun kondisi pandemi Covid-19 belum reda di Kota Banda Aceh, namun kunjungan wisatawan nusantara tercatat meranjak naik kembali pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, sementara di tahun 2022 angka kunjungan wisatawan jauh lebih meningkat dari pada tahun 2021.

2) Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Geliat pariwisata di Kota Banda Aceh mulai tumbuh dan berkembang dan hingga saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, Sebagai salah satu kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Kota Banda Aceh memiliki beberapa landmark wisata seperti, Mesjid Raya Baiturrahman, Museum tsunami, lokasi pemakaman massal korban tsunami, PLTD apung, boat diatas rumah, pantai cermin Ulee Lheue, Pintoe Khop, dan lokasi lainnya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Berkembangnya teknologi informasi dewasa ini yang lebih dikenal dengan media sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam hal mempromosikan pariwisata Kota Banda Aceh. Dengan maraknya medsos ini ada banyak hal yang bisa

dilakukan dengan cara yang kreatif, cepat dan tepat, yang mana pemanfaatan teknologi informasi yang sudah canggih sangat membantu penyebaran promosi pariwisata oleh para generasi muda seperti artikel-artikel atau blog tulisan tentang indahnya kota yang lengkap disertai dengan photo-photo dengan tujuan untuk menarik wisatawan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh, maka pemerintah kota terus memaksimalkan dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepariwisataan melalui segala aspek. Kerja sama lintas sektoral telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder lainnya untuk melakukan sinergisitas kegiatan pembangunan yang dapat mendukung perkembangan kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendukung berkembangnya UMKM, pegiat seni, pelaku usaha kecil, pengusaha kuliner, sanggar dan komunitas, perfileman dan musik, percetakan, dan pengrajin tradisional. Tabel 2.126 dibawah ini menunjukkan jenis dan jumlah unit usaha ekonomi kreatif di Banda Aceh Tahun 2022.

Tabel 2. 126 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2023

Jenis Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha
Kuliner	2257
Fashion	224
Kriya	16
Seni Pertunjukan	13
Seni Rupa	0
Seni Musik	7
Televisi dan Radio	0
Aplikasi dan Game	3
Desain Komunikasi Visual	10
Periklanan	36
Penerbitan dan Percetakan	153
Desain Produk	11
Film, Animasi dan Video	3
Fotografi	13
Arsitektur	0
Desain Interior	48
Pengembang Permainan	0
Total Unit Usaha	**2.794**

Sumber: Katalog Ekonomi Kreatif Banda Aceh 2024
Catatan: Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 2.126 di atas pada Tahun 2023 terdapat 17 jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Banda Aceh dengan jumlah unit usaha berjumlah 2.794. Kuliner, Fashion, Penerbitan dan Percetakan menempati jumlah unit usaha terbesar, masing-masing 2257, 224 dan 152 unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha terkecil adalah Seni Rupa, Televisi & Radio, Arsitektur, dan Pengembang Permainan. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pendataan jenis dan jumlah usaha ekonomi kreatif disebabkan pandemi *Covid*-19.

B. Peternakan

Populasi peternakan di Kota Banda Aceh banyak berada di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh masih bersifat semi tradisional, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain. Perkembangan jumlah populasi ternak di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.127 di bawah ini:

Tabel 2. 127 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	**2019**	403.031			927,14	52,24	1.652.56
2	**2020**	435.376	634.759	4.977.749	501,86	61,21	1.711,52
3	**2021**	455.177	649.962	4.275.940	282,65	23,40	1.819,04
4	**2022**	481.605	531.126	4.361.460	324,56	14,74	1,329,50
5	**2023**				1.064	1.714	14.921

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.127 diatas, menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak yang ada di Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Berikut dibawah ini permasalahan yang sering terjadi dalam perkembangan populasi hewan ternak.

- Permasalahan
  Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga konflik sosial.
- Tingginya harga daging
  Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Kota Banda Aceh pada hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

Sedangkan terkait jumlah produksi daging di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2019-2023, terlihat perubahan, seperti ditunjukkan Tabel 2.128 di bawah ini.

Tabel 2. 128 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	2019				668,779	53.216	1.639.529
2	2020	12.927.761	1.946.250	10.436.548	1,021.00	59.100	1.572.00
3	2021	12.943.976	1.984.425	8.965.106	2.278	1.377	716.842
4	2022	12.014.962	2.046.425	9.144.408	293.712	10.368	1.58
5	2023	15.644.467	2.120.525	8.693.708	249.377	15.950	1.228

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024
** Data per oktober 2022*

Dari Tabel 2.128 di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 terjadi fluktuasi produksi daging di Provinsi Aceh untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Sedangkan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 juga terjadi fluktuasi produksi daging untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Untuk kambing/domba, produksi dagingnya paling fluktuatif dibanding ternak lainnya. Sedangkan untuk unggas, selama Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terus mengalami peningkatan produksi, sedangkan pada tahun 2022 jumlah produksi daging di Kota Banda Aceh mengalami penurunan. Secara umum, jumlah produksi daging dari ketiga jenis golongan hewan tersebut meningkat setiap tahunnya.

Pengembangan peternakan dalam hal budidaya ternak di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada ketersediaan lahan, sedangkan lahan makin lama makin berkurang akibat alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung dan lainnya.

Populasi ternak di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun juga semakin berkurang, hal ini bisa dilihat dari tabel data populasi ternak, khususnya sapi yang agak banyak di Kecamatan Ulee Kareng, Lueng Bata dan Banda Raya dengan sistem pemeliharaan bersifat semi tradisional dan merupakan usaha sampingan untuk pemeliharaan ternak.

C. Perindustrian

1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Jumlah unit usaha di Kota Banda Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh telah berkembangan dengan sangat baik. Selain itu kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai pusat kota jasa di Provinsi Aceh yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, Kota Banda Aceh lebih berfokus kepada industri yang mengandalkan ide-ide kreatif dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Perkembangan IKM dari tahun 2019 hingga 2023 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.129 di bawah ini:

Tabel 2. 129 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sektor Pangan	835	849	867	869	889
2	Sektor Sandang	689	694	699	704	704
3	Sektor Kimia	329	329	330	336	337
4	Sektor Logam	213	228	228	230	233
5	Sektor Kerajinan Umum	248	248	250	256	253
6	Sektor Jasa Lainnya	246	246	246	251	256
	Jumlah	**2.560**	**2.594**	**2.620**	**2.646**	**2.672**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.129 di atas terlihat bahwa industri Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor pangan pada peringkat pertama kemudian diikuti oleh sektor sandang dan kimia. Pada tahun 2023 ini, jumlah IKM sektor pangan sebesar 889 IKM, sektor sandang sebanyak 704 dan sektor kimia sebesar 337. Ketiga sektor ini merupakan lahan utama perkembangan industri di Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai dengan 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IKM adalah persaingan usaha, pemasaran, modal, situasi ekonomi dan situasi politik. Peranan dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi perkembangan IKM di Kota Banda Aceh karena kebijakan pemerintah merupakan penggerak jalannya IKM. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan bekerjasama dan menjalankan program-program pembangunan khususnya terkait dengan pengembangan IKM.

Industri Kecil Menengah memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh terutama dalam penampungan tenaga kerja, dimana sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah IKM dari tahun ke tahun juga menambah penyerapan tenaga kerja pada setiap unit usaha industri. Perkembangan jumlah dan nilai IKM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.130 dibawah ini.

Tabel 2. 130 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Unit Usaha	38.827	41.672	46.286			2.560	2.594	2.620	2.646	2.672
Tenaga Kerja (Org)	108.225	111.216	126.378			8.272	8.373	8.434	8.460	8.528
Nilai Investasi (Rp)	1.284.418.039	4.316.270.654	1.649.196.388			175.066.033.000	176.696.533.000	189.240.055.000	190.870.555.000	185.275.055.000
Nilai Produksi (Rp)	10.751.674.843	17.992.842.392	11.757.557.251			155.691.240.000	158.009.768.000	162.349.118.000	166.598.468.000	166.113.368.000
Nilai Tambah	7.899.307.767	7.900.555.231	8.431.718.749			112.022.700.000	113.478.292.000	116.348.950.000	119.219.608.000	117.916.250.000

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.130 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2019 sebesar 32.156 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 98.778 orang, dengan nilai investasi sebesar 4.440.271.128 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah IKM sebesar 46.286 unit dan tenaga kerja sebanyak 126.378 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2021 sebesar 1.649.196.388 rupiah.

Adapun di Kota Banda Aceh dalam peningkatan jumlah IKM dan nilai investasi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 diikuti dengan peningkatan nilai tambah investasi pada periode yang sama. Nilai tambah investasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp. 117.916.250.000 dari keadaan Tahun 2022 yang berjumlah Rp. 116.219.608.000.

2) Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* (OVOP)

Kota Banda Aceh memiliki produk unggulan daerah sebagai gambaran kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor. Salah satu untuk pengembangan produk unggulan daerah pendekatannya adalah melalui penetapan produk One Village One Product (OVOP). Hal ini sesuai dengan langkah kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Sentra.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah. Tahap awal dengan melakukan survei produk unggulan ke 90 (sembilan puluh) gampong di Kota Banda Aceh. Dari hasil survei, didapatkan 435 produk unggulan Kota Banda Aceh. Namun demikian, tidak semua produk/komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai produk OVOP. Untuk dapat disebut sebagai produk OVOP, suatu produk harus memenuhi kriteria sebagai produk OVOP seperti yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007. Seleksi dilakukan untuk menjaring produk-produk IKM di Kota Banda Aceh yang akan dikembangkan menjadi produk OVOP. Persyaratan produk yang akan diseleksi mencakup batasan produk, produsen, jenis produk, dan jumlah produk. Tabel 2.131 menjelaskan cakupan jenis produk IKM yang diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 131 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022)

No	Nama Produk	Nama Gampong
1	Makanan ringan	Gp.Lampulo, Gp.Lambung, Gp.Lhong cut
2	Minuman sari buah dan sirup buah	Gp.Lambaro skep, Gp.Lamdingin, Gp.Pango raya, Gp.Lamteh Gp.Ulee kareng
3	Kain tenun	Gp.Lamgugop, Gp.Lamteumen
4	Batik	Gp.Lueng Bata
5	Kerajinan anyaman	Gp.Neusu, Gp.Pangoe raya, Gp.Lamteumen
6	Kerajinan gerabah	Gp.Penjeurat

Sumber : Dinas tenaga kerja, 2023

Berdasarkan Tabel 2.131 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 golongan produk yang dapat dijadikan atau diseleksi sebagai produk OVOP yang tersebar di 15 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2023 IKM batik yang di lamboro skep tidak beroperasional lagi, dan IKM batik sekarang ada di Lueng Bata yang bernama IKM Hi Batik.

C. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Kota Banda Aceh merupakan sentra perikanan terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan. Produksi

perikanan Provinisi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.132 dibawah ini:

Tabel 2. 132 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (Dalam Ton)

Tahun	Aceh	Kota Banda Aceh
	Produksi Ikan	Produksi Ikan
2019	159.100	11.713,426
2020	307.359	28.499,33
2021	239.934	18.094,89
2022		23.548.00
2023		28.106,65

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.132 diatas, menunjukkan bahwa produksi ikan di Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Jumlah produksi ikan di tahun 2019 sebesar 159.100, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 239.934 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 meningkat hingga sebesar 307.359 melampaui tahun 2021. Sedangkan di Kota Banda Aceh produksi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi sempat mengalami penurunan sebesar 10.404,44 di tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa produksi ikan di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Di tahun 2022 hanya sebesar 23.548 Ton dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 28.106,65 Ton.

Produksi perikanan budidaya dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.61 dibawah ini:

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 61 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Ton)

Untuk perikanan budidaya, seperti terlihat pada Gambar 2.61 produksi perikanan budidaya di Kota Banda Aceh kurun waktu 2019-2022 mengalami peningkatan, akan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena sejumlah lahan

yang ada di Kota Banda Aceh belum direhab pasca tsunami dan berkurangnya daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) untuk perikanan tambak.

Untuk perikanan budidaya di Kota Banda Aceh tahun 2023 turun drastis mencapai angka 839,9 ton, hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) masih belum stabil pasca tsunami meskipun telah dilakukan rehabilitasi.

2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Pengawasan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada komitmen SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Penjelasan lebih lanjut terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh dijelaskan pada Tabel 2.133 berikut ini:

Tabel 2. 133 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh	5865	6340	6827	7045	7479
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti	5502	5836	6027	6324	6644
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	93,81	92,05	88,28	89,77	88,84

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.133 di atas, jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tertinggi adalah pada Tahun 2019 sebesar 93,81 persen dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan. Persentase tindak lanjut terendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 88,28 persen dari 6827 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti 6027. Di tahun 2023 terdapat sedikit penurunan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dikarenakan rekomendasi-rekomendasi lama yang sulit ditindaklanjuti.

Selain Inspektorat Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.134 berikut:

Tabel 2. 134 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK	816	885	923	983	1054
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	700	755	785	857	966
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	85,78	85,31	85,05	87,18	91,65

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.134 di atas, Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang telah diselesaikan secara umum sudah mencapai 91,65 persen pada tahun 2023, hal ini didorong oleh komitmen Pimpinan SKPK dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah

A. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1) LSM, Ormas dan OKP Terdaftar

Badan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi LSM sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, pengurusan SKT dilakukan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pendaftaran dan verifikasi tetap dibawah Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Jumlah LSM yang terdaftar, LSM tidak aktif dan LSM aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.135 berikut ini:

Tabel 2. 135 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LSM Terdaftar	63*	64*	20*	17	17
2	Jumlah LSM Tidak Aktif	0*	48*	9*	0	0
3	Jumlah LSM Aktif	63*	16*	11*	17	17

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.135 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada LSM yang mendaftar pada tahun 2023 sebesar 17 LSM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh tidak lagi mengeluarkan surat keterangan terdaftar tetapi hanya memverifikasi dokumen dan yang mengeluarkan Menteri dalam negeri, namun demikian kegiatan sebagaimana yang tercantum diatas tetap terlaksana.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakat dapat berbentuk LSM, yayasan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Jumlah Ormas yang terdaftar, Ormas yang tidak aktif dan Ormas yang aktif terdapat pada Tabel 2.136 berikut:

Tabel 2. 136 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	97*	99*	100*	104	17

2	Jumlah Ormas yang tidak aktif	0*	0*	0*	92	0
3	Jumlah Ormas yang aktif	97*	99*	100*	12	17

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024
**) Data tahun 2018-2021 disesuaikan*

Berdasarkan Tabel 2.136 di atas dapat dilihat jumlah Ormas yang terdaftar pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 17 Ormas, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 ormas yang terdaftar. Pada tahun 2022 jumlah ormas yang aktif sebesar 104 ormas, dan pada tahun 2023 sejumlah 17 Ormas.

Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) memegang peranan penting dalam pembinaan mental dan potensi calon pemimpin (leadership) anggotanya. OKP juga merupakan mitra pemerintah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, memberi masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Tabel 2.137 dibawah ini menunjukkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar, OKP tidak aktif dan OKP aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 137 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah OKP yang terdaftar	70	71	66	68		24*	25*	3*	6	7
Jumlah OKP yang tidak aktif						0*	24*	0*	0	0
Jumlah OKP yang aktif						24*	1*	3*	6	7

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.137 di atas dapat dilihat bahwa di Kota Banda Aceh jumlah OKP yang terdaftar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat OKP yang tidak aktif, ini dikarenakan OKP tersebut sudah habis masa berlaku SKT nya dan tidak melaporkan kembali keberadaannya. dan pada tahun 2023 ada 7 OKP yang mendaftar dan aktif.

LSM, Ormas dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dipastikan legalitasnya dan terdaftar di Badan Kesbangpol. Oleh karena itu, Badan kesbangpol harus memastikan SKT yang telah ditetapkan oleh pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dilaporkan ke Badan Kesbangpol untuk pembinaan, memastikan LSM, Ormas dan OKP menjalankan organisasinya sesuai dengan fungsinya dan sebagai bahan klarifikasi apabila diperlukan terkait legalitas LSM, Ormas dan OKP bersangkutan. Badan Kesbangpol perlu memberi pemahaman kepada LSM, Ormas dan OKP terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kegiatan Pembinaan Politik daerah

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah dengan sasaran generasi muda dan merupakan pelopor perkembangan politik kedepan. Target dan realisasi kegiatan pembinaan politik daerah dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.138 di bawah ini:

Tabel 2. 138 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Target	100	-	-	100	200
	Realisasi	100	-	-	100	0

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.138 pada tahun 2020-2021 tidak ada peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan politik daerah tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi daerah dalam masa pandemi *Covid* 19 dan terjadinya Refocusing Anggaran dan kegiatan kembali diadakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kegitan tidak dapat dilaksanakan karena tidak keluarnya SPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pembinaan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, parpol, ormas , LSM, Tokoh pemuda untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berpolitik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh setiap tahunnya menyalurkan bantuan Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp. 2.896.560.000,-.

3) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Menanggapi hal tersebut Badan Kesbangpol melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika di sekolah-sekolah wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba adalah program kegiatan yang ada pada badan kesatuan bangsa dan politik Kota Banda Aceh sesuai dengan Undang -undang nomor 35 tahun 2006 tentang narkotika kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Tabel 2.139 menunjukkan target dan realisasi penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

Tabel 2. 139 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Target	11	11	5	11	6
	Realisasi	18	11	-	2	0

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Perkembangan Restoran di Kota Banda Aceh cukup menjanjikan, dilihat dari segi pertumbuhan yang terus bertambah setiap tahunnya, dengan pengelolaan yang semakin modern mengikuti perkembangan jaman dengan mengikuti arah kemanjuan tehnologi yang dapat membantu operasional restoran seperti sekarang ini sudah menggunakan barkode dalam menggunakan buku menu untuk sebuah layanan dalam melakukan pilihan untuk bertransaksi, Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi tentu hal tersebut harus diupayakan dalam daya saing usaha, untuk memajukan usahanya dalam daya saing, tentunya akan berdampak dengan penerimaan asli daerah. Jumlah restoran, rumah makan dan cafe di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.140 di bawah ini:

Tabel 2. 140 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi
1	Restoran	35	3,381	36	3,450	38	3,495	35	3,875	43	4,090
2	Rumah Makan	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339
3	Café	562	27,538	624	30,018	624	32,572	624	35,814	656	36,230
Jumlah		**808**	**41,258**	**871**	**43,807**	**873**	**46,406**	**870**	**50,128**	**910**	**50,659**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.140 di atas jumlah restoran, rumah makan dan café terus meningkat selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan. Jumlah usaha pada Tahun 2023 sebesar 910 dengan jumlah kursi 50.659 dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 808 usaha dan jumlah kursi 41,258.035. Hal ini terjadi karena jumlah usaha restoran, rumah makan dan café yang juga meningkat.

2) Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan

Perkembangan usaha sektor hotel di Kota Banda Aceh berperan dalam meningkatkan PAD. Untuk lebih jelasnya, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.141:

Tabel 2. 141 Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Kelas	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	162	270	1	162	270
2	Bintang 3	7	839	763	7	919	763	7	919	763	6	612	763	7	612	763
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bintang 1	12	460	778	14	522	928	15	558	991	12	556	778	13	566	787
5	Melati 3	10	350	420	10	350	420	10	468	565	10	470	502	10	470	502
6	Melati 2	6	190	345	6	190	345	7	252	272	6	190	345	6	190	342
7	Melati 1	13	370	701	13	421	805	14	478	913	15	690	890	17	725	948
8	Penginapan	34	361	721	34	361	721	36	506	761	34	662	853	36	681	861
Jumlah		**83**	**2729**	**3998**	**85**	**2922**	**4252**	**90**	**3340**	**4535**	**84**	**3342**	**4401**	**90**	**3396**	**4473**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.141 di atas dapat dilihat jumlah hotel/penginapan di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penambahan pada jumlah usaha penginapan. Pada Tahun 2019 jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 83 hotel, meningkat menjadi 90 hotel pada Tahun 2023. Pada Wilayah Kota Banda Aceh terdapat 21 Unit Hotel Bintang dari bintang 4 sampai dengan bintang 1. Untuk Bintang 4 dari Tahun 2019-2023 hanya terdapat 1 (satu) hotel, sedangkan kelas Melati/Penginapan sebanyak 69 unit.

Jumlah kamar hotel/penginapan meningkat dari 2019 hingga 2023. Jumlah kamar hotel/penginapan pada Tahun 2023 sebanyak 3.396 kamar meningkat dari Tahun 2019 sebanyak 2.729 kamar. Hal ini bertanda adanya hunian yang bertambah pada layanan inap di Kota Banda Aceh. Sejak berakhir masa covid pertumbuhan hunian sudah mulai bertambah karena tidak adanya pembatasan dalam keramaian dan dapat dilihat pada Laporan kunjungan wisata pada Tahun 2022 sebanyak 328.169 dan pada Tahun 2023 sebanyak 382.029 di Kota Banda Aceh (Data bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Dengan adanya peningkatan pada jumlah kunjungan wisata dan kegiatan pemerintahan maka akan meningkatkan penerimaan PAD di Kota Banda Aceh. Selain itu upaya yang dilakukan untuk penerimaan PAD antara lain kerja sama antar pihak selaku penegak aturan dan juga kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi dalam peningkatan penerimaan PAD seperti melatih SDM dalam pemeriksaan pajak, penigkatan sosialisasi dan penambahan alat monitoring pajak online.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Lama Proses Perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, sejak Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan non berusaha dilakukan melalui Aplikasi Si Cantiku. Untuk perizinan berusaha DPMPTSP hanya memproses berkas pemenuhan komitmen agar izin yang diterbitkan OSS dapat berlaku efektif.

Tabel 2.142 berikut menggambarkan lama proses pemenuhan komitmen dan perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi Si Cantiku:

Tabel 2. 142 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
Proses Pemenuhan Komitmen				
1	-	-	-	-
Izin Lingkungan				
2	- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)	Izin lingkungan sudah berubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh fDLHK3		

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	'- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)			
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG))	3 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUPR)	-	-
4	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	Diproses melalui SIMBG oleh Dinas Teknis (PUPR)		
Proses Perizinan Non Berusaha				
5	Izin-izin di Bidang Kesehatan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan persetujuan teknis Dinas)	-	-
6	Izin Kegiatan Seni dan Budaya	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata)	07 item Persyaratan	-
7	Izin-izin di Bidang Pendidikan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan)	-	-
	1. TK (Taman Kanak-Kanak)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	8 item persyaratan	-
	2. KB/TPA/SPS	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	7 item persyaratan	-

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	3. SD (Sekolah Dasar)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	22 item persyaratan	-
	4. SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan SMP memiliki 14 item persyaratan dan untuk Perpanjangan izin operasioanl memiliki 9 item persyaratan	-
	5. Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal (Kursus/LKP/PKBM/Sejenisnya)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan operasional 12 item persyaratan administratif + 3 item persyaratan tehnis dan Untuk persyaratan izin operasioanl lanjutan 9 item persyaratan administratif + 2 item persyaratan tehnis	-

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Untuk nomor 3 dan 4 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Beberapa penghargaan yang diperoleh DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 2.143 antara lain:

Tabel 2. 143 Prestasi yang telah diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh

No	Tahun	Keterangan
1	2010	Kemenpan & RB
		Piala Citra Pelayanan Prima
2	2012	Gubernur Aceh
		Peringkat ke I atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah
4	2013	Walikota Banda Aceh
		Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
5	2014	Ombudsman
		Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
6	2016	Ombudsman
		Peran Aktif mewujudkan pelayanan publik prima dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7	2016	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “A”
8	2017	Markplus, Inc dan Majalah Marketeers
		WOW Public Service Excellence
9	2017	Gubernur Aceh
		Aceh Invesment Award
10	2018	Kemenpan& RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”
11	2018	Walikota Banda Aceh
		Self Assesment Quesioner (SAQ) Pemeringkatan Pengelola Website & PPID Pembantu Kategori PPID Pembantu Kota Banda Aceh

12	2018	Kemenpan & RB
		Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik
13	2019	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” (A-)
14	2020	Harian Serambi Indonesia
		Inovasi Pelayanan Publik
15	2020	Kemenpan & RB
		Kinerja Pelayanan Publik Terbaik Kategori “A-“
16	2021	BKPM RI
		Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Kategori Sangat Baik
17	2021	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I
18	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan public kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2021 (*8 Maret 2022)*
19	2022	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I – Kategori Indeks Daya Saing Daerah *(31 Oktober 2022)*
20	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 (06 Desember 2022)
21	2022	Ombudsman
		Kategori A (KualitasTertinggi) dengan Nilai 90.52 (Zona Hijau) dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 *(22 Desember 2022)*
22	2022	KEJARI (MPP)

		Stand Terbaik pada Adhyaksa Expo 2022 – Kategori Pelayanan Publik *(11 Desember 2022)*
23	2023	Ombudsman
		Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 *(25 januari 2024)*

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 62 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 **(25 Januari 2024)**

2) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha dimaksud adalah perda terkait perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa dan perda terkait dengan ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Kota Banda Aceh. Tabel 2.144 berikut menunjukkan qanun yang mendukung iklim investasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 144 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.144 di atas belum adanya Perda terkait perizinan dan Investasi yang mendukung Iklim Investasi, karena tidak tesedianya anggaran untuk Penyusunan Perda yang mendukung Iklim investasi.

3) Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 – 2021 (yoy)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh, dengan visi : PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Untuk mendorong masuknya investasi ke Kota Banda Aceh, pemerintah kota telah mempersiapkan sektor-sektor strategis guna menarik minat pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Fokus pengembangan investasi di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor Perdagangan, Jasa dan Koperasi;
2. Pengembangan sektor Industri;
3. Pengembangan sektor Infrastruktur;
4. Pengembangan sektor Energi;
5. Pengembangan sektor Pariwisata;
6. Pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan.

Tabel 2. 145 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 - 2023(yoy)

No.	Sektor Usaha	TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023				
		JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN
		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN	
1	Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan dan Peternakan	0	50	Rp -	Rp 774.500.001	Rp 774.500.001	0	39	Rp -	Rp 1.814.500.000	Rp 1.814.500.000	3	176	Rp -	Rp 4.460.000.000	Rp 4.460.000.000
2	Jasa lainnya	6	130	Rp 28.098.797.384	Rp 227.178.707.017	Rp 255.277.504.401	2	99	Rp 22.000.000	Rp 39.180.149.325	Rp 39.202.149.325	4	467	Rp 67.600.000	Rp 196.289.138.879	Rp 196.356.738.879
3	Konstruksi	0	296	Rp -	Rp 36.341.500.000	Rp 36.341.500.000	0	152	Rp -	Rp 157.244.067.006	Rp 157.244.067.006	0	1572	Rp -	Rp 82.658.930.974	Rp 82.658.930.974
4	Listrik, Gas dan Air	0	71	Rp -	Rp 3.834.333.000	Rp 3.834.333.000	0	22	Rp -	Rp 3.493.676.755	Rp 3.493.676.755	1	38	Rp -	Rp 5.909.340.542	Rp 5.909.340.542
5	Perdagangan dan Reparasi	1	455	Rp -	Rp 51.056.688.246	Rp 51.056.688.246	0	290	Rp -	Rp 70.922.746.782	Rp 70.922.746.782	16	1056	Rp 5.041.668.804	Rp 121.792.060.513	Rp 126.833.729.317
6	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	10	226	Rp 170.797.553.311	Rp 29.425.090.748	Rp 200.222.644.059	3	17	Rp 57.160.603.920	Rp 56.346.371.450	Rp 113.506.975.370	6	98	Rp 31.745.789.578	Rp 117.536.677.960	Rp 149.282.467.538
7	Industri	6	27	Rp -	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000	3	21	Rp 1.119.315.346	Rp 46.576.048.511	Rp 47.695.363.857	22	67	Rp 254.940.374	Rp 7.779.407.544	Rp 8.034.347.918
	Total	**23**	**1255**	**Rp 198.896.350.695**	**Rp 348.985.819.012**	**Rp 547.882.169.707**	**8**	**640**	**Rp58.301.919.266**	**Rp 375.577.559.829**	**Rp 433.879.479.095**	**52**	**3474**	**Rp 37.109.998.756**	**Rp 536.425.556.412**	**Rp 573.535.555.168**

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Untuk tahun 2021, jumlah proyek PMA yang melaporkan LKPMnya sebanyak 23 investor, sedangkan tahun 2022 terjadi penurunan jumlah investor PMA yang melaporkan LKPM-nya yaitu hanya sebanyak 8 PMA. Penurunan ini disebabkan karena tidak semua PMA ini melakukan kegiatan pelaporan LKPMnya, sementara BKPM telah mempersyaratkan kewajiban untuk melaporkan LKPM-nya secara triwulan,sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke lapangan terutama kepada investor-investor yang mencantumkan nilai rencana investasinya diatas 1 M. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan jumlah investor PMA dan PMDN antara tahun 2021 dengan tahun 2022, dikarenakan untuk tahun 2022, DPMPTSP tidak lagi menambahkan jumlah investor ke dalam perhitungan apabila nilai pelaporan LKPMnya 0 (nihil), sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah proyek investor baik PMA maupun PMDN. Terkait dengan jumlah PMA yang hanya 8 investor di tahun 2022, bukan mengindikasinya kita mengalami penurunan jumlah investor di Kota Banda Aceh, melainkan hanya 8 investor asing yang melaporkan LKPMnya ke dalam sistem OSS RBA. Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 dan 2022 terlihat dari capaian realisasi investasi per sub sektor yang menunjukkan secara global bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Banda Aceh 'yang menyampaikan realisasi investasi sejumlah 23 PMA lebih banyak dibandingkan tahun 2022 hanya sebanyak 8 PMA yang menyampaikan realisasi investasi. Capaian realisasi investasi dari PMA ini sangat mendorong pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh, baik secara peningkatan perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja, dan untuk tetap terus menambah dan meningkatan jumlah proyek dan nilai realisasi investasi dibutuhkan campur tangan pemerintah terutama terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di Kota Banda Aceh. Per tanggal 3 Maret 2023, jumlah investor PMA yang menanamkan modalnya di Kota Banda Aceh sebanyak 35 investor, dengan nilai rencana investasi diatas 1 Milyar.

Adapun tiga besar sub-sektor usaha pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor jasa masih sangat mendominasi tingkat realisasi investasi di Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 34%, kemudian diikuti oleh sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar 26% serta perdagangan sebesar 22%. Sedangkan sektor yang paling rendah capaian nilai realisasi investasi berdasarkan data Pelaporan LKPM OSS RBA adalah pada sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, perkebunan dan peternakan yang masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan terutama hadirnya regulasi yang berpihak pada kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pelaku usaha pada sektor ini serta dibutuhkan penciptaan inovasi oleh pemerintah sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan sektor usaha ini, terutama sektor perikanan.

4) Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh

Dari Soft Launching MPP Kota Banda Aceh pada akhir 2019, pengunjung MPP Kota Banda Aceh dari tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2020 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 45.630 orang yang terdiri dari 60% pria dan 40% wanita. Tahun 2021 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 41.291 orang yang terdiri dari 55% pria dan 45% wanita, lebih sedikit 4.339 orang dari tahun sebelumnya atau berkurang 10%. Tahun 2022 jumlah masyarakat yang mengunjugi MPP Kota Banda Aceh ada 59.164 orang yang terdiri dari 54% pria dan 46% wanita, lebih banyak 17.873 orang dari tahun sebelumnya atau meningkat 43%. Tahun 2023, jumlah pengunjung MPP Kota Banda Aceh sebanyak 98.229 orang yang terdiri dari 55 % pria dan 45 % wanita, lebih banyak 39.065 orang dari tahun sebelumnya. atau meningkat sebanyak 66 %. Tahun 2023 MPP kota banda aceh juga terpilih sebagai salah satu dari 21 daerah provinsi/kabupaten/kota di seluruh indonesia yang menjadi pilot project implementasi MPP Digital. Untuk saat ini MPP Digital telah diimplementasikan. Pada Tenaga Kesehatan yang mengurus Perizinan Nonberusaha di MPP Kota Banda Aceh. Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 146 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Pengunjung	Pria	Wanita	rata²/bln	Jumlah kenaikan (penurunan) pengunjung	Kenaikkan dari Tahun Sebelumnya	Keterangan
2020	45.630	60%	40%	3.803			
2021	41.291	55%	45%	3.441	(4.339)	-10%	
2022	59.164	54%	46%	4.930	17.873	43%	
2023	98.229	55%	45%	8.186		66%	

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, 2024

.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh

Penggunaan moda angkutan darat sangat diperngaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan publik pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan yang dapat dilihat pada Tabel 2.147 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dibawah ini:

Tabel 2. 147 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio
2019	23.650,05	2.179.295	1,04	765,66	280.967	0,27
2020	23.650,50	3.058.000	773,40	765,66	281.698	0,27
2021	23.650,50	3.544.000	667,30	620,96	294.244	0,26
2022				620,96	295,94	0,21
2023						

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 2.147 diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Aceh cenderung tetap pada periode tahun 2019-2021, walaupun jumlah kendaraan yang melintas dijalan semakin meningkat. Sedangkan di Kota Banda Aceh untuk jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di semakin bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan manjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

2) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktifitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Adapun jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dapat diliat pada Tabel 2.148 di bawah ini:

Tabel 2. 148 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2023

No	Uraian	Aceh										Kota Banda Aceh									
		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023	
		Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg			Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg
1	AKDP											796	1.463.613	901	1.097.859	1.316	665.184	1.643	426.750	1.498	184.907
2	AKAP											169	365.762	157	431.512	219	173.944	57	210.626	207	171.024
	Jumlah	12.672.542		633.082		612.980		2.964.869		602.784		965	1.829.375	1.058	1.529.375	1.535	839.128	1.700	637.376	1.705	355.931
	Jumlah Angk./Pnp X 100%											0,05		0,06		0,18		0,27		0,48	

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Berdasarkan Tabel 2.148 di atas menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum oleh angkutan darat yaitu 2.964.869 orang. Dimana jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 15.288.280, namun nilai tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Sedangkan pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 965 unit angkutan umum pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.705 angkutan umum pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 704.961 penumpang pada tahun 2022 menjadi 355.931 penumpang pada 2023.

3) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.149 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2019-2023 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 149 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang
2019	1.689.953	1.103.034	2.792.987	1.829.375	859.982	2.689.357
2020	1.153.344	566.099	1.719.443	1.529.375	508.964	2.038.339
2021	1.154.013	729.669	2.257.047	1.818.915	562.589	2.381.504
2022	5.797.404	1.083.553	6.527.073	2.985.865	963.031	3.948.896
2023				1.771.360	750.631	2.521.991

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.149 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah orang melalui terminal pada tahun 2022 sebesar 5.797.404 cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 1.154.013. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan perkembangan jumlah orang/barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bis dan juga ASDP tahun 2018-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mecegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bis) maupun di air (ASDP). Dan pada tahun 2022 jumlah penumpang angkutan bus dan ASDP meningkat sejumlah 3.948.896 dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.521.991

Sampai dengan tahun 2019 Provinsi Aceh memiliki 36 terminal dan Kota Banda Aceh juga saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek provinsi dan kota dapat dilihat pada Tabel 2.150 berikut:

Tabel 2. 150 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Aceh					Kota Banda Aceh				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	5	5	5	5		1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	9	9	10	11		1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	22	22	21	20		1	1	1	1	1
Terminal Barang (Mobar)						1	1	1	1	1
Jumlah	36	36	36	36		4	4	4	4	4

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.150 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Provinsi Aceh dari Tahun 2019-2022 berjumlah 36 terminal, yang terdiri dari 5 tipe A, 9 tipe B dan 22 tipe C. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal.

Adapun di Kota Banda Aceh jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia.

Salah satu yang menjadi penyebab hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, dimana pendidikan terbanyak dari tenaga kerja di Banda Aceh ialah Sekolah Menengah Atas (SMA). Rasio lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.151 Rasio ini menggambarkan jumlah lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk.

Tabel 2. 151 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	36.220	37.827	38.630	40.432	
2	Jumlah penduduk	245.779	248.892	251.288	255.409	
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,5	1 : 6,3	

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 2.151, rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 per-satuan penduduk menurun selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Walaupun rasio ini menurun, namun secara kuantitatif jumlah lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2022 ini merupakan angka kelulusan terbesar pada periode lima tahun tersebut. Pada Tahun 2022 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 40.432.

2.1.4.4.2 Ketergantungan Penduduk Produktif Terhadap Penduduk Tidak Produktif

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Disisi lain, semakin rendah angka rasio menunjukkkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Tanggungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non-produktif meskipun mereka tidak bekerja. Rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 secara lebih jelas terdapat pada Tabel 2.152 di bawah ini:

Tabel 2. 152 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	167.582	75.845	75.667	76.207	72.162
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9.969	9.873	10.051	10.601	12.317
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	88.166	85.718	85.718	86.808	84.479
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	151.201	163.174	165.570	168.601	177.490
5	Rasio Ketergantungan	58,31	52,53	52,83	51,49	47,60

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.152, rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah ini mengalami fluktuatif. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana peduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.1.4.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam upaya percepatan penerapan SPM, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan secara nasional sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Diharapakan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang merupakan hak dari setiap warga negara. Adapun yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan untuk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.153 dibawah ini:

Tabel 2. 153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.13 %
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					95.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10386	10386	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.44 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	77.21 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	60.71	**39.29**	**60.71 %**
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	83.33	**16.67**	**83.33 %**
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	81.44	**18.56**	**81.44 %**
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	31.60	**68.4**	**31.60 %**
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	60.61	**39.39**	**60.61 %**
	8 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**900**	**627**	**273**	**617.69 %**	
2 .	**Pendidikan Dasar**					97.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		46834	46834	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17.02 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	85.09 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	95.02	**4.98**	**95.02 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	65.63	**34.37**	**65.63 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	42.43	**57.57**	**42.43 %**
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	100	**0**	**100.00 %**
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	100	**0**	**100.00 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	82	**18**	**82.00 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	79.33	**20.67**	**79.33 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.7	**8.3**	**91.70 %**
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	76.4	**23.6**	**76.40 %**
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.05	**0.95**	**99.05 %**
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	86.53	**13.47**	**86.53 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70.25	**29.75**	**70.25 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	45.03	**54.97**	**45.03 %**
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	30.71	**69.29**	**30.71 %**
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	**4.33**	**95.67 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	**12.67**	**87.33 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	100	83.33	**16.67**	**83.33 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.9	**7.1**	**92.90 %**
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	88.9	**11.1**	**88.90 %**
	JUMLAH	**2,8**	**2,252**	**548**	**2,212.21 %**	
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					95.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		58177	58177	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.94 %**

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	79.72 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	45.26	**54.74**	**45.26 %**
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	45.26	**54.74**	**45.26 %**
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70	**30**	**70.00 %**
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	73.33	**26.67**	**73.33 %**
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	73.33	**26.67**	**73.33 %**
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	**4.33**	**95.67 %**
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	**12.67**	**87.33 %**
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	66.45	**33.55**	**66.45 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	12 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**1,4**	**959**	**441**	**956.63 %**	

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri, 2024

Indikator SPM Pendidikan Dasar Usia Dini sebasar 95,44 %. Pada indikator Pendidikan Dasar sebesar 97,02, sedangkan pada pendidikan kesetaraan sebesar 95,94%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 sudah baik dan hampir mencapai 100%. Sementara itu, dari sisi mutu pelayanan masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti pemenuhan jumlah dan mutu pendidik dan kepala sekolah, penyediaan biaya personil, dan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini.

b. Bidang Kesehatan

SPM bidang urusan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan kesehatan di provinsi dan kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 154 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	94,87%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	91,16%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	94,77%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	74,69%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	98,18%

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	66.7 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%	93,22%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	68.3 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%		100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%		100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%		100%	100%
13.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%
14.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar baisa (KLB)	100%	98,57%	100%	100%

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.154 diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 di Provinsi Aceh untuk jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sudah mencapai 100 persen yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi mencapai 98,57 persen yang direncanakan.

Sedangkan di Kota Banda Aceh terdapat realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 yang sudah mencapai 100 persen yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.155 berikut:

Tabel 2. 155 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	0%	100%	80,03%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	0%	100%	94,85%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.155 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerapan SPM Sub pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Provinsi Aceh belum ada, hal ini mengingat belum adanya SPAM Regional yang dibangun di Aceh. Dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga belum ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya SPALD-S/T di Aceh.

Sedangkan di Kota Banda Aceh realisasi capaian penerapan SPM pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari masih 80,03 persen, dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik mencapai 94,85 persen.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja SPM urusan perumahan rakyat adalah tolok ukur untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang perumahan. SPM urusan perumahan rakyat di provinsi dan kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas:

Tabel 2. 156 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh			Banda Aceh		
		Target	Realisasi	Keterangan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	0	Tidak Ada kejadian bencana	100%	1	Tidak Ada kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	0	Tidak ada relokasi program Pemerintah Provinsi	100%	1	Tidak ada relokasi program Pemerintah Daerah

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.156 dapat dilihat bahwa realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Aceh belum ada. Sedangkan untuk Kota Banda Aceh realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat hanya 1 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023

tidak ada bencana dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah baik skala provinsi maupun kota.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.157 dibawah ini:

Tabel 2. 157 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	80%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				85%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				85%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			86,56%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024

f. Bidang Sosial

SPM bidang urusan Bidang Sosial mencakup kedalam beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 158 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			100%	133,33%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala			100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100%	129%
5.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota			100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%			
7.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti skala	100%			
8.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	100%			
9.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	100%			
10.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100%			

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.158 tersebut diatas dapat dilihat bahwa kewenangan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota adalah Rehabilitasi Sosial Dasar kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana (alam dan sosial). Perbedaan utama kewenangan antara Dinas Sosial provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah di dalam panti sosial dan di luar panti sosial. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2019 s.d 2023 Dinas Sosial Aceh telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial dilaksanakan melalui sistem di dalam panti.

Di Kota Banda Aceh bidang urusan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota saat ini. Banyaknya gelandangan dan pengemis dari luar Kota Banda Aceh yang terbukti dengan seringnya pada saat dilakukan razia dan pendataan dan ditemukan banyaknya warga yang memiliki kartu identitas diluar Kota Banda Aceh. Salah satu alasannya adalah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Anggapan dan harapan sangat bergantung di Kota Banda Aceh, sehingga ini terus akan terjadi dan diperlukan berbagai cara dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2.1.4.6 Statistik Sektoral Daerah

Kebijakan Satu Data Indonesia didasari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pelaksanaan Satu Data Kota Banda Aceh didukung dan diperkuat oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Banda Aceh.

Keberadaan Statistik sektoral daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar 1,81 dan tahun 2023 sebesar 1,83 dengan kategori Cukup. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar dan serius agar bisa meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Banda Aceh.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025. RKPD Kota Banda Aceh dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Program pembangunan yang disusun dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan IV tahun 2023 per Dinas ditunjukkan oleh Tabel 2.159 berikut:

Tabel. 2.159. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 per Dinas

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I		II		III		IV													
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp											
3				4	5		6			8		9		10		11			12			13							14= 7+ 13			15 = 14/6x100%			
1	**01**			**DINAS PENDIDIKAN DAYAH**				**33.113.236.862**			**9.289.410.892**			**575.332.088**			**2.099.515.105**			**1.427.223.246**			**3.608.261.926**										**Dinas Pendidikan Dayah**
1	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**14.967.743.376**			**3.226.678.407**		**0**	**575.332.088**			**786.459.075**			**631.274.566**			**642.624.026**						**-**			**-**		**Dinas Pendidikan Dayah**
1	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**99.819.872**	**100**	**%**	**10.308.510**		**%**	**-**			**-**											**-**			**-**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	99.819.872	5	dokumen	10.308.510	-	dokumen	-	-	dokumen	-					4.305.750	-	dokumen	4.305.750	-	dokumen	4.305.750	-	dokumen	4,31	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13.673.907.672**	**100**	**%**	**2.852.586.788**		**0**	**575.332.088**		**0**	**771.038.794**			**594.640.626**			**581.478.921**		**0**	**2.522.490.429**			**2.522.490.429**	**-**		**18,45**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	13.082.307.672	12	bulan	2.684.311.788	3	bulan	540.382.088	3	bulan	736.088.794	3	bulan	570.990.626	3	bulan	523.008.921	12	bulan	2.370.470.429	12	bulan	2.370.470.429	25	bulan	18,12	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	591.600.000	12	bulan	168.275.000	3	bulan	34.950.000	3	bulan	34.950.000	3	bulan	23.650.000	3	bulan	58.470.000	12	bulan	152.020.000	12	bulan	152.020.000	25	bulan	25,70	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kesejahteraan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**55.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**		**-**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101	Paket	55.000.000	4	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**513.122.060**	**100**	**%**	**139.262.036**		**%**	**-**		**%**	**4.720.000**		**%**	**2.536.855**		**%**	**13.520.240**		**%**	**20.777.095**		**%**	**20.777.095**	**-**		**4,05**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46	Paket	9.611.484	10	paket	1.795.000	-	paket	-	-	paket	-		paket		10	paket	1.190.000	10	paket	1.190.000	10	paket	1.190.000	22	paket	12,38	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66	Paket	195.763.672	15	paket	70.374.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30	Paket	40.746.904	7	paket	7.792.415	-	paket	-	-	paket	-	3	paket	2.536.855	4	paket	12.330.240	7	paket	14.867.095	7	paket	14.867.095	23	paket	36,49	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	267.000.000	10	laporan	59.300.621	-	laporan	-	1	laporan	4.720.000		laporan	0		laporan	0	1	laporan	4.720.000	1	laporan	4.720.000	2	laporan	1,77	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**80.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**			**-**		**0**	**-**		**0**						**-**			**-**	**-**		**-**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	80.000.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit			unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**332.014.428**	**100**	**%**	**109.394.900**		**%**	**-**		**%**	**7.466.281**		**%**	**22.177.782**		**%**	**39.727.865**	**-**	**%**	**69.371.928**	**-**	**%**	**69.371.928**	**-**		**20,89**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Laporan	159.800.000	12	laporan	56.870.000	-	laporan	-	2	laporan	7.466.281	3	laporan	12.709.782	3	laporan	10.506.365	8	laporan	30.682.428	8	laporan	30.682.428	17	laporan	19,20	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Laporan	172.214.428	12	laporan	52.524.900	-	laporan	-	-	laporan	-	3	laporan	9.468.000	3	laporan	29.221.500	6	laporan	38.689.500	6	laporan	38.689.500	13	laporan	22,47	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**213.879.344**	**100**	**%**	**115.126.173**		**%**	**-**		**%**	**3.234.000**		**%**	**11.919.303**		**%**	**7.897.000**		**%**	**23.050.303**	**-**	**%**	**23.050.303**	**-**	**%**	**10,78**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	73.544.000	2	unit	31.101.750	-	unit	-	-	unit	3.234.000		unit	8.998.800	1	unit	5.341.000	1	unit	17.573.800	1	unit	17.573.800	13	unit	23,90	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	120.000.000	1	unit	73.510.920	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98	Unit	20.335.344	24	Unit	10.513.503	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	2.920.503	12	Unit	2.556.000	12	Unit	5.476.503	12	Unit	5.476.503	12	Unit	26,93	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**	**07**		**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**	**Persentase dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar**	**100**	**%**	**18.145.493.486**	**76**	**%**	**6.062.732.485**		**%**	**-**		**%**	**1.313.056.030**		**%**	**795.948.680**		**%**	**2.965.637.900**		**%**	**5.074.642.610**	**-**	**%**	**5.074.642.610**	**-**	**%**	**27,97**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	**01**	**07**	**2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Dayah**	**Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar**	**38**	**Dayah**	**18.145.493.486**	**29**	**dayah**	**6.062.732.485**		**dayah**	**-**		**dayah**	**1.313.056.030**		**dayah**	**795.948.680**		**dayah**	**2.965.637.900**		**dayah**	**5.074.642.610**	**-**	**dayah**	**5.074.642.610**	**-**	**dayah**	**27,97**	**Dinas Pendidikan Dayah**
1	01	07	2.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	38	Unit	7.910.041.221	2	Unit	1.579.958.310	-	Unit	-	-	Unit	521.876.100	1	Unit	105.826.000	3	Unit	1.046.906.900	4	Unit	1.674.609.000	4	Unit	1.674.609.000	11	Unit	21,17	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	38	Unit	411.760.240	2	Unit	190.684.510	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit		4	Unit	569.422.000	4	Unit	569.422.000	4	Unit	569.422.000	11	Unit	138,29	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	180	Orang	2.899.150.108	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	660	Peserta Didik	4.535.025.567	132	Peserta Didik	3.289.574.665	-	Peserta Didik	-	59	Peserta Didik	611.134.930	50	Peserta Didik	463.652.680	32	Peserta Didik	729.583.000	141	Peserta Didik	1.804.370.610	141	Peserta Didik	1.804.370.610	21	Peserta Didik	39,79	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah	38	Satuan Pendidikan	169.347.104	5	Satuan Pendidikan	435.107.000	-	Satuan Pendidikan	-	1	Satuan Pendidikan	139.107.000		Satuan Pendidikan	0	3	Satuan Pendidikan	145.312.000	4	Satuan Pendidikan	284.419.000	4	Satuan Pendidikan	284.419.000	11	Satuan Pendidikan	167,95	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah	23	Dayah	95.544.616	-	Dayah	-	-	Dayah	-	-	Dayah	-		Dayah			Dayah		-	Dayah	-	-	Dayah	-	-	Dayah	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	23	Dayah	165.344.616	5	Satuan Pendidikan	50.000.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	1000	Buku	220.360.272	100	Buku	50.000.000	-	Buku	-	-	Buku	-		Buku			Buku		-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	8	Dayah	732.436.046	2	Unit	267.408.000	-	Unit	-	1	Unit	40.938.000	1	Unit	226.470.000	1	Unit	199.814.000	3	Unit	467.222.000	3	Unit	467.222.000	38	Unit	63,79	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	10	Dokumen	168.544.616	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	12	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	23	Dayah	168.271.016	5	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23	Dayah	170.007.816	-	Dayah	-	-	Dayah	-	-	Dayah	-		Dayah			Dayah		-	Dayah	-	-	Dayah	-	-	Dayah	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	14	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	23	Dayah	165.344.616	-	Dayah	-	-	Dayah	-	-	Dayah	-		Dayah			Dayah	75.000.000	-	Dayah	75.000.000	-	Dayah	75.000.000	-	Dayah	45,36	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	15	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	200	Peserta Didik	168.971.016	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-		Peserta Didik			Peserta Didik		-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	2.01	16	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	23	Dokumen	165.344.616	2	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	199.600.000	-	Dokumen	199.600.000	-	Dokumen	199.600.000	-	Dokumen	120,72	Dinas Pendidikan Dayah
1	**01**			**SEKRETARIAT MPD**				**9.575.116.562**			**2.224.652.193**			**435.215.729**			**613.481.953**		**0**	**531.942.659**		**0**	**608.117.463**			**2.188.757.804**			**2.188.757.804**			**22,86**	
1	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**8.725.858.853**	**100**	**%**	**2.068.649.678**		**%**	**435.215.729**		**%**	**613.481.953**		**%**	**531.942.659**		**%**	**508.117.463**		**%**	**2.088.757.804**	**-**	**%**	**2.088.757.804**	**-**	**%**	**23,94**	**Sekretariat MPD**
1	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**59.050.965**	**100**	**%**	**9.766.060**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**9.766.060**		**%**	**9.766.060**	**-**	**%**	**9.766.060**	**-**	**%**	**16,54**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	59.050.965	5	Dokumen	9.766.060	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	9.766.060	-	Dokumen	9.766.060	-	Dokumen	9.766.060	-	Dokumen	16,54	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**7.857.645.288**	**100**	**%**	**1.854.607.113**		**%**	**435.215.729**		**%**	**577.685.668**		**%**	**464.047.015**		**%**	**432.090.605**		**%**	**1.909.039.017**	**-**	**%**	**1.909.039.017**	**-**	**%**	**24,30**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	4.414.845.288	12	Bulan	1.068.847.113	3	0	256.265.729	3	0	388.735.668	3	0	285.427.015	3	0	268.750.605	12	0	1.199.179.017	12	0	1.199.179.017	25	0	27,16	Sekretariat MPD

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
											I			II			III			IV										
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	3.442.800.000	12	Bulan	785.760.000	3	0	178.950.000	3	0	188.950.000	3	0	178.620.000	3	0	163.340.000	12	0	709.860.000	12	0	709.860.000	25	0	20,62	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**35.200.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	35.200.000	1	Paket	-	-	Paket	-		Paket	-		Paket			Paket	-		Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**251.170.600**	**100**	**%**	**63.236.605**		**%**	**5.246.607**		**%**	**51.064.240**		**%**	**6.803.998**		**%**	**63.114.845**	-	**%**	**63.114.845**	-	**%**	**25,13**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	9.904.000	1	Paket	2.476.000	-	Paket	-		Paket	-	1	Paket	1.186.000	1	Paket	1.290.000	2	Paket	2.476.000	2	Paket	2.476.000	50	Paket	25,00	Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	120.000.000	1	Paket	30.000.000	-	Paket	-		Paket	-	1	Paket	30.000.000	1	Paket	0	2	Paket	30.000.000	2	Paket	30.000.000	50	Paket	25,00	Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	41.266.600	1	Paket	10.760.605	-	Paket	-		Paket	5.246.607	1	Paket	0	1	Paket	5.513.998	2	Paket	10.760.605	2	Paket	10.760.605	50	Paket	26,08	Sekretariat MPD
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan	80.000.000	4	Laporan	20.000.000	-	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	19.878.240		Laporan	0	-	Laporan	19.878.240	-	Laporan	19.878.240	-	Laporan	24,85	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	-	Unit	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**355.640.000**	**100**	**%**	**78.935.000**		**%**	**-**		**%**	**21.150.678**		**%**	**9.199.904**		**%**	**33.059.040**		**%**	**63.409.622**	-	**%**	**63.409.622**	-	**%**	**17,83**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	146.400.000	1	Laporan	27.600.000	-	Laporan	-	-	Laporan	8.448.678	1	Laporan	3.161.904	1	Laporan	6.374.040	2	Laporan	17.984.622	2	Laporan	17.984.622	50	Laporan	12,28	Sekretariat MPD
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	209.240.000	1	Laporan	51.335.000	-	Laporan	-	-	Laporan	12.702.000	1	Laporan	6.038.000	1	Laporan	26.685.000	2	Laporan	45.425.000	2	Laporan	45.425.000	50	Laporan	21,71	Sekretariat MPD
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**167.152.000**	**100**	**%**	**62.104.900**		**%**	**-**		**%**	**9.399.000**		**%**	**7.631.500**		**%**	**26.397.760**		**%**	**43.428.260**	-	**%**	**43.428.260**	-	**%**	**25,98**	**Sekretariat MPD**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	114.420.000	6	Unit	49.108.000		Unit	-	2	Unit	9.399.000	2	Unit	7.631.500	2	Unit	21.485.200	6	Unit	38.515.700	6	Unit	38.515.700	25	Unit	33,66	Sekretariat MPD
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2.823.000	1	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Sekretariat MPD
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit	52.732.000	12	Unit	10.173.900		Unit	-		Unit	-	12	Unit	4.912.560	12	Unit	4.912.560	12	Unit	4.912.560	12	Unit	4.912.560	25	Unit	9,32	Sekretariat MPD
1	**01**	**08**			**Program Penyelenggara Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh**	**Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh**	**100**	**%**	**849.257.709**	**100**	**-**	**156.002.515**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**100.000.000**		**0**	**100.000.000**	-	**0**	**100.000.000**	-	**0**	**11,77**	**Sekretariat MPD**
1	**01**	**08**	**7.01**		**Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh**	**Persentase kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang di hasilkan**	**100**	**%**	**42.802.064**	**100**	**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	-	**0**	**-**	-	**0**	**-**	**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.01	01	Penetapan Standar Pendidkan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun	4	Dokumen	21.401.032	-	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	2	Satuan Pendidikan	21.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.03**		**Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh**	**Persentase Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**150.262.111**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	4	Dokumen	115.066.929	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	4	Dokumen	35.195.182	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	2	Satuan Pendidikan	-	-	-		-	0	-		0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.04**		**Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**112.788.366**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	-	**0**	**-**	-	**0**	**-**	**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	80	Orang	112.788.366	-	-	-		0	-		0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	40	Orang	-	-	-	-		0			0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPD
1	**01**	**08**	**7.05**		**Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh**	**Persentase Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**543.405.168**	**100**	**%**	**156.002.515**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**100.000.000**		**%**	**100.000.000**	-	**%**	**100.000.000**	-	**%**	**18,40**	**Sekretariat MPD**
1	01	08	7.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	80	Peserta Didik	26.401.032		-	-	-	0	-		0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	2	Satuan Pendidikan	463.202.072	2	Satuan Pendidikan	156.002.515	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan		2	Satuan Pendidikan	100.000.000	2	Satuan Pendidikan	100.000.000	2	Satuan Pendidikan	100.000.000	100	Satuan Pendidikan	21,59	Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	2	Satuan Pendidikan	30.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Sekretariat MPD
1	01	08	7.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	2	Satuan Pendidikan	23.401.032	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Sekretariat MPD
1	**01**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**1.206.796.281.014**			**258.521.521.729**		**0**	**71.747.723.898**		**0**	**20.979.766.942**		**0**	**74.075.925.225**		**0**	**88.592.063.808**		**0**	**255.395.479.873**	-	**0**	**255.395.479.873**	**#DIV/0!**	**0**	**21,16**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**899.373.153.084**	**100**	**%**	**190.093.080.030**		**%**	**71.747.723.898**		**%**	**18.797.120.882**		**%**	**42.374.843.558**		**%**	**55.343.613.317**		**%**	**188.263.301.655**	-	**%**	**188.263.301.655**	-	**%**	**20,93**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**192.491.684**	**100**	**%**	**23.798.135**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**13.995.135**		**%**	**13.995.135**	-	**%**	**13.995.135**	-	**%**	**7,27**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	192.491.684	3	Dokumen	23.798.135		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	13.995.135	-	Dokumen	13.995.135	-	Dokumen	13.995.135	-	Dokumen	7,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**890.145.864.043**	**100**	**%**	**188.725.556.807**		**%**	**71.692.663.065**		**%**	**18.739.117.046**		**%**	**41.909.914.464**		**%**	**54.684.696.843**		**%**	**187.026.391.418**	-	**%**	**187.026.391.418**	-	**%**	**21,01**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	885.405.944.043	12	Bulan	185.908.064.807	3	Bulan	71.102.213.065	3	Bulan	18.535.494.610		Bulan	40.928.836.523		Bulan	54.093.185.843	6	Bulan	184.659.730.041	6	Bulan	184.659.730.041	13	Bulan	20,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	4.739.920.000	12	Bulan	2.817.492.000	3	Bulan	590.450.000	3	Bulan	203.622.436		Bulan	981.077.941		Bulan	591.511.000	6	Bulan	2.366.661.377	6	Bulan	2.366.661.377	13	Bulan	49,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.479.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8076	paket	4.479.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**806.595.238**	**100**	**%**	**346.014.797**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**137.033.967**		**%**	**116.971.448**		**%**	**254.005.415**	-	**%**	**254.005.415**	-	**%**	**31,49**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV											
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	17.813.816	15	Paket	4.557.300	-	Paket	-		Paket	-		Paket	1.214.300		Paket	3.343.000	-	Paket	4.557.300	-	Paket	4.557.300	-	Paket	25,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	122.132.140	10	Paket	32.910.150	-	Paket	-		Paket	-		Paket	10.029.650		Paket	7.218.750	-	Paket	17.248.400	-	Paket	17.248.400	-	Paket	14,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	666.649.282	15	Laporan	308.547.347	-	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	125.790.017		Laporan	106.409.698	-	Laporan	232.199.715	-	Laporan	232.199.715	-	Laporan	34,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**777.146.676**	**100**	**%**	**64.126.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**160.333.000**		**%**	**160.333.000**	-	**%**	**160.333.000**	-	**%**	**20,63**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	20.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit	757.146.676	8	Unit	64.126.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	160.333.000	-	Unit	160.333.000	-	Unit	160.333.000	-	Unit	21,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.816.878.303**	**100**	**%**	**662.870.591**		**%**	**55.060.833**		**%**	**55.003.836**		**%**	**246.532.427**		**%**	**199.600.241**		**%**	**556.197.337**	-	**%**	**556.197.337**	-	**%**	**30,61**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	1.314.750.535	12	Laporan	456.839.291	2	Laporan	55.060.833	1	Laporan	20.611.836		Laporan	168.743.127		Laporan	131.449.241	3	Laporan	375.865.037	3	Laporan	375.865.037	6	Laporan	28,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	502.127.768	12	Laporan	206.031.300	-	Laporan	-	3	Laporan	34.392.000		Laporan	77.789.300		Laporan	68.151.000	3	Laporan	180.332.300	3	Laporan	180.332.300	6	Laporan	35,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.155.177.140**	**100**	**%**	**270.713.700**		**%**	-		**%**	**3.000.000**		**%**	**81.362.700**		**%**	**168.016.650**		**%**	**252.379.350**	-	**%**	**252.379.350**	-	**%**	**21,85**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	unit	310.811.200	7	Unit	130.047.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	65.325.000		Unit	52.698.150	-	Unit	118.023.150	-	Unit	118.023.150	-	Unit	37,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dimiliki	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dimiliki	40	unit	125.205.940	10	Unit	108.666.700	-	Unit	-	1	Unit	3.000.000		Unit	16.037.700		Unit	83.517.500	1	Unit	102.555.200	1	Unit	102.555.200	3	Unit	81,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Direhabilitasi	8	unit	719.160.000	2	Unit	32.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	31.801.000	-	Unit	31.801.000	-	Unit	31.801.000	-	Unit	4,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi**	**84**	**%**	**303.453.911.096**	**70**	**%**	**65.668.958.299**		**%**	-		**%**	**1.949.646.060**		**%**	**31.049.126.267**		**%**	**31.744.948.991**		**%**	**64.743.721.318**	-	**%**	**64.743.721.318**	-	**%**	**21,34**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi A**	**42**	**%**	**166.201.201.612**	**36**	**-**	**35.061.212.641**		**0**	-		**0**	**932.177.260**		**0**	**16.948.333.222**		**0**	**15.771.527.250**		**0**	**33.652.037.732**	-	**0**	**33.652.037.732**	-	**0**	**20,25**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	unit	207.400.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			Unit	-	-	Unit	-	-	#DIV/0!	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16	ruang	207.400.000	4	Ruang	250.346.500	-	Ruang	-	-	Ruang	-		Ruang	7.903.200		Ruang	239.856.000	-	Ruang	247.759.200	-	Ruang	247.759.200	-	Ruang	119,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	34	unit	7.575.640.000	10	Unit	2.757.055.760	-	Unit	-	-	Unit	201.177.260		Unit	1.692.694.400		Unit	660.843.900	-	Unit	2.554.715.560	-	Unit	2.554.715.560	-	Unit	33,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	44	ruang	3.007.650.000	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-		Ruang			Ruang	143.823.000	-	Ruang	143.823.000	-	Ruang	143.823.000	-	Ruang	4,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	62	unit	4.041.050.000	15	Unit	73.205.150	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	73.205.150		Unit	88.706.000	-	Unit	161.911.150	-	Unit	161.911.150	-	Unit	4,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	58	paket	2.004.000.000	22	Paket	700.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	686.860.000	-	Paket	686.860.000	-	Paket	686.860.000	-	Paket	34,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	107	paket	10.804.200.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	149.350.000		Paket			Paket		-	Paket	149.350.000	-	Paket	149.350.000	-	Paket	1,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500	unit	4.200.000	500	Unit	499.350.000	-	Unit	-	-	Unit	149.350.000		Unit	149.350.000		Unit	744.317.000	-	Unit	893.667.000	-	Unit	893.667.000	-	Unit	21.277,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	73497	peserta didik	7.371.762.400	18101	Peserta Didik	2.017.930.860	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-		Peserta Didik	646.585.739		Peserta Didik	777.353.094	-	Peserta Didik	1.423.938.833	-	Peserta Didik	1.423.938.833	-	Peserta Didik	19,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	45	paket	3.164.400.000	10	Paket	2.390.859.576	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	2.372.000.000		Paket	-	-	Paket	2.372.000.000	-	Paket	2.372.000.000	-	Paket	74,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	73497	peserta didik	10.482.380.000	18101	Satuan Pendidikan	810.725.000	-	Satuan Pendidikan	-	12.986	Satuan Pendidikan	581.650.000		Satuan Pendidikan	228.695.000		Satuan Pendidikan	-	12.986	Satuan Pendidikan	810.345.000	12.986	Satuan Pendidikan	810.345.000	18	Satuan Pendidikan	7,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2980	peserta didik	1.434.049.112	745	Peserta Didik	224.546.795	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-		Peserta Didik			Peserta Didik	107.000.000	-	Peserta Didik	107.000.000	-	Peserta Didik	107.000.000	-	Peserta Didik	7,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1524	orang	8.647.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	736.667.995		Orang	566.058.256	-	Orang	1.302.726.251	-	Orang	1.302.726.251	-	Orang	15,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3208	orang	4.626.042.792	790	Orang	1.438.201.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	160	satuan pendidikan	91.379.308	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	364	satuan pendidikan	102.532.648.000	91	Satuan Pendidikan	23.898.992.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	11.041.231.738		Satuan Pendidikan	11.756.710.000	-	Satuan Pendidikan	22.797.941.738	-	Satuan Pendidikan	22.797.941.738	-	Satuan Pendidikan	22,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A**	**50**	**%**	**106.083.509.484**	**34**	**%**	**20.645.528.012**		**%**	-		**%**	**846.324.700**		**%**	**9.749.467.105**		**%**	**10.868.103.854**		**%**	**21.463.895.659**	-	**%**	**21.463.895.659**	-	**%**	**20,23**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	unit	214.300.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	#DIV/0!	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	ruang	414.300.000	2	Ruang	829.679.250	-	Ruang	-	-	Ruang	-		Ruang	727.573.650		Ruang	100.097.500	-	Ruang	827.671.150	-	Ruang	827.671.150	-	Ruang	199,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	52	unit	4.210.600.000	12	Unit	703.631.470	-	Unit	-	-	Unit	95.178.700		Unit	103.073.670		Unit	474.829.430	-	Unit	673.081.800	-	Unit	673.081.800	-	Unit	15,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	63	ruang	9.089.200.000	15	Ruang	809.659.690	-	Ruang	-	-	Ruang	-		Ruang	229.953.100		Ruang	475.843.690	-	Ruang	705.796.790	-	Ruang	705.796.790	-	Ruang	7,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	71	unit	4.809.400.000	17	Unit	177.571.500	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	174.812.000		Unit	78.966.900	-	Unit	253.778.900	-	Unit	253.778.900	-	Unit	5,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	82	paket	2.005.300.000	20	Paket	500.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	499.240.000	-	Paket	499.240.000	-	Paket	499.240.000	-	Paket	24,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	128	paket	12.003.520.000	32	Paket	1.558.995.000	-	Paket	-	-	Paket	99.480.000		Paket	1.459.515.000		Paket	198.670.000	-	Paket	1.757.665.000	-	Paket	1.757.665.000	-	Paket	14,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2000	paket	3.520.000	500	Paket	428.632.200	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	278.355.000		Paket	149.827.200	-	Paket	428.182.200	-	Paket	428.182.200	-	Paket	12.164,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	36288	peserta didik	7.157.600.000	8.937	Peserta Didik	2.391.465.710	-	Peserta Didik	-	746	Peserta Didik	199.641.000		Peserta Didik	583.894.710		Peserta Didik	1.079.458.223	746	Peserta Didik	1.862.993.933	746	Peserta Didik	1.862.993.933	2	Peserta Didik	26,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20	paket	5.518.328.000	5	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket			Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	36288	peserta didik	10.355.779.680	8.937	Peserta Didik	698.705.000	-	Peserta Didik	-	5.782	Peserta Didik	452.025.000		Peserta Didik	237.165.000		Peserta Didik	260.340.000	5.782	Peserta Didik	949.530.000	5.782	Peserta Didik	949.530.000	16	Peserta Didik	9,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3451	peserta didik	807.327.012	850	Peserta Didik	236.689.192	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-		Peserta Didik	44.925.192		Peserta Didik	168.940.000	-	Peserta Didik	213.865.192	-	Peserta Didik	213.865.192	-	Peserta Didik	26,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	158	orang	1.443.800.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2193	orang	3.652.642.792	540	Orang	698.201.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	44.736.320		Orang	485.034.374	-	Orang	529.770.694	-	Orang	529.770.694	-	Orang	14,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	20	satuan pendidikan	380.800.000	5	Satuan Pendidikan	89.950.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	89.950.000		Satuan Pendidikan	49.450.000	-	Satuan Pendidikan	139.400.000	-	Satuan Pendidikan	139.400.000	-	Satuan Pendidikan	36,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	116	satuan pendidikan	44.017.092.000	29	Satuan Pendidikan	11.522.348.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	5.775.513.463		Satuan Pendidikan	6.847.406.537	-	Satuan Pendidikan	12.622.920.000	-	Satuan Pendidikan	12.622.920.000	-	Satuan Pendidikan	28,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**PersentaseSsatuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi**	**64**	**%**	**27.850.380.000**	**52**	**%**	**8.668.207.646**		**%**	-	-	**%**	**171.144.100**		**%**	**3.759.810.850**		**%**	**5.092.917.887**		**%**	**9.023.872.837**	-	**%**	**9.023.872.837**	-	**%**	**32,40**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4	unit	4.808.800.000	1	Unit	2.565.781.871	-	Unit	-	-	Unit	80.652.000		Unit	783.877.000		Unit	1.754.055.200	-	Unit	2.618.584.200	-	Unit	2.618.584.200	-	Unit	54,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	unit	6.600.000	2	Unit	283.277.100	-	Unit	-	-	Unit	2.342.100		Unit	224.920.000		Unit	282.306.300	-	Unit	509.568.400	-	Unit	509.568.400	-	Unit	7.720,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	unit	1.615.300.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	95.721.000		Unit		-	Unit	95.721.000	-	Unit	95.721.000	-	Unit	5,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	unit	3.400.000	2	Unit	97.172.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	95.721.000	-	Unit	95.721.000	-	Unit	95.721.000	-	Unit	2.815,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8	unit	3.400.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8	unit	3.400.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	12	paket	4.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2000	paket	2.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1421	peserta didik	1.403.600.000	357	Peserta didik	850.286.675	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-		Peserta didik	484.596.000		Peserta didik	417.416.500	-	Peserta didik	902.012.500	-	Peserta didik	902.012.500	-	Peserta didik	64,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	22	paket	2.500.000	5	Paket	138.150.000	-	Paket	-	-	Paket	88.150.000		Paket	-		Paket	29.220.000	-	Paket	117.370.000	-	Paket	117.370.000	-	Paket	4.694,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2414	peserta didik	3.800.000	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-		Peserta Didik			Peserta Didik		-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	36	orang	194.400.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang	107.765.000	-	Orang	107.765.000	-	Orang	107.765.000	-	Orang	55,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1033	orang	14.600.000	207	Orang	50.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	340	satuan pendidikan	5.900.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	715	satuan pendidikan	19.778.680.000	170	Satuan Pendidikan	4.683.540.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	2.170.696.850		Satuan Pendidikan	2.406.433.887	-	Satuan Pendidikan	4.577.130.737	-	Satuan Pendidikan	4.577.130.737	-	Satuan Pendidikan	23,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi**	**71**	**%**	**3.318.820.000**	**28**	**%**	**1.294.010.000**		**%**	-	-	**%**	-		**%**	**591.515.090**		**%**	**12.400.000**		**%**	**603.915.090**	-	**%**	**603.915.090**	-	**%**	**18,20**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4	unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4	unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	12.400.000	-	Unit	12.400.000	-	Unit	12.400.000	-	Unit	620,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5	unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6	unit	6.580.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	16	paket	5.300.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4	paket	2.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	peserta didik	2.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	11	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	4	paket	2.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	203	peserta didik	2.000.000	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-		Peserta didik			Peserta didik		-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	orang	194.400.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64	orang	2.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7	satuan pendidikan	2.500.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	28	satuan pendidikan	3.094.040.000	7	Satuan Pendidikan	1.294.010.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan	591.515.090		Satuan Pendidikan	591.515.090	-	Satuan Pendidikan	591.515.090	-	Satuan Pendidikan	591.515.090	-	Satuan Pendidikan	19,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.**	**100**	**%**	**411.000.000**	**100**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Tersedianya Perangkat Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**100**	**%**	**411.000.000**	**100**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2750	buku	290.500.000	-	buku	-	-	buku	-	-	buku	-		buku			buku		-	buku	-	-	buku	-	-	buku	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	160	orang	120.500.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik**	**49,66**	**%**	**197.748.000**	**95**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi akademik pada satuan pendidikan**	**52,51**	**%**	**197.748.000**	**44**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8	dokumen	90.992.000	2	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4	Laporan	106.756.000	1	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat**	**82,21**	**%**	**285.650.000**	**78**	**%**	**2.400.000**		**%**	-	-	**%**	-		**%**	**2.400.000**		**%**	-	-	**%**	**2.400.000**	-	**%**	**2.400.000**	-	**%**	**0,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase SD dan SMP swasta yang memenuhi persyaratan izin pendirian dan operasional**	**98**	**%**	**107.650.000**	**93**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	**2.400.000**		**%**	-	-	**%**	**2.400.000**	-	**%**	**2.400.000**	-	**%**	**2,23**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40	dokumen	107.650.000	10	dokuman	-	-	dokuman	-	-	dokuman	-		dokuman	2.400.000		dokuman	2.400.000	-	dokuman	2.400.000	-	dokuman	2.400.000	-	dokuman	2,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase PAUD dan PNF swasta yang memenuhi persyaratan izin pendirian dan operasional**	**66,42**	**%**	**178.000.000**	**62**	**%**	**2.400.000**		**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	103	dokumen	178.000.000	25	dokumen	2.400.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra**	**89,43**	**%**	**172.000.000**	**41**	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outtout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase guru yang dibina pengembangan dalam penuturan bahasa Aceh**	**89,43**	**%**	**172.000.000**	**41**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	7000	buku	120.750.000	-	buku	-	-	buku	-	-	buku	-		buku			buku		-	buku	-	-	buku	-	-	buku	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	109785	peserta didik	51.250.000	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-		peserta didik			peserta didik			peserta didik		-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	-	peserta didik	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															0			0											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase partisipasi pelaku seni budaya serta lembaga dan masyarakat adat**	**48,50**	**%**	**1.001.403.072**	**44**	**%**	**1.024.580.500**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	**30.000.000**		**%**	**747.196.500**		**%**	**777.196.500**	-	**%**	**777.196.500**	-	**%**	**77,61**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Gampong yang berpartisipasi dalam pelestarian adat budaya daerah**	**67**	**%**	**1.000.000**	**62**	**%**	**750.000.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**747.196.500**		**%**	**747.196.500**	-	**%**	**747.196.500**	-	**%**	**74.719,65**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200	orang	1.000.000	50	orang	750.000.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	747.196.500	-	orang	747.196.500	-	orang	747.196.500	-	orang	74.719,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persetase fasilitasi pelestarian kesenian tradisional kepada pelaku seni**	**30**	**%**	**1.000.403.072**	**25**	**%**	**274.580.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	**30.000.000**		**%**	-		**%**	**30.000.000**	-	**%**	**30.000.000**	-	**%**	**3,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4	laporan	1.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	16	sertifikat	999.403.072	4	sertifikat	274.580.500	-	sertifikat	-	-	sertifikat	-		sertifikat	30.000.000		sertifikat	-	-	sertifikat	30.000.000	-	sertifikat	30.000.000	-	sertifikat	3,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase sanggar seni/pelaku seni budaya tradisional yang aktif**	**69**	**%**	**268.564.870**	**62**	**%**	**239.596.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**196.000.000**		**%**	**196.000.000**	-	**%**	**196.000.000**	-	**%**	**72,98**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sanggar/pelaku seni tradisional yang dibina**	**31**	**%**	**268.564.870**	**25**	**%**	**239.596.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**196.000.000**		**%**	**196.000.000**	-	**%**	**196.000.000**	-	**%**	**72,98**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200	orang	268.564.870	50	orang	239.596.500	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	196.000.000	-	orang	196.000.000	-	orang	196.000.000	-	orang	72,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**69**	**%**	**144.259.480**	**62**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**31**	**%**	**144.259.480**	**25**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0	dokumen	144.259.480	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	#DIV/0!	dokumen	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase situs sejarah dan cagar budaya yang ternelihara**	**83**	**%**	**1.461.533.360**	**75**	**%**	**1.295.751.000**		**%**	-		**%**	**233.000.000**		**%**	**422.400.000**		**%**	**560.305.000**		**%**	**1.215.705.000**	-	**%**	**1.215.705.000**	-	**%**	**83,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan Walikota dan terintegrasi nasional**	**75**	**%**	**1.461.533.360**	**70**	**%**	**1.295.751.000**		**%**	-		**%**	**233.000.000**		**%**	**422.400.000**		**%**	**560.305.000**		**%**	**1.215.705.000**	-	**%**	**1.215.705.000**	-	**%**	**83,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	2.02	01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	22	objek	1.313.942.960	6	objek	277.235.000	-	objek	-	1	objek	36.000.000		objek	86.900.000		objek	94.805.000	1	objek	217.705.000	1	objek	217.705.000	5	objek	16,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	12	objek	2.500.000	3	objek	982.500.000	-	objek	-	2	objek	197.000.000		objek	335.500.000		objek	465.500.000	2	objek	998.000.000	2	objek	998.000.000	17	objek	39.920,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	8	objek	145.090.400	2	objek	36.016.000	-	objek	-	-	objek	-		objek			objek		-	objek	-	-	objek	-	-	objek	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase pengelolaan koleksi museum secara digital**	**65,54**	**%**	**27.058.052**	**14**	**%**	**197.155.400**		**%**	-		**%**	-		**%**	**197.155.400**		**%**	-		**%**	**197.155.400**	-	**%**	**197.155.400**	-	**%**	**728,64**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Persentase koleksi museum yang tersedia secara digital**	**18,64**	**%**	**27.058.052**	**14**	**%**	**197.155.400**		**%**	-		**%**	-		**%**	**197.155.400**		**%**	-		**%**	**197.155.400**	-	**%**	**197.155.400**	-	**%**	**728,64**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap koleksi Museum Digital	116	unit	27.058.052	25	unit	197.155.400	-	unit	-	-	unit	-		unit	197.155.400		unit	-	-	unit	197.155.400	-	unit	197.155.400	-	unit	728,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**02**				**DINAS KESEHATAN**				**375.691.920.272**			**73.981.253.992**			**10.734.251.264**			**17.137.978.439**			**0**	**14.649.377.424**		**0**	**33.563.341.647**			**76.084.948.774**	-		**76.084.948.774**	-		**20,25**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**219.319.708.048**	**100**	**%**	**50.111.083.272**		**%**	**10.734.251.264**		**%**	**16.632.021.544**		**%**	**12.091.424.447**		**%**	**11.711.156.297**		**%**	**51.168.853.552**	-	**%**	**51.168.853.552**	-	**%**	**23,33**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**980.181.480**	**100**	**%**	**87.581.850**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.500.000**		**%**	-		**%**	**4.500.000**	-	**%**	**4.500.000**	-	**%**	**0,46**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	279.599.800	5	dokumen	25.840.600	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	4.500.000		dokumen	-	-	dokumen	4.500.000	-	dokumen	4.500.000	-	dokumen	1,61	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	laporan	700.581.680	2	laporan	61.741.250	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**208.154.283.020**	**100**	**%**	**47.291.876.915**		**%**	**10.483.242.377**		**%**	**16.182.369.529**		**%**	**11.554.139.045**		**%**	**10.971.748.806**		**%**	**49.191.499.757**	-	**%**	**49.191.499.757**	-	**%**	**23,63**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	199.887.883.020	12	bulan	45.149.026.915	3	bulan	10.012.034.577	3	bulan	15.685.162.929		bulan	11.127.940.245		bulan	10.579.577.806	6	bulan	47.404.715.557	6	bulan	47.404.715.557	13	bulan	23,72	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	8.266.400.000	12	bulan	2.142.850.000	3	bulan	471.207.800	3	bulan	497.206.600		bulan	426.198.800		bulan	392.171.000	6	bulan	1.786.784.200	6	bulan	1.786.784.200	13	bulan	21,62	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.328.800.000**	**100**	**%**	-	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5088	paket	1.328.800.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**610.702.170**	**100**	**%**	**175.158.127**		**%**	-		**%**	**26.538.701**		**%**	**70.568.747**		**%**	**74.940.635**		**%**	**172.048.083**	-	**%**	**172.048.083**	-	**%**	**28,17**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32	paket	26.400.000	8	paket	4.925.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	3.285.000	-	paket	3.285.000	-	paket	3.285.000	-	paket	12,44	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedakan	43	paket	187.017.160	13	paket	88.060.692	-	paket	-	-	paket	-		paket	35.235.532		paket	25.551.760	-	paket	60.787.292	-	paket	60.787.292	-	paket	32,50	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	397.285.010	12	laporan	82.172.435	-	laporan	-	3	laporan	26.538.701		laporan	35.333.215		laporan	46.103.875	3	laporan	107.975.791	3	laporan	107.975.791	6	laporan	27,18	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**336.365.522**	**100**	**%**	**142.093.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disedakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0	-		0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan	28	unit	336.365.522	7	unit	142.093.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**5.147.105.856**	**100**	**%**	**1.232.755.541**		**%**	**251.008.887**		**%**	**231.934.746**		**%**	**303.066.015**		**%**	**333.037.956**		**%**	**1.119.047.604**	-	**%**	**1.119.047.604**	-	**%**	**21,74**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan	48	laporan	4.406.400.000	12	laporan	1.056.720.000	3	laporan	231.915.887	3	laporan	231.934.746		laporan	242.910.836		laporan	255.105.694	6	laporan	961.867.163	6	laporan	961.867.163	13	laporan	21,83	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan	48	laporan	740.705.856	12	laporan	176.035.541	1	laporan	19.093.000	-	laporan	-		laporan	60.155.179		laporan	77.932.262	1	laporan	157.180.441	1	laporan	157.180.441	2	laporan	21,22	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	**2.09**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.762.270.000**	**100**	**%**	**1.181.617.839**		**%**	-		**%**	**191.178.568**		**%**	**159.150.640**		**%**	**331.428.900**		**%**	**681.758.108**	-	**%**	**681.758.108**	-	**%**	**24,68**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	771	unit	2.280.000.000	186	unit	993.052.000	-	unit	-	59	unit	191.178.568		unit	127.491.801		unit	300.511.900	59	unit	619.182.269	59	unit	619.182.269	8	unit	27,16	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	unit	115.280.000	12	unit	64.353.839	-	unit	-	-	unit	-		unit	31.658.839		unit	30.917.000	-	unit	62.575.839	-	unit	62.575.839	-	unit	54,28	Dinas Kesehatan

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	366.990.000	1	unit	124.212.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**90**	**%**	**149.923.017.387**	**90**	**%**	**20.809.328.775**		**%**	**-**		**%**	**33.234.490**		**%**	**1.822.648.812**		**%**	**20.521.809.410**		**%**	**22.377.692.712**	-	**%**	**22.377.692.712**	-	**%**	**14,93**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**90**	**%**	**43.975.805.429**	**90**	**%**	**10.420.547.615**		**%**	**-**		**%**	**16.617.245**		**%**	**913.781.951**		**%**	**10.272.262.515**		**%**	**11.202.661.711**	-	**%**	**11.202.661.711**	-	**%**	**25,47**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	unit	14.810.429.657	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Faskes	-	-	Faskes	-	-	Faskes	-	-	Faskes	-		Faskes			Faskes		-	Faskes	-	-	Faskes	-	#DIV/0!	Faskes	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3	unit	1.000.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	14	unit	916.500.000	1	unit	188.075.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	unit	69.860.000	1	unit	77.773.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	27.900.000		unit		-	unit	27.900.000	-	unit	27.900.000	-	unit	39,94	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	unit	15.238.401.590	1	unit	4.551.714.693	-	unit	-	-	unit	1.732.500		unit	-		unit	4.232.862.000	-	unit	4.234.594.500	-	unit	4.234.594.500	-	unit	27,79	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16	unit	180.000.000	5	unit	477.518.500	-	unit	-	-	unit	10.119.000		unit	-		unit	2.031.404.000	-	unit	2.041.523.000	-	unit	2.041.523.000	-	unit	1.134,18	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75	unit	830.950.000	60	unit	2.857.846.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	510.250.000		unit	2.238.994.537	-	unit	2.749.244.537	-	unit	2.749.244.537	-	unit	330,86	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	79	unit	225.538.296	15	unit	76.588.296	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	380	paket	6.367.494.172	95	paket	850.926.596	-	paket	-	-	paket	4.765.745		paket	113.877.088		paket	732.221.805	-	paket	850.864.638	-	paket	850.864.638	-	paket	13,36	Dinas Kesehatan
1	02	02	20.1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	380	paket	3.662.436.513	95	paket	1.103.339.075	-	paket	-	-	paket	-		paket	231.864.773		paket	868.149.180	-	paket	1.100.013.953	-	paket	1.100.013.953	-	paket	30,04	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	48	unit	129.300.000	12	unit	205.000.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	24.975.000		unit	145.915.373	-	unit	170.890.373	-	unit	170.890.373	-	unit	132,17	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	48	paket	544.895.201	12	paket	31.766.455	-	paket	-	-	paket	-		paket	4.915.090		paket	22.715.620	-	paket	27.630.710	-	paket	27.630.710	-	paket	5,07	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90**	**%**	**104.532.357.046**	**90**	**%**	**30.799.116.017**		**%**	**-**		**%**	**342.959.897**		**%**	**13.211.437.857**		**%**	**11.595.752.031**		**%**	**25.150.149.785**	-	**%**	**25.150.149.785**	-	**%**	**24,06**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27487	bumil	2.770.534.543	5.556	-	794.014.090	-	0	-	-	0	-		0	190.595.000		0	548.719.090	-	0	739.314.090	-	0	739.314.090	-	0	26,68	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25733	bumil	2.842.002.507	5.556	-	94.918.725	-	0	-	-	0	-		0	11.549.410		0	16.547.000	-	0	28.096.410	-	0	28.096.410	-	0	0,99	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24970	bayi	243.127.901	5.304	-	16.078.075	-	0	-	-	0	-		0	7.432.000		0	8.469.075	-	0	15.901.075	-	0	15.901.075	-	0	6,54	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75750	balita	1.598.556.606	18.856	-	443.376.730	-	0	-	-	0	-		0	81.400.000		0	361.832.730	-	0	443.232.730	-	0	443.232.730	-	0	27,73	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37092	anak	1.977.625.412	9.449	-	185.435.945	-	0	-	-	0	-		0	4.800.000		0	174.483.945	-	0	179.283.945	-	0	179.283.945	-	0	9,07	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	832652	org	229.770.000	200.947	orang	164.985.895	-	orang	-	-	orang	-		orang	48.000.000		orang	112.868.895	-	orang	160.868.895	-	orang	160.868.895	-	orang	70,01	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69452	lansia	574.031.297	20.638	orang	341.105.000	-	orang	-	-	orang	-		orang	114.150.000		orang	222.000.000	-	orang	336.150.000	-	orang	336.150.000	-	orang	58,56	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187541	org	227.237.138	45.260	orang	32.186.530	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	1.377.530	-	orang	1.377.530	-	orang	1.377.530	-	orang	0,61	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29015	org	919.466.814	7.002	orang	290.571.080	-	orang	-	-	orang	-		orang	241.874.400		orang	1.081.080	-	orang	242.955.480	-	orang	242.955.480	-	orang	26,42	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2351	org	480.128.243	541	orang	117.573.930	-	orang	-	-	orang	-		orang	31.600.000		orang	82.620.830	-	orang	114.220.830	-	orang	114.220.830	-	orang	23,79	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25864	org	3.675.313.020	6.466	orang	694.000.000	-	orang	-	-	orang	-		orang	31.500.000		orang	69.600.000	-	orang	101.100.000	-	orang	101.100.000	-	orang	2,75	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26748	org	324.679.977	6.687	orang	105.962.500	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	93.992.156	-	orang	93.992.156	-	orang	93.992.156	-	orang	28,95	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	120	dokumen	3.875.035.455	12	dokumen	94.722.345	-	dokumen	-	-	dokumen	7.500.000		dokumen	7.705.000		dokumen	49.787.345	-	dokumen	64.992.345	-	dokumen	64.992.345	-	dokumen	1,68	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70	dokumen	6.878.803.860	12	dokumen	1.592.141.165	-	dokumen	-	-	dokumen	46.987.500		dokumen	1.014.759.718		dokumen	649.404.070	-	dokumen	1.711.151.288	-	dokumen	1.711.151.288	-	dokumen	24,88	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	96	dokumen	594.888.760	12	dokumen	195.529.290	-	dokumen	-	-	dokumen	24.860.700		dokumen	23.010.000		dokumen	122.000.000	-	dokumen	169.870.700	-	dokumen	169.870.700	-	dokumen	28,56	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	96	dokumen	1.738.459.150	12	dokumen	504.439.650	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	129.600.000		dokumen	310.150.000	-	dokumen	439.750.000	-	dokumen	439.750.000	-	dokumen	25,30	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	96	dokumen	3.925.293.653	12	dokumen	673.607.700	-	dokumen	-	-	dokumen	9.378.500		dokumen	118.606.000		dokumen	589.885.370	-	dokumen	717.869.870	-	dokumen	717.869.870	-	dokumen	18,29	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	dokumen	487.197.254	12	dokumen	293.996.710	-	dokumen	-	-	dokumen	10.200.000		dokumen	33.416.870		dokumen	92.929.840	-	dokumen	136.546.710	-	dokumen	136.546.710	-	dokumen	28,03	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	252	org	945.348.184	63	orang	131.414.790	-	orang	-	-	orang	2.200.000		orang	29.950.000		orang	60.787.500	-	orang	92.937.500	-	orang	92.937.500	-	orang	9,83	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	48	dokumen	1.062.622.905	12	dokumen	303.400.000	-	dokumen	-	6	dokumen	121.864.997		dokumen	103.228.739		dokumen	77.934.289	6	dokumen	303.028.025	6	dokumen	303.028.025	13	dokumen	28,52	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	dokumen	5.157.466.511	12	dokumen	5.824.856.702	-	dokumen	-	1	dokumen	119.968.200		dokumen	1.047.570.346		dokumen	918.644.718	1	dokumen	2.086.183.264	1	dokumen	2.086.183.264	2	dokumen	40,45	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48	dokumen	60.026.686.474	12	dokumen	15.879.989.095	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	9.587.043.592		dokumen	5.494.920.473	-	dokumen	15.081.964.065	-	dokumen	15.081.964.065	-	dokumen	25,13	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	48	paket	99.441.994	12	paket	38.740.460	-	paket	-	-	paket	-		paket	8.500.000		paket	21.340.460	-	paket	29.840.460	-	paket	29.840.460	-	paket	30,01	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah gampong yang memenuhi kriteria kota sehat	40	gampong	475.499.800	10	dokumen	195.095.145	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	56.943.000		dokumen	11.500.000	-	dokumen	68.443.000	-	dokumen	68.443.000	-	dokumen	14,39	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	44	dokumen	1.325.750.000	11	dokumen	1.542.795.900	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	285.703.782		dokumen	1.081.099.935	-	dokumen	1.366.803.717	-	dokumen	1.366.803.717	-	dokumen	103,10	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	31	unit	1.281.612.862	12	unit	202.374.720	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit	387.471.855	-	unit	387.471.855	-	unit	387.471.855	-	unit	30,23	Dinas Kesehatan

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	48	laporan	500.977.260	12	lapporan	42.826.725	-	lapporan	-	-	lapporan	-		lapporan	2.500.000		lapporan	31.326.725	-	lapporan	33.826.725	-	lapporan	33.826.725	-	lapporan	6,75	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48	dokumen	294.799.466	12	dokumen	2.977.120	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	2.977.120	-	dokumen	2.977.120	-	dokumen	2.977.120	-	dokumen	1,01	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**0,9**		**460.758.394**	**90**	**%**	**18.125.560**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**9.099.990**		**%**	**9.099.990**	-	**%**	**9.099.990**	-	**%**	**1,98**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4	dokumen	97.869.928	1	dokumen	9.482.490	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	9.099.990	-	dokumen	9.099.990	-	dokumen	9.099.990	-	dokumen	9,30	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40	dokumen	234.974.579	10	dokumen	8.643.070	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	12	unit	127.913.887	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90**	**%**	**954.096.518**	**90**	**%**	**191.921.550**		**%**	-		**%**	**47.871.250**		**%**	**41.787.000**		**%**	**95.478.145**		**%**	**185.136.395**	-	**%**	**185.136.395**	-	**%**	**19,40**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	104	unit	329.478.165	26	unit	42.811.730	-	unit	-	3	unit	9.587.500		unit	11.217.000		unit	22.007.075	3	unit	42.811.575	3	unit	42.811.575	3	unit	12,99	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	44	unit	624.618.353	11	unit	149.109.820	-	unit	-	3	unit	38.283.750		unit	30.570.000		unit	73.471.070	3	unit	142.324.820	3	unit	142.324.820	7	unit	22,79	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**95**	**%**	**3.151.438.214**	**95**	**%**	**794.887.605**		**%**	-		**%**	**152.751.550**		**%**	**153.722.985**		**%**	**137.880.500**		**%**	**444.355.035**	-	**%**	**444.355.035**	-	**%**	**14,10**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**95**	**%**	**3.151.438.214**	**95**	**%**	**794.887.605**		**%**	-		**%**	**152.751.550**		**%**	**153.722.985**		**%**	**137.880.500**		**%**	**444.355.035**	-	**%**	**444.355.035**	-	**%**	**14,10**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	92	org	2.052.137.269	23	orang	101.255	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	45	dokumen	1.099.300.945	12	dokumen	794.786.350	-	dokumen	-	7	dokumen	152.751.550		dokumen	153.722.985		dokumen	137.880.500	7	dokumen	444.355.035	7	dokumen	444.355.035	16	dokumen	40,42	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**84**	**%**	**1.245.194.138**	**84**	**%**	**490.950.040**		**%**	-		**%**	**100.050.855**		**%**	**143.561.500**		**%**	**213.529.500**		**%**	**457.141.855**	-	**%**	**457.141.855**	-	**%**	**36,71**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Fasilitas pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal yang memiliki izin Operasional**	**75**	**%**	**394.154.292**	**75**	**%**	**103.934.105**		**%**	-		**%**	**19.000.000**		**%**	**49.110.000**		**%**	**25.637.500**		**%**	**93.747.500**	-	**%**	**93.747.500**	-	**%**	**23,78**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48	dokumen	168.300.000	12	dokumen	79.284.600	-	dokumen	-	7	dokumen	19.000.000		dokumen	49.110.000		dokumen	6.925.000	7	dokumen	75.035.000	7	dokumen	75.035.000	15	dokumen	44,58	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	sarana	110.676.962	15	sarana	24.649.505	-	sarana	-	-	sarana	-		sarana			sarana	18.712.500	-	sarana	18.712.500	-	sarana	18.712.500	-	sarana	16,91	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	198	sarana	115.177.330		-		-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat izin Produksi Pangan**	**85**	**%**	**204.741.616**	**85**	**%**	**227.240.975**		**%**	-		**%**	**64.175.855**		**%**	**94.451.500**		**%**	**62.352.500**		**%**	**220.979.855**	-	**%**	**220.979.855**	-	**%**	**107,93**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi	160	sarana	204.741.616	80	-	227.240.975	-	0	-	50	0	64.175.855		0	94.451.500		0	62.352.500	50	0	220.979.855	50	0	220.979.855	31	0	107,93	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**85**	**%**	**88.637.703**	**85**	**%**	**11.208.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.04	04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48	dokumen	88.637.703	12	dokumen	11.208.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**85**	**%**	**55.262.995**	**85**	**%**	**75.460**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.05	05	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	48	dokumen	55.262.995	12	dokumen	75.460	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**90**		**502.397.532**	**90**	**%**	**148.491.500**		**%**	-		**%**	**16.875.000**		**%**	-		**%**	**125.539.500**		**%**	**142.414.500**	-	**%**	**142.414.500**	-	**%**	**28,35**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	2.06	06	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	paket	502.397.532	15	unit	148.491.500	-	unit	-	2	unit	16.875.000		unit	-		unit	125.539.500	2	unit	142.414.500	2	unit	142.414.500	3	unit	28,35	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Promotif, Preventif**	**100**	**%**	**2.052.562.485**	**100**	**%**	**1.775.004.300**		**%**	-		**%**	**219.920.000**		**%**	**438.019.680**		**%**	**978.965.940**		**%**	**1.636.905.620**	-	**%**	**1.636.905.620**	-	**%**	**79,75**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.313.572.514**	**100**	**%**	**433.419.640**		**%**	-		**%**	**99.800.000**		**%**	**68.192.000**		**%**	**263.297.640**		**%**	**431.289.640**	-	**%**	**431.289.640**	-	**%**	**32,83**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	84	dokumen	1.313.572.514	12	dokumen	433.419.640	-	dokumen	-	2	dokumen	99.800.000		dokumen	68.192.000		dokumen	263.297.640	2	dokumen	431.289.640	2	dokumen	431.289.640	2	dokumen	32,83	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**738.989.971**	**100**	**%**	**1.341.584.660**		**%**	-		**%**	**120.120.000**		**%**	**369.827.680**		**%**	**715.668.300**		**%**	**1.205.615.980**	-	**%**	**1.205.615.980**	-	**%**	**163,14**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	46	dokumen	738.989.971	10	dokumen	1.341.584.660	-	dokumen	-	1	dokumen	120.120.000		dokumen	369.827.680		dokumen	715.668.300	1	dokumen	1.205.615.980	1	dokumen	1.205.615.980	2	dokumen	163,14	Dinas Kesehatan

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I		II		III		IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Kinerja	Rp				Kinerja	Rp		Kinerja	Rp				
1	02			RSU Meuraxa				489.834.149.157			125.002.797.539		0	12.723.581.346		0	16.907.023.628		0	72.812.362.349		0	68.476.881.481			0	170.919.848.804		-	0	170.919.848.804	#DIV/0!	0	34,89	Rsu Meuraxa
1	02	01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	83.259.984.220	100	%	18.578.132.966		%	4.155.666.517		%	6.950.195.396		%	9.225.963.979		%	7.902.735.599			%	28.234.561.491		-	%	28.234.561.491	-	%	33,91	Rsu Meuraxa
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	-	%	-					0			0			0			0			0	-		-	0	-	#VALUE!	0	-	Rsu Meuraxa
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	#DIV/0!	dokumen	-	Rsu Meuraxa
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyanekat Daerah	100	%	83.259.984.220	100	%	18.578.132.966		%	4.155.666.517		%	6.950.195.396		%	9.225.963.979		%	7.902.735.599			%	28.234.561.491		-	%	28.234.561.491	-	%	33,91	Rsu Meuraxa
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	80.869.344.220	12	bulan	17.981.197.966	3	bulan	4.141.966.517	3	bulan	6.794.495.396		bulan	9.094.038.979		bulan	7.729.985.599	6	bulan	27.760.486.491	6	bulan	27.760.486.491	13	bulan	34,33	Rsu Meuraxa
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	2.390.640.000	12	-	596.935.000	3	0	13.700.000	3	0	155.700.000		0	131.925.000		0	172.750.000	6	0	474.075.000	6	0	474.075.000	13	0	19,83	Rsu Meuraxa
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	406.574.164.937	100	%	106.424.664.573		%	8.567.914.829		%	9.956.828.232		%	63.586.398.370		%	60.574.145.882			%	142.685.287.313		-	%	142.685.287.313	-	%	35,09	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	106.328.959.111	100	%	2.647.278.895		%	-		%	212.000.000		%	1.472.234.000		%	1.044.400.000			%	2.728.634.000		-	%	2.728.634.000	-	%	2,57	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	11	unit	55.323.516.000	3	unit	2.647.278.895	-	unit	-	-	unit	212.000.000		unit	1.472.234.000		unit	1.044.400.000	-	unit	2.728.634.000	-	unit	2.728.634.000	-	unit	4,93	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	180	unit	51.005.443.111	45	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	-	obat	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#VALUE!	0	-	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	300.245.205.826	100	%	103.777.385.678		%	8.567.914.829		%	9.744.828.232		%	62.114.164.370		%	59.529.745.882			%	139.956.653.313		-	%	139.956.653.313	-	%	46,61	Rsu Meuraxa
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	48	Bulan	300.245.205.826	12	dokumen	103.777.385.678	1	dokumen	8.567.914.829	2	dokumen	9.744.828.232		dokumen	62.114.164.370		dokumen	59.529.745.882	3	dokumen	139.956.653.313	3	dokumen	139.956.653.313	6	dokumen	46,61	Rsu Meuraxa
1	03			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				282.671.291.000			79.165.968.370		0	2.051.744.862		0	15.353.717.233		0	14.353.947.547		0	51.499.738.837			0	83.259.148.479		-	0	83.259.148.479	#DIV/0!	0	29,45	Dinas PUPR
1	03	01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	60.072.291.451			11.925.749.484		0	2.051.744.862		0	3.287.741.083		0	2.601.978.284		0	2.724.340.688			0	10.665.804.837		-	0	10.665.804.837	-	0	17,75	Dinas PUPR
1	03	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	%	197.741.584	100	%	24.374.786		%	-		%	-		%	2.025.286		%	9.354.786			%	11.380.072		-	%	11.380.072	-	%	5,76	Dinas PUPR
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daeran Daerah	8	Dokumen	197.741.584	2	dokumen	24.374.786	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	2.025.286		dokumen	9.354.786	-	dokumen	11.380.072	-	dokumen	11.380.072	-	dokumen	5,76	Dinas PUPR
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	47.180.238.721	100	%	9.738.500.058		%	2.002.271.314		%	3.003.869.275		%	1.987.356.967		%	2.082.868.193			%	9.076.365.749		-	%	9.076.365.749	-	%	19,24	Dinas PUPR
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	40.368.571.721	12	bulan	8.004.846.058	3	bulan	1.700.108.314	3	bulan	2.614.107.275		bulan	1.621.470.967		bulan	1.635.524.193	6	bulan	7.571.210.749	6	bulan	7.571.210.749	13	bulan	18,76	Dinas PUPR
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	6.811.667.000	12	bulan	1.733.654.000	3	bulan	302.163.000	3	bulan	389.762.000		bulan	365.886.000		bulan	447.344.000	6	bulan	1.505.155.000	6	bulan	1.505.155.000	13	bulan	22,10	Dinas PUPR
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	733.780.000	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-			%	-		-	%	-	-	%	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	379	Paket	655.760.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	78.020.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.351.689.420	100	%	408.507.536		%	-		%	24.963.700		%	196.058.316		%	89.167.021			%	310.189.037		-	%	310.189.037	-	%	22,95	Dinas PUPR
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56	Paket	51.732.704	14	paket	15.488.008	-	paket	-	-	paket	-		paket	9.023.008		paket	6.465.000	-	paket	15.488.008	-	paket	15.488.008	-	paket	29,94	Dinas PUPR
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	8	Paket	98.808.492	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	201.148.224	12	paket	41.772.130	-	paket	-	-	paket	-		paket	19.814.290		paket	9.371.750	-	paket	29.186.040	-	paket	29.186.040	-	paket	14,51	Dinas PUPR
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	laporan	1.000.000.000	35	laporan	351.247.398	-	laporan	-	3	laporan	24.963.700		laporan	167.221.018		laporan	73.330.271	3	laporan	265.514.989	3	laporan	265.514.989	2	laporan	26,55	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	2.999.365.001	100	%	193.075.000		%	-		%	-		%	-		%	-			%	-		-	%	-	-	%	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	unit	1.000.000.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	2	Unit	1.000.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20	Unit	399.624.000	5	unit	70.621.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	unit	199.741.001	12	unit	122.454.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	16	unit	400.000.000	4	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	3.762.192.030	100	%	872.374.582		%	49.473.548		%	129.089.408		%	179.348.605		%	271.900.508			%	629.812.069		-	%	629.812.069	-	%	16,74	Dinas PUPR
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	20.000.000	12	laporan	1.050.000	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas PUPR
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	2.114.543.162	12	laporan	531.126.613	1	laporan	49.473.548	2	laporan	77.829.408		laporan	103.639.636		laporan	124.041.508	3	laporan	354.984.100	3	laporan	354.984.100	6	laporan	16,79	Dinas PUPR
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	1.627.648.868	12	laporan	340.197.969	-	laporan	-	-	laporan	51.260.000		laporan	75.708.969		laporan	147.859.000	-	laporan	274.827.969	-	laporan	274.827.969	-	laporan	16,88	Dinas PUPR
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.847.284.695	100	%	688.917.522		%	-		%	129.818.700		%	237.189.110		%	271.050.100			%	638.057.910		-	%	638.057.910	-	%	16,58	Dinas PUPR
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200	Unit	2.387.279.611	50	unit	549.896.702	-	unit	-	9	unit	104.862.700		unit	210.112.700		unit	215.311.100	9	unit	530.286.500	9	unit	530.286.500	5	unit	22,21	Dinas PUPR
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20	Unit	560.000.000	5	unit	108.020.000	-	unit	-	1	unit	24.956.000		unit	10.020.000		unit	41.795.000	1	unit	76.771.000	1	unit	76.771.000	5	unit	13,71	Dinas PUPR
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	208	Unit	100.005.084	52	unit	31.000.820	-	unit	-	-	unit	-		unit	17.056.410		unit	13.944.000	-	unit	31.000.410	-	unit	31.000.410	-	unit	31,00	Dinas PUPR
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	800.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	44,03	%	1.295.066.972	44	%	573.237.000		%	-		%	54.900.000		%	208.539.000		%	273.910.000			%	537.349.000		-	%	537.349.000	-	%	41,49	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengendalian Banjir	44,03	%	1.268.426.972	44	%	573.237.000		%	-		%	54.900.000		%	208.539.000		%	273.910.000			%	537.349.000		-	%	537.349.000	-	%	42,36	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen perencanaan Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Yang Tersusun	3	Dokumen	15.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	0,2	Km	15.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km		-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	4	Unit	99.375.986	1	Unit	185.073.000	-	Unit	-	-	Unit	47.700.000		Unit	41.875.000		Unit	60.341.000	-	Unit	149.916.000	-	Unit	149.916.000	-	Unit	150,86	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	3	Unit	15.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	3	Unit	6.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	Unit	6.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	3	Unit	6.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	3	Unit	6.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di Normalisasi/Restorasi	0,03	Km	6.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	24	Unit	1.094.050.986	6	Unit	388.164.000	-	Unit	-	-	Unit	7.200.000		Unit	166.664.000		Unit	213.569.000			-	Unit	387.433.000	-	Unit	387.433.000	-	Unit	35,41	Dinas PUPR
1	**03**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi**	**96,5**	**%**	**26.640.000**	-	-	-	-	**0**	-	-	**0**	-		**0**	-		**0**			-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dinas PUPR**
1	03	02	2.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	0,03	Km	6.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	0,03	Km	6.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	0,03	Km	6.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	03	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,03	Km	8.640.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	Dinas PUPR
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum**	**94,17**	**%**	**33.796.071.999**	**92**	**%**	**6.300.814.528**		**%**	-		**%**	**1.241.462.250**		**%**	**646.007.073**		**%**	**4.341.952.403**		**%**	**6.229.421.726**	-	**%**	**6.229.421.726**	-	**%**	**18,43**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum**	**94,17**	**%**	**33.796.071.999**	**92**	**%**	**6.300.814.528**		**%**	-		**%**	**1.241.462.250**		**%**	**646.007.073**		**%**	**4.341.952.403**		**%**	**6.229.421.726**	-	**%**	**6.229.421.726**	-	**%**	**18,43**	**Dinas PUPR**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5	Dokumen	401.633.350	2	Dokumen	501.819.009	-	Dokumen	-	2	Dokumen	224.919.000		Dokumen	900.009		Dokumen	272.464.000		2	Dokumen	498.283.009	2	Dokumen	498.283.009	40	Dokumen	124,06	Dinas PUPR
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAMTematik Tertentu yang terbangun	40	SR	32.794.438.649	10	SR	5.798.995.519	-	SR	-	1	SR	1.016.543.250		SR	645.107.064		SR	4.069.488.403		1	SR	5.731.138.717	1	SR	5.731.138.717	3	SR	17,48	Dinas PUPR
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	60	liter/detik	300.000.000	-	liter/detik	-	-	liter/detik	-	-	liter/detik	-		liter/detik			liter/detik			-	liter/detik	-	-	liter/detik	-	-	liter/detik	-	Dinas PUPR
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	3	unit	150.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit			-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	3	unit	150.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit			-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR
1	**03**	**04**			**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan**	**94**	**%**	**974.363.900**	**91**	**%**	**410.900.009**		**%**	-		**%**	-		**%**	**900.009**		**%**	**409.527.000**		**%**	**410.427.009**	-	**%**	**410.427.009**	-	**%**	**42,12**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan**	**94**	**%**	**974.363.900**	**91**	**%**	**410.900.009**		**%**	-		**%**	-		**%**	**900.009**		**%**	**409.527.000**		**%**	**410.427.009**	-	**%**	**410.427.009**	-	**%**	**42,12**	**Dinas PUPR**
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pegelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4	Dokumen	181.558.350	1	dokumen	900.009	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	900.009		dokumen			-	dokumen	900.009	-	dokumen	900.009	-	dokumen	0,50	Dinas PUPR
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	740	Rumah Tangga	702.805.550	500	rumah tangga	410.000.000	-	rumah tangga	-	-	rumah tangga	-		rumah tangga			rumah tangga	409.527.000		-	rumah tangga	409.527.000	-	rumah tangga	409.527.000	-	rumah tangga	58,27	Dinas PUPR
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan Yang Tersedia	18	Unit	90.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas PUPR
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah**	**87,7**	**%**	**15.392.761.100**	**88**	**%**	**8.129.324.348**		**%**	-		**%**	**267.896.000**		**%**	**1.994.241.723**		**%**	**7.723.715.689**		**%**	**9.985.853.412**	-	**%**	**9.985.853.412**	-	**%**	**64,87**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah**	**87,7**	**%**	**15.392.761.100**	**88**	**%**	**8.129.324.348**		**%**	-		**%**	**267.896.000**		**%**	**1.994.241.723**		**%**	**7.723.715.689**		**%**	**9.985.853.412**	-	**%**	**9.985.853.412**	-	**%**	**64,87**	**Dinas PUPR**
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab/Kota yang Disusun	4	Dokumen	257.558.350	1	dokumen	250.591.159	-	dokumen	-	1	dokumen	249.396.000		dokumen	1.195.159		dokumen			1	dokumen	250.591.159	1	dokumen	250.591.159	25	dokumen	97,29	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	27	Rumah Tangga	210.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0	7.723.715.689		-	0	7.723.715.689	-	0	7.723.715.689	-	0	3.677,96	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	75	kelompok	90.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	60	Orang	90.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	unit	90.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1625	Rumah Tangga	14.475.202.750	350	rumah tangga	7.878.733.189	-	rumah tangga	-		rumah tangga	18.500.000		rumah tangga	1.993.046.564		rumah tangga			-	rumah tangga	2.011.546.564	-	rumah tangga	2.011.546.564	-	rumah tangga	13,90	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	3	Unit	90.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	900	Rumah Tangga	90.000.000	-	-	-	-	0	-		0			0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara**	**82,09**	**%**	**32.452.351.828**	**82**	**%**	**11.028.425.189**		**%**	-		**%**	**2.948.690.300**		**%**	**2.228.768.300**		**%**	**7.278.844.820**		**%**	**12.456.303.420**	-	**%**	**12.456.303.420**	-	**%**	**38,38**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara**	**82,09**	**%**	**32.452.351.828**	**82**	**%**	**11.028.425.189**		**%**	-		**%**	**2.948.690.300**		**%**	**2.228.768.300**		**%**	**7.278.844.820**		**%**	**12.456.303.420**	-	**%**	**12.456.303.420**	-	**%**	**38,38**	**Dinas PUPR**
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3	Dokumen	368.007.042	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	06	2.01	03	SupervisiPembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	12000	m	29.741.222.744	3.000	-	5.095.757.033	-	0	-	21	%	1.021.565.600	46	%	531.695.200	32	%	4.190.805.220	99	%	5.744.066.020	99	%	5.744.066.020	1	%	19,31	Dinas PUPR
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	30	m	30.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	30	m	30.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemelharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	132000	m	2.208.122.042	42.000	m	5.932.668.156	-	m	-	9.622	m	1.927.124.700	22.751	m	1.697.073.100	9.226	m	3.088.039.600	41.599	m	6.712.237.400	41.599	m	6.712.237.400	32	m	303,98	Dinas PUPR
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan**	**85,57**	**%**	**36.992.735.184**	**84**	**%**	**8.467.938.985**		**%**	-		**%**	**2.462.062.600**		**%**	**3.436.413.057**		**%**	**4.453.349.843**		**%**	**10.351.825.500**	-	**%**	**10.351.825.500**	-	**%**	**27,98**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Yang Tertata Sesuai Peruntukan**	**85,57**	**%**	**36.992.735.184**	**84**	**%**	**8.467.938.985**		**%**	-		**%**	**2.462.062.600**		**%**	**3.436.413.057**		**%**	**4.453.349.843**		**%**	**10.351.825.500**	-	**%**	**10.351.825.500**	-	**%**	**27,98**	**Dinas PUPR**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Rekomendasi TABG dan Tim SLF	24	Dokumen	795.279.299	6	dokumen	207.912.035	-	dokumen	-		dokumen	-		dokumen	108.000.000		dokumen			-	dokumen	108.000.000	-	dokumen	108.000.000	-	dokumen	13,58	Dinas PUPR
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16	Dokumen	35.951.352.547	7	dokumen	8.155.776.950	-	dokumen	-	1	dokumen	2.462.062.600		dokumen	3.328.413.057		dokumen	4.453.349.843	1	dokumen	10.243.825.500	1	dokumen	10.243.825.500	6	dokumen	28,49	Dinas PUPR
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung yang Tersedia	2	Dokumen	172.110.529	1	dokumen	88.800.000	-	dokumen	-		dokumen	-		dokumen			dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas PUPR
1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	5	Unit	73.992.809	5	unit	15.450.000	-	unit	-		unit	-		unit			unit			-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas PUPR

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah	0	Unit	-	-	-	-	-	0	-		0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas PUPR
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Yang di Rehab	0	Unit	-	-	-	-	-	0	-		0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	**Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata**	**32,5**	**%**	**14.129.449.253**	**31**	**%**	**11.228.886.200**		**%**	**-**		**%**	**837.540.000**		**%**	**803.259.200**		**%**	**9.361.722.325**		**%**	**11.002.521.525**	**-**	**%**	**11.002.521.525**	**-**	**%**	**77,87**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**1**	**kawasan**	**14.129.449.253**	**1**	**kawasan**	**11.228.886.200**		**kawasan**	**-**		**kawasan**	**837.540.000**		**kawasan**	**803.259.200**		**kawasan**	**9.361.722.325**		**kawasan**	**11.002.521.525**	**-**	**kawasan**	**11.002.521.525**	**-**	**kawasan**	**77,87**	**Dinas PUPR**
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4	Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	Dokumen	13.004.449.253	1	kawasan	11.228.886.200	-	kawasan	-	-	kawasan	837.540.000		kawasan	803.259.200		kawasan	9.361.722.325	-	kawasan	11.002.521.525	-	kawasan	11.002.521.525	-	kawasan	84,61	Dinas PUPR
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	kawasan	825.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0	kawasan	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi**	**96,35**	**%**	**83.865.010.443**			**20.508.899.926**		**0**	**-**		**0**	**4.054.215.000**		**0**	**1.929.745.850**		**0**	**14.647.269.500**		**0**	**20.631.230.350**	**-**	**0**	**20.631.230.350**	**-**	**0**	**24,60**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase meningkatnya kualitas kontruksi jalan sesuai spesifikasi**	**96,35**	**%**	**83.865.010.443**	**96**	**%**	**20.508.899.926**		**%**	**-**		**%**	**4.054.215.000**		**%**	**1.929.745.850**		**%**	**14.647.269.500**		**%**	**20.631.230.350**	**-**	**%**	**20.631.230.350**	**-**	**%**	**24,60**	**Dinas PUPR**
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	12	Dokumen	773.121.829	3	dokumen	692.522.150	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	401.472.150	4	dokumen	288.702.000	4	dokumen	690.174.150	4	dokumen	690.174.150	33	dokumen	89,27	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	4	Dokumen	1.266.276.104	1	dokumen	289.622.197	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen		1	dokumen	288.510.000	1	dokumen	288.510.000	1	dokumen	288.510.000	25	dokumen	22,78	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,6	km	2.613.121.829	1,20	KM	12.202.889.000	-	KM	-	0,15	KM	2.920.667.700		KM	199.510.000		KM	9.112.360.300	0,15	KM	12.232.538.000	0	KM	12.232.538.000	25	KM	468,12	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	12	km	21.351.714.229	-	KM	1.050.000	-	KM	-	-	KM	-		KM			KM	299.400.000	-	KM	299.400.000	-	KM	299.400.000	-	KM	1,40	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	20	km	48.675.667.316	5	KM	4.012.870.579	-	KM	-	1,18	KM	1.133.547.300	0,162	KM	(251.865.800)	3,051	KM	2.844.153.700	4,39	KM	3.725.835.200	4	KM	3.725.835.200	22	KM	7,65	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	28,4	km	6.611.987.307	7,1	KM	2.928.896.000	2.029	KM	-	-	KM	-	2.700	KM	1.580.629.500	7,100	KM	1.439.438.500	4.736	KM	3.020.068.000	4.736	KM	3.020.068.000	16.676	KM	45,68	Dinas PUPR
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	24	Dokumen	2.573.121.829	6	dokumen	381.050.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen		6	dokumen	374.705.000	6	dokumen	374.705.000	6	dokumen	374.705.000	25	dokumen	14,56	Dinas PUPR
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi**	**57,5**	**%**	**531.189.681**	**56**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih**	**100**	**orang**	**411.189.681**	**-**	**orang**	**-**		**orang**	**-**		**orang**	**-**		**orang**	**-**		**orang**	**-**		**orang**	**-**	**-**	**orang**	**-**	**-**	**orang**	**-**	**Dinas PUPR**
1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1	Dokumen	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	20	orang	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1	Dokumen	141.189.681	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas PUPR
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	40	orang	90.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	40	orang	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**11**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**2**	**Dokumen**	**120.000.000**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dinas PUPR**
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	Dokumen	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	10	Dokumen	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR**	**82,27**	**%**	**3.169.999.189**	**81**	**%**	**591.792.701**		**%**	**-**		**%**	**199.210.000**		**%**	**504.095.051**		**%**	**285.106.650**		**%**	**988.411.701**	**-**	**%**	**988.411.701**	**-**	**%**	**31,18**	**Dinas PUPR**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kab/Kota**	**Jumlah Implementasi Aturan Perencanaan Tata Ruang**	**8**	**Dokumen**	**689.999.574**	**2**	**dokumen**	**23.702.000**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**17.452.000**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**17.452.000**	**-**	**dokumen**	**17.452.000**	**-**	**dokumen**	**2,53**	**Dinas PUPR**
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	2	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2	Dokumen	140.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4	Dokumen	449.999.574	1	dokumen	23.702.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	17.452.000		dokumen	-	-	dokumen	17.452.000	-	dokumen	17.452.000	-	dokumen	3,88	Dinas PUPR
1	**03**	**12**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sesuai RTRW**	**1**	**Dokumen**	**100.000.000**	**7**	**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**484.316.650**		**dokumen**			**dokumen**	**484.316.650**	**-**	**dokumen**	**484.316.650**	**-**	**dokumen**	**484,32**	**Dinas PUPR**
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0	484.316.650		0		-	0	484.316.650	-	0	484.316.650	-	0	484,32	Dinas PUPR
1	**03**	**12**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sesuai RTRW**	**5**	**Dokumen**	**380.000.000**	**-**	**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**		**dokumen**	**-**		**dokumen**			**dokumen**	**-**	**-**	**dokumen**	**-**	**-**	**dokumen**	**-**	**-**	**dokumen**	**-**	**Dinas PUPR**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3	Dokumen	280.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	**03**	**12**	**2.04**		**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sesuai RTRW**	**31**	**Dokumen**	**1.999.999.615**			**568.090.701**		**0**	**-**		**0**	**199.210.000**		**0**	**2.326.401**		**0**	**285.106.650**		**0**	**486.643.051**	**-**	**0**	**486.643.051**	**-**	**0**	**24,33**	**Dinas PUPR**
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	2	Dokumen	170.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	20	Dokumen	1.219.999.709	5	dokumen	555.514.300	-	dokumen	-	2	dokumen	199.210.000		dokumen			dokumen	285.106.650	2	dokumen	484.316.650	2	dokumen	484.316.650	10	dokumen	39,70	Dinas PUPR
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	4	Kasus	200.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas PUPR

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	Dokumen	409.999.906	2	dokumen	12.576.401	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	2.326.401		dokumen	-	-	dokumen	2.326.401	-	dokumen	2.326.401	-	dokumen	0,57	Dinas PUPR
1	**04**				**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**				**46.338.608.444**			**25.309.224.299**		**0**	**1.135.093.267**		**0**	**22.074.410**		**0**	**13.035.165.907**		**0**	**10.263.539.875**		**0**	**24.455.873.459**		**0**	**24.455.873.459**	**#DIV/0!**	**0**	**52,78**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**01**			**Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**28.605.446.932**			**6.001.789.301**		**0**	**1.135.093.267**		**0**	**22.074.410**		**0**	**3.317.173.670**		**0**	**1.695.736.955**		**0**	**6.170.078.302**		**0**	**6.170.078.302**	-	**0**	**21,57**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**20.000.872**	**100**	**%**	**14.816.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.510.000**		**%**	**1.981.000**		**%**	**5.491.000**	-	**%**	**5.491.000**	-	**%**	**27,45**	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	20.000.872	5	dokumen	14.816.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	3.510.000		dokumen	1.981.000	-	dokumen	5.491.000	-	dokumen	5.491.000	-	dokumen	27,45	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**24.540.804.356**	**100**	**%**	**5.022.664.839**		**%**	**1.066.877.211**		**%**	**22.074.410**		**%**	**2.818.092.472**		**%**	**1.355.924.869**		**%**	**5.262.968.962**	-	**%**	**5.262.968.962**	-	**%**	**21,45**	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	20.325.204.356	12	Bulan	3.951.914.839	3	Bulan	862.547.211	1	Bulan	22.074.410		Bulan	2.241.082.472		Bulan	877.592.869	4	Bulan	4.003.296.962	4	Bulan	4.003.296.962	8	Bulan	19,70	Dinas Perkim
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	4.215.600.000	12	Bulan	1.070.750.000	2	Bulan	204.330.000	-	Bulan	-		Bulan	577.010.000		Bulan	478.332.000	2	Bulan	1.259.672.000	2	Bulan	1.259.672.000	4	Bulan	29,88	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**298.980.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300	Paket	298.980.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**450.996.692**	**100**	**%**	**173.943.109**		**%**	-		**%**	-		**%**	**103.793.491**		**%**	**85.060.406**		**%**	**188.853.897**	-	**%**	**188.853.897**	-	**%**	**41,87**	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	28	Paket	19.876.320	7	paket	3.536.000	-	paket	-	-	paket	-		paket	1.864.000		paket	-	-	paket	1.864.000	-	paket	1.864.000	-	paket	9,38	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yag disediakan	8	Paket	60.000.000	2	paket	14.438.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	28	Paket	34.198.112	7	paket	6.402.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	3.989.000	-	paket	3.989.000	-	paket	3.989.000	-	paket	11,66	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	Paket	56.922.260	12	paket	10.913.380	-	paket	-	-	paket	-		paket	5.272.000		paket	9.221.880	-	paket	14.493.880	-	paket	14.493.880	-	paket	25,46	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	280.000.000	30	laporan	138.653.729	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	96.657.491		laporan	71.849.526	-	laporan	168.507.017	-	laporan	168.507.017	-	laporan	60,18	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan barang Mulik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**159.379.200**	**100**	**%**	**17.709.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kenderaaan Dnas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8	Unit	80.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perkim
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	40	Unit	79.379.200	10	unit	17.709.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.675.236.936**	**100**	**%**	**675.726.353**		**%**	**68.216.056**		**%**	-		**%**	**351.755.907**		**%**	**204.553.830**		**%**	**624.525.793**	-	**%**	**624.525.793**	-	**%**	**23,34**	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24	Laporan	1.834.539.412	6	laporan	458.574.853	1	laporan	68.216.056	-	laporan	-		laporan	241.967.907		laporan	112.221.376	1	laporan	422.405.339	1	laporan	422.405.339	4	laporan	23,03	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	344	Laporan	840.697.524	86	laporan	217.151.500	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	109.788.000		laporan	92.332.454	-	laporan	202.120.454	-	laporan	202.120.454	-	laporan	24,04	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**460.048.876**	**100**	**%**	**96.930.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**40.021.800**		**%**	**48.216.850**		**%**	**88.238.650**	-	**%**	**88.238.650**	-	**%**	**19,18**	**Dinas Perkim**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kederanan Peroranagan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	209.828.000	5	unit	87.912.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	38.113.800		unit	42.554.850	-	unit	80.668.650	-	unit	80.668.650	-	unit	38,45	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	unit	50.220.876	5	unit	9.018.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	1.908.000		unit	5.662.000	-	unit	7.570.000	-	unit	7.570.000	-	unit	15,07	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabiliatasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharai/direhabilitasi	4	Unit	200.000.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**			**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Perumahan**	**100**	**%**	**12.172.586.299**	**100**	**%**	**922.122.024**		**%**	-		**%**	-		**%**	**155.935.074**		**%**	**570.287.000**		**%**	**726.222.074**	-	**%**	**726.222.074**	-	**%**	**5,97**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota**	**Persentase Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana**	**100**	**%**	**628.581.360**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab / Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	4	Dok	276.329.920	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.01	02	Identrifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	Dok	176.251.720	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.01	04	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dok	175.999.720	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab / Kota**	**Persentase Sosialisasi dan Persiapan Rumah Korban Bencana**	**100**	**%**	**39.911.160**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.02	01	Sosilalisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Kak atas Tanah dan Bangunan	120	Orang	39.911.160	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang terkena Relokasi**	**100**	**%**	**515.414.720**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4	Unit rumah	115.900.560	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-		unit rumah			unit rumah		-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Ha	-	-	Ha	-	-	Ha	-	-	Ha	-		Ha			Ha		-	Ha	-	-	Ha	-	#DIV/0!	Ha	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terbangun	8	UnitRuma h	399.514.160	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-		unit rumah			unit rumah		-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	Dinas Perkim
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus**	**Persentase Pembinaan Pengelolaan Rusunawa**	**100**	**%**	**821.609.960**	**100**	**%**	**897.687.950**		**%**	-		**%**	-		**%**	**141.051.000**		**%**	**570.287.000**		**%**	**711.338.000**	-	**%**	**711.338.000**	-	**%**	**86,58**	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik / Penghuni Rumah Susun	48	Laporan	665.600.000	12	laporan	880.662.000	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	141.051.000		laporan	570.287.000	-	laporan	711.338.000	-	laporan	711.338.000	-	laporan	106,87	Dinas Perkim
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	48	Dok	156.009.960	12	dokumen	17.025.950	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penerbitan izin Pembangunan Perumahan**	**100**	**%**	**138.356.000**	**100**	**%**	**24.434.074**		**%**	-		**%**	-		**%**	**14.884.074**		**%**	-		**%**	**14.884.074**	-	**%**	**14.884.074**	-	**%**	**10,76**	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendaliaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	Laporan	138.356.000	1	laporan	24.434.074	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	14.884.074		laporan	-	-	laporan	14.884.074	-	laporan	14.884.074	-	laporan	10,76	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan bangunan Gedung**	**100**	**%**	**10.028.713.099**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peberbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	4	Laporan	10.028.713.099	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perkim
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh**	**100**	**%**	**2.060.128.052**	**100**	**%**	**16.521.313.063**		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.922.036.563**		**%**	**7.196.893.520**		**%**	**15.118.930.083**	-	**%**	**15.118.930.083**	-	**%**	**733,88**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Penerbitan izin Pembangunan Kawasan Permukiman**	**100**	**%**	**485.791.216**	**100**	**%**	**2.261.667**		**%**	-		**%**	-		**%**	**2.261.667**		**%**	-		**%**	**2.261.667**	-	**%**	**2.261.667**	-	**%**	**0,47**	**Dinas Perkim**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV													
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Kinerja	Rp												
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukinan dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan / atau review serta terlegalisasi	8	Dok	138.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4	Laporan	347.791.216	1	laporan	2.261.667	-	laporan	-	-	laporan	-	laporan	2.261.667	laporan	-	-	laporan	2.261.667	-	laporan	2.261.667	-	laporan	0,65	Dinas Perkim
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha**	**Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh**	**100**	**%**	**132.887.724**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-	**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	03	2.02	01	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetatpan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4	Dok	8.014.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen		dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	4	Laporan	124.873.724	1	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan		laporan			-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perkim
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha**	**Persentase Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh**	**100**	**%**	**1.441.449.112**	**100**	**%**	**16.519.051.396**		**%**	-		**%**	-	**%**	**7.919.774.896**	**%**	**7.196.893.520**		**%**	**15.116.668.416**	-	**%**	**15.116.668.416**	-	**%**	**1.048,71**	**Dinas Perkim**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan rencana Tapak (site plan) dan Detail Enginering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumalh Rencana Tapak (site plan) dan Detail Enginering Desig (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	4	dok	694.607.480	1	dokumen	90.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen	89.600.000	dokumen	-	-	dokumen	89.600.000	-	dokumen	89.600.000	-	dokumen	12,90	Dinas Perkim
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	4	Unit	20.000.264	1	unit rumah	583.654.396	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	unit rumah	2.679.396	unit rumah	713.119.000	-	unit rumah	715.798.396	-	unit rumah	715.798.396	-	unit rumah	3.578,94	Dinas Perkim
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman Kumuh yang diremajakan / Dimugar	2	Ha	184.042.320	2	Ha	12.784.322.000	-	Ha	-	-	Ha	-	Ha	6.324.928.800	Ha	4.600.937.220	-	Ha	10.925.866.020	-	Ha	10.925.866.020	-	Ha	5.936,61	Dinas Perkim
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya pendataan dan Verifikasi kawasan permukiman kumuh	4	Dok	8.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	20	Unit	534.799.048	19	unit	3.061.075.000	-	unit	-	-	unit	-	unit	1.502.566.700	unit	1.882.837.300	-	unit	3.385.404.000	-	unit	3.385.404.000	-	unit	633,02	Dinas Perkim
1	**04**	**04**			**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Presentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Kumuh**	**100**	**%**	**19.999.384**	**100**	**%**	**589.678.000**		**%**	-		**%**	-	**%**	**589.678.000**	**%**	-		**%**	**589.678.000**	-	**%**	**589.678.000**	-	**%**	**2.948,48**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kab / Kota**	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh**	**100**	**%**	**19.999.384**	**100**	**%**	**589.678.000**		**%**	-		**%**	-	**%**	**589.678.000**	**%**	-		**%**	**589.678.000**	-	**%**	**589.678.000**	-	**%**	**2.948,48**	**Dinas Perkim**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah (10) sepuluh Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	4	Unit rumah	19.999.384	1	unit rumah	589.678.000	-	unit rumah	-	-	unit rumah	-	unit rumah	589.678.000	unit rumah	-	-	unit rumah	589.678.000	-	unit rumah	589.678.000	-	unit rumah	2.948,48	Dinas Perkim
1	**04**	**05**			**Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan**	**100**	**%**	**3.448.146.817**	**100**	**%**	**1.274.321.911**		**%**	-		**%**	-	**%**	**1.050.342.600**	**%**	**800.622.400**		**%**	**1.850.965.000**	-	**%**	**1.850.965.000**	-	**%**	**53,68**	**Dinas Perkim**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyelenggaran PSU**	**100**	**%**	**3.448.146.817**	**100**	**%**	**1.274.321.911**		**%**	-		**%**	-	**%**	**1.050.342.600**	**%**	**800.622.400**		**%**	**1.850.965.000**	-	**%**	**1.850.965.000**	-	**%**	**53,68**	**Dinas Perkim**
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	Doumen	39.999.200	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen		dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasranan, Sarana dan Utilitas Umum yang Meunjang Fungsi Hunian	20	Lokasi	3.290.369.137	5	lokasi	1.265.244.911	-	lokasi	-	-	lokasi	-	lokasi	1.050.342.600	lokasi	800.622.400	-	lokasi	1.850.965.000	-	lokasi	1.850.965.000	-	lokasi	56,25	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	4	Laporan	39.999.280	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	laporan		laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	05	Verifikasi Dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	Dokumen	77.779.200	1	laporan	9.077.000	-	laporan	-	-	laporan	-	laporan		laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perkim
1	**04**	**06**			**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persentase Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-	**%**	-		**%**	-	**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaaan Rumah serta Perencanaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemapuan Kecil**	**Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum**	**100**	**%**	**32.300.960**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-	**%**	-	**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Perkim**
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkroniasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4	Laporan	32.300.960	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	laporan		laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perkim
1	**05**				**Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan**				**35.764.098.492**			**8.001.794.275**		**0**	-		**0**	**41.380.181**	**0**	**5.336.939.228**	**0**	**1.949.792.145**		**0**	**7.328.111.554**	-	**0**	**7.328.111.554**	**#DIV/0!**	**0**	**20,49**	**DPKP**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100%**	**%**	**35.466.785.814**	**100**	**%**	**7.952.910.470**		**%**	-		**%**	**41.380.181**	**%**	**5.332.619.228**	**%**	**1.929.772.145**		**%**	**7.303.771.554**	-	**%**	**7.303.771.554**	-	**%**	**20,59**	**DPKP**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100%**	**%**	**20.000.000**	**100**	**%**	**10.099.180**		**%**	-		**%**	-	**%**	-	**%**	**2.819.180**		**%**	**2.819.180**	-	**%**	**2.819.180**	-	**%**	**14,10**	**DPKP**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	20.000.000	7	Dokumen	10.099.180	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	2.819.180	-	Dokumen	2.819.180	-	Dokumen	2.819.180	-	Dokumen	14,10	DPKP
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**%**	**6.297.259.030**	**100**	**%**	**24.900.000**		**%**	-		**%**	**4.523.085.113**	**%**	**1.375.500.101**		**%**	**5.923.485.214**	-	**%**	**5.923.485.214**	-	**%**	**20,03**	**DPKP**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	24.129.923.440	12	Bulan	4.919.479.030	-	Bulan	-	-	Bulan	3.563.184.769	Bulan	1.046.477.585	-	Bulan	4.609.662.354	-	Bulan	4.609.662.354	-	Bulan	19,10	DPKP
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	5.440.420.000	12	Bulan	1.377.780.000	-	Bulan	-	-	Bulan	24.900.000	Bulan	959.900.344	Bulan	329.022.516	-	Bulan	1.313.822.860	-	Bulan	1.313.822.860	-	Bulan	24,15	DPKP
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.320.125.856**	**100**	**%**	**114.800.000**		**%**	-		**%**	-	**%**	-	**%**	**104.085.000**		**%**	**104.085.000**	-	**%**	**104.085.000**	-	**%**	**7,88**	**DPKP**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	328	Paket	1.310.125.856	82	paket	114.800.000	-	paket	-	-	paket	-	paket		paket	104.085.000	-	paket	104.085.000	-	paket	104.085.000	-	paket	7,94	DPKP
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Org	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**300.320.138**	**100**	**%**	**101.071.000**		**%**	-		**%**	-	**%**	**43.750.821**	**%**	**23.777.188**		**%**	**67.528.009**	-	**%**	**67.528.009**	-	**%**	**22,49**	**DPKP**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	Paket	20.402.114	5	paket	3.972.000	-	paket	-	-	paket	2.645.000	paket	-	-	paket	2.645.000	-	paket	2.645.000	-	paket	12,96	DPKP
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	Paket	93.217.556	15	paket	7.131.000	-	paket	-	-	paket	-	paket		paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	DPKP
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22	Paket	14.000.000	6	paket	42.668.000	-	paket	-	-	paket	-	paket		paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	DPKP
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	32.700.468	10	paket	6.260.000	-	paket	-	-	paket	-	paket	1.899.000	paket	2.082.000	-	paket	3.981.000	-	paket	3.981.000	-	paket	12,17	DPKP
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	140.000.000	3	laporan	41.040.000	-	laporan	-	-	laporan	-	laporan	39.206.821	laporan	21.695.188	-	laporan	60.902.009	-	laporan	60.902.009	-	laporan	43,50	DPKP
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**71.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-	**%**	-	**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPKP**
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	11.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.603.746.102**	**100**	**%**	**694.504.790**		**%**	-		**%**	**9.390.181**		**%**	**433.306.010**		**%**	**238.555.966**		**%**	**681.252.157**	-	**%**	**681.252.157**	-	**%**	**26,16**	**DPKP**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	827.648.000	12	Laporan	212.324.000	-	Laporan	-	-	Laporan	5.485.181		Laporan	92.225.720		Laporan	44.016.966	-	Laporan	141.727.867	-	Laporan	141.727.867	-	Laporan	17,12	DPKP
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	3.905.000		0			0		-	0	3.905.000	-	0	3.905.000	-	0	32,54	DPKP
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.764.098.102	12	Laporan	482.180.790	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	341.080.290		Laporan	194.539.000	-	Laporan	535.619.290	-	Laporan	535.619.290	-	Laporan	30,36	DPKP
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.581.250.278**		-	**735.176.470**		**0**	-		**0**	**7.090.000**		**0**	**332.477.284**		**0**	**185.034.710**		**0**	**524.601.994**	-	**0**	**524.601.994**	-	**0**	**33,18**	**DPKP**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Unit	263.093.200	6	unit	122.345.043	-	unit	-	1	unit	7.090.000		unit	70.495.827		unit	28.762.900	1	unit	106.348.727	1	unit	106.348.727	5	unit	40,42	DPKP
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74	Unit	1.237.291.710	19	unit	602.100.627	-	unit	-	-	unit	-		unit	258.658.256		unit	153.637.810	-	unit	412.296.066	-	unit	412.296.066	-	unit	33,32	DPKP
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Direlihara	4	Unit	12.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	-		Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPKP
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	17.037.868	3	unit	3.795.000	-	unit	-	-	unit	1.156.401		unit	2.634.000		unit	3.790.401	-	unit	3.790.401	-	unit	3.790.401	-	unit	22,25	DPKP
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	12.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPKP
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	12.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPKP
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	12.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	2.166.800		Unit	-	-	Unit	2.166.800	-	Unit	2.166.800	-	Unit	18,06	DPKP
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	15.827.500	3	Unit	6.935.800	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPKP
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**100**	**%**	**297.312.678**	**100**	**%**	**48.883.805**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.320.000**		**%**	**20.020.000**		**%**	**24.340.000**	-	**%**	**24.340.000**	-	**%**	**8,19**	**DPKP**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**186.000.000**	**100**	**%**	**47.192.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.320.000**		**%**	**20.020.000**		**%**	**24.340.000**	-	**%**	**24.340.000**	-	**%**	**13,09**	**DPKP**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	48	Dokumen	14.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	86	Laporan	70.000.000	30	laporan	27.172.500	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	4.320.000		laporan	-	-	laporan	4.320.000	-	laporan	4.320.000	-	laporan	6,17	DPKP
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	48	Dokumen	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	48	Dokumen	30.000.000	12	dokumen	20.020.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	20.020.000	-	dokumen	20.020.000	-	dokumen	20.020.000	-	dokumen	66,73	DPKP
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4	Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4	Orang	14.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	4	desa/Kel	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1	keluarga	8.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100%**		**24.000.000**	**100**	**%**	**1.691.305**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPKP**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	20	Dokumen	14.000.000	6	-	1.691.305	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**	**0%**		**10.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		-	**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**DPKP**
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	95	Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**0%**		**37.488.152**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		-	**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**DPKP**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	40	Orang	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbina relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya	4	desa/kel	17.488.152	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar	4	Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**39.824.526**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**			**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**DPKP**
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4	Laporan	9.824.526	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	4	Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.05	03	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai Dengan Standar Teknis	4	unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	4	laporan	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPKP
1	**05**				**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**29.065.798.180**		**-**	**6.990.085.604**		**0**	**1.037.495.082**		**0**	**1.520.848.116**		**0**	**1.865.962.241**		**0**	**1.720.153.870**		**0**	**6.144.459.309**	**-**	**0**	**6.144.459.309**	**#DIV/0!**	**0**	**21,14**	**BPBD**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**28.495.410.704**	**100**	**%**	**6.164.242.604**		**%**	**1.037.495.082**		**%**	**1.320.848.116**		**%**	**1.617.637.241**		**%**	**1.410.534.795**		**%**	**5.386.515.234**	**-**	**%**	**5.386.515.234**	**-**	**%**	**18,90**	**BPBD**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi OPD Yang Tersusun**	**100**	**%**	**45.359.956**	**100**	**%**	**25.360.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**3.900.000**		**%**	**1.400.000**		**%**	**5.300.000**	**-**	**%**	**5.300.000**	**-**	**%**	**11,68**	**BPBD**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	45.359.956	7	dokumen	25.360.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	3.900.000		dokumen	1.400.000	-	dokumen	5.300.000	-	dokumen	5.300.000	-	dokumen	11,68	BPBD
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**23.349.506.276**	**100**	**%**	**4.791.827.143**		**%**	**944.812.137**		**%**	**1.198.947.852**		**%**	**1.153.104.966**		**%**	**967.434.253**		**%**	**4.264.299.208**	**-**	**%**	**4.264.299.208**	**-**	**%**	**18,26**	**BPBD**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	20.231.306.276	12	Bulan	3.956.447.143	3	Bulan	774.314.227	3	Bulan	1.019.097.852		Bulan	959.022.876		Bulan	771.924.253	6	Bulan	3.524.359.208	6	Bulan	3.524.359.208	13	Bulan	17,42	BPBD
2	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	3.118.200.000	12	Bulan	835.380.000	3	Bulan	170.497.910	3	Bulan	179.850.000		Bulan	194.082.090		Bulan	195.510.000	6	Bulan	739.940.000	6	Bulan	739.940.000	13	Bulan	23,73	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**143.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**BPBD**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	264	Paket	143.000.000	65	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum**	**100**	**%**	**1.348.596.929**	**100**	**%**	**205.565.580**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**54.654.920**		**%**	**56.370.061**		**%**	**111.024.981**	**-**	**%**	**111.024.981**	**-**	**%**	**8,23**	**BPBD**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	44	Paket	18.702.860	11	paket	4.925.000	-	paket	-	-	paket	-		paket	2.216.000		paket	2.709.000	-	paket	4.925.000	-	paket	4.925.000	-	paket	26,33	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	44	Paket	710.000.000	9	paket	90.075.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	4	Paket	123.645.429	4	paket	3.148.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	24.248.640	4	paket	8.971.500	-	paket	-	-	paket	-		paket	1.678.000		paket	6.335.500	-	paket	8.013.500	-	paket	8.013.500	-	paket	33,05	BPBD
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	472.000.000	20	laporan	98.446.080	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	50.760.920		laporan	47.325.561	-	laporan	98.086.481	-	laporan	98.086.481	-	laporan	20,78	BPBD
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**955.854.571**		**-**	**225.697.925**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**146.981.760**		**0**	**-**		**0**	**146.981.760**	**-**	**0**	**146.981.760**	**-**	**0**	**15,38**	**BPBD**
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disedakan	122	Unit	447.354.571	5	Unit	225.697.925	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	146.981.760		Unit	0	-	Unit	146.981.760	-	Unit	146.981.760	-	Unit	32,86	BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	1	Unit	508.500.000		-		-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.478.699.256**	**100**	**%**	**446.624.041**		**%**	**34.425.445**		**%**	**83.725.344**		**%**	**125.439.748**		**%**	**185.239.535**		**%**	**428.830.072**	**-**	**%**	**428.830.072**	**-**	**%**	**29,00**	**BPBD**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Air Dan Listrik	48	Laporan	458.720.000	12	laporan	121.714.225	2	laporan	19.845.445	2	laporan	22.248.344		laporan	38.030.932		laporan	27.311.535	4	laporan	107.436.256	4	laporan	107.436.256	8	laporan	23,42	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.019.979.256	12	laporan	324.909.816	1	laporan	14.580.000	2	laporan	61.477.000		laporan	87.408.816		laporan	157.928.000	3	laporan	321.393.816	3	laporan	321.393.816	6	laporan	31,51	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.174.393.716**	**100**	**%**	**469.167.915**		**%**	**58.257.500**		**%**	**38.174.920**		**%**	**133.555.847**		**%**	**200.090.946**		**%**	**430.079.213**	**-**	**%**	**430.079.213**	**-**	**%**	**36,62**	**BPBD**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	826.300.364	7	unit	438.979.612	2	unit	58.257.500	1	unit	32.083.740		unit	127.981.112		unit	189.293.700	3	unit	407.616.052	3	unit	407.616.052	11	unit	49,33	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	118.093.352	8	unit	30.188.303		unit	-	1	unit	6.091.180		unit	5.574.735		unit	10.797.246	1	unit	22.463.161	1	unit	22.463.161	4	unit	19,02	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhab	5	Unit	230.000.000	-	unit	-		unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	BPBD
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PRESENTASE PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA**	**100**	**%**	**570.387.476**	**100**	**%**	**825.843.000**		**%**	**-**		**%**	**200.000.000**		**%**	**248.325.000**		**%**	**309.619.075**		**%**	**757.944.075**	**-**	**%**	**757.944.075**	**-**	**%**	**132,88**	**BPBD**
1	**05**	**03**	**2.01**		**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**33.000.000**	**100**	**%**	**400.000.000**		**%**	**-**		**%**	**200.000.000**		**%**	**100.000.000**		**%**	**-**		**%**	**300.000.000**	**-**	**%**	**300.000.000**	**-**	**%**	**909,09**	**BPBD**
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosalisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan tempat Tinggalnya.	4.000	Orang	33.000.000	9	orang	400.000.000	-	orang	-	9	orang	200.000.000		orang	100.000.000		orang	0	9	orang	300.000.000	9	orang	300.000.000	0	orang	909,09	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**	**Presentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100**	**%**	**79.087.332**	**100**	**%**	**223.800.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**309.619.075**		**%**	**309.619.075**	**-**	**%**	**309.619.075**	**-**	**%**	**391,49**	**BPBD**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Disusun/Ada	1	Dokumen	4.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPBD
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1	Orang	43.087.332	18	orang	110.000.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	209.775.075	-	orang	209.775.075	-	orang	209.775.075	-	orang	486,86	BPBD
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	11.500.000	1	dokumen	113.350.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	99.844.000	-	dokumen	99.844.000	-	dokumen	99.844.000	-	dokumen	868,21	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan dari Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	1	Unit	11.500.000	4	unit	450.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	BPBD
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilestalisasi	1	Dokumen	9.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**Presentase Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**%**	**413.305.572**	**100**	**%**	**202.043.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**148.325.000**		**%**	**-**		**%**	**148.325.000**	**-**	**%**	**148.325.000**	**-**	**%**	**35,89**	**BPBD**
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4	Laporan	363.725.000	1	laporan	72.735.000	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	38.325.000		laporan	0	-	laporan	38.325.000	-	laporan	38.325.000	-	laporan	10,54	BPBD

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4000	Orang	49.580.572	1.000	orang	129.308.000	-	orang	-	-	orang	-		orang	110.000.000		orang	0	-	orang	110.000.000	-	orang	110.000.000	-	orang	221,86	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100**	**%**	**44.994.572**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**BPBD**
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	1	Dokumen	44.994.572	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	BPBD
5	**01**				**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				**72.724.865.608**			**10.339.549.051**			**1.697.406.290**			**2.299.958.672**		**0**	**2.168.833.054**		**0**	**2.477.556.241**		**0**	**8.553.754.262**	-	**0**	**8.553.754.262**	**#DIV/0!**	**0**	**11,76**	**BAPPEDA**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**52.531.037.903**	**100**	**%**	**8.012.385.344**		**%**	**1.507.426.290**		**%**	**2.093.418.677**		**%**	**1.796.831.852**		**%**	**2.011.605.386**		**%**	**7.409.282.205**	-	**%**	**7.409.282.205**	-	**%**	**14,10**	**BAPPEDA**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**307.931.400**	**100**	**%**	**49.841.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**45.719.000**		**%**	**3.222.000**		**%**	**48.941.000**	-	**%**	**48.941.000**	-	**%**	**15,89**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48	Dokumen	307.931.400	12	dokumen	49.841.000	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	45.719.000		dokumen	3.222.000	-	dokumen	48.941.000	-	dokumen	48.941.000	-	dokumen	15,89	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**34.450.330.772**	**100**	**%**	**6.813.538.838**		**%**	**1.431.963.973**		**%**	**1.923.821.028**		**%**	**1.491.118.600**		**%**	**1.459.911.745**		**%**	**6.306.815.346**	-	**%**	**6.306.815.346**	-	**%**	**18,31**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	Bulan	30.479.530.772	12	Bulan	5.862.778.838	3	Bulan	1.238.039.364	3	Bulan	1.727.719.474		Bulan	1.265.149.788		Bulan	1.219.343.745	6	Bulan	5.450.252.371	6	Bulan	5.450.252.371	13	Bulan	17,88	BAPPEDA
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	Bulan	3.970.800.000	12	Bulan	950.760.000	3	Bulan	193.924.609	3	Bulan	196.101.554		Bulan	225.968.812		Bulan	240.568.000	6	Bulan	856.562.975	6	Bulan	856.562.975	13	Bulan	21,57	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**655.000.000**	**100**	**%**	**23.145.236**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**12.000.000**		**%**	**-**		**%**	**12.000.000**	-	**%**	**12.000.000**	-	**%**	**1,83**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	255.000.000	1	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	BAPPEDA
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	24	Orang	400.000.000	3	orang	23.145.236	-	orang	-	-	orang	-		orang	12.000.000		orang	-	-	orang	12.000.000	-	orang	12.000.000	-	orang	3,00	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.960.414.400**	**100**	**%**	**496.664.270**		**%**	**17.069.940**		**%**	**28.815.348**		**%**	**150.984.928**		**%**	**168.002.749**		**%**	**364.872.965**	-	**%**	**364.872.965**	-	**%**	**9,21**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	27.683.496	1	paket	5.185.000	-	paket	-	-	paket	1.719.000		paket	1.641.000		paket	-	-	paket	3.360.000	-	paket	3.360.000	-	paket	12,14	BAPPEDA
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	1.828.645.336	1	paket	179.002.500	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	BAPPEDA
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	104.085.568	1	paket	21.429.690	-	paket	-	-	paket	1.817.000		paket	10.197.550		paket	9.624.370	-	paket	21.638.920	-	paket	21.638.920	-	paket	20,79	BAPPEDA
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176	Laporan	2.000.000.000	20	laporan	291.047.080	1	laporan	17.069.940	2	laporan	25.279.348		laporan	139.146.378		laporan	158.378.379	3	laporan	339.874.045	3	laporan	339.874.045	2	laporan	16,99	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**8.764.548.307**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	-	**0**	**-**	-	**0**	**-**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	80.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BAPPEDA
5	01	01	2.07	07	Pengadaan aset tetan lainnya	Jumlah Unit Aset Tetan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	4.100.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BAPPEDA
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	1	Unit	4.584.548.307	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**4.392.813.024**	**100**	**%**	**448.248.000**		**%**	**52.088.077**		**%**	**99.438.701**		**%**	**58.990.324**		**%**	**139.917.392**		**%**	**350.434.494**	-	**%**	**350.434.494**	-	**%**	**7,98**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	1.322.720.000	1	laporan	330.620.000		laporan	32.314.077		laporan	69.421.701		laporan	56.947.324		laporan	73.860.392	-	laporan	232.543.494	-	laporan	232.543.494	-	laporan	17,58	BAPPEDA
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	Laporan	521.914.128	1	laporan	117.628.000		laporan	19.774.000		laporan	30.017.000		laporan	2.043.000		laporan	66.057.000	-	laporan	117.891.000	-	laporan	117.891.000	-	laporan	22,59	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.274.089.448**	**100**	**%**	**180.948.000**		**%**	**6.304.300**		**%**	**41.343.600**		**%**	**38.019.000**		**%**	**240.551.500**	-	**%**	**326.218.400**	-	**%**	**326.218.400**	-	**%**	**25,60**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	44	Unit	341.429.504	11	unit	149.318.000	1	unit	4.317.300	4	unit	31.641.600		unit	31.919.000		unit	35.420.500	5	unit	103.298.400	5	unit	103.298.400	11	unit	30,25	BAPPEDA
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	456	Unit	175.330.944	114	unit	31.630.000	5	unit	1.987.000	27	unit	9.702.000		unit	6.100.000		unit	5.931.000	32	unit	23.720.000	32	unit	23.720.000	7	unit	13,53	BAPPEDA
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguan Lainnya yang dipeliharai/rehabilitasi	4	Unit	757.329.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit	199.200.000	-	unit	199.200.000	-	unit	199.200.000	-	unit	26,30	BAPPEDA
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan**	**100**	**%**	**10.049.404.345**	**100**	**%**	**1.283.211.172**		**%**	**99.980.000**		**%**	**187.370.000**		**%**	**241.693.552**		**%**	**448.115.855**		**%**	**977.159.407**	-	**%**	**977.159.407**	-	**%**	**9,72**	**BAPPEDA**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan**	**100**	**%**	**5.644.828.096**	**100**	**%**	**860.987.560**		**%**	**99.980.000**		**%**	**187.370.000**		**%**	**203.630.840**		**%**	**381.699.600**		**%**	**872.680.440**	-	**%**	**872.680.440**	-	**%**	**15,46**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BAPPEDA
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	4	Dokumen	568.947.400	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	BAPPEDA
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	Berita Acara	397.421.340	1	berita acara	50.150.180	-	berita acara	18.660.000	-	berita acara	19.149.000		berita acara	-		berita acara	-	-	berita acara	37.809.000	-	berita acara	37.809.000	-	berita acara	9,51	BAPPEDA
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	80	Berita Acara	466.182.140	20	berita acara	80.064.240	-	berita acara	-	-	berita acara	-		berita acara	13.090.000		berita acara	-	-	berita acara	13.090.000	-	berita acara	13.090.000	-	berita acara	2,81	BAPPEDA
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	672.510.320	1	berita acara	155.852.465	-	berita acara	-	-	berita acara	46.811.000		berita acara	77.319.000		berita acara	-	-	berita acara	124.130.000	-	berita acara	124.130.000	-	berita acara	18,46	BAPPEDA
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1080	Usulan	-	-	Usulan	-	-	Usulan	-	-	Usulan	-		Usulan			Usulan		-	Usulan	-	-	Usulan	-	-	Usulan	-	BAPPEDA
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	Dokumen	3.539.766.896	4	dokumen	574.920.675	-	dokumen	81.320.000	1	dokumen	121.410.000		dokumen	113.221.840		dokumen	381.699.600	1	dokumen	697.651.440	1	dokumen	697.651.440	5	dokumen	19,71	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.01**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**%**	**447.543.997**	**100**	**%**	**92.399.750**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**1.010.000**		**%**	**36.000.000**		**%**	**37.010.000**	-	**%**	**37.010.000**	-	**%**	**8,27**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.01	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Masukan	447.543.997	2	masukan	92.399.750	-	masukan	-	-	masukan	-		masukan	1.010.000		masukan	36.000.000	-	masukan	37.010.000	-	masukan	37.010.000	-	masukan	8,27	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**%**	**2.621.792.252**	**100**	**%**	**229.714.862**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**27.357.712**		**%**	**30.416.255**		**%**	**57.773.967**	-	**%**	**57.773.967**	-	**%**	**2,20**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengendalian perencanaa dan pelaksanaan pembangunan	16	Laporan	1.866.536.300	4	laporan	183.239.280	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	9.127.130		laporan	28.044.755	-	laporan	37.171.885	-	laporan	37.171.885	-	laporan	1,99	BAPPEDA
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	Laporan	755.255.952	2	laporan	46.475.582	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	18.230.582		laporan	2.371.500	-	laporan	20.602.082	-	laporan	20.602.082	-	laporan	2,73	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah**	**Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah**	**100**	**%**	**1.335.240.000**	**100**	**%**	**100.109.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**9.695.000**		**%**	**-**		**%**	**9.695.000**	-	**%**	**9.695.000**	-	**%**	**0,73**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	12	Dokumen	1.335.240.000	3	dokumen	100.109.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	9.695.000		dokumen	-	-	dokumen	9.695.000	-	dokumen	9.695.000	-	dokumen	0,73	BAPPEDA
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**%**	**3.383.997.680**	**100**	**%**	**260.349.420**		**%**	**-**		**%**	**19.170.000**		**%**	**101.085.000**		**%**	**17.835.000**		**%**	**138.090.000**	-	**%**	**138.090.000**	-	**%**	**4,08**	**BAPPEDA**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
											I			II			III			IV												
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**%**	**1.070.718.000**	**100**	**%**	**72.980.000**		**%**	-		**%**	**6.975.000**		**%**	**31.120.000**		**%**	**6.690.000**		**%**	**44.785.000**	-	**%**	**44.785.000**	-	**%**	**4,18**	**BAPPEDA**
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	Laporan	178.377.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	15	Perangkat daerah	596.200.000	15	perangkat daerah	72.980.000	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	6.975.000		perangkat daerah	31.120.000		perangkat daerah	6.690.000	-	perangkat daerah	44.785.000	-	perangkat daerah	44.785.000	-	perangkat daerah	7,51	BAPPEDA
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	296.141.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100**	**%**	**1.313.164.040**	**100**	**%**	**114.853.500**		**%**	-		**%**	**6.195.000**		**%**	**34.970.000**		**%**	**4.670.000**		**%**	**45.835.000**	-	**%**	**45.835.000**	-	**%**	**3,49**	**BAPPEDA**
5	01	03	2.02	02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	18	Perangkat daerah	450.192.120	18	perangkat daerah	101.687.250	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	6.195.000		perangkat daerah	34.820.000		perangkat daerah	4.670.000	-	perangkat daerah	45.685.000	-	perangkat daerah	45.685.000	-	perangkat daerah	10,15	BAPPEDA
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	4	Laporan	591.271.120	1	laporan	6.788.750	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	150.000		laporan	-	-	laporan	150.000	-	laporan	150.000	-	laporan	0,03	BAPPEDA
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	4	Laporan	271.700.800	1	laporan	6.377.500	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**%**	**1.000.115.640**	**100**	**%**	**72.515.920**		**%**	-		**%**	**6.000.000**		**%**	**34.995.000**		**%**	**6.475.000**		**%**	**47.470.000**	-	**%**	**47.470.000**	-	**%**	**4,75**	**BAPPEDA**
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur	11	Perangkat daerah	483.717.720	11	perangkat daerah	72.515.920	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	6.000.000		perangkat daerah	34.995.000		perangkat daerah	6.475.000	-	perangkat daerah	47.470.000	-	perangkat daerah	47.470.000	-	perangkat daerah	9,81	BAPPEDA
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	24	Laporan	277.678.920	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	20	Laporan	238.719.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah**	**100**	**%**	**6.760.425.680**	**100**	**%**	**783.603.115**		**%**	-		**%**	-		**%**	**29.222.650**		**%**	-		**%**	**29.222.650**	-	**%**	**29.222.650**	-	**%**	**0,43**	**BAPPEDA**
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100**	**%**	**1.551.559.720**	**100**	**%**	**387.218.895**		**%**	-		**%**	-		**%**	**29.222.650**		**%**	-		**%**	**29.222.650**	-	**%**	**29.222.650**	-	**%**	**1,88**	**BAPPEDA**
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	Dokumen	713.290.040	1	dokumen	189.851.855	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	29.222.650		dokumen	-	-	dokumen	29.222.650	-	dokumen	29.222.650	-	dokumen	4,10	BAPPEDA
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	4	Dokumen	838.269.680	1	Dokumen	197.367.040	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BAPPEDA
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**4.094.766.940**	**100**	**%**	**396.384.220**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**BAPPEDA**
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16	Dokumen	838.269.680	4	Dokumen	197.367.180	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan perdagangan	3	Dokumen	617.775.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	16	Dokumen	617.110.260	4	dokumen	199.017.040	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	Dokumen	811.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dokumen	805.306.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3	Dokumen	405.306.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BAPPEDA
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**100**	**%**	**1.114.099.020**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**BAPPEDA**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	20	Laporan	810.002.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	BAPPEDA
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8	Laporan	304.097.020	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	BAPPEDA
2	**15**				**Dinas Perhubungan**				**88.594.117.967**			**24.963.710.259**		**0**	**2.518.685.801**		**0**	**6.658.326.672**		**0**	**8.320.688.148**		**0**	**11.334.206.510**		**0**	**28.831.907.131**	-	**0**	**28.831.907.131**	**#DIV/0!**	**0**	**32,54**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**62.418.492.507**	**100**	**%**	**13.896.969.767**		**%**	**2.518.685.801**		**%**	**2.910.846.872**		**%**	**4.155.037.840**		**%**	**3.642.006.860**		**%**	**13.226.577.373**	-	**%**	**13.226.577.373**	-	**%**	**21,19**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**127.485.096**	**100**	**%**	**19.551.600**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.201.600**		**%**	**3.201.600**	-	**%**	**3.201.600**	-	**%**	**2,51**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	127.485.096	8	dokumen	19.551.600	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	3.201.600	-	dokumen	3.201.600	-	dokumen	3.201.600	-	dokumen	2,51	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**56.700.710.308**	**100**	**%**	**12.126.777.746**		**%**	**2.499.203.072**		**%**	**2.803.745.093**		**%**	**3.419.221.515**		**%**	**2.836.964.181**		**%**	**11.559.133.861**	-	**%**	**11.559.133.861**	-	**%**	**20,39**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.02	01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	44.239.910.308	12	bulan	8.487.927.746	3	bulan	1.761.533.073	3	bulan	2.186.695.093	3	bulan	2.236.581.514	3	bulan	1.836.214.181	12	bulan	8.021.023.861	12	bulan	8.021.023.861	25	bulan	18,13	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	02	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	12.460.800.000	12	bulan	3.638.850.000	3	bulan	737.669.999	3	bulan	617.050.000	3	bulan	1.182.640.001	3	bulan	1.000.750.000	12	bulan	3.538.110.000	12	bulan	3.538.110.000	25	bulan	28,39	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**353.320.000**	**100**	**%**	**66.500.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**66.500.000**		**%**	-		**%**	**66.500.000**	-	**%**	**66.500.000**	-	**%**	**18,82**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.05	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	640	Paket	353.320.000	160	paket	66.500.000	-	paket	-	-	paket	-		paket	66.500.000		paket	-	-	paket	66.500.000	-	paket	66.500.000	-	paket	18,82	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**493.196.532**	**100**	**%**	**301.506.503**		**%**	-		**%**	-		**%**	**148.752.769**		**%**	**149.938.350**		**%**	**298.691.119**	-	**%**	**298.691.119**	-	**%**	**60,56**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.06	01	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	31.145.192	9	paket	27.136.000	-	paket	-	-	paket	-	7	paket	19.992.000	2	paket	7.144.000	9	paket	27.136.000	9	paket	27.136.000	25	paket	87,13	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44	Paket	126.051.340	11	paket	74.370.503	-	paket	-	-	paket	-	7	paket	50.523.503	4	paket	23.770.000	11	paket	74.293.503	11	paket	74.293.503	25	paket	58,94	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	336.000.000	20	laporan	200.000.000	-	laporan	-	4	laporan	-	4	laporan	78.237.266	12	laporan	119.024.350	20	laporan	197.261.616	20	laporan	197.261.616	25	laporan	58,71	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.245.242.804**	**100**	**%**	**262.479.344**		**%**	-		**%**	**34.888.000**		**%**	**136.682.344**		**%**	**85.535.000**		**%**	**257.105.344**	-	**%**	**257.105.344**	-	**%**	**20,65**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	Unit	800.000.000	1	unit	35.000.000	-	unit	-	1	unit	34.888.000		unit	-		unit	-	1	unit	34.888.000	1	unit	34.888.000	6	unit	4,36	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	38.940.000	1	unit	4.834.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	-		unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	313.633.468	1	unit	55.113.000	-	unit	-	-	unit	-	6	unit	49.150.000	5	unit	5.963.000	11	unit	55.113.000	11	unit	55.113.000	55	unit	17,57	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	92.669.336	4	unit	167.532.344	-	unit	-	-	unit	-	2	unit	87.532.344	2	unit	79.572.000	4	unit	167.104.344	4	unit	167.104.344	25	unit	180,32	Dinas Perhubungan

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**15**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.175.847.256**	**100**	**%**	**582.770.188**		**%**	**19.482.729**		**%**	**72.213.779**		**%**	**230.127.794**		**%**	**192.006.697**		**%**	**513.830.999**	-	**%**	**513.830.999**	-	**%**	**23,62**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	1.413.840.000	12	laporan	353.400.000	1	laporan	19.482.729	2	laporan	63.784.779	3	laporan	120.907.606	5	laporan	83.122.697	11	laporan	287.297.811	11	laporan	287.297.811	23	laporan	20,32	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	762.007.256	12	laporan	229.370.188	-	laporan	-	3	laporan	8.429.000	3	laporan	109.220.188	5	laporan	108.884.000	11	laporan	226.533.188	11	laporan	226.533.188	23	laporan	29,73	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.322.690.511**	**100**	**%**	**537.384.386**		**%**	-		**%**	-		**%**	**153.753.418**		**%**	**374.361.032**		**%**	**528.114.450**	-	**%**	**528.114.450**	-	**%**	**39,93**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	1.254.905.659	12	unit	489.403.854	-	unit	-	-	unit	-	3	unit	136.262.500	22	unit	346.390.500	25	unit	482.653.000	25	unit	482.653.000	52	unit	38,46	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	23.096.548	20	unit	47.980.532	-	unit	-	-	unit	-	7	unit	17.490.918	21	unit	27.970.532	28	unit	45.461.450	28	unit	45.461.450	35	unit	196,83	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	40	Unit	-	10	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**100**	**%**	**26.175.625.460**	**100**	**%**	**11.066.740.492**		**%**	-		**%**	**3.747.479.800**		**%**	**4.165.650.308**		**%**	**7.692.199.650**		**%**	**15.605.329.758**	-	**%**	**15.605.329.758**	-	**%**	**59,62**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan LLAJ yang ditetapkan**	**100**	**%**	**600.000.000**	**100**	**%**	**250.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**248.783.000**		**%**	**248.783.000**	-	**%**	**248.783.000**	-	**%**	**41,46**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4	dokumen	600.000.000	1	dokumen	250.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen		1	dokumen	248.783.000	1	dokumen	248.783.000	1	dokumen	248.783.000	25	dokumen	41,46	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota**	**Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan yang disediakan**	**100**	**%**	**14.179.001.940**	**100**	**%**	**4.833.080.670**		**%**	-		**%**	**2.593.355.000**		**%**	**997.952.000**		**%**	**3.971.476.000**		**%**	**7.562.783.000**	-	**%**	**7.562.783.000**	-	**%**	**53,34**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	400	unit	13.490.402.196	15	unit	2.992.328.000	-	unit	-	18	unit	2.593.355.000		unit	398.973.000	3	unit	-	21	unit	2.992.328.000	21	unit	2.992.328.000	5	unit	22,18	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	192	unit	688.599.744	10	unit	1.840.752.670	-	unit	-	-	unit	-	2	unit	598.979.000	8	unit	3.971.476.000	10	unit	4.570.455.000	10	unit	4.570.455.000	5	unit	663,73	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang dikelola**	**100**	**%**	**1.226.254.968**	**100**	**%**	**831.172.000**		**%**	-		**%**	**150.971.400**		**%**	**235.572.000**		**%**	**406.796.600**		**%**	**793.340.000**	-	**%**	**793.340.000**	-	**%**	**64,70**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	4	Dok	200.000.000	2	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	4	unit	404.800.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12	unit	414.800.000	3	unit	831.172.000	-	unit	-	1	unit	150.971.400		unit	235.572.000	2	unit	406.796.600	3	unit	793.340.000	3	unit	793.340.000	25	unit	191,26	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	12	unit	206.654.968	3	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Izin Pembangunan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**2.216.592.648**	**100**	**%**	**1.323.962.000**		**%**	-		**%**	**604.800.000**		**%**	**548.902.000**		**%**	**76.783.050**		**%**	**1.230.485.050**	-	**%**	**1.230.485.050**	-	**%**	**55,51**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.04	01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16	dokumen	938.103.932	4	dokumen	994.211.000	-	dokumen	-	3	dokumen	604.800.000	1	dokumen	309.151.000		dokumen	76.783.050	4	dokumen	990.734.050	4	dokumen	990.734.050	25	dokumen	105,61	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20	laporan	1.278.488.716	3	orang	329.751.000	-	orang	-	-	orang	239.751.000	158	orang	239.751.000	155	orang	-	313	orang	239.751.000	313	orang	239.751.000	1.565	orang	18,75	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.05**		**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Peningkatan Keselamatan Pengguna Jasa Jalan**	**100**	**%**	**5.212.998.000**	**100**	**%**	**1.662.390.322**		**%**	-		**%**	**363.440.400**		**%**	**1.221.286.308**		**%**	**101.360.000**		**%**	**1.686.086.708**	-	**%**	**1.686.086.708**	-	**%**	**32,34**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8	Unit	5.212.998.000	2	unit	1.550.616.708	-	unit	-	-	unit	363.440.400		unit	1.133.786.308		unit	9.360.000	-	unit	1.506.586.708	-	unit	1.506.586.708	-	unit	28,90	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000	Dokumen	720.224.664	6.000	dokumen	88.098.000		dokumen	-		dokumen	-		dokumen	87.500.000		dokumen	87.500.000		dokumen	175.000.000	-	dokumen	175.000.000	-	dokumen	24,30	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	40	Unit	524.918.116	10	unit	23.675.614	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit	4.500.000	-	unit	4.500.000	-	unit	4.500.000	-	unit	0,86	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	laporan	195.306.548	2	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.06**		**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**	**Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.860.553.240**	**100**	**%**	**1.931.626.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	**962.342.000**		**%**	**2.887.001.000**		**%**	**3.849.343.000**	-	**%**	**3.849.343.000**	-	**%**	**206,89**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.06	02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4	Unit	160.000.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	03	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	24	Dokumen	155.410.056	4	dokumen	1.797.742.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	861.342.000		dokumen	2.673.001.000	-	dokumen	3.534.343.000	-	dokumen	3.534.343.000	-	dokumen	2.274,20	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	04	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan	1.545.143.184	1	laporan	133.884.500	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	101.000.000		laporan	214.000.000	-	laporan	315.000.000	-	laporan	315.000.000	-	laporan	20,39	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.09**		**Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan penghubung untuk jasa angkutan orang dan/atau barang yang disediakan**	**100**	**%**	**160.000.000**			**234.509.000**	**-**	**0**	-	-	**0**	**34.913.000**		**0**	**199.596.000**		**0**	-		**0**	**234.509.000**	-	**0**	**234.509.000**	-	**0**	**146,57**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit	160.000.000	2	Unit	234.509.000	-	Unit	-	-	Unit	34.913.000		Unit	199.596.000		Unit	-	-	Unit	234.509.000	-	Unit	234.509.000	-	Unit	146,57	Dinas Perhubungan
2	**21**				**Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota**				**233.528.792.532**			**76.871.523.908**	**-**	**0**	**15.380.111.100**	-	**0**	**14.813.291.186**		**0**	**19.118.840.213**		**0**	**19.533.637.235**		**0**	**68.845.879.734**	-	**0**	**68.845.879.734**	**#DIV/0!**	**0**	**29,48**	**DLHK3**
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang personelar dapat**	**100**	**%**	**195.244.447.364**	**100**	**%**	**54.351.614.561**		**%**	**13.107.219.630**		**%**	**11.201.508.985**		**%**	**11.574.692.317**		**%**	**12.776.430.919**		**%**	**48.659.851.851**	-	**%**	**48.659.851.851**	-	**%**	**24,92**	**DLHK3**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**334.173.768**	**100**	**%**	**65.671.825**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.050.000**		**%**	-		**%**	**4.050.000**	-	**%**	**4.050.000**	-	**%**	**1,21**	**DLHK3**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	48	dokumen	334.173.768	12	dokumen	65.671.825	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	4.050.000		dokumen	15.371.825	-	dokumen	19.421.825	-	dokumen	19.421.825	-	dokumen	5,81	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**101.820.207.064**	**100**	**%**	**26.212.369.974**		**%**	**5.219.166.677**		**%**	**5.278.829.855**		**%**	**5.391.261.103**		**%**	**6.572.637.954**		**%**	**22.461.895.589**	-	**%**	**22.461.895.589**	-	**%**	**22,06**	**DLHK3**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	25.081.723.864	12	Bulan	6.815.855.992	3	Bulan	1.078.859.808	3	Bulan	1.386.387.682	3	Bulan	1.376.419.620	3	Bulan	1.217.168.546	12	Bulan	5.058.835.656	12	Bulan	5.058.835.656	25	Bulan	20,17	DLHK3
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	76.738.483.200	12	Bulan	19.396.513.982	3	Bulan	4.140.306.869	3	Bulan	3.892.442.173	3	Bulan	4.014.841.483	3	Bulan	5.355.469.408	12	Bulan	17.403.059.933	12	Bulan	17.403.059.933	25	Bulan	22,68	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.010.322.120**	**80**	**%**	**220.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**55.000.000**		**%**	**165.000.000**		**%**	**220.000.000**	-	**%**	**220.000.000**	-	**%**	**21,78**	**DLHK3**
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48	dokumen	1.010.322.120	12	dokumen	220.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	3	dokumen	55.000.000	3	dokumen	165.000.000	6	dokumen	220.000.000	6	dokumen	220.000.000	13	dokumen	21,78	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.274.782.400**	**100**	**%**	**818.695.600**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44	paket	3.274.782.400	11	paket	818.695.600	-	paket	-	-	paket	-		paket	-		paket	-	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**3.919.873.168**	**100**	**%**	**739.695.150**		**%**	-		**%**	**140.871.000**		**%**	**249.898.918**		**%**	**87.189.900**		**%**	**477.959.818**	-	**%**	**477.959.818**	-	**%**	**12,19**	**DLHK3**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	104	jenis	1.730.455.900	26	Paket	324.455.000	-	Paket	-	3	Paket	104.419.000	1	Paket	107.400.000		Paket	0	4	Paket	211.819.000	4	Paket	211.819.000	4	Paket	12,24	DLHK3
2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	paket	820.913.352	6	paket	56.688.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	DLHK3
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	paket	488.503.916	9	paket	138.552.150	-	paket	-	1	paket	36.452.000	4	paket	76.452.990	4	paket	87.189.900	9	paket	200.094.890	9	paket	200.094.890	25	paket	40,96	DLHK3
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	laporan	880.000.000	20	laporan	220.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	10	laporan	66.045.928	12	laporan		22	laporan	66.045.928	22	laporan	66.045.928	28	laporan	7,51	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	24	unit	120.000.000	6	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit	-		unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**59.299.574.900**	**100**	**%**	**25.894.486.012**		**%**	**7.888.052.953**		**%**	**5.714.310.130**		**%**	**5.775.749.163**		**%**	**5.859.718.465**		**%**	**25.237.830.711**	-	**%**	**25.237.830.711**	-	**%**	**42,56**	**DLHK3**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	laporan	58.495.498.092	12	laporan	25.658.158.012	3	laporan	7.888.052.953	3	laporan	5.714.310.130	3	laporan	5.706.620.163	3	laporan	5.701.517.465	12	laporan	25.010.500.711	12	laporan	25.010.500.711	25	laporan	42,76	DLHK3
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	laporan	804.076.808	12	laporan	236.328.000	-	laporan	-	-	laporan	-	8	laporan	69.129.000	4	laporan	158.201.000	12	laporan	227.330.000	12	laporan	227.330.000	25	laporan	28,27	DLHK3
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**25.465.513.944**	**100**	**%**	**400.696.000**		**%**	-		**%**	**67.498.000**		**%**	**98.733.133**		**%**	**91.884.600**		**%**	**258.115.733**	-	**%**	**258.115.733**	-	**%**	**1,01**	**DLHK3**
2	11	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	660	unit	25.402.500.000	150	unit	385.000.000	-	unit	-	-	unit	67.498.000	40	unit	98.733.133	20	unit	74.238.600	60	unit	240.469.733	60	unit	240.469.733	9	unit	0,95	DLHK3
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	360	unit	63.013.944	90	unit	15.696.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit	17.646.000	-	unit	17.646.000	-	unit	17.646.000	-	unit	28,00	DLHK3
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	DLHK3
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH**	**100**	**%**	**700.450.112**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH**	**100**	**%**	**700.450.112**	**1**	-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**DLHK3**
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen	450.225.056	1	-	-	-	0	-	-	0	-		0	-		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DLHK3
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	dokumen	250.225.056		-	-	-	0	-	-	0	-		0	-		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DLHK3
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**2.063.035.712**	**100**	**%**	**233.755.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**11.043.000**		**%**	**11.043.000**	-	**%**	**11.043.000**	-	**%**	**0,54**	**DLHK3**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca terhadap target RAD GRK Banda Aceh**	**100**	**%**	**2.063.035.712**	**100**	**%**	**233.755.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**11.043.000**		**%**	**11.043.000**	-	**%**	**11.043.000**	-	**%**	**0,54**	**DLHK3**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	dokumen	1.014.068.368	1	dokumen	118.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	8.683.000	-	dokumen	8.683.000	-	dokumen	8.683.000	-	dokumen	0,86	DLHK3
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	dokumen	1.048.967.344	1	dokumen	115.755.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	2.360.000	-	dokumen	2.360.000	-	dokumen	2.360.000	-	dokumen	0,22	DLHK3
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase Luasan RTH**	**100**	**%**	**2.004.549.276**	**14**	**%**	**2.355.536.481**		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.063.301.500**		**%**	**1.563.060.500**		**%**	**2.626.362.000**	-	**%**	**2.626.362.000**	-	**%**	**131,02**	**DLHK3**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Luas RTH yang dipelihara untuk meningkatkan keanekaragaman hayati**	**100**	**%**	**2.004.549.276**	**14**	**%**	**2.355.536.481**		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.063.301.500**		**%**	**1.563.060.500**		**%**	**2.626.362.000**	-	**%**	**2.626.362.000**	-	**%**	**131,02**	**DLHK3**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	460,92	Ha	1.433.368.044	115	Ha	2.231.336.481	-	Ha	-	-	Ha	-	58	Ha	972.701.500	86	Ha	1.535.165.000	144	Ha	2.507.866.500	144	Ha	2.507.866.500	#VALUE!	Ha	174,96	DLHK3
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	227,8	Ha	451.181.232	56,95	Ha	96.300.000	-	Ha	-	-	Ha	-		Ha	90.600.000		Ha	0	-	Ha	90.600.000	-	Ha	90.600.000	#VALUE!	Ha	20,08	DLHK3
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	8	unit	120.000.000	2	unit	27.900.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit	27.895.500	-	unit	27.895.500	-	unit	27.895.500	-	unit	23,25	DLHK3
2	**11**	**05**			**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100**	**%**	**190.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**190.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4	dokumen	190.000.000	1	-	-	-	0	-	-	0	-		0	-		0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DLHK3
2	**11**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan**	**0**		**593.559.200**	**18**	**%**	**1.750.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.750.000**		**%**	-		**%**	**1.750.000**	-	**%**	**1.750.000**	-	**%**	**0,29**	**DLHK3**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan**	**0**		**593.559.200**	**18**	**%**	**1.750.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.750.000**		**%**	-		**%**	**1.750.000**	-	**%**	**1.750.000**	-	**%**	**0,29**	**DLHK3**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	4	dokumen	508.790.192	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DLHK3
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1123	laporan	84.769.008	242	laporan	1.750.000	-	laporan	-	32	laporan	1.750.000	45	laporan	1.750.000	29	laporan	0	106	laporan	1.750.000	106	laporan	1.750.000	9	laporan	2,06	DLHK3
2	**11**	**07**			**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**100**	**%**	**19.999.680**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**100**	**%**	**19.999.680**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	4	dokumen	19.999.680	1	dokumen	-		dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DLHK3
2	**11**	**08**			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100**	**%**	**527.615.052**	**65**	**%**	**50.120.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100**	**%**	**527.615.052**	**65**	**%**	**50.120.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	230	lembaga	323.710.352	50	lembaga	-	-	lembaga	-	-	lembaga	-		lembaga			lembaga		-	lembaga	-	-	lembaga	-	-	lembaga	-	DLHK3
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	dokumen	203.904.700	1	dokumen	50.120.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DLHK3
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100**	**%**	**309.270.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**309.270.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	Entitas	309.270.000	1	entitas	-	-	entitas	-	-	entitas	-		entitas			entitas		-	entitas	-	-	entitas	-	-	entitas	-	DLHK3
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**113.604.720**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan yang diselesaikan**	**100**	**%**	**113.604.720**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	4	dokumen	113.604.720	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DLHK3
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Sampah Terkelola**	**98**	**%**	**31.762.261.416**	**98**	**%**	**19.878.747.866**		**%**	**2.272.891.470**		**%**	**3.611.782.201**		**%**	**6.479.096.396**			**%**	**5.183.102.816**		**%**	**17.546.872.883**	-	**%**	**17.546.872.883**	-	**%**	**55,24**	**DLHK3**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Sampah Terkelola**	**98**	**%**	**31.053.750.656**	**98**	**%**	**19.878.747.866**		**%**	**2.272.891.470**		**%**	**3.611.782.201**		**%**	**6.479.096.396**			**%**	**5.183.102.816**		**%**	**17.546.872.883**	-	**%**	**17.546.872.883**	-	**%**	**56,50**	**DLHK3**
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	8	laporan	1.740.549.100	2	laporan	182.489.561	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan	0	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	DLHK3
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	307732.2	Ton	954.833.832	76043.5	Ton	14.215.536.732	-	Ton	2.272.891.470	-	Ton	3.611.782.201		Ton	3.425.987.046			Ton	3.609.401.356	-	Ton	12.920.062.073	-	Ton	12.920.062.073	#VALUE!	Ton	1.353,12	DLHK3
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	170	kelompok	2.546.198.056	35	kelompok	1.050.200.000	-	kelompok	-	-	kelompok	-		kelompok	129.800.000		kelompok	889.000.000	-	kelompok	1.018.800.000	-	kelompok	1.018.800.000	-	kelompok	40,01	DLHK3
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4	dokumen	597.000.000	1	dokumen	149.200.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	66.825.000		dokumen	21.000.000	-	dokumen	87.825.000	-	dokumen	87.825.000	-	dokumen	14,71	DLHK3
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	dokumen	3.200.000.000	1	dokumen	1.384.701.573	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	512.848.350		dokumen	583.302.460	-	dokumen	1.096.150.810	-	dokumen	1.096.150.810	-	dokumen	34,25	DLHK3
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40	unit	22.015.169.668	10	unit	2.896.620.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	2.343.636.000		unit	80.399.000	-	unit	2.424.035.000	-	unit	2.424.035.000	-	unit	11,01	DLHK3
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Persentase lokasi yang di monitoring kebersihan dan keindahannya**	**100**	**%**	**708.510.760**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DLHK3**
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	44	laporan	708.510.760	11	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	DLHK3
2	**13**				**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				**29.461.128.927**			**6.861.646.642**		**0**	**1.432.440.645**		**0**	**1.944.912.881**		**0**	**1.582.888.508**		**0**	**1.703.924.555**		**0**	**6.664.166.589**	-	**0**	**6.664.166.589**	**#DIV/0!**	**0**	**22,62**	**Disdukcapil**
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat Daerah**	**100**	**%**	**28.226.283.956**	**100**	**%**	**6.703.388.427**		**%**	**1.432.440.645**		**%**	**1.944.912.881**		**%**	**1.582.888.508**			**%**	**1.703.924.555**		**%**	**6.664.166.589**	-	**%**	**6.664.166.589**	-	**%**	**23,61**	**Disdukcapil**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**157.235.604**	**100**	**%**	**12.279.343**		**%**	-		**%**	**4.895.548**		**%**	-			**%**	**4.895.548**	-	**%**	**4.895.548**	-	**%**	**4.895.548**	-	**%**	**3,11**	**Disdukcapil**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	40	dokumen	157.235.604	1	dokumen	12.279.343	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	4.895.548		dokumen	0	-	dokumen	4.895.548	-	dokumen	4.895.548	-	dokumen	3,11	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**23.535.797.440**	**100**	**%**	**5.262.279.059**		**%**	**1.309.954.207**		**%**	**1.733.340.279**		**%**	**970.053.217**			**%**	**1.234.155.012**		**%**	**5.247.502.715**	-	**%**	**5.247.502.715**	-	**%**	**22,30**	**Disdukcapil**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	48	bulan	21.675.797.440	12	bulan	4.788.849.059	3	bulan	1.209.468.384	3	bulan	1.627.341.708		bulan	862.294.052		bulan	1.119.894.285	6	bulan	4.818.998.429	6	bulan	4.818.998.429	13	bulan	22,23	Disdukcapil
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	48	bulan	1.860.000.000	12	bulan	473.430.000	3	bulan	100.485.823	3	bulan	105.998.571		bulan	107.759.165		bulan	114.260.727	6	bulan	428.504.286	6	bulan	428.504.286	13	bulan	23,04	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.400.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan- nya yang disediakan	188	paket	103.400.000	47	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Administrasi umum**	**100**	**%**	**944.829.586**	**100**	**%**	**410.113.325**		**%**	-		**%**	**10.503.000**		**%**	**358.166.442**			**%**	**103.036.220**		**%**	**471.705.662**	-	**%**	**471.705.662**	-	**%**	**49,92**	**Disdukcapil**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	paket	18.223.464	1	paket	1.223.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	1.223.000	-	paket	1.223.000	-	paket	1.223.000	-	paket	6,71	Disdukcapil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket	294.637.335	1	paket	334.090.000	-	paket	-	-	paket	-		paket	319.180.000		paket	72.810.000	-	paket	391.990.000	-	paket	391.990.000	-	paket	133,04	Disdukcapil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	paket	275.318.334	1	paket	15.651.325	-	paket	-	-	paket	10.503.000		paket	7.750.000		paket	-2.614.065	-	paket	15.638.935	-	paket	15.638.935	-	paket	5,68	Disdukcapil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	115	Laporan	356.650.453	30	laporan	59.149.000	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	31.236.442		laporan	31.617.285	-	laporan	62.853.727	-	laporan	62.853.727	-	laporan	17,62	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**40.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	01	2.07	02	Pengadan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	40.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.172.543.346**	**100**	**%**	**915.618.700**		**%**	**120.273.438**		**%**	**192.098.702**		**%**	**235.500.301**			**%**	**343.122.326**		**%**	**890.994.767**	-	**%**	**890.994.767**	-	**%**	**28,08**	**Disdukcapil**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	48	Laporan	107.216.200	1	laporan	24.934.000	-	laporan	3.583.438		laporan	5.328.702		laporan	5.353.601		laporan	8.909.326	-	laporan	23.175.067	-	laporan	23.175.067	-	laporan	21,62	Disdukcapil
2	12	01	2.08	04	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	laporan	3.065.327.146	12	laporan	890.684.700	1	laporan	116.690.000	2	laporan	186.770.000		laporan	230.146.700		laporan	334.213.000	3	laporan	867.819.700	3	laporan	867.819.700	6	laporan	28,31	Disdukcapil
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**272.477.980**	**100**	**%**	**103.098.000**		**%**	**2.213.000**		**%**	**8.970.900**		**%**	**14.273.000**			**%**	**23.610.997**		**%**	**49.067.897**	-	**%**	**49.067.897**	-	**%**	**18,01**	**Disdukcapil**
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	unit	147.609.600	3	unit	90.741.000	-	unit	2.213.000	1	unit	8.970.900		unit	7.700.000		unit	15.238.997	1	unit	34.122.897	1	unit	34.122.897	8	unit	23,12	Disdukcapil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	320	unit	124.868.380	80	unit	12.357.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	6.573.000		unit	8.372.000	-	unit	14.945.000	-	unit	14.945.000	-	unit	11,97	Disdukcapil

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**100**	**%**	**263.399.743**	**100**	**%**	**61.522.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**185.399.743**	**100**	**%**	**61.522.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1	dokumen	41.267.289	1	dokumen	61.522.500	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1	dokumen	26.132.454	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	120	orang	6.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang			-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	dokumen	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	06	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	12	Laporan	35.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	laporan	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, analisis dan Desiminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	1	dokumen	27.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase capaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**55.000.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disdukcapil**
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	laporan	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	12	dokumen	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	20	orang	15.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	1	dokumen	5.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentasi capaian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**	**23.000.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disdukcapil**
2	12	02	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	dokumen	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	laporan	3.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**520.860.717**	**100**	**%**	**55.737.950**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**138.065.492**	**100**	**%**	**55.737.950**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	laporan	73.065.492	1	layanan	55.737.950	-	layanan	-	-	layanan	-		layanan			layanan			-	layanan	-	-	layanan	-	-	layanan	-	Disdukcapil
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1	dokumen	35.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1	dokumen	30.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**382.795.225**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	03	2.02	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1	laporan	50.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	laporan	65.598.390	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan			-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Disdukcapil
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1	laporan	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.02	07	Penyeleggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	2	dokumen	30.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	laporan	97.196.835	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan			-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Disdukcapil
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	1	laporan	5.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	1	dokumen	35.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	laporan	55.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	laporan	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**229.177.150**	**100**	**%**	**18.811.475**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base kependudukan**	**Persentase Capaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base kependudukan**	**100**	**%**	**164.177.150**	**100**	**%**	**18.811.475**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Disdukcapil**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	dokumen	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	dokumen	107.177.150	1	dokumen	18.811.475	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Disdukcapil
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	laporan	32.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Capaian Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**35.000.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disdukcapil**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	dokumen	35.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**20.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**			**0**	**-**	-	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Disdukcapil**
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	dokumen	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**10.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**			**0**	**-**	-	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Disdukcapil**
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	laporan	10.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Disdukcapil
2	**12**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**%**	**221.407.361**	**100**	**%**	**22.186.290**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Disdukcapil**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**	**100**	**%**	**221.407.361**	**100**	**%**	**22.186.290**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Disdukcapil**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4	dokumen	221.407.361	1	dokumen	22.186.290	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Disdukcapil
2	**09**				**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**45.976.121.760**			**14.836.711.495**		**0**	**1.052.387.887**		**0**	**2.256.771.908**		**0**	**5.606.226.507**		**0**	**6.104.061.185**		**0**	**15.019.447.487**	**-**	**0**	**15.019.447.487**	**#DIV/0!**	**0**	**32,67**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**24.897.810.727**	**100**	**%**	**9.214.923.720**		**%**	**980.387.887**		**%**	**1.377.078.857**		**%**	**3.976.300.507**		**%**	**3.641.055.412**		**%**	**9.974.822.663**	**-**	**%**	**9.974.822.663**	**-**	**%**	**40,06**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**125.702.000**	**100**	**%**	**13.499.750**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**799.750**		**%**	**-**		**%**	**799.750**	**-**	**%**	**799.750**	**-**	**%**	**0,64**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	dokumen	125.702.000	1	dokumen	13.499.750	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	799.750		dokumen	0	-	dokumen	799.750	-	dokumen	799.750	-	dokumen	0,64	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**21.152.444.528**	**100**	**%**	**4.420.068.289**		**%**	**880.391.887**		**%**	**1.199.101.847**		**%**	**992.742.617**		**%**	**957.430.642**		**%**	**4.029.666.993**	**-**	**%**	**4.029.666.993**	**-**	**%**	**19,05**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	18.340.844.528	12	Bulan	3.654.348.289	3	Bulan	720.541.887	3	Bulan	1.042.251.847	3	Bulan	797.342.617	3	Bulan	778.030.642	12	Bulan	3.338.166.993	12	Bulan	3.338.166.993	25	Bulan	18,20	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Perkantoran/Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	Bulan	2.811.600.000	12	Bulan	765.720.000	3	Bulan	159.850.000	3	Bulan	156.850.000	3	Bulan	195.400.000	3	Bulan	179.400.000	12	Bulan	691.500.000	12	Bulan	691.500.000	25	Bulan	24,59	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**101.200.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**			**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	184	paket	101.200.000	46	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**509.454.520**	**100**	**%**	**3.896.743.693**		**%**	**99.996.000**		**%**	**23.839.059**		**%**	**2.876.441.865**		**%**	**2.489.060.076**		**%**	**5.489.337.000**	**-**	**%**	**5.489.337.000**	**-**	**%**	**1.077,49**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	paket	19.234.808	10	paket	6.973.134	2	paket	-	2	paket	-	3	paket	4.769.134	3	paket	2.204.000	10	paket	6.973.134	10	paket	6.973.134	25	paket	36,25	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24	paket	90.219.712	6	paket	3.787.446.959	-	paket	99.996.000	1	paket	16.715.459	2	paket	2.842.879.640	3	paket	2.393.457.495	6	paket	5.353.048.594	6	paket	5.353.048.594	25	paket	5.933,35	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	400.000.000	12	laporan	102.323.600	3	laporan	-	3	laporan	7.123.600	3	laporan	28.793.091	3	laporan	93.398.581	12	laporan	129.315.272	12	laporan	129.315.272	25	laporan	32,33	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**824.347.731**	**100**	**%**	**222.515.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	unit	824.347.731	8	unit	222.515.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.117.200.000**	**100**	**%**	**271.601.747**		**%**	**-**		**%**	**63.367.951**		**%**	**26.606.534**		**%**	**71.767.694**		**%**	**161.742.179**	**-**	**%**	**161.742.179**	**-**	**%**	**14,48**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	laporan	717.200.000	12	laporan	176.900.000	3	laporan	-	3	laporan	29.875.305	3	laporan	19.688.433	3	laporan	30.584.694	12	laporan	80.148.432	12	laporan	80.148.432	25	laporan	11,18	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	laporan	400.000.000	12	laporan	94.701.747	3	laporan	-	3	laporan	33.492.646	3	laporan	6.918.101	3	laporan	41.183.000	12	laporan	81.593.747	12	laporan	81.593.747	25	laporan	20,40	DP3AP2KB
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.067.461.948**	**100**	**%**	**390.495.241**		**%**	**-**		**%**	**90.770.000**		**%**	**79.709.741**		**%**	**122.797.000**		**%**	**293.276.741**	**-**	**%**	**293.276.741**	**-**	**%**	**27,47**	**DP3AP2KB**
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	unit	728.152.000	34	unit	368.653.600	-	unit	-	17	unit	87.682.000		unit	67.888.100		unit	115.865.000	17	unit	271.435.100	17	unit	271.435.100	12	unit	37,28	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	192	unit	53.973.244	48	unit	21.841.641	12	unit	-	12	unit	3.088.000	12	unit	11.821.641	12	unit	6.932.000	48	unit	21.841.641	48	unit	21.841.641	25	unit	40,47	DP3AP2KB
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit	285.336.704	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	DP3AP2KB
2	**08**	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**100**	**%**	**1.163.401.440**	**100**	**%**	**195.000.000**		**%**	**-**		**%**	**30.000.000**		**%**	**90.000.000**		**%**	**-**		**%**	**120.000.000**	**-**	**%**	**120.000.000**	**-**	**%**	**10,31**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**249.620.800**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44	OPD	169.314.400	44	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-		perangkat daerah			perangkat daerah		-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	DP3AP2KB
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosalisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44	OPD	80.306.400	44	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-		perangkat daerah			perangkat daerah		-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	-	perangkat daerah	-	DP3AP2KB
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**201.584.960**	**100**	**%**	**195.000.000**		**%**	**-**		**%**	**30.000.000**		**%**	**90.000.000**		**%**	**-**		**%**	**120.000.000**	**-**	**%**	**120.000.000**	**-**	**%**	**59,53**	**DP3AP2KB**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	201.584.960	1	dokumen	195.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	30.000.000		dokumen	90.000.000		dokumen	0	-	dokumen	120.000.000	-	dokumen	120.000.000	-	dokumen	59,53	DP3AP2KB

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**712.195.680**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	116	orang	712.195.680	29	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	DP3AP2KB
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase Perlindungan Perempuan**	**100**	**%**	**1.070.740.395**	**100**	**%**	**100.000.000**		**%**	**-**		**%**	**100.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**9,34**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**228.878.815**	**100**	**%**	**100.000.000**		**%**	**-**		**%**	**100.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**100.000.000**	**-**	**%**	**43,69**	**DP3AP2KB**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	228.878.815	1	dokumen	100.000.000	-	dokumen	-	1	dokumen	100.000.000		dokumen	0		dokumen	0	1	dokumen	100.000.000	1	dokumen	100.000.000	25	dokumen	43,69	DP3AP2KB
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan**	**100**	**%**	**432.637.580**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	03	2.02	03	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	280	orang	432.637.580	70	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	DP3AP2KB
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**409.224.000**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	280	orang	409.224.000	70	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	DP3AP2KB
2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100**	**%**	**348.705.852**	**100**	**%**	**70.386.635**		**%**	**-**		**%**	**12.000.000**		**%**	**28.000.000**		**%**	**20.000.000**		**%**	**60.000.000**	**-**	**%**	**60.000.000**	**-**	**%**	**17,21**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**348.705.852**	**100**	**%**	**70.386.635**		**%**	**-**		**%**	**12.000.000**		**%**	**28.000.000**		**%**	**20.000.000**		**%**	**60.000.000**	**-**	**%**	**60.000.000**	**-**	**%**	**17,21**	**DP3AP2KB**
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	dokumen	348.705.852	100	dokumen	70.386.635	-	dokumen	-	15	dokumen	12.000.000	1	dokumen	28.000.000		dokumen	20.000.000	16	dokumen	60.000.000	16	dokumen	60.000.000	400	dokumen	17,21	DP3AP2KB
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**100**	**%**	**144.480.330**	**100**	**%**	**19.999.640**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**144.480.330**	**100**	**%**	**19.999.640**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	dokumen	144.480.330	1	dokumen	19.999.640	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DP3AP2KB
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**100**	**%**	**1.130.000.000**	**100**	**%**	**333.581.500**		**%**	**-**		**%**	**105.950.000**		**%**	**1.000.000**		**%**	**-**		**%**	**106.950.000**	**-**	**%**	**106.950.000**	**-**	**%**	**9,46**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.130.000.000**	**100**	**%**	**333.581.500**		**%**	**-**		**%**	**105.950.000**		**%**	**1.000.000**		**%**	**-**		**%**	**106.950.000**	**-**	**%**	**106.950.000**	**-**	**%**	**9,46**	**DP3AP2KB**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36	gp	1.130.000.000	9	organisasi	333.581.500	-	organisasi	-	3	organisasi	105.950.000	3	organisasi	1.000.000	3	organisasi	0	9	organisasi	106.950.000	9	organisasi	106.950.000	25	organisasi	9,46	DP3AP2KB
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Perlindungan Khusus Anak**	**100**	**%**	**2.044.894.000**	**100**	**%**	**601.450.000**		**%**	**-**		**%**	**71.380.000**		**%**	**106.267.000**		**%**	**245.268.500**		**%**	**422.915.500**	**-**	**%**	**422.915.500**	**-**	**%**	**20,68**	**DP3AP2KB**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota**	**100**	**%**	**648.718.000**	**100**	**%**	**151.150.000**		**%**	**-**		**%**	**45.650.000**		**%**	**105.500.000**		**%**	**151.150.000**	**-**	**%**	**151.150.000**	**-**	**%**	**23,30**	**DP3AP2KB**
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	kasus	648.718.000	1	dokumen	151.150.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	45.650.000	1	dokumen	105.500.000	1	dokumen	151.150.000	1	dokumen	151.150.000	2	dokumen	23,30	DP3AP2KB
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.396.176.000**	**100**	**%**	**348.640.000**		**%**	**-**		**%**	**71.380.000**		**%**	**60.617.000**		**%**	**139.768.500**		**%**	**271.765.500**	**-**	**%**	**271.765.500**	**-**	**%**	**19,46**	**DP3AP2KB**
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Layanan	1.396.176.000	1	layanan	348.640.000	-	layanan	-	-	layanan	71.380.000		layanan	60.617.000	6	layanan	139.768.500	6	layanan	271.765.500	6	layanan	271.765.500	150	layanan	19,46	DP3AP2KB
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																0			0										
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase Pengendalian Penduduk**	**100**	**%**	**190.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**			**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100**	**%**	**190.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**			**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	190.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	DP3AP2KB
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**100**	**%**	**14.843.160.000**	**100**	**%**	**4.301.370.000**		**%**	**72.000.000**		**%**	**560.363.051**		**%**	**1.404.659.000**		**%**	**2.197.737.273**		**%**	**4.234.759.324**	**-**	**%**	**4.234.759.324**	**-**	**%**	**28,53**	**DP3AP2KB**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**%**	**11.055.692.000**	**100**	**%**	**3.461.678.000**		**%**	**72.000.000**		**%**	**560.363.051**		**%**	**1.009.607.000**		**%**	**1.766.620.110**		**%**	**3.408.590.161**	**-**	**%**	**3.408.590.161**	**-**	**%**	**30,83**	**DP3AP2KB**
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	laporan	11.055.692.000	1	laporan	3.461.678.000	-	laporan	72.000.000	-	laporan	560.363.051		laporan	1.009.607.000		laporan	1.766.620.110	-	laporan	3.408.590.161	-	laporan	3.408.590.161	-	laporan	30,83	DP3AP2KB
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**3.787.468.000**	**100**	**%**	**839.692.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**395.052.000**		**%**	**431.117.163**		**%**	**826.169.163**	**-**	**%**	**826.169.163**	**-**	**%**	**21,81**	**DP3AP2KB**
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20	unit	3.787.468.000	5	unit	839.692.000	-	unit	-	-	unit	-	2	unit	395.052.000	3	unit	431.117.163	5	unit	826.169.163	5	unit	826.169.163	25	unit	21,81	DP3AP2KB
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS)**	**Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**100**	**%**	**142.929.016**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**%**	**142.929.016**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**DP3AP2KB**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	laporan	142.929.016	1	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		DP3AP2KB
1	**05**				**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah**				**86.712.092.606**			**19.306.621.216**		**0**	**3.441.212.635**		**0**	**3.518.894.432**		**0**	**4.601.178.774**		**0**	**6.654.637.489**		**0**	**18.215.923.330**	-	**0**	**18.215.923.330**	**#DIV/0!**	**0**	**21,01**	**SATPOL PP & WH**
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**76.198.400.712**	**100**	**%**	**16.424.040.541**		**%**	**3.441.212.635**		**%**	**3.408.160.342**		**%**	**4.531.598.774**		**%**	**3.973.024.489**		**%**	**15.353.996.240**	-	**%**	**15.353.996.240**	-	**%**	**20,15**	**SATPOL PP & WH**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**116.511.156**	**100**	**%**	**17.777.930**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**2.202.625**		**%**	**2.202.625**	-	**%**	**2.202.625**	-	**%**	**1,89**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	116.511.156	9	dokumen	17.777.930	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	2.202.625	-	dokumen	2.202.625	-	dokumen	2.202.625	-	dokumen	1,89	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.553.308.012**	**100**	**%**	**15.008.482.556**		**%**	**3.341.893.635**		**%**	**3.185.603.887**		**%**	**4.084.222.692**		**%**	**3.314.630.232**		**%**	**13.926.350.446**	-	**%**	**13.926.350.446**	-	**%**	**20,62**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	32.883.923.012	12	Bulan	6.916.792.556	3	Bulan	1.435.668.635	3	Bulan	1.528.976.387		Bulan	1.947.608.942		Bulan	1.363.757.732	6	Bulan	6.276.011.696	6	Bulan	6.276.011.696	13	Bulan	19,09	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	34.669.385.000	12	Bulan	8.091.690.000	3	Bulan	1.906.225.000	3	Bulan	1.656.627.500		Bulan	2.136.613.750		Bulan	1.950.872.500	6	Bulan	7.650.338.750	6	Bulan	7.650.338.750	13	Bulan	22,07	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kesetasaaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.649.442.500**	**100**	**%**	**214.500.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**214.207.500**		**%**	**214.207.500**	-	**%**	**214.207.500**	-	**%**	**5,87**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1000	Paket	3.300.099.000	250	paket	214.500.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	214.207.500	-	paket	214.207.500	-	paket	214.207.500	-	paket	6,49	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	800	Orang	334.193.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	600	Orang	15.150.500	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**243.287.001**	**100**	**%**	**109.222.986**		**%**	-		**%**	**2.091.986**		**%**	**39.031.582**		**%**	**91.941.190**		**%**	**133.064.758**	-	**%**	**133.064.758**	-	**%**	**54,69**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56	Paket	17.689.247	11	paket	5.285.986	-	paket	-	5	paket	2.091.986	8	paket	1.358.000	14	paket	1.836.000	27	paket	5.285.986	27	paket	5.285.986	48	paket	29,88	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	30.547.754	6	paket	3.937.000	-	paket	-	-	paket	-	3	paket	1.449.000	9	paket	2.488.000	12	paket	3.937.000	12	paket	3.937.000	33	paket	12,89	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	20.050.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	Laporan	175.000.000	35	laporan	100.000.000	-	laporan	-	8	laporan	-	16	laporan	36.224.582	35	laporan	87.617.190	59	laporan	123.841.772	59	laporan	123.841.772	42	laporan	70,77	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.215.010.516**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	63.190.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	55.850.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	268.797.200	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	650.500.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	155.500.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	21.173.316	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.827.603.106**	**100**	**%**	**557.782.631**		**%**	**92.059.000**		**%**	**164.775.631**		**%**	**114.512.000**		**%**	**212.004.392**		**%**	**583.351.023**	-	**%**	**583.351.023**	-	**%**	**31,92**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	205.609.466	12	laporan	41.870.000	-	laporan	-	2	laporan	-	3	laporan		6	laporan	30.670.392	11	laporan	30.670.392	11	laporan	30.670.392	46	laporan	14,92	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.621.993.640	12	laporan	515.912.631	1	laporan	92.059.000	2	laporan	164.775.631	4	laporan	114.512.000	6	laporan	181.334.000	13	laporan	552.680.631	13	laporan	552.680.631	54	laporan	34,07	SATPOL PP & WH
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.593.238.421**	**100**	**%**	**516.274.438**		**%**	**7.260.000**		**%**	**55.688.838**		**%**	**293.832.500**		**%**	**138.038.550**		**%**	**494.819.888**	-	**%**	**494.819.888**	-	**%**	**31,06**	**SATPOL PP & WH**
1	05	01	2.09	02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104	Unit	1.327.783.000	25	unit	471.998.600	-	unit	7.260.000	13	unit	47.360.000	17	unit	264.925.500	26	unit	130.998.550	56	unit	450.544.050	56	unit	450.544.050	54	unit	33,93	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148	Unit	35.455.421	37	unit	44.275.838	-	unit	-	4	unit	8.328.838	30	unit	28.907.000	37	unit	7.040.000	71	unit	44.275.838	71	unit	44.275.838	48	unit	124,88	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	125.000.000			-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	105.000.000			-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**10.513.691.894**	**100**	**%**	**2.882.580.675**		**%**	-		**%**	**110.734.090**		**%**	**69.580.000**		**%**	**2.681.613.000**		**%**	**2.861.927.090**	-	**%**	**2.861.927.090**	-	**%**	**27,22**	**SATPOL PP & WH**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**4.833.365.199**	**100**	**%**	**2.382.125.000**		**%**	-		**%**	**26.305.000**		**%**	-		**%**	**2.299.160.000**		**%**	**2.325.465.000**	-	**%**	**2.325.465.000**	-	**%**	**48,11**	**SATPOL PP & WH**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	360	Kasus	100.250.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	400	Kasus	941.005.375	100	kasus	48.905.000	-	kasus	-	80	kasus	26.305.000	80	kasus	0	100	kasus	0	260	kasus	26.305.000	260	kasus	26.305.000	65	kasus	2,80	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen				-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	3.044.429.700	1	dokumen	2.333.220.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	2.299.160.000	-	dokumen	2.299.160.000	-	dokumen	2.299.160.000	-	dokumen	75,52	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	360	Orang	426.169.934	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	36	Dokumen	80.060.190			-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1200	Laporan	241.450.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	SATPOL PP & WH
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**100**	**%**	**1.804.468.081**	**100**	**%**	**226.150.675**		**%**	-		**%**	**35.829.090**		**%**	**69.580.000**		**%**	**200.731.000**		**%**	**306.140.090**	-	**%**	**306.140.090**	-	**%**	**16,97**	**SATPOL PP & WH**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	72	Laporan	152.722.767		-		-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1200	Laporan	1.651.745.314	300	laporan	226.150.675	-	laporan	-	30	laporan	35.829.090	100	laporan	69.580.000	250	laporan	200.731.000	380	laporan	306.140.090	380	laporan	306.140.090	32	laporan	18,53	SATPOL PP & WH
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**216.900.480**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**SATPOL PP & WH**
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	8	2 Lap.	216.900.480	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	SATPOL PP & WH
1	**05**	**02**	**7.04**		**Pengelolaan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh**	**Persentase Pengelolaan personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang Dilaksanakan**	**100**	**%**	**3.658.958.134**	**100**	**%**	**274.305.000**		**%**	-		**%**	**48.600.000**		**%**	-		**%**	**181.722.000**		**%**	**230.322.000**	-	**%**	**230.322.000**	-	**%**	**6,29**	**SATPOL PP & WH**
1	05	02	7.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	48	Laporan	2.335.905.334	6	laporan	196.145.000	-	laporan	-	6	laporan	48.600.000		laporan	0	12	laporan	120.600.000	18	laporan	169.200.000	18	laporan	169.200.000	38	laporan	7,24	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	36	Laporan	45.451.500	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	04	Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	96	Laporan	222.875.816	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	06	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	3	Laporan	30.301.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	96	Laporan	848.322.484	10	laporan	78.160.000	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan		24	laporan	61.122.000	24	laporan	61.122.000	24	laporan	61.122.000	25	laporan	7,21	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	72	Laporan	60.602.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	05	02	7.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	36	Laporan	115.500.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	SATPOL PP & WH
1	**06**				**Dinas Sosial**				**38.746.337.824**			**8.092.464.055**		**0**	**1.089.200.185**		**0**	**1.540.995.320**		**0**	**1.490.078.160**		**0**	**4.187.571.709**		**0**	**8.307.845.374**	-	**0**	**8.307.845.374**	**#DIV/0!**	**0**	**21,44**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**26.050.595.532**	**100**	**%**	**5.586.913.505**		**%**	**1.089.200.185**		**%**	**1.394.545.820**		**%**	**1.426.980.160**		**%**	**1.330.693.809**		**%**	**5.241.419.974**	-	**%**	**5.241.419.974**	-	**%**	**20,12**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**127.550.172**	**100**	**%**	**16.526.545**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	127.550.172	5	dokumen	16.526.545	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**23.931.706.796**	**100**	**%**	**4.861.949.256**		**%**	**1.031.447.193**		**%**	**1.283.325.758**		**%**	**1.266.628.311**		**%**	**1.069.873.434**		**%**	**4.651.274.696**	-	**%**	**4.651.274.696**	-	**%**	**19,44**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	21.136.906.796	12	bulan	4.164.779.256	3	bulan	869.397.193	3	bulan	1.115.250.758	3	bulan	1.099.448.311	3	bulan	879.413.434	12	bulan	3.963.509.696	12	bulan	3.963.509.696	25	bulan	18,75	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	2.794.800.000	12	Bulan	697.170.000	3	Bulan	162.050.000	3	Bulan	168.075.000	3	Bulan	167.180.000	3	Bulan	190.460.000	12	Bulan	687.765.000	12	Bulan	687.765.000	25	Bulan	24,61	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**121.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.05	02	Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	224	Paket	121.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**302.647.060**	**100**	**%**	**73.454.502**		**%**	-		**%**	**24.968.067**		**%**	-		**%**	**41.194.235**		**%**	**66.162.302**	-	**%**	**66.162.302**	-	**%**	**21,86**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	15.418.580	1	paket	4.992.000	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	3.230.000	-	paket	3.230.000	-	paket	3.230.000	-	paket	20,95	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	47.228.480	6	paket	19.699.435	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket	15.553.435	-	paket	15.553.435	-	paket	15.553.435	-	paket	32,93	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	Laporan	240.000.000	34	laporan	48.763.067	-	laporan	-	14	laporan	24.968.067		laporan			laporan	22.410.800	14	laporan	47.378.867	14	laporan	47.378.867	10	laporan	19,74	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**153.106.008**	**100**	**%**	**60.812.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	73.106.008	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	Unit	80.000.000	6	unit	60.812.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**832.237.752**	**100**	**%**	**287.655.202**		**%**	**21.576.192**		**%**	**32.971.995**		**%**	**61.917.049**		**%**	**102.459.940**		**%**	**218.925.176**	-	**%**	**218.925.176**	-	**%**	**26,31**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	429.600.000	12	laporan	194.400.000	1	laporan	21.576.192	1	laporan	32.971.995		laporan	35.546.549		laporan	44.842.940	2	laporan	134.937.676	2	laporan	134.937.676	4	laporan	31,41	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	402.637.752	12	laporan	93.255.202	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	26.370.500		laporan	57.617.000	-	laporan	83.987.500	-	laporan	83.987.500	-	laporan	20,86	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**582.347.744**	**100**	**%**	**286.516.000**		**%**	**36.176.800**		**%**	**53.280.000**		**%**	**98.434.800**		**%**	**117.166.200**		**%**	**305.057.800**	-	**%**	**305.057.800**	-	**%**	**52,38**	**Dinas Sosial**
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	514.720.000	14	unit	238.800.000	4	unit	36.176.800	6	unit	53.280.000		unit	94.307.800		unit	113.684.200	10	unit	297.448.800	10	unit	297.448.800	71	unit	57,79	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	40.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	968	Unit	27.627.744	968	unit	7.609.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	4.127.000		unit	3.482.000	-	unit	7.609.000	-	unit	7.609.000	-	unit	27,54	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	160.632.972	4	unit	40.107.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Pemenuhan Upaya Pemberdayaan Sosial**	**100**	**%**	**240.271.400**	**100**	**%**	**1.580.740**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Dikembangkan**	**100**	**%**	**240.271.400**	**100**	**%**	**1.580.740**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Sosial**
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	135	Orang	62.675.400	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Keluarga	92.352.000	-	keluarga	-	-	keluarga	-	-	keluarga	-		keluarga			keluarga		-	keluarga	-	-	keluarga	-	-	keluarga	-	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Sertifikat	85.244.000	30	sertiffikat	1.580.740	-	sertiffikat	-	-	sertiffikat	-		sertiffikat			sertiffikat		-	sertiffikat	-	-	sertiffikat	-	-	sertiffikat	-	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Pemenuhan Upaya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS**	**100**	**%**	**4.398.495.660**	**100**	**%**	**859.775.380**		**%**	-		**%**	**69.437.500**		**%**	**33.347.500**		**%**	**641.660.500**		**%**	**744.445.500**	-	**%**	**744.445.500**	-	**%**	**16,93**	**Dinas Sosial**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar**	**100**	**%**	**2.061.531.600**	**100**	**%**	**418.865.250**		**%**	**-**		**%**	**69.437.500**		**%**	**22.950.500**		**%**	**249.448.500**		**%**	**341.836.500**	**-**	**%**	**341.836.500**	**-**	**%**	**16,58**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	890.631.600	150	orang	83.216.500	-	orang	-	23	orang	35.437.500		orang	20.002.500		orang	27.748.500	23	orang	83.188.500	23	orang	83.188.500	4	orang	9,34	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang MenerimaPakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	160.000.000	150	orang	30.343.750	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Orang	200.000.000	11	orang	140.987.000	-	orang	-	-	orang	30.000.000		orang	0		orang	23.800.000	-	orang	53.800.000	-	orang	53.800.000	-	orang	26,90	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	56.000.000	150	orang	5.448.000	-	orang	-	-	orang	-		orang	2.948.000		orang	0	-	orang	2.948.000	-	orang	2.948.000	-	orang	5,26	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	397.200.000	150	orang	39.620.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	76.000.000	150	orang	101.250.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	197.900.000	-	orang	197.900.000	-	orang	197.900.000	-	orang	260,39	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang	13.500.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	186.000.000	75	orang	14.000.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	40.400.000	-	orang	4.000.000	-	orang	-	-	orang	4.000.000		orang	0		orang	0	-	orang	4.000.000	-	orang	4.000.000	-	orang	9,90	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	41.800.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial**	**100**	**%**	**2.336.964.060**	**100**	**%**	**440.910.130**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**10.397.000**		**%**	**392.212.000**		**%**	**402.609.000**	**-**	**%**	**402.609.000**	**-**	**%**	**17,23**	**Dinas Sosial**
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10560	Orang	1.973.000.000	2.640	orang	363.631.130	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	346.500.000	-	orang	346.500.000	-	orang	346.500.000	-	orang	17,56	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	84.000.000	100	orang	37.734.500	-	orang	-	-	orang	-		orang	10.397.000		orang	27.337.500	-	orang	37.734.500	-	orang	37.734.500	-	orang	44,92	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	29.360.000	100	orang	4.669.500	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	4.669.500	-	orang	4.669.500	-	orang	4.669.500	-	orang	15,90	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	14.000.000	75	orang	2.625.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	2.625.000	-	orang	2.625.000	-	orang	2.625.000	-	orang	18,75	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	240	Orang	56.000.000	60	orang	10.600.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	10.600.000	-	orang	10.600.000	-	orang	10.600.000	-	orang	18,93	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	280	Orang	34.650.000	70	orang	11.720.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang	8.200.000	20	orang	5.880.000	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	480.000	-	orang	480.000	-	orang	480.000	-	orang	5,85	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	8.400.000	50	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	11.200.000	50	unit	4.050.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	20	Dokumen	118.154.060	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**%**	**7.380.557.672**	**100**	**%**	**1.343.548.680**		**%**	**-**		**%**	**45.100.000**		**%**	**53.062.500**		**%**	**2.060.291.400**		**%**	**2.158.453.900**	**-**	**%**	**2.158.453.900**	**-**	**%**	**29,25**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara**	**100**	**%**	**101.160.000**	**100**	**%**	**11.600.000**		**%**	**-**		**%**	**43.350.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**43.350.000**	**-**	**%**	**43.350.000**	**-**	**%**	**42,85**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	70.400.000	30	orang	11.600.000	-	orang	-	-	orang	43.350.000		orang			orang		-	orang	43.350.000	-	orang	43.350.000	-	orang	61,58	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	22.360.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	8.400.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelola**	**100**	**%**	**7.279.397.672**	**100**	**%**	**1.331.948.680**		**%**	**-**		**%**	**1.750.000**		**%**	**53.062.500**		**%**	**2.060.291.400**		**%**	**2.115.103.900**	**-**	**%**	**2.115.103.900**	**-**	**%**	**29,06**	**Dinas Sosial**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	200	Orang	968.600.180	50	orang	28.598.680	-	orang	-	-	orang	-		orang	11.462.500		orang	0	-	orang	11.462.500	-	orang	11.462.500	-	orang	1,18	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan dalam Operasional Penerima Santunan Kematian	200	Keluarga	3.267.422.828	50	keluarga	41.600.000	-	keluarga	-	-	keluarga	-		keluarga	41.600.000		keluarga	0	-	keluarga	41.600.000	-	keluarga	41.600.000	-	keluarga	1,27	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	Keluarga	3.043.374.664	1.000	keluarga	461.750.000	-	keluarga	-	-	keluarga	1.750.000		keluarga	0		keluarga	1.265.056.400	-	keluarga	1.266.806.400	-	keluarga	1.266.806.400	-	keluarga	41,63	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Bencana**	**100**	**%**	**676.417.560**	**100**	**%**	**300.645.750**		**%**	**-**		**%**	**31.912.000**		**%**	**(23.312.000)**		**%**	**154.926.000**		**%**	**163.526.000**	**-**	**%**	**163.526.000**	**-**	**%**	**24,18**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial**	**100**	**%**	**676.417.560**	**100**	**%**	**300.645.750**		**%**	**-**		**%**	**31.912.000**		**%**	**(23.312.000)**		**%**	**154.926.000**		**%**	**163.526.000**	**-**	**%**	**163.526.000**	**-**	**%**	**24,18**	**Dinas Sosial**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	422.015.360	30	orang	252.600.000	-	orang	-	-	orang	31.912.000		orang	-23.312.000		orang	117.438.000	-	orang	126.038.000	-	orang	126.038.000	-	orang	29,87	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	147.040.000	30	orang	41.124.250	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	37.488.000	-	orang	37.488.000	-	orang	37.488.000	-	orang	25,50	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Unit	22.789.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	48.680.000	30	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	35.893.200	30	orang	6.921.500	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Sosial
2	**07**				**Dinas Tenaga Kerja**				**71.359.527.880**			**15.620.349.999**		**0**	**765.843.191**		**0**	**3.155.577.703**		**0**	**2.846.005.719**		**0**	**1.528.388.929**		**0**	**8.295.815.542**	-	**0**	**8.295.815.542**	**#DIV/0!**	**0**	**11,63**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**80,25**	**Nilai A**	**22.271.439.880**	**100**	**%**	**4.666.211.003**		**%**	**765.843.191**		**%**	**1.298.775.652**		**%**	**1.019.956.719**		**%**	**1.000.326.969**		**%**	**4.084.902.531**	-	**%**	**4.084.902.531**	**#VALUE!**	**%**	**18,34**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**65.891.820**	**100**	**%**	**17.670.515**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	65.891.820	8	dokumen	17.670.515	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**18.866.037.428**	**100**	**%**	**3.901.688.716**		**%**	**765.843.191**		**%**	**1.132.228.713**		**%**	**826.780.618**		**%**	**789.346.233**		**%**	**3.514.198.755**	-	**%**	**3.514.198.755**	-	**%**	**18,63**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	17.301.837.428	12	Bulan	3.495.628.716	3	Bulan	693.843.191	3	Bulan	1.042.153.713		Bulan	736.705.618		Bulan	671.796.233	6	Bulan	3.144.498.755	6	Bulan	3.144.498.755	13	Bulan	18,17	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	1.564.200.000	12	Bulan	406.060.000	3	Bulan	72.000.000	3	Bulan	90.075.000		Bulan	90.075.000		Bulan	117.550.000	6	Bulan	369.700.000	6	Bulan	369.700.000	13	Bulan	23,64	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**90.200.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	166	Paket	90.200.000	-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-		paket			paket		-	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.042.348.484**	**100**	**%**	**321.403.403**		**%**	-		**%**	**121.561.302**		**%**	**88.045.499**		**%**	**101.599.223**		**%**	**311.206.024**	-	**%**	**311.206.024**	-	**%**	**15,24**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49	Paket	17.358.362	10	paket	4.589.000	-	paket	-	-	paket	-		paket	1.085.000		paket	3.504.000	-	paket	4.589.000	-	paket	4.589.000	-	paket	26,44	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	49	Paket	44.742.700	10	paket	9.272.005	-	paket	-	-	paket	-		paket	6.159.670		paket	3.112.335	-	paket	9.272.005	-	paket	9.272.005	-	paket	20,72	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	Laporan	1.980.247.422	55	laporan	307.542.398	-	laporan	-	13	laporan	121.561.302		laporan	80.800.829		laporan	94.982.888	13	laporan	297.345.019	13	laporan	297.345.019	5	laporan	15,02	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**225.000.000**	**100**	**%**	**71.851.334**		**%**	-		**%**	-		**%**	**8.889.334**		**%**	-		**%**	**8.889.334**	-	**%**	**8.889.334**	-	**%**	**3,95**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432	Unit	225.000.000	105	unit	71.851.334	-	unit	-	-	unit	-		unit	8.889.334		unit	0	-	unit	8.889.334	-	unit	8.889.334	-	unit	3,95	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**553.178.148**	**100**	**%**	**206.706.035**		**%**	-		**%**	**30.817.637**		**%**	**50.307.268**		**%**	**53.376.513**		**%**	**134.501.418**	-	**%**	**134.501.418**	-	**%**	**24,31**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	430.080.000	12	laporan	157.600.000	-	laporan	-	3	laporan	30.817.637		laporan	23.761.953		laporan	32.908.793	3	laporan	87.488.383	3	laporan	87.488.383	6	laporan	20,34	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	123.098.148	12	laporan	49.106.035	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan	26.545.315		laporan	20.467.720	-	laporan	47.013.035	-	laporan	47.013.035	-	laporan	38,19	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**428.784.000**	**100**	**%**	**146.891.000**		**%**	-		**%**	**14.168.000**		**%**	**45.934.000**		**%**	**56.005.000**		**%**	**116.107.000**	-	**%**	**116.107.000**	-	**%**	**27,08**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	177.464.000	7	unit	101.016.000	-	unit	-	1	unit	14.168.000		unit	32.372.000		unit	48.839.000	1	unit	95.379.000	1	unit	95.379.000	4	unit	53,75	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	431	Unit	51.320.000	105	unt	13.291.000	-	unt	-	-	unt	-		unt	3.562.000		unt	7.166.000	-	unt	10.728.000	-	unt	10.728.000	-	unt	20,90	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Unit	200.000.000	2	unit	32.584.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	10.000.000		unit	0	-	unit	10.000.000	-	unit	10.000.000	-	unit	5,00	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah**		**%**	**60.000.000**	**100**	-	**60.000.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja**		**%**	**60.000.000**	**100**	-	**60.000.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4	Dokumen	60.000.000	1	dokumen	60.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	200	Perusahaan	-	-	Perusahaan	-	-	Perusahaan	-	-	Perusahaan	-		Perusahaan			Perusahaan		-	Perusahaan	-	-	Perusahaan	-	-	Perusahaan	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang bekerja**	**100**	**%**	**660.000.000**	**100**	**%**	**259.282.554**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**255.775.515**		**%**	**255.775.515**	-	**%**	**255.775.515**	-	**%**	**38,75**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja yang dilatih**	**448**	**Pencari Kerja**	**660.000.000**	**112**	**orang**	**253.532.554**		**orang**	-		**orang**	-		**orang**	-		**orang**	**255.775.515**		**orang**	**255.775.515**	-	**orang**	**255.775.515**	-	**orang**	**38,75**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	448	Orang	585.000.000	112	orang	253.532.554	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang	255.775.515	-	orang	255.775.515	-	orang	255.775.515	-	orang	43,72	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12	Lembaga	25.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	Unit	50.000.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina**	**28**	**Lembaga**	**40.000.000**	**7**	**lembaga**	**5.750.000**		**lembaga**	-		**lembaga**	-		**lembaga**	-		**lembaga**	-		**lembaga**	-	-	**lembaga**	-	-	**lembaga**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28	Lembaga	40.000.000	7	lembaga	5.750.000	-	lembaga	-	-	lembaga	-		lembaga			lembaga		-	lembaga	-	-	lembaga	-	-	lembaga	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mendaftar dan memiliki izin.**		**Perizinan**	-		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		Perizinan	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas**		**Perusahaan**	**40.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	80	Perusahaan	40.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**		**Dokumen**	**40.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	80	Dokumen	40.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**55**	**%**	**785.000.000**	**40**	**%**	**20.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota**		**%**	**60.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	**#DIV/0!**	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	64	Orang	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	06	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	64	Orang	40.000.000	16	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan job fair yang mendapatkan pekerjaan**	**100**	**%**	**725.000.000**	**100**	**%**	**20.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	Dokumen	80.000.000	1	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200	Orang		-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1200	Orang	645.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan**	**45**	**%**	**1.625.000.000**	**30**	**%**	**70.160.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**2.100.000**		**%**	**2.100.000**	-	**%**	**2.100.000**	-	**%**	**0,13**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**33,18332**	**%**	**100.000.000**		**%**	**10.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	123,5497	Perusahaan	40.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	42,76722	Perusahaan	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	228,0918	Laporan	40.000.000	53	Laporan	10.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga bipartit dan serikat pekerja**	**30**	**Perusahaan**	**1.525.000.000**	**26**	**perusahaan**	**60.160.000**		**perusahaan**	-		**perusahaan**	-		**perusahaan**	-		**perusahaan**	**2.100.000**		**perusahaan**	**2.100.000**	-	**perusahaan**	**2.100.000**	-	**perusahaan**	**0,14**	**Dinas Tenaga Kerja**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1078,908	Perkara	200.000.000	210	Perkara	18.400.000	-	Perkara	-	-	Perkara	-		Perkara			Perkara	2.100.000	-	Perkara	2.100.000	-	Perkara	2.100.000	-	Perkara	1,05	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	153,1471	Perkara	300.000.000	32	perkara	9.545.000	-	perkara			perkara			perkara			perkara		-	perkara	-	-	perkara	-	-	perkara	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	85,26263	Asosiasi dan Serikat Pekerja	40.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	54,30758	Lembaga	925.000.000	13	lembaga	32.215.000	-	lembaga	-	-	lembaga	-		lembaga			lembaga		-	lembaga	-	-	lembaga	-	-	lembaga	-	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	41032,77	Orang	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dinas Tenaga Kerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-	0			0			0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	
3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-	0			0			0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Tenaga Kerja
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industi kecil/menengah**	**100**	**%**	**45.493.088.000**			**10.544.696.442**		**0**	-		**0**	**1.856.802.051**		**0**	**1.826.049.000**		**0**	**270.186.445**		**0**	**3.953.037.496**	-	**0**	**3.953.037.496**	-	**0**	**8,69**	**Dinas Tenaga Kerja**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan, fasilitasi sarana dan prasarana industri serta promosi produk industri**	**100**	**IKM**	**45.493.088.000**		**IKM**	**10.544.696.442**		**IKM**	-		**IKM**	**1.856.802.051**		**IKM**	**1.826.049.000**		**IKM**	**270.186.445**		**IKM**	**3.953.037.496**	-	**IKM**	**3.953.037.496**	-	**IKM**	**8,69**	**Dinas Tenaga Kerja**
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10	Dokumen	280.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Dokumen	250.000.000	2	Dokumen	8.318.190.931	-	Dokumen	-	-	Dokumen	1.814.802.051		Dokumen	1.788.549.000		Dokumen	50.000.000	-	Dokumen	3.653.351.051	-	Dokumen	3.653.351.051	-	Dokumen	1.461,34	Dinas Tenaga Kerja
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	Dokumen	280.000.000	2	Dokumen	1.825.796.570	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14	Dokumen	44.568.088.000	2	Dokumen	400.708.941	-	Dokumen	-	-	Dokumen	42.000.000		Dokumen	37.500.000		Dokumen	220.186.445	-	Dokumen	299.686.445	-	Dokumen	299.686.445	-	Dokumen	0,67	Dinas Tenaga Kerja
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8	Dokumen	115.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Industri yang mendapatkan Izin Usaha Industri Kab/Kota**	**100**	**%**	**180.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**PersentasePenerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**180.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4	Dokumen	85.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	95.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Jumlah Penataan IKM**	**100**	**%**	**285.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan teknologi dan fasilitasi izin usaha industri**	**100**	**IKM**	**285.000.000**		**IKM**	-		**IKM**	-		**IKM**	-		**IKM**			**IKM**			**IKM**	-	-	**IKM**	-	-	**IKM**	-	**Dinas Tenaga Kerja**
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7	Dokumen	95.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4	Dokumen	95.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4	Dokumen	95.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Tenaga Kerja
2	**17**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan**				**90.052.902.420**			**34.345.542.742**		**0**	**3.737.903.103**		**0**	**8.945.024.488**		**0**	**9.648.018.961**		**0**	**7.099.435.331**		**0**	**29.430.381.883**	-	**0**	**29.430.381.883**	**#DIV/0!**	**0**	**32,68**	**Koperasi, UMKM & Dag**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang peranglat daerah**	**100**	**%**	**34.249.712.176**	**100**	**%**	**7.042.533.880**		**%**	**1.417.056.967**		**%**	**2.000.479.526**		**%**	**1.667.214.280**		**%**	**1.628.011.260**		**%**	**6.712.762.033**	-	**%**	**6.712.762.033**	-	**%**	**19,60**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang tersusun**	**100**	**%**	**98.000.000**	**100**	**%**	**30.890.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.290.000**		**%**	**10.013.000**		**%**	**14.303.000**	-	**%**	**14.303.000**	-	**%**	**14,59**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	Dokumen	98.000.000	6	dokumen	30.890.500	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	4.290.000		dokumen	10.013.000	-	dokumen	14.303.000	-	dokumen	14.303.000	-	dokumen	14,59	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**32.078.912.176**	**100**	**%**	**6.493.113.143**		**%**	**1.365.632.050**		**%**	**1.936.172.145**		**%**	**1.458.772.320**		**%**	**1.377.943.126**		**%**	**6.138.519.641**	-	**%**	**6.138.519.641**	-	**%**	**19,14**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	29.560.592.176	12	bulan	5.871.093.143	3	bulan	1.251.384.050	3	bulan	1.825.297.145		bulan	1.333.150.320		bulan	1.254.536.126	6	bulan	5.664.367.641	6	bulan	5.664.367.641	13	bulan	19,16	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	48	bulan	2.518.320.000	12	bulan	622.020.000	3	bulan	114.248.000	3	bulan	110.875.000		bulan	125.622.000		bulan	123.407.000	6	bulan	474.152.000	6	bulan	474.152.000	13	bulan	18,83	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**468.000.000**	**100**	**%**	**130.914.560**		**%**	**29.952.832**		**%**	**19.145.008**		**%**	**91.021.900**		**%**	**138.213.594**		**%**	**278.333.334**	-	**%**	**278.333.334**	-	**%**	**59,47**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	jenis	12.000.000	3	jenis	2.196.000	-	jenis	-	-	jenis	-		jenis			jenis	1.403.000	-	jenis	1.403.000	-	jenis	1.403.000	-	jenis	11,69	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	26	jenis	50.000.000	5	jenis	6.122.000	-	jenis	-	-	jenis	-		jenis	720.000		jenis	5.402.000	-	jenis	6.122.000	-	jenis	6.122.000	-	jenis	12,24	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	35	laporan	406.000.000	5	laporan	122.596.560	1	laporan	29.952.832	1	laporan	19.145.008		laporan	90.301.900		laporan	131.408.594	2	laporan	270.808.334	2	laporan	270.808.334	6	laporan	66,70	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**312.000.000**	**100**	**%**	**29.206.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	unit	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	40	Unit	252.000.000	10	unit	29.206.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**556.800.000**	**100**	**%**	**179.297.375**		**%**	**21.472.085**		**%**	**28.252.973**		**%**	**42.191.860**		**%**	**65.212.638**		**%**	**157.129.556**	-	**%**	**157.129.556**	-	**%**	**28,22**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	48	bulan	382.800.000	12	bulan	146.338.875	2	bulan	21.472.085	3	bulan	28.252.973		bulan	38.750.860		bulan	39.668.638	5	bulan	128.144.556	5	bulan	128.144.556	10	bulan	33,48	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	bulan	174.000.000	12	bulan	32.958.500	-	bulan	-	-	bulan	-		bulan	3.441.000		bulan	25.544.000	-	bulan	28.985.000	-	bulan	28.985.000	-	bulan	16,66	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**568.000.000**	**100**	**%**	**179.112.222**		**%**	-		**%**	**16.909.400**		**%**	**70.938.200**		**%**	**36.628.902**		**%**	**124.476.502**	-	**%**	**124.476.502**	-	**%**	**21,91**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56	kali	436.000.000	14	unit	117.766.000	-	unit	-	2	unit	16.909.400		unit	31.683.200		unit	36.628.902	2	unit	85.221.502	2	unit	85.221.502	4	unit	19,55	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16	kali	40.000.000	4	unit	6.357.222	-	unit	-	-	unit	-		unit	3.086.000		unit	0	-	unit	3.086.000	-	unit	3.086.000	-	unit	7,72	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	25	unit	92.000.000	1	unit	54.989.000	-	unit	-	-	unit	-		unit	36.169.000		unit	0	-	unit	36.169.000	-	unit	36.169.000	-	unit	39,31	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**168.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	274	stell	168.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**100**	**%**	**24.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi**	**100**	**%**	**12.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	Unit Usaha	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi**	**100**	**%**	**12.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit Usaha	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**100**	**%**	**92.000.000**	**80**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannnya dalam daerah kabupaten/kota**	**Persentase koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**100**	**%**	**92.000.000**	**80**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabiltas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	513	Unit Usaha	80.000.000	30	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-		unit usaha			unit usaha		-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240	Unit Usaha	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi**	**Persentase Peningkatan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**100**	**%**	**168.000.000**	**80**	**%**	**2.750.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Persentase KSP/USP yang sudah dinilai kesehatannya serta mendapatkan predikat sehat dan cukup sehat**	**100**	**%**	**168.000.000**	**80**	**%**	**2.750.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	204	Unit Usaha	48.000.000	51	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-		unit usaha			unit usaha		-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	04	2.01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	192	Unit Usaha	120.000.000	45	unit usaha	2.750.000	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-		unit usaha			unit usaha		-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian**	**Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian**	**100**	**%**	**1.646.800.000**	**80**	**%**	**420.370.000**		**%**	-		**%**	**185.224.000**		**%**	**196.330.000**		**%**	**38.612.000**		**%**	**420.166.000**	-	**%**	**420.166.000**	-	**%**	**25,51**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yang memahami pengelolaan kompetensi SDM koperasi**	**100**	**%**	**1.622.800.000**	**80**	**%**	**420.370.000**		**%**	-		**%**	**185.224.000**		**%**	**196.330.000**		**%**	**38.612.000**		**%**	**420.166.000**	-	**%**	**420.166.000**	-	**%**	**25,89**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	840	orang	1.622.800.000	210	orang	420.370.000		orang			orang	185.224.000		orang	196.330.000		orang	38.612.000	-	orang	420.166.000	-	orang	420.166.000	-	orang	25,89	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**05**	**2.02**		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha yang memahami pengelolaan kompetensi SDM Pelaku Usaha**	**100**	**%**	**12.000.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah pelaku usaha yang memahami pengetahuan tentang UKM	360	Pelaku Usaha Mikro	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**17**	**05**	**2.03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta serta kapasitas dan kompetemsi SDM usaha mikro**	**100**	**%**	**12.000.000**		-	-	**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensi SDM	160	orang	12.000.000	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi**	**100**	**%**	**24.000.000**		-	-	**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah SDM Pengelola Koperasi dalam dalam Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan**	**100**	**%**	**24.000.000**		-	-	**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	160	orang	12.000.000	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0			0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	160	orang	12.000.000	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0			0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro**	**100**	**%**	**148.000.000**		-	**11.214.766.000**	**0**	-	**0**	**1.607.753.000**		**0**	**2.644.891.000**		**0**	**1.902.466.000**		**0**	**6.155.110.000**	-	**0**	**6.155.110.000**	-	**0**	**4.158,86**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase jumlah usaha mikro yang didata, difasilitasi izin usaha, difasilitasi mitra usaha, dibina dan jumlah data base sesuai kluster**	**100**	**%**	**148.000.000**	**80**	**%**	**11.214.766.000**	**%**	-	**%**	**1.607.753.000**		**%**	**2.644.891.000**		**%**	**1.902.466.000**		**%**	**6.155.110.000**	-	**%**	**6.155.110.000**	-	**%**	**4.158,86**	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	Unit Usaha	58.000.000	300	usaha mikro	-	-	usaha mikro	-	-	usaha mikro	-	usaha mikro	2.644.891.000		usaha mikro		-	usaha mikro	2.644.891.000	-	usaha mikro	2.644.891.000	-	usaha mikro	4.560,16	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	17	Unit Usaha	66.000.000	4	usaha mikro	-	-	usaha mikro	-	-	usaha mikro			usaha mikro		-	usaha mikro	-	-	usaha mikro	-	-	usaha mikro	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	460	Unit Usaha	6.000.000	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5050	Unit Usaha	6.000.000	1.050	unit usaha	11.214.766.000	-	unit usaha	-	-	unit usaha	1.607.753.000		unit usaha			unit usaha	1.902.466.000	-	unit usaha	3.510.219.000	-	unit usaha	3.510.219.000	-	unit usaha	58.503,65	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepemntingan dalam pemberdayaan usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	569	orang	6.000.000	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0			0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1100	orang	6.000.000	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0			0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM**	**85**	**%**	**120.000.000**	**80**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**			**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Persentase peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**	**85**	**%**	**120.000.000**	**80**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**			**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta design dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	14	Unit Usaha	120.000.000	2	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha			unit usaha			unit usaha		-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	-	unit usaha	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**100**	**%**	**12.000.000**	**80**	**%**	**2.624.785**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase gudang yang memiliki TDG**	**100**	**%**	**12.000.000**		-	**2.624.785**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	18	Dok	12.000.000	-	-	2.624.785	-	0	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**03**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan**	**100**	**%**	**50.716.390.244**		-	**13.542.498.936**	**0**	**1.640.846.136**	**0**	**4.293.897.962**	**0**	**4.758.626.515**	**0**	**3.176.551.251**		**0**	**13.869.921.864**	-	**0**	**13.869.921.864**	-	**0**	**27,35**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**Persentase Pembangunan Pasar Rakyat/ Zona PKL**	**100**	**%**	**50.684.390.244**	**80**	**%**	**13.542.498.936**	**%**	**1.640.846.136**	**%**	**4.293.897.962**	**%**	**4.758.626.515**	**%**	**3.176.551.251**		**%**	**13.869.921.864**	-	**%**	**13.869.921.864**	-	**%**	**27,37**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	16.263.953.756	1	unit	5.147.270.524	-	unit	1.640.846.136		unit			unit	2.465.415.501		unit	1.216.636.200	-	unit	5.322.897.837	-	unit	5.322.897.837	-	unit	32,73	Koperasi, UMKM & Dag
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	34.420.436.488	1	unit	8.395.228.412	-	unit	-	-	unit	4.293.897.962		unit	2.293.211.014		unit	1.959.915.051	-	unit	8.547.024.027	-	unit	8.547.024.027	-	unit	24,83	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase dokumen hasil pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**100**	**%**	**32.000.000**	**80**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dok	28.000.000	3	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7	Dok	4.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100**	**%**	**2.648.000.000**	**80**	**%**	**2.079.321.401**	**%**	**680.000.000**	**%**	**857.670.000**	**%**	**368.780.666**	**%**	**342.640.000**		**%**	**2.249.090.666**	-	**%**	**2.249.090.666**	-	**%**	**84,94**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kabutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah laporan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat**	**100**	**%**	**60.000.000**	**80**	**%**	**9.593.730**	**%**	-	**%**	-	**%**	-	**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8	laporan	60.000.000	2	Laporan	9.593.730	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah laporan pemantauan harga Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku usaha distribusi barang**	**100**	**%**	**2.588.000.000**	**80**	**%**	**2.069.727.671**	**%**	**680.000.000**	**%**	**857.670.000**	**%**	**368.780.666**	**%**	**342.640.000**		**%**	**2.249.090.666**	-	**%**	**2.249.090.666**	-	**%**	**86,90**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	04	2.02	01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distibusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	48	laporan	80.000.000	12	laporan	12.403.905	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8	laporan	2.508.000.000	2	laporan	2.057.323.766	-	laporan	680.000.000	-	laporan	857.670.000		laporan	368.780.666		laporan	342.640.000	-	laporan	2.249.090.666	-	laporan	2.249.090.666	-	laporan	89,68	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor**	**100**	**%**	**24.000.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**			**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keikutsertaan pelaksanaan pameran dagang nasional dan lokal**	**100**	**%**	**24.000.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**			**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasiltasi dalam Pameran Dagang	40	Pelaku Usaha	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasiltasi dalam Pameran Dagang Lokal	37	Pelaku Usaha	12.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**100**	**%**	**166.000.000**	**80**	**%**	**40.677.820**		**%**	-		**%**	-		**%**	**12.176.500**		**%**	**11.154.820**		**%**	**23.331.320**	-	**%**	**23.331.320**	-	**%**	**14,06**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan**	**Persentase alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan lainnya) yang bertanda tera sah**	**100**	**%**	**166.000.000**	**80**	**%**	**40.677.820**		**%**	-		**%**	-		**%**	**12.176.500**		**%**	**11.154.820**		**%**	**23.331.320**	-	**%**	**23.331.320**	-	**%**	**14,06**	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2173	Unit	160.000.000	1.378	unit	40.677.820	-	unit	-	-	unit	-		unit	12.176.500		unit	11.154.820	-	unit	23.331.320	-	unit	23.331.320	-	unit	14,58	Koperasi, UMKM & Dag
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	97	orang	6.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Koperasi, UMKM & Dag
3	**30**	**07**			**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**100**	**%**	**14.000.000**	**80**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri**	**Persentase Penggunaan Sistem Informasi Perdagangan**	**100**	**%**	**14.000.000**	**80**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Koperasi, UMKM & Dag**
3	30	03	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	7	Dok	14.000.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Koperasi, UMKM & Dag
2	**18**				**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**35.307.365.904**			**7.762.190.301**		**0**	**1.426.419.661**		**0**	**1.939.208.160**		**0**	**2.273.795.546**		**0**	**2.343.354.744**		**0**	**7.982.778.111**	-	**0**	**7.982.778.111**	**#DIV/0!**	**0**	**22,61**	**DPMPTSP**
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang penyelesaian urusan**	**100**	**%**	**32.180.425.248**	**100**	**%**	**7.054.359.186**		**%**	**1.419.219.661**		**%**	**1.856.154.460**		**%**	**1.783.505.016**		**%**	**1.762.177.144**		**%**	**6.821.056.281**	-	**%**	**6.821.056.281**	-	**%**	**21,20**	**DPMPTSP**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**19.760.492**	**100**	**%**	**2.764.935**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.340.935**		**%**	**3.340.935**	-	**%**	**3.340.935**	-	**%**	**16,91**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	36	Dokumen	19.760.492	9	Dokumen	2.764.935	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	3.340.935	-	Dokumen	3.340.935	-	Dokumen	3.340.935	-	Dokumen	16,91	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**25.142.192.472**	**100**	**%**	**5.311.683.160**		**%**	**1.117.719.661**		**%**	**1.463.525.530**		**%**	**1.176.073.501**		**%**	**1.116.760.627**		**%**	**4.874.079.319**	-	**%**	**4.874.079.319**	-	**%**	**19,39**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	48	Bulan	21.515.492.472	12	Bulan	4.432.173.160	3	Bulan	924.631.843	3	Bulan	1.264.941.246		Bulan	967.219.695		Bulan	900.670.809	6	Bulan	4.057.463.593	6	Bulan	4.057.463.593	13	Bulan	18,86	DPMPTSP
2	18	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	48	Bulan	3.626.700.000	12	Bulan	879.510.000	3	Bulan	193.087.818	3	Bulan	198.584.284		Bulan	208.853.806		Bulan	216.089.818	6	Bulan	816.615.726	6	Bulan	816.615.726	13	Bulan	22,52	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**175.340.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPMPTSP**
2	18	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	0	Stel	175.340.000	50	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	#DIV/0!	-	Paket	-	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**587.952.308**	**100**	**%**	**132.791.947**		**%**	-		**%**	-		**%**	**88.129.703**		**%**	**41.495.012**		**%**	**129.624.715**	-	**%**	**129.624.715**	-	**%**	**22,05**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	Jenis	13.855.412	11	Paket	6.049.853	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	5.175.853		Paket	874.000	-	Paket	6.049.853	-	Paket	6.049.853	-	Paket	43,66	DPMPTSP
2	18	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24	Jenis	69.470.552	6	Paket	11.859.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	5.267.000		Paket	6.592.000	-	Paket	11.859.000	-	Paket	11.859.000	-	Paket	17,07	DPMPTSP
2	18	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	64	Jenis	304.626.344	13	Paket	54.966.574	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	33.245.604		Paket	21.724.820	-	Paket	54.970.424	-	Paket	54.970.424	-	Paket	18,05	DPMPTSP
2	18	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan/ diikuti	96	Laporan	200.000.000	10	Laporan	59.916.520	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	44.441.246		Laporan	12.304.192	-	Laporan	56.745.438	-	Laporan	56.745.438	-	Laporan	28,37	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**220.296.328**	**100**	**%**	**22.054.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPMPTSP**
2	18	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	200	Unit	188.150.328	55	Unit	22.054.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMPTSP
2	18	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	32.146.000	12	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**5.507.419.892**	**100**	**%**	**1.468.695.043**		**%**	**301.500.000**		**%**	**388.197.000**		**%**	**485.523.812**		**%**	**541.359.500**		**%**	**1.716.580.312**	-	**%**	**1.716.580.312**	-	**%**	**31,17**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Bulan	4.760.000.000	12	Laporan	1.204.230.000	3	Laporan	301.500.000	3	Laporan	340.200.000		Laporan	357.480.000		Laporan	454.550.000	6	Laporan	1.453.730.000	6	Laporan	1.453.730.000	13	Laporan	30,54	DPMPTSP
2	18	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Bulan	747.419.892	12	Laporan	264.465.043	-	Laporan	-	3	Laporan	47.997.000		Laporan	128.043.812		Laporan	86.809.500	3	Laporan	262.850.312	3	Laporan	262.850.312	6	Laporan	35,17	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**527.463.756**	**100**	**%**	**116.370.101**		**%**	-		**%**	**4.431.930**		**%**	**33.778.000**		**%**	**59.221.070**		**%**	**97.431.000**	-	**%**	**97.431.000**	-	**%**	**18,47**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28	Unit	174.680.000	7	Unit	59.391.500	-	Unit	-	1	Unit	4.431.930		Unit	9.465.000		Unit	29.072.270	1	Unit	42.969.200	1	Unit	42.969.200	4	Unit	24,60	DPMPTSP
2	18	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dirawat	236	Unit	277.557.896	63	Unit	41.404.601	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	24.313.000		Unit	16.974.800	-	Unit	41.287.800	-	Unit	41.287.800	-	Unit	14,88	DPMPTSP
2	18	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	128	Unit	75.225.860	24	Unit	15.574.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	13.174.000	-	Unit	13.174.000	-	Unit	13.174.000	-	Unit	17,51	DPMPTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**0**	**%**	**138.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	**#DIV/0!**	**%**	-	**DPMPTSP**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal**	**100**	**%**	**80.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPMPTSP**
2	18	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	80.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMPTSP
2	**18**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal**	**1**	**%**	**58.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**DPMPTSP**
2	18	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	1	Dokumen	58.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMPTSP
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**100**	**%**	**181.992.000**	**100**	**%**	**12.303.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**12.303.000**		**%**	-		**%**	**12.303.000**	-	**%**	**12.303.000**	-	**%**	**6,76**	**DPMPTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**1**	**Laporan**	**181.992.000**	**100**	**%**	**12.303.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**12.303.000**		**%**	-		**%**	**12.303.000**	-	**%**	**12.303.000**	-	**%**	**6,76**	**DPMPTSP**
2	18	03	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran investasi	4	kali	181.992.000	1	Dokumen	12.303.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	12.303.000		Dokumen	0	-	Dokumen	12.303.000	-	Dokumen	12.303.000	-	Dokumen	6,76	DPMPTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat**	**100**	**%**	**490.472.656**	**100**	**%**	**17.436.115**		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.210.130**		**%**	-		**%**	**5.210.130**	-	**%**	**5.210.130**	-	**%**	**1,06**	**DPMPTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal**	**2**	**Laporan**	**490.472.656**	**100**	**%**	**17.436.115**		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.210.130**		**%**	-		**%**	**5.210.130**	-	**%**	**5.210.130**	-	**%**	**1,06**	**DPMPTSP**
2	18	04	2.01	02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki Izin usaha	800	Pelaku Usaha	301.192.656	1	KegiatanUsaha	17.436.115	-	KegiatanUsaha	-	-	KegiatanUsaha	-		KegiatanUsaha	5.210.130		KegiatanUsaha	0	-	KegiatanUsaha	5.210.130	-	KegiatanUsaha	5.210.130	-	KegiatanUsaha	1,73	DPMPTSP
2	18	04	2.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	2000	Masyarakat	189.280.000	500	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	DPMPTSP
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Nilai Penanaman Modal**	**100**	**%**	**1.733.576.000**	**100**	**%**	**333.900.000**		**%**	**7.200.000**		**%**	**83.053.700**		**%**	**141.777.400**		**%**	**234.985.600**		**%**	**467.016.700**	-	**%**	**467.016.700**	-	**%**	**26,94**	**DPMPTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100**	**%**	**1.733.576.000**	**100**	**%**	**333.900.000**		**%**	**7.200.000**		**%**	**83.053.700**		**%**	**141.777.400**		**%**	**234.985.600**		**%**	**467.016.700**	-	**%**	**467.016.700**	-	**%**	**26,94**	**DPMPTSP**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	18	05	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pemantauan	4	Laporan	160.000.000	-	KegiatanUsaha.	-	-	KegiatanUsaha.	-	-	KegiatanUsaha.	-		KegiatanUsaha.	141.777.400		KegiatanUsaha.		-	KegiatanUsaha.	141.777.400	-	KegiatanUsaha.	141.777.400	-	KegiatanUsaha.	88,61	DPMPTSP
2	18	05	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	4	Laporan	1.495.260.800	-	PelakuUsaha	302.838.115	-	PelakuUsaha	7.200.000	-	PelakuUsaha	83.053.700		PelakuUsaha			PelakuUsaha	203.923.795	-	PelakuUsaha	294.177.495	-	PelakuUsaha	294.177.495	-	PelakuUsaha	19,67	DPMPTSP
2	18	05	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal	4	Laporan	78.315.200	-	KegiatanUsaha	31.061.885	-	KegiatanUsaha	-	-	KegiatanUsaha	-		KegiatanUsaha			KegiatanUsaha	31.061.805	-	KegiatanUsaha	31.061.805	-	KegiatanUsaha	31.061.805	-	KegiatanUsaha	39,66	DPMPTSP
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**%**	**582.900.000**	**100**	**%**	**344.192.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**331.000.000**		**%**	**346.192.000**		**%**	**677.192.000**	-	**%**	**677.192.000**	-	**%**	**116,18**	**DPMPTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**100**	**%**	**582.900.000**	**100**	**%**	**344.192.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**331.000.000**		**%**	**346.192.000**		**%**	**677.192.000**	-	**%**	**677.192.000**	-	**%**	**116,18**	**DPMPTSP**
2	18	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Dokumen	582.900.000	1	Dokumen	344.192.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	331.000.000		Dokumen	346.192.000	-	Dokumen	677.192.000	-	Dokumen	677.192.000	-	Dokumen	116,18	DPMPTSP
2	**19**				**Dinas Pemuda Dan Olahraga**				**37.558.967.912**			**12.098.577.517**	**0**		**855.664.888**	**0**		**1.694.965.471**	**0**	**5.168.681.661**		**0**	**2.345.630.636**		**0**	**10.064.942.656**	-	**0**	**10.064.942.656**	**#DIV/0!**	**0**	**26,80**	**Dispora**
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**23.144.948.789**	**100**	**%**	**4.461.054.917**		**%**	**855.664.888**		**%**	**1.220.667.471**		**%**	**1.056.756.916**		**%**	**1.322.277.551**		**%**	**4.455.366.826**	-	**%**	**4.455.366.826**	-	**%**	**19,25**	**Dispora**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**179.999.000**	**100**	**%**	**28.458.120**		**%**	-		**%**	-		**%**	**9.712.250**		**%**	**1.500.000**		**%**	**11.212.250**	-	**%**	**11.212.250**	-	**%**	**6,23**	**Dispora**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	5	Dokumen	179.999.000	5	Dokumen	28.458.120	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	9.712.250		Dokumen	1.500.000	-	Dokumen	11.212.250	-	Dokumen	11.212.250	-	Dokumen	6,23	Dispora
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**19.590.516.092**	**100**	**%**	**3.748.658.126**		**%**	**837.965.335**		**%**	**1.141.040.273**		**%**	**891.058.941**		**%**	**852.060.999**		**%**	**3.722.125.548**	-	**%**	**3.722.125.548**	-	**%**	**19,00**	**Dispora**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	17.976.516.092	12	bulan	3.325.718.126	3	bulan	749.362.335	3	bulan	1.052.702.273		bulan	787.552.941		bulan	721.209.999	6	bulan	3.310.827.548	6	bulan	3.310.827.548	13	bulan	18,42	Dispora
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	1.614.000.000	11	bulan	422.940.000	3	bulan	88.603.000	3	bulan	88.338.000		bulan	103.506.000		bulan	130.851.000	6	bulan	411.298.000	6	bulan	411.298.000	13	bulan	25,48	Dispora
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**234.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dispora**
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47	paket	99.000.000	45	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dispora
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	orang	135.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dispora
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**682.720.304**	**100**	**%**	**208.231.152**		**%**	-		**%**	**29.674.783**		**%**	**64.284.832**		**%**	**138.838.751**		**%**	**232.798.366**	-	**%**	**232.798.366**	-	**%**	**34,10**	**Dispora**
2	06	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berita nos yang disediakan	60	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	bln	-		bln			bln		-	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	Dispora
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	8.374.040	6	Paket	3.306.412	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	2.260.412		Paket	0	-	Paket	2.260.412	-	Paket	2.260.412	-	Paket	26,99	Dispora
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	30	Paket	74.346.264	6	Paket	18.884.740	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	11.851.620		Paket	0	-	Paket	11.851.620	-	Paket	11.851.620	-	Paket	15,94	Dispora
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	Laporan	600.000.000	12	Laporan	186.040.000	-	Laporan	-	2	Laporan	29.674.783		Laporan	50.172.800		Laporan	138.838.751	2	Laporan	218.686.334	2	Laporan	218.686.334	4	Laporan	36,45	Dispora
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**519.393.485**	**100**	**%**	**78.543.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dispora**
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	52	Unit	519.393.485	10	Unit	78.543.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dispora
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.155.837.736**	**100**	**%**	**276.560.571**		**%**	**17.699.553**		**%**	**38.314.115**		**%**	**48.370.016**		**%**	**219.645.153**		**%**	**324.028.837**	-	**%**	**324.028.837**	-	**%**	**28,03**	**Dispora**
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dispora
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	831.600.000	12	Laporan	145.515.610	1	Laporan	17.699.553	-	Laporan	514.115		Laporan			Laporan	70.381.137	1	Laporan	88.594.805	1	Laporan	88.594.805	2	Laporan	10,65	Dispora
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	324.237.736	12	Laporan	131.044.961	-	Laporan	-	6	Laporan	37.800.000		Laporan	48.370.016		Laporan	149.264.016	6	Laporan	235.434.032	6	Laporan	235.434.032	13	Laporan	72,61	Dispora
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**782.482.172**	**1**	-	**120.603.948**		**0**	-		**0**	**11.638.300**		**0**	**43.330.877**		**0**	**110.232.648**		**0**	**165.201.825**	-	**0**	**165.201.825**	-	**0**	**21,11**	**Dispora**
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanmya	4	unit	189.874.400	3	Unit	69.294.000	-	Unit	-	1	Unit	11.638.300		Unit	20.998.400		Unit	58.922.700	1	Unit	91.559.400	1	Unit	91.559.400	25	Unit	48,22	Dispora
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	12	unit	495.000.000	4	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dispora
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	204	Unit	97.607.772	48	Unit	51.309.948	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	22.332.477		Unit	51.309.948	-	Unit	73.642.425	-	Unit	73.642.425	-	Unit	75,45	Dispora
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100**	**%**	**1.773.315.661**	**1**	-	**508.328.085**		**0**	-		**0**	-		**0**	**100.866.500**		**0**	**75.067.585**		**0**	**175.934.085**	-	**0**	**175.934.085**	-	**0**	**9,92**	**Dispora**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader.**	**100**	**%**	**913.315.661**	**1**	-	**177.348.085**		**0**	-		**0**	-		**0**	**100.866.500**		**0**	**200.585**		**0**	**101.067.085**	-	**0**	**101.067.085**	-	**0**	**11,07**	**Dispora**
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	58	orang	307.481.879	50	Orang	74.092.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dispora
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	14	unit	45.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dispora
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	26	Orang	60.000.000		-		-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	80	Orang	60.000.000		-		-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	240	orang	440.833.782	60	Orang	103.256.085	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	100.866.500		Orang	200.585	-	Orang	101.067.085	-	Orang	101.067.085	-	Orang	22,93	Dispora
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**860.000.000**	**100**	-	**330.980.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	**74.867.000**		**0**	**74.867.000**	-	**0**	**74.867.000**	-	**0**	**8,71**	**Dispora**
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	66	Orang	60.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2	org	800.000.000	1	Dokumen	330.980.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	74.867.000	-	Dokumen	74.867.000	-	Dokumen	74.867.000	-	Dokumen	9,36	Dispora
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daya saing Keolahragaan**	**95**	**%**	**11.035.103.462**	**100**	**%**	**6.286.205.970**		**%**	-		**%**	**359.861.000**		**%**	**3.768.769.700**		**%**	**618.912.500**		**%**	**4.747.543.200**	-	**%**	**4.747.543.200**	-	**%**	**43,02**	**Dispora**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**1.201.200.000**	**100**	**%**	**3.489.625.900**		**%**	-		**%**	**59.861.000**		**%**	**3.298.464.900**		**%**	**221.180.000**		**%**	**3.579.505.900**	-	**%**	**3.579.505.900**	-	**%**	**297,99**	**Dispora**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	unit	1.201.200.000	10	Unit	3.489.625.900	-	Unit	-	1	Unit	59.861.000		Unit	3.298.464.900		Unit	221.180.000	1	Unit	3.579.505.900	1	Unit	3.579.505.900	100	Unit	297,99	Dispora
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**3.566.453.152**	**1**	**%**	**830.109.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**399.509.000**		**%**	**224.749.000**		**%**	**624.258.000**	**-**	**%**	**624.258.000**	**-**	**%**	**17,50**	**Dispora**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	26	dokumen	1.200.900.000	5	Dokumen	830.109.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	399.509.000		Dokumen	224.749.000	-	Dokumen	624.258.000	-	Dokumen	624.258.000	-	Dokumen	51,98	Dispora
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	764	orang	2.365.553.152	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	Dispora
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**100**	**%**	**1.459.650.310**	**100**	**-**	**300.000.000**		**0**	**-**		**0**	**300.000.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**300.000.000**	**-**	**0**	**300.000.000**	**-**	**0**	**20,55**	**Dispora**
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	1430	orang	200.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	830	orang	1.214.650.310	125	Orang	300.000.000	-	Orang	-	125	Orang	300.000.000		Orang	0		Orang	0	125	Orang	300.000.000	125	Orang	300.000.000	15	Orang	24,70	Dispora
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	dokumen	45.000.000		-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100**	**%**	**4.095.600.000**	**100**	**-**	**1.301.050.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dispora**
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	4	dokumen	45.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8	dokumen	4.005.600.000	2	Organisasi	1.301.050.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi	-		Organisasi			Organisasi		-	Organisasi	-	-	Organisasi	-	-	Organisasi	-	Dispora
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4	dokumen	45.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dispora
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**%**	**712.200.000**	**1**	**-**	**365.421.070**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**70.795.800**		**0**	**172.983.500**		**0**	**243.779.300**	**-**	**0**	**243.779.300**	**-**	**0**	**34,23**	**Dispora**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	11	dokumen	401.100.000	2	Dokumen	365.421.070	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	70.795.800		Dokumen	172.983.500	-	Dokumen	243.779.300	-	Dokumen	243.779.300	-	Dokumen	60,78	Dispora
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	11	dokumen	311.100.000	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dispora
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**100**	**%**	**1.605.600.000**	**100**	**%**	**842.988.545**		**%**	**-**		**%**	**114.437.000**		**%**	**242.288.545**		**%**	**329.373.000**		**%**	**686.098.545**	**-**	**%**	**686.098.545**	**-**	**%**	**42,73**	**Dispora**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.605.600.000**	**100**	**%**	**842.988.545**		**%**	**-**		**%**	**114.437.000**		**%**	**242.288.545**		**%**	**329.373.000**		**%**	**686.098.545**	**-**	**%**	**686.098.545**	**-**	**%**	**42,73**	**Dispora**
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	laporan	1.605.600.000	1	Laporan	842.988.545	-	Laporan	-	-	Laporan	114.437.000		Laporan	242.288.545		Laporan	329.373.000	-	Laporan	686.098.545	-	Laporan	686.098.545	-	Laporan	42,73	Dispora
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1	Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Dispora
8	**01**				**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**				**45.996.326.623**			**10.368.206.320**		**0**	**873.100.089**		**0**	**3.071.609.881**		**0**	**3.033.642.457**		**0**	**12.492.411.624**		**0**	**19.470.764.051**	**-**	**0**	**19.470.764.051**	**#DIV/0!**	**0**	**42,33**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH**	**100**	**%**	**21.148.543.814**	**100**	**%**	**4.323.404.780**		**%**	**873.100.089**		**%**	**382.829.881**		**%**	**1.924.992.457**		**%**	**1.029.667.230**		**%**	**4.210.589.657**	**-**	**%**	**4.210.589.657**	**-**	**%**	**19,91**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Terusun**	**100**	**%**	**122.352.428**	**100**	**%**	**19.856.770**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**312.000**		**%**	**312.000**	**-**	**%**	**312.000**	**-**	**%**	**0,26**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	122.352.428	6	Dokumen	19.856.770		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	312.000	-	Dokumen	312.000	-	Dokumen	312.000	-	Dokumen	0,26	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**19.373.084.656**	**100**	**%**	**3.760.400.600**		**%**	**846.566.660**		**%**	**154.985.150**		**%**	**1.903.099.169**		**%**	**893.832.318**		**%**	**3.798.483.297**	**-**	**%**	**3.798.483.297**	**-**	**%**	**19,61**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	18.503.084.656	12	bulan	3.539.600.600		bulan	834.566.660		bulan	136.960.150		bulan	1.775.424.169		bulan	830.732.318	-	bulan	3.577.683.297	-	bulan	3.577.683.297	-	bulan	19,34	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	870.000.000	12	bulan	220.800.000		bulan	12.000.000		bulan	18.025.000		bulan	127.675.000		bulan	63.100.000	-	bulan	220.800.000	-	bulan	220.800.000	-	bulan	25,38	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**79.200.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**			**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36	Paket	79.200.000	36	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**476.327.580**	**100**	**%**	**372.311.610**		**%**	**-**		**%**	**213.636.728**		**%**	**(23.075.301)**		**%**	**83.193.062**		**%**	**273.754.489**	**-**	**%**	**273.754.489**	**-**	**%**	**57,47**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	6.254.396	10	Paket	1.562.000		Paket			Paket			Paket			Paket	1.562.000	-	Paket	1.562.000	-	Paket	1.562.000	-	Paket	24,97	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	71.418.668	5	Paket	22.086.000		Paket			Paket			Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	-	-	-	-		0			0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	58.654.516	10	Paket	14.112.950		Paket			Paket			Paket	5.762.055		Paket	2.673.440	-	Paket	8.435.495	-	Paket	8.435.495	-	Paket	14,38	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen			dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	340.000.000	20	Laporan	334.550.660		Laporan			Laporan	213.636.728		Laporan	-28.837.356		Laporan	78.957.622	-	Laporan	263.756.994	-	Laporan	263.756.994	-	Laporan	77,58	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**			**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Paket	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**450.697.400**	**100**	**-**	**129.018.800**		**0**	**21.673.429**		**0**	**14.208.003**		**0**	**33.409.889**		**0**	**35.565.850**		**0**	**104.857.171**	**-**	**0**	**104.857.171**	**-**	**0**	**23,27**	**Badan Kesbangpol**
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	Laporan	214.903.200	12	Laporan	53.725.800	2	Laporan	7.465.426	-	Laporan	-		Laporan	17.495.892		Laporan	9.245.850	2	Laporan	34.207.168	2	Laporan	34.207.168	17	Laporan	15,92	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	100.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	14.208.003		Laporan			Laporan		-	Laporan	14.208.003	-	Laporan	14.208.003	-	Laporan	14,21	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	135.794.200	12	Laporan	75.293.000	5	Laporan	14.208.003	-	Laporan	-		Laporan	15.913.997		Laporan	26.320.000	5	Laporan	56.442.000	5	Laporan	56.442.000	#DIV/0!	Laporan	41,56	Badan Kesbangpol
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**646.881.750**		**%**	**41.817.000**		**%**	**4.860.000**		**%**	**-**		**%**	**11.558.700**		**%**	**16.764.000**		**%**	**33.182.700**	**-**	**%**	**33.182.700**	**-**	**%**	**5,13**	**Badan Kesbangpol**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	31.377.400	3	Unit	32.790.000	1	Unit	3.261.000	-	Unit	-		Unit	9.907.700		Unit	15.165.000	1	Unit	28.333.700	1	Unit	28.333.700	33	Unit	90,30	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	unit	26.128.000	2	Unit	9.027.000	-	Unit	1.599.000	-	Unit	-		Unit	1.651.000		Unit	1.599.000	-	Unit	4.849.000	-	Unit	4.849.000	-	Unit	18,56	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	589.376.350	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase meningkatnya kesadaran berbagsa, bernegara dan cinta tanah air**	**85**	**%**	**388.389.080**	**85**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**		**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa**	**85**	**%**	**388.389.080**	**85**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**		**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	Orang	316.047.040	100	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesbangpol
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	Orang	72.342.040	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	#DIV/0!	Laporan	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**90**	**%**	**18.210.589.593**	**90**	**%**	**4.607.530.055**		**%**	**-**		**%**	**2.457.910.000**		**%**	**458.650.000**		**%**	**11.118.494.394**		**%**	**14.035.054.394**	**-**	**%**	**14.035.054.394**	**-**	**%**	**77,07**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.**	**90**	**%**	**18.210.589.593**	**90**	**%**	**4.607.530.055**		**%**	**-**		**%**	**2.457.910.000**		**%**	**458.650.000**		**%**	**11.118.494.394**		**%**	**14.035.054.394**	**-**	**%**	**14.035.054.394**	**-**	**%**	**77,07**	**Badan Kesbangpol**
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	300	orang	17.567.473.593	100	Orang	4.589.348.700	-	Orang	-	46	Orang	2.457.910.000		Orang	458.650.000		Orang	11.118.494.394	46	Orang	14.035.054.394	46	Orang	14.035.054.394	15	Orang	79,89	Badan Kesbangpol
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	100	Orang	340.338.000	100	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesbangpol
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik didaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	2	Laporan	302.778.000	2	Laporan	18.181.355	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase tersedianya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**85**	**%**	**189.624.548**	**85**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**		**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**	**85**	**%**	**189.624.548**	**85**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**		**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang	164.624.548	100	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesbangpol
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Laporan	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Badan Kesbangpol
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	Laporan	25.000.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**85**	**%**	**1.558.182.680**	**85**	**%**	**108.672.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**85**	**%**	**1.558.182.680**	**85**	**%**	**108.672.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Badan Kesbangpol**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	100	Orang	174.049.480	100	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesbangpol
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	Laporan	1.240.852.540	100	Orang	108.672.500	-	Orang	-	7	Orang	39.775.000		Orang	-2.275.000		Orang	97.762.375	7	Orang	135.262.375	7	Orang	135.262.375	117	Orang	10,90	Badan Kesbangpol

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Laporan	143.280.660	3	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Badan Kesbangpol
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**	**85**	**%**	**4.500.996.908**	**85**	**%**	**1.328.598.985**		**%**	-		**%**	**230.870.000**		**%**	**650.000.000**		**%**	**344.250.000**		**%**	**1.225.120.000**	-	**%**	**1.225.120.000**	-	**%**	**27,22**	**Badan Kesbangpol**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Serta Penanganan Konflik di Daerah.**	**85**	**%**	**4.500.996.908**	**85**	**%**	**1.328.598.985**		**%**	-		**%**	**230.870.000**		**%**	**650.000.000**		**%**	**344.250.000**		**%**	**1.225.120.000**	-	**%**	**1.225.120.000**	-	**%**	**27,22**	**Badan Kesbangpol**
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	100	Orang	3.744.723.598	100	Orang	949.972.000	-	Orang	-	24	Orang	230.870.000		Orang	650.000.000		Orang	0	24	Orang	880.870.000	24	Orang	880.870.000	24	Orang	23,52	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	Orang	248.261.360	100	Orang	27.121.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan	243.011.950	2	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Badan Kesbangpol
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	265.000.000	2	Laporan	351.505.985	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	344.250.000	-	Laporan	344.250.000	-	Laporan	344.250.000	-	Laporan	129,91	Badan Kesbangpol
4	**01**				**Sekretariat Daerah**				**205.703.228.592**			**48.258.212.456**	**0**		**6.750.855.123**	**0**		**4.525.074.634**	**0**		**21.066.276.634**	**0**		**15.793.728.874**	**0**		**48.135.935.265**	-	**0**	**48.135.935.265**	**#DIV/0!**	**0**	**23,40**	**Sekda**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**182.258.627.203**	**100**	**%**	**43.112.974.095**		**%**	**6.711.015.123**		**%**	**4.454.585.134**		**%**	**19.167.604.371**		**%**	**13.887.451.729**		**%**	**44.220.656.357**	-	**%**	**44.220.656.357**	-	**%**	**24,26**	**Bag. Umum**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**215.721.436**	**100**	**%**	**34.168.085**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.419.085**		**%**	**5.419.085**	-	**%**	**5.419.085**	-	**%**	**2,51**	**Bag. Adm. Pembangunan**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	215.721.436	5	Dokumen	34.168.085	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	5.419.085	-	Dokumen	5.419.085	-	Dokumen	5.419.085	-	Dokumen	2,51	Bag. Adm. Pembangunan
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**105.252.989.792**	**100**	**%**	**22.769.742.193**		**%**	**4.733.117.734**		**%**	**2.947.966.356**		**%**	**9.630.128.545**		**%**	**3.563.457.120**		**%**	**20.874.669.755**	-	**%**	**20.874.669.755**	-	**%**	**19,83**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	89.004.989.792	12	Bulan	18.596.572.193	3	Bulan	3.795.769.492	3	Bulan	2.602.192.356		Bulan	6.673.267.963		Bulan	3.741.180.776	6	Bulan	16.812.410.587	6	Bulan	16.812.410.587	13	Bulan	18,89	Bag. Umum
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	16.248.000.000	11	bulan	4.173.170.000	3	bulan	937.348.242	3	bulan	345.774.000		bulan	2.956.860.582		bulan	-177.723.656	6	bulan	4.062.259.168	6	bulan	4.062.259.168	13	bulan	25,00	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.334.900.000**	**100**	**%**	**34.300.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**54.200.000**		**%**	**54.200.000**	-	**%**	**54.200.000**	-	**%**	**4,06**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2568	Paket	1.314.900.000	642	Paket	34.300.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	54.200.000	-	Paket	54.200.000	-	Paket	54.200.000	-	Paket	4,12	Bag. Umum
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	20.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**15.360.525.218**	**100**	**%**	**4.206.196.136**		**%**	**547.403.247**		**%**	**384.983.462**		**%**	**2.047.362.816**		**%**	**2.870.592.251**		**%**	**5.850.341.776**	-	**%**	**5.850.341.776**	-	**%**	**38,09**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	800	Paket	5.741.467.404	200	Paket	1.663.494.262	21	Paket	160.851.000	4	Paket	27.690.000		Paket	500.624.200		Paket	1.430.187.580	25	Paket	2.119.352.780	25	Paket	2.119.352.780	3	Paket	36,91	Bag. Umum
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400	Paket	406.825.334	100	Paket	119.900.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	24.900.000		Paket	209.163.000	-	Paket	234.063.000	-	Paket	234.063.000	-	Paket	57,53	Bag. Umum
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	1.165.608.800	12	Paket	315.308.803	2	Paket	55.921.000	1	Paket	16.676.000		Paket	139.999.803		Paket	195.226.000	3	Paket	407.822.803	3	Paket	407.822.803	6	Paket	34,99	Bag. Umum
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4000	Paket	666.161.480	1.000	Paket	172.471.365	90	Paket	15.025.000	152	Paket	25.304.000		Paket	44.801.290		Paket	139.322.665	242	Paket	224.452.955	242	Paket	224.452.955	6	Paket	33,69	Bag. Umum
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17	Dokumen	80.462.200	17	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	34.452.200		Dokumen	7.315.000	-	Dokumen	41.767.200	-	Dokumen	41.767.200	-	Dokumen	51,91	Bag. Prokopim
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da Konsultasi SKPD	480	Laporan	7.300.000.000	120	Laporan	1.935.021.706	20	Laporan	315.606.247	20	Laporan	315.313.462		Laporan	1.302.585.323		Laporan	889.378.006	40	Laporan	2.822.883.038	40	Laporan	2.822.883.038	8	Laporan	38,67	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**4.732.799.394**	**100**	**%**	**237.573.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**72.160.000**		**%**	**65.802.000**		**%**	**137.962.000**	-	**%**	**137.962.000**	-	**%**	**2,92**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	4.000.000.000	1	-	70.000.000	-	0	-	-	0	-		0	65.800.000		0	0	-	0	65.800.000	-	0	65.800.000	-	0	1,65	Bag. Umum
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	532.799.394	20	Unit	118.493.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	35.802.000	-	Unit	35.802.000	-	Unit	35.802.000	-	Unit	6,72	Bag. Umum
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200	Unit	200.000.000	50	Unit	49.080.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	6.360.000		Unit	30.000.000	-	Unit	36.360.000	-	Unit	36.360.000	-	Unit	18,18	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**18.413.269.552**	**100**	**%**	**4.702.063.896**		**%**	**808.431.052**		**%**	**548.139.750**		**%**	**1.912.699.463**		**%**	**1.932.811.923**		**%**	**5.202.082.188**	-	**%**	**5.202.082.188**	-	**%**	**28,25**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000	Laporan	32.000.000	1.000	Laporan	7.500.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	6.000.000	-	Laporan	6.000.000	-	Laporan	6.000.000	-	Laporan	18,75	Bag. Umum
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	6.548.400.000	12	Laporan	1.615.100.000	3	Laporan	378.559.052	2	Laporan	255.316.059		Laporan	702.885.604		Laporan	543.391.421	5	Laporan	1.880.152.127	5	Laporan	1.880.152.127	10	Laporan	28,71	Bag. Umum
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.751.084.000	12	Laporan	494.670.000	1	Laporan	19.376.000	-	Laporan	510.000		Laporan	195.562.551		Laporan	319.568.712	1	Laporan	535.017.263	1	Laporan	535.017.263	2	Laporan	30,55	Bag. Umum
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	10.081.785.552	12	Laporan	2.584.793.896	2	Laporan	410.496.000	1	Laporan	292.313.700		Laporan	1.014.251.308		Laporan	1.063.851.790	3	Laporan	2.780.912.798	3	Laporan	2.780.912.798	6	Laporan	27,58	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**16.278.477.200**	**100**	**%**	**4.270.284.795**		**%**	**331.657.090**		**%**	**354.510.566**		**%**	**1.927.612.400**		**%**	**2.586.673.600**		**%**	**5.200.453.656**	-	**%**	**5.200.453.656**	-	**%**	**31,95**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	400	Unit	6.669.115.492	100	Unit	1.920.410.400	18	Unit	297.634.090	14	Unit	241.946.566		Unit	921.294.400		Unit	895.628.150	32	Unit	2.356.503.206	32	Unit	2.356.503.206	8	Unit	35,33	Bag. Umum
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	200	Unit	100.000.000	50	Unit	24.966.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	20.076.000	-	Unit	20.076.000	-	Unit	20.076.000	-	Unit	20,08	Bag. Umum
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	Unit	690.000.000	10	Unit	139.834.000	-	Unit	-	1	Unit	15.246.000		Unit	20.159.000		Unit	159.696.000	1	Unit	195.101.000	1	Unit	195.101.000	3	Unit	28,28	Bag. Umum
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	16	Unit	6.729.361.708	4	Unit	1.706.305.000	-	Unit	34.023.000	-	Unit	-		Unit	842.592.000		Unit	1.104.412.450	-	Unit	1.981.027.450	-	Unit	1.981.027.450	-	Unit	29,44	Bag. Umum
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	120	Unit	2.090.000.000	30	Unit	478.769.395	-	Unit	-	5	Unit	97.318.000		Unit	143.567.000		Unit	406.861.000	5	Unit	647.746.000	5	Unit	647.746.000	4	Unit	30,99	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**3.803.608.104**	**100**	**%**	**737.068.632**		**%**	-		**%**	-		**%**	**494.312.500**		**%**	**300.240.000**		**%**	**794.552.500**	-	**%**	**794.552.500**	-	**%**	**20,89**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8/48	Orang/Bulan	936.408.104	2	Orang/Bulan	268.632	-	Orang/Bulan	-	-	Orang/Bulan	-		Orang/Bulan	11.512.500		Orang/Bulan	0	-	Orang/Bulan	11.512.500	-	Orang/Bulan	11.512.500	-	Orang/Bulan	1,23	Bag. Umum

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40	Paket	347.200.000	10	Paket	106.800.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	82.800.000		Paket	71.200.000	-	Paket	154.000.000	-	Paket	154.000.000	-	Paket	44,35	Bag. Umum
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengkuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	120.000.000	1	Orang	30.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang	29.040.000	-	Orang	29.040.000	-	Orang	29.040.000	-	Orang	24,20	Bag. Umum
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8/48	Orang/Bulan	2.400.000.000	2	Orang/Bulan	600.000.000	-	Orang/Bulan	-	-	Orang/Bulan	-		Orang/Bulan	400.000.000		Orang/Bulan	200.000.000	-	Orang/Bulan	600.000.000	-	Orang/Bulan	600.000.000	-	Orang/Bulan	25,00	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100**	**%**	**10.643.400.000**	**100**	**%**	**2.706.296.147**		**%**	**290.406.000**		**%**	**218.985.000**		**%**	**1.102.670.147**		**%**	**1.540.225.000**		**%**	**3.152.286.147**	-	**%**	**3.152.286.147**	-	**%**	**29,62**	**Bag. Umum**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48	Paket	9.062.200.000	12	Paket	2.267.675.000	2	Paket	287.606.000	1	Paket	152.474.000		Paket	947.485.000		Paket	1.349.766.000	3	Paket	2.737.331.000	3	Paket	2.737.331.000	6	Paket	30,21	Bag. Umum
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48	Paket	178.800.000	12	Paket	44.700.000	1	Paket	2.800.000	2	Paket	8.000.000		Paket	18.000.000		Paket	15.900.000	3	Paket	44.700.000	3	Paket	44.700.000	6	Paket	25,00	Bag. Umum
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48	Paket	1.402.400.000	12	Paket	393.921.147	-	Paket	-	2	Paket	58.511.000		Paket	137.185.147		Paket	174.559.000	2	Paket	370.255.147	2	Paket	370.255.147	4	Paket	26,40	Bag. Umum
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Pemenuhan Penataan Organisasi**	**100**	**%**	**2.527.633.408**	**100**	**%**	**299.325.845**		**%**	-		**%**	-		**%**	**75.000.000**		**%**	**332.794.000**		**%**	**407.794.000**	-	**%**	**407.794.000**	-	**%**	**16,13**	**Bag. Organisasi**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	Dokumen	890.721.616	2	Dokumen	71.265.345	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	227.794.000		Dokumen	227.794.000	-	Dokumen	227.794.000	-	Dokumen	227.794.000	-	Dokumen	25,57	Bag. Organisasi
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	Laporan	1.015.766.276	2	Laporan	177.008.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	75.000.000		Laporan	105.000.000	-	Laporan	180.000.000	-	Laporan	180.000.000	-	Laporan	17,72	Bag. Organisasi
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	Dokumen	621.145.516	2	Dokumen	51.052.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Bag. Organisasi
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**%**	**3.695.303.099**	**100**	**%**	**3.115.955.366**		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.905.658.500**		**%**	**635.236.750**		**%**	**2.540.895.250**	-	**%**	**2.540.895.250**	-	**%**	**68,76**	**Bag. Prokopim**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	330	Laporan	65.090.000	330	Laporan	65.790.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	9.000.000		Laporan	5.000.000	-	Laporan	14.000.000	-	Laporan	14.000.000	-	Laporan	21,51	Bag. Prokopim
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	330	Laporan	113.823.000	330	Laporan	265.029.200	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	61.925.000		Laporan	37.550.000	-	Laporan	99.475.000	-	Laporan	99.475.000	-	Laporan	87,39	Bag. Prokopim
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3080	Laporan	3.516.390.099	770	Laporan	2.785.136.166	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	1.834.733.500		Laporan	592.686.750	-	Laporan	2.427.420.250	-	Laporan	2.427.420.250	-	Laporan	69,03	Bag. Prokopim
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**14.438.539.364**	**100**	**%**	**3.226.663.117**		**%**	**33.840.000**		**%**	-		**%**	**1.461.525.822**		**%**	**1.236.576.645**		**%**	**2.731.942.467**	-	**%**	**2.731.942.467**	-	**%**	**18,92**	**Bag. Pemerintahan, Keistimewaan, Hukum, Perekonomian**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Pemerintah Daerah yang Optimal**	**100**	**%**	**2.003.313.112**	**100**	**%**	**206.047.915**		**%**	-		**%**	-		**%**	**16.075.730**		**%**	**179.136.385**		**%**	**195.212.115**	-	**%**	**195.212.115**	-	**%**	**9,74**	**Bag. Pemerintahan**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	Dokumen	424.882.200	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	8.037.865		Dokumen		-	Dokumen	8.037.865	-	Dokumen	8.037.865	-	Dokumen	1,89	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8	Dokumen	812.631.092	2	Dokumen	57.514.050	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	12.072.385	-	Dokumen	12.072.385	-	Dokumen	12.072.385	-	Dokumen	1,49	Bag. Pemerintahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	Dokumen	765.799.820	2	Dokumen	148.533.865	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	8.037.865		Dokumen	167.064.000	-	Dokumen	175.101.865	-	Dokumen	175.101.865	-	Dokumen	22,87	Bag. Pemerintahan
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**6.730.062.368**	**100**	**%**	**1.711.470.265**		**%**	**33.840.000**		**%**	-		**%**	**932.970.000**		**%**	**531.534.000**		**%**	**1.498.344.000**	-	**%**	**1.498.344.000**	-	**%**	**22,26**	**Bag. Keistimewaan**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dokumen	1.594.746.832	2	Dokumen	401.376.000	-	Dokumen	31.840.000	-	Dokumen	-		Dokumen	197.870.000		Dokumen	64.435.000	-	Dokumen	294.145.000	-	Dokumen	294.145.000	-	Dokumen	18,44	Bag. Keistimewaan
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8	Dokumen	1.054.534.040	1	Dokumen	301.755.810	-	Dokumen	2.000.000	-	Dokumen	-		Dokumen	78.100.000		Dokumen	181.900.000	-	Dokumen	262.000.000	-	Dokumen	262.000.000	-	Dokumen	24,85	Bag. Keistimewaan
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8	Dokumen	4.080.781.496	1	Dokumen	1.008.338.455	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	657.000.000		Dokumen	285.199.000	-	Dokumen	942.199.000	-	Dokumen	942.199.000	-	Dokumen	23,09	Bag. Keistimewaan
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang difasilitasi/ditangani**	**100**	**%**	**5.434.083.676**	**100**	**%**	**1.287.964.845**		**%**	-		**%**	-		**%**	**491.300.000**		**%**	**525.906.260**		**%**	**1.017.206.260**	-	**%**	**1.017.206.260**	-	**%**	**18,72**	**Bag. Hukum**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	180	Dokumen	1.751.306.660	45	Dokumen	321.218.190	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	125.000.000		Dokumen	139.809.260	-	Dokumen	264.809.260	-	Dokumen	264.809.260	-	Dokumen	15,12	Bag. Hukum
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	Kasus	2.393.938.484	5	Kasus	882.015.800	-	Kasus	-	-	Kasus	-		Kasus	366.300.000		Kasus	382.467.000	-	Kasus	748.767.000	-	Kasus	748.767.000	-	Kasus	31,28	Bag. Hukum
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	180	Dokumen	1.288.838.532	45	Dokumen	84.730.855	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	0,28	Bag. Hukum
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Implementasi Kerjasama Dalam Negeri**	**100**	**%**	**271.080.208**	**100**	**%**	**21.180.092**		**%**	-		**%**	-		**%**	**21.180.092**		**%**	-		**%**	**21.180.092**	-	**%**	**21.180.092**	-	**%**	**7,81**	**Bag. Pemerintahan**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	Dokumen	271.080.208	15	Dokumen	21.180.092	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	21.180.092		Dokumen	0	-	Dokumen	21.180.092	-	Dokumen	21.180.092	-	Dokumen	7,81	Bag. Pemerintahan
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembamunan**	**100**	**%**	**9.006.062.025**	**100**	**%**	**1.918.575.244**		**%**	**6.000.000**		**%**	**70.489.500**		**%**	**437.146.441**		**%**	**669.700.500**		**%**	**1.183.336.441**	-	**%**	**1.183.336.441**	-	**%**	**13,14**	**Bag. Perekonomian, Adm.Pemb. PBJ**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.801.576.560**	**100**	**%**	**123.755.178**		**%**	**6.000.000**		**%**	**6.000.000**		**%**	**34.292.373**		**%**	**12.000.000**		**%**	**58.292.373**	-	**%**	**58.292.373**	-	**%**	**3,24**	**Bag. Perekonomian**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	555.095.564	1	Dokumen	7.561.716	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	7.561.716		Dokumen	0	-	Dokumen	7.561.716	-	Dokumen	7.561.716	-	Dokumen	1,36	Bag. Perekonomian
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	836.974.668	1	Laporan	116.193.462	-	Laporan	6.000.000	-	Laporan	6.000.000		Laporan	26.730.657		Laporan	12.000.000	-	Laporan	50.730.657	-	Laporan	50.730.657	-	Laporan	6,06	Bag. Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen	409.506.328	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Bag. Perekonomian
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah dilaksanakan**	**100**	**%**	**6.367.086.872**	**100**	**%**	**853.511.940**		**%**	-		**%**	**64.489.500**		**%**	**96.051.300**		**%**	**570.600.500**		**%**	**731.141.300**	-	**%**	**731.141.300**	-	**%**	**11,48**	**Bag. Adm. Pemb.**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokumen	1.628.000.000	1	Dokumen	376.008.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	64.489.500		Dokumen	92.979.000		Dokumen	168.405.500	-	Dokumen	325.874.000	-	Dokumen	325.874.000	-	Dokumen	20,02	Bag. Adm. Pemb.
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8	Laporan	2.148.800.000	2	Laporan	398.405.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	381.325.000	-	Laporan	381.325.000	-	Laporan	381.325.000	-	Laporan	17,75	Bag. Adm. Pemb.
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	68	Laporan	2.590.286.872	17	Laporan	79.098.940	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	3.072.300		Laporan	20.870.000	-	Laporan	23.942.300	-	Laporan	23.942.300	-	Laporan	0,92	Bag. Adm. Pemb.
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**%**	**837.398.593**	**100**	**%**	**941.308.126**		**%**	-		**%**	-		**%**	**306.802.768**		**%**	**87.100.000**		**%**	**393.902.768**	-	**%**	**393.902.768**	-	**%**	**47,04**	**Bag. PBJ**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	440	Dokumen	460.593.162	110	Dokumen	491.153.906	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	140.694.922		Dokumen	7.100.000	-	Dokumen	147.794.922	-	Dokumen	147.794.922	-	Dokumen	32,09	Bag. PBJ
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	125.005.601	1	Dokumen	179.920.729	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	9.843.016		Dokumen	0	-	Dokumen	9.843.016	-	Dokumen	9.843.016	-	Dokumen	7,87	Bag. PBJ
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44	Orang	251.799.830	44	Orang	270.233.491	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	156.264.830		Orang	80.000.000	-	Orang	236.264.830	-	Orang	236.264.830	-	Orang	93,83	Bag. PBJ
4	**02**				**Sekretariat DPRK**				**181.134.056.344**			**64.931.351.350**		**0**	**5.793.004.074**		**0**	**7.166.793.814**		**0**	**28.573.853.592**		**0**	**25.452.626.604**		**0**	**66.986.278.084**	-	**0**	**66.986.278.084**	**#DIV/0!**	**0**	**36,98**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**157.941.771.881**	**100**	**%**	**44.662.557.002**		**%**	**5.793.004.074**		**%**	**2.582.017.159**		**%**	**21.212.864.990**		**%**	**12.780.076.743**		**%**	**42.367.962.966**	-	**%**	**42.367.962.966**	-	**%**	**26,83**	**Set. DPRK Banda Aceh**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**32.572.704**	**100**	**%**	**41.445.860**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.630.860**		**%**	**4.630.860**	-	**%**	**4.630.860**	-	**%**	**14,22**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	20	Dokumen	32.572.704	5	Dokumen	41.445.860	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	4.630.860	-	Dokumen	4.630.860	-	Dokumen	4.630.860	#VALUE!	Dokumen	14,22	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.599.751.756**	**100**	**%**	**6.603.586.459**		**%**	**1.501.981.453**		**%**	**366.317.010**		**%**	**3.141.593.101**		**%**	**1.548.429.964**		**%**	**6.558.321.528**	-	**%**	**6.558.321.528**	-	**%**	**21,43**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	21.867.351.756	12	Bulan	4.239.586.459	3	Bulan	1.027.785.120	3	Bulan	187.395.581		Bulan	2.349.652.566		Bulan	1.056.943.237	6	Bulan	4.621.776.504	6	Bulan	4.621.776.504	13	Bulan	21,14	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	8.732.400.000	11	Bulan	2.364.000.000	3	Bulan	474.196.333	3	Bulan	178.921.429		Bulan	791.940.535		Bulan	491.486.727	6	Bulan	1.936.545.024	6	Bulan	1.936.545.024	13	Bulan	22,18	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.894.400.000**	**100**	**%**	**364.200.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**91.000.000**		**%**	**189.060.000**		**%**	**280.060.000**	-	**%**	**280.060.000**	-	**%**	**14,78**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	384	Paket	435.200.000	96	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	1.459.200.000	15	Orang	364.200.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	91.000.000		Orang	189.060.000	-	Orang	280.060.000	-	Orang	280.060.000	-	Orang	19,19	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**42.464.789.352**	**100**	**%**	**11.944.174.222**		**%**	-		**%**	**596.088.250**		**%**	**5.545.302.789**		**%**	**3.975.160.529**		**%**	**10.116.551.568**	-	**%**	**10.116.551.568**	-	**%**	**23,82**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	112	Paket	140.444.220	28	Paket	26.298.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	8.447.000		Paket	17.825.000	-	Paket	26.272.000	-	Paket	26.272.000	-	Paket	18,71	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	576	Paket	3.070.336.000	144	Paket	1.062.375.334	-	Paket	-	82	Paket	436.288.250		Paket	261.490.334		Paket	107.148.000	82	Paket	804.926.584	82	Paket	804.926.584	14	Paket	26,22	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64	Paket	1.954.011.220	16	Paket	454.712.975	-	Paket	-	5	Paket	159.800.000		Paket	24.995.000		Paket	280.471.975	5	Paket	465.266.975	5	Paket	465.266.975	8	Paket	23,81	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2504	Laporan	37.299.997.912	626	Laporan	10.400.787.913	-	Laporan	-	-	Laporan	5.250.370.455		Laporan	3.569.715.554		Laporan	-	-	Laporan	8.820.086.009	-	Laporan	8.820.086.009	-	Laporan	23,65	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**4.465.520.000**	**100**	**%**	**190.462.902**		**%**	-		**%**	-		**%**	**179.957.902**		**%**	-		**%**	**179.957.902**	-	**%**	**179.957.902**	-	**%**	**4,03**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	1.320.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	1.200.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	140	Unit	1.945.520.000	35	Unit	190.462.902	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	179.957.902		Unit	0	-	Unit	179.957.902	-	Unit	179.957.902	-	Unit	9,25	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**9.506.642.065**	**100**	**%**	**2.930.558.430**		**%**	**202.315.400**		**%**	-		**%**	**1.382.522.637**		**%**	**1.200.615.011**		**%**	**2.785.453.048**	-	**%**	**2.785.453.048**	-	**%**	**29,30**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	2.732.800.000	36	Laporan	685.698.930	7	Laporan	131.800.400	-	Laporan	-		Laporan	393.039.637		Laporan	137.701.011	7	Laporan	662.541.048	7	Laporan	662.541.048	5	Laporan	24,24	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	6.773.842.065	12	Laporan	2.244.859.500	-	Laporan	70.515.000	-	Laporan	-		Laporan	989.483.000		Laporan	1.062.914.000	-	Laporan	2.122.912.000	-	Laporan	2.122.912.000	-	Laporan	31,34	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**8.411.206.244**	**100**	**%**	**3.371.020.224**		**%**	-		**%**	-		**%**	**2.355.396.125**		**%**	**930.160.179**		**%**	**3.285.556.304**	-	**%**	**3.285.556.304**	-	**%**	**39,06**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	1.881.301.440	15	Unit	845.537.778	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	341.739.489		Unit	243.332.643	-	Unit	585.072.132	-	Unit	585.072.132	-	Unit	31,10	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	96	Unit	31.062.024	24	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340	Unit	252.007.500	85	Unit	193.896.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	168.709.000		Unit	2.046.368.100	-	Unit	2.215.077.100	-	Unit	2.215.077.100	-	Unit	878,97	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	Unit	5.245.570.000	2	Unit	2.089.132.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	1.682.209.100		Unit	-1.359.540.564	-	Unit	322.668.536	-	Unit	322.668.536	-	Unit	6,15	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120	Unit	1.001.265.280	30	Unit	242.454.446	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	162.738.536		Unit		-	Unit	162.738.536	-	Unit	162.738.536	-	Unit	16,25	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**54.972.243.004**	**100**	**%**	**17.455.211.250**		**%**	**4.088.707.221**		**%**	**1.408.911.899**		**%**	**7.924.705.336**		**%**	**4.173.150.840**		**%**	**17.595.475.296**	-	**%**	**17.595.475.296**	-	**%**	**32,01**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	90	Orang/ Bulan	53.390.243.004	30	Orang/Bul	16.976.211.250	8	Orang/Bul	4.088.707.221	3	Orang/Bul	1.408.911.899		Orang/Bul	6.886.288.236		Orang/Bul	4.159.650.840	11	Orang/Bul	16.543.558.196	11	Orang/Bul	16.543.558.196	12	Orang/Bul	30,99	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	600	Paket	1.182.000.000	150	Paket	379.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	203.500.000		Paket	13.500.000	-	Paket	217.000.000	-	Paket	217.000.000	-	Paket	18,36	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120	Orang	400.000.000	30	Orang	100.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	834.917.100		Orang		-	Orang	834.917.100	-	Orang	834.917.100	-	Orang	208,73	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100**	**%**	**5.594.646.756**	**100**	**%**	**1.761.897.655**		**%**	-		**%**	**210.700.000**		**%**	**592.387.100**		**%**	**758.869.360**		**%**	**1.561.956.460**	-	**%**	**1.561.956.460**	-	**%**	**27,92**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72	Laporan	192.167.784	18	Laporan	79.841.895	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	32.580.000	-	Laporan	32.580.000	-	Laporan	32.580.000	-	Laporan	16,95	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	240	Laporan	3.751.278.972	60	Laporan	999.878.360	-	Laporan	-	13	Laporan	210.700.000		Laporan	271.130.000		Laporan	460.329.860	13	Laporan	942.159.860	13	Laporan	942.159.860	5	Laporan	25,12	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48	Paket	1.651.200.000	12	Paket	682.177.400	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	321.257.100		Paket	265.959.500	-	Paket	587.216.600	-	Paket	587.216.600	-	Paket	35,56	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD**	**100**	**%**	**23.192.284.463**	**100**	**%**	**20.268.794.348**		**%**	-		**%**	**4.584.776.655**		**%**	**7.360.988.602**		**%**	**12.672.549.861**		**%**	**24.618.315.118**	-	**%**	**24.618.315.118**	-	**%**	**106,15**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk**	**100**	**%**	**3.066.698.412**	**100**	**%**	**475.653.025**		**%**	-		**%**	-		**%**	**23.160.000**		**%**	**122.500.000**		**%**	**145.660.000**	-	**%**	**145.660.000**	-	**%**	**4,75**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60	Dokumen	123.600.000	15	Dokumen	20.099.755	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	0	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28	Dokumen	1.721.840.192	7	Dokumen	276.195.015	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	23.160.000		Dokumen	122.500.000	-	Dokumen	145.660.000	-	Dokumen	145.660.000	-	Dokumen	8,46	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	16	Dokumen	289.964.992	4	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	20	Dokumen	871.293.228	5	Dokumen	179.358.255	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	Dokumen	60.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran**	**100**	**%**	**1.260.823.060**	**100**	**%**	**345.572.677**		**%**	-		**%**	**103.983.255**		**%**	**1.641.746**		**%**	**312.396.866**		**%**	**418.021.867**	-	**%**	**418.021.867**	-	**%**	**33,15**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	189.725.600	1	Dokumen	48.032.916	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	601.556		Dokumen	262.227.031	-	Dokumen	262.828.587	-	Dokumen	262.828.587	-	Dokumen	138,53	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	189.033.380	1	Dokumen	758.345	-	Dokumen	-	-	Dokumen	483.255		Dokumen	275.090		Dokumen	19.500.000	-	Dokumen	20.258.345	-	Dokumen	20.258.345	-	Dokumen	10,72	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD	4	Dokumen	248.793.500	1	Dokumen	116.808.751	-	Dokumen	-	-	Dokumen	54.000.000		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	54.000.000	-	Dokumen	54.000.000	-	Dokumen	21,70	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan yang diluksanakan	4	Dokumen	247.628.944	1	Dokumen	78.957.130	-	Dokumen	-	-	Dokumen	17.050.000		Dokumen	0		Dokumen	16.919.400	-	Dokumen	33.969.400	-	Dokumen	33.969.400	-	Dokumen	13,72	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8	Dokumen	114.438.920	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan pertanggungjawa ban APBD	4	Dokumen	271.202.716	1	Dokumen	101.015.535	-	Dokumen	-	-	Dokumen	32.450.000		Dokumen	765.100		Dokumen	13.750.435	-	Dokumen	46.965.535	-	Dokumen	46.965.535	-	Dokumen	17,32	Set. DPRK Banda Aceh

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outtout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**%**	**545.046.208**	**100**	**%**	**8.933.691**		**%**	-		**%**	-		**%**	**8.933.691**		**%**	**5.070.450**		**%**	**14.004.141**	-	**%**	**14.004.141**	-	**%**	**2,57**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8	Laporan	30.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	8	Dokumen	242.354.000	2	Dokumen	8.933.691	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	8.933.691		Dokumen	5.070.450	-	Dokumen	14.004.141	-	Dokumen	14.004.141	-	Dokumen	5,78	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8	Dokumen	248.692.208	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	24.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**%**	**7.716.330.852**	**100**	**%**	**16.925.423.564**		**%**	-		**%**	**4.480.793.400**		**%**	**6.551.724.564**		**%**	**10.687.983.045**		**%**	**21.720.501.009**	-	**%**	**21.720.501.009**	-	**%**	**281,49**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	90	Dokumen	36.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	20	Dokumen	45.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	188	Dokumen	3.511.913.812	47	Dokumen	15.833.135.844	-	Dokumen	-	47	Dokumen	4.480.793.400		Dokumen	6.061.919.844		Dokumen	9.937.983.045	47	Dokumen	20.480.696.289	47	Dokumen	20.480.696.289	25	Dokumen	583,18	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	84	Orang	506.018.228	21	Orang	109.003.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	30.000.000		Orang	0	-	Orang	30.000.000	-	Orang	30.000.000	-	Orang	5,93	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24	Orang	864.000.000	6	Orang	194.400.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	86.400.000		Orang	0	-	Orang	86.400.000	-	Orang	86.400.000	-	Orang	10,00	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	104	Dokumen	2.663.154.864	26	Dokumen	576.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	162.000.000		Dokumen	750.000.000	-	Dokumen	912.000.000	-	Dokumen	912.000.000	-	Dokumen	34,25	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4	Dokumen	90.243.948	1	Dokumen	212.884.720	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	211.404.720		Dokumen	0	-	Dokumen	211.404.720	-	Dokumen	211.404.720	-	Dokumen	234,26	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang ditampung**	**600**	**Laporan**	**10.180.074.640**	**150**	**Laporan**	**2.472.974.290**		**Laporan**	-		**Laporan**	-		**Laporan**	**753.291.500**		**Laporan**	**1.526.599.500**		**Laporan**	**2.279.891.000**	-	**Laporan**	**2.279.891.000**	-	**Laporan**	**22,40**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	120	Laporan	132.700.000	30	Laporan	10.674.790	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	120	Dokumen	198.171.032	30	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	360	Dokumen	9.849.203.608	90	Dokumen	2.462.299.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	753.291.500		Dokumen	1.526.599.500	-	Dokumen	2.279.891.000	-	Dokumen	2.279.891.000	-	Dokumen	23,15	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana**	**100**	**%**	**114.613.748**	**100**	**%**	**40.237.101**		**%**	-		**%**	-		**%**	**22.237.101**		**%**	**18.000.000**		**%**	**40.237.101**	-	**%**	**40.237.101**	-	**%**	**35,11**	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	8	Dokumen	114.613.748	2	Dokumen	40.237.101	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	22.237.101		Dokumen	18.000.000	-	Dokumen	40.237.101	-	Dokumen	40.237.101	-	Dokumen	35,11	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerjasama Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**96.900.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	9	Dokumen	45.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	141	Dokumen	51.900.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas DPRD yang terlaksana**	**100**	**%**	**211.797.543**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Set. DPRK Banda Aceh**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120	Dokumen	105.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	360	Laporan	20.100.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	360	Dokumen	26.697.543	90	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	280	Dokumen	30.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Set. DPRK Banda Aceh
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	120	Dokumen	30.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	
6	**01**				**Inspektorat**				**41.561.194.912**			**8.971.123.621**		**0**	**1.621.059.298**		**0**	**2.498.168.448**		**0**	**1.929.100.997**		**0**	**2.003.044.462**		**0**	**8.051.373.205**	-	**0**	**8.051.373.205**	**#DIV/0!**	**0**	**19,37**	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**35.798.403.084**	**100**	**%**	**7.275.614.491**		**%**	**1.426.099.298**		**%**	**2.167.765.948**		**%**	**1.617.940.997**		**%**	**1.614.326.962**		**%**	**6.826.133.205**	-	**%**	**6.826.133.205**	-	**%**	**19,07**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**5.260.000**	**100**	**%**	**21.392.900**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**360.000**		**%**	**360.000**	-	**%**	**360.000**	-	**%**	**6,84**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20	Dokumen	5.260.000	5	Dokumen	21.392.900	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	360.000	-	Dokumen	360.000	-	Dokumen	360.000	-	Dokumen	6,84	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**33.247.665.348**	**100**		**6.451.600.475**		**0**	**1.384.860.511**		**0**	**2.001.626.126**		**0**	**1.502.330.936**		**0**	**1.396.273.386**		**0**	**6.285.090.959**	-	**0**	**6.285.090.959**	-	**0**	**18,90**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	Bulan	32.550.465.348	12	Bulan	6.278.160.475	3	Bulan	1.349.010.511	3	Bulan	1.959.851.126	3	Bulan	1.460.035.936	3	Bulan	1.348.813.386	12	Bulan	6.117.710.959	12	Bulan	6.117.710.959	25	Bulan	18,79	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	697.200.000	11	Bulan	173.440.000	3	Bulan	35.850.000	3	Bulan	41.775.000	3	Bulan	42.295.000	3	Bulan	47.460.000	12	Bulan	167.380.000	12	Bulan	167.380.000	25	Bulan	24,01	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**511.040.000**	**100**	**%**	**70.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.800.000**		**%**	-		**%**	**7.800.000**	-	**%**	**7.800.000**	-	**%**	**1,53**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	204	Paket	271.040.000	51	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	240.000.000	10	Orang	70.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	7.800.000		Orang	0	-	Orang	7.800.000	-	Orang	7.800.000	-	Orang	3,25	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**1.099.007.164**	**100**	**%**	**196.131.705**		**%**	**34.371.634**		**%**	**98.834.231**		**%**	**60.019.073**		**%**	**110.549.933**		**%**	**303.774.871**	-	**%**	**303.774.871**	-	**%**	**27,64**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan/bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	5.717.472	4	Paket	1.064.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.064.000		Paket	0	-	Paket	1.064.000	-	Paket	1.064.000	-	Paket	18,61	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	116.558.692	12	Paket	24.139.780	-	Paket	-	5	Paket	11.299.205	3	Paket	10.345.440	3	Paket	12.425.680	11	Paket	34.070.325	11	Paket	34.070.325	275	Paket	29,23	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Laporan	976.731.000	16	Laporan	170.927.925	2	Laporan	34.371.634	6	Laporan	87.535.026		Laporan	48.609.633	14	Laporan	98.124.253	22	Laporan	268.640.546	22	Laporan	268.640.546	34	Laporan	27,50	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**187.544.524**	**100**	**%**	**116.064.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	Unit	40.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	40	Unit	147.544.524	13	Unit	116.064.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**463.797.232**	**100**	**%**	**102.048.311**		**%**	**6.867.153**		**%**	**21.958.359**		**%**	**22.339.888**		**%**	**42.607.643**		**%**	**93.773.043**	-	**%**	**93.773.043**	-	**%**	**20,22**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	237.185.244	12	Laporan	58.216.311	1	Laporan	6.867.153	3	Laporan	13.713.359	3	Laporan	9.834.888	3	Laporan	11.104.643	10	Laporan	41.520.043	10	Laporan	41.520.043	21	Laporan	17,51	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	226.611.988	12	Laporan	43.832.000	-	Laporan	-	2	Laporan	8.245.000	3	Laporan	12.505.000	3	Laporan	31.503.000	8	Laporan	52.253.000	8	Laporan	52.253.000	17	Laporan	23,06	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**284.088.816**	**100**	**%**	**318.377.100**		**%**	-		**%**	**45.347.232**		**%**	**25.451.100**		**%**	**64.536.000**		**%**	**135.334.332**	-	**%**	**135.334.332**	-	**%**	**47,64**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	214.128.000	7	Unit	116.775.400	-	Unit	-	6	Unit	43.899.500		Unit	25.451.100		Unit	56.131.000	6	Unit	125.481.600	6	Unit	125.481.600	21	Unit	58,60	INSPEKTORAT

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
											I		II		III		IV													
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			Kinerja	Rp				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
6	01	01	2.09	06	Sub Kegatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	Unit	23.080.816	10	Unit	4.274.000	-	Unit	-	3	Unit	1.447.732		Unit	0	17	Unit	8.405.000	20	Unit	9.852.732	20	Unit	9.852.732	50	Unit	42,69	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Sub Kegatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direlihara/ direhabilitasi	4	Unit	46.880.000	1	Unit	197.327.700	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pengawasan yang Diselenggarakan secara Optimal**	**100**	**%**	**5.673.656.828**	**100**	**%**	**1.549.719.130**		**%**	**194.960.000**		**%**	**315.042.500**		**%**	**311.160.000**		**%**	**358.527.500**		**%**	**1.179.690.000**	**-**	**%**	**1.179.690.000**	**-**	**%**	**20,79**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**5.498.952.828**	**100**	**%**	**1.474.119.130**		**%**	**194.960.000**		**%**	**293.042.500**		**%**	**278.500.000**		**%**	**339.627.500**		**%**	**1.106.130.000**	**-**	**%**	**1.106.130.000**	**-**	**%**	**20,12**	**INSPEKTORAT**
6	01	02	2.01	01	Sub Kegatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	24	Laporan	305.750.000	6	Laporan	69.082.500	-	Laporan	-	-	Laporan	2.302.500		Laporan	4.100.000	3	Laporan	0	3	Laporan	6.402.500	3	Laporan	6.402.500	13	Laporan	2,09	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Sub Kegatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	456	Laporan	1.173.426.752	114	Laporan	383.426.000	33	Laporan	84.460.000	38	Laporan	97.540.000		Laporan	0	16	Laporan	119.230.000	87	Laporan	301.230.000	87	Laporan	301.230.000	19	Laporan	25,67	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Sub Kegatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	32	Laporan	691.100.000	5	Laporan	164.837.500	2	Laporan	33.100.000	2	Laporan	40.800.000		Laporan	38.700.000	1	Laporan	0	5	Laporan	112.600.000	5	Laporan	112.600.000	16	Laporan	16,29	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Sub Kegatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	48	Laporan	1.222.500.000	13	Laporan	304.960.000	3	Laporan	77.400.000	-	Laporan	-	5	Laporan	123.600.000	3	Laporan	49.382.500	11	Laporan	250.382.500	11	Laporan	250.382.500	23	Laporan	20,48	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Sub Kegatan Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	168	Laporan	875.200.000	45	Laporan	273.500.000	-	gampong	-	-	gampong	-	18	gampong	73.235.000	11	gampong	152.785.000	29	gampong	226.020.000	29	gampong	226.020.000	17	gampong	25,82	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Sub Kegatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	4	Kesepakatan	763.119.476	1	Kesepakatan	188.320.920	-	Kesepakatan	-	-	Kesepakatan	152.400.000		Kesepakatan	0		Kesepakatan	650.000	-	Kesepakatan	153.050.000	-	Kesepakatan	153.050.000	-	Kesepakatan	20,06	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Sub Kegatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	24	Dokumen	467.856.600	4	Dokumen	89.992.210	-	Dokumen	-	-	Dokumen	38.865.000	1	Dokumen	17.580.000	1	Dokumen	56.445.000	1	Dokumen	56.445.000	4	Dokumen	12,06	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase kasus pengaduan dan kerugian negara/daerah yang diselesaikan**	**100**	**%**	**174.704.000**	**100**	**%**	**75.600.000**		**%**	**-**		**%**	**22.000.000**		**%**	**32.660.000**		**%**	**18.900.000**		**%**	**73.560.000**	**-**	**%**	**73.560.000**	**-**	**%**	**42,11**	**INSPEKTORAT**
6	01	02	2.02	01	Sub Kegatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/daerah yang ditangani	4	Laporan	23.504.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Sub Kegatan Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	56	Laporan	151.200.000	14	Laporan	75.600.000	-	Laporan	-	8	Laporan	22.000.000	4	Laporan	32.660.000		Laporan	18.900.000	12	Laporan	73.560.000	12	Laporan	73.560.000	21	Laporan	48,65	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5**	**100**	**%**	**89.135.000**	**100**	**%**	**145.790.000**		**%**	**-**		**%**	**15.360.000**		**%**	**-**		**%**	**30.190.000**		**%**	**45.550.000**	**-**	**%**	**45.550.000**	**-**	**%**	**51,10**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Level kapabilitas APIP**	**3**	**Level**	**9.500.000**	**3**	**Level**	**-**		**Level**	**-**		**Level**	**-**		**Level**			**Level**			**Level**	**-**	**Level**	**-**	**-**	**Level**	**-**	**INSPEKTORAT**
6	01	03	2.01	01	Sub Kegatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	8	Rekomendasi	9.500.000	2	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-		Rekomendasi			Rekomendasi	0	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Penerapan SPIP secara memadai pada OPD yang ditetapkan**	**100**	**%**	**79.635.000**	**100**	**%**	**145.790.000**		**%**	**-**		**%**	**15.360.000**		**%**	**-**		**%**	**30.190.000**		**%**	**45.550.000**	**-**	**%**	**45.550.000**	**-**	**%**	**57,20**	**INSPEKTORAT**
6	01	03	2.02	01	Sub Kegatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	40	Perangkat Daerah	51.135.000	10	perangkatdaerah	19.129.000	-	perangkatdaerah	-	-	perangkatdaerah	-	1	perangkatdaerah		1	peranglkatdaerah	17.990.000	2	perangkatdaerah	17.990.000	2	perangkatdaerah	17.990.000	5	perangkatdaerah	35,18	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Sub Kegatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	56	Perangkat Daerah	9.500.000	14	perangkatdaerah	-	-	perangkatdaerah	-	-	perangkatdaerah	-		perangkatdaerah			peranglkatdaerah		-	perangkatdaerah	-	-	perangkatdaerah	-	-	perangkatdaerah	-	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Sub Kegatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	16	Kegiatan	9.500.000	4	Kegiatan	126.661.000	-	Kegiatan	-	4	Kegiatan	15.360.000		Kegiatan			Kegiatan	12.200.000	4	Kegiatan	27.560.000	4	Kegiatan	27.560.000	25	Kegiatan	290,11	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Sub Kegatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	40	Perangkat Daerah	9.500.000	10	perangkadaerah	-	-	perangkadaerah	-	-	perangkadaerah	-		perangkadaerah			perangkadaerah		-	perangkadaerah	-	-	perangkadaerah	-	-	perangkadaerah	-	INSPEKTORAT
7	**01**				**Kecamatan Kuta Alam**				**14.546.348.820**			**2.972.344.890**	**0**		**458.779.207**	**0**		**763.061.032**		**0**	**642.806.632**		**0**	**853.517.932**		**0**	**2.718.164.803**	**-**	**0**	**2.718.164.803**	**#DIV/0!**	**0**	**18,69**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**13.825.934.600**	**100**	**%**	**2.794.322.901**		**%**	**444.379.207**		**%**	**730.539.768**		**%**	**617.606.632**		**%**	**748.795.082**		**%**	**2.541.320.689**	**-**	**%**	**2.541.320.689**	**-**	**%**	**18,38**	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**17.292.640**	**100**	**%**	**3.383.760**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	dokumen	17.292.640	4	Dokumen	3.383.760	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**12.935.636.360**	**100**	**%**	**2.569.770.533**		**%**	**429.388.506**		**%**	**686.454.437**		**%**	**587.958.401**		**%**	**642.402.664**		**%**	**2.346.204.008**	**-**	**%**	**2.346.204.008**	**-**	**%**	**18,14**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	12.058.436.360	12	Bulan	2.352.090.533	3	Bulan	391.863.506	3	Bulan	644.079.437	3	Bulan	541.653.401	3	Bulan	459.422.664	12	Bulan	2.037.019.008	12	Bulan	2.037.019.008	25	Bulan	16,89	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	877.200.000	12	Bulan	217.680.000	3	Bulan	37.525.000	3	Bulan	42.375.000	3	Bulan	46.305.000	3	Bulan	182.980.000	12	Bulan	309.185.000	12	Bulan	309.185.000	25	Bulan	35,25	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kesejahteraan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**70.800.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	paket	70.800.000	30	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**117.167.288**	**100**	**%**	**45.961.046**		**%**	**-**		**%**	**18.597.000**		**%**	**3.151.365**		**%**	**27.309.790**		**%**	**49.058.155**	**-**	**%**	**49.058.155**	**-**	**%**	**41,87**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	3.544.716	5	Paket	1.878.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.878.000		Paket	0	-	Paket	1.878.000	-	Paket	1.878.000	-	Paket	52,98	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	9.643.192	4	Paket	2.107.745	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.273.365		Paket	4.029.790	-	Paket	5.303.155	-	Paket	5.303.155	-	Paket	54,99	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	103.979.380	2	Laporan	41.975.301	-	Laporan	-	2	Laporan	18.597.000	1	Laporan	0	1	Laporan	23.280.000	4	Laporan	41.877.000	4	Laporan	41.877.000	50	Laporan	40,27	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**104.868.000**	**100**	**%**	**38.731.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**16.418.000**		**%**	**16.418.000**	**-**	**%**	**16.418.000**	**-**	**%**	**15,66**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	Unit	104.868.000	8	Unit	38.731.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	16.418.000	-	Unit	16.418.000	-	Unit	16.418.000	-	Unit	15,66	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**402.586.312**	**100**	**%**	**92.245.855**		**%**	**10.678.701**		**%**	**12.210.624**		**%**	**16.719.866**		**%**	**51.046.228**		**%**	**90.655.419**	**-**	**%**	**90.655.419**	**-**	**%**	**22,52**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	299.520.000	12	Bulan	73.800.000	3	Bulan	8.619.701	3	Bulan	9.894.769	3	Bulan	14.087.866	3	Bulan	25.056.228	12	Bulan	57.658.564	12	Bulan	57.658.564	25	Bulan	19,25	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	103.066.312	12	Bulan	18.445.855	3	Bulan	2.059.000	3	Bulan	2.315.855	3	Bulan	2.632.000	3	Bulan	25.990.000	12	Bulan	32.996.855	12	Bulan	32.996.855	25	Bulan	32,02	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**177.584.000**	**100**	**%**	**44.230.707**		**%**	**4.312.000**		**%**	**13.277.707**		**%**	**9.777.000**		**%**	**11.618.400**		**%**	**38.985.107**	**-**	**%**	**38.985.107**	**-**	**%**	**21,95**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lanangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	83.744.000	2	Unit	33.872.000	-	Unit	4.312.000	2	Unit	5.000.000	2	Unit	8.624.000	2	Unit	11.188.400	6	Unit	29.124.400	6	Unit	29.124.400	75	Unit	34,78	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	11.032.000	5	Unit	10.358.707	-	Unit	-	5	Unit	8.277.707	5	Unit	1.153.000	5	Unit	430.000	15	Unit	9.860.707	15	Unit	9.860.707	75	Unit	89,38	Kec. Kuta Alam
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	82.808.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**%**	**264.590.328**	**100**	**%**	**26.569.264**		**%**	**-**		**%**	**15.421.264**		**%**	**-**		**%**	**77.016.000**		**%**	**92.437.264**	**-**	**%**	**92.437.264**	**-**	**%**	**34,94**	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**133.432.928**	**100**	**%**	**26.569.264**		**%**	**-**		**%**	**15.421.264**		**%**	**-**		**%**	**77.016.000**		**%**	**92.437.264**	**-**	**%**	**92.437.264**	**-**	**%**	**69,28**	**Kec. Kuta Alam**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	dokumen	133.432.928	2	Dokumen	26.569.264		Dokumen			Dokumen	15.421.264		Dokumen	0		Dokumen	77.016.000	-	Dokumen	92.437.264	-	Dokumen	92.437.264	-	Dokumen	69,28	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**50.500.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	dokumen	50.500.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**80.657.400**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Dokumen	32.500.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Alam
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	48.157.400	3	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**88.697.384**	**100**	**%**	**83.331.250**		**%**	**14.400.000**		**%**	**9.600.000**		**%**	**19.200.000**		**%**	**9.371.750**		**%**	**52.571.750**	-	**%**	**52.571.750**	-	**%**	**59,27**	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**39.044.228**	**100**	**%**	**14.530.750**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.273.250**		**%**	**1.273.250**	-	**%**	**1.273.250**	-	**%**	**3,26**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	LembagaKemasyarakatan	8.566.000	2	Lembaga	1.273.250	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga			Lembaga	1.273.250	-	Lembaga	1.273.250	-	Lembaga	1.273.250	-	Lembaga	14,86	Kec. Kuta Alam
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	30.478.228	1	Laporan	13.257.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Alam
7	01	03	2.01	xx	Lomba Gammawar	Jumlah Lomba PKK yang di Laksanakan	-	Jumlah Lomba	-	-	Jumlah Lomba	-	-	Jumlah Lomba	-	-	Jumlah Lomba	-		Jumlah Lomba			Jumlah Lomba		-	Jumlah Lomba	-	-	Jumlah Lomba	-	#DIV/0!	Jumlah Lomba	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**33.712.800**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
7	01	03	2.05	01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	dokumen	33.712.800	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	11.200.000	100	%	-		%	-		%	-		%			%			%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Kuta Alam
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	Keluarga	11.200.000	2	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	#DIV/0!	Keluarga	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**4.740.356**	**100**	**%**	**68.800.500**		**%**	**14.400.000**		**%**	**9.600.000**		**%**	**19.200.000**		**%**	**8.098.500**		**%**	**51.298.500**	-	**%**	**51.298.500**	-	**%**	**1.082,17**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1	dokumen	1.586.276	1	Dokumen	65.698.500	-	Dokumen	14.400.000	-	Dokumen	9.600.000		Dokumen	19.200.000		Dokumen	8.098.500	-	Dokumen	51.298.500	-	Dokumen	51.298.500	-	Dokumen	3.233,89	Kec. Kuta Alam
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1	Laporan	3.154.080	1	Laporan	3.102.000	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan		1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**18.754.250**		**%**	-		**%**	**7.500.000**		**%**	**6.000.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**18.000.000**	-	**%**	**18.000.000**	-	**%**	**225,00**	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**18.754.250**		**%**	-		**%**	**7.500.000**		**%**	**6.000.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**18.000.000**	-	**%**	**18.000.000**	-	**%**	**225,00**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wlayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	8.000.000	1	Laporan	18.754.250	-	Laporan	-	-	Laporan	7.500.000		Laporan	6.000.000		Laporan	4.500.000	-	Laporan	18.000.000	-	Laporan	18.000.000	#DIV/0!	Laporan	225,00	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**7.700.000**	**100**	**%**	**2.236.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**7.700.000**	**100**	**%**	**2.236.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
7	01	04	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen	7.700.000	1	Dokumen	2.236.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**335.426.508**	**100**	**%**	**47.131.225**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**13.835.100**		**%**	**13.835.100**	-	**%**	**13.835.100**	-	**%**	**4,12**	**Kec. Kuta Alam**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**335.426.508**	**100**	**%**	**47.131.225**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**13.835.100**		**%**	**13.835.100**	-	**%**	**13.835.100**	-	**%**	**4,12**	**Kec. Kuta Alam**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi adminsitrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	dokumen	55.302.100	2	Dokumen	6.503.625	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	90.789.016	3	Dokumen	15.992.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	dokumen	38.883.064	1	Dokumen	13.835.100	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	13.835.100	-	Dokumen	13.835.100	-	Dokumen	13.835.100	#DIV/0!	Dokumen	35,58	Kec. Kuta Alam
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	dokumen	33.884.600	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	dokumen	26.069.212	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	dokumen	90.498.516	1	Dokumen	10.800.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Alam
9	**01**	**02**			**Program Syariat Islam Aceh**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**16.000.000**	**78**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**16.000.000**	**78**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Alam**
9	01	02	7.02	04	Pelaksana MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	0	orang	16.000.000	45	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	#DIV/0!	Orang	-	Kec. Kuta Alam
7	**01**				**Kecamatan Baiturrahman**				**12.474.168.456**			**2.628.277.800**		**0**	**510.059.699**		**0**	**738.060.609**		**0**	**612.898.951**		**0**	**670.462.738**		**0**	**2.531.481.997**	-	**0**	**2.531.481.997**	**#DIV/0!**	**0**	**20,29**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**11.648.626.608**	**100**	**%**	**2.508.401.875**		**%**	**491.159.699**		**%**	**722.142.609**		**%**	**591.571.951**		**%**	**639.387.738**		**%**	**2.444.261.997**	-	**%**	**2.444.261.997**	-	**%**	**20,98**	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**76.007.360**	**100**	**%**	**10.448.360**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.098.360**		**%**	**3.098.360**	-	**%**	**3.098.360**	-	**%**	**4,08**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	76.007.360	12	Dokumen	10.448.360		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	3.098.360	-	Dokumen	3.098.360	-	Dokumen	3.098.360	-	Dokumen	4,08	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**10.737.042.124**	**100**	**%**	**2.326.892.917**		**%**	**474.527.349**		**%**	**691.114.146**		**%**	**557.210.386**		**%**	**543.848.369**		**%**	**2.266.700.250**	-	**%**	**2.266.700.250**	-	**%**	**21,11**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	9.568.242.124	12	Orang/bulan	2.109.212.917	3	Orang/bulan	433.577.349	3	Orang/bulan	650.164.146	3	Orang/bulan	508.400.386	3	Orang/bulan	489.578.369	12	Orang/bulan	2.081.720.250	12	Orang/bulan	2.081.720.250	25	Orang/bulan	21,76	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	1.168.800.000	12	Dokumen	217.680.000	3	Dokumen	40.950.000	3	Dokumen	40.950.000	3	Dokumen	48.810.000	3	Dokumen	54.270.000	12	Dokumen	184.980.000	12	Dokumen	184.980.000	25	Dokumen	15,83	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**87.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	87.000.000	2	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**205.545.140**	**100**	**%**	**47.266.555**		**%**	-		**%**	**9.406.320**		**%**	**6.879.700**		**%**	**28.991.860**		**%**	**45.277.880**	-	**%**	**45.277.880**	-	**%**	**22,03**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	9.384.900	1	Paket	1.753.000	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	575.000		Paket	1.178.000	1	Paket	1.753.000	1	Paket	1.753.000	25	Paket	18,68	Kec. Baiturrahman

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	56.160.240	2	Paket	10.513.555	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	6.304.700	1	Paket	4.217.710	2	Paket	10.522.410	2	Paket	10.522.410	25	Paket	18,74	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Lap	140.000.000	21	Laporan	35.000.000	-	Laporan	-	6	Laporan	9.406.320		Laporan	0	1	Laporan	23.596.150	7	Laporan	33.002.470	7	Laporan	33.002.470	88	Laporan	23,57	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**12.963.008**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	12.963.008	4	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**378.951.616**	**100**	**%**	**76.326.043**		**%**	**11.675.350**		**%**	**13.306.143**		**%**	**16.514.865**		**%**	**42.021.949**		**%**	**83.518.307**	-	**%**	**83.518.307**	-	**%**	**22,04**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	238.086.172	12	Laporan	58.441.543	2	Laporan	7.573.350	2	Laporan	11.466.143		Laporan	12.936.365		Laporan	16.954.949	4	Laporan	48.930.807	4	Laporan	48.930.807	8	Laporan	20,55	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	140.865.444	12	Laporan	17.884.500	1	Laporan	4.102.000	1	Laporan	1.840.000		Laporan	3.578.500		Laporan	25.067.000	2	Laporan	34.587.500	2	Laporan	34.587.500	4	Laporan	24,55	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**151.117.360**	**100**	**%**	**47.468.000**		**%**	**4.957.000**		**%**	**8.316.000**		**%**	**10.967.000**		**%**	**21.427.200**		**%**	**45.667.200**	-	**%**	**45.667.200**	-	**%**	**30,22**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	100.928.000	3	Unit	41.055.000	-	Unit	2.182.000	1	Unit	8.316.000	1	Unit	10.967.000	2	Unit	17.789.200	4	Unit	39.254.200	4	Unit	39.254.200	33	Unit	38,89	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	Unit	50.189.360	24	Unit	6.413.000	-	Unit	2.775.000	-	Unit	-	10	Unit	0	14	Unit	3.638.000	24	Unit	6.413.000	24	Unit	6.413.000	25	Unit	12,78	Kec. Baiturrahman
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**211.112.632**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	**#DIV/0!**	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**80.140.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dok	80.140.000	3	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**100**	**%**	**20.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	20.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**100**	**%**	**110.972.632**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Dok	16.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Lap	94.972.632	3	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**208.287.336**	**100**	**%**	**82.550.925**		**%**	**14.400.000**		**%**	**12.918.000**		**%**	**14.577.000**		**%**	**17.700.000**		**%**	**59.595.000**	-	**%**	**59.595.000**	-	**%**	**28,61**	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**65.968.834**	**100**	**%**	**19.688.925**		**%**	-		**%**	**3.318.000**		**%**	**177.000**		**%**	-		**%**	**3.495.000**	-	**%**	**3.495.000**	-	**%**	**5,30**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	LembagaKemasyarakatan	10.072.000	10	orang	3.495.000	-	orang	-	70	orang	3.318.000		orang	177.000	70	orang	0	140	orang	3.495.000	140	orang	3.495.000	350	orang	34,70	Kec. Baiturrahman
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Lap	55.896.834	3	Laporan	16.193.925	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**87.944.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	Dok	87.944.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	Kec. Baiturrahman
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	39.290.502	-	%	-	-	%	-	-	%	-		%			%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Baiturrahman
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200	Kel	39.290.502	-	Kel	-	-	Kel	-	-	Kel	-		Kel			Kel		-	Kel	-	-	Kel	-	-	Kel	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**15.084.000**	**100**	**%**	**62.862.000**		**%**	**14.400.000**		**%**	**9.600.000**		**%**	**14.400.000**		**%**	**17.700.000**		**%**	**56.100.000**	-	**%**	**56.100.000**	-	**%**	**371,92**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	4	Dok	5.440.000	1	Dokumen	60.565.000	-	Dokumen	14.400.000	-	Dokumen	9.600.000		Dokumen	14.400.000		Dokumen	17.700.000	-	Dokumen	56.100.000	-	Dokumen	56.100.000	-	Dokumen	1.031,25	Kec. Baiturrahman
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	4	Lap	9.644.000	1	Laporan	2.297.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**19.750.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**3.000.000**		**%**	**6.750.000**		**%**	**5.500.000**		**%**	**19.750.000**	-	**%**	**19.750.000**	-	**%**	**246,88**	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**19.750.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**3.000.000**		**%**	**6.750.000**		**%**	**5.500.000**		**%**	**19.750.000**	-	**%**	**19.750.000**	-	**%**	**246,88**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	8.000.000	-	Laporan	19.750.000	-	Laporan	4.500.000	-	Laporan	3.000.000		Laporan	6.750.000		Laporan	5.500.000	-	Laporan	19.750.000	-	Laporan	19.750.000	-	Laporan	246,88	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**11.500.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**11.500.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	11.500.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**374.641.880**	**100**	**%**	**17.575.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.875.000**		**%**	**7.875.000**	-	**%**	**7.875.000**	-	**%**	**2,10**	**Kec. Baiturrahman**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**374.641.880**	**100**	**%**	**17.575.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.875.000**		**%**	**7.875.000**	-	**%**	**7.875.000**	-	**%**	**2,10**	**Kec. Baiturrahman**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dok	65.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	Dok	215.815.440	2	Dokumen	8.725.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40	Dok	33.961.080	10	Dokumen	7.875.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	7.875.000	-	Dokumen	7.875.000	-	Dokumen	7.875.000	-	Dokumen	23,19	Kec. Baiturrahman
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	Dok	28.750.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Dok	20.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	Dok	-	#DIV/0!	Dok	-	Kec. Baiturrahman
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dok	11.115.360	1	Dokumen	975.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Baiturrahman
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**12.000.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**12.000.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Baiturrahman**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	180	Orang	12.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Baiturrahman
7	**01**				**Kecamatan Meuraxa**				**12.302.754.284**			**2.672.029.890**		**0**	**512.876.223**		**0**	**316.993.818**		**0**	**1.057.676.134**		**0**	**592.139.241**			**0**	**2.479.685.416**	-	**0**	**2.479.685.416**	**#DIV/0!**	**0**	**20,16**	
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**11.485.660.884**	**100**	**%**	**2.523.842.165**		**%**	**500.276.223**		**%**	**304.393.818**		**%**	**1.022.676.669**		**%**	**561.745.401**			**%**	**2.389.092.111**	-	**%**	**2.389.092.111**	-	**%**	**20,80**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun**	**100**	**%**	**18.751.076**	**4**	**Dokumen**	**6.538.755**		**Dokumen**	-		**Dokumen**	-		**Dokumen**	**975.000**		**Dokumen**	**3.181.755**			**Dokumen**	**4.156.755**	-	**Dokumen**	**4.156.755**	-	**Dokumen**	**22,17**	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	18.751.076	4	%	6.538.755	-	%	-	-	%	-		%	975.000		%	3.181.755	-	%	4.156.755	-	%	4.156.755	-	%	22,17	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**10.772.609.844**	**12**	**%**	**2.317.057.410**		**%**	**484.383.368**		**%**	**302.060.762**		**%**	**959.399.875**		**%**	**497.360.437**			**%**	**2.243.204.442**	-	**%**	**2.243.204.442**	-	**%**	**20,82**	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	9.991.409.844	12	Bulan	2.147.377.410	3	Bulan	476.383.368	3	Bulan	277.635.762		Bulan	925.074.875		Bulan	453.230.437	6	Bulan	2.132.324.442	6	Bulan	2.132.324.442	13	Bulan	21,34	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	781.200.000	12	Bulan	169.680.000	3	Bulan	8.000.000	3	Bulan	24.425.000		Bulan	34.325.000		Bulan	44.130.000	6	Bulan	110.880.000	6	Bulan	110.880.000	13	Bulan	14,19	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	paket	72.000.000	100	%	-	-	%	-	-	%	-		%			%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**93.766.328**	**100**	**%**	**54.363.640**		**%**	-		**%**	-		**%**	**22.814.420**		**%**	**23.156.790**		**%**	**45.971.210**	-	**%**	**45.971.210**	-	**%**	**49,03**	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	5.868.520	4	Paket	1.465.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	708.000		Paket	1.424.000	-	Paket	2.132.000	-	Paket	2.132.000	-	Paket	36,33	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	28.313.024	2	Laporan	8.119.335	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	906.000		Laporan	9.750.280	-	Laporan	10.656.280	-	Laporan	10.656.280	-	Laporan	37,64	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	59.584.784	100	%	44.779.305	-	%	-	-	%	-		%	21.200.420		%	11.982.510	-	%	33.182.930	-	%	33.182.930	-	%	55,69	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**19.972.000**	-	**%**	**26.500.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	20.7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	-	6	Unit	26.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Meuraxa
7	01	01	20.7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	unit	19.972.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Meuraxa
7	01	01	20.7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Meuraxa
7	01	01	20.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	-	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**393.864.816**	**12**	**Laporan**	**87.223.360**		**Laporan**	**12.812.855**		**Laporan**	**2.333.056**		**Laporan**	**24.803.874**		**Laporan**	**28.201.519**		**Laporan**	**68.151.304**	-	**Laporan**	**68.151.304**	-	**Laporan**	**17,30**	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	224.460.000	12	Laporan	62.135.360	2	Laporan	7.529.855	1	Laporan	2.333.056		Laporan	14.730.874		Laporan	7.915.519	3	Laporan	32.509.304	3	Laporan	32.509.304	6	Laporan	14,48	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	169.404.816	100	%	25.088.000	20	%	5.283.000	-	%	-		%	10.073.000		%	20.286.000	20	%	35.642.000	20	%	35.642.000	42	%	21,04	Kec. Meuraxa
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**114.696.820**	**100**	**%**	**32.159.000**		**%**	**3.080.000**		**%**	-		**%**	**14.683.500**		**%**	**9.844.900**		**%**	**27.608.400**	-	**%**	**27.608.400**	-	**%**	**24,07**	**Kec. Meuraxa**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	76.750.000	1	Unit	26.227.000	7	Unit	3.080.000	-	Unit	-		Unit	10.436.500		Unit	8.538.900	7	Unit	22.055.400	7	Unit	22.055.400	233	Unit	28,74	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	unit	27.446.820	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	4.247.000		Unit	1.306.000	-	Unit	5.553.000	-	Unit	5.553.000	-	Unit	20,23	Kec. Meuraxa
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	10.500.000	15	unit	5.932.000	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**02**			**Program Penyelengaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**	**100**	**%**	**289.269.200**	**100**	**%**	**11.250.090**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.016.000**		**%**	**4.016.000**	-	**%**	**4.016.000**	-	**%**	**1,39**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelengaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**94.930.000**	**2**	**%**	**7.426.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.016.000**		**%**	**4.016.000**	-	**%**	**4.016.000**	-	**%**	**4,23**	**Kec. Meuraxa**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	Dok	94.930.000	2	Dok	7.426.000	-	Dok	-	-	Dok	-		Dok			Dok	4.016.000	-	Dok	4.016.000	-	Dok	4.016.000	-	Dok	4,23	Kec. Meuraxa
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**1.655.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**			**%**			**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	1.655.000	100	%	-	-	%	-	-	%	-		%			%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan pada camat**	**Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100**	**%**	**192.684.200**	**100**	**%**	**3.824.090**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Meuraxa**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	Dok	39.810.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Laporan	13.500.000	3	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Lap	139.374.200	3	Laporan	3.824.090	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**%**	**125.364.200**	**100**	**%**	**87.215.965**		**%**	**9.600.000**		**%**	**9.600.000**		**%**	**28.999.465**		**%**	**14.728.000**		**%**	**62.927.465**	-	**%**	**62.927.465**	-	**%**	**50,20**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat**	**100**	**%**	**108.814.200**	**100**	**%**	**28.287.965**		**%**	-		**%**	-		**%**	**4.999.465**		**%**	-		**%**	**4.999.465**	-	**%**	**4.999.465**	-	**%**	**4,59**	**Kec. Meuraxa**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musywarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Desa	64	Laporan	33.954.200	16	Lembaga	7.119.465	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga	4.999.465		Lembaga	0	-	Lembaga	4.999.465	-	Lembaga	4.999.465	-	Lembaga	14,72	Kec. Meuraxa
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	74.860.000	2	Laporan	21.168.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**3.310.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Meuraxa**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Laporan	1.655.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4	Laporan	1.655.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**6.620.000**	-	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Meuraxa**
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	dok	3.310.000	-	dok	-		dok			dok			dok			dok		-	dok	-	-	dok	-	-	dok	-	Kec. Meuraxa

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
										I		II		III		IV										
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Kinerja				
7	01	03	2.05	02	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah dokumen penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	4 dok	1.655.000	- dok	-		dok		dok		dok		- dok	-	- dok	-	- dok	-		Kec. Meuraxa
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 dok	1.655.000	-		0		0		0		0		- 0	-	- 0	-	- 0	-		Kec. Meuraxa
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**1**	**6.620.000**	**- dok**	**58.928.000**		**dok**	**9.600.000**	**dok**	**9.600.000**	**dok**	**24.000.000**	**dok**	**14.728.000**	**- dok**	**57.928.000**	**- dok**	**57.928.000**	**- dok**	**875,05**	**Kec. Meuraxa**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggraan Mukim	16 dok	3.310.000	4 Dokumen	58.928.000	-	Dokumen	9.600.000	Dokumen	24.000.000	Dokumen	14.728.000	- Dokumen	57.928.000	- Dokumen	57.928.000	- Dokumen	1.750,09	Kec. Meuraxa
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	16 laporan	3.310.000	- %	-	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	- %	-	- %	-	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PELAKSANAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**% 32.500.000**	**100**	**% 21.600.000**		**%**	**3.000.000**	**%**	**3.000.000**	**%**	**6.000.000**	**%**	**6.000.000**		**% 18.000.000**	**- %**	**18.000.000**	**- %**	**55,38**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**6.500.000**	**100**	**%**	**21.600.000**		**%**	**3.000.000**	**%**	**3.000.000**	**%**	**6.000.000**	**%**	**6.000.000**		**% 18.000.000**	**- %**	**18.000.000**	**- %**	**276,92**	**Kec. Meuraxa**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	3.250.000	1	Laporan	21.600.000	-	Laporan	3.000.000	Laporan	3.000.000	Laporan	6.000.000	Laporan	6.000.000	-	Laporan	18.000.000	-	Laporan	18.000.000	-	Laporan	553,85	Kec. Meuraxa
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	3.250.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Meuraxa**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	8.000.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Meuraxa**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	5.000.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	5.000.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**04**	**7.04**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Meuraxa**
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	8.000.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**32.500.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**32.500.000**	**16**	**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**	**Kec. Meuraxa**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	64	Orang	3.500.000	16	Orang	-	-	Orang	-	Orang		Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64	Orang	3.500.000	16	Orang	-	-	Orang	-	Orang		Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	64	Orang	6.250.000	16	Orang	-	-	Orang	-	Orang		Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional ,dan Nasional	64	Orang	3.250.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan		Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	Laporan	6.250.000	16	Lembaga Masyarakat	-	-	Lembaga Masyarakat	-	Lembaga Masyarakat		Lembaga Masyarakat		-	Lembaga Masyarakat	-	-	Lembaga Masyarakat	-	-	Lembaga Masyarakat	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	64	Lembaga Masyarakat	3.250.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dokumen	3.250.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	3.250.000	100	%	-	-	%	-	%		%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
7	**01**	**06**			**Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN**	**100**	**%**	**334.150.000**	**100**	**%**	**28.121.670**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**5.649.840**		**%**	**5.649.840**	**-**	**%**	**5.649.840**	**-**	**%**	**1,69**	**Kec. Meuraxa**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**%**	**334.150.000**	**100**	**%**	**28.121.670**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**5.649.840**		**%**	**5.649.840**	**-**	**%**	**5.649.840**	**-**	**%**	**1,69**	**Kec. Meuraxa**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	dok	23.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	keg	23.310.000	1	Dokumen	3.624.780	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok	161.930.000	4	Dokumen	9.417.500	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	16	dok	26.620.000	2	Dokumen	5.649.840	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	5.649.840	-	Dokumen	5.649.840	-	Dokumen	5.649.840	-	Dokumen	21,22	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	8	dok	26.620.000	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	8	dok	26.620.000	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Meuraxa
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dok	46.050.000	-	Dok	8.391.355	-	Dok	-	Dok		Dok		-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	Kec. Meuraxa
9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN							-		0		0		0		0			0	-	-	0	-	-	#DIV/0!	0	-	
9					KEKHUSUSAN ACEH					-		-		0		0		0		0			0	-	-	0	-	-	#DIV/0!	0	-	

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
9	01	02			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Syariat Islam di kecamatan	82,7	%	3.310.000	-	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Alquran	82,7	%	3.310.000	-	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Meuraxa
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang Yang Mengikuti MTQ	284	Orang	3.310.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	Kec. Meuraxa
7	01				Kecamatan Syiah Kuala				13.292.863.988			2.945.936.560		0	487.465.010		0	221.548.809		0	1.293.652.108		0	688.333.102		0	2.690.999.029		0	2.690.999.029	#DIV/0!	0	20,24	Kec. Syiah Kuala
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	12.625.572.917	100	%	2.774.638.145		%	465.865.010		%	209.848.809		%	1.236.518.228		%	659.861.102		%	2.572.093.149	-	%	2.572.093.149	-	%	20,37	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpasun	100	%	38.431.636	100	%	2.456.780		%	-		%	-		%	-		%	3.892.780		%	3.892.780	-	%	3.892.780	-	%	10,13	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	38.431.636	2	Dokumen	2.456.780	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	3.892.780	-	Dokumen	3.892.780	-	Dokumen	3.892.780	-	Dokumen	10,13	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.650.297.828	100	%	2.499.754.961		%	465.865.010		%	209.848.809		%	1.134.041.393		%	542.852.195		%	2.352.607.407	-	%	2.352.607.407	-	%	20,19	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	10.749.577.828	12	Bulan	2.334.414.961	3	Bulan	438.915.010	3	Bulan	190.373.809		Bulan	1.066.906.393		Bulan	496.352.195	6	Bulan	2.192.547.407	6	Bulan	2.192.547.407	13	Bulan	20,40	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	900.720.000	12	Bulan	165.340.000	3	Bulan	26.950.000	3	Bulan	19.475.000		Bulan	67.135.000		Bulan	46.500.000	6	Bulan	160.060.000	6	Bulan	160.060.000	13	Bulan	17,77	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	55.000.000	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	Paket	55.000.000	23	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	147.931.380	100	%	64.245.225		%	-		%	-		%	14.546.215		%	14.989.235		%	29.535.450	-	%	29.535.450	-	%	19,97	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4.676.884	3	Paket	2.936.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.034.000		Paket	2.144.000	-	Paket	3.178.000	-	Paket	3.178.000	-	Paket	67,95	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	43.254.496	4	Paket	11.309.225	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	4.907.895		Paket	3.659.235	-	Paket	8.567.130	-	Paket	8.567.130	-	Paket	19,81	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	100.000.000	2	Laporan	50.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	8.604.320		Laporan	9.186.000	-	Laporan	17.790.320	-	Laporan	17.790.320	-	Laporan	17,79	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	130.286.313	100	%	33.000.000		%	-		%	-		%	-		%	33.000.000		%	33.000.000	-	%	33.000.000	-	%	25,33	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	25.706.996	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2.100.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	92.479.317	3	Unit	33.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	33.000.000	-	Unit	33.000.000	-	Unit	33.000.000	-	Unit	35,68	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	459.249.868	100	%	124.315.579		%	-		%	-		%	68.491.820		%	38.870.492		%	107.362.312	-	%	107.362.312	-	%	23,38	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	274.961.564	12	Laporan	73.806.079	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	41.708.820		Laporan	12.750.492	-	Laporan	54.459.312	-	Laporan	54.459.312	-	Laporan	19,81	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	184.288.304	12	Laporan	50.509.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	26.783.000		Laporan	26.120.000	-	Laporan	52.903.000	-	Laporan	52.903.000	-	Laporan	28,71	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	144.375.892	100	%	50.865.600		%	-		%	-		%	19.438.800		%	26.256.400		%	45.695.200	-	%	45.695.200	-	%	31,65	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	105.674.400	3	Unit	43.050.600	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	19.438.800		Unit	18.441.400	-	Unit	37.880.200	-	Unit	37.880.200	-	Unit	35,85	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	34.701.492	20	Unit	7.815.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	7.815.000	-	Unit	7.815.000	-	Unit	7.815.000	-	Unit	22,52	Kec. Syiah Kuala
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	4.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	143.929.191	100	%	11.405.000		%	-		%	-		%	11.405.000		%	-		%	11.405.000	-	%	11.405.000	-	%	7,92	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	74.280.000	100	%	11.405.000		%	-		%	-		%	11.405.000		%	-		%	11.405.000	-	%	11.405.000	-	%	15,35	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	Dokumen	74.280.000	12	Dokumen	11.405.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	11.405.000		Dokumen	0	-	Dokumen	11.405.000	-	Dokumen	11.405.000	-	Dokumen	15,35	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%	6.000.000	-	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	48	Dokumen	6.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	63.649.191	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Dokumen	4.838.935	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	Laporan	58.810.256	4	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	224.961.880	100	%	110.368.410		%	21.600.000		%	7.200.000		%	38.228.880		%	22.100.000		%	89.128.880	-	%	89.128.880	-	%	39,62	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	115.866.464	100	%	20.068.910		%	-		%	-		%	1.829.380		%	-		%	1.829.380	-	%	1.829.380	-	%	1,58	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Laporan	18.781.396	10	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	1.829.380		Laporan	0	-	Laporan	1.829.380	-	Laporan	1.829.380	-	Laporan	9,74	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	97.085.068	2	Laporan	20.068.910	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100	%	77.706.500	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	77.706.500	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	20.126.916	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80	keluarga	20.126.916	20	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100	%	11.262.000	100	%	90.299.500		%	21.600.000		%	7.200.000		%	36.399.500		%	22.100.000		%	87.299.500	-	%	87.299.500	-	%	775,17	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	4	Dokumen	8.325.000	1	Dokumen	89.162.000	-	Dokumen	21.600.000	-	Dokumen	7.200.000		Dokumen	35.262.000		Dokumen	22.100.000	-	Dokumen	86.162.000	-	Dokumen	86.162.000	-	Dokumen	1.034,98	Kec. Syiah Kuala
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1	Laporan	2.937.000	1	Laporan	1.137.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	1.137.500		Laporan	0	-	Laporan	1.137.500	-	Laporan	1.137.500	-	Laporan	38,73	Kec. Syiah Kuala
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	5.000.000	-	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Syiah Kuala

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV											
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**5.000.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Syiah Kuala**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	laporan	5.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-		laporan			laporan		-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Kec. Syiah Kuala
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**19.122.000**		**%**	**-**		**%**	**4.500.000**		**%**	**7.500.000**		**%**	**6.372.000**		**%**	**18.372.000**	**-**	**%**	**18.372.000**	**-**	**%**	**229,65**	**Kec. Syiah Kuala**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**19.122.000**		**%**	**-**		**%**	**4.500.000**		**%**	**7.500.000**		**%**	**6.372.000**		**%**	**18.372.000**	**-**	**%**	**18.372.000**	**-**	**%**	**229,65**	**Kec. Syiah Kuala**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	laporan	8.000.000	6	Laporan	19.122.000	-	Laporan	-	-	Laporan	4.500.000		Laporan	7.500.000		Laporan	6.372.000	-	Laporan	18.372.000	-	Laporan	18.372.000	-	Laporan	229,65	Kec. Syiah Kuala
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**262.500.000**	**100**	**%**	**30.403.005**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Syiah Kuala**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**262.500.000**	**100**	**%**	**30.403.005**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Syiah Kuala**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	Dokumen	39.382.103	3	Dokumen	5.612.705	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	118.950.000	1	Dokumen	12.532.440	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Dokumen	11.795.707	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	Dokumen		1	Dokumen	6.564.860	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Dokumen		1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	16.200.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dokumen	2.821.806	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	73.350.384	1	Dokumen	5.693.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Syiah Kuala
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**23.000.000**	**78,27**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Syiah Kuala**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Aloquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Aloquran**	**100**	**%**	**23.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Syiah Kuala**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	42	orang	23.000.000	40	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Syiah Kuala
7	**01**				**Kecamatan Banda Raya**				**12.953.851.732**			**2.926.478.055**		**600.053.625**		**0**	**891.371.901**		**0**	**717.771.339**		**0**	**765.852.713**		**0**	**2.975.049.578**	**-**	**0**	**2.975.049.578**	**#DIV/0!**	**0**	**22,97**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**12.012.975.979**	**100**	**%**	**2.806.352.555**		**%**	**600.053.625**		**%**	**883.991.901**		**%**	**717.771.339**		**%**	**713.819.323**		**%**	**2.915.636.188**	**-**	**%**	**2.915.636.188**	**-**	**%**	**24,27**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**28.747.456**	**100**	**%**	**5.761.120**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**2.281.120**		**%**	**2.281.120**	**-**	**%**	**2.281.120**	**-**	**%**	**7,94**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	28.747.456	4	Dokumen	5.761.120	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	2.281.120	-	Dokumen	2.281.120	-	Dokumen	2.281.120	-	Dokumen	7,94	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**11.333.131.248**	**100**	**%**	**2.624.855.545**		**%**	**600.053.625**		**%**	**854.563.924**		**%**	**681.737.710**		**%**	**643.417.916**		**%**	**2.779.773.175**	**-**	**%**	**2.779.773.175**	**-**	**%**	**24,53**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	10.335.931.248	12	Bulan	2.401.575.545	3	Bulan	550.203.625	3	Bulan	813.313.924		Bulan	623.977.710		Bulan	589.797.916	6	Bulan	2.577.293.175	6	Bulan	2.577.293.175	13	Bulan	24,94	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	997.200.000	11	Bulan	223.280.000	3	Bulan	49.850.000	3	Bulan	41.250.000		Bulan	57.760.000		Bulan	53.620.000	6	Bulan	202.480.000	6	Bulan	202.480.000	13	Bulan	20,30	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**50.600.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	Paket	50.600.000	26	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**137.353.292**	**100**	**%**	**47.977.890**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**14.347.285**		**%**	**25.510.560**		**%**	**39.857.845**	**-**	**%**	**39.857.845**	**-**	**%**	**29,02**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	7.567.700	5	Paket	1.407.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	924.000	-	Paket	924.000	-	Paket	924.000	-	Paket	12,21	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	19.785.592	7	Paket	7.070.890	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	4.110.505		Paket	0	-	Paket	4.110.505	-	Paket	4.110.505	-	Paket	20,78	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	110.000.000	2	Laporan	39.500.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	10.236.780		Laporan	24.586.560	-	Laporan	34.823.340	-	Laporan	34.823.340	-	Laporan	31,66	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-		0	-	-	0	-		0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**303.327.736**	**100**	**%**	**72.488.000**		**%**	**-**		**%**	**18.050.177**		**%**	**12.474.344**		**%**	**24.572.531**		**%**	**55.097.052**	**-**	**%**	**55.097.052**	**-**	**%**	**18,16**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	163.200.000	12	Laporan	40.800.000	-	Laporan	-	4	Laporan	12.773.177		Laporan	6.935.344		Laporan	7.075.531	4	Laporan	26.784.052	4	Laporan	26.784.052	8	Laporan	16,41	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	140.127.736	12	Laporan	31.688.000	-	Laporan	-	2	Laporan	5.277.000		Laporan	5.539.000		Laporan	17.497.000	2	Laporan	28.313.000	2	Laporan	28.313.000	4	Laporan	20,21	Kec. Banda Raya
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**157.816.247**	**100**	**%**	**55.270.000**		**%**	**-**		**%**	**11.377.800**		**%**	**9.212.000**		**%**	**18.037.196**		**%**	**38.626.996**	**-**	**%**	**38.626.996**	**-**	**%**	**24,48**	**Kec. Banda Raya**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	114.112.000	4	Unit	48.106.000	-	Unit	-	1	Unit	9.413.800		Unit	9.212.000		Unit	13.973.196	1	Unit	32.598.996	1	Unit	32.598.996	6	Unit	28,57	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	18.345.088	15	Unit	7.164.000	-	Unit	-	5	Unit	1.964.000		Unit			Unit	4.064.000	5	Unit	6.028.000	5	Unit	6.028.000	8	Unit	32,86	Kec. Banda Raya
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	25.359.159	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**	**100**	**%**	**165.601.300**	**100**	**%**	**14.853.010**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**5.720.000**		**%**	**5.720.000**	**-**	**%**	**5.720.000**	**-**	**%**	**3,45**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**102.000.000**	**100**	**%**	**5.720.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**5.720.000**		**%**	**5.720.000**	**-**	**%**	**5.720.000**	**-**	**%**	**5,61**	**Kec. Banda Raya**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	Dok	102.000.000	12	Dokumen	5.720.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	5.720.000	-	Dokumen	5.720.000	-	Dokumen	5.720.000	-	Dokumen	5,61	Kec. Banda Raya

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**17.500.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	17.500.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100**	**%**	**46.101.300**	**100**	**-**	**9.133.010**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Dok	13.606.442	-	-	-		0			0			0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Kec. Banda Raya
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	Lap	32.494.858	4	Laporan	9.133.010	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**%**	**308.841.777**	**100**	**%**	**30.257.000**		**%**	**-**		**%**	**1.380.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**1.380.000**	-	**%**	**1.380.000**	-	**%**	**0,45**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat**	**100**	**%**	**188.946.996**	**100**	**%**	**30.257.000**		**%**	**-**		**%**	**1.380.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**1.380.000**	-	**%**	**1.380.000**	-	**%**	**0,73**	**Kec. Banda Raya**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Laporan	27.279.680	-	Laporan	1.380.000	-	Laporan	-	-	Laporan	1.380.000		Laporan	0		Laporan	0	-	Laporan	1.380.000	-	Laporan	1.380.000	-	Laporan	5,06	Kec. Banda Raya
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	161.667.316	2	Laporan	28.877.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**33.000.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	33.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**100**	**%**	**78.441.728**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200	Keluarga	78.441.728	50	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**8.453.053**	-	-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Kec. Banda Raya**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1	Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Kec. Banda Raya
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1	Laporan	3.453.053	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PELAKSANAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**32.000.000**	-	-	**45.891.840**		**0**	-		**0**	**6.000.000**		**0**	-		**0**	**38.841.840**		**0**	**44.841.840**	-	**0**	**44.841.840**	-	**0**	**140,13**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**32.000.000**	-	-	**45.891.840**		**0**	-		**0**	**6.000.000**		**0**	-		**0**	**38.841.840**		**0**	**44.841.840**	-	**0**	**44.841.840**	-	**0**	**140,13**	**Kec. Banda Raya**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	32.000.000	3	Laporan	45.891.840	-	Laporan	-	-	Laporan	6.000.000		Laporan			Laporan	38.841.840	-	Laporan	44.841.840	-	Laporan	44.841.840	-	Laporan	140,13	Kec. Banda Raya
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**32.000.000**	-	-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**32.000.000**	-	-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Kec. Banda Raya**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	32.000.000	1	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN**	**100**	**%**	**385.432.676**	**100**	**%**	**29.123.650**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.471.550**		**%**	**7.471.550**	-	**%**	**7.471.550**	-	**%**	**1,94**	**Kec. Banda Raya**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**%**	**385.432.676**	**10**	**%**	**29.123.650**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.471.550**		**%**	**7.471.550**	-	**%**	**7.471.550**	-	**%**	**1,94**	**Kec. Banda Raya**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40	Dokumen	67.098.761	10	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40	Dokumen	187.591.491	10	Dokumen	15.258.925	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40	Dokumen	33.075.144	10	Dokumen	7.921.550	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	7.471.550	-	Dokumen	7.471.550	-	Dokumen	7.471.550	-	Dokumen	22,59	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	32.134.484	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dokumen	18.490.820	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	47.041.976	2	Dokumen	5.943.175	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Banda Raya
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**Persentase Syariat Islam di kecamatan**	**83**	**%**	**17.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**17.000.000**	**78,27**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Kec. Banda Raya**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	180	Orang	17.000.000	45	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Banda Raya
7	**01**				**Kecamatan Kuta Raja**				**11.198.884.676**			**2.308.853.824**		**0**	**414.634.082**		**0**	**37.891.191**		**0**	**1.059.809.722**		**0**	**550.458.490**		**0**	**2.062.793.485**	-	**0**	**2.062.793.485**	**#DIV/0!**	**0**	**18,42**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**10.373.607.048**	**100**	**%**	**2.173.527.589**		**%**	**406.834.082**		**%**	**27.891.191**		**%**	**1.030.174.232**		**%**	**498.860.490**		**%**	**1.963.759.995**	-	**%**	**1.963.759.995**	-	**%**	**18,93**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**4.772.624**	**100**	**%**	**3.379.470**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	4.772.624	2	Dokumen	3.379.470	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**9.733.390.776**	**100**	**%**	**2.003.572.196**		**%**	**392.023.945**		**%**	**24.731.071**		**%**	**1.010.254.702**		**%**	**423.061.647**		**%**	**1.850.071.365**	-	**%**	**1.850.071.365**	-	**%**	**19,01**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bln	9.087.070.776	12	Bulan	1.868.092.196	3	Bulan	368.073.945	3	Bulan	19.256.071	3	Bulan	947.659.702	3	Bulan	387.221.647	12	Bulan	1.722.211.365	12	Bulan	1.722.211.365	25	Bulan	18,95	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	646.320.000	12	Bulan	135.480.000	3	Bulan	23.950.000	3	Bulan	5.475.000	3	Bulan	62.595.000	3	Bulan	35.840.000	12	Bulan	127.860.000	12	Bulan	127.860.000	25	Bulan	19,78	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**39.600.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	Paket	39.600.000	18	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**101.994.888**	**100**	**%**	**35.533.385**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**17.607.685**		**%**	**17.607.685**	-	**%**	**17.607.685**	-	**%**	**17,26**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.835.516	3	Paket	3.321.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	0	1	Paket	2.612.000	1	Paket	2.612.000	1	Paket	2.612.000	8	Paket	24,11	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	11.159.372	4	Paket	4.212.385	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket		2	Paket	2.119.685	3	Paket	2.119.685	3	Paket	2.119.685	19	Paket	18,99	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	80.000.000	2	Laporan	28.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan		1	Laporan	12.876.000	1	Laporan	12.876.000	1	Laporan	12.876.000	13	Laporan	16,10	Kec. Kuta Raja

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**17.778.668**	**100**	**%**	**6.063.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	17.778.668	1	Unit	6.063.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**296.603.372**	**100**	**%**	**69.070.993**		**%**	**9.650.137**		**%**	**2.137.120**		**%**	**10.637.030**		**%**	**40.911.158**		**%**	**63.335.445**	-	**%**	**63.335.445**	-	**%**	**21,35**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	175.667.972	12	Laporan	43.916.993	1	Laporan	4.293.137	1	Laporan	2.137.120	3	Laporan	9.137.030	3	Laporan	12.284.158	8	Laporan	27.851.445	8	Laporan	27.851.445	17	Laporan	15,85	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	120.935.400	12	Laporan	25.154.000	2	Laporan	5.357.000	-	Laporan	-	3	Laporan	1.500.000	3	Laporan	28.627.000	8	Laporan	35.484.000	8	Laporan	35.484.000	17	Laporan	29,34	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**179.466.720**	**100**	**%**	**55.908.545**		**%**	**5.160.000**		**%**	**1.023.000**		**%**	**9.282.500**		**%**	**17.280.000**		**%**	**32.745.500**	-	**%**	**32.745.500**	-	**%**	**18,25**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	68.260.000	1	Unit	29.359.045	-	Unit	5.160.000	3	Unit	-	3	Unit	9.282.500	3	Unit	13.688.000	9	Unit	28.130.500	9	Unit	28.130.500	300	Unit	41,21	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	3.446.000	-	Unit	-	6	Unit	1.023.000		Unit	0	7	Unit	3.592.000	13	Unit	4.615.000	13	Unit	4.615.000	65	Unit	33,48	Kec. Kuta Raja
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	97.424.308	1	Unit	23.103.500	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PROGRAM ENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**%**	**115.000.000**	**100**	**%**	**7.677.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**11.608.000**		**%**	**11.608.000**	-	**%**	**11.608.000**	-	**%**	**10,09**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**02**	**2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**74.600.000**	**100**	**%**	**4.610.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**11.608.000**		**%**	**11.608.000**	-	**%**	**11.608.000**	-	**%**	**15,56**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	Dokumen	74.600.000	12	Dokumen	4.610.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	12	Dokumen			Dokumen	11.608.000	12	Dokumen	11.608.000	12	Dokumen	11.608.000	25	Dokumen	15,56	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**	**2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**25.800.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	48	Dokumen	25.800.000	12	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**14.600.000**	**100**	**%**	**3.067.500**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	01	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Dokumen	3.800.000	1	Laporan	367.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Raja
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	Laporan	10.800.000	4	Laporan	2.700.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**214.011.316**	**100**	**%**	**64.752.260**		**%**	**4.800.000**		**%**	-		**%**	**20.635.490**		**%**	**9.600.000**		**%**	**35.035.490**	-	**%**	**35.035.490**	-	**%**	**16,37**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**140.326.316**	**100**	**%**	**34.952.260**		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.235.490**		**%**	-		**%**	**5.235.490**	-	**%**	**5.235.490**	-	**%**	**3,73**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	LembagaKemasyarakatan	23.311.316	6	Lembaga	5.235.490	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga	5.235.490		Lembaga	0	-	Lembaga	5.235.490	-	Lembaga	5.235.490	-	Lembaga	22,46	Kec. Kuta Raja
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	117.015.000	2	Laporan	29.716.770	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**	**2.05**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**53.585.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	
7	01	03	2.05	02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	53.585.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	3.600.000	100	%	-	-	%	-	-	%	-		%			%		-	%	-	-	%	-	-	%	-	
7	01	03	2.06	03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4	Dokumen	3.600.000	20	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**03**	**7.04**	**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**16.500.000**	**100**	**%**	**29.800.000**		**%**	**4.800.000**		**%**	-		**%**	**15.400.000**		**%**	**9.600.000**		**%**	**29.800.000**	-	**%**	**29.800.000**	-	**%**	**180,61**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	03	7.04	01 Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	4	Dokumen	8.250.000	1	Dokumen	29.800.000	-	Dokumen	4.800.000	-	Dokumen	-		Dokumen	15.400.000	1	Dokumen	9.600.000	1	Dokumen	29.800.000	1	Dokumen	29.800.000	25	Dokumen	361,21	Kec. Kuta Raja
7	01	03	7.04	04 Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	4	Laporan	8.250.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	1	Laporan			Laporan		1	Laporan	-	1	Laporan	-	25	Laporan	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**9.600.000**	-		**29.950.000**		**0**	**3.000.000**		**0**	**10.000.000**		**0**	**9.000.000**		**0**	**7.950.000**		**0**	**29.950.000**	-	**0**	**29.950.000**	-	**0**	**311,98**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**04**	**7.03**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**9.600.000**	-		**29.950.000**		**0**	**3.000.000**		**0**	**10.000.000**		**0**	**9.000.000**		**0**	**7.950.000**		**0**	**29.950.000**	-	**0**	**29.950.000**	-	**0**	**311,98**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	04	7.03	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Dokumen	9.600.000	6	Laporan	29.950.000	-	Laporan	3.000.000	-	Laporan	10.000.000		Laporan	9.000.000		Laporan	7.950.000	-	Laporan	29.950.000	-	Laporan	29.950.000	-	Laporan	311,98	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**8.000.000**	-		-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**05**	**2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	-		-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Kec. Kuta Raja**
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	8.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	2	Dokumen		2	Dokumen		4	Dokumen	-	4	Dokumen	-	33	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**	**06**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**278.586.312**	**100**	**%**	**32.946.475**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**22.440.000**		**%**	**22.440.000**	-	**%**	**22.440.000**	-	**%**	**8,05**	**Kec. Kuta Raja**
7	**01**	**06**	**2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**278.586.312**	**100**	**%**	**32.946.475**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**22.440.000**		**%**	**22.440.000**	-	**%**	**22.440.000**	-	**%**	**8,05**	**Kec. Kuta Raja**
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	37.850.000	3	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	38.000.000	3	Dokumen	15.632.995	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	14.025.000	-	Dokumen	14.025.000	-	Dokumen	14.025.000	-	Dokumen	36,91	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	Dokumen	33.229.734	1	Dokumen	3.900.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	8.415.000	-	Dokumen	8.415.000	-	Dokumen	8.415.000	-	Dokumen	25,32	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	32.256.578	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
7	01	06	2.01	08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dokumen	33.450.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	103.800.000	1	Dokumen	13.413.480	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Kuta Raja
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**200.000.000**	**78,27**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Kuta Raja**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**200.000.000**	**78,27**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Kuta Raja**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	12	Dokumen	200.000.000	42	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Kuta Raja
7	**01**				**Kecamatan Jaya Baru**				**12.679.966.884**			**2.632.041.096**		**0**	**489.378.571**		**0**	**303.470.361**		**0**	**1.072.482.204**		**0**	**598.355.544**		**0**	**2.463.686.680**	**-**	**0**	**2.463.686.680**	**#DIV/0!**	**0**	**19,43**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai**	**C**	**11.946.180.184**	**100**	**%**	**2.489.629.811**		**%**	**489.378.571**		**%**	**285.962.896**		**%**	**1.014.606.204**		**%**	**578.835.244**		**%**	**2.368.782.915**	**-**	**%**	**2.368.782.915**	**#VALUE!**	**%**	**19,83**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**7**	**dok**	**56.347.936**	**100**	**%**	**4.761.645**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	56.347.936	7	Dokumen	4.761.645	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**11.322.424.624**	**100**	**%**	**2.260.932.166**		**%**	**476.478.069**		**%**	**276.714.498**		**%**	**930.061.942**		**%**	**480.584.385**		**%**	**2.163.838.894**	**-**	**%**	**2.163.838.894**	**-**	**%**	**19,11**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	10.541.224.624	12	Bulan	2.098.852.166	3	Bulan	437.928.069	3	Bulan	265.239.498	3	Bulan	868.126.942	3	Bulan	441.164.385	12	Bulan	2.012.458.894	12	Bulan	2.012.458.894	25	Bulan	19,09	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	781.200.000	12	Bulan	162.080.000	3	Bulan	38.550.000	3	Bulan	11.475.000	3	Bulan	61.935.000	3	Bulan	39.420.000	12	Bulan	151.380.000	12	Bulan	151.380.000	25	Bulan	19,38	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**50.600.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	stel	50.600.000	23	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**94.294.352**	**100**	**%**	**52.751.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**28.331.469**		**%**	**23.371.520**		**%**	**51.702.989**	**-**	**%**	**51.702.989**	**-**	**%**	**54,83**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bln	3.043.996	12	Paket	2.465.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	757.000		Paket	1.708.000	-	Paket	2.465.000	-	Paket	2.465.000	-	Paket	80,98	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bln	31.773.244	12	Paket	12.186.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	9.937.655		Paket	9.997.520	-	Paket	19.935.175	-	Paket	19.935.175	-	Paket	62,74	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	59.477.112	2	Laporan	38.100.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	17.636.814		Laporan	11.666.000	-	Laporan	29.302.814	-	Laporan	29.302.814	-	Laporan	49,27	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**8.000.000**	**100**	**%**	**24.875.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**9.850.000**		**%**	**9.850.000**	**-**	**%**	**9.850.000**	**-**	**%**	**123,13**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	jenis	2.000.000	1	Unit	24.875.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	9.850.000	-	Unit	9.850.000	-	Unit	9.850.000	-	Unit	492,50	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**322.946.332**	**100**	**%**	**90.973.000**		**%**	**12.040.502**		**%**	**7.998.398**		**%**	**31.544.693**		**%**	**37.504.639**		**%**	**89.088.232**	**-**	**%**	**89.088.232**	**-**	**%**	**27,59**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln	215.624.000	12	Laporan	61.326.000	2	Laporan	7.976.502	2	Laporan	7.728.398		Laporan	20.907.693		Laporan	12.500.639	4	Laporan	49.113.232	4	Laporan	49.113.232	33	Laporan	22,78	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bln	107.322.332	12	Laporan	29.647.000	2	Laporan	4.064.000	-	Laporan	270.000		Laporan	10.637.000		Laporan	25.004.000	2	Laporan	39.975.000	2	Laporan	39.975.000	17	Laporan	37,25	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**91.566.940**	**100**	**%**	**55.337.000**		**%**	**860.000**		**%**	**1.250.000**		**%**	**24.668.100**		**%**	**27.524.700**		**%**	**54.302.800**	**-**	**%**	**54.302.800**	**#DIV/0!**	**%**	**59,30**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	80.536.000	3	Unit	50.864.000	-	Unit	-	-	Unit	1.250.000		Unit	21.055.100		Unit	25.770.700	-	Unit	48.075.800	-	Unit	48.075.800	-	Unit	59,69	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20		9.030.940	10	Unit	4.473.000	4	Unit	860.000	-	Unit	-		Unit	3.613.000		Unit	1.754.000	4	Unit	6.227.000	4	Unit	6.227.000	20	Unit	68,95	Kec. Jaya Baru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Publik**	**100**	**%**	**150.802.500**	**100**	**%**	**23.641.045**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**10.576.000**		**%**	**474.800**		**%**	**11.050.800**	**-**	**%**	**11.050.800**	**-**	**%**	**7,33**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**37.290.500**	**100**	**%**	**11.050.800**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**10.576.000**		**%**	**474.800**		**%**	**11.050.800**	**-**	**%**	**11.050.800**	**-**	**%**	**29,63**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	37.290.500	4	Dokumen	11.050.800	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	10.576.000		Dokumen	474.800	-	Dokumen	11.050.800	-	Dokumen	11.050.800	-	Dokumen	29,63	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**113.512.000**	**100**	**%**	**12.590.245**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Kali	18.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	keg	95.512.000	2	Laporan	12.590.245	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**115.950.000**	**100**	**%**	**60.087.965**		**%**	**-**		**%**	**3.507.465**		**%**	**28.800.000**		**%**	**18.180.500**		**%**	**50.487.965**	**-**	**%**	**50.487.965**	**-**	**%**	**43,54**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**75.700.000**	**100**	**%**	**3.507.465**		**%**	**-**		**%**	**3.507.465**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**3.507.465**	**-**	**%**	**3.507.465**	**-**	**%**	**4,63**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Laporan	15.700.000		Laporan	3.507.465	-	Laporan	-	-	Laporan	3.507.465		Laporan	0		Laporan	0	-	Laporan	3.507.465	-	Laporan	3.507.465	-	Laporan	22,34	Kec. Jaya Baru
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Lap	60.000.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**2**	**kali**	**3.500.000**	**-**	**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	03	2.05	02	Penangan Covid 19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	kali	3.500.000	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-		kali	-		kali	-	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-	Kec. Jaya Baru
7	01	03	2.06		Pemberdayaan Dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		2	kali	3.500.000	-	kali	-		kali	-		kali	-		kali	-		kali	-		kali	-	-	kali	-	-	kali	-	Kec. Jaya Baru
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2	kali	3.500.000	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-		kali	-		kali	-	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Jumlah Pemberdayaan Mukim**	**2**	**kali**	**33.250.000**	**-**	**kali**	**56.580.500**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**28.800.000**		**kali**	**18.180.500**		**kali**	**46.980.500**	**-**	**kali**	**46.980.500**	**-**	**kali**	**141,29**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	2	kali	18.750.000	1	Dokumen	54.421.855	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	28.800.000		Dokumen	16.021.855	-	Dokumen	44.821.855	-	Dokumen	44.821.855	-	Dokumen	239,05	Kec. Jaya Baru
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	2	kali	14.500.000	1	Laporan	2.158.645	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	2.158.645	-	Laporan	2.158.645	-	Laporan	2.158.645	-	Laporan	14,89	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2**	**kali**	**33.000.000**	**-**	**kali**	**28.998.000**		**kali**	**-**		**kali**	**14.000.000**		**kali**	**18.500.000**		**kali**	**(5.002.000)**		**kali**	**27.498.000**	**-**	**kali**	**27.498.000**	**-**	**kali**	**83,33**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2**	**kali**	**33.000.000**	**-**	**kali**	**28.998.000**		**kali**	**-**		**kali**	**14.000.000**		**kali**	**18.500.000**		**kali**	**(5.002.000)**		**kali**	**27.498.000**	**-**	**kali**	**27.498.000**	**-**	**kali**	**83,33**	**Kec. Jaya Baru**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja						
7	01	04	7.03	04	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	kali	33.000.000	1	Laporan	28.998.000	-	Laporan	-	-	Laporan	14.000.000		Laporan	18.500.000		Laporan	-5.002.000	-	Laporan	27.498.000	-	Laporan	27.498.000	-	Laporan	83,33	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2**	**kali**	**33.000.000**	**-**	**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2**	**kali**	**33.000.000**	**-**	**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	kali	33.000.000	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-		kali			kali		-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**390.034.200**	**100**		**29.684.275**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**5.867.000**		**0**	**5.867.000**	**-**	**0**	**5.867.000**	**-**	**0**	**1,50**	**Kec. Jaya Baru**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**390.034.200**	**100**	**%**	**29.684.275**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**5.867.000**		**%**	**5.867.000**	**-**	**%**	**5.867.000**	**-**	**%**	**1,50**	**Kec. Jaya Baru**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Dokumen	62.850.000	1	Dokumen	1.327.215	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	3.293.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dokumen	265.657.000	3	Dokumen	7.069.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	5.867.000	-	Dokumen	5.867.000	-	Dokumen	5.867.000	-	Dokumen	2,21	Kec. Jaya Baru
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dokumen	1.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dokumen	1.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	56.234.200	1	Dokumen	21.288.060	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Jaya Baru
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**11.000.000**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**11.000.000**	**-**	**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Kec. Jaya Baru**
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang Yang Mengikuti MTQ	1	Kali	11.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Kec. Jaya Baru
7	**01**				**Kecamatan Lueng Bata**				**12.688.755.183**			**2.636.439.733**		**0**	**481.308.705**		**0**	**613.426.576**		**0**	**601.725.782**		**0**	**596.088.759**		**0**	**2.292.549.822**	**-**	**0**	**2.292.549.822**	**#DIV/0!**	**0**	**18,18**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**11.717.391.148**	**100**	**%**	**2.497.173.733**		**%**	**471.108.705**		**%**	**611.026.576**		**%**	**588.150.782**		**%**	**563.158.759**		**%**	**2.233.444.822**	**-**	**%**	**2.233.444.822**	**-**	**%**	**19,06**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**70.274.216**	**100**	**%**	**18.085.855**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**1.508.355**		**%**	**1.508.355**	**-**	**%**	**1.508.355**	**-**	**%**	**2,15**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	70.274.216	3	Dokumen	18.085.855		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	1.508.355	-	Dokumen	1.508.355	-	Dokumen	1.508.355	-	Dokumen	2,15	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**10.854.086.136**	**100**	**%**	**2.163.329.412**		**%**	**460.288.332**		**%**	**593.931.340**		**%**	**536.035.752**		**%**	**464.688.011**		**%**	**2.054.943.435**	**-**	**%**	**2.054.943.435**	**-**	**%**	**18,93**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	10.184.486.136	12	Bulan	1.996.169.412	3	Bulan	433.338.332	3	Bulan	548.031.340		Bulan	493.975.752		Bulan	418.618.011	6	Bulan	1.893.963.435	6	Bulan	1.893.963.435	13	Bulan	18,60	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	669.600.000	12	Bulan	167.160.000	3	Bulan	26.950.000	3	Bulan	45.900.000		Bulan	42.060.000		Bulan	46.070.000	6	Bulan	160.980.000	6	Bulan	160.980.000	13	Bulan	24,04	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**50.600.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	paket	50.600.000	23	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**139.884.460**	**100**	**%**	**53.037.370**		**%**	**-**		**%**	**2.205.500**		**%**	**13.803.580**		**%**	**22.633.370**		**%**	**38.642.450**	**-**	**%**	**38.642.450**	**-**	**%**	**27,62**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	9.354.992	4	Paket	1.953.000	-	Paket	-	1	Paket	637.000		Paket	658.000		Paket	658.000	1	Paket	1.953.000	1	Paket	1.953.000	6	Paket	20,88	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	paket	19.729.468	7	Paket	4.664.370	-	Paket	-	2	Paket	1.568.500		Paket	1.540.500		Paket	1.555.370	2	Paket	4.664.370	2	Paket	4.664.370	7	Paket	23,64	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	laporan	110.800.000	4	Laporan	46.420.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	11.605.080		Laporan	20.420.000	-	Laporan	32.025.080	-	Laporan	32.025.080	-	Laporan	28,90	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**70.360.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	70.360.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**424.719.212**	**100**	**%**	**109.112.000**		**%**	**10.820.373**		**%**	**9.345.736**		**%**	**22.513.950**		**%**	**48.837.023**		**%**	**91.517.082**	**-**	**%**	**91.517.082**	**-**	**%**	**21,55**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	292.080.000	12	Laporan	71.940.000	2	Laporan	10.820.373	1	Laporan	5.680.736		Laporan	13.274.950		Laporan	15.786.023	3	Laporan	45.562.082	3	Laporan	45.562.082	6	Laporan	15,60	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	132.639.212	12	Laporan	37.172.000	-	Laporan	-	1	Laporan	3.665.000		Laporan	9.239.000		Laporan	33.051.000	1	Laporan	45.955.000	1	Laporan	45.955.000	2	Laporan	34,65	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**107.467.124**	**100**	**%**	**153.609.096**		**%**	**-**		**%**	**5.544.000**		**%**	**15.797.500**		**%**	**25.492.000**		**%**	**46.833.500**	**-**	**%**	**46.833.500**	**-**	**%**	**43,58**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	85.031.364	2	Unit	42.713.991	-	Unit	-	-	Unit	5.544.000		Unit	12.144.500		Unit	23.756.000	-	Unit	41.444.500	-	Unit	41.444.500	-	Unit	48,74	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	132	unit	22.435.760	33	Unit	5.389.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	3.653.000		Unit	1.736.000	-	Unit	5.389.000	-	Unit	5.389.000	-	Unit	24,02	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	-	33	Unit	105.506.105	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-		unit			unit		-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**%**	**318.304.552**	**100**	**%**	**22.896.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**375.000**		**%**	**7.978.000**		**%**	**8.353.000**	**-**	**%**	**8.353.000**	**-**	**%**	**2,62**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**132.000.000**	**100**	**%**	**8.457.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**375.000**		**%**	**7.978.000**		**%**	**8.353.000**	**-**	**%**	**8.353.000**	**-**	**%**	**6,33**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16	dokumen	132.000.000	4	Dokumen	8.457.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	375.000		Dokumen	7.978.000	-	Dokumen	8.353.000	-	Dokumen	8.353.000	6,33	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**53.600.000**	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	dokumen	53.600.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**132.704.552**	**100**	**%**	**14.439.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	8	laporan	8.263.320	2	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Lueng Bata
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36	laporan	124.441.232	9	Laporan	14.439.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**171.725.819**	**100**	**%**	**50.141.000**		**%**	**7.200.000**		**%**	**2.400.000**		**%**	**5.700.000**		**%**	**3.545.000**		**%**	**18.845.000**	-	**%**	**18.845.000**	-	**%**	**10,97**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**85.367.898**	**100**	**%**	**21.341.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.545.000**		**%**	**3.545.000**	-	**%**	**3.545.000**	-	**%**	**4,15**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36	Laporan	15.181.066	438	Laporan	3.795.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	3.545.000	-	Laporan	3.545.000	-	Laporan	3.545.000	-	Laporan	23,35	Kec. Lueng Bata
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	laporan	70.186.832	5	Laporan	17.546.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**03**	**2.05**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**100**	**%**	**65.765.272**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	16	dokumen	65.765.272	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen			dokumen		-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	1.189.456	100	%	-		%	-		%	-		%			%			%	-	-	%	-	-	%	-	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	108	keluarga	1.189.456	27	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**03**	**7.04**	**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**19.403.193**	**100**	-	**28.800.000**		**0**	**7.200.000**		**0**	**2.400.000**		**0**	**5.700.000**		**0**	-		**0**	**15.300.000**	-	**0**	**15.300.000**	-	**0**	**78,85**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	4	dokumen	2.009.560	1	Dokumen	28.800.000	-	Dokumen	7.200.000	-	Dokumen	2.400.000		Dokumen	5.700.000		Dokumen		-	Dokumen	15.300.000	-	Dokumen	15.300.000	-	Dokumen	761,36	Kec. Lueng Bata
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	4	laporan	17.393.633	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**9.189.456**	**100**	**%**	**20.760.000**		**%**	**3.000.000**		**%**	-		**%**	**7.500.000**		**%**	-		**%**	**10.500.000**	-	**%**	**10.500.000**	-	**%**	**114,26**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**01**	**7.03**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**9.189.456**	**100**	**%**	**20.760.000**		**%**	**3.000.000**		**%**	-		**%**	**7.500.000**		**%**	-		**%**	**10.500.000**	-	**%**	**10.500.000**	-	**%**	**114,26**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	laporan	9.189.456	2	Laporan	20.760.000	-	Laporan	3.000.000	-	Laporan	-		Laporan	7.500.000		Laporan		-	Laporan	10.500.000	-	Laporan	10.500.000	-	Laporan	114,26	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**10.520.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**10.520.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	dokumen	10.520.000	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**	**01**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**350.424.208**	**100**	**%**	**45.469.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**21.407.000**		**%**	**21.407.000**	-	**%**	**21.407.000**	-	**%**	**6,11**	**Kec. Lueng Bata**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**350.424.208**	**100**	**%**	**45.469.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**21.407.000**		**%**	**21.407.000**	-	**%**	**21.407.000**	-	**%**	**6,11**	**Kec. Lueng Bata**
7	01	01	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	dokumen	13.189.456	2	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	dokumen	59.923.688	18	Dokumen	10.853.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	36	dokumen	184.973.688	9	Dokumen	22.686.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	21.407.000	-	Dokumen	21.407.000	-	Dokumen	21.407.000	-	Dokumen	11,57	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	36	dokumen	10.973.688	9	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	36	dokumen	9.523.688	9	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
7	01	01	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48	dokumen	71.840.000	12	Dokumen	11.930.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Lueng Bata
9	**01**	**01**		**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**31.200.000**	**78,27**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
9	**01**	**01**	**7.02**	**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**31.200.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Lueng Bata**
9	01	01	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	216	orang	31.200.000	54	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Kec. Lueng Bata
7	**01**			**Kecamatan Ulee Kareng**				**14.649.489.064**			**3.095.146.385**			**579.376.293**			**0**			**532.876.049**			**0**			**978.056.354**			**0**			**699.465.962**			**0**			**2.789.774.658**	-	**0**	**2.789.774.658**	**#DIV/0!**	**0**	**19,04**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**14.005.826.724**	**100**	**%**	**2.927.419.355**		**%**	**564.976.293**		**%**	**527.639.069**		**%**	**944.416.354**		**%**	**657.017.892**		**%**	**2.694.049.608**	-	**%**	**2.694.049.608**	-	**%**	**19,24**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**26.449.400**	**100**	**%**	**2.701.730**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**1.038.730**		**%**	**1.038.730**	-	**%**	**1.038.730**	-	**%**	**3,93**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	26.449.400	3	Dokumen	2.701.730	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	1.038.730	-	Dokumen	1.038.730	-	Dokumen	1.038.730	-	Dokumen	3,93	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13.397.690.740**	**100**	**%**	**2.775.061.273**		**%**	**564.976.293**		**%**	**493.218.000**		**%**	**906.928.964**		**%**	**584.387.463**		**%**	**2.549.510.720**	-	**%**	**2.549.510.720**	-	**%**	**19,03**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	12.328.490.740	12	Bulan	2.536.801.273	3	Bulan	518.026.293	3	Bulan	458.268.000	3	Bulan	837.268.964	3	Bulan	526.967.463	12	Bulan	2.340.530.720	12	Bulan	2.340.530.720	25	Bulan	18,98	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	1.069.200.000	12	Bulan	238.260.000	3	Bulan	46.950.000	3	Bulan	34.950.000	3	Bulan	69.660.000	3	Bulan	57.420.000	12	Bulan	208.980.000	12	Bulan	208.980.000	25	Bulan	19,55	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**66.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	128	stell	66.000.000	30	Stell	-	-	Stell	-	-	Stell	-		Stell			Stell		-	Stell	-	-	Stell	-	-	Stell	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**109.072.248**	**100**	**%**	**40.751.906**		**%**	-		**%**	**6.144.906**		**%**	**13.184.080**		**%**	**21.894.125**		**%**	**41.223.111**	-	**%**	**41.223.111**	-	**%**	**37,79**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	jenis	12.316.424	12	Jenis	6.840.506	-	Jenis	-	12	Jenis	3.763.506		Jenis	1.532.000		Jenis	1.545.000	12	Jenis	6.840.506	12	Jenis	6.840.506	25	Jenis	55,54	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bln	16.755.824	12	Bulan	5.661.400	-	Bulan	-	7	Bulan	2.381.400		Bulan	383.000		Bulan	3.681.125	7	Bulan	6.445.525	7	Bulan	6.445.525	12	Bulan	38,47	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	80.000.000	5	Laporan	28.250.000	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan	11.269.080		Laporan	16.668.000	-	Laporan	27.937.080	-	Laporan	27.937.080	-	Laporan	34,92	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.020.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	400.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	unit	200.000	2	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Ulee Kareng

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	100.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit		Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	320.000	2	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit		Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**312.541.396**	**100**	**%**	**70.971.879**		**%**	-		**%**	**22.334.996**		**%**	**16.998.910**		**%**	**30.850.174**		**%**	**70.184.080**	-	**%**	**70.184.080**	-	**%**	**22,46**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	bulan	192.024.000	12	Laporan	48.427.380	-	Laporan	-	4	Laporan	15.462.497		Laporan	12.052.910		Laporan	14.910.174	4	Laporan	42.425.581	4	Laporan	42.425.581	8	Laporan	22,09	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	120.517.396	12	Laporan	22.544.499	-	Laporan	-	3	Laporan	6.872.499		Laporan	4.946.000		Laporan	15.940.000	3	Laporan	27.758.499	3	Laporan	27.758.499	300	Laporan	23,03	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**93.052.940**	**100**	**%**	**37.932.567**		**%**	-		**%**	**5.941.167**		**%**	**7.304.400**		**%**	**18.847.400**		**%**	**32.092.967**	-	**%**	**32.092.967**	-	**%**	**34,49**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	bulan	80.944.000	12	Bulan	33.261.000	-	Bulan	-	2	Bulan	3.673.600		Bulan	7.304.400		Bulan	16.964.400	2	Bulan	27.942.400	2	Bulan	27.942.400	4	Bulan	34,52	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	11.508.940	5	Unit	4.671.567	-	Unit	-	5	Unit	2.267.567		Unit	0		Unit	1.883.000	5	Unit	4.150.567	5	Unit	4.150.567	25	Unit	36,06	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!	Unit	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	01	2.04	09	Pemeliharaan /rehapbilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap	4	Kegiatan	600.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**%**	**109.546.940**	**100**	**%**	**8.099.710**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.870.000**		**%**	**3.870.000**	-	**%**	**3.870.000**	-	**%**	**3,53**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**87.120.000**	**100**	**%**	**5.849.710**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**3.870.000**		**%**	**3.870.000**	-	**%**	**3.870.000**	-	**%**	**4,44**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	Dokumen	87.120.000	2	Dokumen	5.849.710	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	3.870.000	-	Dokumen	3.870.000	-	Dokumen	3.870.000	-	Dokumen	4,44	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**12.426.940**	**100**	**%**	**2.250.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	720	Dokumen	100.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	laporan	12.326.940	2	Laporan	2.250.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**%**	**67.914.000**	**100**	**%**	**119.081.435**		**%**	**14.400.000**		**%**	**736.980**		**%**	**29.140.000**		**%**	**21.355.575**		**%**	**65.632.555**	-	**%**	**65.632.555**	-	**%**	**96,64**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**%**	**35.484.000**	**100**	**%**	**52.932.495**		**%**	-		**%**	**736.980**		**%**	**3.340.000**		**%**	-		**%**	**4.076.980**	-	**%**	**4.076.980**	-	**%**	**11,49**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	400	org	16.310.000		orang	4.076.980	-	orang	-	-	orang	736.980		orang	3.340.000		orang	0	-	orang	4.076.980	-	orang	4.076.980	-	orang	25,00	Kec. Ulee Kareng
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	19.174.000	2	Laporan	48.855.515	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**			**21.838.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	**#DIV/0!**	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12	kali	21.838.000	30	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	1.000.000	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	-	%	-	-	%	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80	Keluarga	1.000.000	20	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**03**	**7.04**		**Pemberdayaan Mukim**	**Persentase Pemberdayaan Mukim**	**100**	**%**	**9.592.000**	**100**	**%**	**66.148.940**		**%**	**14.400.000**		**%**	-		**%**	**25.800.000**		**%**	**21.355.575**		**%**	**61.555.575**	-	**%**	**61.555.575**	-	**%**	**641,74**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	8	kali	3.432.000	2	Dokumen	60.879.150		Dokumen	14.400.000		Dokumen	-		Dokumen	25.800.000		Dokumen	18.710.575	-	Dokumen	58.910.575	-	Dokumen	58.910.575	-	Dokumen	1.716,51	Kec. Ulee Kareng
7	01	03	7.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	8	kali	6.160.000	2	Laporan	5.269.790	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	2.645.000	-	Laporan	2.645.000	-	Laporan	2.645.000	-	Laporan	42,94	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**%**	**4.000.000**	**100**	**%**	**22.749.830**		**%**	-		**%**	**4.500.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**11.410.000**		**%**	**20.410.000**	-	**%**	**20.410.000**	-	**%**	**510,25**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**4.000.000**	**100**	**%**	**22.749.830**		**%**	-		**%**	**4.500.000**		**%**	**4.500.000**		**%**	**11.410.000**		**%**	**20.410.000**	-	**%**	**20.410.000**	-	**%**	**510,25**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	kali	4.000.000	3	Laporan	22.749.830	-	Laporan	-	-	Laporan	4.500.000		Laporan	4.500.000		Laporan	11.410.000	-	Laporan	20.410.000	-	Laporan	20.410.000	-	Laporan	510,25	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100**	**%**	**4.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**4.000.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	4.000.000	100	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**60.681.400**	**100**	**%**	**17.796.055**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.812.495**		**%**	**5.812.495**	-	**%**	**5.812.495**	-	**%**	**9,58**	**Kec. Ulee Kareng**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**60.681.400**	**100**	**%**	**17.796.055**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**5.812.495**		**%**	**5.812.495**	-	**%**	**5.812.495**	-	**%**	**9,58**	**Kec. Ulee Kareng**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	dok	2.261.400	1	Dokumen	1.027.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dok	17.580.000	3	Dokumen	7.784.100	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40	Dokumen	20.000.000	10	Dokumen	8.984.455	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	5.812.495	-	Dokumen	5.812.495	-	Dokumen	5.812.495	-	Dokumen	29,06	Kec. Ulee Kareng
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	40	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25	Keg	10.000.000	5	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Kec. Ulee Kareng
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160	keg	8.840.000	40	Kali	-	-	Kali	-	-	Kali	-		Kali			Kali		-	Kali	-	-	Kali	-	-	Kali	-	Kec. Ulee Kareng
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**PERSENTASE PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**100**	**%**	**397.520.000**	**78,27**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV											
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	
9	**01**	**02**	**7.02**	**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**100**	**%**	**397.520.000**	**78,27**	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Kec. Ulee Kareng**
9	01	02	7.02	04 Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	180	Orang	397.520.000	45	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang			-	Orang	-	-	Orang	-	-	Kec. Ulee Kareng
5	**02**			**Badan Pengelolaan Keuangan**				**699.557.008.038**			**170.176.320.339**		**0**	**11.304.120.057**		**0**	**5.024.214.453**		**0**	**14.477.589.539**		**0**	**136.403.936.150**		**0**	**167.209.860.199**	-	**0**	**167.209.860.199**	**#DIV/0!**	**0**	**23,90**	**BPKK**
5	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**90.370.107.556**			**32.682.517.937**		**0**	**2.523.944.333**		**0**	**2.509.153.453**		**0**	**13.024.496.739**		**0**	**6.224.284.197**		**0**	**24.281.878.722**	-	**0**	**24.281.878.722**	-	**0**	**26,87**	**BPKK**
5	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**410.922.026**		**%**	**45.614.390**		**%**	-		**%**	-		**%**	**35.020.000**		**%**	**23.095.000**		**%**	**58.115.000**	-	**%**	**58.115.000**	-	**%**	**14,14**	**BPKK**
5	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	271.448.496	6	Dokumen	45.614.390	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	35.020.000		Dokumen	23.095.000	-	Dokumen	58.115.000	-	Dokumen	58.115.000	-	Dokumen	21,41	BPKK
5	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	Laporan	109.473.530	18	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**72.310.955.642**			**29.636.165.807**		**0**	**2.275.678.849**		**0**	**2.509.153.453**		**0**	**11.456.858.428**		**0**	**4.909.048.364**		**0**	**21.150.739.094**	-	**0**	**21.150.739.094**	-	**0**	**29,25**	**BPKK**
5	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	59.362.946.512	12	Bulan	26.627.805.807	3	Bulan	1.552.932.918	3	Bulan	2.473.153.453		Bulan	10.328.728.545		Bulan	3.907.718.618	6	Bulan	18.262.533.534	6	Bulan	18.262.533.534	13	Bulan	30,76	BPKK
5	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	12.735.505.600	12	Bulan	3.008.360.000	3	Bulan	722.745.931	3	Bulan	36.000.000		Bulan	1.128.129.883		Bulan	1.001.329.746	6	Bulan	2.888.205.560	6	Bulan	2.888.205.560	13	Bulan	22,68	BPKK
5	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2130	Dokumen	60.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28	Laporan	122.503.530	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	Laporan	30.000.000	7	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**15.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**BPKK**
5	01	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	15.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**581.400.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**BPKK**
5	01	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	Unit	30.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	532	Paket	421.900.000	152	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	BPKK
5	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang	54.500.000	4	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BPKK
5	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Orang	75.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.336.338.675**			**583.046.540**		**0**	**94.821.790**		**0**	-		**0**	**210.045.145**		**0**	**169.121.948**		**0**	**473.988.883**	-	**0**	**473.988.883**	-	**0**	**14,21**	**BPKK**
5	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	20.036.181	4	Paket	3.884.000	1	Paket	1.140.000	-	Paket	-		Paket	1.338.000		Paket	1.406.000	1	Paket	3.884.000	1	Paket	3.884.000	6	Paket	19,38	BPKK
5	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	13.155.000	4	Paket	14.690.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	BPKK
5	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Paket	180.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	BPKK
5	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	160.546.069	10	Paket	30.346.000	2	Paket	9.780.000	-	Paket	-		Paket	17.351.000		Paket	3.215.000	2	Paket	30.346.000	2	Paket	30.346.000	5	Paket	18,90	BPKK
5	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	Paket	1.369.148.583	50	Paket	174.756.540	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	77.522.700		Paket	51.487.310	-	Paket	129.010.010	-	Paket	129.010.010	-	Paket	9,42	BPKK
5	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	9.525.600	2	Dokumen	1.530.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	1.020.000	-	Dokumen	1.020.000	-	Dokumen	1.020.000	-	Dokumen	10,71	BPKK
5	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30	Paket	30.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	BPKK
5	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	30.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280	Laporan	1.328.927.242	70	Laporan	357.840.000	15	Laporan	83.901.790	-	Laporan	-		Laporan	113.833.445		Laporan	111.993.638	15	Laporan	309.728.873	15	Laporan	309.728.873	5	Laporan	23,31	BPKK
5	01	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	Dokumen	150.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	01	01	2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	45.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**4.324.058.758**			**458.120.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**368.277.000**		**0**	**351.858.000**		**0**	**720.135.000**	-	**0**	**720.135.000**	-	**0**	**16,65**	**BPKK**
5	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	16	Unit	515.400.000	4	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	1.094.400.000	3	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	83.615.694	10	Unit	54.918.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160	Unit	2.570.643.064	40	Unit	403.202.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	368.277.000		Unit	351.858.000	-	Unit	720.135.000	-	Unit	720.135.000	-	Unit	28,01	BPKK
5	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	30.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	30.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**4.268.193.969**		**%**	**969.111.000**		**%**	**93.040.124**		**%**	-		**%**	**461.840.115**		**%**	**397.798.385**		**%**	**952.678.624**	-	**%**	**952.678.624**	-	**%**	**22,32**	**BPKK**
5	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	32.500.000	12	Laporan	11.625.000	3	Laporan	2.500.000	-	Laporan	-		Laporan	2.222.000		Laporan	5.779.000	3	Laporan	10.501.000	3	Laporan	10.501.000	5	Laporan	32,31	BPKK
5	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	1.440.000.000	12	Laporan	360.960.000	2	Laporan	45.185.424	-	Laporan	-		Laporan	160.462.510		Laporan	76.920.735	2	Laporan	282.568.669	2	Laporan	282.568.669	4	Laporan	19,62	BPKK
5	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2.795.693.969	12	Laporan	596.526.000	1	Laporan	45.354.700	-	Laporan	-		Laporan	299.155.605		Laporan	315.098.650	1	Laporan	659.608.955	1	Laporan	659.608.955	2	Laporan	23,59	BPKK
5	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**5.123.238.486**		**%**	**990.460.200**		**%**	**60.403.570**		**%**	-		**%**	**492.456.051**		**%**	**373.362.500**		**%**	**926.222.121**	-	**%**	**926.222.121**	-	**%**	**18,08**	**BPKK**
5	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	128	Unit	1.294.152.000	32	Unit	407.646.000	3	Unit	32.847.400	-	Unit	-		Unit	219.498.900		Unit	116.067.700	3	Unit	368.414.000	3	Unit	368.414.000	2	Unit	28,47	BPKK
5	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	1.264.752.000	8	Unit	520.884.000	1	Unit	27.556.170	-	Unit	-		Unit	262.262.151		Unit	204.311.800	1	Unit	494.130.121	1	Unit	494.130.121	3	Unit	39,07	BPKK
5	01	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	30.837.794	10	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	10.000.000	-	Unit	10.000.000	-	Unit	10.000.000	-	Unit	32,43	BPKK
5	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	Unit	218.496.692	40	Unit	61.930.200	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	10.695.000		Unit	42.983.000	-	Unit	53.678.000	-	Unit	53.678.000	-	Unit	24,57	BPKK
5	01	01	2.09	07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.09	08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2.150.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	75.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan**	**100**	**%**	**589.275.160.938**			**130.108.409.472**		**0**	**8.678.325.724**		**0**	**222.040.000**		**0**	**1.453.092.800**		**0**	**126.500.564.648**		**0**	**136.854.023.172**	-	**0**	**136.854.023.172**	-	**0**	**23,22**	**BPKK**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Ketersediaan dokumen pelaksanaan APBK**	**100**	**%**	**19.803.881.159**			**3.704.354.755**		**0**	**596.173.250**		**0**	**53.040.000**		**0**	**1.453.092.800**		**0**	**1.195.106.675**		**0**	**3.297.412.725**	-	**0**	**3.297.412.725**	-	**0**	**16,65**	**BPKK**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	3.848.216.889	2	Dokumen	548.767.500	-	Dokumen	50.640.000	-	Dokumen	-		Dokumen	276.247.000		Dokumen	120.530.480	-	Dokumen	447.417.480	-	Dokumen	447.417.480	-	Dokumen	11,63	BPKK
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	893.231.420	2	Dokumen	328.720.000	-	Dokumen	50.640.000	-	Dokumen	-		Dokumen	126.540.000		Dokumen	85.894.100	-	Dokumen	263.074.100	-	Dokumen	263.074.100	-	Dokumen	29,45	BPKK
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	577.138.500	88	Dokumen	228.400.000	10	Dokumen	53.040.000	-	Dokumen	-		Dokumen	0		Dokumen	107.300.000	10	Dokumen	160.340.000	10	Dokumen	160.340.000	6	Dokumen	27,78	BPKK
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	umlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	138.405.000	44	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	53.040.000		Dokumen	124.140.000		Dokumen		-	Dokumen	177.180.000	-	Dokumen	177.180.000	-	Dokumen	128,02	BPKK
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	829.943.763	44	Dokumen	288.900.000	9	Dokumen	109.040.000	-	Dokumen	-		Dokumen	173.600.000		Dokumen	0	9	Dokumen	282.640.000	9	Dokumen	282.640.000	5	Dokumen	34,06	BPKK
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	176	Dokumen	530.055.000	44	Dokumen	163.500.000	5	Dokumen	53.040.000	-	Dokumen	-		Dokumen	107.300.000		Dokumen	0	5	Dokumen	160.340.000	5	Dokumen	160.340.000	3	Dokumen	30,25	BPKK
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	Dokumen	4.081.227.512	2	Dokumen	741.075.000	-	Dokumen	89.933.250	-	Dokumen	-		Dokumen	165.545.000		Dokumen	290.385.975	-	Dokumen	545.864.225	-	Dokumen	545.864.225	-	Dokumen	13,38	BPKK
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	2.384.342.973	2	Dokumen	500.081.420	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	140.823.300		Dokumen	361.116.120	-	Dokumen	501.939.420	-	Dokumen	501.939.420	-	Dokumen	21,05	BPKK
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dokumen	4.164.154.939	1	Dokumen	904.910.835		Dokumen	189.840.000	-	Dokumen	-		Dokumen	338.897.500		Dokumen	229.880.000	-	Dokumen	758.617.500	-	Dokumen	758.617.500	-	Dokumen	18,22	BPKK
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dokumen	690.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	Dokumen	690.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen	720.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Orang	257.165.163	2	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BPKK
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**%**	**4.047.497.303**			**983.362.245**		**0**	**107.740.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**914.738.686**		**0**	**1.022.478.686**	-	**0**	**1.022.478.686**	-	**0**	**25,26**	**BPKK**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	Dokumen	479.872.354	12	Dokumen	96.880.375	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	91.883.096	-	Dokumen	91.883.096	-	Dokumen	91.883.096	-	Dokumen	19,15	BPKK
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	umlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2112	Dokumen	560.577.684	528	Dokumen	142.820.000	51	Dokumen	42.190.000	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	111.428.800	51	Dokumen	153.618.800	51	Dokumen	153.618.800	2	Dokumen	27,40	BPKK
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	48	Dokumen	7.887.006	4	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48	Dokumen	518.600.000	12	Dokumen	80.400.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	131.925.500	-	Dokumen	131.925.500	-	Dokumen	131.925.500	-	Dokumen	25,44	BPKK
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	36000	Dokumen	1.764.029.414	9.000	Dokumen	477.216.620	1.245	Dokumen	65.550.000	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	411.284.630	1.245	Dokumen	476.834.630	1.245	Dokumen	476.834.630	3	Dokumen	27,03	BPKK
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan mungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4	Laporan	114.926.983	1	Laporan	27.461.250	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	27.461.250	-	Laporan	27.461.250	-	Laporan	27.461.250	-	Laporan	23,89	BPKK
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48	Dokumen	175.893.322	12	Dokumen	29.138.115	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	29.138.115	-	Dokumen	29.138.115	-	Dokumen	29.138.115	-	Dokumen	16,57	BPKK
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	48	Dokumen	123.140.242	12	Dokumen	27.747.700	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	26.497.700	-	Dokumen	26.497.700	-	Dokumen	26.497.700	-	Dokumen	21,52	BPKK
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	Dokumen	163.416.475	1	Dokumen	71.008.590	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	54.430.000	-	Dokumen	54.430.000	-	Dokumen	54.430.000	-	Dokumen	33,31	BPKK
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352	Orang	139.153.822	88	Orang	30.689.595	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang	30.689.595	-	Orang	30.689.595	-	Orang	30.689.595	-	Orang	22,05	BPKK
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100**	**%**	**3.707.739.651**			**615.405.284**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	**532.571.030**		**0**	**532.571.030**	-	**0**	**532.571.030**	-	**0**	**14,36**	**BPKK**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8	Laporan	163.526.198	2	Laporan	4.221.805	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	0	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	Dokumen	382.523.467	3	Dokumen	110.892.570	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	100.092.190	-	Dokumen	100.092.190	-	Dokumen	100.092.190	-	Dokumen	26,17	BPKK
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	Laporan	451.088.335	1	Laporan	104.983.765	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	92.270.765	-	Laporan	92.270.765	-	Laporan	92.270.765	-	Laporan	20,46	BPKK
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	28	Laporan	832.253.703	7	Laporan	154.224.429	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	147.491.575	-	Laporan	147.491.575	-	Laporan	147.491.575	-	Laporan	17,72	BPKK
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dokumen	482.106.091	2	Dokumen	136.595.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	162.264.000	-	Dokumen	162.264.000	-	Dokumen	162.264.000	-	Dokumen	33,66	BPKK
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	Dokumen	186.341.922	2	Dokumen	59.539.965	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	7.767.500	-	Dokumen	7.767.500	-	Dokumen	7.767.500	-	Dokumen	4,17	BPKK

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja			
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	184.612.090	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	Dokumen	520.495.322	1	Dokumen	22.262.750	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	Dokumen	275.859.262	1	Dokumen	22.685.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	22.685.000	-	Dokumen	22.685.000	-	Dokumen	22.685.000	-	Dokumen	8,22	BPKK
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	Dokumen	48.211.306	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	176	Orang	22.174.112	44	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BPKK
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8	Lembaga	65.032.862	2	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga			Lembaga		-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	BPKK
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Laporan	93.514.983	2	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**561.518.418.504**		**%**	**124.452.397.188**		**%**	**7.863.532.474**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**123.802.948.257**		**%**	**131.666.480.731**	**-**	**%**	**131.666.480.731**	**-**	**%**	**23,45**	**BPKK**
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	3	Dokumen	45.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	1.588.950.040	-	Laporan	1.588.950.040	-	Laporan	1.588.950.040	-	Laporan	3.531,00	BPKK
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4	Laporan	14.044.000.000	1	Laporan	2.000.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3	Laporan	45.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan	6.000.000.000	1	Laporan	1.000.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	51.717.019	-	Laporan	51.717.019	-	Laporan	51.717.019	-	Laporan	0,86	BPKK
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Laporan	541.159.418.504	1	Laporan	121.452.397.188	-	Laporan	7.863.532.474	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	122.162.281.198	-	Laporan	130.025.813.672	-	Laporan	130.025.813.672	-	Laporan	24,03	BPKK
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100**	**%**	**197.624.321**		-	**352.890.000**	**0**		**110.880.000**	**0**		**169.000.000**	**0**		-	**0**		**55.200.000**		**0**	**335.080.000**	**-**	**0**	**335.080.000**	**-**	**0**	**169,55**	**BPKK**
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3	Dokumen	45.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BPKK
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3	Dokumen	45.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	BPKK
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4	Orang	107.624.321	1	Orang	352.890.000	-	Orang	110.880.000	-	Orang	169.000.000		Orang			Orang	55.200.000	-	Orang	335.080.000	-	Orang	335.080.000	-	Orang	311,34	BPKK
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan**	**100**	**%**	**11.953.146.948**		-	**3.865.493.930**	**0**		**101.850.000**	**0**		**1.225.961.000**	**0**		-	**0**		**1.987.516.995**		**0**	**3.315.327.995**	**-**	**0**	**3.315.327.995**	**-**	**0**	**27,74**	**BPKK**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**11.953.146.948**		-	**3.865.493.930**	**0**		**101.850.000**	**0**		**1.225.961.000**	**0**		-	**0**		**1.987.516.995**		**0**	**3.315.327.995**	**-**	**0**	**3.315.327.995**	**-**	**0**	**27,74**	**BPKK**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dokumen	1.232.573.947	1	Dokumen	306.555.630	-	Dokumen	-	-	Dokumen	128.500.000		Dokumen			Dokumen	122.705.630	-	Dokumen	251.205.630	-	Dokumen	251.205.630	-	Dokumen	20,38	BPKK

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outuut)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	3	Dokumen	15.900.000	-	-	-	-	0	-	-	0	104.600.000		0			0		-	0	104.600.000	-	0	104.600.000	-	0	657,86	BPKK
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	713.089.838	1	Dokumen	118.950.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen	119.250.000	-	Dokumen	119.250.000	-	Dokumen	119.250.000	-	Dokumen	16,72	BPKK
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	613.419.338	1	Laporan	181.363.165	-	Laporan	-	-	Laporan	104.450.000		Laporan			Laporan	49.463.165	-	Laporan	153.913.165	-	Laporan	153.913.165	-	Laporan	25,09	BPKK
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	Laporan	455.396.395	1	Laporan	108.900.000	-	Laporan	-	-	Laporan	56.250.000		Laporan			Laporan	11.250.000	-	Laporan	67.500.000	-	Laporan	67.500.000	-	Laporan	14,82	BPKK
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	2.984.928.478	1	Laporan	2.047.597.935	-	Laporan	38.250.000	1	Laporan	341.261.000		Laporan			Laporan	1.394.121.000	1	Laporan	1.773.632.000	1	Laporan	1.773.632.000	25	Laporan	59,42	BPKK
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	908.587.645	1	Laporan	100.200.000	-	Laporan	-	-	Laporan	54.750.000		Laporan			Laporan	10.950.000	-	Laporan	65.700.000	-	Laporan	65.700.000	-	Laporan	7,23	BPKK
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	505.668.612	1	Laporan	82.500.000	-	Laporan	-	-	Laporan	49.250.000		Laporan			Laporan	9.850.000	-	Laporan	59.100.000	-	Laporan	59.100.000	-	Laporan	11,69	BPKK
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	1.949.712.810	1	Dokumen	419.317.200	-	Dokumen	-	-	Dokumen	175.000.000		Dokumen			Dokumen	178.217.200	-	Dokumen	353.217.200	-	Dokumen	353.217.200	-	Dokumen	18,12	BPKK
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan	1.522.447.620	1	Laporan	236.460.000	-	Laporan	63.600.000	-	Laporan	95.400.000		Laporan			Laporan	39.060.000	-	Laporan	198.060.000	-	Laporan	198.060.000	-	Laporan	13,01	BPKK
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	Laporan	501.610.257	1	Laporan	114.925.000	-	Laporan	-	-	Laporan	67.875.000		Laporan			Laporan	11.950.000	-	Laporan	79.825.000	-	Laporan	79.825.000	-	Laporan	15,91	BPKK
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	352	Orang	549.812.009	88	Orang	148.725.000	-	Orang	-	23	Orang	48.625.000		Orang			Orang	40.700.000	23	Orang	89.325.000	23	Orang	89.325.000	7	Orang	16,25	BPKK
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**42**	**%**	**7.958.592.596**			**3.519.899.000**		**0**	-		**0**	**1.067.060.000**		**0**	-		**0**	**1.691.570.310**		**0**	**2.758.630.310**	-	**0**	**2.758.630.310**	-	**0**	**34,66**	**BPKK**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**42**	**%**	**7.958.592.596**			**3.519.899.000**		**0**	-		**0**	**1.067.060.000**		**0**	-		**0**	**1.691.570.310**		**0**	**2.758.630.310**	-	**0**	**2.758.630.310**	-	**0**	**34,66**	**BPKK**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Dokumen	296.950.000	1	Dokumen	3.300.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	533.530.000		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	533.530.000	-	Dokumen	533.530.000	-	Dokumen	179,67	BPKK
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	963.897.145	1	Dokumen	236.963.540	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	79.061.080	-	Dokumen	79.061.080	-	Dokumen	79.061.080	-	Dokumen	8,20	BPKK
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	384.928.200	1	Laporan	305.157.500	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	260.908.000	-	Laporan	260.908.000	-	Laporan	260.908.000	-	Laporan	67,78	BPKK
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit	231.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BPKK
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	246.802.000	1	Laporan	41.335.860	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	33.160.000	-	Laporan	33.160.000	-	Laporan	33.160.000	-	Laporan	13,44	BPKK
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	637.963.575	1	Laporan	1.010.832.235	-	Laporan	-	-	Laporan	27.900.000		Laporan			Laporan	226.073.735	-	Laporan	253.973.735	-	Laporan	253.973.735	-	Laporan	39,81	BPKK
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20000	Objek Pajak	2.108.345.494	5.000	Obyek Pajak	1.244.820.000	-	Obyek Pajak	-	2.777	Obyek Pajak	337.817.500		Obyek Pajak			Obyek Pajak	740.129.995	2.777	Obyek Pajak	1.077.947.495	2.777	Obyek Pajak	1.077.947.495	14	Obyek Pajak	51,13	BPKK
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dokumen	355.922.548	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4	Layanan	139.914.771	1	Layanan	30.856.250	-	Layanan	-	-	Layanan	-		Layanan			Layanan		-	Layanan	-	-	Layanan	-	-	Layanan	-	BPKK
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	Dokumen	260.077.000	1	Dokumen	123.138.125	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	106.290.000	-	Dokumen	106.290.000	-	Dokumen	106.290.000	-	Dokumen	40,87	BPKK
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	1.423.873.658	1	Dokumen	487.306.740	-	Dokumen	-	-	Dokumen	167.812.500		Dokumen			Dokumen	245.947.500	-	Dokumen	413.760.000	-	Dokumen	413.760.000	-	Dokumen	29,06	BPKK
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3	Dokumen	172.500.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen	226.418.205	1	Dokumen	36.188.750	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BPKK
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Laporan	255.000.000	-	Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	Laporan	255.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BPKK
5	**03**				**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**45.413.974.181**			**9.507.473.653**		**0**	**1.512.943.055**		**0**	**2.284.763.315**		**0**	**1.753.079.341**		**0**	**2.582.483.226**		**0**	**8.133.268.937**	-	**0**	**8.133.268.937**	**#DIV/0!**	**0**	**17,91**	**BKPSDM**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**34.056.207.925**		**%**	**7.617.224.825**		**%**	**1.512.943.055**		**%**	**2.245.984.852**		**%**	**1.755.216.226**		**%**	**1.893.469.691**		**%**	**7.407.613.824**	-	**%**	**7.407.613.824**	-	**%**	**21,75**	**BKPSDM**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**145.012.500**		**%**	**33.650.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	**7.442.500**		**%**	**7.442.500**	-	**%**	**7.442.500**	-	**%**	**5,13**	**BKPSDM**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	145.012.500	5	Dokumen	33.650.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	7.442.500	-	Dokumen	7.442.500	-	Dokumen	7.442.500	-	Dokumen	5,13	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**29.834.990.232**		**%**	**6.697.154.885**		**%**	**1.460.198.007**		**%**	**2.061.209.390**		**%**	**1.543.711.366**		**%**	**1.523.453.982**		**%**	**6.588.572.745**	-	**%**	**6.588.572.745**	-	**%**	**22,08**	**BKPSDM**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	29.317.510.232	12	Bulan	6.223.254.885	3	Bulan	1.356.566.959	3	Bulan	1.958.270.390		Bulan	1.432.233.719		Bulan	1.407.706.765	6	Bulan	6.154.777.833	6	Bulan	6.154.777.833	13	Bulan	20,99	BKPSDM
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	517.480.000	11	Bulan	473.900.000	3	Bulan	103.631.048	3	Bulan	102.939.000		Bulan	111.477.647		Bulan	115.747.217	6	Bulan	433.794.912	6	Bulan	433.794.912	13	Bulan	83,83	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**234.000.000**	**100**	**%**	**20.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**BKPSDM**
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	154.000.000	1	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	BKPSDM
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Pegawai	80.000.000	5	Pegawai	20.000.000	-	Pegawai	-	-	Pegawai	-		Pegawai			Pegawai		-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**933.649.976**		-	**212.444.055**		**0**	-		**0**	**52.880.354**		**0**	**79.058.519**		**0**	**132.843.602**		**0**	**264.782.475**	-	**0**	**264.782.475**	-	**0**	**28,36**	**BKPSDM**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	52.719.940	1	Paket	9.862.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	5.869.000		Paket	3.113.000	-	Paket	8.982.000	-	Paket	8.982.000	-	Paket	17,04	BKPSDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	216.696.036	1	Paket	48.582.055	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	26.924.750		Paket	40.200.000	-	Paket	67.124.750	-	Paket	67.124.750	-	Paket	30,98	BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	664.234.000	25	Laporan	154.000.000	-	Laporan	-	8	Laporan	52.880.354		Laporan	46.264.769		Laporan	89.530.602	8	Laporan	188.675.725	8	Laporan	188.675.725	8	Laporan	28,41	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**135.436.804**		-	**29.063.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	**#DIV/0!**	**0**	-	**BKPSDM**
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	BKPSDM
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	unit	135.436.804	8	Unit	29.063.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BKPSDM

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.342.348.950**		**-**	**490.661.885**		**0**	**52.745.048**		**0**	**110.327.773**		**0**	**100.237.431**		**0**	**156.183.007**		**0**	**419.493.259**	**-**	**0**	**419.493.259**	**-**	**0**	**17,91**	**BKPSDM**
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	1.918.000.000	1	Laporan	413.000.000	-	Laporan	52.745.048	-	Laporan	92.656.773		Laporan	84.270.546		Laporan	102.754.007	-	Laporan	332.426.374	-	Laporan	332.426.374	-	Laporan	17,33	BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	424.348.950	1	Laporan	77.661.885	-	Laporan	-	-	Laporan	17.671.000		Laporan	15.966.885		Laporan	53.429.000	-	Laporan	87.066.885	-	Laporan	87.066.885	-	Laporan	20,52	BKPSDM
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**430.769.463**		**-**	**134.251.000**		**0**	**-**		**0**	**21.567.335**		**0**	**32.208.910**		**0**	**73.546.600**		**0**	**127.322.845**	**-**	**0**	**127.322.845**	**-**	**0**	**29,56**	**BKPSDM**
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	256.400.000	9	Unit	108.668.000	-	Unit	-	2	Unit	14.168.000		Unit	32.208.910		Unit	55.370.600	2	Unit	101.747.510	2	Unit	101.747.510	6	Unit	39,68	BKPSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	109.227.244	20	Unit	25.583.000	-	Unit	-	6	Unit	7.399.335		Unit	0		Unit	18.176.000	6	Unit	25.575.335	6	Unit	25.575.335	8	Unit	23,41	BKPSDM
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	65.142.219	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	BKPSDM
5					KEPEGAWAIAN										0			0			0			0			0	-		#DIV/0!	0		-	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN DATA KEPEGAWAIAN ASN**	**100**	**%**	**8.451.711.349**		**-**	**1.393.614.108**		**0**	**-**		**0**	**38.778.463**		**0**	**(2.136.885)**		**0**	**323.708.740**		**0**	**360.350.318**	**-**	**0**	**360.350.318**	**-**	**0**	**4,26**	**BKPSDM**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100**	**%**	**2.944.204.682**		**-**	**151.352.273**		**0**	**-**		**0**	**38.778.463**		**0**	**-**		**0**	**59.183.810**		**0**	**97.962.273**	**-**	**0**	**97.962.273**	**-**	**0**	**3,33**	**BKPSDM**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12	Dokumen	2.037.165.050	3	Dokumen	151.352.273	-	Dokumen	-	-	Dokumen	38.778.463		Dokumen	0		Dokumen	59.183.810	-	Dokumen	97.962.273	-	Dokumen	97.962.273	-	Dokumen	4,81	BKPSDM
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100	Dokumen	262.414.632	5	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BKPSDM
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4	Lembaga	464.775.000	1	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga			Lembaga		-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	BKPSDM
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20	Dokumen	179.850.000	5	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan**	**100**	**%**	**2.176.583.463**	**-**	**%**	**679.261.835**		**%**	**-**		**%**	**61.490.720**		**%**	**(2.136.885)**		**%**	**264.524.930**		**%**	**323.878.765**	**-**	**%**	**323.878.765**	**-**	**%**	**14,88**	**BKPSDM**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12	Dokumen	412.200.000	1	Dokumen	73.787.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen	900.000		Dokumen	0	-	Dokumen	900.000	-	Dokumen	900.000	-	Dokumen	0,22	BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dokumen	421.337.175	1	Dokumen	122.180.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	10.800.000		Dokumen			Dokumen	40.550.000	-	Dokumen	51.350.000	-	Dokumen	51.350.000	-	Dokumen	12,19	BKPSDM
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	1.343.046.288	1	Dokumen	483.294.335	-	Dokumen	-	-	Dokumen	50.690.720		Dokumen	-3.036.885		Dokumen	223.974.930	-	Dokumen	271.628.765	-	Dokumen	271.628.765	-	Dokumen	20,22	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**100**	**%**	**4.629.935.807**		**%**	**563.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**BKPSDM**
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	#DIV/0!	Orang	-	BKPSDM
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	468	Orang	4.629.935.807	117	Orang	563.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BKPSDM
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Negara**	**Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara**	**100**	**%**	**697.720.860**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**BKPSDM**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	Dokumen	192.540.860	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	BKPSDM
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	4	Dokumen	214.930.000	5	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	BKPSDM
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Laporan	290.250.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BKPSDM
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN**	**100**	**%**	**2.906.054.907**		**%**	**496.634.720**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**365.304.795**		**%**	**365.304.795**	**-**	**%**	**365.304.795**	**-**	**%**	**12,57**	**BKPSDM**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional**	**100**	**%**	**314.894.965**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**7.435.000**		**%**	**7.435.000**	**-**	**%**	**7.435.000**	**-**	**%**	**2,36**	**BKPSDM**
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	24	Dokumen	314.894.965	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen	7.435.000	-	Dokumen	7.435.000	-	Dokumen	7.435.000	-	Dokumen	2,36	BKPSDM
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100**	**%**	**2.591.159.942**		**%**	**496.634.720**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**357.869.795**		**%**	**357.869.795**	**-**	**%**	**357.869.795**	**-**	**%**	**13,81**	**BKPSDM**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20	Laporan	315.294.965	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	BKPSDM
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	20	Laporan	2.275.864.977	1	Dokumen	496.634.720	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	357.869.795	-	Dokumen	357.869.795	-	Dokumen	357.869.795	-	Dokumen	15,72	BKPSDM
2	**09**				**Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan**				**98.845.949.684**			**16.745.241.058**		**0**	**2.198.526.381**		**0**	**4.335.498.415**		**0**	**4.095.561.207**		**0**	**3.864.056.386**		**0**	**14.493.642.389**	**-**	**0**	**14.493.642.389**	**#DIV/0!**	**0**	**14,66**	**Dp2KP**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**60.919.301.636**		**%**	**10.697.358.958**		**%**	**2.179.026.381**		**%**	**3.114.126.720**		**%**	**2.313.121.752**		**%**	**2.293.449.343**		**%**	**9.899.724.196**	**-**	**%**	**9.899.724.196**	**-**	**%**	**16,25**	**Dp2KP**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi OPD yang tersusun**	**100**	**%**	**27.642.000**		**%**	**27.024.825**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**4.024.825**		**%**	**4.024.825**	**-**	**%**	**4.024.825**	**-**	**%**	**14,56**	**Dp2KP**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	26.642.000	5	Dokumen	27.024.825	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	4.024.825	-	Dokumen	4.024.825	-	Dokumen	4.024.825	-	Dokumen	15,11	Dp2KP
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**4**	**%**	**55.484.512.144**		**%**	**9.999.892.480**		**%**	**2.112.629.578**		**%**	**3.039.340.979**		**%**	**2.148.646.420**		**%**	**2.066.270.074**		**%**	**9.366.887.051**	**-**	**%**	**9.366.887.051**	**-**	**%**	**16,88**	**Dp2KP**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/bulan	53.286.912.144	12	Bulan	9.424.282.480	3	Bulan	1.983.094.578	3	Bulan	2.909.216.979		Bulan	1.996.096.420		Bulan	1.905.415.074	6	Bulan	8.793.823.051	6	Bulan	8.793.823.051	13	Bulan	16,50	Dp2KP
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	2.193.350.000	12	Bulan	575.610.000	3	Bulan	129.535.000	3	Bulan	130.124.000		Bulan	152.550.000		Bulan	160.855.000	6	Bulan	573.064.000	6	Bulan	573.064.000	13	Bulan	26,13	Dp2KP
2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	48	Dokumen	4.250.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**%**	**226.600.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	460	Paket	226.600.000	115	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum**	**4**	**%**	**527.407.160**		**%**	**146.080.778**		**%**	**9.347.660**		**%**	**-**		**%**	**54.638.813**		**%**	**39.747.957**		**%**	**103.734.430**	**-**	**%**	**103.734.430**	**-**	**%**	**19,67**	**Dp2KP**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	23.636.800	3	Paket	4.431.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.477.000		Paket	1.994.000	-	Paket	3.471.000	-	Paket	3.471.000	-	Paket	14,68	Dp2KP

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	600.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dp2KP
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	76.811.000	7	Paket	14.405.375	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	5.985.690		Paket	4.481.560	-	Paket	10.467.250	-	Paket	10.467.250	-	Paket	13,63	Dp2KP
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yg disediakan	4	Dokumen	1.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dp2KP
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan	425.359.360	4	Laporan	127.244.403	-	Laporan	9.347.660	-	Laporan	-		Laporan	47.176.123		Laporan	33.272.397	-	Laporan	89.796.180	-	Laporan	89.796.180	-	Laporan	21,11	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**%**	**15.910.400**		**%**	**43.375.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**25.301.784**		**%**	**25.301.784**	-	**%**	**25.301.784**	-	**%**	**159,03**	**Dp2KP**
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	15.910.400	3	Unit	43.375.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit	25.301.784	-	Unit	25.301.784	-	Unit	25.301.784	-	Unit	159,03	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**%**	**875.944.412**		**%**	**207.138.995**		**%**	**40.773.503**		**%**	**32.808.889**		**%**	**47.532.962**		**%**	**44.642.361**		**%**	**165.757.715**	-	**%**	**165.757.715**	-	**%**	**18,92**	**Dp2KP**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	672.000.000	12	Laporan	168.000.000	2	Laporan	31.346.628	2	Laporan	28.917.974		Laporan	34.075.562		Laporan	32.320.306	4	Laporan	126.660.470	4	Laporan	126.660.470	8	Laporan	18,85	Dp2KP
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	203.944.412	12	Laporan	39.138.995	2	Laporan	9.426.875	1	Laporan	3.890.915		Laporan	13.457.400		Laporan	12.322.055	3	Laporan	39.097.245	3	Laporan	39.097.245	6	Laporan	19,17	Dp2KP
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**%**	**3.761.285.520**		**%**	**273.846.880**		**%**	**16.275.640**		**%**	**41.976.852**		**%**	**62.303.557**		**%**	**113.462.342**		**%**	**234.018.391**	-	**%**	**234.018.391**	-	**%**	**6,22**	**Dp2KP**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	220	Unit	848.661.520	55	Unit	271.919.880	4	Unit	16.275.640	11	Unit	41.976.852		Unit	61.176.557		Unit	112.808.342	15	Unit	232.237.391	15	Unit	232.237.391	7	Unit	27,37	Dp2KP
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	10.442.000	20	Unit	1.927.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	1.127.000		Unit	654.000	-	Unit	1.781.000	-	Unit	1.781.000	-	Unit	17,06	Dp2KP
2	09	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	56.460.000	3	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dp2KP
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN (URUSAN WAJIB)		0		2.845.722.000												0			0			0			0			#DIV/0!	0		Dp2KP
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Diversifikasi Jenis Pangan Baru**	**1,2**	**%**	**2.189.214.000**		**%**	**1.000.000.000**		**%**	**-**		**%**	**123.187.500**		**%**	**210.000.000**		**%**	**575.729.280**		**%**	**908.916.780**	-	**%**	**908.916.780**	-	**%**	**41,52**	**Dp2KP**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Penyediaan dan penyaluran pangan pokok**	**4**	**%**	**1.210.200.000**		**%**	**500.000.000**		**%**	**-**		**%**	**123.187.500**		**%**	**210.000.000**		**%**	**153.362.500**		**%**	**486.550.000**	-	**%**	**486.550.000**	-	**%**	**40,20**	**Dp2KP**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8	Laporan	1.200.000	2	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dp2KP
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4	Laporan	1.204.000.000	30	Laporan	500.000.000	-	Laporan	-	11	Laporan	123.187.500		Laporan	210.000.000		Laporan	153.362.500	11	Laporan	486.550.000	11	Laporan	486.550.000	275	Laporan	40,41	Dp2KP
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4	Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4	Unit	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4	Unit	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4000	Keluarga	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gampong yang Bebas dari Status Rawan Pangan**	**120**	**Gampong**	**807.400.000**			**500.000.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**422.366.780**		**0**	**422.366.780**	-	**0**	**422.366.780**	-	**0**	**52,31**	**Dp2KP**
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	4	Dokumen	1.200.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	87	Ton	801.200.000	20	Ton	500.000.000	-	Ton	-	-	Ton	-		Ton			Ton	422.366.780	-	Ton	422.366.780	-	Ton	422.366.780	-	Ton	52,72	Dp2KP
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	87	Ton	4.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**03**	**2.03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Jumlah pangan lokal yang ditetapkan harga minimum**	**188**	**Bahan Pokok**				-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4	Laporan	1.600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan**	**4**	**%**	**170.014.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dokumen	1.200.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	Laporan	167.814.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dp2KP
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA**	**4**	**%**	**203.200.000**			**500.000.000**		**0**	-		**0**	**8.350.000**		**0**	**327.226.000**		**0**			**0**	**335.576.000**	-	**0**	**335.576.000**	-	**0**	**165,15**	**Dp2KP**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Laporan tahunan FSVA**	**4**	**Dokumen**	**1.200.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4	Dokumen	1.200.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penanganan kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah gampong Mandiri Pangan**	**120**	**Gampong**	**202.000.000**			**500.000.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**8.350.000**		**0**	**327.226.000**		**0**	**335.576.000**	-	**0**	**335.576.000**	-	**0**	**166,13**	**Dp2KP**
2	09	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	04	2.01	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	201.000.000	1	Dokumen	500.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen	8.350.000		Dokumen	327.226.000	-	Dokumen	335.576.000	-	Dokumen	335.576.000	-	Dokumen	166,95	Dp2KP
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pangan yang memenuhi syarat**	**4**	**%**	**14.968.431.024**			**52.553.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana pengujian yang tersedia**	**4**	**Unit**	**14.968.431.024**			**52.553.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4	Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20	Sertifikat	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	449.308.000	1	Dokumen	52.553.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dp2KP

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (Urusan Pilihan)		0		14.515.123.024		-			0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dp2KP
3	**27**	**02**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian**	**1,6**	**%**	**259.200.000**		**-**	**537.291.000**		**0**	**-**		**0**	**297.691.000**		**0**	**49.600.000**		**0**	**59.999.163**		**0**	**407.290.163**	**-**	**0**	**407.290.163**	**-**	**0**	**157,13**	**Dp2KP**
3	**27**	**02**	**2.01**	**Pengawasan Pengerunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Sarana Pertanian**	**8**	**Kali**	**256.600.000**		**-**	**50.000.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**59.999.163**		**0**	**59.999.163**	**-**	**0**	**59.999.163**	**-**	**0**	**23,38**	**Dp2KP**
3	27	02	2.01	01 Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komunitas teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8	Laporan	256.000.000	2	Laporan	50.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan	59.999.163	-	Laporan	59.999.163	-	Laporan	59.999.163	-	Laporan	23,44	Dp2KP
3	27	02	2.01	02 Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan	600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**02**	**2.02**	**Pengelolan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang dikelola**	**8**	**Jenis**	**1.200.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	02	2.02	02 Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	Laporan	600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	02	2.02	03 Pemanfatan SDG hewan /tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4	Dokumen	600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**02**	**2.05**	**Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak , dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**4**	**%**	**1.000.000**		**%**	**487.291.000**		**%**	**-**		**%**	**297.691.000**		**%**	**49.600.000**		**%**	**-**		**%**	**347.291.000**	**-**	**%**	**347.291.000**	**-**	**%**	**34.729,10**	**Dp2KP**
3	27	02	2.05	05 Pengendalian penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	80	Ton	600.000	20	Ton	487.291.000	-	Ton	-	20	Ton	297.691.000		Ton	49.600.000		Ton	0	20	Ton	347.291.000	20	Ton	347.291.000	25	Ton	57.881,83	Dp2KP
3	27	02	2.05	06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT , Bahan Pakan/Pakan	4	Laporan	400.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dp2KP
3	**27**	**02**	**2.06**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah Produksi Benih/bibit ternak dan Hijauan pakan ternak**	**4**	**kali**	**400.000**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**		**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**-**	**kali**	**-**	**Dp2KP**
3	27	02	2.06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15750	Ekor	400.000	-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-		Ekor			Ekor		-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-	Dp2KP
3	**27**	**03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian**	**1,2**	**%**	**13.920.846.024**			**404.770.000**		**0**	**-**		**0**	**26.750.000**		**0**	**34.395.000**		**0**	**159.960.800**		**0**	**221.105.800**	**-**	**0**	**221.105.800**	**-**	**0**	**1,59**	**Dp2KP**
3	**27**	**03**	**2.01**	**Pengembangan prasarana pertanian**	**Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian**	**8**	**kegiatan**	**253.400.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	03	2.01	01 Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B kawasan pertanian pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4	Dokumen	251.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	03	2.01	02 Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	4	Dokumen	1.200.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	03	2.01	03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4	Laporan	1.200.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**03**	**2.02**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian**	**32**	**Unit**	**13.667.446.024**		**-**	**404.770.000**		**0**	**-**		**0**	**26.750.000**		**0**	**34.395.000**		**0**	**159.960.800**		**0**	**221.105.800**	**-**	**0**	**221.105.800**	**-**	**0**	**1,62**	**Dp2KP**
3	27	03	2.02	07 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Unit	274.446.024	5	Unit	69.120.000	-	Unit	-	2	Unit	23.000.000		Unit	15.000.000		Unit	25.490.000	2	Unit	63.490.000	2	Unit	63.490.000	50	Unit	23,13	Dp2KP
3	27	03	2.02	08 Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	Unit	7.285.200.000	3	Unit	34.500.000	-	Unit	-	-	Unit	3.750.000		Unit	14.995.000		Unit	15.180.000	-	Unit	33.925.000	-	Unit	33.925.000	-	Unit	0,47	Dp2KP
3	27	03	2.02	09 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	Unit	6.107.800.000	2	Unit	301.150.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	4.400.000		Unit	119.290.800	-	Unit	123.690.800	-	Unit	123.690.800	-	Unit	2,03	Dp2KP
3	**27**	**04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet**	**2**	**%**	**304.677.000**		**-**	**14.400.000**		**0**	**-**		**0**	**3.600.000**		**0**	**-**		**0**	**900.000**		**0**	**4.500.000**	**-**	**0**	**4.500.000**	**-**	**0**	**1,48**	**Dp2KP**
3	**27**	**04**	**2.01**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan**	**129104**	**Ekor**	**302.077.000**		**-**	**14.400.000**		**0**	**-**		**0**	**3.600.000**		**0**	**-**		**0**	**900.000**		**0**	**4.500.000**	**-**	**0**	**4.500.000**	**-**	**0**	**1,49**	**Dp2KP**
3	27	04	2.01	01 Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	Laporan	52.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	04	2.01	02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	250.077.000	1	Laporan	14.400.000	-	Laporan	-	-	Laporan	3.600.000		Laporan	0		Laporan	900.000	-	Laporan	4.500.000	-	Laporan	4.500.000	-	Laporan	1,80	Dp2KP
3	**27**	**04**	**2.04**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Dokumen yang diterbitkan**	**8**	**dokumen**	**2.600.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	04	2.04	01 Pendampingan unit usaha hewan dan Produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8	Laporan	1.600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	04	2.04	04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**05**		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dabn Penanggulangan Bencana Pertanian**	**2**	**%**	**3.600.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	**27**	**05**	**2.01**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Luas Areal Bencana yang terkendali**	**4**	**kali**	**3.600.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	05	2.01	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20	Ha	1.600.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	05	2.01	02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20	Ha	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**06**		**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	**2**	**%**	**800.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	**27**	**06**	**2.01**	**Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Pertanian**	**60**	**Izin Usaha**	**800.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	06	2.01	02 Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	8	Dokumen	800.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	**27**	**07**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Penyuluh Pertanian / Perkebunan**	**100**	**%**	**26.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	**27**	**07**	**2.01**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelompok Tani Binaan**	**36**	**Kecamatan**	**26.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Dp2KP**
3	27	07	2.01	01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	Unit	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	07	2.01	02 Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	Unit	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	07	2.01	03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4	Unit	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	27	07	2.01	04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	120	Unit	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Urusan Pilihan)												0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dp2KP
3	**25**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Jumlah Wilayah Penangkapan**	**1,4**	**%**	**2.481.000.000**		**-**	**2.948.668.100**		**0**	**19.500.000**		**0**	**550.943.195**		**0**	**1.480.094.455**		**0**	**446.791.800**		**0**	**2.497.329.450**	**-**	**0**	**2.497.329.450**	**-**	**0**	**100,66**	**Dp2KP**
3	**25**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**4**	**%**	**2.481.000.000**		**-**	**2.948.668.100**		**0**	**19.500.000**		**0**	**550.943.195**		**0**	**1.480.094.455**		**0**	**446.791.800**		**0**	**2.497.329.450**	**-**	**0**	**2.497.329.450**	**-**	**0**	**100,66**	**Dp2KP**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Dokumen	1.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0			-	0	-	-	0	-	-	0	-	Dp2KP
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	80	Unit	2.000.000.000	20	Unit	2.073.969.100	-	Unit	-	-	Unit	347.994.195		Unit	1.460.594.455		Unit	0	-	Unit	1.808.588.650	-	Unit	1.808.588.650	-	Unit	90,43	Dp2KP
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	40	Unit	480.000.000	10	Unit	874.699.000	-	Unit	19.500.000	2	Unit	202.949.000		Unit	19.500.000		Unit	446.791.800	2	Unit	688.740.800	2	Unit	688.740.800	5	Unit	143,49	Dp2KP
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**1,4**	**%**	**1.568.480.000**			**590.200.000**		**0**	-		**0**	**219.200.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**219.200.000**	-	**0**	**219.200.000**	-	**0**	**13,98**	**Dp2KP**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase jumlah pembudidaya ikan**	**4**	**%**	**1.568.480.000**			**590.200.000**		**0**	-		**0**	**219.200.000**		**0**			**0**			**0**	**219.200.000**	-	**0**	**219.200.000**	-	**0**	**13,98**	**Dp2KP**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Meningkat Pengembangan Kapasitas	20	Kelompok	1.568.480.000	5	Kelompok	590.200.000	-	Kelompok	-	1	Kelompok	219.200.000		Kelompok	0		Kelompok	229.180.740	1	Kelompok	448.380.740	1	Kelompok	448.380.740	5	Kelompok	28,59	Dp2KP
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Olahan Perikanan**	**100**	**%**	**2.001.200.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Dp2KP**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jaminan mutu dan keamanan**	**4**	**Pameran**	**1.200.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	44	Unit Usaha	1.200.000	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	Dp2KP
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah bahan baku industri**	**4**	**%**	**2.000.000.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**			**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dp2KP**
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	24	Pelaku Usaha	2.000.000.000	6	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	Dp2KP
2	**13**				**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong**				**29.194.909.380**			**7.512.581.791**		**0**	**788.232.804**		**0**	**1.282.413.054**		**0**	**2.380.691.472**		**0**	**1.967.963.990**		**0**	**6.419.301.320**	-	**0**	**6.419.301.320**	**#DIV/0!**	**0**	**21,99**	**DPMG**
2					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat							-		0			0			0			0			0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	DPMG
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Peranekat daerah**	**100**	**%**	**20.631.359.492**			**4.341.824.201**		**0**	**788.232.804**		**0**	**1.099.473.054**		**0**	**1.091.775.022**		**0**	**1.095.044.990**		**0**	**4.074.525.870**	-	**0**	**4.074.525.870**	-	**0**	**19,75**	**DPMG**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**100.000.000**			**1.826.150**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	**1.326.150**		**0**	**1.326.150**	-	**0**	**1.326.150**	-	**0**	**1,33**	**DPMG**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	1.826.150		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	1.326.150	-	Dokumen	1.326.150	-	Dokumen	1.326.150	-	Dokumen	1,33	DPMG
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**16.448.376.292**			**3.419.120.451**		**0**	**788.232.804**		**0**	**1.099.473.054**		**0**	**907.471.460**		**0**	**825.748.712**		**0**	**3.620.926.030**	-	**0**	**3.620.926.030**	-	**0**	**22,01**	**DPMG**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	15.277.176.292	12	Bulan	2.872.120.451	3	Bulan	658.182.804	3	Bulan	967.398.054	3	Bulan	777.716.460	3	Bulan	704.928.712	12	Bulan	3.108.226.030	12	Bulan	3.108.226.030	25	Bulan	20,35	DPMG
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	1.171.200.000	12	Bulan	547.000.000	3	Bulan	130.050.000	3	Bulan	132.075.000	3	Bulan	129.755.000	3	Bulan	120.820.000	12	Bulan	512.700.000	12	Bulan	512.700.000	25	Bulan	43,78	DPMG
2	**13**	**02**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**79.200.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**DPMG**
2	13	02	2.05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta artibut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	79.200.000	1	Paket	-		Paket			Paket			Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	DPMG
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.745.589.200**			**410.884.600**		**0**	-		**0**	-		**0**	**101.015.825**		**0**	**93.363.580**		**0**	**194.379.405**	-	**0**	**194.379.405**	-	**0**	**11,14**	**DPMG**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	36.200.000	1	Paket	8.598.000		Paket		3	Paket	4.247.000	3	Paket	4.351.000	9	Paket	8.598.000	9	Paket	8.598.000	225	Paket	23,75	DPMG
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	68.300.000	1	Paket	21.476.800		Paket			Paket			Paket	3.785.700		Paket	17.691.100	-	Paket	21.476.800	-	Paket	21.476.800	-	Paket	31,44	DPMG
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	1.641.089.200	60	Laporan	380.809.800		Laporan		8	Laporan		12	Laporan	92.983.125	25	Laporan	71.321.480	45	Laporan	164.304.605	45	Laporan	164.304.605	19	Laporan	10,01	DPMG
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**1.164.000.000**			**202.275.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**DPMG**
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMG
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit	155.000.000	12	Unit	79.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMG
2	13	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMG
2	13	02	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	487.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMG
2	13	02	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	47	Unit	487.000.000	10	Unit	122.775.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	DPMG
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**718.820.000**			**188.276.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**61.447.737**		**0**	**110.204.548**		**0**	**171.652.285**	-	**0**	**171.652.285**	-	**0**	**23,88**	**DPMG**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	420.720.000	1	Laporan	104.100.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	35.803.737		Laporan	37.719.009	-	Laporan	73.522.746	-	Laporan	73.522.746	-	Laporan	17,48	DPMG
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	298.100.000	1	Laporan	84.176.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	25.644.000		Laporan	72.485.539	-	Laporan	98.129.539	-	Laporan	98.129.539	-	Laporan	32,92	DPMG
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**375.374.000**			**119.442.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**21.840.000**		**0**	**64.402.000**		**0**	**86.242.000**	-	**0**	**86.242.000**	-	**0**	**22,97**	**DPMG**
2	13	02	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	Unit	234.874.000	9	Unit	107.200.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	21.840.000		Unit	52.160.000	-	Unit	74.000.000	-	Unit	74.000.000	-	Unit	31,51	DPMG
2	13	02	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14	Unit	3.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	02	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	156	Unit	55.500.000	20	-	12.242.000	-	0	-	-	0	-		0			0	12.242.000	-	0	12.242.000	-	0	12.242.000	-	0	22,06	DPMG
2	13	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	32.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	02	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							-		0			0			0			0			0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	DPMG
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik**	**100**	**%**	**40.000.000**			**1.544.993.950**		**0**	-		**0**	**6.680.000**		**0**	**942.163.950**		**0**	**372.066.000**		**0**	**1.320.909.950**	-	**0**	**1.320.909.950**	-	**0**	**3.302,27**	**DPMG**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan Gampong yang tersedia**	**100**	**%**	**40.000.000**			**1.544.993.950**		**0**	-		**0**	**6.680.000**		**0**	**942.163.950**		**0**	**372.066.000**		**0**	**1.320.909.950**	-	**0**	**1.320.909.950**	-	**0**	**3.302,27**	**DPMG**
2	13	02	2.01	06	Fasilitas sarana dan Prasarana desa	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana gampong	2400	Unit	40.000.000	600	Unit	1.544.993.950		Unit			Unit	6.680.000		Unit	942.163.950		Unit	372.066.000	-	Unit	1.320.909.950	-	Unit	1.320.909.950	-	Unit	3.302,27	DPMG
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk**	**100**	**%**	**394.600.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**DPMG**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Persentase Gampong yang melakukan kerjasama antar gampong dan pihak ke tiga**	**100**	**%**	**394.600.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**DPMG**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4	Dokumen	394.600.000	1	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**13**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik**	**100**	**%**	**3.882.300.000**		-	**713.789.820**	**0**	-		**0**	**176.260.000**	**0**	**8.940.000**		**0**	**360.630.000**		**0**	**545.830.000**	-	**0**	**545.830.000**	-	**0**	**14,06**	**DPMG**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang baik**	**100**	**%**	**3.882.300.000**		-	**713.789.820**	**0**	-		**0**	**176.260.000**	**0**	**8.940.000**		**0**	**360.630.000**		**0**	**545.830.000**	-	**0**	**545.830.000**	-	**0**	**14,06**	**DPMG**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	Dokumen	488.400.000	1	dokumen	320.352.945	-	dokumen	-	-	dokumen	-	dokumen	8.940.000		dokumen	130.163.000	-	dokumen	139.103.000	-	dokumen	139.103.000	-	dokumen	28,48	DPMG
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4	Dokumen	99.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	360	Dokumen	149.500.000	90	Dokumen	23.869.875	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	360	Dokumen	1.090.000.000	90	Dokumen	32.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	360	Orang	83.600.000	90	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	DPMG
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4	Laporan	113.500.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	DPMG
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	4	Dokumen	155.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	108	Dokumen	513.000.000	1	Dokumen	100.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4	Laporan	200.000.000	1	Laporan	61.307.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan			Laporan	110.907.000	-	Laporan	110.907.000	-	Laporan	110.907.000	-	Laporan	55,45	DPMG
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	36	Dokumen	63.000.000	1	Dokumen	176.260.000	-	Dokumen	-	1	Dokumen	176.260.000	Dokumen	0		Dokumen	0	1	Dokumen	176.260.000	1	Dokumen	176.260.000	3	Dokumen	279,78	DPMG
2	13	04	2.02	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan desa	3	Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	4	Dokumen	104.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasita Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	180	Orang	103.300.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	Laporan	101.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	604.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen	119.560.000	-	Dokumen	119.560.000	-	Dokumen	119.560.000	-	Dokumen	19,79	DPMG
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang baik**	**100**	**%**	**4.246.649.888**		-	**911.973.820**	**0**	-		**0**	-	**0**	**337.812.500**		**0**	**140.223.000**		**0**	**478.035.500**	-	**0**	**478.035.500**	-	**0**	**11,26**	**DPMG**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina**	**100**	**%**	**4.246.649.888**		-	**911.973.820**	**0**	-		**0**	-	**0**	**337.812.500**		**0**	**140.223.000**		**0**	**478.035.500**	-	**0**	**478.035.500**	-	**0**	**11,26**	**DPMG**
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	3.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Dokumen	97.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	800	Unit	20.000.000	200	Unit	262.432.500	-	Unit	-	-	Unit	-	Unit	262.432.500		Unit	0	-	Unit	262.432.500	-	Unit	262.432.500	-	Unit	1.312,16	DPMG
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	200	Dokumen	204.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	DPMG
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4	Laporan	1.447.900.000	1	Laporan	10.387.000		Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan			Laporan	387.000	-	Laporan	387.000	-	Laporan	387.000	-	Laporan	0,03	DPMG
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4	Laporan	193.800.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	DPMG
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	34	Dokumen	2.274.949.888	8	Dokumen	639.154.320	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dokumen	75.380.000		Dokumen	139.836.000	-	Dokumen	215.216.000	-	Dokumen	215.216.000	-	Dokumen	9,46	DPMG
2	13	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45	Keluarga	3.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45	Keluarga	3.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	DPMG
2	**16**				**Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik**				**39.893.618.000**		-	**8.481.341.182**	**0**	**1.303.448.421**		**0**	**1.950.191.363**	**0**	**2.476.014.512**		**0**	**4.144.551.169**		**0**	**9.874.205.465**	-	**0**	**9.874.205.465**	**#DIV/0!**	**0**	**24,75**	
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**33.622.426.305**		-	**6.231.823.607**	**0**	**1.303.448.421**		**0**	**1.643.944.863**	**0**	**1.579.809.112**		**0**	**1.493.069.319**		**0**	**6.020.271.715**	-	**0**	**6.020.271.715**	-	**0**	**17,91**	**Diskominfotik'**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	-		-	-	**0**	-		**0**	-	**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**27.801.853.060**		-	**5.218.814.994**	**0**	**1.147.083.573**		**0**	**1.357.967.657**	**0**	**1.307.216.083**		**0**	**1.121.205.091**		**0**	**4.933.472.404**	-	**0**	**4.933.472.404**	-	**0**	**17,75**	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	19.422.613.060	12	Bulan	3.898.514.994	3	Bulan	793.563.813	3	Bulan	1.140.021.257	3	Bulan	903.267.813	3	Bulan	787.420.891	12	Bulan	3.624.273.774	12	Bulan	3.624.273.774	25	Bulan	18,66	Diskominfotik'
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	8.379.240.000	12	Bulan	1.320.300.000	3	Bulan	353.519.760	3	Bulan	217.946.400	3	Bulan	403.948.270	3	Bulan	333.784.200	12	Bulan	1.309.198.630	12	Bulan	1.309.198.630	25	Bulan	15,62	Diskominfotik'

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**321.200.000**			-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	321.200.000	60	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Diskominfotik'
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**849.499.721**		**-**	**89.033.900**		**0**	-		**0**	**35.971.936**		**0**	**24.630.920**		**0**	**60.231.970**		**0**	**120.834.826**	-	**0**	**120.834.826**	-	**0**	**14,22**	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	23.445.424	6	Paket	7.327.000	-	Paket	-	2	Paket	2.440.000	1	Paket	1.987.000	2	Paket	2.900.000	5	Paket	7.327.000	5	Paket	7.327.000	21	Paket	31,25	Diskominfotik'
2	16	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	61.982.988	7	Paket	11.706.900	-	Paket	-	2	Paket	3.854.080	2	Paket	3.844.080	3	Paket	9.031.240	7	Paket	16.729.400	7	Paket	16.729.400	25	Paket	26,99	Diskominfotik'
2	16	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	764.071.309	20	Laporan	70.000.000	-	Laporan	-	6	Laporan	29.677.856	5	Laporan	18.799.840	9	Laporan	48.300.730	20	Laporan	96.778.426	20	Laporan	96.778.426	25	Laporan	12,67	Diskominfotik'
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**533.279.560**		**-**	**53.710.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	533.279.560	10	Unit	53.710.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Diskominfotik'
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3.002.137.772**		**-**	**742.041.113**		**0**	**156.364.848**		**0**	**217.019.136**		**0**	**218.523.309**		**0**	**259.556.058**		**0**	**851.463.351**	-	**0**	**851.463.351**	-	**0**	**28,36**	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	2.794.436.452	12	Laporan	698.609.113	3	Laporan	156.364.848	4	Laporan	204.214.136	3	Laporan	205.964.309	3	Laporan	242.421.808	13	Laporan	808.965.101	13	Laporan	808.965.101	27	Laporan	28,95	Diskominfotik'
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	207.701.320	12	Laporan	43.432.000	-	Laporan	-	3	Laporan	12.805.000		Laporan	12.559.000	6	Laporan	17.134.250	9	Laporan	42.498.250	9	Laporan	42.498.250	19	Laporan	20,46	Diskominfotik'
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.114.456.192**		**-**	**128.223.600**		**0**	-		**0**	**32.986.134**		**0**	**29.438.800**		**0**	**52.076.200**		**0**	**114.501.134**	-	**0**	**114.501.134**	-	**0**	**10,27**	**Diskominfotik'**
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	361.948.400	4	Unit	100.600.600	-	Unit	-	1	Unit	20.696.134	1	Unit	27.289.800	2	Unit	44.798.200	4	Unit	92.784.134	4	Unit	92.784.134	25	Unit	25,63	Diskominfotik'
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232	Unit	752.507.792	58	Unit	27.623.000	-	Unit	-	4	Unit	12.290.000	10	Unit	2.149.000	19	Unit	7.278.000	33	Unit	21.717.000	33	Unit	21.717.000	14	Unit	2,89	Diskominfotik'
2					Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Diskominfotik'
2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat**	**100**	**%**	**3.819.682.606**		**-**	**1.889.031.350**		**0**	-		**0**	**275.000.000**		**0**	**778.905.900**		**0**	**2.497.156.000**		**0**	**3.551.061.900**	-	**0**	**3.551.061.900**	-	**0**	**92,97**	**Diskominfotik'**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat**	**100**	**%**	**3.819.682.606**		**-**	**1.889.031.350**		**0**	-		**0**	**275.000.000**		**0**	**778.905.900**		**0**	**2.497.156.000**		**0**	**3.551.061.900**	-	**0**	**3.551.061.900**	-	**0**	**92,97**	**Diskominfotik'**
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	223.553.228	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4	Dokumen	233.485.528	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dokumen	308.837.848	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	20	Layanan	2.751.945.668	5	Layanan	1.877.701.900	-	Layanan	-	2	Layanan	275.000.000	1	Layanan	778.905.900	3	Layanan	2.497.156.000	6	Layanan	3.551.061.900	6	Layanan	3.551.061.900	30	Layanan	129,04	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	Dokumen	123.743.600	1	Dokumen	11.329.450	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	180	Orang	85.816.734	45	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Diskominfotik'
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	Dokumen	92.300.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika**	**100**	**%**	**1.887.149.129**		**-**	**360.486.225**		**0**	-		**0**	**31.246.500**		**0**	**117.299.500**		**0**	**154.325.850**		**0**	**302.871.850**	-	**0**	**302.871.850**	-	**0**	**16,05**	**Diskominfotik'**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola**	**100**	**%**	**612.462.504**		**-**	**311.130.475**		**0**	-		**0**	**31.246.500**		**0**	**117.299.500**		**0**	**142.217.600**		**0**	**290.763.600**	-	**0**	**290.763.600**	-	**0**	**47,47**	**Diskominfotik'**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	176	Unit	612.462.504	44	Unit	311.130.475	-	Unit	-	9	Unit	31.246.500	15	Unit	117.299.500	21	Unit	142.217.600	45	Unit	290.763.600	45	Unit	290.763.600	26	Unit	47,47	Diskominfotik'
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase layanan e-government yang dikelola**	**100**	**%**	**1.274.686.625**		**-**	**49.355.750**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	**12.108.250**		**0**	**12.108.250**	-	**0**	**12.108.250**	-	**0**	**0,95**	**Diskominfotik'**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	304.816.000	1	Dokumen	30.497.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	Unit	152.603.676	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Diskominfotik'
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	176	Perangkat Daerah	186.968.000	44	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		-	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	Diskominfotik'
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12	Unit	171.949.468	3	Unit	18.858.250	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit		3	Unit	12.108.250	3	Unit	12.108.250	3	Unit	12.108.250	25	Unit	7,04	Diskominfotik'
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	458.349.481	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Diskominfotik'
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2					Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Diskominfotik'
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah**	**100**	**%**	**525.002.770**		**-**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Diskominfotik'**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota**	**100**	**%**	**525.002.770**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Diskominfotik'**
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	272	Orang	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	136	Orang	525.002.770	34	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Diskominfotik'
2					Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									0			0			0			0			0			0		#DIV/0!	0		Diskominfotik'
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100**	**%**	**39.357.190**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Diskominfotik'**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana**	**100**	**%**	**39.357.190**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**			**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Diskominfotik'**
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	39.357.190	1	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**-**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Diskominfotik'**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	176	Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	Diskominfotik'
2	**23**				**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**				**22.082.662.316**			**5.657.943.832**		**0**	**641.950.812**		**0**	**539.199.076**		**0**	**2.710.205.750**		**0**	**1.185.346.982**		**0**	**5.076.702.620**	**-**	**0**	**5.076.702.620**	**#DIV/0!**	**0**	**22,99**	**Disarsip**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**18.078.837.036**		**-**	**3.676.725.676**		**0**	**641.950.812**		**0**	**539.199.076**		**0**	**1.426.838.950**		**0**	**895.577.232**		**0**	**3.503.566.070**	**-**	**0**	**3.503.566.070**	**-**	**0**	**19,38**	**Disarsip**
2	**23**	**01**	**20.1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**31.245.196**		**-**	**5.137.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Disarsip**
2	23	01	20.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	20	Dokumen	31.245.196	5	Dokumen	5.137.000	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1	Dokumen		1	Dokumen		5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	25	Dokumen	-	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**15.380.300.776**		**-**	**3.176.556.158**		**0**	**641.950.812**		**0**	**539.199.076**		**0**	**1.320.190.689**		**0**	**693.941.562**		**0**	**3.195.282.139**	**-**	**0**	**3.195.282.139**	**-**	**0**	**20,78**	**Disarsip**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	13.550.300.776	12	Bulan	2.728.076.158	3	Bulan	550.400.812	3	Bulan	539.199.076	3	Bulan	1.096.210.689	3	Bulan	572.771.562	12	Bulan	2.758.582.139	12	Bulan	2.758.582.139	25	Bulan	20,36	Disarsip
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	1.830.000.000	12	bulan	448.480.000	3	bulan	91.550.000		bulan	-	3	bulan	223.980.000	3	bulan	121.170.000	9	bulan	436.700.000	9	bulan	436.700.000	19	bulan	23,86	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**116.200.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Disarsip**
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	59.400.000	1	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Disarsip
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	32.000.000	2	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Disarsip
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	24.800.000	20	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**511.051.260**		**-**	**99.816.430**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**24.561.363**		**0**	**58.732.453**		**0**	**83.293.816**	**-**	**0**	**83.293.816**	**-**	**0**	**16,30**	**Disarsip**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	34.423.680	1	Paket	9.678.000	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	1.768.000		Paket	7.910.000	1	Paket	9.678.000	1	Paket	9.678.000	25	Paket	28,11	Disarsip
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	38.294.400	1	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Disarsip
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	61.884.780	1	Paket	23.638.430	-	Paket	-	-	Paket	-	1	Paket	4.160.050		Paket	18.882.725	1	Paket	23.042.775	1	Paket	23.042.775	25	Paket	37,23	Disarsip
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	14.120.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Disarsip
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	300.000.000	10	Laporan	66.500.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	18.633.313		Laporan	31.939.728	-	Laporan	50.573.041	-	Laporan	50.573.041	-	Laporan	16,86	Disarsip
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	30.170.400	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Disarsip
2	23	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	32.158.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**386.817.200**		**-**	**65.099.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**Disarsip**
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	50.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	30.452.000	1	Unit	65.099.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	41.100.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	Unit	217.672.000	10	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	47.593.200	3	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.164.321.152**		**-**	**230.772.000**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**60.323.978**		**0**	**75.374.397**		**0**	**135.698.375**	**-**	**0**	**135.698.375**	**-**	**0**	**11,65**	**Disarsip**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	22.760.000	1	Laporan	1.650.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan		1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	25	Laporan	43,94	Disarsip
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	806.400.000	1	Laporan	162.900.000	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	38.265.978		Laporan	15.844.397	2	Laporan	54.110.375	2	Laporan	54.110.375	50	Laporan	6,71	Disarsip
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	46.000.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Disarsip
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	289.161.152	1	Laporan	66.222.000	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	22.058.000		Laporan	49.530.000	2	Laporan	71.588.000	2	Laporan	71.588.000	50	Laporan	24,76	Disarsip
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**488.901.452**		**-**	**99.345.088**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**21.762.920**		**0**	**67.528.820**		**0**	**89.291.740**	**-**	**0**	**89.291.740**	**-**	**0**	**18,26**	**Disarsip**
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	300.465.952	5	Unit	87.263.488	-	Unit	-	5	Unit	-	5	Unit	19.318.400		Unit	58.595.700	10	Unit	77.914.100	10	Unit	77.914.100	50	Unit	25,93	Disarsip
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24	Unit	18.954.556	6	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	39.308.944	10	Unit	12.081.600	-	Unit	-	1	Unit	-		Unit	2.444.520		Unit	8.933.120	1	Unit	11.377.640	1	Unit	11.377.640	3	Unit	28,94	Disarsip
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	53.176.800	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	42.279.200	5	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	34.716.000	6	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Disarsip
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**100**	**%**	**3.024.764.060**		-	**1.904.031.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**1.283.366.800**		**0**	**289.769.750**		**0**	**1.573.136.550**	-	**0**	**1.573.136.550**	-	**0**	**52,01**	**Disarsip**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah**	**100**	**%**	**523.480.060**		-	**1.205.865.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**585.200.800**		**0**	**289.769.750**		**0**	**874.970.550**	-	**0**	**874.970.550**	-	**0**	**167,14**	**Disarsip**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4	layanan	81.400.000	1	Layanan	-	-	Layanan	-	-	Layanan	-		Layanan			Layanan		-	Layanan	-	-	Layanan	-	-	Layanan	-	Disarsip
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	80	perpustakaan	37.900.000	20	Perpustakaan	1.026.043.000	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	1	Perpustakaan	495.378.800		Perpustakaan	0	1	Perpustakaan	495.378.800	1	Perpustakaan	495.378.800	1	Perpustakaan	1.307,07	Disarsip
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah,Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	28	eksemplar	29.092.060	10	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-		Eksemplar			Eksemplar		-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	Disarsip
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40	Perpustakaan	66.252.000	10	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-		Perpustakaan			Perpustakaan		-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	Disarsip
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Pernustakaan	14	perpustakaan	29.200.000	5	Perpustakaaan	-	-	Perpustakaaan	-	-	Perpustakaaan	-		Perpustakaaan			Perpustakaaan		-	Perpustakaaan	-	-	Perpustakaaan	-	-	Perpustakaaan	-	Disarsip
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	orang	30.200.000	5	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Disarsip
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4	layanan	30.600.000	1	Layanan	-	-	Layanan	-	-	Layanan	-		Layanan			Layanan		-	Layanan	-	-	Layanan	-	-	Layanan	-	Disarsip
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	750	Eksemplar	186.608.000	200	Eksemplar	179.822.000	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-		Eksemplar	89.822.000	1.384	Eksemplar	289.769.750	1.384	Eksemplar	379.591.750	1.384	Eksemplar	379.591.750	185	Eksemplar	203,42	Disarsip
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	32.228.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Disarsip
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan layanan perpustakaan**	**100**	**%**	**2.501.284.000**		-	**698.166.000**		**0**	-		**0**	-		**0**	**698.166.000**		**0**	-		**0**	**698.166.000**	-	**0**	**698.166.000**	-	**0**	**27,91**	**Disarsip**
2	23	02	2.02	01	Sosiasasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	80	Lokus	50.600.000	-	Lokus	-	-	Lokus	-	-	Lokus	-		Lokus			Lokus		-	Lokus	-	-	Lokus	-	-	Lokus	-	Disarsip
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpustakaan	2.200.000.000	1	Perpustakaan	698.166.000	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-		Perpustakaan	698.166.000		Perpustakaan	0	-	Perpustakaan	698.166.000	-	Perpustakaan	698.166.000	-	Perpustakaan	31,73	Disarsip
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12	Orang	116.344.000	3	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Oraing	-	Disarsip
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8	Perpustakaan	35.340.000	2	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-		Perpustakaan			Perpustakaan		-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	Disarsip
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	20	orang	99.000.000	5	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Disarsip
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase peningkatan peran serta masyarakat dan bahan pustaka/naskah kuno yang dilestarikan dan dialihmediakan**	**100**	**%**	**89.401.220**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno**	**100**	**%**	**89.401.220**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	12	Orang	29.700.608	3	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Disarsip
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	24	Eksemplar	59.700.612	5	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-		Eksemplar			Eksemplar		-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	Disarsip
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pengelolaan Arsip OPD Sesuai dengan Kaidah Kearsipan**	**100**	**%**	**598.716.800**		-	**65.719.246**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertibnya Pengelolaan Arsip Dinamis**	**100**	**%**	**441.095.600**		-	**65.719.246**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12000	Berkas	334.775.600	2.000	Berkas	53.916.746	-	Berkas	-	-	Berkas	-		Berkas			Berkas		-	Berkas	-	-	Berkas	-	-	Berkas	-	Disarsip
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2000	Berkas	64.670.000	300	Berkas	11.802.500	-	Berkas	-	-	Berkas	-		Berkas			Berkas		-	Berkas	-	-	Berkas	-	-	Berkas	-	Disarsip
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	41.650.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Disarsip
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertibnya Penyelamatan Arsip Statis**	**100**	**%**	**74.673.200**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	4	Arsip	33.368.000	1	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4	Arsip	41.305.200	1	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Penginputan Arsip Kedalam Aplikasi**	**100**	**%**	**82.948.000**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	4	pengguna	49.380.000	1	Pengguna	-	-	Pengguna	-	-	Pengguna	-		Pengguna			Pengguna		-	Pengguna	-	-	Pengguna	-	-	Pengguna	-	Disarsip
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4	laporan	33.568.000	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Disarsip
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip statis yang diselamatkan**	**100**	**%**	**224.207.200**		-	**11.467.910**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Terlaksananya pemusnahan Arsip sesuai dengan peraturan**	**100**	**%**	**66.120.800**		-	**11.467.910**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4	Arsip	41.200.000	1	Arsip	11.467.910	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	800	Berkas	24.920.800	200	Berkas	-	-	Berkas	-	-	Berkas	-		Berkas			Berkas		-	Berkas	-	-	Berkas	-	-	Berkas	-	Disarsip
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Tersusunnya Daftar Penilaian, penyerahan dan penyusunan Arsip**	**100**	**%**	**55.707.600**		-	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Daftar	29.360.000	-	Daftar	-	-	Daftar	-	-	Daftar	-		Daftar			Daftar		-	Daftar	-	-	Daftar	-	-	Daftar	-	Disarsip
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Arsip	26.347.600	-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Autentekasi Arsip Hasil Alih Media**	**100**	**%**	**51.178.800**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	4	Arsip	25.840.800	-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	Arsip	25.338.000	-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Tersusun Daftar Pencarian Arsip**	**100**	**%**	**51.200.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1	Arsip	29.200.000	1	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengamuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengamuman	1	Arsip	22.000.000	1	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase SOP izin penggunaan arsip**	**100**	**%**	**66.736.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Jumlah SOP izin penggunaan arsip**	**100**	**%**	**66.736.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Disarsip**
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	4	SOP	37.476.000	-	SOP	-	-	SOP	-	-	SOP	-		SOP			SOP		-	SOP	-	-	SOP	-	-	SOP	-	Disarsip
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	4	Arsip	29.260.000	-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-		Arsip			Arsip		-	Arsip	-	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Disarsip
3	**26**				**Dinas Pariwisata**				**40.721.876.304**			**7.803.014.337**	**0**	**984.641.650**		**0**	**1.263.308.920**		**0**	**2.554.034.728**		**0**	**3.078.520.947**		**0**	**7.880.506.245**	-	**0**	**7.880.506.245**	**#DIV/0!**	**0**	**19,35**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**100**	**%**	**23.958.864.156**		-	**5.295.473.564**	**0**	**949.871.650**		**0**	**694.485.920**		**0**	**1.888.456.768**		**0**	**1.163.064.647**		**0**	**4.695.878.985**	-	**0**	**4.695.878.985**	-	**0**	**19,60**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**17.906.932**		-	**16.136.720**	**0**	-	**0**	-		**0**	-		**0**	**4.309.795**		**0**	**4.309.795**	-	**0**	**4.309.795**	-	**0**	**24,07**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	bulan	17.906.932	20	Dokumen	16.136.720		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	4.309.795		Dokumen	4.309.795	-	Dokumen	4.309.795	-	Dokumen	24,07	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan**	**100**	**%**	**20.633.318.648**		-	**4.136.981.723**	**0**	**910.023.029**		**0**	**621.849.893**		**0**	**1.538.208.825**		**0**	**894.220.150**		**0**	**3.964.301.897**	-	**0**	**3.964.301.897**	-	**0**	**19,21**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	16.726.018.648	12	Bulan	3.056.111.723		Bulan	658.023.029		Bulan	341.499.893		Bulan	1.269.478.825		Bulan	635.220.150		Bulan	2.904.221.897	-	Bulan	2.904.221.897	-	Bulan	17,36	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	bulan	3.907.300.000	12	Bulan	1.080.870.000		Bulan	252.000.000		Bulan	280.350.000		Bulan	268.730.000		Bulan	259.000.000		Bulan	1.060.080.000	-	Bulan	1.060.080.000	-	Bulan	27,13	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**178.200.000**		-	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	324	stel	178.200.000	81	Stel	-		Stel			Stel			Stel			Stel			Stel	-	-	Stel	-	-	Stel	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.412.332.328**		-	**408.470.678**	**0**	-	**0**	**4.589.000**		**0**	**145.219.312**		**0**	**97.904.830**		**0**	**247.713.142**	-	**0**	**247.713.142**	-	**0**	**17,54**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	bulan	38.569.008	12	Bulan	13.838.000	3	Bulan		3	Bulan	3.459.000	3	Bulan	5.794.000	3	Bulan	0		Bulan	9.253.000	-	Bulan	9.253.000	-	Bulan	23,99	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	bulan	36.550.812	12	Bulan	5.679.000	3	Bulan		3	Bulan	1.130.000	3	Bulan	2.595.000	3	Bulan	346.000		Bulan	4.071.000	-	Bulan	4.071.000	-	Bulan	11,14	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	bulan	1.337.212.508	12	Bulan	388.953.678	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	136.830.312	3	Bulan	97.558.830		Bulan	234.389.142	-	Bulan	234.389.142	-	Bulan	17,53	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.509.450.776**		-	**544.645.043**	**0**	**39.848.621**		**0**	**65.511.027**		**0**	**92.143.231**		**0**	**90.669.222**		**0**	**288.172.101**	-	**0**	**288.172.101**	-	**0**	**19,09**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0		-		-	-	0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	bulan	865.443.576	12	Bulan	225.300.894		Bulan	39.848.621		Bulan	42.435.027		Bulan	41.793.472		Bulan	38.938.817		Bulan	163.015.937	-	Bulan	163.015.937	-	Bulan	18,84	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	bulan	168.000.000	12	Bulan	103.125.000		Bulan			Bulan	23.076.000		Bulan			Bulan			Bulan	23.076.000	-	Bulan	23.076.000	-	Bulan	13,74	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	bulan	476.007.200	12	Bulan	216.219.149		Bulan			Bulan			Bulan	50.349.759		Bulan	51.730.405		Bulan	102.080.164	-	Bulan	102.080.164	-	Bulan	21,45	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terjaganya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**		**207.655.472**		-	**189.239.400**	**0**	-	**0**	**2.536.000**		**0**	**112.885.400**		**0**	**75.960.650**		**0**	**191.382.050**	-	**0**	**191.382.050**	**#DIV/0!**	**0**	**92,16**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0		-	12	Bulan	81.690.000		Bulan			Bulan	2.536.000		Bulan			Bulan	67.376.650		Bulan	69.912.650	-	Bulan	69.912.650	#DIV/0!	Bulan	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	bulan	175.716.800		-		0			0			0	52.390.400		0			0	52.390.400	-	0	52.390.400	-	0	29,82	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0		-		-		0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0		-		-		0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		-		-		0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	bulan	31.938.672	12	Bulan	107.549.400		Bulan			Bulan			Bulan	60.495.000		Bulan	8.584.000		Bulan	69.079.000	-	Bulan	69.079.000	-	Bulan	216,29	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		-		-		0			0			0			0			0		-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penanggung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp		
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0**		**-**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Dinas Pariwisata**
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA**	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**3,6**		**10.023.070.660**		**-**	**1.028.298.000**		**0**	**34.770.000**		**0**	**304.398.000**		**0**	**53.568.000**		**0**	**521.108.000**		**0**	**913.844.000**	**-**	**0**	**913.844.000**	**-**	**0**	**9,12**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**0**		**475.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**			**0**			**0**	**-**		**0**	**-**		**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	kegiatan.	475.000.000		-			0			0			0			0			0	-		0	-		-	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ristisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	kegiatan	-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**		**0**		**1.137.882.408**		**-**	**1.028.298.000**		**0**	**12.320.000**		**0**	**35.728.000**		**0**	**29.568.000**		**0**	**153.412.000**		**0**	**231.028.000**	**-**	**0**	**231.028.000**	**-**	**20,30**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ristisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4	Kegiatan	345.910.408	1	keg	-		keg			keg			keg			keg			keg	-		keg	-		-	keg	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	-	1	keg	604.630.000		keg			keg			keg			keg			keg	-		keg	-		-	keg	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-	1	keg	131.040.000		keg			keg			keg			keg			keg	-		keg	-		#DIV/0!	keg	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	48	bulan	791.972.000	12	Bulan	292.628.000	3	Bulan	12.320.000	3	Bulan	35.728.000	3	Bulan	29.568.000	3	Bulan	153.412.000		Bulan	231.028.000	-	Bulan	231.028.000	-	Bulan	29,17	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota**	**Meningkatnya monitoring dan evaluasi Destinasi**	**0**		**8.050.188.252**		**-**	**-**		**0**	**22.450.000**		**0**	**268.670.000**		**0**	**24.000.000**		**0**	**367.696.000**		**0**	**682.816.000**	**-**	**0**	**682.816.000**	**#DIV/0!**	**0**	**8,48**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	615.000.000		-			0			0			0	17.254.000		0	17.254.000	-		0	17.254.000	-		0	2,81	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4	Kegiatan	6.011.900.000		-			0			0			0			0			0	-		0	-		-	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4	Kegiatan	420.000.000	1	Kegiatan	-		Kegiatan	22.450.000	1	Kegiatan	199.630.000	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	326.442.000		Kegiatan	548.522.000	-	Kegiatan	548.522.000	-	Kegiatan	130,60	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	1.003.288.252	1	Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan	69.040.000	1	Kegiatan	24.000.000	1	Kegiatan	24.000.000		Kegiatan	117.040.000	-	Kegiatan	117.040.000	-	Kegiatan	11,67	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	bulan	-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**360.000.000**		**-**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	4	Kegiatan	360.000.000		-			0			0			0			0			0	-		0	-		-	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata**	**0**		**4.084.380.000**		**-**	**880.948.000**		**0**	**-**		**0**	**65.000.000**		**0**	**326.267.000**		**0**	**1.178.435.300**		**0**	**1.569.702.300**	**-**	**0**	**1.569.702.300**	**#DIV/0!**	**0**	**38,43**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya kerjasama dalam menfasilitasi pemasaran industri pariwisata**	**0**		**4.084.380.000**		**-**	**880.948.000**		**0**	**-**		**0**	**65.000.000**		**0**	**326.267.000**		**0**	**1.178.435.300**		**0**	**1.569.702.300**	**-**	**0**	**1.569.702.300**	**#DIV/0!**	**0**	**38,43**	**Dinas Pariwisata**
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	48	bulan	2.630.973.520	12	Bulan	444.067.000		Bulan			Bulan	65.000.000		Bulan	326.267.000		Bulan	629.134.000		Bulan	1.020.401.000	-	Bulan	1.020.401.000	-	Bulan	38,78	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	48	bulan	171.006.480	6	Even	146.131.000		Even			Even			Even			Even	106.831.000		Even	106.831.000	-	Even	106.831.000	-	Even	62,47	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	48	bulan	346.000.000	12	Bulan	40.000.000		Bulan			Bulan			Bulan			Bulan			Bulan	-		Bulan	-		-	Bulan	-	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	48	bulan	936.400.000	12	Bulan	250.750.000		Bulan			Bulan			Bulan			Bulan	442.470.300		Bulan	442.470.300	-	Bulan	442.470.300	-	Bulan	47,25	Dinas Pariwisata
3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0		-		-			0			0			0			0			0	-		0	-		#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata

Kode				urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outnut)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
												I			II			III			IV												
						Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemamfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**0**		**407.000.000**		**-**	**25.543.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**25.543.000**		**0**	**-**		**0**	**25.543.000**	**-**	**0**	**25.543.000**	**#DIV/0!**	**0**	**6,28**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**		**0**		**407.000.000**		**-**	**25.543.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**25.543.000**		**0**	**-**		**0**	**25.543.000**	**-**	**0**	**25.543.000**	**#DIV/0!**	**0**	**6,28**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	48	bulan	407.000.000	12	Bulan	25.543.000	Bulan			Bulan			Bulan	25.543.000		Bulan	0		Bulan	25.543.000	-	Bulan	25.543.000	-	Bulan	6,28	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		**0**		**-**		**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**0**		**2.248.561.488**		**-**	**572.751.773**	**0**	**-**	**0**	**199.425.000**	**0**	**260.199.960**		**0**	**215.913.000**		**0**	**675.537.960**	**-**	**0**	**675.537.960**	**#DIV/0!**	**0**	**30,04**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan PenunjangPelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**0**		**2.248.561.488**		**-**	**572.751.773**	**0**	**-**	**0**	**199.425.000**	**0**	**260.199.960**		**0**	**215.913.000**		**0**	**675.537.960**	**-**	**0**	**675.537.960**	**#DIV/0!**	**0**	**30,04**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	48	bulan	125.001.488	1	Kegiatan	10.797.000	Kegiatan		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	1.047.000		Kegiatan	1.047.000	-	Kegiatan	1.047.000	-	Kegiatan	0,84	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiraan Pariwisata	48	bulan	634.760.000	47	kali	198.279.773	kali		kali			kali	122.909.960		kali	24.000.000		kali	146.909.960	-	kali	146.909.960	-	kali	23,14	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	48	bulan	189.000.000	600	orang	146.130.000	orang		orang			orang	1.960.000		orang	103.520.000		orang	105.480.000	-	orang	105.480.000	-	orang	55,81	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	48	bulan	204.000.000		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	48	bulan	320.500.000	12	Bulan	50.000.000	Bulan		Bulan	199.425.000		Bulan	0		Bulan	0		Bulan	199.425.000	-	Bulan	199.425.000	-	Bulan	62,22	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	48	bulan	775.300.000	12	Bulan	167.545.000	Bulan		Bulan			Bulan	135.330.000		Bulan	87.346.000		Bulan	222.676.000	-	Bulan	222.676.000	-	Bulan	28,72	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**0**		**-**		**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**0**	**-**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0		-		-		0		0			0			0			0	-		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Dinas Pariwisata
9	**01**				**Dinas Syariat Islam**				**58.706.847.923**		**-**	**16.901.690.608**	**0**	**-**	**0**	**5.093.037.712**		**0**	**4.444.657.018**		**0**	**8.793.592.034**		**0**	**18.331.286.764**	**-**	**0**	**18.331.286.764**	**#DIV/0!**	**0**	**31,23**	**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**01**			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**		**%**	**20.978.186.502**	**100**	**%**	**4.540.842.855**		**%**	**-**		**%**	**2.288.585.986**		**%**	**1.016.028.808**		**%**	**1.021.512.502**		**%**	**4.326.127.296**	**-**	**%**	**4.326.127.296**	**#DIV/0!**	**%**	**20,62**	**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		**%**	**193.760.000**	100	**%**	**9.515.000**		**%**	**-**		**%**	**2.340.000**		**%**	**5.005.000**		**%**	**7.345.000**	**-**	**%**	**7.345.000**	**#DIV/0!**	**%**	**3,79**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	193.760.000	5	Dokumen	9.515.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	3	Dokumen	2.340.000	1	Dokumen	5.005.000	4	Dokumen	7.345.000	4	Dokumen	7.345.000	20	Dokumen	3,79	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**%**	**18.313.588.364**	100	**%**	**3.808.115.843**		**%**	**-**		**%**	**2.007.440.728**		**%**	**931.235.644**		**%**	**882.405.082**		**%**	**3.821.081.454**	**-**	**%**	**3.821.081.454**	**#DIV/0!**	**%**	**20,86**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	17.367.268.364	12	Bulan	3.559.175.843	3	Bulan	-	3	Bulan	1.910.260.728	3	Bulan	870.385.644	3	Bulan	811.805.082	12	Bulan	3.592.451.454	12	Bulan	3.592.451.454	25	Bulan	20,69	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	946.320.000	12	Bulan	248.940.000	3	Bulan	-	3	Bulan	97.180.000	3	Bulan	60.850.000	3	Bulan	70.600.000	12	Bulan	228.630.000	12	Bulan	228.630.000	25	Bulan	24,16	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**82.280.000**	100	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	82.280.000	1	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**898.087.299**	100	**%**	**251.436.555**		**%**	**-**		**%**	**89.403.000**		**%**	**23.744.800**		**%**	**22.910.180**		**%**	**136.057.980**	**-**	**%**	**136.057.980**	**-**	**%**	**15,15**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	15.629.496	1	Paket	2.923.000	-	Paket	-	-	Paket			Paket		1	Paket	1.941.000	1	Paket	1.941.000	1	Paket	1.941.000	25	Paket	12,42	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	302.868.000	1	Paket	91.112.000	-	Paket	-	-	Paket	73.153.000		Paket	0		Paket	0	-	Paket	73.153.000	-	Paket	73.153.000	-	Paket	24,15	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	129.589.803	1	Paket	55.401.555	-	Paket	-	3	Paket	16.250.000		Paket	12.450.000		Paket	13.157.000	3	Paket	41.857.000	3	Paket	41.857.000	75	Paket	32,30	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	450.000.000	6	Laporan	102.000.000	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	11.294.800	1	Laporan	7.812.180	3	Laporan	19.106.980	3	Laporan	19.106.980	13	Laporan	4,25	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**102.000.000**	100	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	102.000.000	3	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**948.990.407**	100	**%**	**247.428.257**		**%**	**-**		**%**	**35.709.058**		**%**	**30.089.564**		**%**	**51.150.340**		**%**	**116.948.962**	**-**	**%**	**116.948.962**	**-**	**%**	**12,32**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	701.141.347	12	Laporan	187.100.257	-	Laporan	-	2	Laporan	23.759.058	3	Laporan	22.427.564	3	Laporan	17.575.340	8	Laporan	63.761.962	8	Laporan	63.761.962	17	Laporan	9,09	Dinas Syariat Islam

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	247.849.060	12	Laporan	60.328.000	-	Laporan	-	2	Laporan	11.950.000	3	Laporan	7.662.000	3	Laporan	33.575.000	8	Laporan	53.187.000	8	Laporan	53.187.000	17	Laporan	21,46	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**439.480.432**	100	**%**	**224.347.200**		**%**	-		**%**	**156.033.200**		**%**	**28.618.800**		**%**	**60.041.900**		**%**	**244.693.900**	-	**%**	**244.693.900**	-	**%**	**55,68**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	264.816.000	7	Unit	134.263.200	-	Unit	-	3	Unit	29.251.200		Unit	28.618.800		Unit	48.475.900	3	Unit	106.345.900	3	Unit	106.345.900	11	Unit	40,16	Dinas Syariat Islam
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bannguna Lainnya yang direhara/Direhabilitasi	3	unit	102.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	63.391.000		Unit			Unit		1	Unit	63.391.000	1	Unit	63.391.000	33	Unit	62,15	
9	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	180	Unit	72.664.432	77	Unit	90.084.000	-	Unit	-	-	Unit	63.391.000		Unit	0		Unit	11.566.000	-	Unit	74.957.000	-	Unit	74.957.000	-	Unit	103,16	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**Indeks Kota Syariah (IKS)**	**82,77**	**%**	**37.728.661.421**	**78**	**%**	**12.360.847.753**		**%**	-		**%**	**2.804.451.726**		**%**	**3.428.628.210**		**%**	**7.772.079.532**		**%**	**14.005.159.468**	-	**%**	**14.005.159.468**	-	**%**	**37,12**	**Dinas Syariat Islam**
9	**01**	**02**	**7.01**		**Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Wawasan Keislaman**		**%**	**424.837.400**	100	**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	**#DIV/0!**	**%**	-	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	400	Orang	196.683.920	100	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya	240	Orang	228.153.480	60	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.02**		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Al-Qur'an**		**%**	**10.424.934.350**	100	**%**	**1.915.079.010**		**%**	-		**%**	**92.099.010**		**%**	-		**%**	**1.651.043.000**		**%**	**1.743.142.010**	-	**%**	**1.743.142.010**	**#DIV/0!**	**%**	**16,72**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	36	Lembaga	864.133.840	9	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-		Lembaga			Lembaga		-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	1120	Orang	9.560.800.510	56	Orang	1.915.079.010	-	Orang	-	-	Orang	92.099.010		Orang	0		Orang	1.651.043.000	-	Orang	1.743.142.010	-	Orang	1.743.142.010	-	Orang	18,23	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.04**		**Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**	**Persentase Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam yang dilaksanakan**		**%**	**18.860.408.581**	100	**%**	**9.252.412.313**		**%**	-		**%**	**2.419.178.286**		**%**	**3.242.733.210**		**%**	**5.122.709.532**		**%**	**10.784.621.028**	-	**%**	**10.784.621.028**	**#DIV/0!**	**%**	**57,18**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	4	Dokumen	3.419.548.399	1	Dokumen	834.046.276	1	Dokumen	-	-	Dokumen	329.199.886		Dokumen	100.000.000		Dokumen	158.166.832	1	Dokumen	587.366.718	1	Dokumen	587.366.718	25	Dokumen	17,18	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya	220	Orang	2.893.339.910	55	Orang	437.123.100	-	Orang	-	7	Orang	99.000.000		Orang	66.000.000		Orang	251.982.500	7	Orang	416.982.500	7	Orang	416.982.500	3	Orang	14,41	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	05	Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	464	Orang	667.021.656	116	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	40	Gampong	216.375.000	10	Gampong	-	-	Gampong	-		Gampong	-		Gampong			Gampong		-	Gampong	-	-	Gampong	-	-	Gampong	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	200	Unit	232.225.000	50	Unit	237.420.000	-	Unit	-		Unit	-		Unit	99.633.600		Unit	1.300.777.000	-	Unit	1.400.410.600	-	Unit	1.400.410.600	-	Unit	603,04	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	60	Unit	11.431.898.616	15	Unit	7.743.822.937	-	Unit	-	5	Unit	1.990.978.400	11	Unit	2.977.099.610	2	Unit	3.411.783.200	18	Unit	8.379.861.210	18	Unit	8.379.861.210	30	Unit	73,30	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.05**		**Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam**	**Persentase Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam yang dilaksanakan**			**4.642.396.730**	100	**%**	**683.329.430**		**%**	-		**%**	**185.174.430**		**%**	**149.895.000**		**%**	**704.152.000**		**%**	**1.039.221.430**	-	**%**	**1.039.221.430**	**#DIV/0!**	**%**	**22,39**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	4	Laporan	825.364.000	1	Laporan	151.885.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-	1	Laporan		1	Laporan	575.012.000	2	Laporan	575.012.000	2	Laporan	575.012.000	50	Laporan	69,67	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	4	Laporan	589.521.656	1	Laporan	61.388.430	-	Laporan	-	-	Laporan	16.828.430		Laporan	0		Laporan	0	-	Laporan	16.828.430	-	Laporan	16.828.430	-	Laporan	2,85	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	04	Pembinaan Keluarga Islami	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	200	Keluarga	198.390.848	50	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-		Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	720	Orang	55.611.991	180	Orang	201.810.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	49.995.000		Orang	129.140.000	-	Orang	179.135.000	-	Orang	179.135.000	-	Orang	322,12	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	216	Orang	2.973.508.235	54	Orang	268.246.000	-	Orang	-	28	Orang	168.346.000		Orang	99.900.000		Orang	0	28	Orang	268.246.000	28	Orang	268.246.000	13	Orang	9,02	Dinas Syariat Islam
9	**01**	**02**	**7.06**		**Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam**	**Persentase Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pengawasan Syariat Islam**	**100**	**%**	**3.376.084.360**	100	**%**	**510.027.000**		**%**	-		**%**	**108.000.000**		**%**	**36.000.000**		**%**	**294.175.000**		**%**	**438.175.000**	-	**%**	**438.175.000**	-	**%**	**12,98**	**Dinas Syariat Islam**
9	01	02	7.06	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	4	Laporan	486.456.968	1	Laporan	62.052.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Dinas Syariat Islam
9	01	02	7.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	4	Laporan	2.889.627.392	1	Laporan	447.975.000	1	Laporan	-	-	Laporan	108.000.000		Laporan	36.000.000		Laporan	294.175.000	1	Laporan	438.175.000	1	Laporan	438.175.000	25	Laporan	15,16	Dinas Syariat Islam
9	**01**				**Sekretariat MPU**				**13.685.826.720**			**3.037.114.547**	**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**1.417.854.561**		**0**	**702.502.029**		**0**	**2.631.312.362**	-	**0**	**2.631.312.362**	**#DIV/0!**	**0**	**19,23**	**Sekretariat MPU**
9					KEKHUSUSAN ACEH								0	-	-			0			0			0			-	-		-	#DIV/0!	0	-	
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**11.573.992.340**		**%**	**2.837.395.697**		**%**	**510.955.772**		**%**	-		**%**	**1.417.854.561**		**%**	**702.502.029**		**%**	**2.631.312.362**	-	**%**	**2.631.312.362**	-	**%**	**22,73**	**Sekretariat MPU**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**124.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	20	Dokumen	124.000.000	5	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**10.225.879.120**		**%**	**2.252.986.827**		**%**	**498.303.602**		**%**	-		**%**	**1.140.806.784**		**%**	**521.203.577**		**%**	**2.160.313.963**	-	**%**	**2.160.313.963**	-	**%**	**21,13**	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	6.541.879.120	12	Bulan	1.264.426.827		Bulan	263.553.602		Bulan	-		Bulan	673.868.784		Bulan	270.583.577	-	Bulan	1.208.005.963	-	Bulan	1.208.005.963	-	Bulan	18,47	Sekretariat MPU
9	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	3.684.000.000	12	Bulan	988.560.000		Bulan	234.750.000		Bulan	-		Bulan	466.938.000		Bulan	250.620.000	-	Bulan	952.308.000	-	Bulan	952.308.000	-	Bulan	25,85	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**39.600.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72	Paket	39.600.000	18	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum**	**100**	**%**	**452.513.220**		**%**	**139.707.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**109.965.040**		**%**	**14.315.345**		**%**	**124.280.385**	-	**%**	**124.280.385**	-	**%**	**27,46**	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000	3	Paket	8.597.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	2.696.000		Paket	7.110.000	-	Paket	9.806.000	-	Paket	9.806.000	-	Paket	81,72	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	200.513.220	5	Paket	58.476.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	52.851.000		Paket	0	-	Paket	52.851.000	-	Paket	52.851.000	-	Paket	26,36	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	20.000.000	8	Paket	5.354.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	2.327.500		Paket	3.025.345	-	Paket	5.352.845	-	Paket	5.352.845	-	Paket	26,76	Sekretariat MPU
9	01	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	220.000.000	5	Laporan	67.280.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan	52.090.540		Laporan	4.180.000	-	Laporan	56.270.540	-	Laporan	56.270.540	-	Laporan	25,58	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	100.000.000	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Sekretariat MPU
9	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**400.000.000**		**%**	**109.142.000**		**%**	**6.774.770**		**%**	-		**%**	**41.561.617**		**%**	**53.666.129**		**%**	**102.002.516**	-	**%**	**102.002.516**	-	**%**	**25,50**	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Sekretariat MPU
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	120.000.000	12	Laporan	25.500.000	-	Laporan	3.820.770	-	Laporan	-		Laporan	12.987.117		Laporan	7.309.629	-	Laporan	24.117.516	-	Laporan	24.117.516	-	Laporan	20,10	Sekretariat MPU
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	280.000.000	12	Laporan	83.642.000	-	Laporan	2.954.000	-	Laporan	-		Laporan	28.574.500		Laporan	46.356.500	-	Laporan	77.885.000	-	Laporan	77.885.000	-	Laporan	27,82	Sekretariat MPU
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**232.000.000**		**%**	**335.559.870**		**%**	**5.877.400**		**%**	-		**%**	**125.521.120**		**%**	**113.316.978**		**%**	**244.715.498**	-	**%**	**244.715.498**	-	**%**	**105,48**	**Sekretariat MPU**
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit	120.000.000	4	Unit	65.894.000	-	Unit	5.877.400	-	Unit	-		Unit	22.665.000		Unit	24.472.500	-	Unit	53.014.900	-	Unit	53.014.900	-	Unit	44,18	Sekretariat MPU

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp									
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	32.000.000	1	Unit	260.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	99.882.250		Unit	79.777.143	-	Unit	179.659.393	-	Unit	179.659.393	-	Unit	561,44	Sekretariat MPU

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV												
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp				
9	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	80.000.000	5	Unit	9.665.870	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	2.973.870		Unit	9.067.335	-	Unit	12.041.205	-	Unit	12.041.205	-	Unit	15,05	Sekretariat MPU
9	**01**	**03**			**PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH**	**Persentase Meningkatnya Kapasitas dan Peran Ulama**	**100**	**%**	**2.111.834.380**		**%**	**199.718.850**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MPU**
9	**01**	**03**	**7.01**		**Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama**	**Persentase meningkatnya peran serta ulama dalam menghasilkan sumber daya ulama yang berkualitas**	**100**	**%**	**1.632.375.785**		**%**	**199.718.850**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MPU**
9	01	03	7.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	40	laporan	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah kader ulama yang mengikuti pendidikan	160	orang	818.000.000	40	Orang	199.718.850	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi permusyawaratan ulama	100	laporan	95.000.000	25	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah laporan hasil muzakarah masalah keagamaan	4	laporan	95.000.000	1	rumusan	-	-	rumusan	-	-	rumusan	-		rumusan			rumusan		-	rumusan	-	-	rumusan	-	-	rumusan	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah dokumen hasil pengkajian aliran sempalan	4	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	8	Dokumen	105.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah	4	laporan	96.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	11	Sosialisasi fatwa dan hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	240	Laporan	76.375.785	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	200	Laporan	247.000.000	-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-		kali			kali		-	kali	-	-	kali	-	-	kali	-	Sekretariat MPU
9	**01**	**03**	**7.02**		**Silaturrahmi Ulama-Ulama**	**Persentase meningkatnya peran serta Ulama dalam menghasilkan Sumber Daya Ulama yang berkualitas**	**100**	**%**	**267.000.000**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	-	**0**	**-**	-	**0**	**-**	**Sekretariat MPU**
9	01	03	7.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamalah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamalah yang mengikuti Lokakarya	160	Orang	148.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah ulama yang berperan dalam pembangunan Daerah	80	Orang	119.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah laporan kunjungan muhibbah ulama	4	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-		Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Sekretariat MPU
9	**01**	**03**	**7.03**		**Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama**	**Presentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama**	**100**	**%**	**212.458.595**			**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**	-	**0**	**-**	-	**0**	**-**	**Sekretariat MPU**
9	01	03	7.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah dokumen hasil Sistem Jaminan Produk Halal	4	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	02	Pelaksanaan, penataan dan pengawasan Produk halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	4	Dokumen	93.000.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	4	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MPU
9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta / Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	200	Orang	119.458.595	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MPU
9	**01**				**Sekretariat MAA**				**11.832.048.612**			**2.734.880.165**		**0**	**581.603.444**		**0**	**1.742.569.920**		**0**	**(760.693.581)**		**0**	**591.941.287**		**0**	**2.155.421.070**	-	**0**	**2.155.421.070**		**0**	**18,22**	**Sekretariat MAA**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah**	**100**	**%**	**10.970.236.272**		**%**	**2.684.995.165**		**%**	**581.603.444**		**%**	**1.712.684.920**		**%**	**(760.693.581)**		**%**	**591.941.287**		**%**	**2.125.536.070**	-	**%**	**2.125.536.070**	-	**%**	**19,38**	**Sekretariat MAA**
2	**22**	**01**	**xxxx**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	**100**	**%**	**15.000.000**			**4.001.175**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**-**		**0**	**5.404.575**		**0**	**5.404.575**	-	**0**	**5.404.575**	-	**0**	**36,03**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	15.000.000	5	Dokumen	4.001.175	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	5.404.575	-	Dokumen	5.404.575	-	Dokumen	5.404.575	-	Dokumen	36,03	Sekretariat MAA
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**9.981.573.092**			**2.419.623.340**		**0**	**574.881.696**		**0**	**1.633.181.422**		**0**	**(821.625.662)**		**0**	**511.353.860**		**0**	**1.897.791.316**	-	**0**	**1.897.791.316**	-	**0**	**19,01**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.02	01	penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	6.471.573.092	12	Bulan	1.535.463.340	3	Bulan	453.281.696	3	Bulan	1.579.581.422		Bulan	-1.035.585.662		Bulan	289.933.860	6	Bulan	1.287.211.316	6	Bulan	1.287.211.316	13	Bulan	19,89	Sekretariat MAA
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	3.510.000.000	12	Bulan	884.160.000	3	Bulan	121.600.000	3	Bulan	53.600.000		Bulan	213.960.000		Bulan	221.420.000	6	Bulan	610.580.000	6	Bulan	610.580.000	13	Bulan	17,40	Sekretariat MAA
2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**39.600.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76	Paket	39.600.000	19	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Sekretariat MAA
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**145.000.000**		**%**	**88.358.633**		**%**	**-**		**%**	**38.338.166**		**%**	**17.474.547**		**%**	**21.794.000**		**%**	**77.606.713**	-	**%**	**77.606.713**	-	**%**	**53,52**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42	Paket	13.000.000	10	Paket	2.899.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket	1.304.000		Paket	1.595.000	-	Paket	2.899.000	-	Paket	2.899.000	-	Paket	22,30	Sekretariat MAA
2	22	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	12.000.000	5	Paket	20.500.000	-	Paket	-	-	Paket	20.500.000		Paket	0		Paket	0	-	Paket	20.500.000	-	Paket	20.500.000	-	Paket	170,83	Sekretariat MAA
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22	Paket	15.000.000	5	Paket	9.583.833	-	Paket	-	-	Paket	4.836.366		Paket	2.563.467		Paket	2.184.000	-	Paket	9.583.833	-	Paket	9.583.833	-	Paket	63,89	Sekretariat MAA
2	22	01	.2.0	.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	105.000.000	3	Laporan	55.375.800	-	Laporan	-	-	Laporan	13.001.800		Laporan	13.607.080		Laporan	18.015.000	-	Laporan	44.623.880	-	Laporan	44.623.880	-	Laporan	42,50	Sekretariat MAA
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**125.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	**-**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	45.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MAA
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	Unit	80.000.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MAA
2	**20**	**XX**	**xxx8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**235.754.885**		**%**	**87.559.480**		**%**	**1.194.586**		**%**	**12.059.844**		**%**	**19.118.747**		**%**	**28.289.052**		**%**	**60.662.229**	-	**%**	**60.662.229**	-	**%**	**25,73**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	144.400.000	1	Laporan	35.400.000	-	Laporan	1.194.586	-	Laporan	3.669.553		Laporan	8.078.847		Laporan	4.381.052	-	Laporan	17.324.038	-	Laporan	17.324.038	-	Laporan	12,00	Sekretariat MAA
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	13.323.590	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MAA
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	78.031.295	3	Laporan	52.159.480	-	Laporan	-	1	Laporan	8.390.291		Laporan	11.039.900		Laporan	23.908.000	1	Laporan	43.338.191	1	Laporan	43.338.191	8	Laporan	55,54	Sekretariat MAA
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**428.308.295**		**%**	**85.452.537**		**%**	**5.527.162**		**%**	**29.105.488**		**%**	**24.338.787**		**%**	**25.099.800**		**%**	**84.071.237**	-	**%**	**84.071.237**	-	**%**	**19,63**	**Sekretariat MAA**
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	246.016.000	7	Unit	78.121.800	-	Unit	5.527.162	4	Unit	29.105.488		Unit	21.027.050		Unit	21.389.800	4	Unit	77.049.500	4	Unit	77.049.500	14	Unit	31,32	Sekretariat MAA
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	21.500.000	7	Unit	7.330.737	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	3.311.737		Unit	3.710.000	-	Unit	7.021.737	-	Unit	7.021.737	-	Unit	32,66	Sekretariat MAA
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	145.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Sekretariat MAA
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Unit	15.792.295	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Sekretariat MAA
2	**22**	**07**			**PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**	**Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait Pelestarian Adat Aceh**	**100**	**%**	**861.812.340**		**%**	**49.885.000**		**%**	**-**		**%**	**29.885.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**29.885.000**	-	**%**	**29.885.000**	-	**%**	**3,47**	**Sekretariat MAA**
2	**22**	**07**	**7.01**		**Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat**	**Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat yang dilaksanakan**		**%**	**512.404.691**		**%**	**49.885.000**		**%**	**29.885.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**29.885.000**	-	**%**	**29.885.000**	**#DIV/0!**	**%**	**5,83**	**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	4	Laporan	185.000.000	1	Laporan	20.000.000	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Sekretariat MAA

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Outout)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV										
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
2	22	07	7.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	4	Lembaga	130.000.000	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga			Lembaga			Lembaga		-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat istiadat	360	orang	129.000.000	90	Orang	29.885.000	-	Orang	-	90	Orang	29.885.000		Orang	0		Orang	0	90	Orang	29.885.000	90	Orang	29.885.000	25	Orang	23,17	Sekretariat MAA

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD			OPD Penangung Jawab
													I			II			III			IV											
							Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp			
2	22	07	7.01	04	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	0	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-	Keluarga			Keluarga			Keluarga		-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	#DIV/0!	Keluarga	-	Sekretariat MAA
2	22	07	7.01	05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	600	Buku	68.404.691	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku			Buku			Buku		-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	Sekretariat MAA
2	**22**	**07**	**7.02**		**Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**160.000.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.01	02	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	120	Orang	160.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang			Orang			Orang		-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	Sekretariat MAA
2	**22**	**07**	**7.03**		**Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat**	**Persentase Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**189.407.649**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat MAA**
2	22	07	7.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	46	Orang	91.953.085	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan hasil rapat kerja MAA	0	Dokumen	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	-	Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	300	Orang	70.454.564	-	-	-	-	0	-	-	0	-		0			0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	Sekretariat MAA
2	22	07	7.03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	30	Unit	27.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Sekretariat MAA
9	**01**				**Sekretariat Baitul Mal**				**100.087.755.404**			**24.845.803.910**		**0**	**697.196.421**		**0**	**6.861.161.974**		**0**	**3.817.569.736**		**0**	**10.435.557.634**		**0**	**21.811.485.765**	-	**0**	**21.811.485.765**	**#DIV/0!**	**0**	**21,79**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**12.164.875.404**		-	**3.031.536.320**		**0**	**617.181.421**		**0**	**805.692.174**		**0**	**798.017.886**		**0**	**701.456.240**		**0**	**2.922.347.721**	-	**0**	**2.922.347.721**	-	**0**	**24,02**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD yang Tersusun**	**100**	**%**	**13.757.484**		-	**1.298.540**		**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	**1.298.540**		**0**	**1.298.540**	-	**0**	**1.298.540**	-	**0**	**9,44**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	13.757.484	5	Dokumen	1.298.540	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	1.298.540	-	Dokumen	1.298.540	-	Dokumen	1.298.540	-	Dokumen	9,44	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**11.297.882.480**		-	**2.706.812.297**		**0**	**578.972.142**		**0**	**779.422.027**		**0**	**692.386.702**		**0**	**596.150.638**		**0**	**2.646.931.509**	-	**0**	**2.646.931.509**	-	**0**	**23,43**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	6.223.082.480	12	Bulan	1.415.187.297	3	Bulan	369.772.142	3	Bulan	467.297.027		Bulan	283.806.702		Bulan	304.280.638	6	Bulan	1.425.156.509	6	Bulan	1.425.156.509	13	Bulan	22,90	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	5.074.800.000	12	Bulan	1.291.625.000	3	Bulan	209.200.000	3	Bulan	312.125.000		Bulan	408.580.000		Bulan	291.870.000	6	Bulan	1.221.775.000	6	Bulan	1.221.775.000	13	Bulan	24,08	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.400.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	103.400.000	50	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket		-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**36.384.852**		**%**	**18.195.100**		**%**	-		**%**	**543.200**		**%**	**8.652.875**		**%**	**11.016.580**		**%**	**20.212.655**	-	**%**	**20.212.655**	-	**%**	**55,55**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	10.964.952	12	Paket	2.511.000	-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket	2.511.000	-	Paket	2.511.000	-	Paket	2.511.000	-	Paket	22,90	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	25.419.900	12	Paket	15.684.100	-	Paket	-	-	Paket	543.200		Paket	8.652.875		Paket	8.505.580	-	Paket	17.701.655	-	Paket	17.701.655	-	Paket	69,64	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**50.800.000**		**%**	**21.042.000**		**%**	**5.375.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**15.592.000**		**%**	**20.967.000**	-	**%**	**20.967.000**	-	**%**	**41,27**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	50.800.000	2	Unit	21.042.000	1	Unit	5.375.000	-	Unit	-		Unit	0		Unit	15.592.000	1	Unit	20.967.000	1	Unit	20.967.000	2	Unit	41,27	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**169.750.588**		**%**	**51.512.383**		**%**	**8.502.279**		**%**	**10.611.247**		**%**	**14.989.409**		**%**	**21.875.682**		**%**	**55.978.617**	-	**%**	**55.978.617**	-	**%**	**32,98**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	134.904.000	12	Laporan	33.726.000	3	Laporan	8.502.279	2	Laporan	5.431.864		Laporan	9.096.409		Laporan	11.477.682	5	Laporan	34.508.234	5	Laporan	34.508.234	10	Laporan	25,58	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	34.846.588	1	Laporan	17.786.383	-	Laporan	-	1	Laporan	5.179.383		Laporan	5.893.000		Laporan	10.398.000	1	Laporan	21.470.383	1	Laporan	21.470.383	2	Laporan	61,61	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**492.900.000**		**%**	**232.676.000**		**%**	**24.332.000**		**%**	**15.115.700**		**%**	**81.988.900**		**%**	**55.522.800**		**%**	**176.959.400**	-	**%**	**176.959.400**	-	**%**	**35,90**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	Unit	481.568.000	21	Unit	230.914.000	4	Unit	24.332.000	3	Unit	15.115.700		Unit	80.617.900		Unit	53.147.800	7	Unit	173.213.400	7	Unit	173.213.400	8	Unit	35,97	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.09	07	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28	Unit	11.332.000	2	Unit	1.762.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit	1.371.000		Unit	2.375.000	-	Unit	3.746.000	-	Unit	3.746.000	-	Unit	33,06	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**			**Program Baitul Mal**	**Persentase Pelaksanaan Baitul Mal**	**100**	**%**	**87.922.880.000**		**%**	**21.814.267.590**		**%**	**80.015.000**		**%**	**6.055.469.800**		**%**	**3.019.551.850**		**%**	**9.734.101.394**		**%**	**18.889.138.044**	-	**%**	**18.889.138.044**	-	**%**	**21,48**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	**01**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan ZISWAF**	**Persentase Jumlah Perencanaan ZISWAF yang disusun**	**100**	**%**	**162.020.150**		**%**	**1.364.590**		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	04	2.12	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	48	Orang	162.020.150	1	Dokumen	1.364.590	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal**	**Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Gampong**	**100**	**%**	**604.339.850**		**%**	**23.773.000**		**%**	-		**%**	-		**%**	**6.250.000**		**%**	**3.630.000**		**%**	**9.880.000**	-	**%**	**9.880.000**	-	**%**	**1,63**	**Sekretariat Baitul Mal**
9	01	04	2.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	48	Orang	240.540.000	1.000	Orang	20.143.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang	6.250.000		Orang	0	-	Orang	6.250.000	-	Orang	6.250.000	-	Orang	2,60	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	2.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	139	Dokumen	339.799.850	1	Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	3.630.000	-	Dokumen	1,07	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	2.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	40	Dokumen	24.000.000	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	**7.03**		**Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF**	**Persentase Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf**	**100**	**%**	**87.156.520.000**		**%**	**21.789.130.000**		**%**	**80.015.000**		**%**	**6.055.469.800**		**%**	**3.013.301.850**		**%**	**9.730.471.394**		**%**	**18.879.258.044**	-	**%**	**18.879.258.044**	-	**%**	**21,66**	**Sekretariat Baitul Mal**
5	02	02	2.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	48	Orang	22.380.800.000	3.688	Orang	5.520.000.000	-	Orang	800.000	1.380	Orang	2.060.800.000		Orang	619.200.000		Orang	1.221.500.000	1.380	Orang	3.902.300.000	1.380	Orang	3.902.300.000	2.875	Orang	17,44	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	48	Orang	28.050.400.000	4.635	Orang	7.059.300.000	-	Orang	1.200.000	2.168	Orang	3.301.000.000		Orang	1.499.300.000		Orang	2.882.700.000	2.168	Orang	7.684.200.000	2.168	Orang	7.684.200.000	4.517	Orang	27,39	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	48	Orang	2.244.800.000	50	Orang	573.200.000	-	Orang	-	10	Orang	96.750.000		Orang	70.465.850		Orang	31.185.394	10	Orang	198.401.244	10	Orang	198.401.244	21	Orang	8,84	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	48	Orang	80.000.000	30	Orang	20.000.000	-	Orang	-	5	Orang	5.000.000		Orang	1.000.000		Orang	4.000.000	5	Orang	10.000.000	5	Orang	10.000.000	10	Orang	12,50	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	48	Orang	120.000.000	45	Orang	90.000.000	-	Orang	4.815.000	13	Orang	21.700.000		Orang	2.500.000		Orang	16.000.000	13	Orang	45.015.000	13	Orang	45.015.000	27	Orang	37,51	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	48	Orang	27.340.000.000	7.000	Orang	6.791.500.000	-	Orang	1.800.000	471	Orang	460.964.800		Orang	374.136.000		Orang	4.509.761.000	471	Orang	5.346.661.800	471	Orang	5.346.661.800	981	Orang	19,56	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil	48	Orang	80.000.000	40	Orang	20.000.000	-	Orang	2.900.000	18	Orang	6.150.000		Orang	2.550.000		Orang	3.250.000	18	Orang	14.850.000	18	Orang	14.850.000	38	Orang	18,56	Sekretariat Baitul Mal
5	02	02	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	48	Orang	6.860.520.000	1.700	Orang	1.715.130.000	-	Orang	68.500.000	129	Orang	103.105.000		Orang	444.150.000		Orang	1.062.075.000	129	Orang	1.677.830.000	129	Orang	1.677.830.000	269	Orang	24,46	Sekretariat Baitul Mal

Berdasarkan Tabel 2.159 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja OPD Tahun 2023 Triwulan IV sebahagian besar telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan yang menyebabkan tingginya capaian target kinerja anggaran disebabkan tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut juga tidak terlepas karena dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang capaian target kinerja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan masih belum optimal. Karena hal tersebut diharapkan setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan, serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini.

Dalam rangka mendapatkan hasil optimal dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara Rencana kerja OPD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.3 Permasalahan Pembangunan

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang sedang membangun, dihadapkan kepada permasalahan diberbagai bidang khususnya di bidang pembangunan baik sarana maupun prasarana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, merupakan Gap Expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Permasalahan ini muncul dari kekuatan (strengths) Kota Banda Aceh yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weaknesses) yang belum dapat diatasi, peluang (opportunities) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman (threats) yang belum dapat diantisipasi dan juga belum bisa dijadikan sebagai peluang.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.160 sebagai berikut:

Tabel 2. 160 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Permasalahan	Prioritas	Sasaran
1	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum
3	Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum		
4	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan
6	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan
7	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Peningkatan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
8	Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial		
9	Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
11	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
12	Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		
13	Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		
14	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		
15	Adanya Kawasan Banjir Genangan		
16	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
18	Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan		
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH		
20	Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
21	Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana		
22	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga

23	Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan;
2) Belum optimalnya optimalisasi prasarana dan sarana pendidikan;
3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
4) Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
5) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
6) Kecenderungan berkurangnya jumlah guru PNS.

2. Kesehatan

1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
2) Belum optimalnya optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
3) Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
4) Masih adanya stunting;
5) Belum optimalnya tenaga medis dan spesialis;

3. Pekerjaan Umum

A. Penyediaan Air Bersih

1) Belum optimalnya akses air minum jaringan perpipaan;
2) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
3) Meningkatnya permintaan akan layanan air minum perpipaan akibat meningkatnya pembangunan permukiman baru di Kota Banda Aceh.

B. Drainase

1) Masih adanya kawasan banjir genangan;
2) Tingginya tingkat sedimentasi drainase;
3) Belum optimalnya pembangunan drainase baru ke wilayah-wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
4) Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
5) Masih adanya saluran drainase yang belum terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

C. Pemeliharan Jalan Kota

1) Belum optimalnya penanganan kerusakan jalan;
2) Belum optimalnya peningkatan jalan;

3) Belum optimalnya penanganan genangan air di atas badan jalan;
4) Masih adanya kendaraan bertonase tinggi yang melintasi ruas jalan yang tidak sesuai.

D. Permasalahan Tata Ruang

1) Terbatasnya alokasi ruang kota untuk pengembangan wilayah perkotaan;
2) Belum optimalnya pemberdayaan lahan terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
3) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW;
4) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).

4. Perumahan

1) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman;
2) Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
3) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan;
4) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5) Meningkatnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah;
2) adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketentraman umum;
3) Belum memenuhinya jumlah personil Satpol PP dan WH (sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja);
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional Satpol PP dan WH.

6. Sosial

1) Belum optimalnya pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2) Belum optimalnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana umum yang ramah disabilitas;
4) Masih adanya penyandang masalah sosial yang tidak terdata dan tertangani.

Adapun kendala yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang tidak memenuhi adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dimana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan berupa usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos (Bantuan Sosial), BPJS Kesehatan, BPNT /Bansos Pangan, KIP sebanyak 673 Orang tidak tercapai target pada taghun 2023 dikarenakan sebagian masyarakat sudah melakukan pengaduan ke TKSK dan Fasilitator dan dikarenakan kondisonal bansos yang pada tahun 2023 tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana tahun tahun sebelumnya banyak bansos baik

dari APBN dan ABPK dikarenakan kondisi seperti Program JKS yang mau dihapus sehinggga banyak masyarakat yang melaukan pengaduan terkait BPJS Kesehatan, dan dikarenakan ada nya data data yang dikirim pusat melalui DTKS ada yang tidak layak penerima nya sehingga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan dan protes ke Dinsos.

- Data DTKS sudah terupdate namun belum semua di verifikasi validasi dikarenakan ada nya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil DTKS dimana masih ada masyarakat penerima bantuan yang dianggap masih mampu dimana pada saat didata KPM tersebut tidak mampu namun dikarenakan kehidupan ini bersifat dinamis pada saat data DTKS keluar dari pusat ternyata nama nya keluar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu ada masyarakat yang tidak menerima dan melakukan pengaduan dan kemudian tim dari Dinsos seperti TKSK, PKH, Fasilitator dan Pelayanan di Dinsos melakukan verivali data yang masuk termasuk aduan yang datang ke Dinsos sehingga banyak nya yang diverivali data selama tahun 2023 yaitu sebanyak 188.059 Orang dan yang layak mendapat kan bantuan sebanyak 187.399 Orang.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial

- Untuk jumlah Klien pemerlu permakanan dan sandang serta bimbingan sosial dan fisik di rumah singgah menggambarkan masih banyaknya PMKS di Kota Banda Aceh sehingga melebihi target dimana sumber dana dari APBK tidak mencukupi dan selama tahun 2023 kekurangan dananya dikumpulkan dari bantuan dari Dinsos Aceh dan dari dana pribadi PPTK
- Untuk kebutuhan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh
- Untuk kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Permasalah dalam kegiatan UEP ini tidak tersedianya honor verifikasi lapangan, banyaknya jenis usaha yang belum tertampung dan ada beberapa jenis usaha lainnya yang belum terakomodir pada program dan kegiatan tahun 2023 tidak sesuai dengan program kegiatan ini.
- Pergeseran anggaran dari kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Pelayanan Dukungan Psikososial, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dikarenakan tidak cukupnya anggaran pada kegiatan lainnya.
- Pada kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, tidak dijalankan karena kebutuhan pokoknya berupa permakanan dan sandang sudah diberikan, sedangkan pendampingan kelompok rentan tersebut tidak dapat dilakukan.
- Kebutuhan kelompok rentan mendapatkan pendampingann merupakan hak setiap korban bencana.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

1) Masih tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi penduduk;
2) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja;
4) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kualifikasi dan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

5) Belum optimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak; dan
2) Maraknya eksploitasi anak dari luar wilayah kota Banda Aceh.

3. Ketahanan Pangan

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana dan pemanfaatan perkarangan rumah untuk ketahanan pangan;
2) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
3) Belum optimalnya budidaya tanaman organik oleh masyarakat;
4) Belum optimalnya penanganan hasil tangkapan ikan nelayan
5) Belum optimalnya budidaya perikanan darat.

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1.1 Lingkungan Hidup

1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
2) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah;
5) Belum terpenuhinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.2 Mitigasi Bencana

1) Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana;
2) Belum tersedianya qanun pengurangan resiko bencana;
3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas masyarakat sadar bencana untuk kesiapsiagaan bencana;
4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah dan swasta dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;

1.3 Pemadam Kebakaran

1) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas dan kurangnya jumlah aparatur Damkar yang bersertifikasi;
2) Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh pemerintah kota;
3) Masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional yang rata-rata masa pemakaian 20 Tahun ke atas;
4) Masih kurangnya pemahaman tentang regulasi pemadam kebakaran pada masyarakat;

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat gampong;
3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui BUMG;
4) Belum tercapainya indek kemandirian desa;
5) Belum optimalnya pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

6. Perhubungan

1) Masih terjadinya kemacetan lalu lintas;
2) Belum seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
3) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas;
5) Belum optimalnya penerapan sistem perparkiran secara digital;
6) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
7) Kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor;
8) Belum tersedianya rencana induk transportasi perkotaan.

7. Komunikasi dan Informatika

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer,networker,analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik;
3) Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
4) Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik dimana fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfotik hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas;
5) Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki terlebih dengan munculnya isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih;
6) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana koperasi dan usaha kecil menengah;
2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
3) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
4) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah.

C. Urusan Pelayanan Pilihan

1. Industri

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana industri;
2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;

5) Masih rendahnya kualitas dan hilirisasi produk industri kecil dan menengah;
6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.

2. Kelautan dan Perikanan

1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
2) Hasil tangkap masih bergantung kepada musim;
3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
4) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan.
5) Terbatasnya peralatan untuk pengolahan
6) Kurangnya kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan perizinan

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

2. Keuangan

1) Menurunnya sumber dana OTSUS Aceh dan DOKA;
Sejak tahun 2008, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, jumlah yang diterima menurun menjadi 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional terhitung mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2028. Penurunan jumlah serta berakhirnya Dana Otsus tentunya juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam rangka percepatan pembangunan seperti kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penanganan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

2) Rendahnya realisasi PAD akibat pandemi;

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor PAD, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Pembatasan aktifitas ekonomi; Pembatasan sosial yang diberlakukan selama Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Pembatasan jam operasional, pembatasan berkumpul ditempat-tempat umum, dan pembatasan berpergian mengakibatkan penurunan pendapatan terutama dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan.
b. Perubahan Kebiasan Konsumsi
Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih cenderung berbelanja secara during/online dan mengurangi kunjungan langsung secara fisik ketempat-tempat yang menawarkan produk-produk barang dan jasa. Perubahan pola berbelanja masyarakat secara during juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Pelaku usaha yang menjual barang secara during jarang melaporkan kewajiban pajak daerah mereka.
c. Penurunan daya beli masyarakat

Penurunan daya beli masyarakat karena kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sehingga masyarakat cenderung membatasi atau mengurangi konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa.

d. Keterbatasan Pemerintah melakukan Penagihan Pajak
Aturan Pembatasan Sosial yang diberlakukan pemerintah memberi keterbatasan petugas pajak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan wajib pajak terutama menyelesaikan kewajiban pajak daerah.

Untuk mempermudah pelaku usaha yang telah menunggak pembayaran Pajak Daerah selama masa Covid-19, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kebijakan :
- Memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi pajak daerah dengan cara pembayaran pajak secara cicilan.
- Memberi keringanan pengurangan denda pajak daerah.
- Mengubah target PAD

3) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Aset Produktif Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 161 Daftar Aset produktif belum optimal Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
1.	Tanah Simpang Lamteh	603 m²	Gampong Blang Asoe Nanggroe	Hak Pakai	Pengelola
2.	Tanah Gp. Blang	315 m²	Jalan Samping Blang - Asoe nanggore	Hak Pakai	Pengelola
3.	Tanah Pasar Lamgapang	1.402 m²	Lamgapang	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
4.	Tanah dan bangunan	727 m²	Jalan Rama setia, Gampong Deah Baro	Hak Pakai	Pengelola
5.	Tanah dan Bangunan	2.388 m²	Jalan ke pelabuhan Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
6.	Tanah	14.000 m²	Gampong Lhang	Hak Pakai	Pengelola
7.	Tanah	10.169 m²	Alue Naga	Hak Pakai	Pengelola

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
8.	Tanah	6.955 m²	Lamsidaya	Hak Pakai	Pengelola
9.	Tanah Terminal Keudah	11.717 m²	Jalan Cut Mutia	Hak Pakai	Dinas Perhubungan
10.	Tanah Pasar New town	7.914 m²	Jalan Mr.T.Moh.hasan	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
11.	Bangunan Eks. Gedung KONI Banda Aceh	68 m²	Peunayong	Hak Pakai	Sekretariat
12.	Bangunan Pasar Suvenir Ulee Lheue	±500 m²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
13.	Tanah Belakang Mitigasi Bencana	±500 m²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Pengelola
14.	Bangunan Kuliner Malam	230.85 m²	Jl.Tgk Daudsyah Peunayong	Hak Pakai	UPTD Pasar
15.	Bangunan Pertokoan Perbasi	1.579 m²	Jl. Mr Mohd Hasan Gp. Lamdom Kec. Lueng bata	Hak Pakai	UPTD Pasar
16.	Tanah Lapangan Bola	9.800 m²	Gp.lamjabat	Hak Pakai	Pengelola
17.	Tanah Hutan Kota	9956.0 m²	Gp.Tibang	Hak Pakai	Pengelola
18.	Tanah Kedai kopi Samping Stadion Harapan Bangsa	±500 m²	Lhong Raya	Hak Pakai	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19.	Tanah belakang Min lhong raya	3.566 m²	Lhong Raya	Hak Pakai	Pengelola

Kendala dan Upaya:

Kendala yang di hadapi adalah belum adanya permohonan untuk pemanfaatan aset tersebut. BPKK melalui Bidang Aset terus melakukan komunikasi dengan Perangkat Gampong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat Gampong dan sejumlah tokoh masyarakat, pihak pimpinan BUMG serta mendatangkan para investor untuk kerja sama dalam pemanfaatan aset tanah dan bangunan tersebut. Untuk aset Tanah di belakang MIN Lhong Raya telah mengupayakan kepada melalui pihak

Gampong agar melakukan pembebasan lahan sehingga terdapat akses jalan untuk aset dimaksud.

4) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk komponen Pendapatan Asli Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yaitu kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan mengelola kekayaan daerah.

Ada beberapa kendala dalam pemungutan PAD tersebut yang menyebabkan minimnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

1. Belum optimal upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang laksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Kepatuhan dari wajib pajak dan restribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pemungutan pajak dan Retribusi oleh petugas pemungut
4. Belum optimalnya sumber daya manusia pengelolaan Pendapatan
5. Kurangnya pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan restribusi;
6. Kurangnya kerjasama dengan para pihak seperti pihak pengacara negara, pihak penegakan aturan, pihak swasta/LSM dalam pemungutan pajak daerah dan;
7. Kurangnya penyelenggarakan sistem Komputerisasi Penerimaan Daerah

5) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Komposisi pendapatan daerah pada Rancangan APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBK Kota Banda Aceh TA. 2024 Pendapatan Transfer masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 76,40 persen atau Rp. 986.376.448.126,- disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 22,34 persen atau Rp. 288.440.965.342,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 1,26 persen atau Rp. 16.261.490.280,-.

Berdasarkan penjelasan diatas tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemerintah Propinsi dan Pusat maka penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantung dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

3. Pengawasan

1) Terbatasnya anggaran dan jumlah aparat pengawas;
2) Belum meratanya kualitas dan kompetensi pengawas internal;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

E. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Persiapan pelaksanaan pemilu/pemilukada 2024;
2) Peningkatan Pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
3) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
4) Penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, miras di wilayah Kota Banda Aceh;
5) Peningkatan Peran Ormas dan LSM dalam Pembangunan.

F. Urusan Keistimewaan

1. Syariat Islam

1) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam;
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana Syariat Islam;
3) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
4) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;
5) Belum optimalnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
6) Belum optimalnya minat masyarakat masuk dayah;
7) Belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda Pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis, dan transparan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperi infrastruktur, pariwisata, pangan, energi dan lain-lain.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 96,20 persen

2. Tanpa Kelaparan

Tujuan nomor dua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang bekelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya komsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 109,5 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2022 telah menjadi 112,12 kg/tahun per jiwa. Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Tahun 2022, 120 balita sudah dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu

4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan

dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5. Kesejahteraan Gender

Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) setiap tahunnya sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan, disabilitas dan perwakilan anak dalam penanganan perencanaan pembangunan di Banda Aceh. Metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tujuan umum Musrena adalah untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota yang ramah Gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan Gender khususnya dalam hal ini juga termasuk perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.

Pemerintah Kota Bnda Aceh bekerjasama dengan kementerian PUPR hingga hingga saat ini telah merampungkan IPAL di lima gampong (desa) di Banda Acweh. Adapun gampong-gampong yang telah selesai dibangun IPAl Komunal tahun 2022 adalah Gampong Doy, Lampaseh Kota, Rukoh, Jeulingke, dan Gampong Blang Ke Camatan Meuraxa. Pembangunan sistem air limbah di lima gampong di Banda Aceh itu merupakan pembangunan IPAL baru skala pemukiman kombinasi MCK dan jaringan perpipaan. Tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk " Gerakan 100-0-100" yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ini mengurangi ketimpangan didalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ini membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global.

14. Ekosistem Lautan

Tujuan ini melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjtan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu disamudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

15. Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelajutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara dengan Dunia Selatan dan Dunia Selatan dengan Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasioanl untuk mecapai target.

Upaya pencapain target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari

Tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*/ MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pencapain target TPB/SDGs telah melaksanakan beberapa kebijakan diantaranya terus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari sektor emisi gas, pertanian, pengolahan limbah serta berbagai program lainnya.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di tingkat global, nasional dan regional. Oleh karena itu, untuk menetapkan kebijakan ekonomi daerah Kota Banda Aceh perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Aceh yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Banda Aceh. Kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan daerah ditetapkan akan berbeda dengan perkembangan kondisi perekonomian setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

Pembentukan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2023 dan gambaran kondisi perekonomian tahun 2024 serta proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2025 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2025 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Saat ini Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Perekonomian Indonesia Tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy). Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala rebound walaupun masih sangat terbatas,

yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen).

Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diprakirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah). Inflasi domestik diprakirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diprakirakan mencapai 5,26 persen. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional.

Perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur *travel bubble* bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

Pertumbuhan Perekonomian Nasional Tahun 2024 secara umum akan terus meningkat, yang terlihat dari proses pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukan perkembangan positif. Didalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 dan target pembangunan tahun 2024, ditetapkan hal sebagi berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,20 persen;
2. Tingkat kemiskinan berada di angka 8,5 – 9,0 persen;
3. IPM berada di kisaran 75,09;
4. Gini ratio 0,381 – 0,384;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,0-5,7 persen.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Aceh

Dari Laporan Perekonomian Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan IV 2023 tumbuh kuat sebesar 4,15% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 3,78% (yoy). Peningkatan didorong oleh peningkatan mobilitas ditengah penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) dan stabilnya tingkat inflasi pada triwulan berjalan yang mendorong konsumsi. Pada sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh perbaikan kinerja net ekspor antar daerah serta peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha Perdagangan, serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2023 sebesar 4,23% (yoy) stabil dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 4,21% (yoy). Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024.

Persentase pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 bersumber dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 3,14% (yoy). Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah berasal dari komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 1,32 %, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,65 %. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi memberikan sumber pertumbuhan positif yaitu sekitar 0,13 %. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) memberikan sumber pertumbuhan negatif yaitu sebesar 0,08 % dan impor luar negeri sebagai komponen pengurang pada PDRB juga menyumbang sumber pertumbuhan negatif yaitu sekitar 0,05%.

Jika dilakukan pendekatan dari sisi Lapangan usaha, maka yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 19,51 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,57 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 6,11 persen dan jasa keuangan sebesar 5,08 persen.

Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2023. Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh 3,92%-4,72% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Disamping optimalisasi realisasi belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Dibanding triwulan I-2023 (year-on-year) Ekonomi Aceh pada triwulan 1-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen. pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,65 persen. Kemudian, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 9,22 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,08 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,04 persen serta pengadaan Air sebesar 6,44 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang terkontraksi adalah jasa kesehatan sebesar 5,74 persen dan jasa keuangan sebesar 0,38 persen. jika dibandingkan dengan triwulan-IV 2023 (quarter-to-quarter), ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 6,44 persen. Adapun, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya lapangan usaha konstruksi sebesar 19,61 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,67 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,74 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,70 persen, diikuti jasa pendidikan sebesar 5,69 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 3,80 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan 1-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,65 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,28 persen, administrasi pemerintahan sebesar 8,70 persen, konstruksi sebesar 8,32 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 6,59 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 70,54 persen. jika dilihat dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 29,34 persen, diikuti oleh

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 20,83 persen, Komponen Ekspor Barang & Jasa sebesar 10,78 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,73 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 11,82 persen. Terkait indikator ketenagakerjaan pada triwulan I 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,56 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan dengan triwulan I 2023. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Mengacu pada Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2025 ialah "Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian". Selain itu Pemerintah Aceh menetapkan rencana capaian terhadap indikator makro tahun 2025 seperti yang tertuang Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan ekonomi berkisar 3,85 persen;
2. Tingkat kemiskinan berada di angka 14,03 persen;
3. IPM berada di kisaran 72,98;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 5,24 persen;
5. Gini Ratio 0,301.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh

Laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2023 merupakan tanda dari adanya perbaikan kinerja perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebesar 5,23 persen lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yang sempat mencapai 5,53 persen. Tumbuhnya ekonomi Banda Aceh tidak terlepas dari mulai menggeliat kembali sektor-sektor unggulan sepanjang 2022, terutama perdagangan dan jasa.

Struktur perekonomian Kota Banda Aceh tahun 2023 berbeda pola dengan tahun-tahun sebelumnya dimana sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Namun di tahun 2023 sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berada diurutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus meningkat di tahun 2023. Tumbuhnya sektor ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang mulai kembali normal sehingga mendorong meningkatnya kembali konsumsi masyarakat akibat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian kedepan yang semakin membaik. Kemudian diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berada diposisi kedua.

Untuk meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Banda Aceh pada tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh 2023-2026, ialah **"**Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan".
Selain itu pada tahun 2025 pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan beberapa sasaran dan target, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,8 persen;
2. Persentase penduduk miskin berada di angka 6,89;
3. IPM berada di kisaran 87,47;
4. Gini ratio 0,327;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 7,45 persen.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Aceh diproyeksikan akan kembali menunjukkan kinerja yang positif dan akan terus berlanjut di tahun 2025. Kondisi kesehatan yang terus membaik tentunya akan mendorong berkembangnya sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian Kota Banda Aceh. Sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat juga akan mendorong ekonomi Kota Banda Aceh kearah yang lebih baik.

Meningkatnya kinerja ekonomi yang lebih baik dapat terjadi dikarenakan telah dilaksanakanya program-program stratesis pemulihan ekonomi. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Banda Aceh, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh terbaru tahun 2022-2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2022	2023	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	274,74	393,38	177,65	242,84
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	480,55	493,48	323,95	323,85
Pengadaan Listrik dan Gas	74,61	79,44	70,21	73,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,34	35,10	18,30	18,55
Konstruksi	1 280,42	1 358,68	1 022,54	1 060,13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 563,76	5 237,04	3 274,16	3 541,43
Transportasi dan Pergudangan	1 928,40	2 338,13	1 821,86	1 899,29
Penyediaan Akomodasi dan	1 022,32	1 220,85	581,06	692,61

Makan Minum				
Informasi dan Komunikasi	1 107,86	1 283,92	1 476,56	1 599,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	653,53	591,19	395,10	352,12
Real Estate	1 719,40	1 803,85	1 183,77	1 221,17
Jasa Perusahaan	534,02	551,75	375,40	372,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 808,66	5 121,50	3 341,84	3 427,18
Jasa Pendidikan	1 631,47	1 703,04	1 102,63	1 128,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	990,93	1 047,41	740,26	749,45
Jasa lainnya	452,97	518,72	352,64	377,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**21 556,95**	**23 777,46**	**16 257,93**	**17 079,85**

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023

Berdasarkan Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 23.777,46 miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah Rp. 21.556,95 miliar. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Banda Aceh didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar Rp. 5 237,04 miliar. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 5 121,50 miliar.

Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel, nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp. 17.079,85 miliar, jumlah ini lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun 2022 sebesar Rp. 16.257,93 miliar. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnnya, yaitu sebesar Rp. 3.541,43 miliar. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.427,18 miliar, serta kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1.899,29 miliar.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, dan yang lainnya. Di dalam sistem kerangka kerja data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. PDRB pengeluaran menggambarkan hasil

akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah.

Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor. Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini kondisi PDRB pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2022-2023;

Tabel 3. 2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2022-2023

Komponen	PDRB Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2022	2023	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12 332,05	13 250,30	8 186,47	8 540,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	350,32	390,45	243,87	268,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8 005,95	8 387,18	5 110,76	5 178,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 042,58	5 593,29	3 365,75	3 563,34
Perubahan Inventori	187,66	201,74	185,54	195,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	-4 358,07	-4 045,50	-835,08	-665,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**21 560,55**	**23 777,46**	**16 257,33**	**17 079,85**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Dari sisi PDRB pengeluaran yang tertera pada tabel diatas, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan penggerak utama perekonomian Kota Banda Aceh sebesar dengan kontribusi sebesar 55,73 persen dan 35,27 persen.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh tahun 2019-2023 terus meningkat. Pada tahun 2022 sebesar 83,67 juta rupiah meningkat pada tahun 2023 sebesar 90,76 juta rupiah. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu wilayah maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Tabel 3. 3 PDRB Perkapita (ADHB) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)

2019	69,24
2020	73,3
2021	78,20
2022	83,67
2023	90,76

b. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Kedua hal tersebut (inflasi dan IHK) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk perencanaan pembangunan disuatu daerah.

Selama tahun 2023 Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 1,53 persen. Inflasi tahun 2023 ditandai dengan kenaikan indeks harga konsumen sebesar 114,99 pada bulan Desember 2022 menjadi 115,69 pada bulan Desember 2023. Tingkat inflasi tersebut sama apabila dibandingkan dengan realisasi inflasi Propinsi Aceh dan lebih kecil disbanding realisasi inflasi nasional. Dibandingkan tahun 2021 dan 2022 Inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah yang terkecil. Mengalami penurunan sebesar 3,59 persen bila dibanding tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 6 persen dan lebih kecil 0,88 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Perkembangan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Kota Banda Aceh	2,41	6	1,53
Provinsi Aceh	2,25	5,89	1,53
Nasional	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Kota Banda Aceh dan BPS Provinsi Aceh, 2024

Angka inflasi juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket komoditi barang dan jasa konsumsi masyarakat.

Penyebab inflasi yang terjadi di Banda Aceh karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,45, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,20 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,50 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,60 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,92 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu:

kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,23 persn dan kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 0,2 persen. Kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok transportasi.

c. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah masih terus memberikan perhatian yang khusus terhadap kasus kemiskinan hal ini dilakukanan guna meningkatkan program pembangunan di masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah memiliki program-program yang telah terealisasi di masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh berupa bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Menurut Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS Kota Banda Aceh), Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 mencapai 19,94 ribu orang dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,04 persen. Jumlah ini bertambah 4 ribu orang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 sebanyak 19,90 ribu dengan tingkat kemiskinan 7,13 persen.

Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	628.493	19,42	7,22
2020	674.977	18,97	6,90
2021	698.617	20,95	7,61
2022	737.016	19,90	7,13
2023	814.530	19,94	7,04

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.09 persen dibandingkan tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Aceh yang mencapai 14,45 persen dan nasional yang berada pada 9,36 persen.

Disamping itu, permasalahan pokok kemiskinan di Kota Banda Aceh berkaitan dengan arus urbanisasi dari daerah ke Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja menjadikan tingkat pengangguran terbuka semakin bertambah, disamping banyaknya para lulusan dari tingkat sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi yang tidak tertampung oleh lapangan kerja.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2023 untuk menurunkan tingkat kemiskinan yaitu melalui Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, diantaranya memberikan bantuan fasilitas dan modal bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peningkatan kualitas dan

fungsionalisasi infrastuktur juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Banda Aceh di Tahun 2023, yang nantinya dapat menjadi sarana yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,59 persen dari 8,62 persen pada tahun 2022 menjadi 8,03 persen pada tahun 2023. Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Banda Aceh didominasi oleh tenaga kerja berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 44,51 persen, diikuti oleh tenaga kerja jenjang pendidikan perguruan tinggi mencapai 31,30%. Sementara pekerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 12,89% dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) sebesar 11,31%.

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2019-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2019	6,89
2020	9,54
2021	8,94
2022	8,62
2023	8,03

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah sebesar 86,69. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah sebesar 86,28 angka ini meningkat sebesar 0.41 poin. IPM Kota Banda Aceh masih berada pada peringkat tertinggi kedua secara nasional dibawah Kota Yogyakarta, dan tertinggi diluar pulau jawa. Tingginya IPM merepresentasikan bagaimana penduduk Kota Banda Aceh dapat mengakses hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya dengan layak.

Pada tahun 2023 Umur Harapan Hidup penduduk Kota Banda Aceh mencapai 75,02 tahun naik 0,22 poin dari tahun 2022 yang mencapai 74,08 tahun. Angka umur harapan hidup Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 lebih tinggi dibanding umur harapan hidup ditingkat Propinsi Aceh yang hanya mencapai 73,06 tahun.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2023 mencapai 13.04 tahun, naik 0,1 tahun dibandingkan tahun 2022. Sementara pengeluaran perkapita penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 sebesar Rp. 17.521.000,- lebih tinggi Rp.293.000,- dibandingkan dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 17.228.000,-.

Selanjutnya, merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator makro Kota Banda Aceh tahun 2023, target indikator makro Aceh dalam RKPD tahun 2025 dan target indikator makro Nasional dalam RKP Nasional tahun 2025 maka target pertumbuhan ekonomi makro Kota Banda Aceh tahun 2025 adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Target Ekonomi Makro Kota Banda Aceh Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	
				RKPA	RKPD Banda Aceh
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,28-4,51	4,8
2	Tingkat kemiskinan	%	7,04	14,03	6,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,03	5,25	7,45
4	Rasio Gini	Indeks	0,330	0,290-0,293	0,327
5	IPM	Indeks	87,06	72,98	87,47

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Kota Banda Aceh memprioritaskan program- program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, serta merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta penyempurnaan program pembangunan baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bidang- bidang lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Penyusunan APBD Kota Banda Aceh juga mempertimbangkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, sehingga dalam penyusunannya memerlukan proses pembahasan yang lebih intens antara eksekutif dan legislatif dengan memperhatikan prinsip partisipatif, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Struktur APBD merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

2. Belanja Daerah
   Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Pembiayaan Daerah
   Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1(satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Untuk pelaksanan pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan pemeritah daerah perlu memperhatikan sumber pendanaan keuangan daerah. Sumber pendanaan keuangan daerah dapat diupayakan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraslisasi. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah dengan cara sebagai berikut: mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan melakukan updating data wajib pajak dan penilaian (verifikasi) ulang usaha wajib pajak oleh petugas. Melakukan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah untuk keberlangsungan pembangunan Kota Banda Aceh. Mengoptimalkan digitalisasi

sistem perpajakan, membentuk tim bersama penagihan pajak tertunggak, mengirim SDM untuk mengikuti Diklat juru sita, penilai pajak, penilai aset dan PPNS, melakukan penagihan pajak secara persuasif dan juga penegakan hukum dengan upaya paksa (punishment) terhadap wajib pajak yang menunggak pajak, selain itu juga melakukan penagihan PBB-P2 serta mensosialisasikannya kepada masyarakat serta membuka counter pelayanan pebayaran PBB di sembilan kecamatan.

Melihat performa pendapatan daerah tahun 2024 yang mengacu pada proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2023 dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Pendapatan daerah diharapkan dapat terus meningkat pada setiap tahunnya .Untuk mengetahui proyeksi/target pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3. 8 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2022	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi/ Target Pada Tahun Rencana (n+1) 2026
1	2	5	5	6	7	8
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.355.586.767.032**	**1.272.623.511.811**	**1.291.078.903.748**	**1.485.532.848.935**	**1.266.048.361.290**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**314.828.148.941**	**287.367.598.251**	**288.440.965.342**	**452.894.910.529**	**302.459.964.167**
4.1.01.	Pajak Daerah	85.533.440.411	104.643.250.136	112.417.554.387	258.871.499.574	121.599.460.520
4.1.02.	Retribusi Daerah	24.528.838.525	25.149.883.618	42.848.929.143	42.848.929.143	43.944.467.127
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.413.864.365	3.773.273.749	6.200.000.000	6.200.000.000	7.577.025.120
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	199.352.005.640	153.801.190.748	126.974.481.812	144.974.481.812	129.339.011.400
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.028.008.472.466**	**970.178.051.536**	**986.376.448.126**	**1.016.376.448.126**	**963.588.397.123**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2022	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi/ Target Pada Tahun Rencana (n+1) 2026
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.512.177.209	827.883.393.805	891.155.707.000	921.155.707.000	867.317.980.795
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.496.295.257	142.292.657.723	95.220.741.126	95.220.741.126	96.270.416.328
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	36.323.527.416	42.300.829.178	39.808.156.126	0	37.865.470.756
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	123.070.767.840	99.891.828.553	55.412.585.000	0	58.404.945.572
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.750.145.624**	**15.077.862.024**	**16.261.490.280**	**16.261.490.280**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000	0	0	0	0
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemeritah Pusat	0	**0**	**0**	0	0

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2022	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi/ Target Pada Tahun Rencana (n+1) 2026
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	15.077.862.024	16.261.490.280	16.261.490.280	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	0	0
	Jumlah Pendapatan	**1.355.586.767.032**	**1.272.623.511.811**	**1.291.078.903.748**	**1.485.532.848.935**	**1.266.048.361.290**

Sumber: Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPD Kota Banda Aceh 2023-2024

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas untuk proyeksi pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp.1.485.532.848.935,- dengan asumsi terjadi kenaikan sebesar 15.06% dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.1.291.078.903.748,-. Kenaikan yang dialami disebabkan oleh adanya penyesuaian regulasi terkait pajak dan retribusi daerah sehingga potensi PAD dapat ditingkatkan pada tahun 2025, selain itu pada tahun 2025 akan terdapat pelaksanaan pemilu serentak dan peningkatan kepatuhan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang diasumsikan bahwasannya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) dapat meningkat.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tetap mengupayakan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan lain baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Terkait penerimaan pendapatan asli daerah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Situasi dan kondisi daerah serta perkembangan ekonomi masyarakat saat ini;
- Realisasi penerimaan tahun berjalan;
- Perkembangan Objek Penerimaan Daerah;
- Kebijakan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah atasan.

Adapun Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi ketaatan membayar pajak/retribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang lalai.
g. Melakukan perubahan sistem pembayaran pajak/retribusi dari manual menjadi digital.
h. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pencapaian target PAD secara rutin.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah pada suaru periode anggaran. Belanja daerah disusun dengan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari inputyang direncanakan dengan mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Komponen belanja daerah terdiri dari:

- Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, beanja hibah dan belanja bantuan sosial.

- Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdirid ari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.
- Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer, merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitias pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBK diprioritaskan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2024, setiap program, kegiatan dan sub kegiatan diberikan batasan maksimum penggunaan anggaran, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam membiayai setiap belanja yang diusulkan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah yang akan menjadi fokus Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2024 adalah meningkatkan kualitas demokrasi dan ketentraman umum, meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial, serta mengoptimalkan upaya pelestarian budaya.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*) dan belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

a. Kebijakan Belanja Operasi adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan SDM ASN di jajaran Pemko Banda Aceh, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
b. Kebijakan Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelayanan pemerintahan.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan terlebih

dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur serta pencapaian tujuan pembangunan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 dituangkan dalam tabel dibawah dibawah ini:

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2022 (Rp.)	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2023 (Rp.)	Tahun Berjalan (n-1) 2024 (Rp.)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2025 (Rp.)	Proyeksi pada Tahun (n+1) 2026 (Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.1	**Belanja Operasi**	**994.408.218.027**	**1.051.856.709.405**	**1.035.063.654.003**	**1.207.069.399.189**	**1.055.496.553.080**
5.1.01	Belanja Pegawai	458.367.729.152	489.427.505.895	525.910.285.220	527.820.185.310	485.901.759.396
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.609.240.985,	476.346.378.113	441.294.328.224	555.145.048.917	444.045.268.722
5.1.03	Belanja Bunga	1.795.518.341	1.588.950.040	2.000.000.000	2.000.000.000	3.400.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	1.081.250.000	2.384.650.000	1.600.000.000	226.800.000	272.160.000
5.1.05	Belanja Hibah	88.835.948.048	79.192.778.956	60.589.192.861	120.024.948.750	120.024.948.750
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.718.531.500	2.916.446.400	3.669.847.698	1.852.416.212	1.852.416.212

5.2	**Belanja Modal**	**212.609.418.529**	**99.682.799.055**	**134.884.993.708**	**136.246.675.708**	**73.513.826.133**
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**253.537.500**	**51.717.019**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**
5.4	**Belanja Transfer**	**127.609.067.853**	**131.963.725.572**	**147.003.846.038**	**148.416.774.038**	**135.537.982.077**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.334.880.241.909**	**1.283.554.951.051**	**1.317.952.493.749**	**1.492.732.848.935**	**1.266.048.361.290**

Sumber: Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPD Kota Banda Aceh 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, realisasi APBD Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1.283.554.951.051,-, sedangkan pada tahun 2022 realisasi APBD sebesar Rp. 1.334.880.241.909,- Ini berarti anggaran belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan anggaran belanja tahun 2022. Selanjutnya APBD Kota Banda Aceh tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.1.317.952.493.749,- dan proyeksi belanja program pembangunan daerah tahun 2025 sebesar RP.1.492.732.848.935,- atau meningkat sebesar 11.71%. Anggaran Belanja pada tahun 2025 diprediksi lebih besar Rp.7.200.000.000,- atau 0.48% dari anggaran pendapatan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (invenstasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Untuk pembayaran rencana pembangunan di Tahun 2024, arah dan kebijakan pembiayaan diusahakan untuk menutupi defisit anggaran melalui alokasi belanja berdasarkan skala prioritas dan estimasi jumlah pendapatan daerah yang akurat. Jika tidak dapat diusahakan surplus, hendaknya tidak menimbulkan besarnya defisit anggaran akibat alokasi belanja yang tidak efisien.

Struktur Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2025 seperti terlihat pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2022 (Rp)	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2023 (Rp)	APBD Tahun Berjalan (n-1) 2024 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun RKPD (n) 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun (n+1) 2026 (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.455.126.678	28.361.651.801	29.673.590.001	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	**7.655.126.678**	**25.561.651.801**	**26.873.590.001**	**7.200.000.000**	**0**

Sumber :Proyeksi BPKK Kota

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas diketahui bahwa rencana jumlah penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,- dan rencana jumlah pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.2.800.000.000,- sehingga berdasarkan proyeksi yang disusun terdapat selisih yang menyebabkan surplus dalam pembiayaan netto Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.7.200.000.000,-.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan provinsi tahun bersangkutan.

Prioritas pembangunan daerah berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan agar proses pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu juga dipertimbangkan, sehingga beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dan belum selesai dapat segera ditindaklanjuti.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026; (2) Isu Strategis; (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat Nasional; dan (4) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama tahap I (tahap penguatan pondasi transformasi) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045. Visi dan Misi

Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPA Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Visi dan Misi RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045

	RPJP Nasional	RPJP Aceh	RPJP Kota Banda Aceh
VISI	"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN"	"ACEH YANG MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN"	"BANDA ACEH KOTA ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"
MISI	1. Transformasi Sosial; 2. Transformasi Ekonomi; 3. Transformasi Tata Kelola; 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta; 8. Kesinambungan Pembangunan.	1. Mewujudkan transformasi sosial; 2. Mewujudkan transformasi ekonomi; 3. Mewujudkan transformasi tata kelola; 4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam; 5. Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis; 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Aceh Unggul.	1. Mewujudkan transformasi sosial; 2. Mewujudkan transformasi ekonomi; 3. Mewujudkan transformasi tata kelola; 4. Memantapkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam; 5. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis; 6. Pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan; 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Sumber : RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045

Merujuk pada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh tahun 2025 beserta indikator kinerja tujuan/sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	OPD
						2021	2025	
1		*2*	*3*		*4*	*5*		*6*
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	81,27	Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan	Peningkatan Indeks Ketenteraman	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan	Indeks Ketenteraman Umum	Indeks	80,51	82,34	Kesbangpol

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	OPD
						2021	2025	
1		*2*	*3*		*4*	*5*		*6*
	Ketenteraman Umum	Umum	Ketenteraman Umum					Kecamatan
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,97	93,9	Dinas Tenaga Kerja
								Kecamatan
								DPMPTSP
								Disdukcapil
								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								BKPSDM
								DAMKAR
								Satpol PP dan WH
				Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	Inspektorat
								Sekretariat Daerah
								Sekretariat DPRK
								BAPPEDA
								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Diskominfotik
4	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	82,64	95,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Dinas Pendidikan Dayah
								Sekretariat MPD
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	85,451	94,717	Dinas Kesehatan
								RSUD Meuraxa
								DP3AP2KB
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,53***	4,8	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
								Dinas Tenaga Kerja
								DPMPTSP
								DPMG
								DP2KP
		Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,94	7,74	Dinas Tenaga Kerja

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	OPD
						2021	2025	
1		*2*	*3*		*4*	*5*		*6*
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial		Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial	%	97	100	Dinas Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251.836	550,000	Dinas Pariwisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks	73,41	81,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat MAA
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastuktur Perkotaan	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastuktur Dasar Perkotaan	%	89,49	91,49	Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Perhubungan
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	63,05	76,08	DP3AP2KB
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,29	67,46	DLHK3 Dinas PUPR
		Peningkatan Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,33	14,375	DLHK3
		Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)	Sedang (117,02)	Sedang (97,02)	BPBD
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Indeks	19,47	25,18	Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	OPD
						2021	2025	
1		*2*	*3*		*4*	*5*		*6*
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	1.61	3.18	BPKK

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

4.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan secara umum yang telah dijelaskan secara rinci dalam BAB II sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang merupakan tahun ke-3 RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2) Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung
3) Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum
4) Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5) Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
6) Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
7) Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
8) Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial
9) Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi
10) Belum Optimalnya Pelestarian Budaya
11) Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
12) Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan
13) Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas
14) Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman
15) Adanya Kawasan Banjir Genangan
16) Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
18) Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan
19) Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH
20) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
21) Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana
22) Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
23) Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi

Dalam perencanaan pembangunan, isu strategis merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi sebuah isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2025 di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2025 sebagai berikut:

1) Penguatan Syariat Islam.
2) Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum.
3) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.
4) Optimalisasi Kualitas Pendidikan

5) Optimalisasi Kualitas Kesehatan.
6) Penguatan Ekonomi dan Sosial.
7) Pariwisata dan Budaya.
8) Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman.
9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10) Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH Perkotaan, dan Mitigasi Bencana.
11) Pemuda dan Olah raga.
12) Sumber Pendapatan.

4.3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 218 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Untuk mengetahui program pembangunan daerah Kota Banda Aceh tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	0	Program Syariat Islam Aceh	DSI
				Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Sekretariat MPU
2	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,58	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Syiah Kuala
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Kuta Raja
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Kuta Alam
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Lueng Bata
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Ulee Kareng
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Baiturrahman
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Banda Raya
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Meuraxa
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Jaya Baru
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Syiah Kuala

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kuta Raja
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Baiturrahman
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Banda Raya
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Meuraxa
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Jaya Baru
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Ulee Kareng
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kuta Alam
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lueng Bata
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Syiah Kuala
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Meuraxa
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Baiturrahman
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banda Raya
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kuta Raja

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kuta Alam
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ulee Kareng
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lueng Bata
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaya Baru
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Syiah Kuala
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kuta Raja
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Baiturrahman
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Meuraxa
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banda Raya
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kuta Alam
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Ulee Kareng
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lueng Bata
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Jaya Baru
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
				Program Pembinaan Perpustakaan	DISPERSIP
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	DISPERSIP
				Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	DPKP
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP & WH
				Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP & WH
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal
		Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61,82 (B)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRK
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Arsip	DISPERSIP
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPERSIP
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	DISPERSIP

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfotik
				Program Aplikasi Informatika	Diskominfotik
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Diskominfotik
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfotik
3	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	99,80%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
				Program Pengembangan Kurikulum	DISDIKBUD
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIKBUD
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIKBUD
				Program Pendidikan Dayah	DISDIKDAY
				Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Sekretariat MPD
				Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Sekretariat MAA
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
4	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	95,69%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Meuraxa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3AP2KB
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2KB
5	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	5,23	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja
				Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Stabilisisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
				Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				masyarakat	Perikanan
				Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
				Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
				Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
6	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan	97,94	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
				Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
				Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
7	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,46	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DP3AP2KB
				Program Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AP2KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AP2KB

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2023	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AP2KB

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh, yaitu: **"**Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan", dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah

4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Banda Aceh ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2025 yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh. Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKP Aceh Tahun 2025	Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	"Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan Wilayah"	"Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan"
Prioritas Pembangunan Nasional	**Prioritas Pembangunan Aceh**	**Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh**
⇩	⇩	⇩

PN1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia	PA1	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya Aceh, meningkatan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian	PBNA1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
PN8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
PN2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	PA2	Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi	PBNA2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial

	ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		biru		
PN5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatan nilai tambah di dalam negeri	PA5	Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan		
PN6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan				
PN3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PA3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	PBNA3	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
PN4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	PA4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi social dan penguatan peran pemuda	PBNA4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan
				PBNA5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
				PBNA6	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PBNA7	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
PN7	Memperkuat reformasi politik, hokum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PA6	Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	PBNA8	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Sumber: RKP Nasional Tahun 2025, RKPA Tahun 2025 dan RKP Kota Banda Aceh Tahun 2025

4.6 Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk mengetahui keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Provinsi Aceh dan Pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN1)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA1)**	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA1)**
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN8)		
	Program Syariat Islam Aceh	Program Syariat Islam Aceh
	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN2)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA2)**	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)**
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program penanganan kerawanan pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program pengawasan keamanan pangan
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)
	Program Pendidikan Dayah	Program Pendidikan Dayah
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA3)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN3)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA3)**	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)
	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN4)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA4)**	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)**
	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA6)
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA7)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)
	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Hubungan Industrial	Program hubungan industrial
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA5)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN5)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA5)**	
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN6)		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN7)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA6)**	

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi
	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sumber : RKP Tahun 2025, RKPA Tahun 2025, *dan RPD Kota Banda Aceh 2023-2026*

4.7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dengan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
Sasaran Pembangunan P-BNA 1: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam					
1	Indeks Kota syariah	Indeks	76,77	81,27	DSI
2	Jumlah Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dihasilkan	Rekomendasi	9	30	SET. MPU
Sasaran Pembangunan P-BNA 2: Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial					

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,53***	4.8	
2	Laju Inflasi	%	2.41	2.29	
3	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	60,59***	68.59	
4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	78,16***	86.16	
5	Indeks Gini	Indeks	0,347***	0.327	
6	Persentase Penduduk Miskin	%	7.61	6.89	
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	20,950	20,723	
8	IPM	Indeks	85.71	87.47	
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	1.61	3.18	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17.8	17.84	DISDIKBUD
11	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	12.83	12.85	DISDIKBUD
12	Angka harapan hidup	Tahun	71.52	72.3	DINKES
13	Persentase balita gizi buruk	%	0.23	0.2	DINKES
14	Prevalensi balita gizi kurang	%	1.07	1.04	DINKES
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	8.94	7.45	DISNAKER
16	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	BPKK
17	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	22	BPKK
18	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	59	100	DINSOS
19	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	DINSOS
20	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	DINSOS
21	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	93	100	DINSOS

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
22	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	DINSOS
23	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	61.23	DISNAKER
24	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	17.47	23.26	DISNAKER
25	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1.17	0.71	DISNAKER
26	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	59	65	DISNAKER
27	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	37.06	42.9	DISNAKER
28	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	7.41	18.52	DISNAKER
29	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	26.36	28.16	DISNAKER
30	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	1,310	1,370	DISNAKER
31	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	1.8	7.3	DISNAKER
32	Persentase koperasi aktif	%	77	83	DISKOP
33	Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	%	2	17	DISKOP
34	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	7	10	DISKOP
35	Persentase Pasar yang Representatif	%	50	66.67	DISKOP
36	Jumlah Usaha Mikro	UM	16,970	19,643	DISKOP
37	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	513	519	DISKOP
38	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	395	405	DISKOP

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
39	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar	5	7	DISKOP
40	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1250	1908	DISKOP
41	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)	547.88	630.06	DPMPTSP
42	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	82.56	87	DP2KP
43	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N/A	1,049.95	DP2KP
44	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	N/A	22,197.85	DP2KP
45	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	N/A	428.77	DP2KP
46	Jumlah Produksi Ternak:				
	a. Sapi	Ton	N/A	318.13	DP2KP
	b. Kambing	Ton	N/A	25.7	DP2KP
	c. Unggas	Ton	N/A	2,032	DP2KP
Sasaran Pembangunan P-BNA 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman					
1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	68.82	100	PUPR
2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	PUPR
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	91.37	93.47	PUPR
4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	87.58	87.67	PUPR
5	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	82.01	82.07	PUPR
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	44.11	44.05	PUPR
7	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	95.55	96.15	PUPR
8	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	74.43	74.73	PUPR
9	Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi	Orang	50	50	PUPR
10	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81.07	81.97	PUPR

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
11	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	%	56.85	67.03	PUPR
12	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	Kawasan	0	0	PUPR
13	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	PERKIM
14	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	PERKIM
15	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	76.7	77.3	PERKIM
16	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92.2	93	PERKIM
17	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	7.64	6.64	PERKIM
18	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96.61	98.6	PERKIM
19	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1,649,464	1,698,457	DISHUB
20	Rasio ijin trayek	%	0.22	0.25	DISHUB
21	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	10,500	10,800	DISHUB
22	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	DISHUB
23	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0.15	0.18	DISHUB
24	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	20	17	DISHUB
25	Pemasangan Rambu-rambu	%	102.71	100	DISHUB
Sasaran Pembangunan P-BNA 4: Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	60.12	100	DISDIKBUD

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	%	99.99	100	DISDIKBUD
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP	%	99.99	100	DISDIKBUD
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	97.05	100	DISDIKBUD
5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.76	2.16	DISDIKBUD
6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.6	2	DISDIKBUD
7	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.85	2.25	DISDIKBUD
8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.7	2.1	DISDIKBUD
9	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	49.45	52	DISDIKBUD
10	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	33.33	45	DISDIKBUD
11	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39.9	52	DISDIKBUD
12	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	28.5	62	DISDIKBUD
13	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39.78	45	DISDIKBUD

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
14	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	56.59	62	DISDIKBUD
15	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	25.3	31	DISDIKBUD
16	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	79.45	84	DISDIKBUD
17	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:34	1:22	DISDIKBUD
18	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	6.69	11	DISDIKBUD
19	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	5.55	11	DISDIKBUD
20	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	26	35	DISDIKDAYAH
21	Jumlah rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang dihasilkan	rekomendasi	2	2	SEKRETARIAT MPD
Sasaran Pembangunan P-BNA 5: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan					
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	DINKES
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	95.4	100	DINKES
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	DINKES
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	60.9	100	DINKES

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	73.9	100	DINKES
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	123	100	DINKES
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	14	100	DINKES
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	33	100	DINKES
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	154	100	DINKES
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	DINKES
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	87	100	DINKES
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	99, 19	100	DINKES
13	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80	100	RSUD MEURAXA
14	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	%	76	90	RSUD MEURAXA
Sasaran Pembangunan P-BNA 6: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
1	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	16	80	DP3AP2KB
2	Rasio KDRT	%	0.13	0.1	DP3AP2KB
3	Persentase Gampong Layak Anak	%	25.56	64.44	DP3AP2KB
4	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	72.99	88.72	DP3AP2KB
5	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	%	46.15	92.31	DP3AP2KB
Sasaran Pembangunan P-BNA 7: Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	14.81	22.22	DISPORA
2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	24.12	28.14	DISPORA
Sasaran Pembangunan P-BNA 8: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah					
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99.31	99.5	DISDUKCAPIL
2	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	74.26	75.7	DISDUKCAPIL
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	96.73	96.9	DISDUKCAPIL
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	84	85.5	DISDUKCAPIL
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	95.36	95.6	DISDUKCAPIL
6	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jiwa	9,852	20,597	DISPERSIP
7	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai peraturan	%	N/A	75	DISPERSIP
8	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	75	79	BKPSDM

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
9	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	DPKP
10	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	30	DPKP
11	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	56	70	DPKP
12	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	DPKP
13	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	89.5	SATPOL PP & WH
14	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio	5.27	5.64	SATPOL PP & WH
15	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	85	SATPOL PP & WH
16	Presentase tindak lanjut temuan	%	89.02	90.21	Inspektorat
17	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRK

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
18	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRK
19	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRK
20	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	BAPPEDA
21	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	BAPPEDA
22	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	BAPPEDA
23	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	94.73	100	BAPPEDA
24	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2.62	2.77	DISKOMINFOTIK
25	Persentase website OPD yang aktif	%	75	86	DISKOMINFOTIK
26	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50	61	DISKOMINFOTIK

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2021	Target 2025	OPD
27	Persentase data statistik sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	20	31	DISKOMINFOTIK

Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Kemudian, untuk pencapaian sasaran pembangunan tersebut disusun beberapa intervensi yang mencakup sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Intervensi Mendukung 8 (delapan) P-BNA

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 1 : Mengoptimalkan Pemahaman Dan Pengamalan Syariat Islam			
1	Pelatihan Mawaris	Banda Aceh	Dinas Syariat Islam
2	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Banda Aceh	
3	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Banda Aceh	
4	Pelaksanaan MTQ	Banda Aceh	
5	Peningkatan Kualitas Dakwah Dan Penyemarakan Syariat Islam	Banda Aceh	
6	Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Dai Dan Koordinator Lapangan	Banda Aceh	
7	Pelatihan Takmir Mesjid	Banda Aceh	
8	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Banda Aceh	
9	Penyediaan, Pendistribusian Dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Banda Aceh	
10	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Agama	Banda Aceh	
11	Pemasyarakatan Dan Penyebaran Informasi Keislaman	Banda Aceh	
12	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Banda Aceh	
13	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Banda Aceh	
14	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Banda Aceh	
15	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
16	Pendidikan Kader Ulama	Banda Aceh	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
17	Muzakarah Masalah Keagamaan	Banda Aceh	
18	Sosialisasi Fatwa Dan Hukum Islam	Banda Aceh	
19	Kajian Pedoman Keagamaan	Banda Aceh	
20	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Banda Aceh	
21	Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Banda Aceh	
22	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Banda Aceh	
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 2 : Meningkatkan Penguatan Ekonomi Dan Sosial			
1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
2	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
3	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
4	Pengembangan Usaha Mikro	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
5	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
8	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Banda Aceh	
9	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
10	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
12	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Banda Aceh	
14	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Banda Aceh	
15	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Banda Aceh	
17	Pengawasan Penanaman Modal	Banda Aceh	
18	Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
19	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Banda Aceh	
20	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Banda Aceh	
21	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
22	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
23	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
24	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
25	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Banda Aceh	
26	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Banda Aceh	
27	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Banda Aceh	
28	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak Dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Banda Aceh	
29	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak	Banda Aceh	
30	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Banda Aceh	
31	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
32	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Di Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
33	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
34	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Banda Aceh	
35	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Banda Aceh	
36	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
37	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
38	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
39	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Banda Aceh	
40	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Banda Aceh	
41	Pameran Dagang Nasional	Banda Aceh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
42	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Tenaga Kerja
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Banda Aceh	
44	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Banda Aceh	
45	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Banda Aceh	
46	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Banda Aceh	
47	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	Banda Aceh	Dinas Tenaga Kerja
48	Diseminasi, Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Siinas	Banda Aceh	
49	Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data Ke Siinas	Banda Aceh	
50	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
51	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Banda Aceh	Gampong
52	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Banda Aceh	
53	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Banda Aceh	
54	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Banda Aceh	
55	Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Desa	Banda Aceh	
56	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUM Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Banda Aceh	
57	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	Banda Aceh	
58	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Banda Aceh	
59	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Banda Aceh	
60	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Banda Aceh	
61	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Banda Aceh	
62	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Banda Aceh	
63	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Banda Aceh	
64	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
65	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Banda Aceh	
66	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia	Banda Aceh	
67	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Banda Aceh	
68	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
69	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
70	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis	Banda Aceh	
71	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Banda Aceh	
72	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Banda Aceh	
73	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
74	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
75	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Banda Aceh	
76	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Banda Aceh	
77	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Banda Aceh	
78	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Banda Aceh	
79	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Banda Aceh	
80	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
81	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
82	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
83	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
84	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
85	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
86	Koordinasi Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Banda Aceh	
87	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Banda Aceh	
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 3 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Penataan Kawasan Permukiman			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Banda Aceh	
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Banda Aceh	
4	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Banda Aceh	
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Banda Aceh	
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Banda Aceh	
9	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Banda Aceh	
10	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Banda Aceh	
11	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
12	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Banda Aceh	
13	Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Banda Aceh	
14	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Banda Aceh	
15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Desa	Banda Aceh	
17	Pembangunan Jalan	Banda Aceh	
18	Rekonstruksi Jalan	Banda Aceh	
19	Pemeliharaan Berkala Jalan	Banda Aceh	
20	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Banda Aceh	
21	Rehabilitasi Jembatan	Banda Aceh	
22	Pembangunan Jembatan	Banda Aceh	
23	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Banda Aceh	
24	Rehabilitasi Jalan	Banda Aceh	
25	Pemeliharaan Rutin Jalan	Banda Aceh	
26	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Perhubungan
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
28	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Banda Aceh	
29	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Banda Aceh	
30	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Banda Aceh	
31	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Dan Penunjang)	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
32	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Banda Aceh	
33	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
34	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Banda Aceh	
35	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Banda Aceh	
36	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Banda Aceh	
37	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Banda Aceh	
38	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
39	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Banda Aceh	
40	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
41	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
42	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Banda Aceh	
43	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
44	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Banda Aceh	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
45	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Banda Aceh	
46	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Banda Aceh	
47	Verifikasi Dan Penyerahan PSU Perumahan Dari Pengembang	Banda Aceh	
48	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
49	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Banda Aceh	
50	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
51	Pelaksanaan Evaluasi Dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
52	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Banda Aceh	
53	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
54	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Banda Aceh	
55	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
56	Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Banda Aceh	
57	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Banda Aceh	
58	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Banda Aceh	
59	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Banda Aceh	
60	Pemberian Insentif Dan/Atau Disinsentif Non Fiskal	Banda Aceh	
61	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Banda Aceh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
62	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Banda Aceh	
63	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Banda Aceh	
64	Operasi Dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Banda Aceh	
65	Normalisasi/Restorasi Sungai	Banda Aceh	
66	Pembangunan Tanggul Sungai	Banda Aceh	
67	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Dan Pengaman Pantai	Banda Aceh	
68	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Banda Aceh	
69	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Banda Aceh	
70	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Banda Aceh	
71	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Banda Aceh	
72	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Banda Aceh	
73	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Banda Aceh	
74	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Banda Aceh	
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 4 : Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan			
1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Banda Aceh	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Pengadaan Mebel Sekolah	Banda Aceh	
3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
4	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Banda Aceh	
5	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Banda Aceh	
6	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Banda Aceh	
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Banda Aceh	
8	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Banda Aceh	
9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Banda Aceh	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Banda Aceh	
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Banda Aceh	
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Banda Aceh	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Banda Aceh	
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Banda Aceh	
15	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	Banda Aceh	
16	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Banda Aceh	
17	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Banda Aceh	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Banda Aceh	
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Banda Aceh	
20	Pengadaan Mebel Sekolah	Banda Aceh	
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Banda Aceh	
22	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Banda Aceh	
23	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
24	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Banda Aceh	
25	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Banda Aceh	
26	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Banda Aceh	
27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Banda Aceh	
28	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Banda Aceh	
29	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Banda Aceh	
30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Banda Aceh	
31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Banda Aceh	
32	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	Banda Aceh	
33	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Banda Aceh	
34	Pengadaan Mebel PAUD	Banda Aceh	
35	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Banda Aceh	
36	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Banda Aceh	
37	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Banda Aceh	
38	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Banda Aceh	
39	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Banda Aceh	
40	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Banda Aceh	
41	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Peserta Didik	Banda Aceh	
42	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Banda Aceh	
43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Banda Aceh	
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Banda Aceh	
45	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik PAUD	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
46	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Banda Aceh	
47	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Banda Aceh	
48	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Banda Aceh	
49	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Banda Aceh	
50	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Banda Aceh	
51	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Banda Aceh	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
52	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Banda Aceh	
53	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Banda Aceh	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
54	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Banda Aceh	
55	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dayah	Banda Aceh	Dinas Pendidikan Dayah
56	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dayah	Banda Aceh	
57	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dayah	Banda Aceh	
58	Pemberdayaan Dan Pendidikan Santri	Banda Aceh	
59	Pembinaan Manajemen Dayah	Banda Aceh	
60	Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Banda Aceh	
61	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Banda Aceh	
62	Pembangunan Dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Banda Aceh	
63	Fasilitasi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren Dan Balai Pengajian	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
64	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Banda Aceh	Dinas Pendidikan Dayah
65	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Banda Aceh	
66	Penyusunan Kurikulum Aceh Yang Islami Untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah	Banda Aceh	
67	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum Dan Madrasah	Banda Aceh	
68	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Dayah Salafiah Dan Diniyah	Banda Aceh	
69	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Pada Sekolah/Madrasah Dan Dayah Yang Berskala Provinsi	Banda Aceh	
70	Supervisi Dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Banda Aceh	
71	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh Pada Setiap Satuan Pendidikan Di Aceh	Banda Aceh	
72	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh Dan Standar Pelayanan Minimal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Banda Aceh	
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 5 : Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan			
1	Pembangunan Puskesmas	Banda Aceh	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	
3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	
4	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Banda Aceh	
5	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Banda Aceh	
7	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Banda Aceh	
8	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Banda Aceh	
9	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Banda Aceh	
10	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	Banda Aceh	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Banda Aceh	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Banda Aceh	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Banda Aceh	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Banda Aceh	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Banda Aceh	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Banda Aceh	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Banda Aceh	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Banda Aceh	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Banda Aceh	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Banda Aceh	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Banda Aceh	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Banda Aceh	
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Banda Aceh	
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Banda Aceh	
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Banda Aceh	
27	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Banda Aceh	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Banda Aceh	
29	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Banda Aceh	
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	Banda Aceh	
31	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Banda Aceh	
32	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Banda Aceh	
33	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Banda Aceh	
34	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Banda Aceh	
35	Operasional Pelayanan Puskesmas	Banda Aceh	
36	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	
37	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
38	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Banda Aceh	
39	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Banda Aceh	
40	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Banda Aceh	
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Banda Aceh	
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Banda Aceh	
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Banda Aceh	
45	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Banda Aceh	
46	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Banda Aceh	
47	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
48	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Banda Aceh	
49	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Banda Aceh	Dinas Kesehatan
50	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Banda Aceh	
51	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
52	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Banda Aceh	Dinas Kesehatan
53	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Banda Aceh	
54	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Banda Aceh	RSUD Meuraxa
55	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Banda Aceh	
56	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 6 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Banda Aceh	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
4	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
8	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi KG Dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10	Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Banda Aceh	
12	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
Highlight Intervensi Pendukung P-BNA 7 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga			
1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan Dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
3	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
4	Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaran Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
6	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Banda Aceh	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Highlight Intervensi Pendukung P-Bna 8 : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintah			
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Banda Aceh	Dinas Tenaga Kerja
2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Banda Aceh	
3	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Banda Aceh	
4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
6	Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
8	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Banda Aceh	
9	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Banda Aceh	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Pengumpulan, Analisis, Dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Banda Aceh	
12	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Banda Aceh	
13	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non-Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Banda Aceh	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Banda Aceh	
15	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Banda Aceh	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
17	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Banda Aceh	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
19	Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
20	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Banda Aceh	
21	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
22	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Banda Aceh	
23	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat	Banda Aceh	
24	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Banda Aceh	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS Dan PPPK	Banda Aceh	
26	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Banda Aceh	
27	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Banda Aceh	
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Banda Aceh	
29	Pengelolaan Mutasi ASN	Banda Aceh	
30	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Banda Aceh	
31	Pengelolaan Promosi ASN	Banda Aceh	
32	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Banda Aceh	
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Banda Aceh	
34	Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Banda Aceh	
35	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
36	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Banda Aceh	
37	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Banda Aceh	
38	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan	Banda Aceh	
39	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan Dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, Dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, Dan Prajabatan	Banda Aceh	
40	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
41	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
42	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Banda Aceh	
43	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
44	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Banda Aceh	
45	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
46	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Banda Aceh	
47	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (RISPKP)	Banda Aceh	
48	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran Dan Analis Kebakaran	Banda Aceh	
49	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (RISPKP)	Banda Aceh	
50	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Banda Aceh	
51	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Banda Aceh	
52	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Banda Aceh	
53	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Banda Aceh	
54	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Banda Aceh	
55	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Banda Aceh	
56	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Banda Aceh	
57	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Banda Aceh	
58	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Banda Aceh	
59	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Banda Aceh	
60	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
61	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Banda Aceh	
62	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Banda Aceh	
63	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Banda Aceh	
64	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Banda Aceh	
65	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Banda Aceh	
66	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Banda Aceh	Inspektorat
67	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	
68	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Banda Aceh	
69	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Banda Aceh	
70	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Banda Aceh	
71	Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Banda Aceh	Sekretariat Dprk
72	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banda Aceh	
73	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
74	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Banda Aceh	
75	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Banda Aceh	
76	Pembahasan KUA Dan PPAS	Banda Aceh	
77	Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Banda Aceh	
78	Pembahasan APBD	Banda Aceh	
79	Pembahasan APBD Perubahan	Banda Aceh	
80	Pembahasan Laporan Semester	Banda Aceh	
81	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Banda Aceh	
82	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Banda Aceh	
83	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Banda Aceh	
84	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Banda Aceh	
85	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Banda Aceh	
86	Orientasi DPRD	Banda Aceh	
87	Pendalaman Tugas DPRD	Banda Aceh	
88	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Banda Aceh	
89	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Banda Aceh	
90	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Banda Aceh	
91	Penyusunan Program Kerja DPRD	Banda Aceh	
92	Publikasi Dan Dokumentasi DPRD	Banda Aceh	
93	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Banda Aceh	
94	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Banda Aceh	
95	Pelaksanaan Reses	Banda Aceh	
96	Penyusunan Kode Etik DPRD	Banda Aceh	
97	Pengawasan Kode Etik DPRD	Banda Aceh	
98	Fasilitasi, Verifikasi, Dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
99	Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi	Banda Aceh	
100	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Banda Aceh	
101	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Banda Aceh	
102	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Banda Aceh	
103	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Banda Aceh	
104	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Banda Aceh	
105	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
106	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Banda Aceh	
107	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	
108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Banda Aceh	
109	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	
110	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Banda Aceh	
111	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Banda Aceh	
112	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	
113	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
114	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Banda Aceh	
115	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Banda Aceh	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
116	Penelitian Dan Pengembangan Pariwisata	Banda Aceh	
117	Penelitian Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Banda Aceh	
118	Penelitian Dan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan	Banda Aceh	
119	Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Banda Aceh	
120	Penelitian Dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Banda Aceh	
121	Penelitian Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Banda Aceh	
122	Penelitian Dan Pengembangan Penataan Ruang Dan Pertanahan	Banda Aceh	
123	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Banda Aceh	
124	Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Banda Aceh	
125	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Banda Aceh	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
126	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Banda Aceh	
127	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	Banda Aceh	
128	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Banda Aceh	
129	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD	Banda Aceh	
130	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Banda Aceh	
131	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
132	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Banda Aceh	
133	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Banda Aceh	
134	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Banda Aceh	
135	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Banda Aceh	
136	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Banda Aceh	
137	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
138	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Banda Aceh	
139	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Banda Aceh	
140	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Banda Aceh	
141	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	Banda Aceh	
142	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Banda Aceh	
143	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Banda Aceh	
144	Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan Dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
145	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Banda Aceh	
146	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Banda Aceh	
147	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
148	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Banda Aceh	
149	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan Beban	Banda Aceh	
150	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	Banda Aceh	
151	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
152	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
153	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Banda Aceh	
154	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
155	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Banda Aceh	
156	Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
157	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
158	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Danpertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
159	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
160	Koordinasi Dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	
161	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
162	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
163	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
164	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Banda Aceh	
165	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Banda Aceh	
166	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Banda Aceh	
167	Penyusunan Kebijakan Dan Alokasi Subsidi	Banda Aceh	
168	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Banda Aceh	
169	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Banda Aceh	
170	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
171	Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Banda Aceh	

No	Intervensi	Wilayah Prioritas	OPD
172	Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Banda Aceh	
173	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	
174	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Banda Aceh	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
175	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Banda Aceh	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
176	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Banda Aceh	

Sumber : Aplikasi SIPD Tahun 2025

Lebih detail mengenai program prioritas tahun 2025 yang mendukung 8 (delapan) PBNA dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4. 9 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 1: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam							
1	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76.77	81.27	15,279,095,250	Dinas Syariat Islam
2	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	%	100	100	652,023,600	Sekretariat MPU
Program prioritas Pendukung P-BNA 2: Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial							
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	80	95	223,284,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	%	80	90	128,139,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	%	80	95	51,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	%	80	95	177,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	%	0	100	495.602.710	DPMPTSP
6	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	0	100	181,845,000	DPMPTSP
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0	100	180,685,960	DPMPTSP
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	%	0	100	11,300,000	DPMPTSP
9	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	%	35	25	1,425,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
10	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	35	25	325,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	%	25	25	2,505,035,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
12	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	%	40	20	1,108,830,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	%	30	30	1,816,607,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
14	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	80	95	5,154,400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	%	80	95	9,519,041,412	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
16	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	%	80	95	119,999,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
17	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	%	100	100	6,080,172,000	Dinas Tenaga Kerja
18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	%	100	100	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja
19	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	%	100	100	705,426,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
20	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	%	30	100	616,430,500	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
21	Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	%	0	100	806,440,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
22	Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	%	0	100	153,931,000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman							
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	%	91.27	93.47	9,381,267,600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	%	87.58	87.67	8,125,058,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	%	93.12	96.15	27,688,824,191	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	%	100	100	6,856,470,000	Dinas Perhubungan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	%	100	100	9,426,611,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	100	100	3,057,847,600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	%	81.07	85.07	11,180,365,945	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	%	74.01	81.97	2,193,673,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	%	80	44.05	270,359,130	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program prioritas Pendukung P-BNA 4: Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	%	66.02	79.00	96,544,279,110	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	%	39.86	100.00	35,633,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	%	75.25	80.47	37,060,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	%	68.42%	92.11%	5,028,301,500	Dinas Pendidikan Dayah

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
5	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	%	09.42	100	313,096,800	Dinas Pendidikan Dayah
Program prioritas Pendukung P-BNA 5: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	79.20	90	51,241,279,935	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	95	95	1,410,724,600	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	95	100	980,594,110	Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	51,241,279,935	RSUD Meuraxa
Program prioritas Pendukung P-BNA 6: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	95.03	100	496,950,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	0	100	79,010,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	%	100	100	380,314,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	448,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	69.03	100	537,218,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	%	100	100	381,801,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program prioritas Pendukung P-BNA 7: Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga							

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	614,699,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	100	203,630,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program prioritas Pendukung P-BNA 8: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah							
1	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	%	25	40	308,396,000	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	%	100	100	766,310,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100,966,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	184,645,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	72,270,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	50,005,200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	%	87.05	100	1,292,951,100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
8	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	%	100	100	1,135,688,700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	%	40	100	706,024,500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	%	100	100	3,715,101,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
11	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	%	100	100	39,290,000	Inspektorat
12	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	8,451,616,600	Sekretariat DPRK
13	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1,146,451,000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	2,497,306,450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	148,329,250,973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
16	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0	100	45,622,500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	2025		OPD
					Target	Rp	
17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	%	100	100	191,367,000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan Aplikasi SIPD RKPD Tahun 2025

4.8 Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

Di samping penetapan tema dan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025, juga ditetapkan program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dengan memperhatikan pencapaian kinerja Tahun 2025 Triwulan 1 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah. Adapun program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dan juga program prioritas pembangunan nasional dan program prioritas Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
I	Program Prioritas Pendukung P-BNA 1: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	80%	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Penguatan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	15.279.095.250	Dinas Syariat Islam
						Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	652.023.600	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Total Pagu						**15.931.118.850**		
II	Program Prioritas Pendukung P-BNA 2: Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	80%	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial	Penguatan Ekonomi dan Sosial	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	223.284.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	128.139.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Pengembangan UMKM	177.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	495.602.710	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Promosi Penanaman Modal	181.845.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Pelayanan Penanaman Modal	180.685.960	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program pengelolaan perikanan tangkap	1.425.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program pengelolaan perikanan budidaya	325.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.505.035.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.108.830.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.816.607.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	5.154.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.519.041.412	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Pengembangan Ekspor	119.999.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.080.172.000	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	705.426.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
						Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	616.430.500	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program penanganan kerawanan pangan	806.440.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
						Program pengawasan keamanan pangan	153.931.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
Total Pagu							**26.725.923.282**	
III	Program Prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastuktur Perkotaan	0,50%	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman Adanya Kawasan Banjir Genangan	Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.381.267.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.125.058.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Jalan	27.688.824.191	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.856.470.000	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Kawasan Permukiman	9.426.611.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.057.847.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Penataan Bangunan Gedung	11.180.365.945	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.193.673.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	270.359.130	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
Total Pagu						**78.180.476.466**		
IV	Program Prioritas Pendukung P-BNA 4: Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	80%	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	96.544.279.110	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	35.633.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	37.060.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						Program Pendidikan Dayah	5.028.301.500	Dinas Pendidikan Dayah
						Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	313.096.800	Dinas Pendidikan Dayah
Total Pagu						**101.958.370.410**		

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
V	Program Prioritas Pendukung P-BNA 5: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	80%	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.241.279.935	Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.410.724.600	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	980.594.110	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.241.279.935	Rsud Meuraxa
Total Pagu						**104.873.878.580**		
VI	Program Prioritas Pendukung P-BNA 6: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,37	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	496.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	79.010.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan Perempuan	380.314.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
								Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	448.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	537.218.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan Khusus Anak	381.801.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Total Pagu							**2.323.293.500**	

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
VII	Program Prioritas Pendukung P-BNA 7: Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	1,43	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Pemuda dan Olah raga.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	614.699.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	203.630.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Total Pagu							**818.329.000**	
VIII	Program Prioritas Pendukung P-BNA 8: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	80%	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Program hubungan industrial	308.396.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	766.310.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Pendaftaran Penduduk	100.966.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pencatatan Sipil	184.645.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.270.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.005.200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pembinaan Perpustakaan	1.292.951.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						Program Kepegawaian Daerah	1.135.688.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	706.024.500	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	3.715.101.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
						Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	39.290.000	Inspektorat

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.451.616.600	Sekretariat DPRK
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.146.451.000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.497.306.450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	148.329.250.973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	45.622.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	191.367.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Total Pagu						**169.033.262.023**		

Sumber: SIPD, diolah, 2024

4.9 Konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 11 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA1)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA1)**	**15.931.118.850**	
Program Syariat Islam Aceh	Program Syariat Islam Aceh	15.279.095.250	Dinas Syariat Islam
Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	652.023.600	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA2)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)**	**1.576.801.500**	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	616.430.500	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program penanganan kerawanan pangan	806.440.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program pengawasan keamanan pangan	153.931.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)	**5.028.301.500**	
Program Pendidikan Dayah	Program Pendidikan Dayah	5.028.301.500	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA3)	**78.180.476.466**	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.381.267.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.125.058.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	270.359.130	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Prioritas Mendukung			

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Prioritas Aceh (PA3)			
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	27.688.824.191	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.856.470.000	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.193.673.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	9.426.611.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.057.847.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	11.180.365.945	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**3.715.101.000**	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	3.715.101.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)	**6.754.749.400**	
Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	177.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	223.284.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	128.139.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.080.172.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	5.154.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA4)	**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)**	**96.930.068.910**	
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	96.544.279.110	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	35.633.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	313.096.800	Dinas Pendidikan Dayah
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	37.060.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA6)	**2.323.293.500**	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	496.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	380.314.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	448.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	79.010.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	537.218.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	381.801.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA7)	**818.329.000**	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	614.699.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	203.630.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**4.144.276.050**	
Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	1.292.951.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	45.622.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.497.306.450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Program Hubungan Industrial	Program hubungan industrial	308.396.000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA5)	**104.873.878.580**	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.241.279.935	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.410.724.600	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	980.594.110	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.241.279.935	RSUD Meuraxa
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)	**18.213.686.422**	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.505.035.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA5)			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.108.830.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.816.607.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1.425.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	325.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.519.041.412	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	705.426.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	119.999.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	495.602.710	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	181.845.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	180,685,960	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**161.173.884.973**	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	766.310.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Prioritas Mendukung Prioritas Aceh (PA6)			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	148.329.250.973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	39.290.000	Inspektorat

RKP Aceh 2025	RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Provinsi Aceh	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1.135.688.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	706.024.500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	191.367.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.146.451.000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.270.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	100.966.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	184.645.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.005.200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.451.616.600	Sekretariat DPRK

Sumber : RKPA 2025 dan SIPD, diolah, 2024

4.10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Berikut akan diuraikan konsistensi prioritas pembangunan Kota Banda Aceh dengan pendukung prioritas nasional beserta rencana alokasi anggaran setiap programnya yang dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4. 12 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN1)		**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA1)**	**15.931.118.850**	
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN8)				
		Program Syariat Islam Aceh	15.279.095.250	Dinas Syariat Islam
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	652.023.600	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN2)		**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)**	**1.576.801.500**	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	616.430.500	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program penanganan kerawanan pangan	806.440.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	153.931.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)	**5.028.301.500**	
		Program Pendidikan Dayah	5.028.301.500	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA3)	**78.180.476.466**	

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.381.267.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.125.058.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	270.359.130	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN3)				
		Program Penyelenggaraan Jalan	27.688.824.191	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.856.470.000	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.193.673.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman	9.426.611.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.057.847.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	11.180.365.945	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**3.715.101.000**	

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	3.715.101.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)	**6.754.749.400**	
		Program Pengembangan UMKM	177.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	223.284.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	128.139.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.080.172.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	5.154.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN4)		**Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA4)**	**96.930.068.910**	

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Pengelolaan Pendidikan	96.544.279.110	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	35.633.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	313.096.800	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	37.060.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA6)	**2.323.293.500**	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	496.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	380.314.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	448.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	79.010.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	537.218.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	381.801.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA7)	**818.329.000**	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	614.699.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	203.630.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**4.144.276.050**	
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.292.951.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	45.622.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Perizinan Penggunaan Arsip		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.497.306.450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program hubungan industrial	308.396.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA5)	**104.873.878.580**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.241.279.935	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.410.724.600	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	980.594.110	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.241.279.935	RSUD Meuraxa
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA2)	**18.213.686.422**	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.505.035.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN5)				
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN6)				

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.108.830.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.816.607.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	1.425.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	325.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.519.041.412	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	705.426.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
		Program Pengembangan Ekspor	119.999.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	495.602.710	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	181.845.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	180,685,960	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Prioritas Mendukung Prioritas Banda Aceh (PBNA8)	**161.173.884.973**	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	766.310.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Prioritas Mendukung Prioritas Nasional (PN7)				
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	148.329.250.973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
		Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	39.290.000	Inspektorat
		Program Kepegawaian Daerah	1.135.688.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	706.024.500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	191.367.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

RKP Nasional 2025		RKPD Kota Banda Aceh 2025		
Program Prioritas Nasional	**Indikator Kinerja**	**Program Prioritas Kota Banda Aceh**	**Pagu**	**OPD**
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.146.451.000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.270.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	100.966.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	184.645.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50.005.200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.451.616.600	Sekretariat DPRK

Sumber : RKP Nasional Tahun 2025. RPD Tahun 2023-2026. SIPD

Selain program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sesuai tabel 4.5. terdapat program-program pendukung masing-masing tujuan tersebut seperti tercantum dalam tabel 4.13 berikut:

Tabel 4. 13 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	81.27	Dinas Syariat Islam
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	100	Sekretariat MPU
2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	90	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	20	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	30	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	95	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
3	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	93.47	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87.67	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	96.15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100	Dinas Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	85.07	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	81.97	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	44.05	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	79.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	80.47	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	92.11	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	100	Dinas Pendidikan Dayah
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	RSUD Meuraxa
6	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
8	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	40	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	100	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100	Inspektorat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100	Sekretariat DPRK
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	100	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

No	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target	OPD
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta mewujudkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh, ditetapkan program dan kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan serta mewujudkan implementasi program prioritas pembangunan sesuai dengan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan dinamika pembangunan. Penyusunan perencanaan program pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. **1.492.732.848.935,-.** Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju rencana Tahun 2026 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut urusan ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut (terlampir dalam Buku 2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)):

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2023

Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator yang dapat dijadikan alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator pembangunan dari tahun ke tahun merupakan potret kinerja pemerintah dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 218 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Target capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6. 1 **Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam					
1.	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	79,85	81,27	Dinas Syariat Islam, Sekretariat MPU
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,58	93,9	Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BKPSDM, DPKP, Satpol PP & WH, Kesbangpol, Sekretariat Baitul Mal
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	61,82 (B)	BB	Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Diskominfotik, BPKK
Tujuan : Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan					

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	99,80	95,38	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat MPD, Sekretariat MAA, Dinas Pemuda dan Olahraga
Tujuan: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan					
1	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	95,69	94,717	Dinas Kesehatan, RSUD Meuraxa, DP3AP2KB
Tujuan : Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial					
1	Pertumbuhan ekonomi/Pertumbuhan PDRb	%	5,23	4,8	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, DPMG, DP2KP, Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Sosial
Tujuan: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman					
1	Rata-Rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	%	97,94	91,49	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, DLHK3
Tujuan: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	85,46	76,08	DP3AP2KB

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

6.2 Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2023

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat target capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penentuan indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Target pencapaian IKD untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi:						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,06	4,4	4,8	
2	Laju Inflasi	%	1,53	2,32	2,29	
3	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	65,20	66,59	68,59	
4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	90,764	84,16	86,16	
5	Indeks Gini	Indeks	0,330	0,332	0,327	
6	Persentase Penduduk Miskin	%	7,04	7,07	6,89	
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.940	20.799	20.723	
8	IPM	Indeks	88,32	87,03	87,47	
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	NA	2,52	3,18	
Kesejahteraan Sosial						
Pendidikan						
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,93	17,83	17,84	Disdikbud
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	13,04	12,84	12,85	Disdikbud
Kesehatan						
3	Angka harapan hidup	Tahun	71,79	72,10	72,30	Dinkes
4	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,21	0,20	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,6	1,05	1,04	Dinkes
Ketenagakerjaan						
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,03	7,80	7,45	Disnaker
Keuangan						
7	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKK
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19,21%	21	22	BPKK
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	**PENDIDIKAN**					
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	60.71	100	100	Disdikbud
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	%	99.92	100	100	Disdikbud
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP	%	99.05	100	100	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	45.26	100	100	Disdikbud
1.5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68.89	2,06	2,16	Disdikbud
1.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	46.07	1,90	2,00	Disdikbud
1.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74.94	2,15	2,25	Disdikbud
1.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45.03	2,00	2,10	Disdikbud
1.9	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	36.84	51	52	Disdikbud
1.10	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	66.67	39	45	Disdikbud
1.11	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	83.33	50	52	Disdikbud
1.12	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	80	50	62	Disdikbud
1.13	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	89.75	43	45	Disdikbud
1.14	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	92.9	60	62	Disdikbud
1.15	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	36.2	29	31	Disdikbud
1.16	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	81.44	83	84	Disdikbud
1.17	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:65	1:25	1:22	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.18	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	7	10	11	Disdikbud
1.19	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	8	10	11	Disdikbud
1.20	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	29	32	35	Disdikdayah
1.21	Jumlah rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	2	Sek. MPD
2.	**KESEHATAN**					
2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	93,13	100	100	Dinkes
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	29,60	100	100	Dinkes
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,90	100	100	Dinkes
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,97	100	100	Dinkes
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,66	100	100	Dinkes
2.6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,50	100	100	Dinkes
2.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,54	100	100	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	4,28	100	100	Dinkes
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,58	100	100	Dinkes
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,16	100	100	Dinkes
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	42,74	100	100	Dinkes
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	96,50	100	100	Dinkes
2.13	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	NA	100	100	Dinkes
2.14	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	%	NA	85	90	Dinkes
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
3.1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,03	100	100	Dinas PUPR
3.2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,98	100	100	Dinas PUPR
3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	80,02	92,77	93,47	Dinas PUPR
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	95,0	87,64	87,67	Dinas PUPR
3.5	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	75,38	82,05	82,07	Dinas PUPR
3.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	21,44	44,07	44,05	Dinas PUPR
3.7	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	79,76	95,95	96,15	Dinas PUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.8	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	74,65	74,63	74,73	Dinas PUPR
3.9	Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi	Orang	0	50	50	Dinas PUPR
3.10	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81,28	81,67	81,97	Dinas PUPR
3.11	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	%	60,54	63,78	67,03	Dinas PUPR
3.12	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	Kawasan	0	1	0	Dinas PUPR
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
4.1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	Dinas Perkim
4.2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	Dinas Perkim
4.3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	80,9	77,10	77,30	Dinas Perkim
4.4	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92,84	92,80	93,00	Dinas Perkim
4.5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	6,34	6,84	6,64	Dinas Perkim
4.6	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	98,20	98,60	Dinas Perkim
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	88,6	89,5	Satpol PP & WH
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio	5,68	5,58	5,64	Satpol PP & WH
5.3	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	85	85	Satpol PP & WH
5.4	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,61	0,62	0,64	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.5	Layanan informasi rawan bencana	%	0,01	100	100	BPBD
5.6	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,01	100	100	BPBD
5.7	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	100	100	BPBD
5.8	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	DPKP
5.9	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	20	30	DPKP
5.10	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	83	65	70	DPKP
5.11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	100	DPKP
6.	**SOSIAL**					
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	133,33	100	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	Dinas Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6.4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	129	100	100	Dinas Sosial
6.5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1.	**TENAGA KERJA**					
1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	42,75	55,56	61,23	Disnaker
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	55,96	21,14	23,26	Disnaker
1.3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,18	0,86	0,71	Disnaker
1.4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	12,05	63,00	65,00	Disnaker
1.5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	38,62	40,86	42,90	Disnaker
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	14,81	18,52	Disnaker
1.7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0	27,57	28,16	Disnaker
1.8	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	0	1.350	1.370	Disnaker
1.9	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	0	5,50	7,30	Disnaker
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
2.1	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	38	64	80	Dinas P3AP2KB
2.3	Rasio KDRT	%	0,16	0,11	0,10	Dinas P3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.4	Persentase Gampong Layak Anak	%	25,55	54,44	64,44	Dinas P3AP2KB
2.5	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	59,44	84,50	88,72	Dinas P3AP2KB
2.6	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	%	83,33	76,92	92,31	Dinas P3AP2KB
3.	**PANGAN**					
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83,3	85,00	87,00	DP2KP
4.	**LINGKUNGAN HIDUP**					
4.1	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	85,10	97,60	98,00	DLHK3
4.2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,365	14,365	14,370	DLHK3
4.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,67	45,71	45,76	DLHK3
4.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,69	83,54	83,59	DLHK3
4.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,60	29,19	29,20	DLHK3
4.5	Persentase Penerangan Jalan Umum	%	84,68	86,25	86,50	DLHK3
4.6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	98,36	97,60	97,70	DLHK3
4.7	Penghargaan Adipura	Ada/Tidak Ada	Belum ada pengumuman	Ada	Ada	DLHK3
5.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
5.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99,76	99,40	99,50	Disdukcapil
5.2	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	82,69	75,60	75,70	Disdukcapil
5.3	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	96,73	96,80	96,90	Disdukcapil
5.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,60	85,00	85,50	Disdukcapil
5.5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	97,87	95,50	95,60	Disdukcapil
6.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**					
6.1	Indeks Gampong Membangun (IGM)	Indeks	0,8615	0,803	0,818	DPMG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6.2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	98,89	100	100	DPMG
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2,18	2,80	2,90	DPMG
6.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22,2	22,40	22,50	DPMG
6.5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	DPMG
6.6	Persntase Posyandu Aktif	%	100	100	100	DPMG
7.	**PERHUBUNGAN**					
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	2,521,991	1.682.126	1.698.457	Dishub
7.2	Rasio ijin trayek	%	0,005	0,24	0,25	Dishub
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	7,111	10.700	10.800	Dishub
7.4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	3	Dishub
7.5	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,10	0,17	0,18	Dishub
7.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	12,12	18	17	Dishub
7.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	87,30	100	100	Dishub
8.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
8.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,54	2,72	2,77	Diskominfotik
8.2	Persentase website OPD yang aktif	%	82	84	86	Diskominfotik
8.3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	57	59	61	Diskominfotik
9.	**KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**					
9.1	Persentase koperasi aktif	%	76,88	81	83	Diskop, UKM & Dag
9.2	Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	%	7	12	17	Diskop, UKM & Dag
9.3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	8	9	10	Diskop, UKM & Dag
9.4	Persentase Pasar yang Representatif	%	100	58,33	66,67	Diskop, UKM & Dag

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9.5	Jumlah Usaha Mikro	UM	34,428	18.708	19.643	Diskop, UKM & Dag
9.6	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	519	517	519	Diskop, UKM & Dag
9.7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	443	400	405	Diskop, UKM & Dag
9.8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar	9	6	7	Diskop, UKM & Dag
9.9	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1378	1643	1908	Diskop, UKM & Dag
10.	**PENANAMAN MODAL**					
10.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)	573,54	602,67	630,06	DPMPTSP
11.	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**					
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	16,67	20,37	22,22	Dispora
11.2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	26,13	27,14	28,14	Dispora
12.	**STATISTIK**					
12.1	Persentase data statistik sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	27	29	31	Diskominfotik
13.	**KEBUDAYAAN**					
13.1	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks	82.9	79,05	81,84	Disdikbud
13.2	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%	62	67	69	Disdikbud
13.3	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%	81	79	85	Disdikbud
13.4	Jumlah rekomendasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	2	Sek. MAA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14.	**PERPUSTAKAAN**					
14.1	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jiwa	10,087	18.725	20.597	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	**KEARSIPAN**					
15.1	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai peraturan	%	25	50	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Layanan Urusan Pilihan						
1.	**PARIWISATA**					
1.1	Jumlah Kunjungan Wisataan	Jiwa	382,029	450.000	550.000	Dinas Pariwisata
1.2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	0,1402	5,2	5,3	Dinas Pariwisata
2.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
2.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	839,9	981,26	1.049,95	DP2KP
2.2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	28.106,65	20.745,657	22.197,853	DP2KP
2.3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	429,32	400,72	428,77	DP2KP
3.	**PETERNAKAN**					
3.1	Jumlah Produksi Ternak					
	a. Sapi	Ton	249,38	308,86	318,13	DP2KP
	b. Kambing	Ton	15,95	24,95	25,70	DP2KP
	c. Unggas	Ton	1.228,09	1.973	2.032	DP2KP
	PENUNJANG URUSAN:					
1.	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	100	100	100	Bappeda
2.	**KEUANGAN**					
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKK
2.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19,21%	21	22	BPKK
3.	**KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					
3.1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	88,22	78	79	BKPSDM
4.	**INSPEKTORAT**					
4.1	Presentase tindak lanjut temuan	%	90,25	89,95	90,21	Inspektorat
5.	**SEKRETARIAT DPRK**					
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
5.2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	OPD Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
	KESATUAN BANGSA					
1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					
1.1	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	%	66,7	100	100	Kesbangpol
1.2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	0	73,79	-	Kesbangpol
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					
1.	**KEAGAMAAN**					
1.1	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	Nihil	79,77	81,27	DSI
1.2	Jumlah rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dihasilkan	Rekomendasi	18	26	30	Sek. MPU
	ASPEK DAYA SAING DAERAH :					
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,22	0,50	0,52	Dishub
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1,771,360	1.221.000	1.222.000	Dishub
		Barang	66,333	77.779	79.242	
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/ Barang	2,521,991	1.682.126	1.698.457	Dishub

Sumber : OPD Pemerintah Kota Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

6.3 Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh telah mampu meraih berbagai penghargaan dan prestasi di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Aceh. Selama Tahun 2022-2023, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengukir prestasi ditingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi Aceh sebagaimana dapat dilhat pada Tabel 6.3 di bawah ini :

Tabel 6. 3 Penghargaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022/2023

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Bulan/ Tahun
1	Penghargaan BAZNAZ Award 2022 katagori "Kepala Daerah Pendukung kebangkitan Zakat Terbaik"	Badan Amil Zakat Nasional	2022
2	Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) Ke-VIII Tahun 2022 sebagai Kota Perencanaan dan Pencapaian daerah Tingkat Kota se-Aceh Terbaik I	Pemerintah Aceh	2022
3	Penghargaan Kabupaten layak Anak Tahun 2022 Kategori Nindya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022
4	Penghargaan apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	2022
5	Piala Adipura Tahun 2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	2023
6	Penghargaan Digital Government Award SPBE Summit 2023 Kategori Penguatan kebijakan SPBE	Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	2023
7	Penghargaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terbaik 2022	Pemerintah Aceh	2023
8	Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) Ke-IX Tahun 2023 sebagai Kota Perencanaan Terbaik I Tingkat Kota se-Aceh	Pemerintah Aceh	2023

Sumber : Bagian Prokopim dan Hubungan Masyarakat Setda Kota Banda Aceh, 2023

Selama periode tahun 2022 sampai 2023 Kota Banda Aceh banyak memperoleh penghargaan baik Internasional, Nasional, maupun tingkat Provinsi. Ditingkat Internasional Kota Banda Aceh memperoleh satu penghargaan, ditingkat Nasional memperoleh 5 penghargaan dan ditingkat Propinsi Aceh memperoleh 3 penghargaan.

6.4 Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023

Inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berawal dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya atau cara baru dalam melakukan sesuatu. Untuk daerah, inovasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif dan daya saing suatu daerah. Inovasi ini merupakan kebutuhan mendasar yang memerlukan ide-ide baru dalam pembangunan sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Daerah didorong untuk menciptakan inovasi yang kompetitif di berbagai sektor pembangunan dengan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain keterbatasan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan sumber keuangan daerah juga menjadi pertimbangan yang mendasar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.

1. Nama Inovasi dan Dasar Hukum

Inovasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah **"DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH"** yang merupakan wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perparkiran di Kota Banda Aceh. Untuk mendukung keberhasilan inovasi ini, telah dilakukan penataan pelataran kawasan parkir pada daerah Garis Sempadan Bangunan (GSB) pertokoan dan pemasangan perangkat digital system pembayaran retribusi parkir secara non tunai. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menata area parkir menjadi lebih rapi sehingga mengurangi kemacetan dan kesemrawutan parkir kendaraan di badan jalan. Sampai dengan tahun 2022 telah dibangun dan ditata sebanyak 20 kawasan parkir sedangkan perangkat digital parkir dengan system pembayaran secara non tunai menggunakan uang elektronik telah terpasang pada 3 (tiga) lokasi yang tersebar di Kota Banda Aceh.

Dasar hukum pelaksanaan digitalisasi parkir adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, yang mengamanahkan pembayaran parkir di Kota Banda Aceh dilakukan secara non tunai.

2. Mitra Kerja Inovasi

Mitra kerja inovasi yaitu bekerjasama dengan perbankan issuer kartu uang elektronik seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA serta dengan Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia selaku *cobranding* uang elektronik di Aceh. Dalam pelaksaaan inovasi juga bermitra dengan Bank Indonesia selaku pengembang dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi secara digital menggunakan QRIS. Untuk kebutuhan system yang mendukung impementasi digitalisasi parkir bekerjasma dengan *Payment Gateway* atau penyedia jasa system pembayaran yang berlisensi dari Bank Indonesia.

3. Latar Belakang Inovasi

Kepadatan penduduk menyebabkan volume kendaraan bermotor yang ada di Kota Banda Aceh tiap tahun selalu meningkat, hal ini seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi yang dianggap memudahkan manusia dalam melakukan setiap aktifitasnya. Kendaraan bermotor yang ada di Kota Banda Aceh menyebabkan sering sekali terdapat titik-titik kemacetan, yang disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penyebab kemacetan ialah seringkali adanya tempat-tempat yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir.

Di era digitalisasi ini, semua diarahkan menggunakan teknologi termasuk dalam mengurus perparkiran, selain lebih praktis, efisien, juga transparan. Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan program digitalisasi system pembayaran parkir. Implementasi system pembayaran parkir secara non tunai menggunakan uang elektronik sebagai bentuk pelaksanaan peraturan yang ada di Kota Banda Aceh yang mengatur pembayaran retribusi parkir secara non tunai, dimaksudkan untuk mewujudkan kota Banda Aceh sebagai *smart city*.

Pelaksanaan kebijakan pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan pembayaran non tunai saat ini telat diimplementasikan di tiga area di Kota Banda Aceh, yaitu di Jln. Tp. Nyak Makam, Jln. Prof. Ali Hasyimi, dan Jln. Sri Ratu Safiatuddin.

4. Tujuan Inovasi

Inovasi DIGITALISASI PARKIR ini bertujuan untuk:

1. Agar masyarakat mengikuti perkembangan era digital IT
2. Mencegah Pungli dan kebocoran PAD dari penerimaan retribusi
3. Transparansi dan kemudahan pengawasan penerimaan retribusi
4. Kemudahan pelaporan realisasi penerimaan PAD
5. Pencegahan penyebaran kuman dan virus Covid 19

5. Sasaran Inovasi

Sasaran Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir ini adalah:

1. Memperbaiki sistem perparkiran dan mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir.
2. Mengurangi petugas parkir yang pada giliran dapat mengurangi pengeluaran daerah.

6. Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact

Untuk mengetahui Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact yang diharapkan dari inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir ini, secara rinci dapat diihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 4 Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir di Kota Banda Aceh

Input	1. Mitra Kerja Pelaksananan Inovasi; 2. Aplikasi JAGA PARKIR (Sistem Informasi Jaga Parkir secara Terpadu); 3. Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir
Output	Tersedianya tempat parkir yang nyaman sekaligus mendapat peningkatan manfaat dari retribusi parkir
Outcome	Berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui retribusi parkir
Benefit	- Optimalisasi Penerimaan PAD Kota Banda Aceh - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena pengelolaan dan pembayaran parkir dilakukan secara *smart* dan *modern yang tidak bersentuhan dengan uang kertas/logam* tetapi dilakukan dengan uang elektronik melalui perangkat digital.
Impact	- Terlaksananya program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kota Banda Aceh - Adanya transparansi penerimaan retibusi dalam mencegah Kobocoran PAD

7. Tahapan dan Proses Inovasi

1. Penataan Kawasan Parkir

Penataan pelataran kawasan parkir dibangun pada daerah Garis Sempadan Bangunan (GSB) pertokoan. Dalam rangka mengurangi kemacetan dan kesemrawutan parkir kendaraan di badan jalan. Sampai dengan tahun 2022 telah di bangun sebanyak 20 kawasan parkir, antara lain;

1. Jln. Tp.Nyak Makam sebanyak 3 kawasan
2. Jln. Prof. Ali Hasyimi sebanyak 10 kawasan
3. Jln. Sri Ratu Safiatuddin sebanyak 3 kawasan
4. Jln. Mr. Mohammad Hasan sebanyak 4 kawasan

Penataan kawasan parkir tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah lingkungan dan tertib parkir. Nantinya akan dilakukan pengawasan pelataran parkir yang dilengkapi dengan peralatan elektronik.

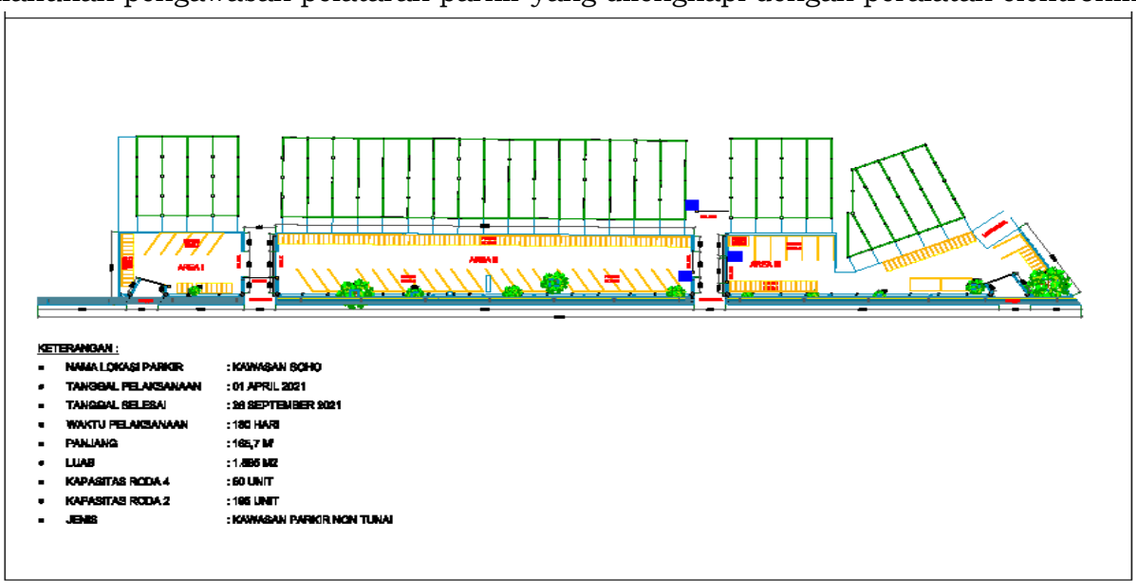

Gambar 6. 1 Salah Satu Layout Kawasan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh

2. Penyediaan Hardware dan Software Perangkat digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir pada Kawasan Parkir Elektronik

Lokasi Kawasan Parkir Elektronik (*Off Street*) akan menggunakan teknologi *Full Manless* dan Non Tunai dengan menggunakan kartu uang elektronik produk perbankan seperti e-money , brizzi, TapCash dan Flazz serta bisa melalui scan barcode QRIS. Terhadap pengguna jasa parkir yang tetap dan terus menerus di lokasi yang sama dapat melakukan pembayaran secara berlangganan/member melalui kartu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

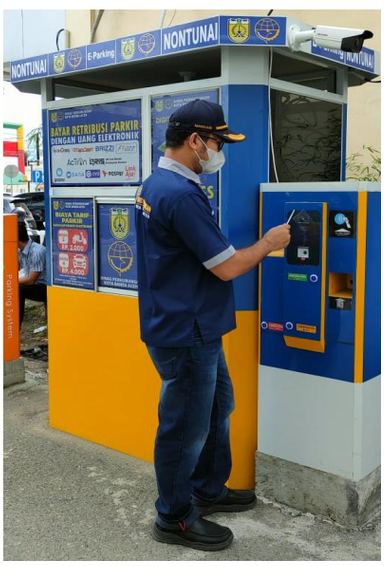

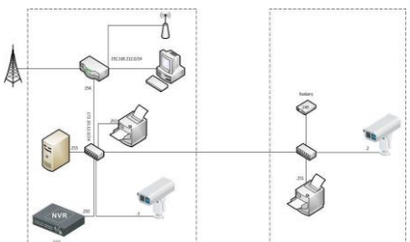

Gambar 6. 2 Perangkat Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir pada Kawasan Parkir Elektronik di Kota Banda Aceh

2.1 Implementasi Sistem Pembayaran Parkir secara Non Tunai Di Kawasan Parkir Elektronik

Pada saat ini digitalisasi sistem pembayaran parkir telah berlaku atau di implementasikan pada kawasan parkir elektronik sebagai berikut;

1. Jln. Sri Ratu Safiatuddin 3 lokasi
2. Jln. T. P. Nyak Makam 1 lokasi
3. Jln. Prof. Ali Hasjimi 1 lokasi

Implementasi dan *Launching* kawasan parkir elektronik dengan system pembayaran non tunai oleh Bapak Pj. Walikota Banda Aceh di Kawasan parkir Jl. TP. Nyak Makam pada tanggal 28 Desember 2022 yang dihadiri oleh Deputi Kepala BI Perwakilan Aceh Bapak T. Amir Hamzah, Pimpinan DPRK Banda Aceh, dan stakeholders terkait.

Gambar 6. 3 Peresmian Kawasan Parkir Elektronik dengan Sistem Pembayaran Parkir secara Non Tunai

Beberapa tahapan metode pembayaran parkir non tunai di kawasan parkir elektronik, antara lain:

1. Pembayaran dilakukan di Dispenser pembayaran pada pintu keluar parkir
2. Dispenser pembayaran terintegrasi dengan Payment Device
3. Pembayaran parkir non tunai dapat menggunakan kartu uang elektronik dan QRIS
4. Akses member bagi pemilik usaha atau penduduk menggunakan Kartu Member

Gambar 6. 4 Kartu Uang Elektronik yang Dapat Digunakan Pada Pembayaran Parkir Non Tunai

2.2 Alur Kerja Sistem Pambayaran Retribusi Di Kawasan Parkir Elektronik

Pada gambar dibawah ini terdapat beberapa tahapan alur kerja sistem pembayaran retribusi di kawasan parkir elektronik yang ada di Kota Banda Aceh, antara lain:

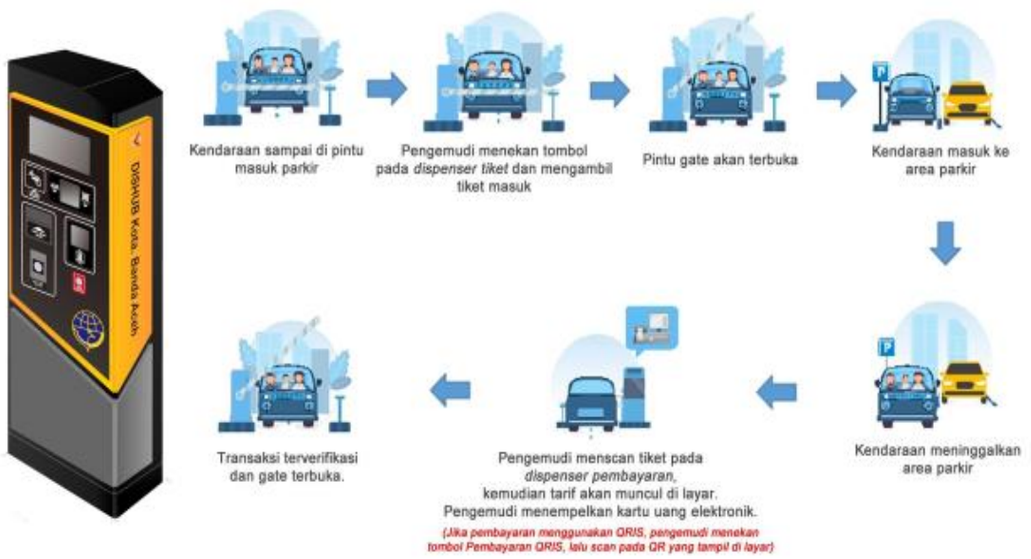

3. Pengembangan Pembayaran Parkir Secara Non Tunai Di Tepi Jalan Umum

Telah dilakukan uji coba dan sosialisasi pembayaran non tunai terhadap 20 orang jukir pada Jln. Diponegoro untuk pembayaran retribusi parkir secara non tunai. Teknis implementasi dilapangan untuk parkir tepi jalan umum, para juru parkir yang sudah terdaftar di Dishub akan dibekali pelatihan pelayanan parkir tepi jalan dan *smartphone* sebagai alat untuk pencatatan data parkir dan penerimaan pembayaran transaksi parkir non tunai dengan scan QR code (QRIS) seperti layanan mobile banking dari perbankan, Link Aja, Ovo, dana, Gopay dan lain-lain dan jug adengan menempelkan kartu uang elektronik dari perbankan seperti Emoney, Brizzi, TapCash dan Flash.

3.1 Metode Pembayaran parkir Non Tunai di Parkir Tepi Jalan

Adapun tahapan yang dilakukan pada metode pembayaran parkir non tunai di parkir tepi jalan antara lain:

1. Pembayaran dilakukan dengan menscan QRIS pada ID CARD dan Tapping Kartu Uang Elektronik pada perangkat Handheld Juru Parkir
2. Notifikasi pembayaran terintegrasi dengan HP Juru Parkir

Gambar 6. 5 Juru Parkir menunjukkan Barcode QRIS pada ID Card Juru Parkir

3.2 Alur Kerja Sistem Parkir Tepi Jalan

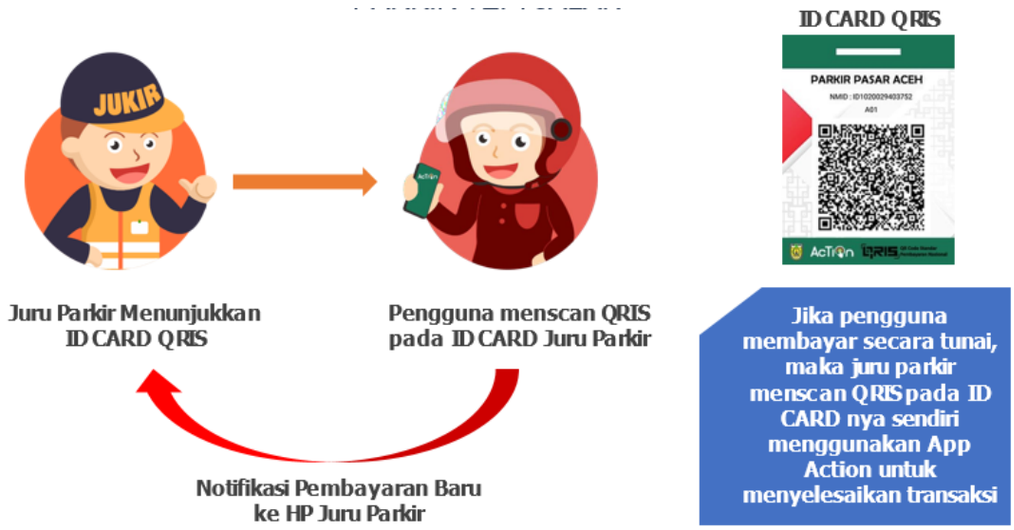

3.3 Alur Kerja Sistem Parkir Tepi Jalan Menggunakan Handheld

3.4 Edukasi dan Penyuluhan kepada Juru Parkir dan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memberikan edukasi serta penyuluhan kepada juru parkir dan masyarakat tentang metode pembayaran parkir non tunai baik yang ada di kawasan parkir elektronik maupun yang parkir di tepi jalan.

Gambar 6. 6 Edukasi dan Penyuluhan Kepada Juru Parkir dan Masyarakat terkait Digitalisasi Sistem Pembayaran Parkir

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Jaga Parkir Secara Terpadu Mencakup *Database* Parkir, Pembayaran Parkir Secara *Online* dan Pelaporan Parkir Liar

Saat ini telah tersedia aplikasi informasi jaga parkir secara terpadu yang mencakup, antara lain;

a. *Databased* yang memuat informasi lokasi parkir, proses administrasi pendaftaran juru parkir, pembuatan surat tata kelola parkir dan tanda pengenal juru parkir.
b. Pengembangan pembayaran parkir *online* dimana nantinya pengguna jasa parkir dapat melakukan *top up* saldo untuk biaya retribusi berlangganan parkir melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat dapat parkir dimana saja tanpa membayar parkir secara tunai kepada juru parkir.
c. Pelaporan parkir liar dimana masyarakat dapat memberikan informasi serta pengaduan langsung terhadap parkir liar dalam wilayah Kota Banda Aceh.

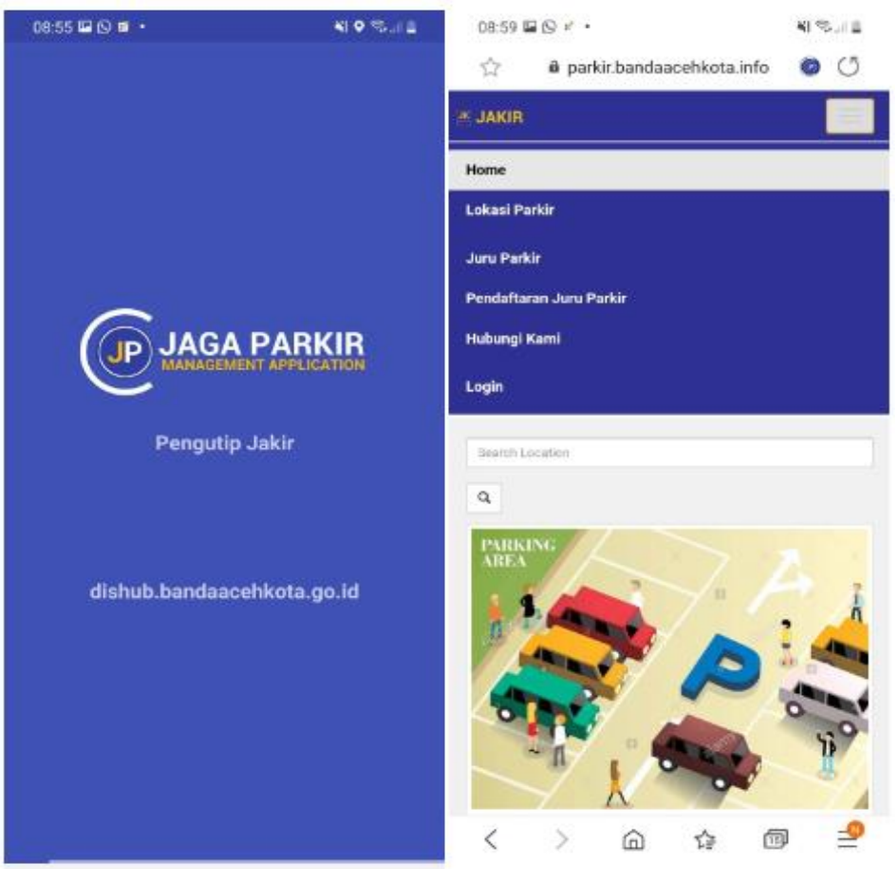

Gambar 6. 7 Tampilan aplikasi jaga Parkir

Selain inovasi yang disampaikan diatas, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melaksanakan beberapa Inovasi sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Daftar Inovasi Kota Banda Aceh

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
1	Aplikasi Ekinerja 4.0	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian	Penerapan
2	Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Retribusi Non Tunai	Inovasi pelayanan publik	Perhubungan	Penerapan
3	Digitalisasi Pengelolaan Parkir Kota Banda Aceh	Inovasi pelayanan publik	Perhubungan	Penerapan
4	Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerapan
5	Aplikasi PPDB Online	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	Penerapan
6	Charming Banda Aceh	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Komunikasi dan informatika,pariwisata	Penerapan
7	Tim Reaksi Cepat Siap Siaga Dinas PUPR Kota Banda Aceh	Inovasi pelayanan publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang,perumahan rakyat dan kawasan permukiman,lingkungan hidup,perhubungan	Penerapan
8	Cafe Barista Disabilitas (Hana Sue Cafe)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan,sosial	Penerapan
9	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kota Banda Aceh	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pertanian, Pangan	Penerapan
10	Pengelolaan Sampah Organik	Inovasi pelayanan publik	Lingkungan Hidup	Penerapan
11	Aplikasi Online Pelaporan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan
12	MPP Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Penanaman Modal	Inisiatif
13	SIPERI (Sistem Informasi Pencatatan Retribusi)	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
14	SIJAKIR	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan
15	Sistem Informasi Data Terpadu (SIDADU) Dinkes Kota Banda Aceh	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kesehatan	Penerapan
16	Sistem Monitoring dan Pelaporan (SIMPEL)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Keuangan	Penerapan
17	Sistem Pembayaran Retribusi Secara Non Tunai Di Terminal L-300 Lueng Bata	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan
18	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inisiatif
19	SIWAHCEH (Sistem Informasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)	Inovasi Pelayanan Publik	Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	Uji Coba
20	Ojek Sputum	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Uji Coba

6.5 Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Kota Banda Aceh

Upaya pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan pemenuhan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan kerja sama ini telah diatur dengan (Permendagri) Nomor 22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Sosialisasi Permendagri Nomor 25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Selama Tahun 2022 Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai perjanjian kerjasama baik dengan pihak luar negeri, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga yang didominasi oleh sektor keuangan, akademisi, LSM, dan komunitas-komunitas. Berikut akan dijelaskan salah satu jenis kerja sama yang dilakukan dengan KLHK dan DEPA-DENMARK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh:

A. Rencana Pengelolaan Sampah Organik Kota Banda Aceh Kerjasama dengan KLHK dan DEPA-Denmark

Gambar 6. 8 Rapat Persiapan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark

Rencana Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark terkait dengan pengelolaan sampah organik yang mencakup berbagai sektor yang antara lainnya:

1. Penanganan Sampah Organik Sektor Perhotelan dan Restoran
2. Penanganan Sampah Organik Sektor Rumah Tangga
3. Penanganan Sampah Organik Sektor Pasar
4. Penanganan Sampah Organik Sektor Sekolah

Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) antara lain sebagai berikut:

No	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tahun	Tujuan
1	Komoditi Hasil Pertanian	Pemkab Aceh Besar	2022	Percepatan pembangunan daerah, kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan pelayanan publik untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
2	Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Perdagangan	Kamar Dagang dan Industri Kota Banda Aceh	2022	Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan sinergitas dengan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya disektor perdagangan dan industri
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Smart City	Pemkab Aceh Barat Daya	2022	Percepatan pembangunan daerah, kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan pelayanan publik untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
4	Kerja Sama Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh	2022	Meningkatkan Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang para pihak

5	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	PT Digital Kreasi Muslim	2022	Meningkatkan pelayanan dan tata Kelola Pendapatan Daerah
6	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Kota Banda Aceh	Institut Pertanian Bogor	2022	Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tercantum didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 tahun pertama. RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergisitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah. Dokumen RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang selanjutnya menjadi acuan resmi bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Tahun 2025. Selain itu, penyusunan RKPD juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, OPD, DPRD, pemangku pembangunan lainnya. Dengan demikian, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan tingkat prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 mendapatkan respon positif pada tahap penganggaran, sehingga kegiatan perencanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis dengan kegiatan perencanaan anggaran. Berikut kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Banda Aceh Tahun 2025 yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam penerapannya adalah:

1. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini, tidak hanya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini, merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap OPD menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum OPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya

6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
7. Pada akhir tahun anggaran 2025 setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini sangat diperlukan. Di samping itu, OPD juga harus mengoptimalkan dan mengefektifkan kinerjanya, sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 mampu mendukung tercapainya Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yaitu "Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan".

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH

AMIRUDDIN

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Jalan Nyak Adam Kamil, No.19 Neusu Jaya, Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 32398, Fax. (0651) 32397, Email. bappeda@bandaaceh.go.id

bappedabna bappeda.sosmed www.bappeda.bandaacehkota.go.id